# RPJMD
## Kota Payakumbuh

TAHUN 2025 - 2029





Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
dan
WALI KOTA PAYAKUMBUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Payakumbuh.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Payakumbuh.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

RPJMD Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memayungi serta memberikan arahan rencana pembangunan jangka menengah bagi pelaku pembangunan yaitu Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

Pasal 3

RPJMD Tahun 2025-2029 bertujuan sebagai pedoman dalam:

a. menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan Daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan selama lima tahun agar mekanisme perencanaan dan pembangunan Daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah;
b. penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
c. penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman kepada RPJPD Tahun 2025-2045.

Pasal 5

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 6

(1) RPJMD Tahun 2025-2029 memuat mengenai:
   a. pendahuluan;
   b. gambaran umum Daerah;
   c. visi, misi dan program prioritas pembangunan Daerah;
   d. program perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
   e. penutup.

(2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1) Wali Kota melalui perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah malakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam rangka efektifitas, perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD Tahun 2025-2029 kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya:
a. bencana alam;
b. goncangan politik;
c. krisis ekonomi;
d. konflik sosial budaya;
e. gangguan keamanan;
f. pemekaran Daerah; atau
g. perubahan kebijakan nasional.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 19 Agustus 2025
WALI KOTA PAYAKUMBUH,

ZULMAETA

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 19 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

RIDA ANANDA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT : (2/49/2025)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah Kota Payakumbuh adalah upaya bersama yang terencana secara sistematis untuk peningkatan kualitas kehidupan dan merealisasikan seluruh potensi secara berkesinambungan. Hakikat pembangunan Daerah adalah mewujudkan tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditegaskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 5 ayat (2), menyatakan dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 65 ayat (1) huruf c menegaskan bahwa

"Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD". Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sesuai dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan daerah melalui Bappeda untuk menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah.

Kemudian dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Payakumbuh menjadi tonggak penting dalam upaya sinkronisasi pembangunan daerah, provinsi, dan nasional, membuktikan komitmen untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan secara terkoordinasi. Selain itu dokumen RPJMD ini juga merupakan bagian integral dari upaya pemenuhan target kinerja pembangunan nasional, provinsi, dan daerah, yang mencerminkan komitmen untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan secara bersinergi.

Berdasarkan hal tersebut di atas serta dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam pasal 70 ayat (2) menyatakan Bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah

tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik. maka Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 perlu ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 71

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

# RPJMD
# KOTA PAYAKUMBUH
# TAHUN 2025-2029

# DAFTAR ISI

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2029


BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG I-1
2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN I-3
3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA I-9
4. MAKSUD DAN TUJUAN I-13
   A. Maksud Penyusunan RPJMD I-13
   B. Tujuan Penyusunan RPJMD I-13
5. SISTEMATIKA PENULISAN I-14

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
   A. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI II-1
      1). Posisi dan Peran Strategis Daerah II-1
      2). Potensi Sumber Daya Alam II-3
         A). Potensi Karst Sumber Air Baku dan Wisata II-3
      3). Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup II-5
         A). Kapasitas Air Baku II-5
      4). Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan II-8
         A). Ketahanan Pangan II-8
         B). Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) II-9
         C). Ketersediaan Pangan Utama II-10
         D). Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan II-11
         E). Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman II-12
         F). Proyeksi Kebutuhan Air Bersih II-12
         G). Penggunaan Energi II-14
         H). Proyeksi Kebutuhan Energi/Listrik II-16
      5). Lingkungan Hidup Berkualitas II-16
         A). Kualitas Lingkungan Hidup II-16
         B). Kawasan Lindung Kota Payakumbuh II-19
         C). Pengawasan Izin Lingkungan II-19
         D). Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi II-20
         E). Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman II-21
         F). Persentase Pengelolaan Sampah II-21
         G). Operasionalisasi TPA/TPS-3R/TPS II-21
         H). Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas II-23

Pengolahan Sampah
I). Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah II-23
J). Limbah B3 II-24
6). Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim II-24
A). Perubahan Iklim II-26
B). Persentase Penurunan Emisi GRK II-26
(1). Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif) II-26
(2). Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan) II-27
C). Kebencanaan II-27
D). Perkiraan Mengenai Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup II-28
7). Demografi II-39
A). Jumlah Penduduk, Penduduk Usia Produktif, Penduduk Usia Tidak Produktif, Penduduk Usia Lanjut dan Angka Ketergantungan II-39
B). Rasio Penduduk II-40
C). Kepadatan Penduduk II-41
D). Struktur dan Karakteristik Penduduk II-42
(1). Struktur Penduduk Berdasarkan Usia II-42
(2). Struktur Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian II-44
(3). Struktur Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan II-44
E). Proyeksi Demografi II-45
B. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT II-47
1). Kesejahteraan Ekonomi II-47
A). PDRB Perkapita II-47
B). Pertumbuhan Ekonomi II-48
C). Indeks gini II-52
D). Tingkat Kemiskinan II-53
E). Pengangguran Terbuka II-54
F). Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja II-55
G). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan II-56
H). Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan II-56
I). Proporsi Kontribusi PDRB Kota Paykumbuh II-57
J). Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau II-58
K). Total Dana Pihak Ketiga/PDRB II-59
L). Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-Rata Tahunan II-59

M). Total Kredit/PDRB II-60
N). Rasio PDRB Jasa Keuangan II-60
O). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) II-61
P). Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Per-Bulan II-62
Q). Produktifitas Total Daerah II-63
2). Kesehatan Untuk Semua II-63
A). Usia Harapan Hidup II-63
B). Angka Kematian Ibu II-64
C). Prevalensi Stunting II-64
D). Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis II-65
E). Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkolosis II-66
F). Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional II-66
G). Indeks Pembangunan Keluarga II-67
3). Pendidikan Berkualitas yang Merata II-67
A). Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional II-68
B). Rata-Rata Lama Sekolah II-68
C). Harapan Lama Sekolah II-69
D). Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi II-69
E). Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi II-70
F). Indeks Pendidikan II-71
G). Perpustakaan II-71
H). Indeks Masyarakat Digital Indonesia II-72
4). Perlindungan Sosial yang Adaptif II-73
A). Cakupan Kepersertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja II-73
B). Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal II-73
5). Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju II-74
A). Indeks Kerukunan Umat Beragama II-74
B). Indeks Pembangunan Kebudayaan II-74
6). Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif II-75
A). Indeks Perlindungan Anak II-75
B). Indeks Pembangunan Keluarga II-76
C). Indeks Ketimpangan Gender II-76
D). Indeks Pembangunan Gender II-77
E). Indeks Pembangunan Pemuda II-77
C. ASPEK DAYA SAING DAERAH II-77

1). Daya Saing Sumber Daya Manusia II-77
A). Angka Ketergantungan II-77
2). Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi II-79
A). Rasio PDRB Industri Pengolahan II-79
B). Rasio PDRB Akomodasi Makan Dan Minum II-79
C). Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif II-80
D). Rasio Kewirausahaan II-80
E). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja II-80
F). Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal II-81
G). Indeks Inovasi Daerah II-81
3). Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru II-82
A). Indeks Ekonomi Hijau II-82
B). Rasio PDRB Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan II-82
4). Transformasi Digital II-83
A). Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi II-83
5). Integrasi Ekonomi Domestik dan Global II-84
A). Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang kebutuhan Pokok II-84
B). Pembentukan Modal Tetap Bruto II-84
C). Ekspor Barang dan Jasa II-85
6). Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi II-86
A). Indeks Infrastruktur Kota II-86
B). Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak II-86
7). Stabilitas Ekonomi Makro II-87
A). Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB II-87
B). Tingkat Inflasi II-87
C). Stabilisasi Harga Beras, Cabe dan Bawang II-88
D). Nilai Transaksi Saham Per-Kapita Per-Rupiah II-89
D. ASPEK PELAYANAN UMUM II-90
1). Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegras dan Adaptif II-90
A). Indeks Reformasi Hukum II-90
B). Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik II-91
C). Indeks Pelayanan Publik II-92
D). Survey Penilaian Integritas (SPI) II-92
2). Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial II-93
A). Persentase Penegakan Perda II-94
B). Indeks Ketentraman dan Ketertiban II-95
C). Angka Kriminalitas II-95

D). Cakupan Linmas II-96
E). Persentase Penurunan Pelanggaran Tantribum II-96
3). Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan II-96
A). Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan II-96
4). Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah II-97
E. EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR II-109
1). Indikator Makro II-110
2). Indikator Kinerja Utama II-111
3). Indikator Kinerja Daerah II-114
F. STANDAR PELAYANAN MINIMAL II-124
G. KERJA SAMA DAERAH II-127
H. RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR OLEH APBN DAN/ATAU PROVINSI DI KABUPATEN/KOTA II-130
I. BUMD YANG MENDUKUNG KINERJA PELAYANAN PEMDA II-131
J. CAPAIAN PROYEKSI SDG'S/TPB (TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN) II-137
2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH II-157
A. REALISASI KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020-2024 II-157
1). Kinerja Pelaksanaan APBD II-157
A). Pendapatan Daerah II-158
(1). Pendapatan Asli Daerah II-161
(2). Pendapatan Transfer II-162
(3). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah II-164
B). Belanja Daerah I-164
C). Pembiayaan Daerah II-166
2). Neraca Daerah II-167
B. PROYEKSI KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026-2030 II-171
1). Proyeksi Pendapatan Daerah II-171
2). Arah Kebijakan Pendapatan Daerah II-175
A). Pendapatan Asli Daerah II-175
B). Pendapatan Transfer II-177
C). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah II-177
3). Proyeksi Belanja Daerah II-180
4). Arah Kebijakan Belanja Daerah II-183
5). Proyeksi Pembiayaan Daerah II-187
6). Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah II-188
7). Proyeksi Belanja Bersifat Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dan *Earmark* II-189
8). Arah Kebijakan Belanja Bersifat Wajib dan Mengikat II-190

serta Prioritas Utama dan *Earmark*

9). Proyeksi Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah II-193

3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS II-194

A. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH II-194

1). Permasalahan Berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-194

2). Permasalahan Berdasarkan Aspek Daya Saing Daerah II-196

3). Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum II-196

A). Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar II-196

(1). Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan II-196

(2). Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan II-197

(3). Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-197

(4). Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman II-198

(5). Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat II-198

(6). Urusan Pemerintah Bidang Sosial II-198

B). Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar II-199

(1). Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja II-199

(2). Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II-199

(3). Urusan Pemerintahan Bidang Pangan II-200

(4). Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan II-200

(5). Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup II-200

(6). Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil II-200

(7). Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa II-201

(8). Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II-201

(9). Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan II-201

(10). Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika II-202

(11). Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah II-202

(12). Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal II-202

(13). Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan II-202

dan Olahraga
(14). Urusan Pemerintahan Bidang Statistik II-202
(15). Urusan Pemerintahan Bidang Persandian II-203
(16). Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan II-203
(17). Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan II-203
(18). Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan II-203
C). Urusan Pemerintahan Pilihan II-204
(1). Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan II-204
(2). Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata II-204
(3). Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian II-204
(4). Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan II-205
(5). Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian II-205
D). Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan II-205
(1). Unsur Sekretariat Daerah II-205
(2). Unsur Sekretariat DPRD II-205
E). Unsur Penunjang Urusan Pemerintah II-206
(1). Unsur Perencanaan II-206
(2). Unsur Keuangan II-206
(3). Unsur Kepegawaian II-206
(4). Unsur Pendidikan dan Pelatihan II-206
(5). Unsur Penelitian dan Pengembangan II-207
F). Unsur Pengawasan II-207
G). Unsur Kewilayahan II-207
H). Unsur Pemerintahan Umum II-207
4). Permasalahan Terkait Kajian Lingkungan II-207
B. ISU STRATEGIS DAERAH II-209
1). Identifikasi Isu Strategis II-209
2). Rumusan Isu Strategis II-238
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN III-1
A. Visi dan Misi RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045 III-2
1). Visi dan Sasaran Visi RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045 III-2
2). Misi RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045 III-2
3). Arah Dan Sasaran Pembangunan RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045 III-3
B. VISI DAN MISI RPJMN TAHUN 2025-2029 III-6
1). Visi Misi RPJMN Tahun 2025-2029 III-6
2). Sasaran Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029 III-7

C. VISI DAN MISI RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029 III-8
1). Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 III-8
2). Sasaran Pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 III-8
D. VISI DAN MISI RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2029 III-11
1). Visi RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 III-11
2). Misi RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 III-15
3). Keselarasan Visi Dan Misi RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 Dengan Visi dan Misi RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045 III-18
4). Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 dengan Visi, Misi RPJMN Tahun 2025-2029, dan Visi, Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 III-20
5). Tujuan dan Sasaran III-22
2 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-32
A. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029 III-32
1). Strategi III-32
2). Arah Kebijakan III-35
B. PROGRAM-PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029 III-51
C. ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TERHADAP FOKUS PRIORITAS RPJMN TAHUN 2025-2029 III-88
1). Penurunan Kemiskinan III-88
2). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia III-89
3). Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan III-91
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH IV-1
A. DAFTAR PROGRAM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 DALAM MENCAPAI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
B. INDIKATOR PROGRAM, TARGET DAN PAGU INDIKATIF PROGRAM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026-2030 IV-2
C. KESELARASAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH IV-65
1). Keselarasan Program Prioritas RPJMN Dengan Program Perangkat Daerah IV-65
2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-74
A. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029 MELALUI IV-74

INDIKATOR MAKRO

B. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR SASARAN VISI IV-75

C. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) IV-75

D. TARGET PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (IKD) IV-77

E. TARGET PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) IV-89

BAB V PENUTUP

1. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD V-1
2. MANAJEMEN RESIKO PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH V-2
3. TATA KELOLA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH V-3

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : META DATA INDIKATOR KINERJA

LAMPIRAN 2 : MANAJEMEN RESIKO PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

LAMPIRAN 3 : POHON KINERJA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

# DAFTAR TABEL

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2029


| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2.1 | Pembagian Wilayah Administratif Kota Payakumbuh | II-2 |
| Tabel 2.2 | Kapasitas Sungai di Kota Payakumbuh | II-5 |
| Tabel 2.3 | Kapasitas Embung di Kota Payakumbuh | II-5 |
| Tabel 2.4 | Luas Cekungan Air Tanah di Kota Payakumbuh | II-7 |
| Tabel 2.5 | Data Ketersediaan Pangan dan Perbandingan Skor PPH Kota Payakumbuh dengan Sumatera Barat | II-10 |
| Tabel 2.6 | Data Keamanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-11 |
| Tabel 2.7 | Standar Kebutuhan Air Berdasarkan Kategori Wilayah | II-13 |
| Tabel 2.8 | Proyeksi Kebutuhan Air Minum Domestik Kota Payakumbuh Tahun 2025-2030 | II-13 |
| Tabel 2.9 | Proyeksi Kebutuhan Air Minum Domestik Kota Payakumbuh Skala Non Domestik Tahun 2025-2030 | II-14 |
| Tabel 2.10 | Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kota Payakumbuh Tahun 2025-2030 | II-14 |
| Tabel 2.11 | Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik Kota Payakumbuh Tahun 2025-2030 | II-16 |
| Tabel 2.12 | Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air Tahun 2024 | II-17 |
| Tabel 2.13 | Jumlah Kawasan Lindung Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-19 |
| Tabel 2.14 | Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan di Kota Payakumbuh Tahun 2020 – 2024 | II-19 |
| Tabel 2.15 | Rumah Tinggal Bersanitasi Layak Kota Payakumbuh Tahun 2022-2024 | II-20 |
| Tabel 2.16 | Rumah Tinggal Akses Sanitasi Aman Kota Payakumbuh Tahun 2022-2024 | II-21 |
| Tabel 2.17 | Volume dan Produksi Sampah Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-21 |
| Tabel 2.18 | Jumlah TPS 3R Per-kecamatan Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-22 |
| Tabel 2.19 | Rasio Daya Tampung TPS Per satuan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-22 |
| Tabel 2.20 | Emisi Gas Rumah Kaca Kota Payakumbuh (Satuan Gg CO2) Tahun 2020-2024 | II-26 |
| Tabel 2.21 | Jenis dan Tingkat Risiko Bencana di Kota Payakumbuh | II-28 |
| Tabel 2.22 | Potensi Resiko Multi Bahaya di Kota Payakumbuh | II-29 |
| Tabel 2.23 | Indeks Risiko Bencana | II-29 |
| Tabel 2.24 | Matriks Analisis Penentuan Prioritas Penanganan Risiko Bencana | II-31 |
| Tabel 2.25 | Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020-2024 | II-41 |
| Tabel 2.26 | Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Usia Tahun | II-42 |

| | | |
|---|---|---|
| | 2020-2024 | |
| Tabel 2.27 | Perhitungan Rasio Beban Tanggungan Penduduk Tahun 2020– 2024 | II-43 |
| Tabel 2.28 | Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2020-2024 | II-44 |
| Tabel 2.29 | Tingkat Partisipasi Pendidikan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-45 |
| Tabel 2.30 | Parameter Proyeksi Penduduk 2025-2030 | II-45 |
| Tabel 2.31 | Proyeksi Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2025-2030 | II-45 |
| Tabel 2.32 | Proyeksi Penduduk Kota Payakumbuh Menurut Kelompok Umur Tahun 2025-2030 | II-46 |
| Tabel 2.33 | Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2025-2030 | II-46 |
| Tabel 2.34 | Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-48 |
| Tabel 2.35 | Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB ADHB Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-50 |
| Tabel 2.36 | Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB ADHK (2010) Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-51 |
| Tabel 2.37 | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-55 |
| Tabel 2.38 | Total Kredit per PDRB Kota Payakumbuh tahun 2020-2024 | II-60 |
| Tabel 2.39 | Rasio PDRB Jasa Keuangan Kota Payakumbuh tahun 2020-2024 | II-61 |
| Tabel 2.40 | Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan di Kota Payakumbuh tahun 2020 s.d 2024 | II-62 |
| Tabel 2.41 | Produktifitas Total Daerah di Kota Payakumbuh tahun 2020 s.d 2024 | II-63 |
| Tabel 2.42 | Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-66 |
| Tabel 2.43 | Klasifikasi Tingkat Pendidikan | II-70 |
| Tabel 2.44 | Perkembangan Perpustakaan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 - 2023 | II-72 |
| Tabel 2.45 | Apresiasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kota Payakumbuh Tahun 2020 – 2023 | II-75 |
| Tabel 2.46 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-76 |
| Tabel 2.47 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-77 |
| Tabel 2.48 | Rasio PDRB Industri Pengolahan Tahun 2020-2024 | II-79 |
| Tabel 2.49 | Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Tahun 2020-2024 | II-79 |
| Tabel 2.50 | Perkembangan Data Ketenagakerjaan Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-80 |
| Tabel 2.51 | Indeks Inovasi Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-82 |
| Tabel 2.52 | Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun | II-82 |

| | | |
|---|---|---|
| | 2020-2024 | |
| Tabel 2.53 | Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-84 |
| Tabel 2.54 | Rasio Rumah Layak Huni terhadap Jumlah Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-86 |
| Tabel 2.55 | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-87 |
| Tabel 2.56 | Perbandingan Tingkat Inflasi Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 | II-88 |
| Tabel 2.57 | Transaksi Saham per Kapita per (Juta Rupiah) | II-89 |
| Tabel 2.58 | Indeks Reformasi Hukum Kota Payakumbuh Tahun 2022-2024 | II-91 |
| Tabel 2.59 | Indeks Pelayanan Publik Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-92 |
| Tabel 2.60 | Tingkat Pelanggaran Perda Pekat Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-94 |
| Tabel 2.61 | Tindak Kriminal Pelanggaran Perda di Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-95 |
| Tabel 2.62 | Angka Kriminalitas di Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-95 |
| Tabel 2.63 | Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-96 |
| Tabel 2.64 | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-96 |
| Tabel 2.65 | Indikator Kinerja Kunci | II-98 |
| Tabel 2.66 | Skala Nilai Peringkat Kinerja | II-109 |
| Tabel 2.67 | Indikator Makro Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-111 |
| Tabel 2.68 | Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-112 |
| Tabel 2.69 | Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-114 |
| Tabel 2.70 | Evaluasi Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020-2024 | II-124 |
| Tabel 2.71 | Bentuk Kerjasama Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Pemerintah Lain Tahun 2021-2024 | II-128 |
| Tabel 2.72 | Daftar Kerjasama dengan Pihak Ketiga Kota Payakumbuh tahun 2021 s.d 2025 | II-128 |
| Tabel 2.73 | Usulan Pembangunan Infrastruktur | II-131 |
| Tabel 2.74 | Sumber Air Baku PAMTIGO Kota Payakumbuh | II-131 |
| Tabel 2.75 | Data Perpipaan yang Terpasang di Kota Payakumbuh | II-133 |
| Tabel 2.76 | Data Jumlah Pelanggan, Cakupan pelanggan dan Tingkat Kehilangan Air Pamtigo Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-134 |
| Tabel 2.77 | Data Keuangan Pamtigo Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-134 |
| Tabel 2.78 | Penilaian Kinerja Menurut Permendagri No. 47 Tahun 1999 | II-134 |
| Tabel 2.79 | Penilaian Kinerja Menurut Dinas PUPR Kota Payakumbuh | II-135 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2.80 | Perbandingan Realisasi dengan Target dan Rencana Bisnis Tahun 2020-2025 | II-136 |
| Tabel 2.81 | Capaian Tahun 2024 dan Proyeksi SDG'S/TPB Kota Payakumbuh Tahun 2025 | II-137 |
| Tabel 2.82 | Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-157 |
| Tabel 2.83 | Realisasi APBD Tahun 2020-2024 | II-160 |
| Tabel 2.84 | Tingkat Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Payakumbh Tahun 2019-2024 | II-161 |
| Tabel 2.85 | Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-161 |
| Tabel 2.86 | Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020-2024 | II-162 |
| Tabel 2.87 | Perkembangan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2020-2024 | II-162 |
| Tabel 2.88 | Perkembangan Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun 2020-2024 | II-163 |
| Tabel 2.89 | Perkembangan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020-2024 | II-164 |
| Tabel 2.90 | Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020-2024 | II-165 |
| Tabel 2.91 | Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2024 | II-166 |
| Tabel 2.92 | Perkembangan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2024 | II-167 |
| Tabel 2.93 | Neraca Daerah Tahun 2020-2024 | II-170 |
| Tabel 2.94 | Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030 | II-173 |
| Tabel 2.95 | Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2026-2030 | II-182 |
| Tabel 2.96 | Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2025-2030 | II-187 |
| Tabel 2.97 | Belanja *Mandatory* Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025 | II-190 |
| Tabel 2.98 | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh | II-193 |
| Tabel 2.99 | Isu Strategis Daerah | II-210 |
| Tabel 2.100 | Isu Pembangunan Global, Nasional dan Daerah | II-238 |
| Tabel 3.1 | Sasaran Visi RPJPD Tahun 2025-2045 Tahap I | III-2 |
| Tabel 3.2 | Misi RPJPD Tahun 2025-2045 Tahap I | III-2 |
| Tabel 3.3 | Arah dan Sasaran Pokok Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 Tahap I | III-3 |
| Tabel 3.4 | Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 | III-8 |
| Tabel 3.5 | Sasaran Visi RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 | III-14 |
| Tabel 3.6 | Keterkaitan Visi dengan Misi RPJMD Kota Payakmbuh Tahun 2025-2029 | III-17 |
| Tabel 3.7 | Rumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD | III-25 |
| Tabel 3.8 | Strategi Pentahapan Pembangunan RPJMD | III-32 |
| Tabel 3.9 | Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 | III-33 |
| Tabel 3.10 | Strategi, Arah Kebijakan dan Pentahapan RPJMD Tahun | III-36 |

| | | |
|---|---|---|
| | 2025-2029 | |
| Tabel 3.11 | Rumusan Program Prioritas RPJMD | III-52 |
| Tabel 3.12 | Program Prioritas Pembangunan Daerah Disertai Pagu Indikatif sesuai Tujuan dan Sasaran | III-67 |
| Tabel 4.1 | Program Perangkat Daerah Tahun 2026-2030 | IV-3 |
| Tabel 4.2 | Keselarasan Program Prioritas RPJMN dengan Program kerja RPJMD | IV-66 |
| Tabel 4.3 | Indikator Kinerja Makro Tahun 2024-2030 | IV-74 |
| Tabel 4.4 | Indikator Sasaran Visi tahun 2024-2030 | IV-75 |
| Tabel 4.5 | Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2030 | IV-76 |
| Tabel 4.6 | Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024-2030 | IV-78 |
| Tabel 4.7 | Indikator Kinerja Kunci Tahun 2024-2030 | IV-89 |

# DAFTAR GAMBAR

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2029


| | | |
|---|---|---|
| Gambar 1.1 | Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya | I-10 |
| Gambar 2.1 | Peta Administrasi Kota Payakumbuh | II-1 |
| Gambar 2.2 | Titik Lokasi Survei Kawasan Karst Provinsi Sumatera Barat | II-3 |
| Gambar 2.3 | Kompleks Gua Ngalau Indah | II-4 |
| Gambar 2.4 | Singkapan Batu Gamping Kaki Bukit Simarajo | II-4 |
| Gambar 2.5 | Peta Cekungan Air Tanah Kota Payakumbuh | II-7 |
| Gambar 2.6 | Peta Potensi Air Tanah di Kota Payakumbuh | II-8 |
| Gambar 2.7 | TPA Regional Payakumbuh | II-22 |
| Gambar 2.8 | Peta Potensi Kerentanan terhadap Perubahan Iklim | II-27 |
| Gambar 2.9 | Peta Wilayah Rawan Bencana Kota Payakumbuh | II-28 |
| Gambar 2.10 | Peta Resiko Bencana Multi Bahaya | II-30 |
| Gambar 2.11 | Peta Resiko Bencana Banjir | II-32 |
| Gambar 2.12 | Peta Resiko Bencana Banjir Bandang | II-33 |
| Gambar 2.13 | Peta Resiko Bencana Cuaca Ekstrem | II-34 |
| Gambar 2.14 | Peta Resiko Bencana Gempa Bumi | II-35 |
| Gambar 2.15 | Peta Resiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan | II-36 |
| Gambar 2.16 | Peta Risiko Bencana Kekeringan | II-37 |
| Gambar 2.17 | Peta Risiko Bencana Tanah Longsor | II-38 |
| Gambar 2.18 | Peta Jaringan Pamtigo | II-133 |
| Gambar 3.1 | Visi dan Misi RPJMN tahun 2025-2029 | III-7 |
| Gambar 3.2 | Sasaran Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029 | III-7 |
| Gambar 3.3 | Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 | III-8 |

# DAFTAR DIAGRAM

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2029


| | | |
|---|---|---|
| Diagram 2.1 | Perkembangan Kapasitas Air Baku Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-6 |
| Diagram 2.2 | Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-9 |
| Diagram 2.3 | Perkembangan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) Kota Payakumbuh 2020-2024 | II-9 |
| Diagram 2.4 | Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-11 |
| Diagram 2.5 | Perkembangan Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Aman Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-12 |
| Diagram 2.6 | Perkembangan Rasio Elektrifikasi dan Konsumsi Listrik Perkapita Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-15 |
| Diagram 2.7 | Perkembangan Produksi Listrik dan Kapasitas Listrik Terjual di Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-15 |
| Diagram 2.8 | Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-17 |
| Diagram 2.9 | Perkembangan Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kota Tahun 2020-2024 | II-18 |
| Diagram 2.10 | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2020-2024 | II-23 |
| Diagram 2.11 | Usaha dan atau Kegiatan Di Kota Payakumbuh yang Telah Memiliki Rincian Teknis | II-24 |
| Diagram 2.12 | Jumlah dan Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2019-2030 | II-39 |
| Diagram 2.13 | Perkembangan dan Proyeksi Penduduk Produktif, Penduduk Tidak Produktif, Penduduk Usia Lanjut dan Angka Ketergantungan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2019-2030 | II-40 |
| Diagram 2.14 | Perkembangan Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2010-2024 | II-40 |
| Diagram 2.15 | Perkembangan Kepadatan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2010-2024 | II-41 |
| Diagram 2.16 | Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-43 |
| Diagram 2.17 | Jumlah Kelompok Penduduk Usia Produktif dan Non Produktif Kota Payakumbuh Tahun 2020 – 2024 | II-44 |
| Diagram 2.18 | Perkembangan PDRB Per-kapita ADHB dan ADHK Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 (juta rupiah) | II-48 |
| Diagram 2.19 | Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Payakumbuh dibandingkan dengan Kota Bukittinggi, Solok, Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 | II-49 |
| Diagram 2.20 | Perbandingan Indeks Gini Kota Payakumbuh dengan Kota Bukittinggi, Kota Solok, Padang Panjang, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 | II-52 |
| Diagram 2.21 | Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Payakumbuh, | II-53 |

| | | |
|---|---|---|
| | Kota Bukittinggi, Solok, Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dan Nasional Tahun 2020-2024 | |
| Diagram 2.22 | Perbandingan Garis Kemiskinan Kota Payakumbuh, Bukittinggi, Solok dan Padang Panjang Tahun 2020-2024 | II-54 |
| Diagram 2.23 | Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Payakumbuh, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 | II-55 |
| Diagram 2.24 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-56 |
| Diagram 2.25 | Tingkat Produktifitas Angkatan Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 (juta/ kapita) | II-57 |
| Diagram 2.26 | Proporsi Kontribusi PDRB Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-57 |
| Diagram 2.27 | Perkembangan RT yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-58 |
| Diagram 2.28 | Perkembangan Total Dana Pihak Ketiga Dibandingkan dengan PDRB Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-59 |
| Diagram 2.29 | Perkembangan Nilai Transaksi Saham Tahunan Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-60 |
| Diagram 2.30 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-62 |
| Diagram 2.31 | Usia Harapan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-64 |
| Diagram 2.32 | Angka Kematian Ibu Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-64 |
| Diagram 2.33 | Prevalensi Stunting Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-65 |
| Diagram 2.34 | Kasus Tuberkulosis di Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-65 |
| Diagram 2.35 | Angka Penyembuhan Kasus Tuberkulosis di Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-66 |
| Diagram 2.36 | Indeks Pembangunan Keluarga di Kota Payakumbuh Tahun 2021-2023 | II-67 |
| Diagram 2.37 | Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-68 |
| Diagram 2.38 | Harapan Lama Sekolah di Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-69 |
| Diagram 2.39 | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas dengan Kualifikasi Pendidikan Tinggi di Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-70 |
| Diagram 2.40 | Perkembangan Indeks Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-71 |
| Diagram 2.41 | Angka Ketergantungan Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-78 |
| Diagram 2.42 | Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-85 |
| Diagram 2.43 | Persentase Ekspor Barang dan Jasa Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-85 |
| Diagram 2.44 | Perbandingan Angka Inflasi | II-88 |

| | | |
|---|---|---|
| Diagram 2.45 | Perkembangan Stabiliasi Harga Tiga Bahan Pokok Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-89 |
| Diagram 2.46 | Capaian SPBE Kota Payakumbuh Tahun 2018-2024 | II-92 |
| Diagram 2.47 | Capaian SPI Kota Payakumbuh Tahun 2021-2024 | II-93 |
| Diagram 2.48 | Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 | II-158 |
| Diagram 3.1 | Keterkaitan Visi RPJPD dengan Visi RPJMD | III-18 |
| Diagram 3.2 | Keterkaitan Misi RPJPD dengan Misi RPJMD | III-19 |
| Diagram 3.3 | Keterkaitan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Barat dengan RPJMD Kota Payakumbuh | III-21 |
| Diagram 3.4 | Keterkaitan Misi RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Barat dengan RPJMD Kota Payakumbuh | III-22 |

# DAFTAR ISTILAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2029

| | |
|---|---|
| ABS SBK | Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah |
| ADHB | Atas Dasar Harga Berlaku |
| ADHK | Atas Dasar Harga Konstan |
| AKI | Angka Kematian Ibu |
| AKIP | Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |
| APE | Anugerah Parahita Ekapraya |
| APIP | Aparat Pengawas Internal Pemerintah |
| APK | Angka Partisipasi Kasar |
| APM | Angka Partisipasi Murni |
| ARG | Anggaran Renponsif Gender |
| ASFR | *Age Specific Fertility Rate* |
| ASI | Air Susu Ibu |
| Bappeda | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| BKPSDM | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| BKD | Badan Keuangan Daerah |
| BLUD | Badan Layanan Umum Daerah |
| BPK | Badan Pemeriksa Keuangan |
| BT | Bujur Timur |
| BUMN | Badan Usaha Milik Negara |
| CAT | Cekungan Air Tanah |
| CWIS | *Citywide Inclusive Sanitation* |
| DLH | Dinas Lingkungan Hidup |
| DM | Diabetes Melitus |
| Dinkes | Dinas Kesehatan |
| Dinsos | Dinas Sosial |
| Disdik | Dinas Pendidikan |
| DisdukCapil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Dishub | Dinas Perhubungan |
| Diskominfo | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Diskop UKM | Dinas Koperasi, dan UKM |
| Disnakerperin | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| Disparpora | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| Distan | Dinas Pertanian |
| Distapang | Dinas Ketahanan Pangan |
| DP3AP2KB | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| DPMPTSP | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| DPK | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |

| | |
|---|---|
| DPKP | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman |
| DPUPR | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| DTKS | Data Terpadu Kesejahteraan Sosial |
| GRK | Gas Rumah Kaca |
| HIV | *Human Immunodeficiency Virus* |
| HLS | Harapan Lama Sekolah |
| IDSD | Indeks Daya Saing Daerah |
| IKD | Indikator Kinerja Daerah |
| IKG | Indeks Ketimpangan Gender |
| IKK | Indikator Kinerja Kunci |
| IKM | Indeks Kepuasan Masyarakat |
| IKP | Indeks Ketahanan Pangan |
| IKU | Indikator Kinerja Utama |
| IoT | *Internet of Things* |
| IPKA | Indeks Perlindungan Khusus Anak |
| IPKD | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah |
| IPKI | Izin Perluasan Kawasan Industri |
| IPUI | Izin Perluasan Usaha Industri |
| IUI | Izin Usaha Industri |
| IUKI | Izin Usaha Kawasan Industri |
| IPM | Indeks Pembangunan Manusia |
| IPS | Indeks Pembangunan Statistik |
| IRB | Indeks Reformasi Birokrasi |
| IUP | Indikator Utama Pembangunan |
| JKN | Jaminan Kesehatan Nasional |
| JUT | Jalan Usaha Tani |
| KEK | Kekurangan Energi Kronis |
| KesbangPol | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Kepmendagri | Keputusan Menteri Dalam Negeri |
| KIA | Kesehatan Ibu dan Anak |
| KKBPK | Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga |
| KLA | Kota Layak Anak |
| KRP | Kebijakan, Rencana dan/atau Program |
| KSP | Koperasi Simpan Pinjam |
| KTP | Kartu Tanda Penduduk |
| KUA | Kebijakan Umum APBD |
| Limbah B3 | Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun |
| LP2B | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan |
| LPM | Lembaga Pemberdayaan Masyarakat |
| LPPD | Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |
| LS | Lintang Selatan |
| mCPR | *Modern Contraceptive Prevalence Rate* |
| mdpl | meter di atas permukaan laut |

| | |
|---|---|
| Mendagri | Menteri Dalam Negeri |
| MMS | *Multiple Micronutrient Supplementation* |
| MPASI | Makanan Pendamping Air Susu Ibu |
| MTN | Manajemen Talenta Nasional |
| MUKP | Median Usia Kawin Pertama |
| NKV | Nomor Kontrol Veteriner |
| ODGJ | Orang Dengan Gangguan Jiwa |
| OSS-RBA | *Online Single Submission Risk Base Approach* |
| PAD | Pendapatan Asli Daerah |
| PATBM | Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat |
| PAUD | Pendidikan Anak Usia Dini |
| PBG | Persetujuan Bangunan Gedung |
| PD | Perangkat Daerah |
| PDRB | Produk Domestik Regional Bruto |
| Permendagri | Peraturan Menteri Dalam Negeri |
| Perumda | Perusahaan Umum Daerah |
| PKK | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga |
| PKN | Pusat Kegiatan Nasional |
| PKW | Pusat Kegiatan Wilayah |
| PPA | Prioritas dan Plafon Anggaran |
| PPKS | Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial |
| PPLH | Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup |
| PSKS | Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial |
| PSU | Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum |
| PUSPAGA | Pusat Pembelajaran Keluarga |
| PUULH | Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| RAD PG | Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi |
| RAD PUG | Rencana Aksi Daerah Pengarus Utamaan Gender |
| RDTR | Rencana Detail Tata Ruang |
| RIPIN | Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional |
| RIPJPID | Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah |
| RJIT | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier |
| RPIK | Rencana Pembangunan Industri Kota |
| RPJMD | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah |
| RPJMN | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional |
| RPJPD | Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah |
| RT | Rukun Tetangga |
| RTH | Ruang Terbuka Hijau |
| RTLH | Rumah Tinggal Layak Huni |
| RTRW | Rencana Tata Ruang Wilayah |
| RW | Rukun Warga |
| SatPol PP & PK | Satpol PP dan Pemadam Kebakaran |
| SDA | Sumber Daya Alam |
| SDG | Sumber Daya Genetik |

| | |
|---|---|
| SDM | Sumber Daya Manusia |
| Setdako | Sekretariat Daerah Kota |
| Setwan | Sekretariat Dewan |
| SIINas | Sistem Informasi Industri Nasional |
| SILPA | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran |
| SPAM | Sistem Penyediaan Air Minum |
| SPBE | Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik |
| SPI | Survey Penilaian Integritas |
| SPIP | Sistem Pengendalian Internal Pemerintah |
| Tbc | Tuberkulosis |
| TPPO | Tindak Pidana Perdagangan Orang |
| TTD | Tablet Tambah Darah |
| UKM | Usaha Kecil Menengah |
| UMKM | Usaha Mikro, Kecil dan Menengah |
| USP | Unit Simpan Pinjam |
| UTTP | Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan |
| WMK | Wirausaha Merdeka |
| WTP | *Water Treatment Plan* |

# BAB I
# PENDAHULUAN

# 1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah disusun dalam suatu dokumen dengan jangka waktu berkala yaitu: (a) jangka waktu 20 tahun yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (b) jangka waktu 5 tahun yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan (c) jangka waktu tahunan yang dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh pada tanggal 20 Februari 2025 menandakan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 harus telah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan, dimana dokumen ini berisikan penjabaran dari visi, dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh dengan mempertimbangkan isu strategis dan permasalahan aktual di Kota Payakumbuh, namun juga harus tetap selaras dengan kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat.

Selain itu penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai pedoman pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun ke depan melalui penentuan prioritas, sasaran, dan program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat struktur ekonomi daerah.

Oleh karenanya dapat dirangkum faktor yang melatar belakangi penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 antara lain:

a. **Pergantian Kepala Daerah**;
   Pelantikan **Dr. dr. Zulmaeta, SP. OG., KFM** sebagai Wali Kota dan **Elzadaswarman, SKM., MPPM** sebagai Wakil Wali Kota pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 65 huruf c kepala daerah menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD, dan pasal 142 point 4 Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Dalam pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

**b. Penyelarasan terhadap Kebijakan Nasional;**

Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 yang juga telah menyusun RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran dari visi dan misi serta janji-janji politik beliau saat kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dokumen ini harus dipedomani dan selaras dalam penyusunan RPJMD yang bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan nasional, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan.

Selain pendekatan tersebut, dalam perencanaan pembangunan juga diterapkan pendekatan imperatif, di mana target capaian pembangunan sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sehingga menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengadopsi dan mengimplementasikan target tersebut secara konsisten dalam RPJMD.

**c. Penyesuaian Rencana Pembangunan Daerah terhadap Perkembangan Situasi Sosial, Ekonomi, dan Teknologi;**

Saat ini, situasi global yang dinamis baik sosial, ekonomi dan teknologi sangat mempengaruhi situasi regional, nasional bahkan situasi di Kota Payakumbuh sehingga perlunya penyesuaian cara pandang dalam menyikapi situasi yang dinamis ini. Langkah ini perlu dilakukan dalam perencanaan untuk menentukan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Payakumbuh dalam 5 tahun masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029.

**d. Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah dan Kualitas Layanan Publik;**

Semakin besarnya ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan melayani, menyebabkan birokrasi harus menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi dan informasi dalam memberikan layanan prima kepada masyarakat. Salah satu tujuan utama RPJMD adalah meningkatkan kualitas layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan layanan sosial. Penyusunan RPJMD diharapkan dapat menjawab berbagai masalah yang ada, seperti ketimpangan pembangunan antar wilayah, kemiskinan, pengangguran, serta kesenjangan sosial yang masih terjadi di berbagai daerah. RPJMD memuat sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas dengan indikator kinerja yang terukur sehingga dapat menjadi acuan dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam masa lima tahun ke depan.

**e. Partisipasi Masyarakat;**

Dalam pembangunan daerah, masyarakat bukan hanya sebatas obyek pembangunan akan tetapi juga sebagai subyek pembangunan yang berperan besar dalam mewujudkan kemajuan di suatu daerah. Proses penyusunan RPJMD diharapkan melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan

dan harapan masyarakat. Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD disusun dengan menggunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan, meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RPJMD menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang tercermin dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RPJMD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dimaksudkan bahwa RPJMD disusun dengan memperhatikan harapan masyarakat Kota Payakumbuh, mengarah pada percepatan pembangunan daerah dan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat. Selain itu DPRD selaku perwakilan masyarakat yang juga menjadi mitra Pemerintah Daerah secara politis melakukan pembahasan RPJMD ini dengan pemerintah Kota Payakumbuh.

f. **Kondisi Keuangan Daerah**;
Seiring dengan pertumbuhan penduduk maka kebutuhan anggaran untuk melaksanakan fungsi pemerintahan sebagai pelayan publik secara prima semakin meningkat. Untuk itu perlu disusun strategi pembiayaan pembangunan yang dapat seoptimal mungkin mengakses sumber-sumber pembiayaan selain dari dana transfer dari Pemerintah Pusat. Ketersediaan anggaran menjadi faktor penting dalam merencanakan pembangunan daerah. RPJMD harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah yang mungkin mengalami perubahan, baik dari sisi pendapatan daerah, dana alokasi pusat, maupun sumber pendanaan lainnya.

Secara keseluruhan, RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan perwujudan komitmen lima tahun dari pemerintah Kota Payakumbuh untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama dari 4 tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang termuat dalam dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 20025-2045.

## 2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang digunakan untuk penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
25. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
26. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
27. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Jangka

Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
29. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri kesehatan Nomor 34 tahun 2005 Nomor: 1138/Menkes/PB/VIII/2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
39. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
40. Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 533);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
42. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45) ;
43. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
44. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 20025-2045 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 68);

Disamping semua dasar hukum yang disebutkan di atas, tindak lanjut dari kebijakan pilkada serentak dan penyamaan periodesasi dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

## 3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 berpedoman pada Rencana RPJPD Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Payakumbuh 2010-2030, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 serta dokumen perencanaan lainnya.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berdasarkan kondisi geografis, demografis dan potensi daerah dengan mempedomani Tema Kewilayahan Pembangunan Sumatera Barat di dalam RPJMN yaitu **"Mandala pengembangan agrikultur bernilai tinggi, ekonomi hijau, dan pariwisata kelas dunia, yang bersendi kearifan budaya lokal"** maka Kota Payakumbuh juga menjadi bagian dalam kunci kebijakan kewilayahan Sumatera Barat Jangka Panjang yaitu kawasan strategis agrikultur, kawasan perkotaan sebagai *growth pole* dan pusat pengembangan industri berbasis keunggulan wilayah serta Kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.

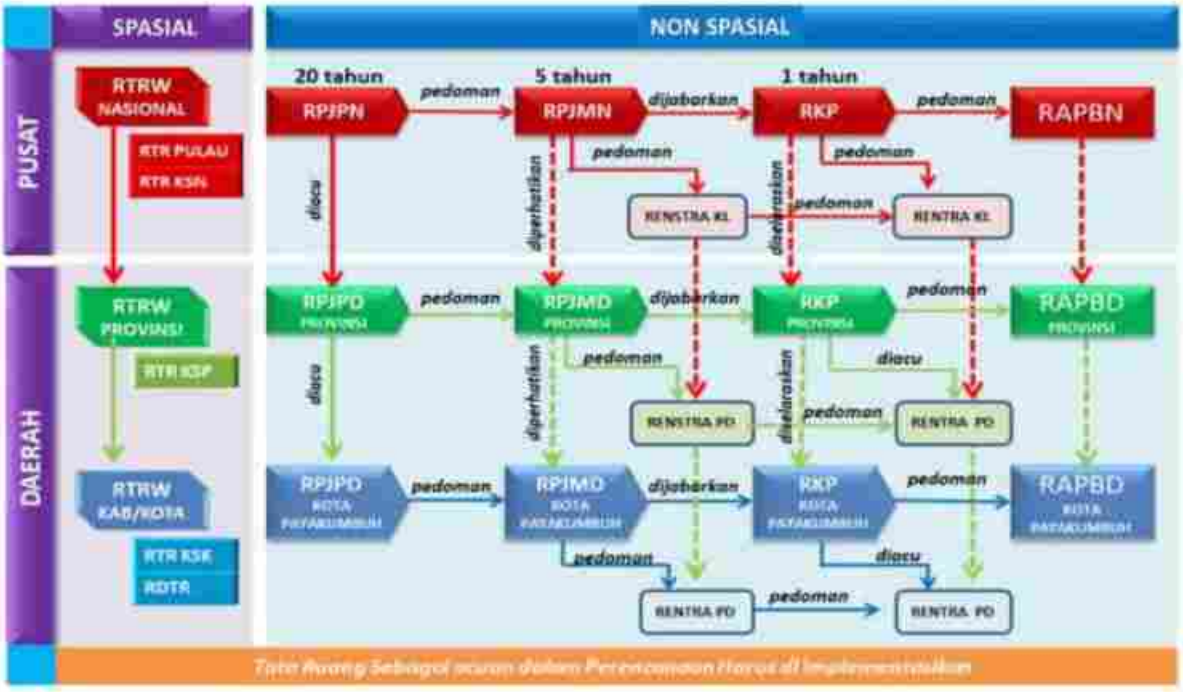
Dalam kaitan hubungan fungsional dengan dokumen perencanaan lain, selain memperhatikan RTRW Kota Payakumbuh, penyusunan dokumen ini juga memperhatikan dokumen RPJMD dan RTRW Kabupaten tetangga. Keterkaitan hubungan fungsional ini terutama pada program-program pembangunan sistem jaringan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan sinergitas perencanaan untuk pencapaian prioritas pembangunan kewilayahan maka diharapkan pembangunan terutama pada kawasan perbatasan dan sekitarnya akan dapat diintegrasikan.

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen induk yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) bagi Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan tahapan yang melibatkan berbagai stakeholders. Dokumen perencanaan strategis sektoral ataupun spasial berupa Rencana Induk, Peta Jalan, Rencana Aksi pada Perangkat daerah baik jangka panjang ataupun jangka menengah menjadi bagian penting dan terkandung di dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029. Dokumen itu antara lain RPKD, RIPJPID, RAD PG, RAD PUG, RTRW, RDTR, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan, Rencana Induk Kemajuan Kepemudaan. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum dan lain-lain.

Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 nantinya akan menjadi acuan dalam rencana pembangunan tahunan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rencana Kerja (RENJA) serta

prioritas dan plafon anggaran (PPA) setiap tahunnya. Dengan demikian diharapkan sasaran dan tujuan pembangunan di dalam RPJMD ini setiap tahun dapat dicapai secara bertahap, sehingga proses pembangunan dapat terwujud dalam suatu sistem yang terencana dan berkelanjutan. Hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya terlihat pada Gambar I-1

**Gambar I. 1** Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




**Sumber:** Bappeda Kota Payakumbuh, 2025

Dalam pelaksanaan pembangunan yang responsif gender Pemerintah daerah beserta seluruh jajaran *Focal Point* Pengarusutamaan Gender (PUG) juga menyusun kebijakan, program dan kegiatan responsif gender yang dituangkan di dalam RPJMD ini, selanjutnya digabungkan dalam Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya, sebagai bentuk responsif terhadap isu sentral permasalahan kesenjangan gender.

RPJMD Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

a. RPJMN Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 melalui penyelarasan pencapaian Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan serta Program Pembangunan Daerah dengan Visi Misi RPJMN Tahun 2025—2029 yang termuat dalam Asta Cita dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Kota Payakumbuh.

b. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Sebagai salah satu Kota di Provinsi Sumatera Barat, Penyusunan RPJMD Kota Payakumbuh berpedoman kepada RPJMD Provinsi

Sumatera Barat 2025-2029. RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan hierarkis dan harus sinkron dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.

c. RPJPD Tahun 2025-2045

Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD yang diatur Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045. RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama dari perencanaan pembangunan. Dalam penyusunan tujuan dan sasaran masih tetap berpedoman pada kebijakan yang diamanatkan dalam RPJPD. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 juga mengacu sepenuhnya pada Visi, Sasaran Visi, Misi, Arah Pembangunan serta Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 2045.

d. RTRW Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030

Penyusunan RPJMD berpedoman pada RTRW yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030, melalui penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang Kota Payakumbuh.

e. RKPD

Dalam penyusunan RKPD, prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah diselaraskan dengan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD menjadi penyusunan sasaran dan prioritas Pembangunan RKPD mengacu sepenuhnya pada sasaran RPJMD.

f. Renstra PD

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD. Renstra adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi PD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Secara umum, dokumen renstra merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD pelaksana pembangunan.

g. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD adalah analisis menyeluruh yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029. KLHS menjadi panduan dan memiliki keterkaitan erat dengan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029. KLHS menjadi dasar untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam RPJMD, memastikan bahwa kebijakan

pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial.

h. Rancangan Teknokratik RPJMD

Rancangan Teknokratik RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun pemerintah daerah sebelum pemilihan kepala daerah. Dokumen ini disusun dengan pendekatan teknokratik. Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 dan RPJMD Tahun 2025-2029 memiliki hubungan yang erat. Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai bahan masukan utama dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029. Dokumen ini memberikan informasi yang komprehensif mengenai kondisi daerah, potensi, serta permasalahan yang ada, yang kemudian menjadi dasar bagi kepala daerah dalam merumuskan visi, misi, dan program pembangunan daerah. Dengan demikian, RPJMD yang telah disusun diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan dan potensi daerah, serta selaras dengan kondisi objektif yang telah diidentifikasi dalam Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029.

i. Penyusunan Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJPID)

RIPJPID adalah dokumen strategis yang berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan dan mengembangkan iptek di daerah. Dokumen ini mengidentifikasi langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memajukan Iptek dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang lebih baik.

j. Evaluasi Capaian Pembangunan 5 Tahun terakhir

Evaluasi capaian pembangunan 5 tahun terakhir memberikan gambaran tentang realisasi kinerja indikator sasaran pokok yang mencapai maupun tidak mencapai target yang direncanakan, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau terlampauinya target kinerja, kebijakan atau tindakan perencanaan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut dalam RPJMD/RPJPD periode berikutnya dan implikasi yang timbul terhadap pencapaian sasaran pokok RPJPD yang dipedomani dalam RPJMD/RPJPD periode berikutnya.

k. Dokumen Perencanaan Pembangunan dan sektoral lainnya

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen kunci dalam perencanaan pembangunan daerah yang memiliki keterkaitan erat dan dasar penyusunan berbagai dokumen perencanaan lainnya seperti Dokumen RPKD, RAD PG, RAD PUG, RTRW, RDTR, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan, Rencana Induk Pemajuan Kepemudaan, RPB, KRB dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum.

l. Hubungan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Rencana Sektoral Kabupaten 50 Kota

Secara administrasi Kota Payakumbuh berbatasan langsung hanya dengan Kabupaten 50 Kota, sesuai dengan Permendagri No 22 Tahun 2020 tentang Kerjasama daerah, mengamanatkan bahwa kerjasama daerah yang berbatasan merupakan kerjasama wajib oleh karena itu implementasi bentuk kerjasama tersebut disemua sektor harus menjadi bagian dalam dokumen RPJMD kedua daerah yang berbatasan.

# 4. MAKSUD DAN TUJUAN

## A. MAKSUD PENYUSUNAN RPJMD

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dimaksudkan:

1) Sebagai arah pembangunan jangka menengah Kota Payakumbuh pada tahun 2025-2029 ;
2) Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah Kota Payakumbuh selama tahun 2025-2029;
3) Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih;
4) Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan prioritas pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

## B. TUJUAN PENYUSUNAN RPJMD

RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan untuk:

1) Menjadi landasan penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
2) Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif menjadi pedoman dalam penyusunan program prioritas daerah;
3) Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi;
4) Memberikan penjabaran visi dan misi dalam agenda-agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan;

5) Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan pola tindak;

6) Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pembangunan kota yang berkelanjutan;

7) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan dengan daerah sekitar dan pemerintah pusat;

8) Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional;

9) Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

## 5. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan mematuhi pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Prosedur penyusunan mengikuti sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini menguraikan posisi dan peran Kota Payakumbuh serta gambaran umum penyusunan RPJMD yang terdiri dari:

a. Latar Belakang;

b. Dasar Hukum Penyusunan;

c. Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya;

d. Maksud dan Tujuan;

e. Sistematika Penulisan.

**BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH**

a. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

b. Gambaran Keuangan Daerah

Bagian ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan masa lalu meliputi kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu; dan proyeksi keuangan daerah tahun 2025-2030.

c. Permasalahan dan Isu Strategis

Bagian ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan.

**BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

a. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bagian ini menjelaskan dan menguraikan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, sebagai landasan perumusan tujuan dan sasaran, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan yang ditetapkan dalam RPJPD.

b. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bagian ini menguraikan strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Rumusan arah kebijakan dan program pembangunan akan menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Selain itu, rumusan arah kebijakan dibuat pertahun sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD tiap tahunnya.

**BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

a. Program Perangkat Daerah

Bagian ini menguraikan seluruh program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh selama 5 (lima) tahun, baik yang bersifat program prioritas dalam rangka pencapaian visi misi, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pemenuhan kebutuhan operasional yang disertai dengan indikator pencapaian target yang disajikan menurut urusan pemerintahan dan kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama.

b. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bagian ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Wali Kota dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing melalui indikator kinerja daerah.

**BAB V PENUTUP**

Bagian ini menyampaikan dengan singkat harapan pencapaian dari dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dan juga berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

**LAMPIRAN**

a. Lampiran I RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029.

Bagian ini menyampaikan Metadata Indikator Pembangunan Daerah yang memuat informasi terstruktur yang menjelaskan secara rinci mengenai setiap indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029 Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program.

b. Lampiran II RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029.

Bagian ini menyampaikan Manajemen Risiko Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat substansi sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan berbagai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

c. Lampiran III RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029.

Bagian ini menyampaikan Penjenjangan Kinerja dalam bentuk Pohon Kinerja

# BAB II

# GAMBARAN UMUM DAERAH

# 1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

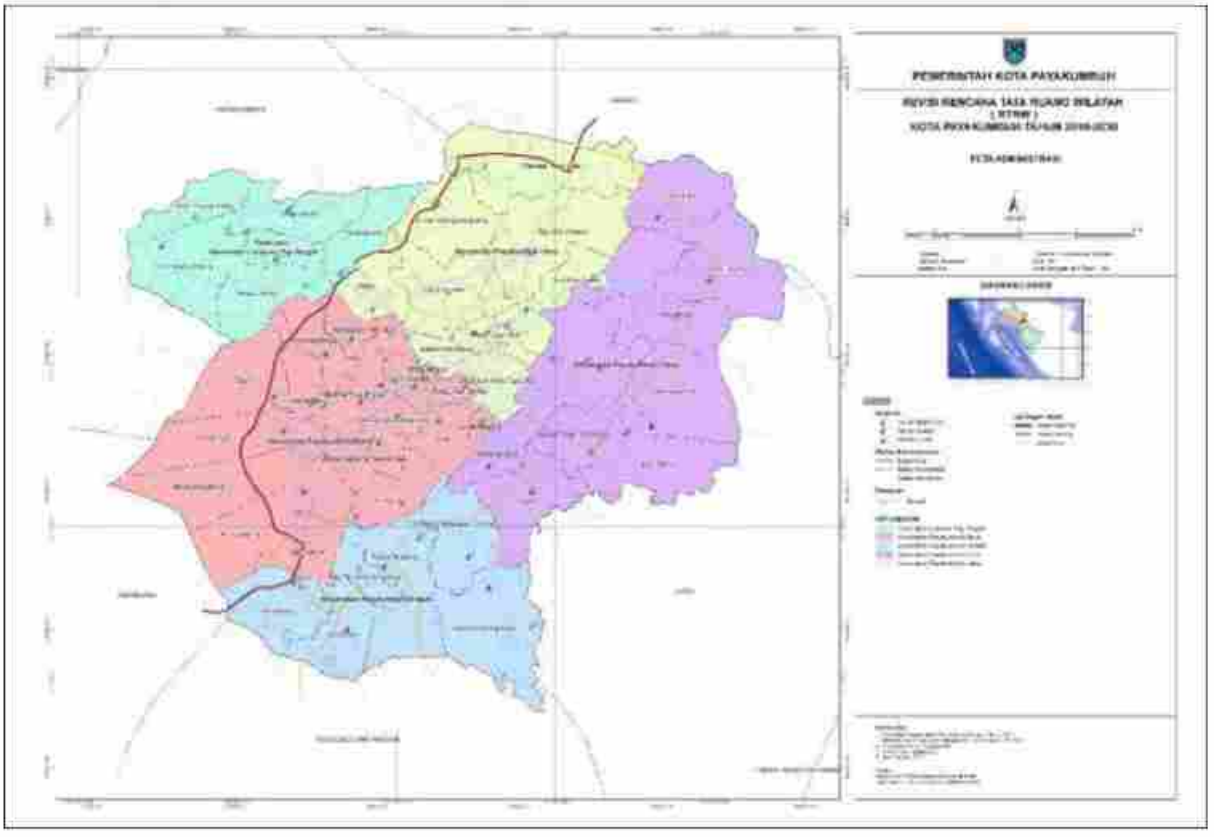
## A. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

### 1). POSISI DAN PERAN STRATEGIS DAERAH

Secara geografis, Kota Payakumbuh terletak pada $00^{0}10'$ sampai dengan $00^{0}17'$ LS dan $100^{0}35'$ sampai dengan $100^{0}45'$ BT pada ketinggian ±514 meter dari permukaan laut. Kota Payakumbuh merupakan kota kecil dengan luas wilayah 80,43 $km^2$ atau 0,19% dari luas Provinsi Sumatera Barat dan berjarak ±120 km dari Kota Padang sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, luas wilayah Kota Payakumbuh ditetapkan 74,552 $km^2$, namun dalam keputusan tersebut tidak ditetapkan luasan setiap kecamatan, sehingga dalam dokumen ini dan dokumen resmi lainnya seperti Payakumbuh Dalam Angka Tahun 2025 masih menggunakan luas wilayah 80,43 $km^2$.

**Gambar 2.1** Peta Administrasi Kota Payakumbuh



**Sumber:** Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010-2030

Secara administratif, Kota Payakumbuh terdiri dari 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kecamatan Payakumbuh Selatan dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dengan luas wilayah masing-masing kecamatan seperti terlihat pada tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1** Pembagian Wilayah Administratif Kota Payakumbuh

| NO | KECAMATAN | IBUKOTA KECAMATAN | LUAS ($KM^2$) | % TERHADAP LUAS WILAYAH | JUMLAH | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | KELURAHAN | RW | RT |
| 1 | Payakumbuh Barat | Tanjung Pauh | 19,07 | 23,71 | 17 | 58 | 168 |
| 2 | Payakumbuh Utara | Tigo Koto Diate | 14,53 | 18,07 | 9 | 35 | 122 |
| 3 | Payakumbuh Timur | Tiakar | 22,73 | 28,26 | 9 | 33 | 91 |
| 4 | Payakumbuh Selatan | Sawah Padang Aua Kuniang | 14,68 | 18,25 | 6 | 16 | 50 |
| 5 | Lamposi Tigo Nagori | Sungai Durian | 9,42 | 11,71 | 6 | 14 | 51 |
| **Total** | | | **80,43** | **100,00** | **47** | **156** | **482** |

**Sumber:** Payakumbuh Dalam Angka 2025

Kota Payakumbuh merupakan bagian dari Luhak Nan Bungsu yang dikelilingi oleh Kabupaten Lima Puluh Kota yang secara administratif berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah di kabupaten tersebut :

a. Sebelah Utara : Kecamatan Harau dan Kecamatan Payakumbuh (Kabupaten Lima Puluh Kota)
b. Sebelah Selatan : Kecamatan Luhak dan Kecamatan Situjuah (Kabupaten Lima Puluh Kota)
c. Sebelah Barat : Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Akabiluru (Kabupaten Lima Puluh Kota)
d. Sebelah Timur : Kecamatan Luhak dan Kecamatan Harau (Kabupaten Lima Puluh Kota)

Letak geografis akan berpengaruh terhadap peran strategis Kota Payakumbuh dari sisi lokal, regional dan nasional, potensi sumber daya alam, gambaran kualitas lingkungan yang termasuk daya tampung dan daya dukung lingkungan dan juga kebencanaan. Posisi Kota Payakumbuh sebagaimana telah disebutkan di atas sangat strategis, di samping dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota yang subur, juga dilalui oleh jalur lalu lintas utama dari Kota Padang sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Barat menuju Pekanbaru sebagai pusat pemerintahan Provinsi Riau. Dengan Demikian Kota Payakumbuh menjadi jalur mobilitas utama bagi penduduk diantara kedua daerah provinsi tersebut

Pada skala lokal, Kota Payakumbuh berperan sebagai pusat transaksi aktifitas perekonomian wilayah sekitarnya (Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam) serta sekaligus sebagai simpul perdagangan dan jasa. Sedangkan pada skala regional dan nasional, Kota Payakumbuh sudah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang secara spasial memiliki fungsi dan peranan yang cukup strategis dalam sistem perwilayahan dan pelayanan sistem perkotaan di Provinsi Sumatera Barat, diantaranya:

a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung Pusat Kegiatan Nasional (PKN) –

Kota Padang dan Pekanbaru sebagai Kota PKN di Sumatera melalui peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi darat;

b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten yang meliputi Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagian wilayah Kabupaten Agam dan sebagian wilayah Kabupaten Tanah Datar;

c. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten;

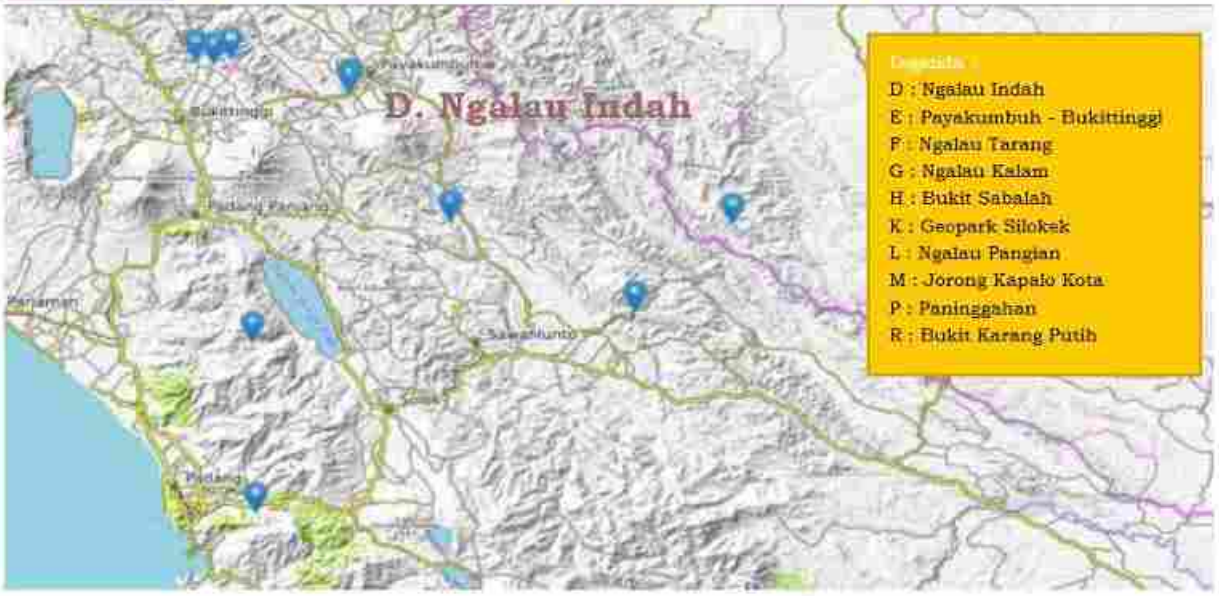
d. Dari segi penyediaan infrastruktur kawasan, kawasan perkotaan Payakumbuh memiliki nilai ekonomis di bidang transportasi darat. Hal ini disebabkan karena posisi Kota Payakumbuh yang berada pada simpul transportasi regional nasional di Pulau Sumatera (prioritas penanganan pembangunan jalan pengumpan yang menghubungkan Lintas Barat dan Lintas Tengah Timur dengan prioritas fungsi yang menghubungkan Kota Padang-Bukittinggi-Pekanbaru dan pengembangan jaringan jalan bebas hambatan Pekanbaru-Bangkinang-Payakumbuh-Bukittinggi-Padang

## 2). POTENSI SUMBER DAYA ALAM

### A). POTENSI KARST SUMBER AIR BAKU DAN WISATA

Formasi Cl (Batuan karbonat) merupakan batu gamping yang menyusun punggungan tajam dari perbukitan sisi timur laut Bukittinggi, Memiliki warna putih hingga keabuan dan berongga. Batu Gamping di Sumatera Barat memiliki ciri berupa sebaran yang membentuk pola blok (unit) yang menyebar dengan luasan yang relatif kecil pada setiap bloknya.

**Gambar 2.2** Titik Lokasi Survei Kawasan Karst Provinsi Sumatera Barat




**Sumber:** Inventarisasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Ekosistem Karst Pulau Sumatera (Provinsi Sumatera Barat), 2019

Adapun lokasi yang tersusun atas formasi ini diantaranya yaitu Kompleks Ngalau Indah dan singkapan di Jalan Lintas Payakumbuh-Bukittinggi. Distribusi secara spasial blok batu gamping di Provinsi Sumatera Barat disajikan pada peta Gambar 2.2.

## (1). KOMPLEKS NGALAU INDAH

Kompleks Ngalau Indah berada di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Adapun posisi absolut dari kompleks batu gamping berdasarkan dokumen Inventarisasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Ekosistem Karst Pulau Sumatera yang terbit pada tahun 2019 adalah x: 678552 dan y: 9971923, dimana batu gamping bertransformasi menjadi satuan bentuk lahan karst yang memiliki morfologi berupa perbukitan kerucut karst, seperti pada kompleks Ngalau Indah yang terdapat gua horizontal kering dan tidak ditemui adanya sungai bawah tanah pada kompleks perbukitan dengan ketinggian 600 mdpl.

**Gambar 2.3** Kompleks Gua Ngalau Indah

**Kiri:** Pelataran Gua ngalau indah; **Kanan:** bentukan eksoterm dalam Gua Ngalau Indah




**Sumber:** Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh, 2025

## (2). JALAN LINTAS PAYAKUMBUH - BUKITTINGGI

Kompleks batu gamping yang berada di sekitar Jalan lintas Payakumbuh-Bukittinggi terdapat pada koordinat x: 678480, dan y: 9971252. Singkapan terlihat pada salah satu tepi jalan yang menghubungkan antara Payakumbuh dengan Bukittinggi. Singkapan tersebut merupakan bagian dari kaki Bukit Simarajo yang memiliki morfologi berupa kerucut karst pada ketinggian 600 mdpl. Lebih lanjut, pada sekitar singkapan tersebut juga ditemukan mata air yang mengalir dari batu gamping yang tersingkap.

**Gambar 2.4** Singkapan Batu Gamping Kaki Bukit Simarajo

**Kiri:** Singkapan di tepi Jalan Payakumbuh-Bukittinggi; **Kanan:** Mata air yang mengalir dari singkapan batu gamping



**Sumber:** Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh, 2025

## 3). DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP

### A). KAPASITAS AIR BAKU

Sumber air baku Kota Payakumbuh cukup melimpah, baik dari sumber mata air, air tanah, air permukaan dan air hujan, namun belum termanfaatkan secara optimal. Sumber air baku yang berada di Kota Payakumbuh dimanfaatkan untuk pengairan/irigasi, peternakan, industri dan air minum rumah tangga, yang sebagian besar berasal dari sumber mata air di luar wilayah Kota Payakumbuh, yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota melalui jaringan perpipaan yang dikelola oleh Perumda Tirta Sago. Untuk wilayah Kota Payakumbuh, sumber air permukaan Sungai Batang Agam telah dimanfaatkan oleh Perumda Tirta Sago semenjak adanya *Water Treatment Plan* (WTP) di Kelurahan Tanjung Pauh, walaupun pemanfaatannya belum maksimal, khususnya dalam mencukupi kebutuhan debit air yang bersumber dari air baku yang sudah ada selama ini.

Secara keseluruhan ada 7 (tujuh) sungai yang sangat potensial untuk diolah dan dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih, pertanian, industri, peternakan dan sebagainya.

**Tabel 2.2** Kapasitas Sungai di Kota Payakumbuh

| NO | NAMA SUNGAI | PANJANG (KM) | LEBAR PERMUKAAN (M) | DEBIT ($M^3$/ DTK) | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batang Agam | 15,60 | 25 | 4,52 | Balai Panjang, Limbukan, Tanjung Pauh, Ibuh, Nunang Daya Bangun, Koto Kociek Kubu Tapak Rajo, Tiakar, Ikua Koto Dibalai, Payobasung, Koto Panjang |
| 2 | Batang Lampasi | 11,60 | 20 | 3,53 | Koto Panjang, Sungai Durian, Taratak Padang Kampuang, Ompang Tanah Sirah |
| 3 | Batang Sikali | 10,00 | 6 | 0,51 | Sawah Padang Aur Kuning, Padang Karambia, Padang Tiakar, Padang Tongah Payobadar, Tiakar, Payobasung |
| 4 | Sungai Baih | 5,00 | 6 | - | Padang Alai Bodi, Balai Jaring, Payobasung |
| 5 | Sungai Talang | 5,00 | 5 | - | Sicincin, Tiakar |
| 6 | Batang Pulau | 11,40 | 5 | - | Taratak Padang Kampuang, Tigo Koto Dibaruah |
| 7 | Sungai Tembok Jua | 6,30 | 4 | - | Taratak Padang Kampuang, Tigo Koto Dibaruah |

**Sumber:** KLHS RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029, 2025

Sungai Batang Agam merupakan salah satu sungai yang mengalir di wilayah Kota Payakumbuh. Selain itu, Kota Payakumbuh memiliki 2 (dua) embung di Kota Payakumbuh dengan total luas diperkirakan mencapai 5,5 ha.

**Tabel 2.3** Kapasitas Embung di Kota Payakumbuh

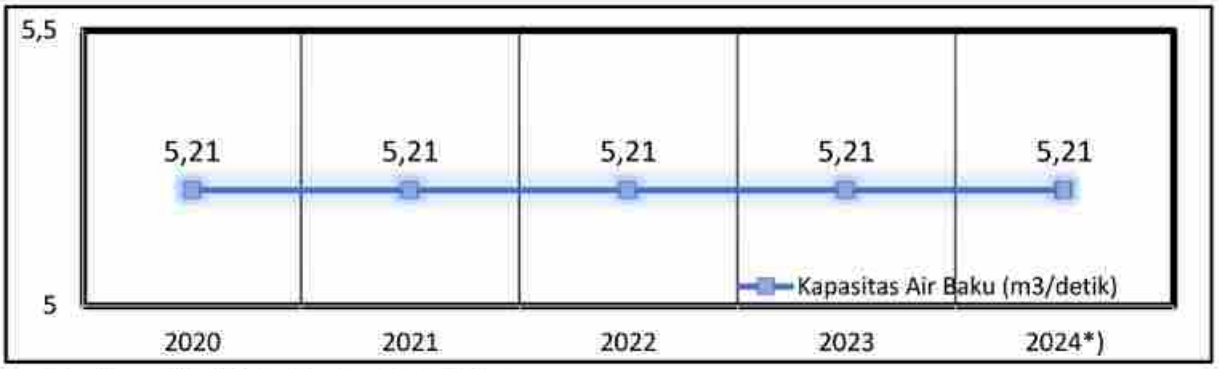
| NO | NAMA EMBUNG | LUAS (HA) | VOLUME ($M^3$) | DEBIT (LITER/DTK) | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Embung Bulakan | 3 | 35,007 | 500 | Limbukan, Kec. Payakumbuh Selatan |

| NO | NAMA EMBUNG | LUAS (HA) | VOLUME ($M^3$) | DEBIT (LITER/DTK) | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Embung Lurah Rawang | 1 | - | 7 | Kapalo Koto, Kec. Payakumbuh Selatan |

**Sumber:** KLHS RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029, 2025

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber air baku yang ada di Kota Payakumbuh dibutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Berbagai upaya pembiayaan sudah dilakukan, termasuk pembiayaan dari pemerintah pusat dan pinjaman daerah, namun belum terealisasi sesuai yang diharapkan. Perkembangan kapasitas air baku Kota Payakumbuh dari tahun 2020-2024 terlihat pada diagram 2.1 dimana kapasitas air baku Kota Payakumbuh sejak tahun 2020 tetap sebesar 5,21 $m^3$/detik yang berarti kapasitas air baku yang dapat dimanfaatkan sudah pada tingkatan maksimal.

**Diagram 2.1** Perkembangan Kapasitas Air Baku Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024




**Sumber:** Dinas PUPR Kota Payakumbuh, 2024

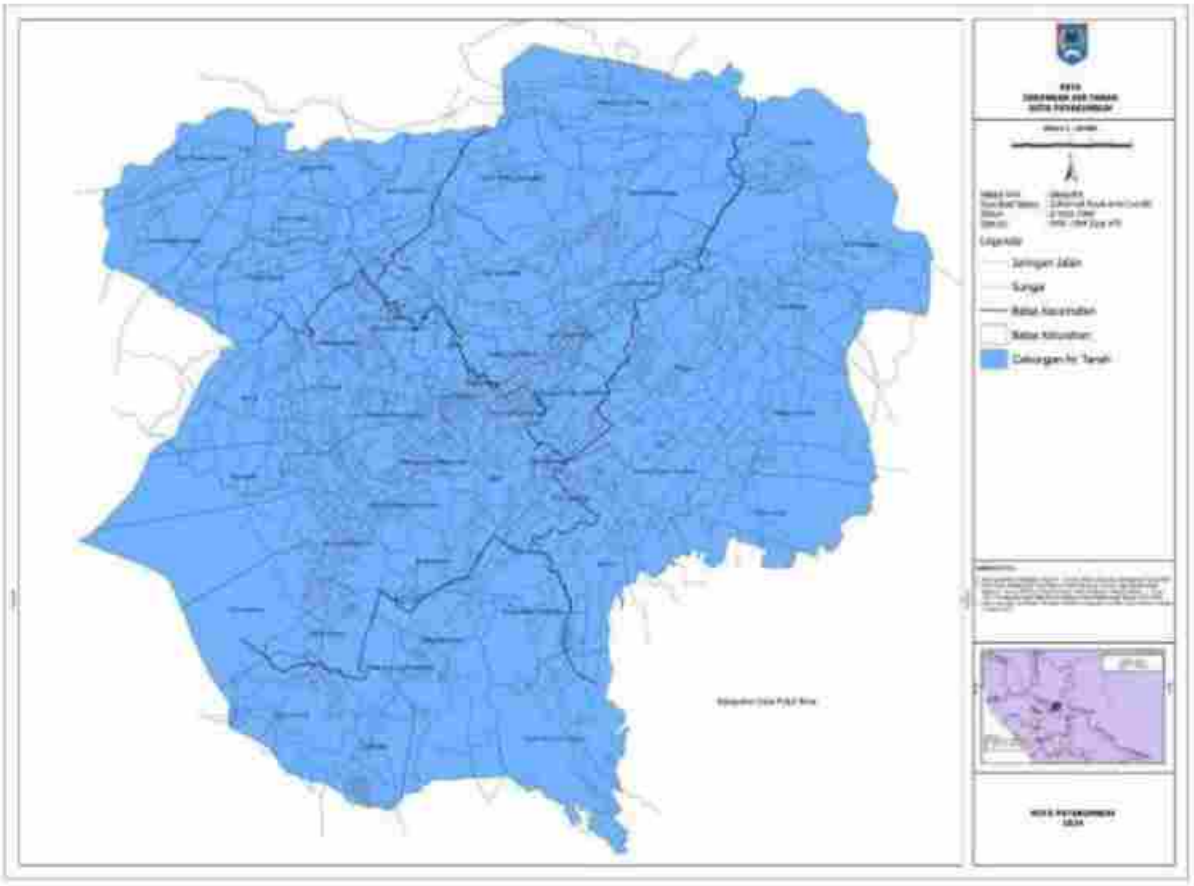
Selain pemanfaatan embung untuk meningkatkan sumber air baku, Kota Payakumbuh juga memiliki sumber air yang berasal dari cekungan air tanah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Cekungan Air Tanah (CAT) adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.

Cekungan Air Tanah (CAT) meliputi area geografis di mana air tanah tertimbun di bawah permukaan tanah dalam lapisan batuan atau material akumulasi lainnya. Air tanah terakumulasi dalam cekungan ini karena proses alami seperti infiltrasi air hujan ke dalam tanah dan kemudian meresap ke lapisan bawahnya yang memiliki kepadatan yang lebih tinggi. Dalam cekungan air tanah, air disimpan dalam formasi geologis seperti akuifer, yang merupakan lapisan batuan atau material yang dapat menampung dan menyimpan air secara signifikan. Air dalam cekungan ini bisa diakses melalui sumur-sumur bor atau sumur gali yang mencapai lapisan air tanah tersebut.

Cekungan air tanah bisa berukuran kecil seperti cekungan lokal di bawah permukaan tanah yang melayani sumber air untuk sumur-sumur

rumah tangga, atau bisa juga sangat besar seperti cekungan air tanah regional yang memberikan pasokan air untuk daerah yang lebih luas, bahkan mencakup wilayah antar negara. Pemanfaatan dan eksploitasi air tanah berlebihan tanpa kendali justru berpotensi merusak lingkungan, seperti terjadinya penurunan muka air tanah.

**Gambar 2.5** Peta Cekungan Air Tanah Kota Payakumbuh



**Sumber:** Diolah dari Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia

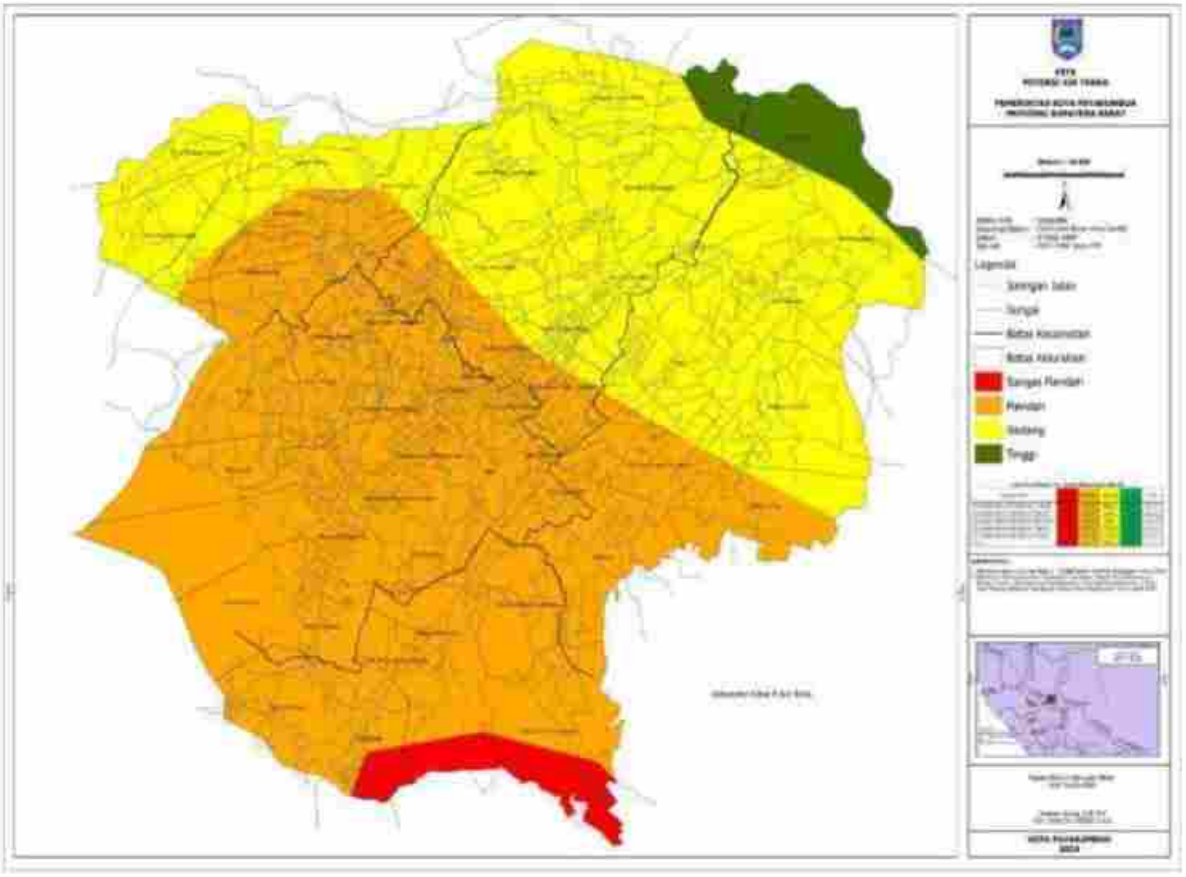
Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah (CAT) di Indonesia, terdapat sekitar 10 CAT di Provinsi Sumatera Barat, salah satunya di Kota Payakumbuh. Luas CAT ini diperkirakan mencapai 77.83 $km^2$

**Tabel 2.4** Luas Cekungan Air Tanah Di Kota Payakumbuh

| NO | KECAMATAN | LUAS CEKUNGAN AIR TANAH | PERSENTASE LUASAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Payakumbuh Barat | 2.030,66 Ha | 26,09% |
| 2 | Payakumbuh Utara | 1.560,33 Ha | 20,05% |
| 3 | Payakumbuh Timur | 2.056,12 Ha | 26,42% |
| 4 | Payakumbuh Selatan | 1.212,57 Ha | 15,58% |
| 5 | Lamposi Tigo Nagori | 923,08 Ha | 11,86% |
| **Total** | | **7.782,76 Ha** | **100,00%** |

**Sumber:** Payakumbuh Dalam Angka 2025

**Gambar 2.6** Peta Potensi Air Tanah di Kota Payakumbuh



**Sumber:** Peraturan Menteri ESDM No. 02 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah (CAT) di Indonesia, diolah

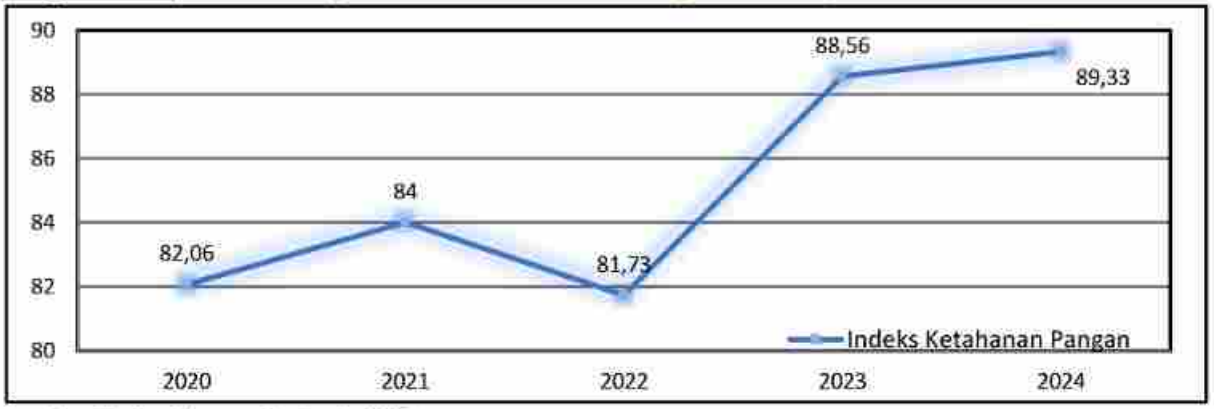
## 4). BERKETAHANAN ENERGI, AIR DAN KEMANDIRIAN PANGAN

### A). KETAHANAN PANGAN

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi daerah sampai kepada perseorangan, ini dicerminkan dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Untuk mengukur ketersediaan pangan suatu daerah, maka digunakan alat ukur Indeks Ketahanan Pangan (IKP).

Indeks Ketahanan Pangan dihitung secara nasional oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional dan dipublikasikan setiap tahun. Indeks ketahanan pangan Kota Payakumbuh dari tahun 2020 - 2024 untuk kategori kota termasuk kategori ketahanan pangan paling baik (IKP > 70,64).

**Diagram 2.2** Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024



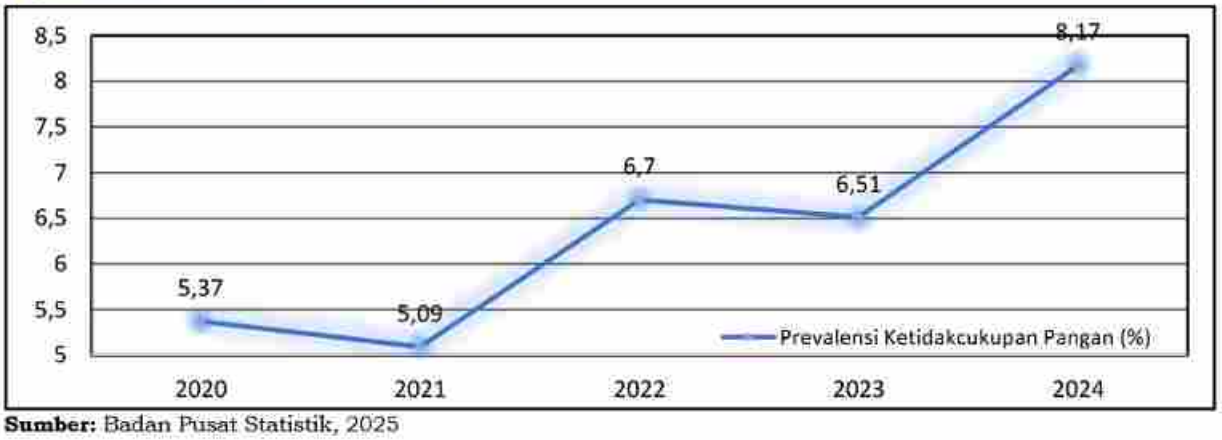

**Sumber:** Badan Pangan Nasional, 2025

Nilai IKP Kota Payakumbuh cenderung naik dari tahun ke tahun, walaupun mengalami sedikit penurunan di tahun 2022 yang disebabkan adanya operasi pasar yang cukup besar untuk memenuhi dan menjaga kestabilan harga pangan setelah terjadinya wabah Covid-19. Namun secara umum kondisi tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap ketahanan pangan Kota Payakumbuh. Kepeduliaan Pemerintah Kota Payakumbuh terhadap aspek ketahanan pangan terlihat ketika terjadinya pemulihan ekonomi tahun 2023, nilai IKP naik cukup signifikan mencapai 88,56 dan 89,33 pada tahun 2024.

## B). PREVALENSI KETIDAKCUKUPAN KONSUMSI PANGAN (PREVALENCE OF UNDERNOURISHMENT)

Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Indikator ini digunakan untuk mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan di bawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan yang kandungan nutrisinya tidak ideal. Perkembangan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kota Payakumbuh dalam 5 (lima) tahun terakhir digambarkan sebagai berikut.

**Diagram 2.3** Perkembangan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024




**Sumber:** Badan Pusat Statistik, 2025

Dari gambar di atas terlihat bahwa trend prevalensi ketidakcukupan pangan di Kota Payakumbuh secara umum masih rendah yang disebabkan masih rendahnya kecukupan pangan dan gizi masyarakat miskin yang ada di Kota Payakumbuh. Di samping itu, juga adanya kegagalan panen akibat perubahan iklim dan terganggunya rantai pasok bahan pangan.

## C). KETERSEDIAAN PANGAN UTAMA

Kondisi ketersediaan pangan, dalam hal ini beras merupakan hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Skor PPH dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang serta menjadi pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Pada Tahun 2024 Skor PPH Konsumsi 87,7 dimana masih di bawah Skor PPH Konsumsi Provinsi Sumatera Barat. Melihat kondisi skor PPH Konsumsi Kota Payakumbuh tahun 2024 dibutuhkan upaya-upaya dan langkah-langkah yang tepat dan nyata untuk merubah pola pikir masyarakat agar ikut dan mampu melaksanakan program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan mau menerapkan pola konsumsi pangan B2SA. Selain skor PPH konsumsi juga terdapat Skor PPH Ketersediaan yaitu informasi yang menggambarkan tentang pencapaian keberagaman pangan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk dalam kurun waktu setahun. PPH ketersediaan di ukur berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) di mana NBM dihasilkan dari Data Produksi Daerah, Barang Masuk (Impor) dan Barang Keluar (Ekspor) serta penggunaan lainnya. Sehingga dapat digambarkan jumlah penyediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk Kota Payakumbuh, dan juga menggambarkan jumlah kalori yang dapat dikonsumsi masyarakat. Skor PPH Ketersediaan di Kota Payakumbuh berada pada posisi 89,17 pada tahun 2024, dimana tingkat ketersediaan untuk 3 kelompok bahan pangan masih rendah yaitu kacang-kacangan, buah biji berminyak dan sayuran dan buah.

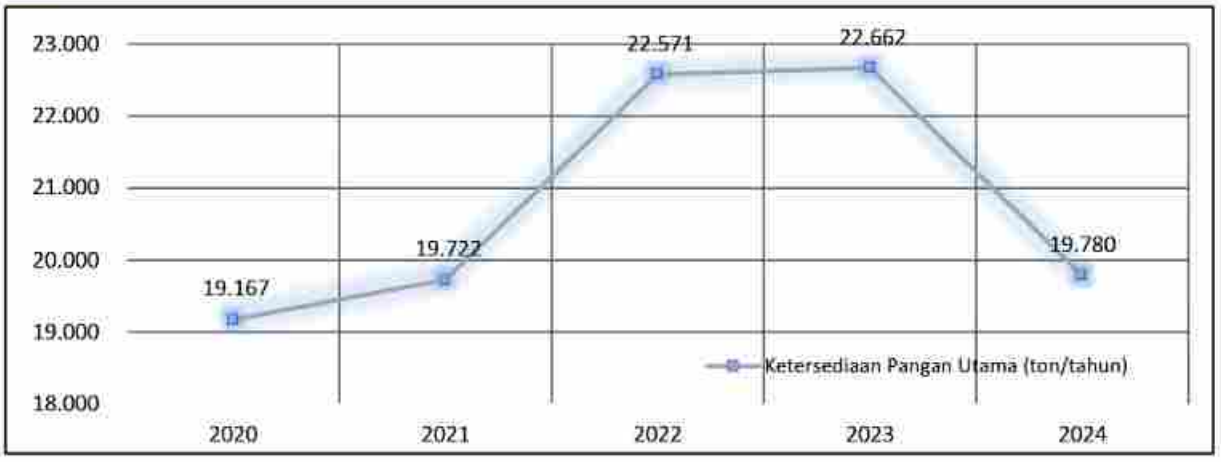
**Tabel 2.5** Data Ketersediaan Pangan dan Perbandingan Skor PPH Kota Payakumbuh dengan Sumatera Barat Tahun 2020-2024

| NO. | TAHUN | KETERSEDIAAN PANGAN (KG/KAP/TH) | SKOR PPH KONSUMSI PROVINSI SUMATERA BARAT | SKOR PPH KONSUMSI KOTA PAYAKUMBUH | SKOR PPH KETERSEDIAAN KOTA PAYAKUMBUH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 403,62 | 86,6 | 83,7 | 88,05 |
| 2 | 2021 | 606,01 | 86,6 | 84,20 | 88,77 |
| 3 | 2022 | 504,53 | 89,8 | 85,09 | 89,02 |
| 4 | 2023 | 511,72 | 90,5 | 87,3 | 89,11 |
| 5 | 2024 | 469,29 | 89 | 87,7 | 89,17 |

**Sumber:** Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, 2025

Ketersediaan pangan utama merupakan rata-rata ketersediaan pangan utama bagi penduduk Kota Payakumbuh dalam periode satu tahun. Ketersedian pangan utama ini diperhitungkan dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Kota Payakumbuh seandainya terjadi krisis pangan, sehingga produksi pangan terhenti. Angka ketersedian pangan utama Kota Payakumbuh tahun 2020-2024 dapat dilihat pada diagram 2.4 berikut.

**Diagram 2.4** Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024




**Sumber:** Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, 2025

## D). PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KEAMANAN PANGAN

Pemerintah disamping berusaha untuk menyediakan pangan bagi masyarakat, juga harus memastikan keamanan pangan bagi masyarakat, karena hal ini berkorelasi pada kesehatan masyarakat yang nantinya menjadi salah satu faktor penentu kualitas SDM Kota Payakumbuh. Pemerintah Kota Payakumbuh terus berupaya untuk menjadikan skor keamanan pangan tersebut pada level tingkat keamanan tinggi (86 – 100%).

**Tabel 2.6** Data Keamanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

| NO | TAHUN | JUMLAH SAMPEL | JUMLAH SAMPEL AMAN | JUMLAH SAMPEL TIDAK AMAN | SAMPEL AMAN (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 20 | 18 | 2 | 90 |
| 2 | 2021 | 40 | 35 | 5 | 87,5 |
| 3 | 2022 | 10 | 9 | 1 | 90 |
| 4 | 2023 | 30 | 30 | 0 | 100 |
| 5 | 2024 | 50 | 39 | 11 | 78 |

**Sumber:** Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, 2024

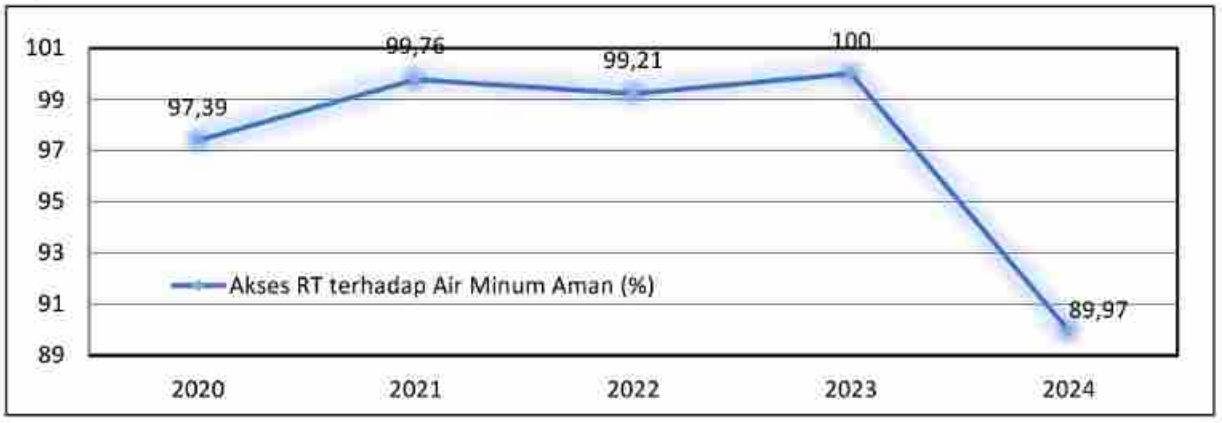
Untuk menjamin mutu dan keamanan pangan yang akan dikonsumsi masyarakat yang terbebas dari bahan-bahan berbahaya, seperti residu pestisida dan formalin, maka perlu dilaksanakan pengawasan terhadap pangan segar yang beredar di Kota Payakumbuh. Salah satu pengawasan yang dilakukan pemerintah Kota Payakumbuh adalah dengan pengambilan sampel pangan yang beredar di Kota Payakumbuh. Pada tahun 2024 pengawasan dan pengambilan sampel bahan pangan dilakukan dengan pengambilan 50 sampel, dimana ditemukan 11 sampel yang dinyatakan tidak aman atau sebesar 22% dari total sampel. Melihat hasil sampel yang

diperoleh, kondisi keamanan pangan Kota Payakumbuh pada tahun 2024 dikategorikan Sedang.

## E). AKSES RUMAH TANGGA TERHADAP SUMBER AIR MINUM AMAN

Penyediaan air minum aman yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Sago melalui penyediaan layanan air minum perpipaan. Tahun 2024 layanan sudah mencapai 89,77% yang dapat dilihat perkembangannya dari tahun 2020-2024 pada diagram 2.5 berikut.

**Diagram 2.5** Perkembangan Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024




**Sumber:** Dinas PUPR Kota Payakumbuh, 2025

Jika dilihat diagram di atas, terlihat adanya fluktuasi dari akses air minum aman Kota Payakumbuh, dimana terjadi penurunan yang cukup tinggi pada tahun 2024. Hal ini disebabkan perkembangan perumahan yang cukup pesat dan tidak disertai kapasitas sumber air baku yang bisa dimanfaatkan sehingga perumahan baru belum dapat terpenuhi sepenuhnya akses layanan air minum oleh Perumda Tirta Sago.

## F). PROYEKSI KEBUTUHAN AIR BERSIH

Air merupakan kebutuhan dasar untuk hidup, oleh karenanya pasokan air minum yang memadai, bersih, dan aman harus dapat diakses oleh penggunanya. Akses terhadap air minum yang aman dikategorikan sebagai hak asasi manusia yang mendasar sehingga tidak hanya pada MDGs, target ini dilanjutkan kembali pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke 6 di mana dinarasikan bahwa "Air Menopang Kehidupan, tetapi Air Minum Bersih yang aman menentukan peradaban". Pemerintah Republik Indonesia mengkategorikan penyediaan air bersih sebagai standar pelayanan minimum pemerintahan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tantangan dari penyediaan air minum adalah terkait kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Untuk kualitas kita berbicara tentang air minum aman, ketika berbicara tentang kuantitas kita berbicara akan jumlah yang memenuhi kebutuhan penggunanya, sedangkan untuk kontinuitas kita berbicara penyebaran dan akses dari sumber ke pengguna. Pasokan air menjadi dasar meningkatkan kualitas dan kontinuitas layanan air minum,

karena itu perlu dihitung berapa kebutuhan air minum di Kota Payakumbuh untuk jangka menengah maupun jangka panjangnya.

Kebutuhan air berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, dijelaskan bahwa standar kebutuhan pokok air ialah sebesar 60 l/org/hr. Kebutuhan air tersebut dibedakan atas kategori wilayah, dimana berdasarkan survei yang dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya kebutuhan akan air bersih tersebut dibagi ke dalam beberapa kategori.

**Tabel 2.7** Standar Kebutuhan Air Berdasarkan Kategori Wilayah

| NO | KATEGORI WILAYAH | JUMLAH PENDUDUK (ORANG) | KEBUTUHAN AIR BERSIH (LITER ORANG/HARI) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedesaan | 3000 – 20.000 | 60 – 90 |
| 2 | Kota Kecil | 20.000 – 100.000 | 90 - 110 |
| 3 | Kota Sedang | 100.000 – 500.000 | 100 - 125 |
| 4 | Kota Besar | 500.000 – 1.000.000 | 125 - 150 |
| 5 | Kota Metropolitan | > 1.000.000 | 150 - 200 |

**Sumber:** SNI 7831- 2012

Dilain pihak, Badan Standar Nasional Indonesia (BSNI) juga membedakan kebutuhan air berdasarkan pada dua kategori: pedesaan dan perkotaan, dimana untuk pedesaan adalah 60 liter/hari, dan perkotaan sebesar 120 liter/hari. Maka untuk Perhitungan Prediksi Kebutuhan Air Domestik untuk Kota Payakumbuh yang dikategorikan Kota Sedang, maka kita asumsikan kebutuhan air setiap orang per-hari adalah 125 liter/hari, yang dalam skala rumah tangga, rata-rata penggunaan air digunakan untuk membersihkan rumah, mandi, mencuci pakaian, minum, memasak, keperluan ibadah, dan sebagainya, yang bersumber dari air permukaan seperti sungai, danau dan air tanah. Perhitungan jumlah air diformulasikan sebagai akumulasi dari kebutuhan pemakaian harian per-liter dari sejumlah pengguna atau penduduk di Kota Payakumbuh.

**Tabel 2.8** Proyeksi Kebutuhan Air Minum Domestik Kota Payakumbuh Tahun 2025-2030

| NO | TAHUN PROYEKSI | JUMLAH PENDUDUK | KEBUTUHAN AIR (LITER/HARI) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kondisi Tahun 2024 | 146.731 | 17.371.375 Liter |
| 2 | Tahun 2025 | 148,597 | 18.574.625 Liter |
| 3 | Tahun 2026 | 150.450 | 18.806.250 Liter |
| 4 | Tahun 2027 | 152.270 | 19.033.750Liter |
| 5 | Tahun 2028 | 154.050 | 19.256.250 Liter |
| 6 | Tahun 2029 | 155.830 | 19.478.750 Liter |
| 7 | Tahun 2030 | 157.573 | 19.696.250 Liter |

**Sumber:** Hasil Analisis Bappeda, 2025

Disisi lain, Kebutuhan air skala Non Domestik merupakan layanan air bersih yang dikategorikan atas empat tipe:

1. Umum (tempat peribadatan, rekreasi, sekolah, terminal, rumah sakit, dan lain-lain)

2. Institusional (kantor pemerintah dan swasta, komplek militer, dan lain-lain)
3. Komersial (bioskop, hotel, restoran, pertokoan, dan lain-lain)
4. Industrial (peternakan, pabrik, pelabuhan, dan lain-lain)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, maka perkiraan kebutuhan air non-domestik diasumsikan adalah 15% dari kebutuhan domestik, Maka berdasarkan hal tersebut, untuk kebutuhan Non Domestik Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.9** Proyeksi Kebutuhan Air Minum Domestik Kota Payakumbuh Skala Non Domestik Tahun 2025-2030

| NO | TAHUN | KEBUTUHAN AIR NON DOMESTIK (LITER/HARI) |
|---|---|---|
| 1 | Kondisi Tahun 2024 | 2.605.706 Liter |
| 2 | Tahun 2025 | 2.786.194 Liter |
| 3 | Tahun 2026 | 2.820.937 Liter |
| 4 | Tahun 2027 | 2.855.062 Liter |
| 5 | Tahun 2028 | 2.888.437 Liter |
| 6 | Tahun 2029 | 2.921.812 Liter |
| 7 | Tahun 2030 | 2.954.437 Liter |

**Sumber:** Hasil Analisa Bappeda, 2025

Dari uraian di atas, maka proyeksi kebutuhan air minum Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.10** Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kota Payakumbuh Tahun 2025-2030

| URAIAN | KONDISI TAHUN 2024 | PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MUNIM | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Jumlah Penduduk (jiwa) | 146.731 | 148.597 | 150.450 | 152.270 | 154.050 | 155.830 | 157.573 |
| Proyeksi Kebutuhan Air Minum (liter/ hari) | 20.602.9695 | 21.360.819 | 21.627.187 | 21.888.812 | 22.144.687 | 22.400.562 | 22.650.687 |

**Sumber:** Hasil Analisa Bappeda, 2025

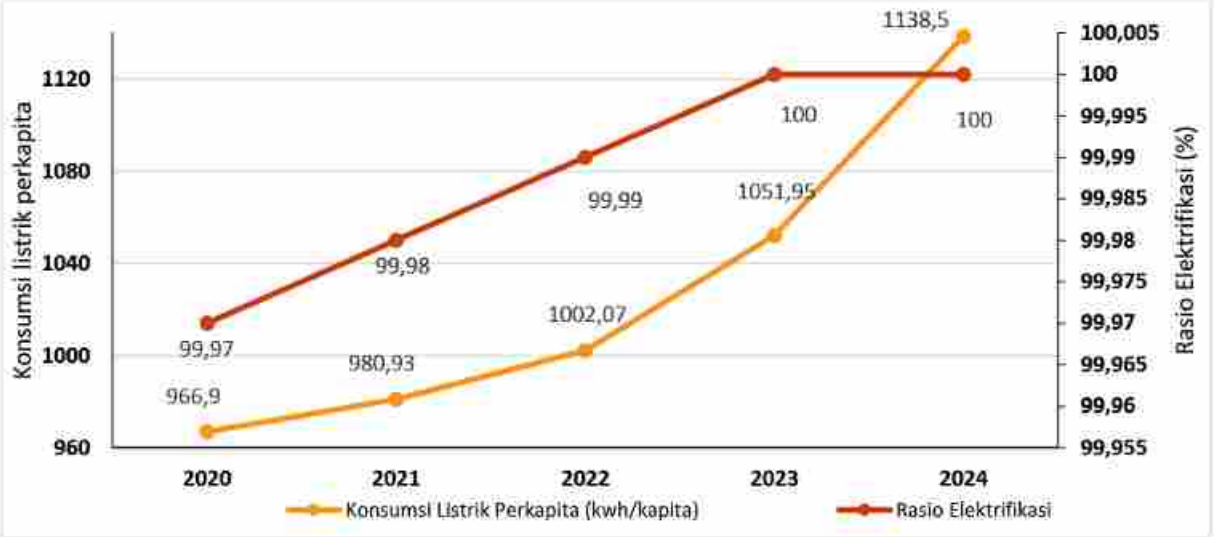
Dari hasil perhitungan terlihat kebutuhan air minum Kota Payakumbuh meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, Hal ini tentunya harus menjadi perhatian dalam penentuan kebijakan dan prioritas pembangunan, utamanya terkait sumber air bersih yang semakin sedikit ketersediaannya.

## G). PENGGUNAAN ENERGI

Indikator yang digunakan untuk menghitung penggunaan energi yaitu rasio elektrifikasi dan konsumsi listrik per kapita. Rasio elektrifikasi merupakan perbandingan antara jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga. Sedangkan

pemakaian listrik perkapita merupakan total jumlah energi listrik yang digunakan di suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk dalam periode satu tahun. Hal ini menunjukkan rata-rata konsumsi listrik tiap penduduk. Rasio Elektrifikasi di Kota Payakumbuh sejak tahun 2023 sudah mencapai 100%. Sedangkan tingkat konsumsi listrik perkapita cenderung naik dalam 5 (lima) tahun terakhir, dimana pada tahun 2020 tercatat 966,9 kwh/ kapita dan naik terus sampai 1.138,5 kwh/ kapita pada tahun 2024

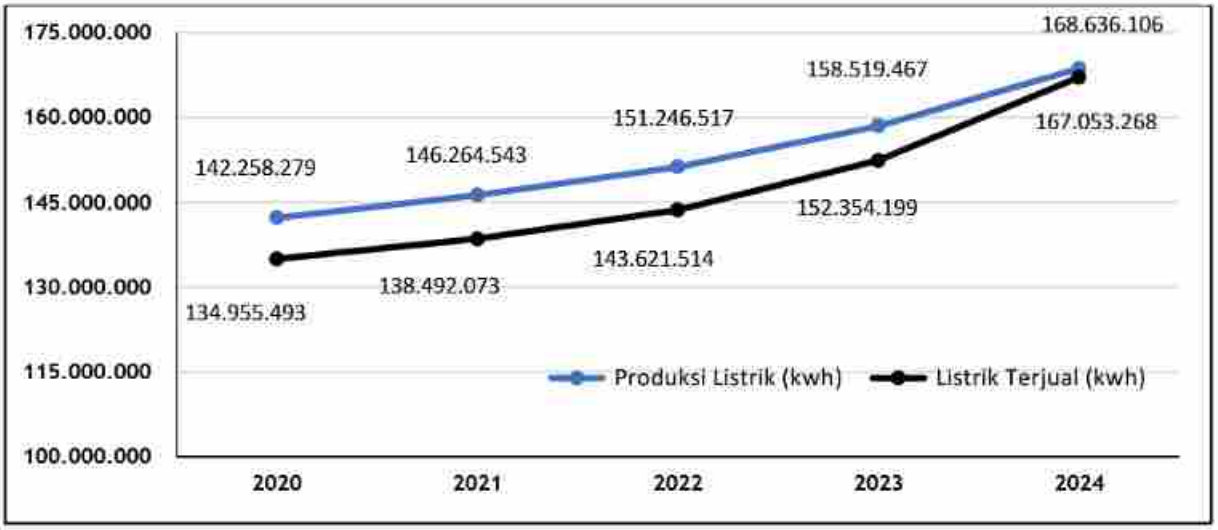
**Diagram 2.6** Perkembangan Rasio Elektrifikasi dan Konsumsi Listrik Perkapita Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024




**Sumber:** Payakumbuh Dalam Angka 2025, data diolah Bappeda

Seiring waktu dengan pertumbuhan penduduk dan perumahan juga akan meningkatkan kebutuhan listrik di Kota Payakumbuh. Diagram 2.7 memperlihatkan hubungan antara jumlah produksi listrik dengan listrik terjual pada tahun 2020-2024, dimana produksi listrik lebih besar dari listrik yang terjual, sehingga dengan kondisi ini dapat dipastikan kebutuhan listrik ke depan masih dapat dipenuhi oleh PLN Cabang Payakumbuh sesuai dengan perkembangan kota.

**Diagram 2.7** Perkembangan Produksi Listrik dan Kapasitas Listrik Terjual di Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024




**Sumber:** Payakumbuh Dalam Angka 2025

## H). PROYEKSI KEBUTUHAN ENERGI/LISTRIK

Energi listrik merupakan sumber energi utama yang banyak dimanfaaatkan dan dibutuhkan manusia. Dari waktu ke waktu kebutuhan energi listrik senantiasa bertambah. Peningkatan kebutuhan energi listrik tidak saja dipengaruhi oleh penambahan jumlah penduduk, tetapi juga dipengaruhi faktor aktifitas ekonomi penduduk yang terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin tinggi aktivitas ekonomi maka akan semakin besar kebutuhan akan energi listriknya. Proyeksi kebutuhan listrik Kota Payakumbuh lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut.

**Tabel 2.11** Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik Kota Payakumbuh Tahun 2025-2030

| URAIAN | KONDISI TAHUN 2024 | PROYEKSI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Jumlah Penduduk (jiwa) | 146.731 | 148.597 | 150.450 | 152.270 | 154.050 | 155.830 | 157.573 |
| Jumlah Rumah | 33.967 | 37.149 | 37.592 | 38.045 | 38.493 | 38.941 | 39.393 |
| Kebutuhan Listrik (KWh) | 50.437,36 | 51.786,05 | 52.412,128 | 53.037,756 | 53.663,384 | 54.289,012 | 54.914,19 |

**Sumber:** Bappeda Kota Payakumbuh, 2025

## 5). LINGKUNGAN HIDUP BERKUALITAS

## A). KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pembangunan berwawasan lingkungan dan digunakan sebagai bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup, IKLH merupakan perpaduan konsep Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) dan konsep Environment Performance Index (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Kualitas Air, (2) Kualitas Udara dan (3) Kualitas Lahan.

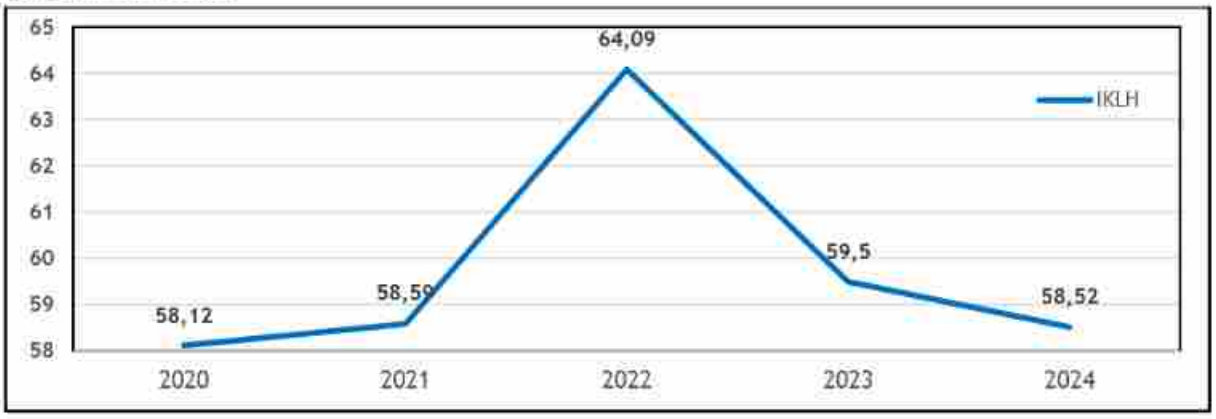
Perhitungan Capaian Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dihitung dengan menggunakan rumusan di bawah ini :

**IKLH Kota = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)**

cara perolehan data :

1. Data IKA diperoleh dari hasil uji kualitas pada badan air yaitu di Sungai Batang Agam, Batang Lampasi, Batang Sikali, Batang Pulau, Sungai Talang, Sungai Baih dan Sungai Tembok Jua;
2. Data IKU diperoleh dari hasil pengujian kualitas udara dibeberapa lokasi dengan metode passive sampler;
3. Data IKL diperoleh dari citra satelit yakni tentang luas wilayah Kota Payakumbuh yang tertutup vegetasi.

**Diagram 2.8** Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024




**Sumber:** KLHS RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

Kualitas lingkungan hidup Kota Payakumbuh dilihat dari perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dapat dikatakan fluktuatif. IKLH terendah terjadi pada tahun 2020 dengan nilai 58,12, kemudian tertinggi tahun 2022 dengan nilai 64,09 yang kemudian terjadi penurunan menjadi 58,52 pada tahun 2024, yang hampir mendekati kondisi tahun 2020. Walaupun fluktuatif, kondisi IKLH Kota Payakumbuh berkategori "*sedang*" (50 ≤ IKLH ≥ 70).

## (1). INDEKS KUALITAS AIR (IKA)

Perhitungan Indeks Kualitas Air Tahun 2024 Kota Payakumbuh dilakukan dengan melakukan menghitung Indeks Kualitas vegetasi air pada 32 sampel uji kualitas air di 7 (tujuh) sungai yang melintas di Kota Payakumbuh yaitu Sungai Batang Agam, Batang Lampasi, Batang Sikali, Batang Pulau, Sungai Talang, Sungai Baih dan Sungai Tembok Jua. Berdasarkan hasil uji kualitas Air yang telah dilakukan di Kota Payakumbuh didapatkan hasil kualitas air di Kota Payakumbuh mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni yakni 45,261 yang dikategorikan "Kurang" Hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak, baik di hulu maupun di hilir sungai, karena Kota Payakumbuh merupakan daerah perlintasan sungai.

**Tabel 2.12** Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air Tahun 2024

| MUTU AIR | JUMLAH PEMANTAUAN MEMENUHI MUTU AIR | PERSENTASE PEMENUHAN MUTU AIR | BOBOT NILAI INDEKS | NILAI INDEKS PER MUTU AIR |
|---|---|---|---|---|
| Memenuhi | - | - | 70 | - |
| Ringan | 32 | 100% | 50 | 45,261 |
| Sedang | - | - | 30 | - |
| Berat | - | - | 10 | - |
| **Total** | **32** | **100%** | | |

**Sumber:** Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2024

## (2). INDEKS KUALITAS UDARA (IKU)

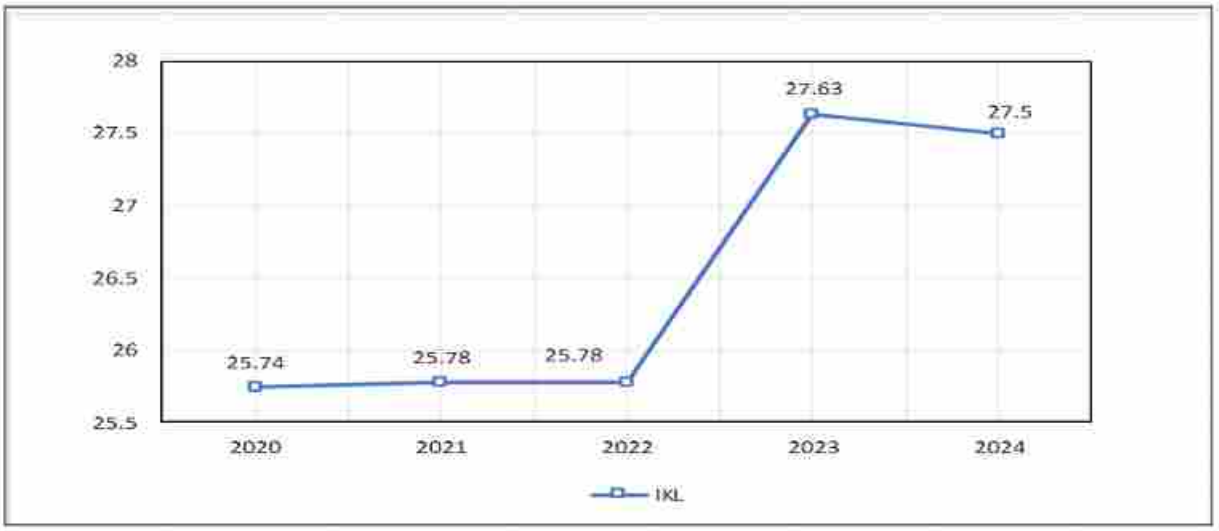
Perhitungan Indeks Kualitas Udara diambil dari hasil pengujian kualitas udara dibeberapa lokasi dengan metode passive sampler. Nilai IKU

ini merupakan data kualitas udara ambien yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, di mana Indeks Kualitas Udara Kota Payakumbuh pada tahun 2024 berada di angka 87,59 "Baik". Nilai IKU ini menempatkan Kota Payakumbuh pada urutan 7 (tujuh) di tingkat Kota dan di peringkat ke 17 (tujuh belas) untuk Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat. Walaupun Indek Kualitas Udara Kota Payakumbuh cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya tapi masih dalam kategori dapat dikendalikan, dan perlu menjadi perhatian kedepannya dalam mengendalikan polusi udara di Kota Payakumbuh.

### (3). INDEKS KUALITAS LAHAN

Kualitas lahan suatu daerah diukur dengan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut. Selama tahun 2020-2024, nilai IKL Kota Payakumbuh berfluktuasi, namun tidak terlalu signifikan. Tahun 2020 nilai IKL sebesar 25,74 dan meningkat menjadi 27,63 di tahun 2023, dan kembali mengalami penurunan menjadi 27,50. Penurunan ini dikarenakan adanya permintaan masyarakat untuk pemangkasan pohon pelindung. Nilai IKL Kota Payakumbuh dapat dikategorikan "kurang" (25 ≤ IKL ≥ 50). Oleh karenanya, salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan indeks kualitas lahan adalah dengan mempertahankan tutupan lahan dan kesuburan melalui intensifikasi pertanian dan pelaksanaan gerakan penanaman pohon serta peningkatan Ruang Terbuka (RTH) setiap tahunnya untuk mengimbangi perkembangan permukiman.

**Diagram 2.9** Perkembangan Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kota Tahun 2020-2024




**Sumber:** KLHS RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029, 2025

Dengan Indeks Kualitas Air (IKA) bernilai **45,26** Indeks Kualitas Udara (IKU) bernilai **87,59** dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) adalah **27,50** maka perhitungan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dapat dihitung dengan menggunakan rumusan sebagai berikut :

**IKLH = (0,376 x IKA )+ (0,405 X IKU )+ (0,219 x IKL)**
**IKLH = (0,376 x 45,26) + (0,405 x 87,59) + (0,219 x 27,50)**
**IKLH = 17,02 + 35,47 + 6,03**

Dari perhitungan diatas, maka **nilai IKLH** Kota Payakumbuh Tahun 2024 adalah **58,52.**

## B). KAWASAN LINDUNG KOTA PAYAKUMBUH

Luas kawasan lindung di Kota Payakumbuh pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun tahun sebelumnya, Dari 1.196,156 Ha menjadi 1.197,49 Ha. Data tersebut bersumber dari Perda Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030. Kawasan lindung di Kota Payakumbuh terdiri dari Hutan, Sungai, RTH, Pemakaman, RTH Taman Rekreasi, TPA

**Tabel 2.13** Jumlah Kawasan Lindung Kota Payakumbuh Tahun 2020 – 2024

| NO | URAIAN | SATUAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kawasan Lindung | Ha | 1.196,156 | 1.196,156 | 1.196,156 | 1.196,156 | 1.197,49 |
| 2. | Mata Air | buah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

**Sumber:** Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2024

## C). PENGAWASAN IZIN LINGKUNGAN

Penegakan hukum lingkungan dapat dilihat dari jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemerintah Daerah dibandingkan dengan jumlah kasus lingkungan yang ada. Cakupan ini dilihat dari jumlah usaha da-tau kegiatan wajib AMDAL yang telah diawasi dibandingkan dengan jumlah seluruh usaha da-tau kegiatan wajib AMDAL. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 4 menyatakan bahwa setiap rencana usaha da-tau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPL. Pada Pasal 65 Ayat (1) ditegaskan bahwa SPPL bagi usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha diintegrasikan kedalam Nomor Induk Berusaha. Sedangkan, pada Pasal 65 Ayat (2) ditegaskan bahwa SPPL bagi kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dilakukan melalui pengisian formulir yang menjadi dasar penerbitan Persetujuan Pemerintah.

Dalam rangka menindaklanjuti aturan tersebut, terhitung sejak tanggal 3 Juli 2021 kewenangan penerbitan SPPL bagi pelaku usaha telah diserahterimakan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh kepada DPM-PTSP Kota Payakumbuh. Sedangkan, untuk penerbitan SPPL bagi Instansi Pemerintah masih menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh. Adapun uraian terkait jumlah usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan hidup dan kasus penegakan hukum yang ditangani di Kota Payakumbuh dari tahun 2020-2024.

**Tabel 2.14** Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan di Kota Payakumbuh Tahun 2020 – 2024

| NO | URAIAN | SATUAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan | Dokumen | 207 | 108 | 283 | 2.362 | 2169 |
| 2. | Kasus Penegakan Hukum Lingkungan | Kasus | 10 | 8 | 3 | 17 | - |

| NO | URAIAN | SATUAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Kasus Penegakan Hukum Lingkungan Diselesaikan | Kasus | 10 | 8 | 3 | 3 | - |
| 4. | Surat Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dikeluarkan | Surat Rekomendasi | 185 | 92 | 281 | 2.353 | 2163 |
| 5. | Usaha Pengendalian Lingkungan/ Usaha Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) | Surat Rekomendasi | 18 | 16 | 2 | 9 | 6 |

**Sumber:** Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2024

Kasus penegakan hukum lingkungan dilaksanakan apabila ada pengaduan yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup, sehingga setiap tahun jumlahnya berbeda. Setiap kasus pengaduan yang masuk dapat diselesaikan oleh Tim Verifikasi Pengaduan yang beranggotakan perwakilan dari beberapa Perangkat Daerah teknis terkait. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, pada Pasal 22 disebutkan bahwa setiap usaha da-tau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.

Pada Pasal 34 Ayat (1) disebutkan bahwa setiap usaha da-tau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL. Di mana, pada Pasal 34 Ayat (2) ditegaskan bahwa Pemenuhan standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup. Sementara itu, pada Pasal 35 Ayat (1) disebutkan bahwa usaha da-tau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha.

## D). PERSENTASE RUMAH TINGGAL BERSANITASI

Jumlah rumah tinggal bersanitasi selalu meningkat seiring dengan peningkatan pembangunan sanitasi perkotaan yang merupakan sebagai salah satu prioritas penanggulangan wilayah kumuh di Kota Payakumbuh. Rumah tinggal berakses sanitasi layak dirumuskan sebagai rumah tangga/KK yang memperoleh akses sanitasi dasar: tangki septik, baik individu maupun komunal.

**Tabel 2.15** Rumah Tinggal Bersanitasi layak Kota Payakumbuh Tahun 2022-2024

| No | Uraian | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi | 28.783 | 28.998 | 30.746 |
| 2. | Jumlah Rumah Tinggal | 33.046 | 33.046 | 34.967 |
| 3. | Persentase | 87,1 | 87,75 | 87,93 |

**Sumber:** website BPS Provinsi Sumatera Barat 2025

## E). RUMAH TANGGA DENGAN AKSES SANITASI AMAN

Akses sanitasi aman merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan sanitasi. Sebelumnya istilah akses sanitasi layak digunakan sebagai dasar kinerja, maka sejak tahun 2022 indikator yang dipakai adalah akses sanitasi aman. Berdasarkan data di BPS, sanitasi aman pada tahun 2022 sebesar 15.38%, dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2024.

**Tabel 2.16** Rumah Tinggal Akses Sanitasi Aman Kota Payakumbuh Tahun 2022-2024

| NO | URAIAN | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi Aman | 5.082 | 5.403 | 7.997 |
| 2. | Jumlah Rumah Tinggal | 33.046 | 33.046 | 34.967 |
| 3. | Persentase | 15,38 | 16,35 | 19,48 |

**Sumber:** Hasil Susenas 2024

## F). PERSENTASE PENGELOLAAN SAMPAH

Jumlah sampah Kota Payakumbuh di Tahun 2024 adalah 34.821, 66 ton, namun yang terkelola sebesar 33.557,87 ton atau 96,37%, melalui penangangan di TPA sebesar 27.971,23 ton (80,32%) dan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali, serta pendaur ulangan melalui mekanisme bank sampah, TPST/TPS3R, sektor Informal (lapak/pengepul/pemulung) sebesar 5.586,67 ton (16,04%). Untuk memaksimalkan pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Payakumbuh membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagai sarana pemrosesan akhir sampah, apalagi semenjak akhir tahun 2023 TPA Regional Payakumbuh tidak beroperasi lagi.

**Tabel 2.17** Volume dan Produksi Sampah Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Timbulan sampah (Ton/Tahun) | 35679,04 | 36063,06 | 36608,81 | 34041,5 | 34.821,66 |
| 2 | Jumlah Pengurangan Sampah (Ton/Tahun) | 5791,7 | 6032,27 | 5772,06 | 5426,52 | 5.586,67 |
| 3 | Jumlah Penanganan Sampah/ terangkut ke TPA (Ton/Tahun) | 28.037 | 29884,16 | 30678,24 | 27188,85 | 27.971,23 |
| 4 | Jumlah sampah terkelola (Ton/Tahun) | 33.828,70 | 35.916,43 | 36.450,30 | 32.615,37 | 33.557,90 |
| | Persentase Sampah Terkelola | 94,81% | 99,59% | 99,57% | 95,81% | 96,37% |

**Sumber:** Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2024

## G). OPERASIONALISASI TPA/TPS-3R/TPS

Dalam mengelola sampah di Kota Payakumbuh dioperasionalkan TPS-3R yang berjumlah 7 unit dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang berlokasi di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (UPT TPA Sampah Regional) yang dilakukan dengan *System Sanitary Landfill*, di mana sebelumnya dilakukan melalui *System Open Dumping* untuk melayani pengolahan sampah 4 Kab/Kota yaitu Kota Payakumbuh, Kabupaten 50

Kota, Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam. Namun dengan kejadian longsor pada akhir tahun 2023 dan *over capacity,* TPA Regional Payakumbuh ditutup.

**Tabel 2.18** Jumlah TPS 3R per-kecamatan Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

| NO | KECAMATAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Payakumbuh Timur | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Payakumbuh Barat | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3. | Payakumbuh Utara | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Payakumbuh Selatan | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Lampasi Tigo Nagori | - | - | - | - | - |
| | Jumlah | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 |

**Sumber:** Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2024

Hal ini menyebabkan permasalahan persampahan di Kota Payakumbuh berlanjut, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kota Payakumbuh mengambil langkah-langkah penanganan darurat sampah seperti kerjasama dengan Pemerintah Kota Padang sehingga sampah Kota Payakumbuh dapat dikelola di TPA Air Dingin Padang, dan memperbanyak pembangunan TPST sebagai tempat pengelolaan sampah terpadu.

**Gambar 2.7** TPA Regional Payakumbuh



**Sumber:** Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2023

Disamping itu, Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan persampahan ini telah memiliki 35 TPS dengan daya tampung 130,37 ton. Jika dirasiokan sebesar 0,87 atau memiliki daya tampung TPS sebesar 0,87 ton per 1000 orang.

**Tabel 2.19** Rasio Daya Tampung TPS per Satuan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2020 – 2024

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah tempat pembuangan sampah TPS (unit) | 144 | 142 | 104 | 135 | 135 |
| 2. | Jumlah Daya Tampung TPS (ton) | 218,58 | 125,00 | 117,98 | 130,37 | 130,37 |
| 3. | Jumlah penduduk | 139.576 | 141.184 | 143.283 | 145.726 | 148.154 |
| 4. | Rasio | 1,57 | 1,52 | 0,82 | 0,90 | 0,87 |

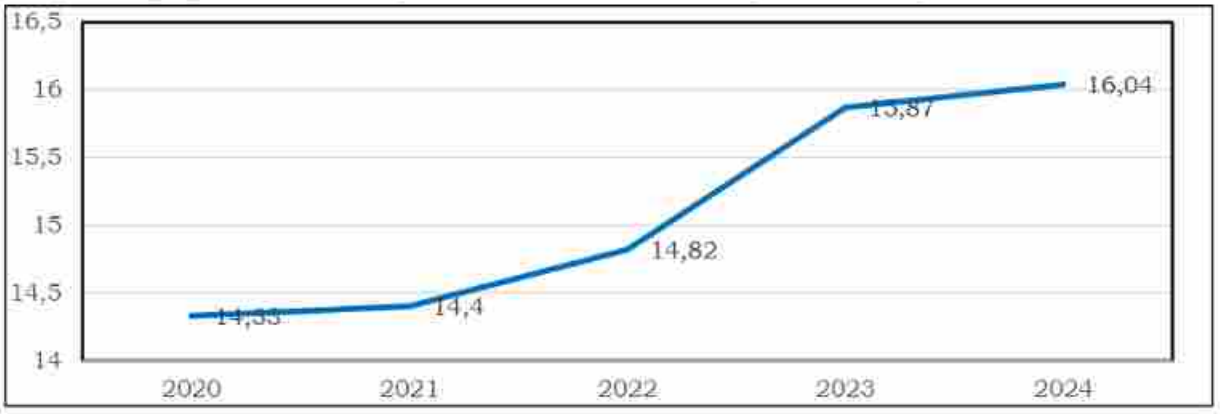
**Sumber:** Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2024

## H). TIMBULAN SAMPAH TEROLAH DI FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH

Persampahan merupakan persoalan yang dihadapi oleh setiap daerah, khususnya kota-kota dengan penduduk yang padat dan lahan yang terbatas. Salah satu solusi pengelolaan sampah adalah pengolahan sampah di setiap fasilitas, khususnya pengolahan di tingkat masyarakat pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Bank Sampah dan lain-lain dengan menggunakan teknologi pengolahan yang ramah lingkungan.

Pemanfaatan teknologi pengolahan sampah menjadi solusi utama bagi daerah perkotaan seperti Kota Payakumbuh, khususnya semenjak tidak bisa dimanfaatkannya lagi TPA Regional di Kelurahan Kapalo Koto. Pemerintah sudah berupaya melakukan edukasi kepada masyarakat dalam penanganan sampah pada tingkat rumah tangga, tapi belum optimal, karena perlu waktu yang panjang untuk merubah perilaku masyarakat dalam mengolah sampah. Timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah Kota Payakumbuh digambarkan sebagai berikut.

**Diagram 2.10** Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2020-2024




**Sumber:** Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2025

Dari data di atas, timbulan sampah yang terolah masih rendah, mencapai 15,87% pada tahun 2023 dan tahun 2024 meningkat menjadi 16,04%.

## I). PROPORSI RT DENGAN LAYANAN PENUH PENGUMPULAN SAMPAH

Layanan pengumpulan sampah di Kota Payakumbuh sudah mencapai 100 persen, karena dengan wilayah perkotaan yang tidak terlalu luas dan kebijakan pemerintah dalam pengumpulan sampah oleh kelurahan dengan adanya fasilitas becak motor di setiap kelurahan. Setiap hari becak motor secara rutin menjemput sampah ke rumah-rumah masyarakat, kemudian mengumpulkan pada transfer depo sebelum diangkut ke TPA. Dengan tidak optimalnya TPA saat ini, maka pola pengelolaan sampah lebih diutamakan pada tingkat masyarakat melalui pengomposan dan pemilahan. Sebagaimana dikemukakan di atas, pola pengelolaan sampah harus beralih menggunakan teknologi modern, sehingga tidak lagi menimbulkan residu atau sisa sampah yang perlu dibuang.

## J). LIMBAH B3

Pada tahun 2023 tidak ada izin mengelola limbah B3 yang diterbitkan bagi perusahaan di kota payakumbuh. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebelum memulai kegiatannya penanggung jawab usaha da-tau kegiatan harus menyusun dokumen lingkungan (amdal/ ukl-upl) terlebih dahulu. Dimana selain dipersyaratkan untuk memiliki persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), pemrakarsa juga diwajibkan untuk menyusun rincian teknis limbah B3. Adapun beberapa usaha da-tau kegiatan di kota payakumbuh yang telah memiliki rincian teknis pada tahun 2023 dapat dilihat pada berikut.

**Diagram 2.11** Usaha dan atau Kegiatan Di Kota Payakumbuh Yang Telah Memiliki Rincian Teknis




**Sumber:** DIKPLHD Kota Payakumbuh, 2023

## 6). RESILIENSI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM

Resiliensi dalam konteks bencana dan perubahan iklim adalah kemampuan individu, komunitas, institusi, dan sistem untuk mengantisipasi, merespons, menyesuaikan diri, dan pulih dengan cepat dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh bencana maupun perubahan iklim, baik yang bersifat tiba-tiba (seperti banjir atau gempa bumi) maupun bertahap (seperti kekeringan atau kenaikan permukaan laut).

Resiliensi bukan sekadar kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi bencana, melainkan mencakup serangkaian langkah menyeluruh yang dimulai dari antisipasi, yakni kemampuan untuk mengidentifikasi potensi risiko serta merancang strategi pencegahan yang tepat. Selanjutnya, kesiapsiagaan menjadi kunci, yaitu melalui penyusunan rencana dan pelatihan yang matang agar masyarakat siap menghadapi berbagai kemungkinan bencana. Ketika bencana benar-benar terjadi, respons cepat dan efektif diperlukan untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Setelah fase darurat, proses pemulihan dijalankan dengan membangun kembali sistem sosial dan lingkungan yang terdampak agar dapat kembali

berfungsi secara normal. Di tengah dinamika perubahan iklim yang terus berlangsung, resiliensi juga menuntut kemampuan adaptasi, yaitu penyesuaian cara hidup, kebijakan, dan sistem sosial secara berkelanjutan guna menghadapi tantangan jangka panjang.

Perubahan iklim telah memicu peningkatan kejadian bencana alam, baik dari segi frekuensi maupun intensitas. Curah hujan yang semakin tidak menentu dan ekstrem kerap menimbulkan banjir, terutama di wilayah yang memiliki sistem drainase yang tidak memadai. Di sisi lain, musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan kekeringan parah, yang berdampak langsung pada sektor pertanian dan pasokan air bersih. Kondisi suhu yang terus meningkat juga memperbesar risiko terjadinya kebakaran hutan. Selain itu, naiknya permukaan air laut menjadi ancaman serius bagi kawasan pesisir yang rentan tergenang. Tak hanya itu, perubahan pola iklim turut mengacaukan musim tanam, sehingga mempengaruhi produktivitas pertanian dan mengganggu ketahanan pangan masyarakat.

Provinsi Sumatera Barat memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi, terutama akibat letaknya yang berada di jalur patahan Sumatera dan zona subduksi, sehingga rawan gempa bumi. Selain itu, topografi pegunungan membuat wilayah ini rentan terhadap banjir dan longsor, khususnya saat musim hujan. Aktivitas vulkanik dari gunung api aktif seperti Gunung Marapi dan Gunung Talang juga menjadi potensi bencana tersendiri. Di sisi lain, perubahan iklim menyebabkan pergeseran musim tanam, yang berdampak pada sektor pertanian dan ketahanan pangan. Untuk memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerapkan pendekatan mitigasi dan adaptasi melalui berbagai langkah, antara lain:

1. Mengintegrasikan isu resiliensi dalam dokumen perencanaan jangka panjang RPJPD 2025–2045.
2. Mengaktifkan BPBD provinsi dalam penyuluhan, pelatihan, dan pemetaan risiko bencana.
3. Mendorong pembentukan dan penguatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA).
4. Melakukan revitalisasi daerah aliran sungai (DAS), penanaman pohon, serta pengelolaan tata ruang berbasis risiko bencana.

Payakumbuh berada di daerah pegunungan dan dikelilingi gunung berapi, menjadikannya rawan banjir lokal, longsor, dan angin kencang, terutama saat cuaca ekstrem. Kerentanan ini diperparah oleh kondisi drainase dan aliran sungai yang krusial bagi pengendalian bencana. Pemerintah Kota telah melakukan berbagai langkah seperti:

1. Pemetaan wilayah rawan bencana dan edukasi masyarakat, khususnya di wilayah rentan seperti Lamposi dan Payakumbuh Timur.
2. Siaga 24 jam melalui piket dan patroli, serta penerapan sistem respons cepat.
3. Kerja sama dengan sekolah dan warga untuk menumbuhkan budaya siaga bencana.

4. Perbaikan infrastruktur drainase guna mengurangi risiko banjir.
5. Penerapan pertanian adaptif untuk menyesuaikan diri dengan perubahan iklim.

## A). PERUBAHAN IKLIM

Beragam aktivitas manusia menyebabkan peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca (GRK) di atmosfer bumi. Sumber penghasil gas rumah kaca seperti penggunaan energi listrik, aktivitas kendaraan bermotor, penggunaan pestisida pada pertanian, kotoran hewan, limbah sisa makanan dan sumber lainnya. Seperti yang dibahas sebelumnya bahwa Kota Payakumbuh mempunyai kerentanan yang tinggi terhadap cuaca ekstrim.

Berdasarkan data dari signsmart.menlhk.go.id, emisi gas rumah kaca pada Kota Payakumbuh dari sektor energi, IPPU, pertanian, kehutanan dan limbah, seperti terlihat pada di bawah ini. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa emisi gas rumah kaca di Kota Payakumbuh secara umum berasal dari kegiatan pertanian.

**Tabel 2.20** Emisi Gas Rumah Kaca Kota Payakumbuh (satuan Gg CO2) Tahun 2020-2024

| NO. | ITEM | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energi | 94,67 | 121,69 | 143,23 | 133,69 | 0,00 |
| 2 | IPPU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pertanian | 51,03 | 19,61 | 19,61 | 51,42 | 50,00 |
| 4 | Kehutanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Limbah | 8,55 | 12,06 | 12,48 | 12,63 | 12,78 |
| | T O T A L | 154,25 | 155,09 | 175,32 | 197,56 | 62,78 |

**Sumber:** signsmart.menlhk.go.id, 2024

Berdasarkan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) KLHK, 44 kelurahan mempunyai kerentanan perubahan iklim kategori sedang dan 3 lainnya ber-kategori tinggi, seperti terlihat pada gambar diatas. Oleh karena itu, diperlukan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

## B). PERSENTASE PENURUNAN EMISI GRK

### (1) PERSENTASE PENURUNAN EMISI GRK (KUMULATIF)

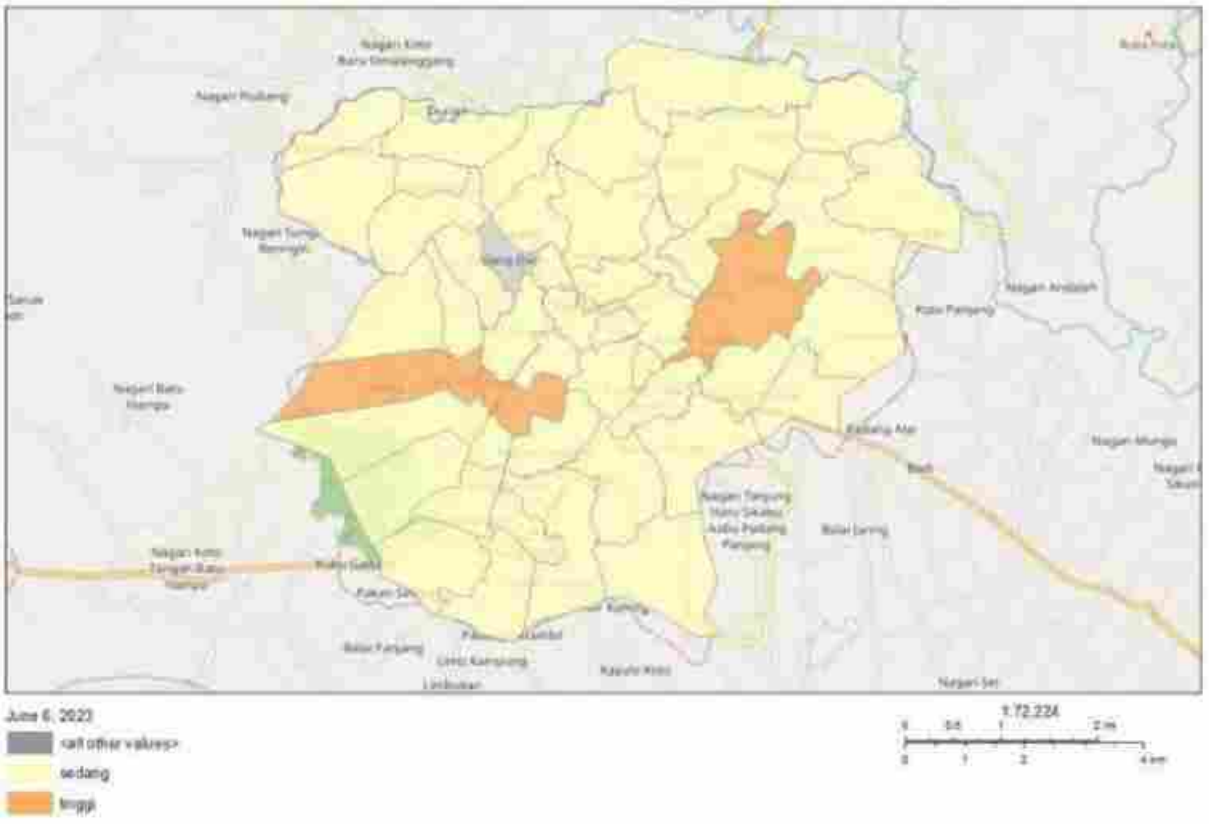
Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%) adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar penurunan emisi GRK yang telah dicapai secara total selama periode waktu tertentu, dibandingkan dengan skenario *business-as-usual* (BAU) — yaitu skenario di mana tidak ada intervensi kebijakan mitigasi iklim. Indikator ini sangat krusial karena mencerminkan sejauh mana komitmen iklim—baik nasional maupun daerah—telah benar-benar dijalankan dalam dokumen seperti NDC atau RAD-GRK. Selain itu, angka penurunan emisi yang tercatat menunjukkan kontribusi konkret Indonesia terhadap tujuan Perjanjian Paris untuk membatasi pemanasan global di kisaran 1,5–2 °C. Terakhir, data ini menjadi dasar penting dalam menilai dan menyempurnakan kebijakan rendah karbon serta langkah-langkah pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor. Saat

ini, tidak ada data yang yang tersedia tentang data persentase penurunan emisi gas rumah kaca komulatif (%) untuk Kota Payakumbuh.

### (2) PERSENTASE PENURUNAN EMISI GRK (TAHUNAN)

Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan adalah indikator yang menunjukkan berapa besar penurunan emisi GRK dalam satu tahun dibandingkan tahun sebelumnya, biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase (%). Indikator ini penting untuk memantau progres suatu wilayah—baik negara, provinsi, maupun kota—dalam mengurangi emisi GRK yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Angka ini menunjukkan sejauh mana program dan kebijakan rendah karbon (seperti penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, dan penghijauan) berhasil mengurangi emisi dalam periode tahunan. Saat ini, tidak ada data yang tersedia tentang data persentase penurunan emisi gas rumah kaca komulatif (%) tahunan untuk Kota Payakumbuh.

**Gambar 2.8** Peta Potensi Kerentanan terhadap Perubahan Iklim




Sumber: SIDIK KLHK, 2023

## C). KEBENCANAAN

Berdasarkan pemetaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kota Payakumbuh salah satu daerah teratas di Indonesia yang rawan terhadap berbagai ancaman dan potensi bencana, seperti banjir, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan/lahan, kekeringan dan tanah longsor, yang kemudian dilakukan Kajian Resiko Bencana (KRB) Kota Payakumbuh tahun 2022, jenis dan tingkat resiko kebencanaan di wilayah Kota Payakumbuh yang masih berlaku sampai saat ini.

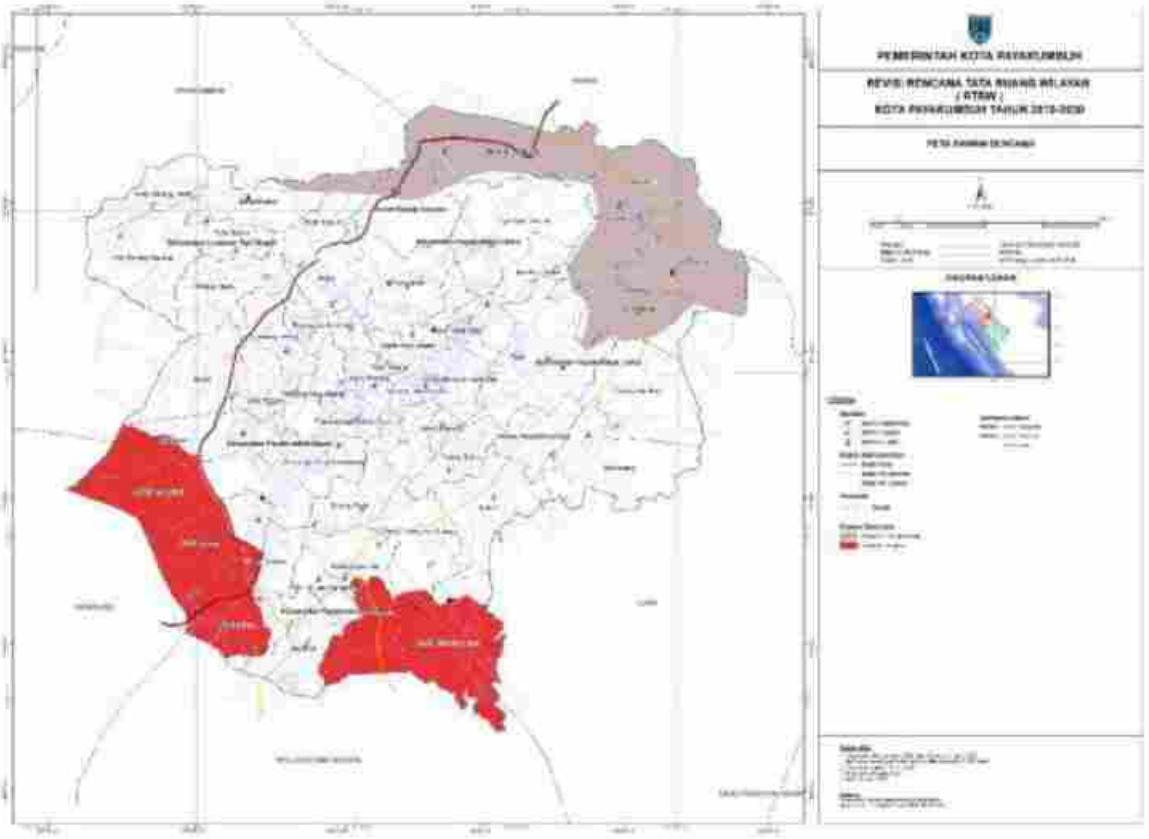
**Tabel 2.21** Jenis dan Tingkat Resiko Bencana di Kota Payakumbuh

| NO | JENIS BENCANA | KELAS BAHAYA | KELAS KERENTANAN | KELAS KAPASITAS | KELAS RESIKO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banjir | Tinggi | Sedang | Sedang | Sedang |
| 2 | Cuaca Ekstrim | Tinggi | Sedang | Sedang | Tinggi |
| 3 | Gempa Bumi | Tinggi | Sedang | Sedang | Tinggi |
| 4 | Kebakaran Hutan/ Lahan | Rendah | Rendah | Sedang | Sedang |
| 5 | Kekeringan | Sedang | Sedang | Sedang | Sedang |
| 6 | Tanah Longsor | Rendah | Rendah | Sedang | Rendah |

**Sumber:** Kajian Resiko Bencana Kota Payakumbuh, 2022

Dari kajian resiko bencana yang meliputi analisis potensi bahaya, kerentanan, kapasitas daerah, hingga resiko, maka terlihat bahwa tingkat resiko tertinggi adalah bencana cuaca ekstrim dan gempa bumi, dan terendah adanya tanah longsor. Walaupun demikian mekanisme perlindungan dan strategi dalam menghadapi bencana serta menyusun rencana tindak tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mengeliminir kerugian yang besar kepada masyarakat.

**Gambar 2.9** Peta Wilayah Rawan Bencana Kota Payakumbuh



**Sumber:** Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010-2030

## D). PERKIRAAN MENGENAI DAMPAK DAN RESIKO LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan dokumen KRB Kota Payakumbuh, resiko multi bahaya dilakukan untuk mengetahui potensi akumulasi resiko 7 bencana pada tiap-

tiap kecamatan di Kota Payakumbuh. Kajian tersebut Rekapitulasi resiko multi bahaya Kota Payakumbuh dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

**Tabel 2.22** Potensi Resiko Multi Bahaya di Kota Payakumbuh

| No | KECAMATAN | RISIKO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LUAS | | | | KELAS |
| | | RENDAH | SEDANG | TINGGI | TOTAL | |
| 1 | Lamposi Tigo Nagari | 246,73 | 128,74 | 566,53 | 942,00 | TINGGI |
| 2 | Payakumbuh Barat | 597,59 | 1.006,94 | 301,47 | 1.906,00 | TINGGI |
| 3 | Payakumbuh Selatan | 582,63 | 885,31 | 0,72 | 1.468,66 | SEDANG |
| 4 | Payakumbuh Timur | 755,19 | 1.421,63 | 96,60 | 2.273,42 | TINGGI |
| 5 | Payakumbuh Utara | 461,02 | 420,01 | 571,89 | 1.452,92 | TINGGI |
| | KOTA PAYAKUMBUH | 2.643,16 | 3.862,63 | 1.537,21 | 8.043,00 | TINGGI |

**Sumber:** KRB BPBD, 2023

Sebagaimana terlihat pada tabel 2.22, Kota Payakumbuh memiliki total luas resiko multi bahaya sebesar 8.043 Ha, di mana 2.643 Ha diantaranya berada pada kelas resiko Rendah, 3.862,63 Ha berada pada kelas resiko Sedang, dan 1.537,21 Ha berada pada kelas resiko Tinggi.

**Tabel 2.23** Indeks Resiko Bencana

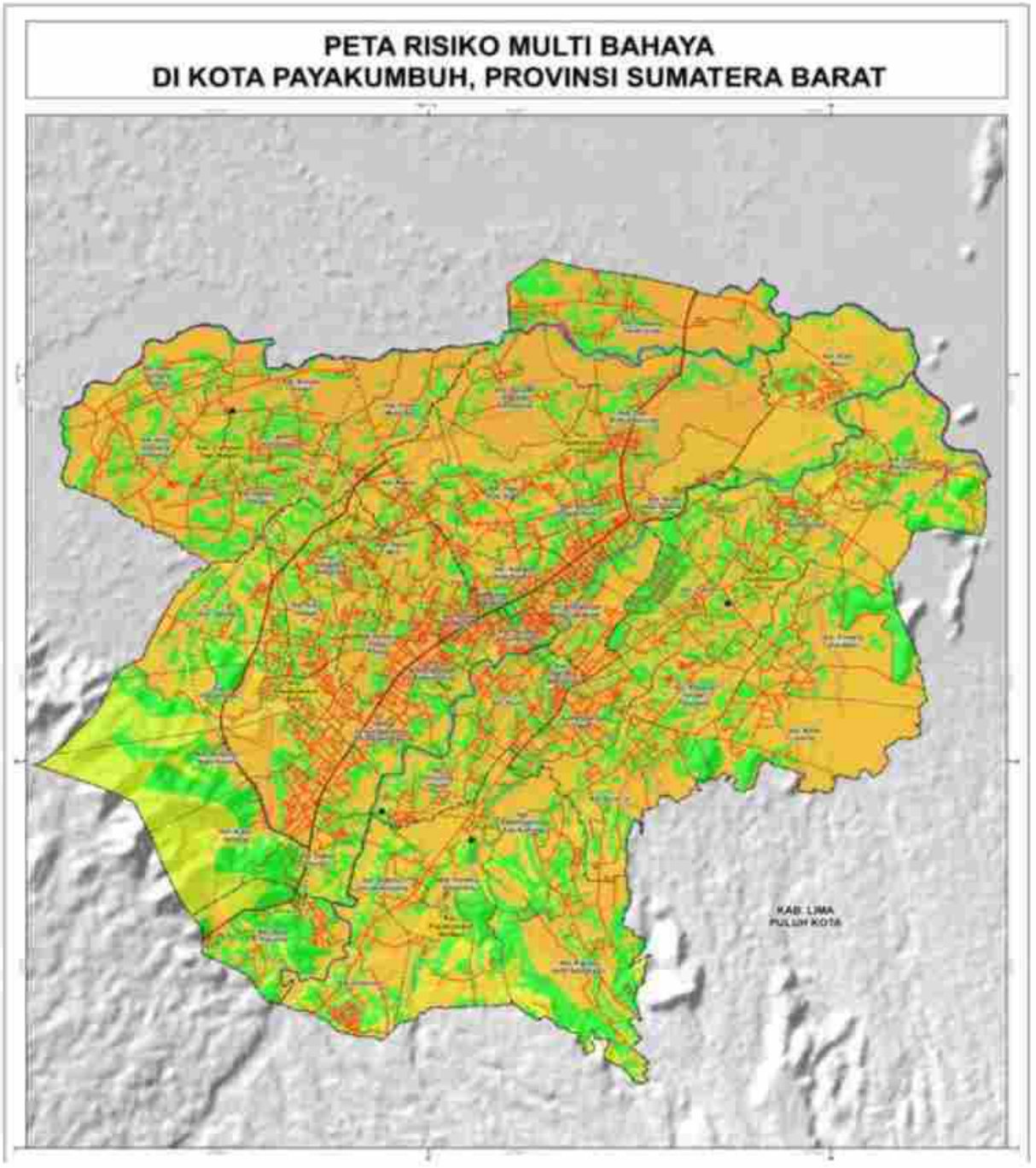
| NO | KABUPATEN/ KOTA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | KELAS RISIKO 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasaman Barat | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | TINGGI |
| 2 | Kepulauan Mentawai | 197,20 | 197,20 | 197,20 | 197,20 | 197,20 | 197,20 | 197,20 | 197,20 | TINGGI |
| 3 | Agam | 209,20 | 209,20 | 209,20 | 209,20 | 209,20 | 209,20 | 193,52 | 193,52 | TINGGI |
| 4 | Kota Padang | 209,20 | 209,20 | 191,60 | 191,60 | 169,92 | 169,92 | 181,70 | 179,03 | TINGGI |
| 5 | Pasaman | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 176,80 | 176,80 | TINGGI |
| 6 | Kota Pariaman | 171,20 | 171,20 | 171,20 | 171,20 | 171,20 | 171,20 | 171,20 | 157,28 | TINGGI |
| 7 | Padang Pariaman | 196,80 | 196,80 | 184,11 | 184,11 | 180,72 | 167,21 | 156,73 | 156,73 | TINGGI |
| 8 | Pesisir Selatan | 189,60 | 189,60 | 189,60 | 189,60 | 189,60 | 189,60 | 169,42 | 152,96 | TINGGI |
| 9 | Dharmasraya | 143,20 | 143,20 | 143,20 | 143,20 | 143,20 | 143,20 | 137,69 | 137,69 | SEDANG |
| 10 | Solok | 137,20 | 137,20 | 137,20 | 137,20 | 137,20 | 137,20 | 137,20 | 137,20 | SEDANG |
| 11 | Solok Selatan | 137,20 | 137,20 | 137,20 | 137,20 | 137,20 | 137,20 | 137,20 | 137,20 | SEDANG |
| 12 | Kota Bukittinggi | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 128,01 | SEDANG |
| 13 | Tanah Datar | 125,20 | 125,20 | 125,20 | 125,20 | 125,20 | 125,20 | 125,20 | 125,20 | SEDANG |
| 14 | Lima Puluh Kota | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | SEDANG |
| 15 | Kota Solok | 125,20 | 125,20 | 125,20 | 125,20 | 125,20 | 125,20 | 125,20 | 115,82 | SEDANG |
| 16 | Kota Padang Panjang | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | SEDANG |
| 17 | Sijunjung | 107,20 | 107,20 | 107,20 | 107,20 | 107,20 | 107,20 | 107,20 | 107,20 | SEDANG |
| 18 | Kota Payakumbuh | 104,80 | 104,80 | 104,80 | 104,80 | 104,80 | 104,80 | 104,80 | 104,80 | SEDANG |
| 19 | Kota Sawahlunto | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 101,08 | SEDANG |

**Sumber:** Inarisk, 2023 (website BNPB, yang dirilis melalui laman *https://inarisk.bnpb.go.id/irbi)*

Berdasarkan analisis indeks resiko bencana (IRB) yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2023, dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatra Barat, IRB Kota Payakumbuh tergolong pada kelas sedang dengan nilai IRB 104,80, yaitu

peringkat 18 dari 19 Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat. Nilai IRB Kota Payakumbuh belum mengalami perubahan sejak tahun 2015. Pada tahun 2022, BPBD Kota Payakumbuh telah melakukan penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana yang menyimpulkan bahwa terdapat 7 (tujuh) jenis bencana yang ditemukan di Kota Payakumbuh, antara lain: banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan tanah longsor.

**Gambar 2.10** Peta Resiko Bencana Multi Bahaya




**Sumber:** KRB BPBD, 2023

Pemerintah Kota Payakumbuh telah melakukan penyusunan Kajian Resiko Bencana (KRB) Tahun 2023-2027. Berdasarkan dokumen KRB tersebut, maka terdapat potensi 7 (tujuh) jenis bencana di Kota Payakumbuh,

yaitu: banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan tanah longsor. Adapun matriks analisis penentuan prioritas penanganan resiko bencana dapat dilihat pada tabel 2.24 berikut.

**Tabel 2.24** Matriks Analisis Penentuan Prioritas Penanganan Resiko Bencana

| PRIORITAS PENANGANAN RISIKO BENCANA | | KELAS RISIKO BENCANA | | |
|---|---|---|---|---|
| | | RENDAH | SEDANG | TINGGI |
| KECENDRUNGAN KEJADIAN BENCANA | MENURUN | | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN; KEKERINGAN | GEMPA BUMI |
| | TETAP | | | BANJIR BANDANG |
| | MENINGKAT | TANAH LONGSOR | BANJIR | CUACA EKSTRIM |

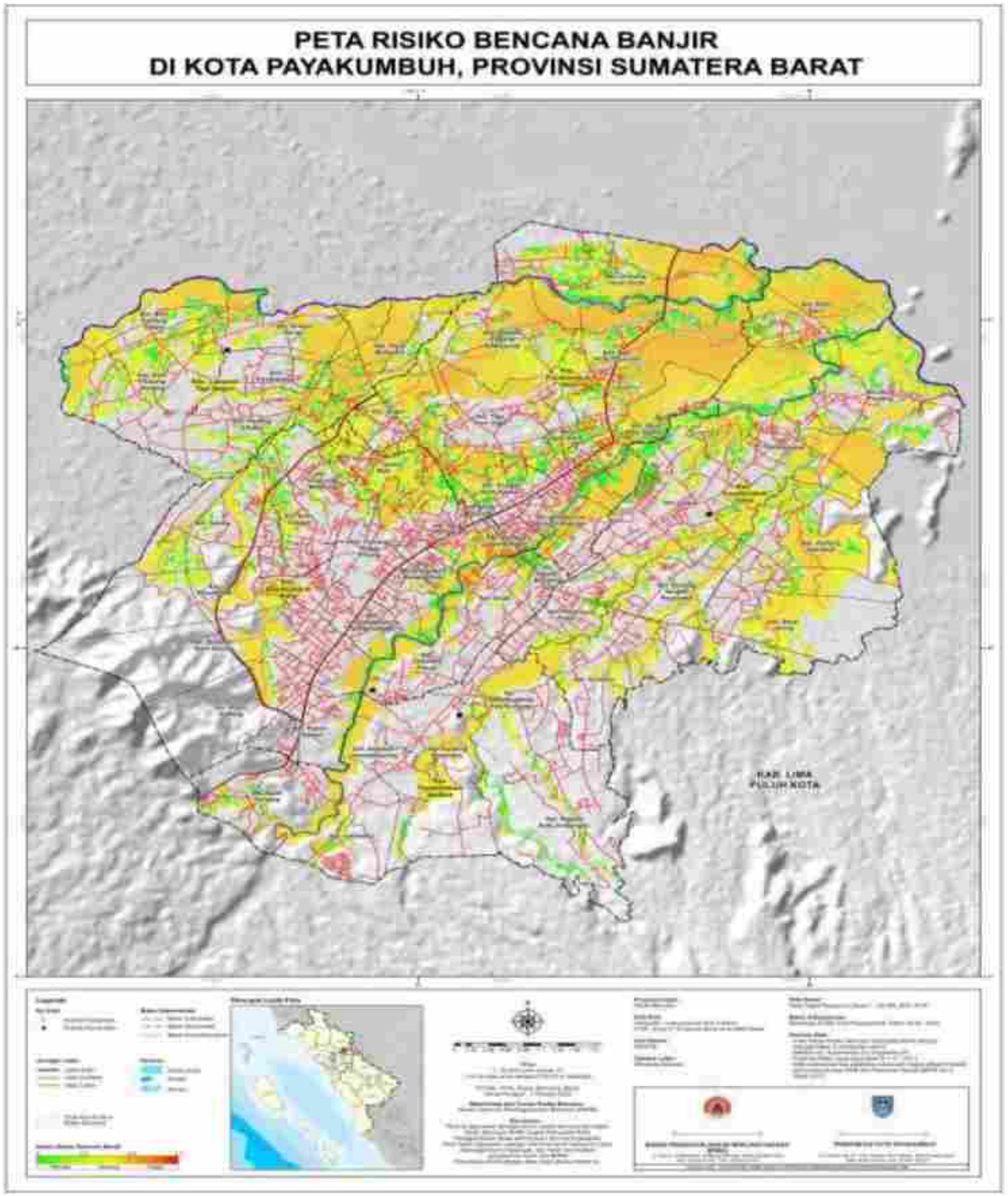
**Sumber:** KRB BPBD, 2023

Sementara itu, Hasil analisis Kajian Resiko Bencana di Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

1. Tingkat resiko bencana banjir, menunjukkan kelas Sedang pada 5 (lima) kecamatan di Kota Payakumbuh, seperti terlihat pada matriks analisis penentuan prioritas penanganan resiko bencana, Bencana banjir termasuk prioritas 1.
2. Tingkat resiko bencana banjir bandang, menunjukkan kelas Tinggi pada Kecamatan Payakumbuh Timur, kelas Rendah pada 2 (dua) kecamatan, dan kelas Rendah pada Kecamatan Payakumbuh Utara, Bencana banjir bandang termasuk prioritas 1.
3. Tingkat resiko bencana cuaca ekstrim, menunjukkan kelas Tinggi pada 3 (tiga) kecamatan dan menunjukkan kelas Sedang pada 2 (dua) kecamatan di Kota Payakumbuh. Bencana cuaca ekstrem termasuk prioritas 1.
4. Tingkat resiko bencana gempa bumi, menunjukkan kelas Tinggi pada 3 (tiga) kecamatan dan menunjukkan kelas Sedang pada 2 (dua) kecamatan di Kota Payakumbuh.
5. Tingkat resiko bencana kebakaran hutan dan lahan, menunjukkan kelas Sedang pada 2 (dua) kecamatan dan menunjukkan kelas Rendah pada 3 (tiga) kecamatan di Kota Payakumbuh.
6. Tingkat resiko bencana kekeringan, menunjukkan kelas Sedang pada 5 (lima) kecamatan di Kota Payakumbuh.
7. Tingkat resiko bencana tanah longsor, menunjukkan kelas Rendah pada 3 (tiga) kecamatan, sementara 2 (dua) kecamatan lainnya tidak

beresiko terhadap bencana tanah longsor di Kota Payakumbuh, lihat gambar di bawah ini:

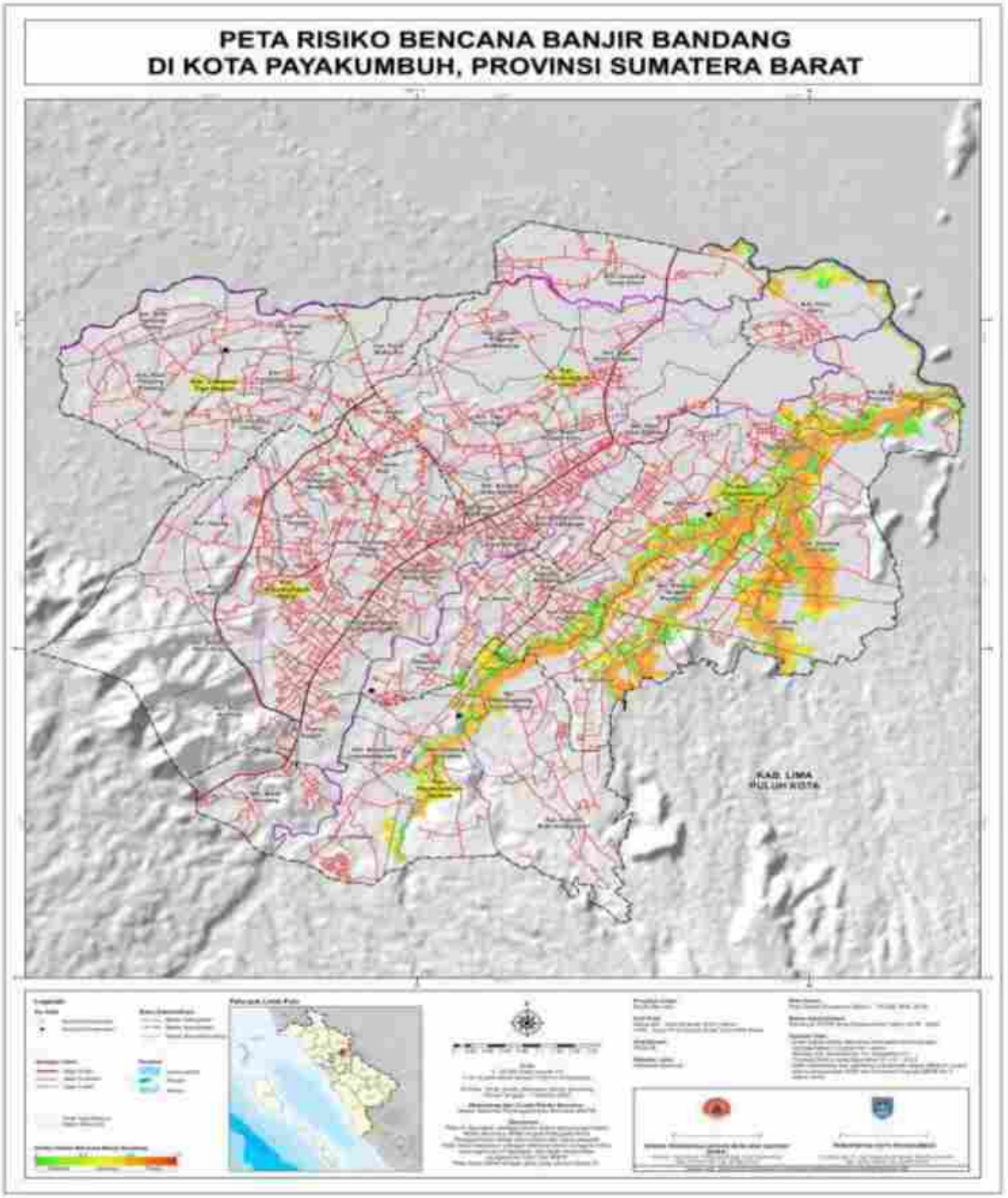
**Gambar 2.11** Peta Resiko Bencana Banjir




**Sumber:** KRB BPBD, 2023

Tingkat resiko bencana banjir, berada menunjukkan kelas Sedang pada 5 (lima) kecamatan di Kota Payakumbuh, dengan luas resiko 3.283,40 Ha. Bencana banjir termasuk prioritas 1.

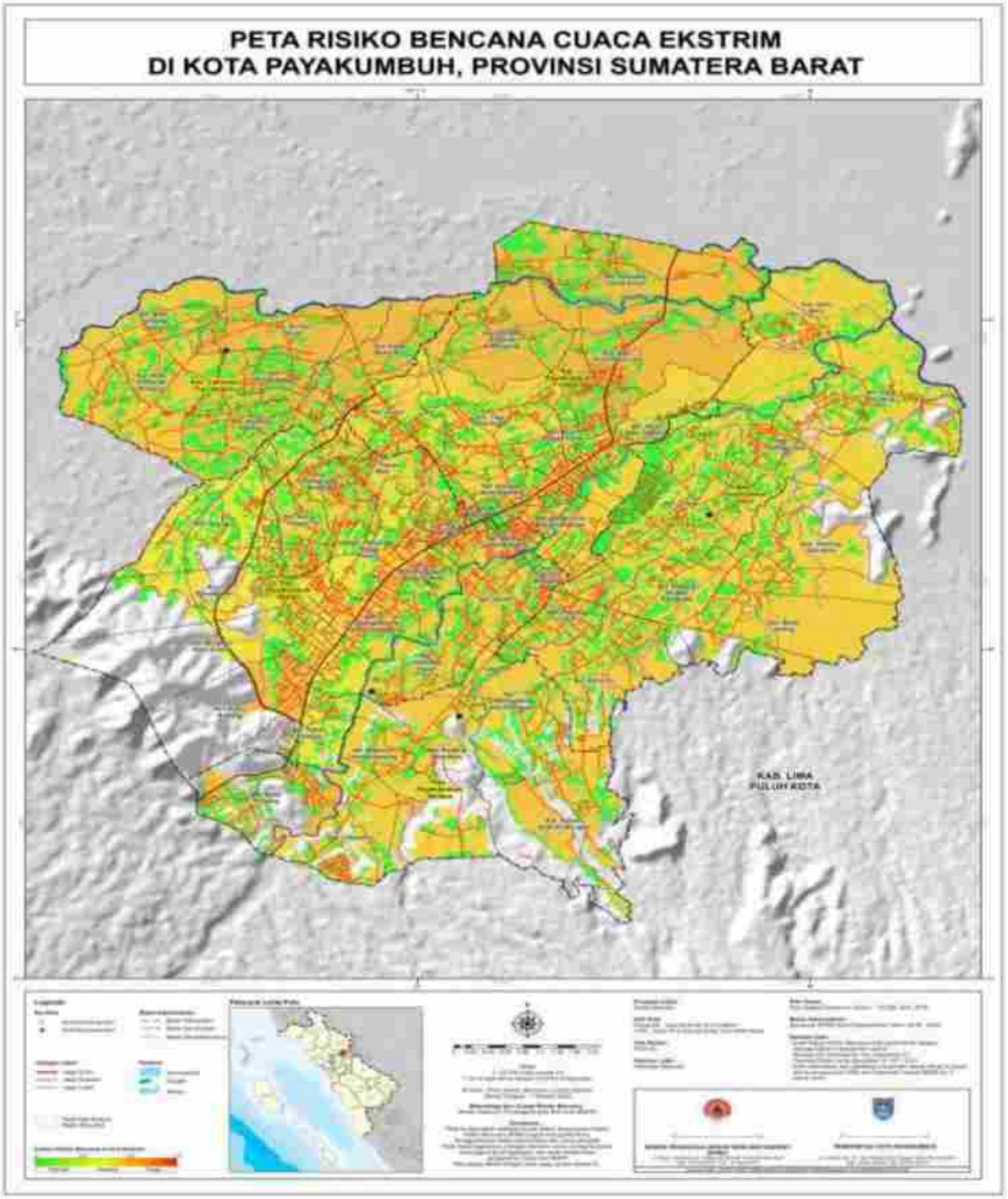
**Gambar 2.12** Peta Resiko Bencana Banjir Bandang




**Sumber:** KRB BPBD, 2023

Tingkat resiko bencana banjir bandang, menunjukkan kelas Tinggi pada Kecamatan Payakumbuh Timur, kelas Rendah pada 2 (dua) kecamatan, dan kelas Rendah pada Kecamatan Payakumbuh Utara, dengan luas resiko 743,90 Ha di mana Bencana banjir bandang termasuk prioritas 1.

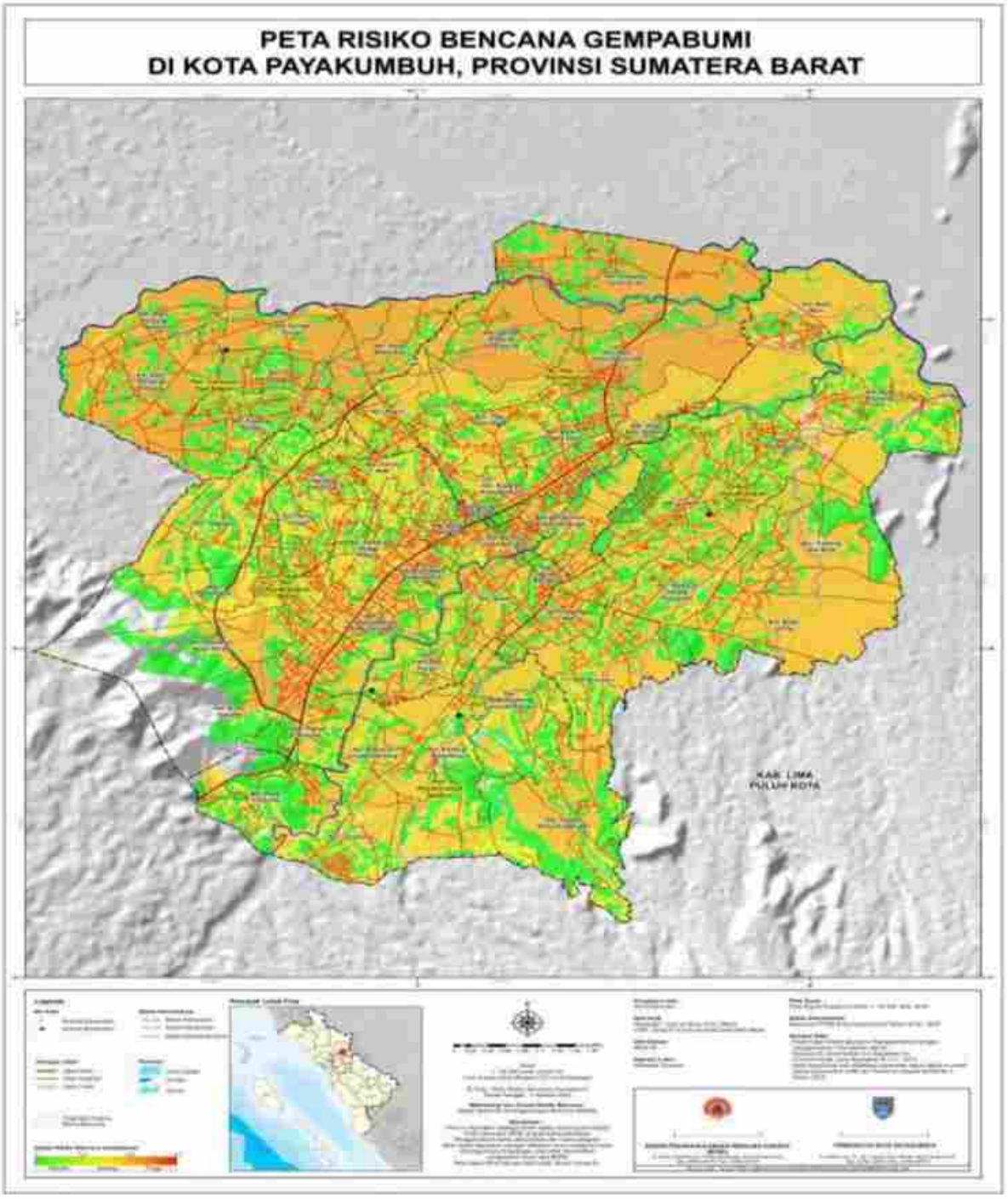
**Gambar 2.13** Peta Resiko Bencana Cuaca Ekstrem




**Sumber:** KRB BPBD, 2023

Tingkat resiko bencana cuaca ekstrim, menunjukkan kelas Tinggi pada 3 (tiga) kecamatan yakni Kecamatan lamposi Tigo Nagori, Kecamatan Payakumbuh Barat dan Kecamatan Payakumbuh Utara dan menunjukkan kelas Sedang pada 2 (dua) kecamatan di Kota Payakumbuh yakni Kecamatan Payakumbuh Selatan dan Payakumbuh Timur, dengan total luasan resiko adalah 5.931,52 Ha. Bencana cuaca ekstrem termasuk prioritas 1.

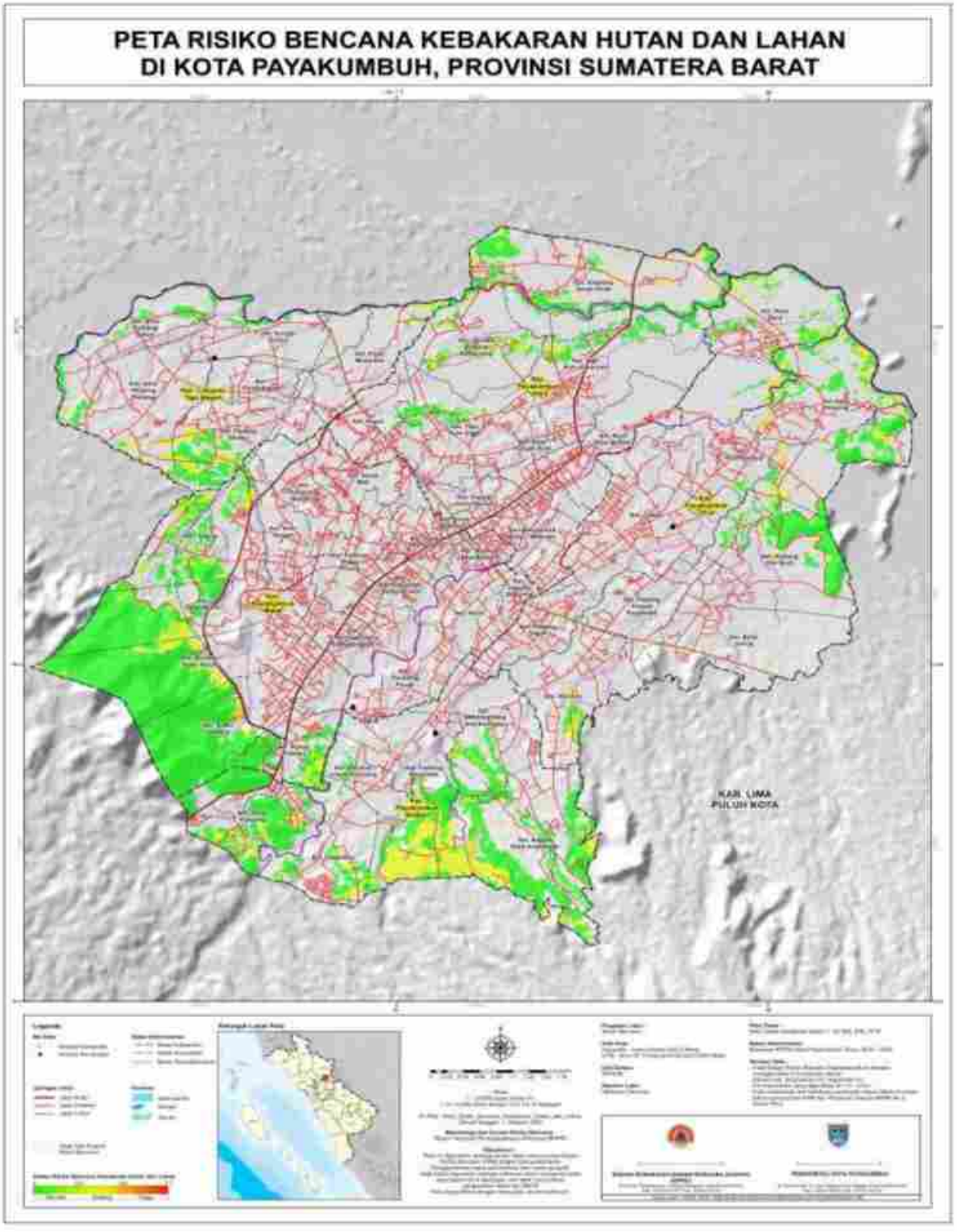
**Gambar 2.14** Peta Resiko Bencana Gempa Bumi




**Sumber:** KRB BPBD, 2023

Tingkat resiko bencana gempa bumi, menunjukkan kelas Tinggi pada 3 (tiga) kecamatan yakni Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kecamatan Payakumbuh Barat dan Kecamatan Payakumbuh Utara dan menunjukkan kelas Sedang pada 2 (dua) kecamatan di Kota Payakumbuh yakni Kecamatan Payakumbuh Selatan dan Payakumbuh Timur dengan luasan resiko adalah 6.904,25 Ha

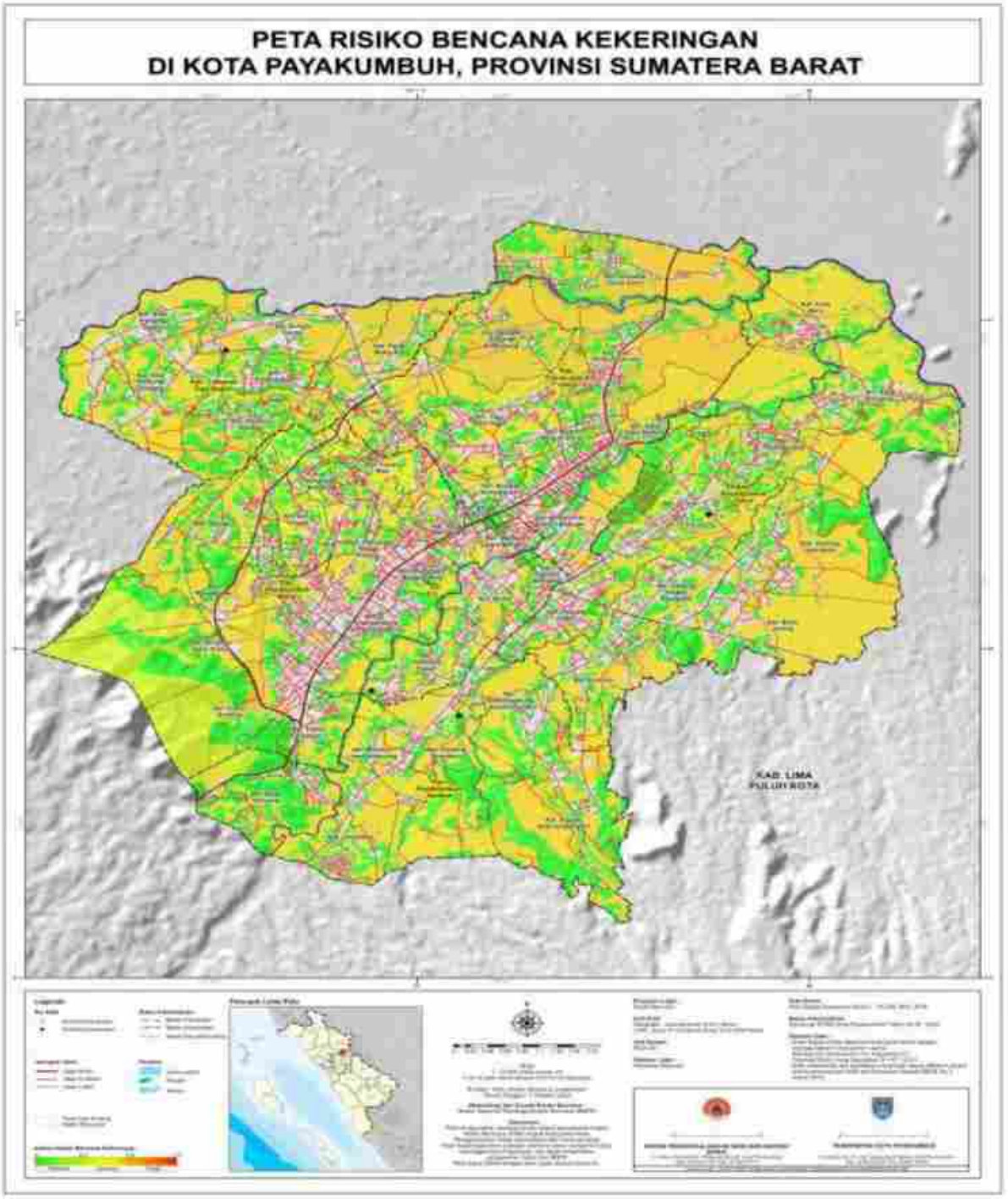
**Gambar 2.15** Peta Resiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan




**Sumber:** KRB BPBD, 2023

Tingkat resiko bencana kebakaran hutan dan lahan, menunjukkan kelas Sedang pada 2 (dua) kecamatan yakni Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan Kecamatan Payakumbuh Selatan dan menunjukkan kelas Rendah pada 3 (tiga) kecamatan di Kota Payakumbuh yakni Kecamatan Payakumbuh Barat, Payakumbuh Timur dan Payakumbuh Utara dengan total luasan resiko adalah 1.428,02 Ha.

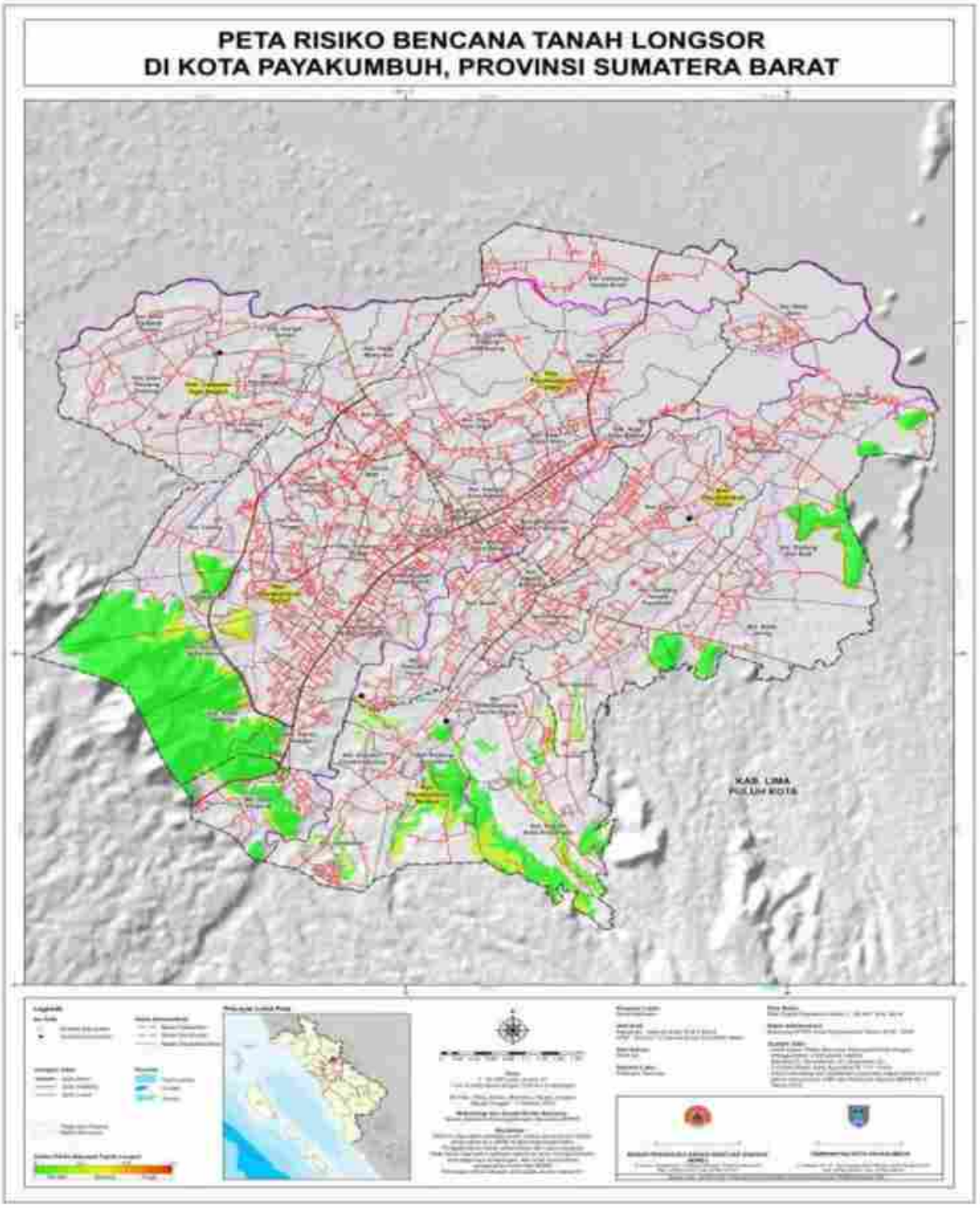
**Gambar 2.16** Peta Resiko Bencana Kekeringan




**Sumber:** KRB BPBD, 2023

Tingkat resiko bencana kekeringan, menunjukkan kelas Sedang pada 5 (lima) kecamatan di Kota Payakumbuh dengan total luasan resiko adalah 5.408,87 Ha.

**Gambar 2.17** Peta Resiko Bencana Tanah Longsor




**Sumber:** KRB BPBD, 2023

Tingkat resiko bencana tanah longsor, menunjukkan kelas Rendah pada 3 (tiga) kecamatan yakni Kecamatan Payakumbuh Barat, Payakumbuh Timur dan Payakumbuh Selatan dengan Total luas resiko adalah 761,64H, sementara 2 (dua) kecamatan lainnya tidak beresiko terhadap bencana tanah longsor di Kota Payakumbuh.

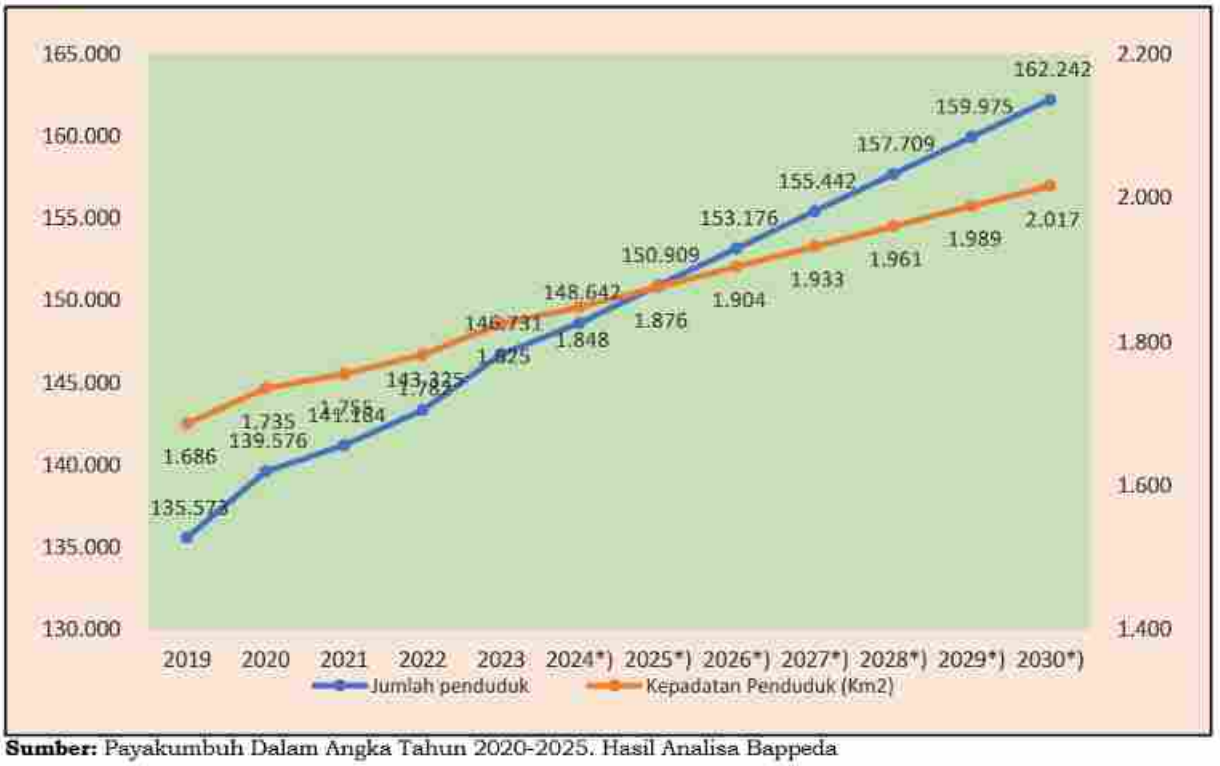
## 7). DEMOGRAFI

Aspek demografi menggambarkan dinamika kependudukan pada suatu wilayah yang meliputi jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, rasio penduduk dan kepadatan penduduk.

### A). JUMLAH PENDUDUK, PENDUDUK USIA PRODUKTIF, PENDUDUK USIA TIDAK PRODUKTIF, PENDUDUK USIA LANJUT DAN ANGKA KETERGANTUNGAN

Kepadatan Penduduk adalah ukuran jumlah penduduk yang tinggal dalam satu kilometer persegi wilayah. Semakin besar angka kepadatan penduduk maka semakin padat penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Kepadatan penduduk Payakumbuh tahun 2019 adalah 1.686 orang per kilometer persegi dan diprediksi sampai tahun 2030 menjadi 20.017 orang permeter persegi. Sedangkan jumlah penduduk Payakumbuh diprediksi mencapai 162,242 jiwa pada tahun 2030.

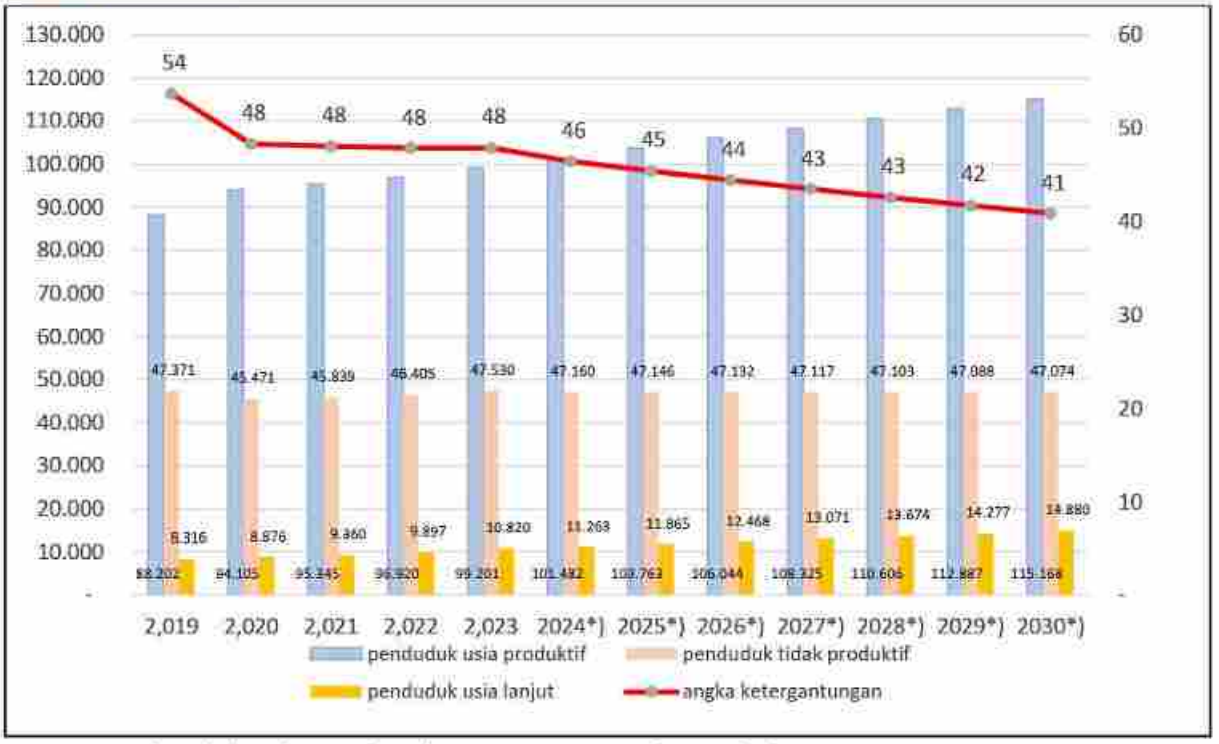
**Diagram 2.12** Jumlah dan Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2019-2030




**Sumber:** Payakumbuh Dalam Angka Tahun 2020-2025. Hasil Analisa Bappeda

Pada diagram 2.12 dapat dilihat perkembangan dan proyeksi angka ketergantungan penduduk Kota Payakumbuh sampai tahun 2030, serta pengelompokan penduduk berdasarkan usia produktif, penduduk tidak produktif dan lansia. Secara umum angka ketergantungan penduduk Payakumbuh cenderung turun dari tahun ketahun dan jumlah penduduk usia lanjut cenderung naik setiap tahunnya. Ini menjadi catatan pemerintah kota kedepannya.

**Diagram 2.13** Perkembangan dan Proyeksi Penduduk Produktif, Penduduk Tidak Produktif, Penduduk Usia Lanjut dan Angka Ketergantungan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2019-2030

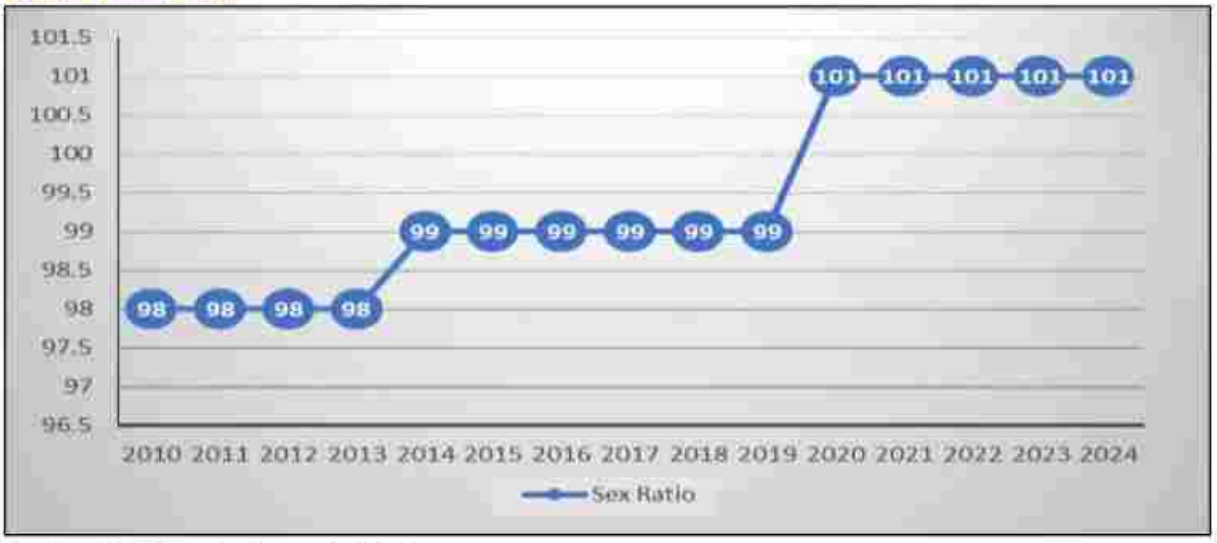



**Sumber:** Payakumbuh Dalam Angka Tahun 2020-2025 *) Angka Proyeksi

## B). RASIO PENDUDUK

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan pada waktu tertentu. Dalam 14 tahun terakhir, sex ratio penduduk Kota Payakumbuh mengalami perubahan, di mana sejak tahun 2010-2019 didominasi oleh perempuan, namun sejak tahun 2020-2024 justru jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dengan rasio 101, artinya terdapat 101 jiwa laki-laki untuk setiap 100 jiwa perempuan.

**Diagram 2.14** Perkembangan Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2010-2024




**Sumber:** BPS Kota Payakumbuh, 2025

## C). KEPADATAN PENDUDUK

Kondisi kependudukan Kota Payakumbuh setiap tahun mengalami peningkatan, di mana tercatat laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,31% pada tahun 2024. Penduduk ini bermukim tersebar pada 5 (lima) kecamatan, sehingga kepadatan penduduk pada setiap kecamatan berbeda-beda.

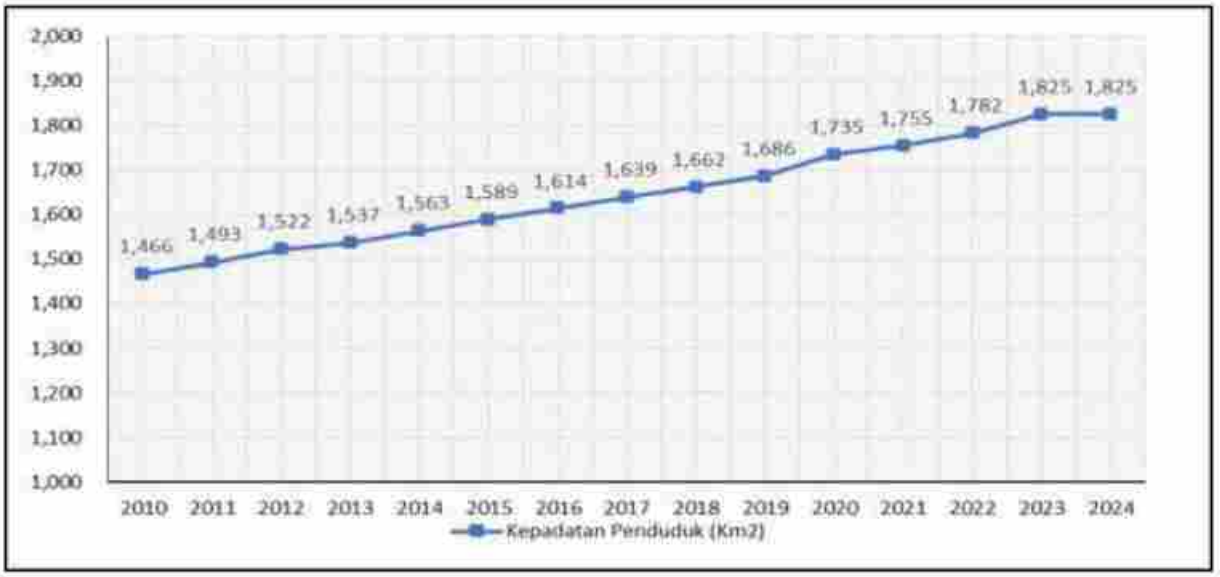
**Tabel 2.25** Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020-2024

| NO | URAIAN | LUAS (KM²) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jumlah (Jiwa) | Density (Jiwa/ Km²) | Jumlah (Jiwa) | Density (Jiwa/ Km²) | Jumlah (Jiwa) | Density (Jiwa/ Km²) | Jumlah (Jiwa) | Density (Jiwa/ Km²) | Jumlah (Jiwa) | Density (Jiwa/ Km²) |
| 1. | Payakumbuh Barat | 19,064 | 54.532 | 2.861 | 55.133 | 2.893 | 55.938 | 2.934 | 56.490 | 2.964 | 57.200 | 3.001 |
| 2. | Payakumbuh Timur | 22,730 | 29.325 | 1.290 | 29.669 | 1.305 | 32.762 | 1.441 | 30.450 | 1.339 | 12.931 | 1.357 |
| 3. | Payakumbuh Utara | 14,528 | 32.242 | 2,219 | 32.443 | 2.233 | 30.125 | 2.074 | 32.930 | 2.266 | 30.850 | 2.284 |
| 4. | Payakumbuh Selatan | 14,683 | 11.990 | 817 | 12.205 | 831 | 12.469 | 849 | 12.680 | 864 | 33.190 | 881 |
| 5. | Lamposi Tigo Nagori | 9,425 | 11.487 | 1.218 | 11.734 | 1.244 | 12.031 | 1.276 | 12.280 | 1.303 | 12.560 | 1.333 |
| | **Total** | **80,43** | **139.576** | **1.735** | **141.184** | **1.755** | **143.325** | **1.782** | **144.830** | **1.801** | **146.731** | **1.825** |

**Sumber:** Payakumbuh Dalam Angka 2021–2025, 2025

Kepadatan tertinggi tahun 2024 ada pada Kecamatan Payakumbuh Barat dengan angka 3.001 jiwa/km² diikuti oleh Kecamatan Payakumbuh Utara dengan kepadatan sebesar 2.284 jiwa/km². Kondisi ini disebabkan oleh kedua kecamatan ini merupakan pusat perdagangan barang dan jasa atau daerah pusat bisnis serta pusat pemerintahan di Kota Payakumbuh. Selain dari faktor tersebut pilihan/preferensi masyarakat terhadap lokasi pemukiman juga dipengaruhi oleh topografi wilayah seperti luas daerah Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Payakumbuh Selatan tidak terlalu berbeda, tetapi karena Kecamatan Payakumbuh Selatan lebih didominasi perbukitan, sehingga kecamatan Payakumbuh Utara lebih dipilih sebagai kawasan pemukiman dibandingkan Payakumbuh Selatan.

**Diagram 2.15** Perkembangan Kepadatan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2010-2024




**Sumber:** BPS Kota Payakumbuh, 2024

Secara keseluruhan, kepadatan penduduk Kota Payakumbuh terus mengalami kenaikan, pada tahun 2024 sudah mencapai 1.825 jiwa/km$^2$, meningkat hampir 25% dibandingkan tahun 2010 yang hanya 1.466 jiwa/km$^2$. Rata-rata setiap tahun terjadi peningkatan kepadatan penduduk sebesar 26 jiwa/km$^2$. Ini tentunya menjadi tantangan pembangunan daerah jangka panjang dalam pengaturan pemanfaatan ruang wilayah.

## D). STRUKTUR DAN KARAKTERISTIK PENDUDUK

### (1). STRUKTUR PENDUDUK BERDASARKAN USIA

Klasifikasi penduduk berdasarkan usia berguna untuk memperlihatkan karakteristik penduduk suatu daerah, dan juga untuk menunjukkan tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan) antara penduduk produktif dengan penduduk non produktif.

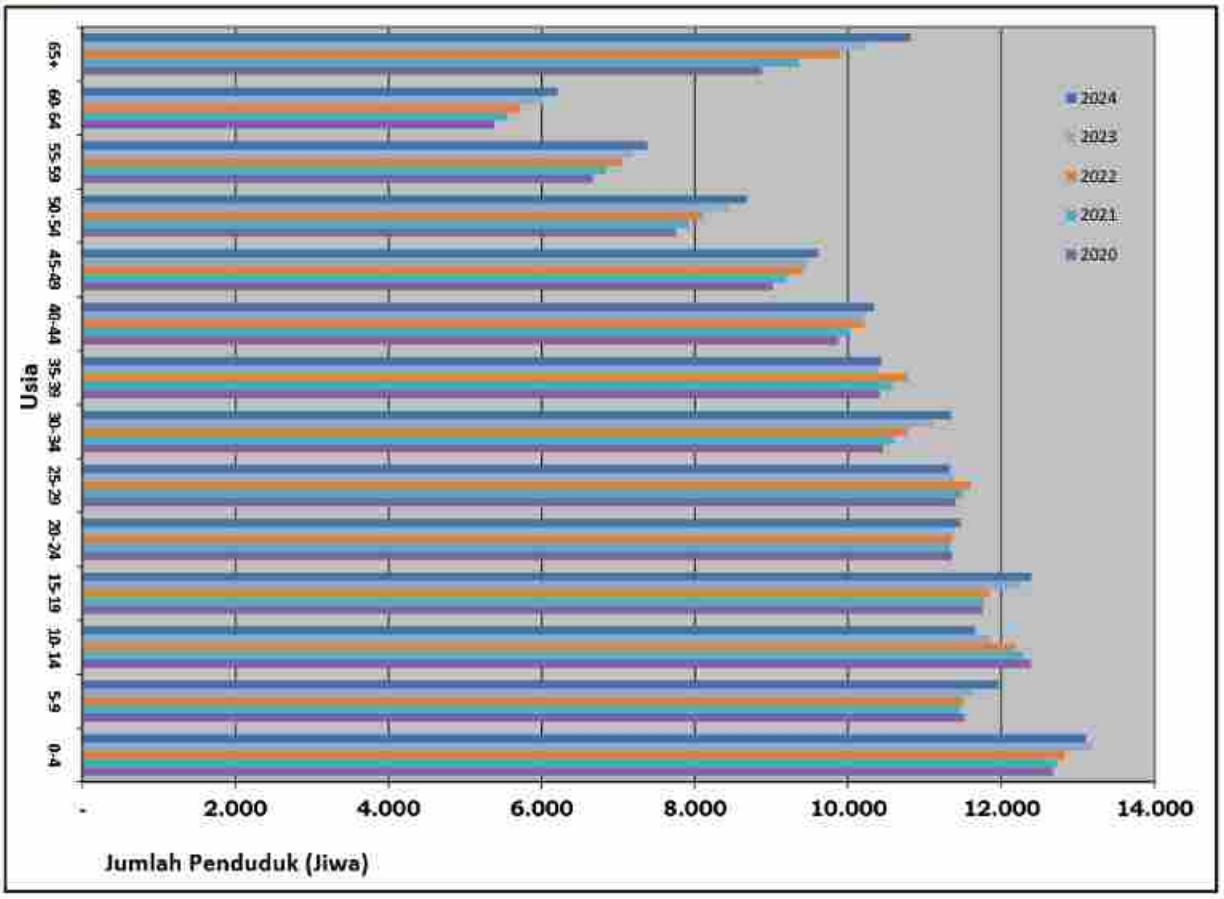
**Tabel 2.26** Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2020-2024

| NO | KELOMPOK USIA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0-4 | 12.682 | 12.728 | 12.825 | 13.190 | 13.110 |
| 2. | 5 -9 | 11.521 | 11.467 | 11.503 | 11.630 | 11.970 |
| 3. | 10 -14 | 12.392 | 12.284 | 12.180 | 11.870 | 11.660 |
| 4. | 15-19 | 11.761 | 11.777 | 11.848 | 12.260 | 12.391 |
| 5. | 20-24 | 11.357 | 11.338 | 11.358 | 11.380 | 11.470 |
| 6. | 25-29 | 11.406 | 11.493 | 11.604 | 11.390 | 11.330 |
| 7. | 30-34 | 10.459 | 10.606 | 10.788 | 11.110 | 11.350 |
| 8. | 35-39 | 10.417 | 10.582 | 10.786 | 10.400 | 10.440 |
| 9. | 40-44 | 9.879 | 10.032 | 10.218 | 10.240 | 10.340 |
| 10. | 45-49 | 9.019 | 9.202 | 9.424 | 9.470 | 9.610 |
| 11. | 50-54 | 7.758 | 7.923 | 8.114 | 8.450 | 8.680 |
| 12. | 55-59 | 6.664 | 6.843 | 7.052 | 7.190 | 7.380 |
| 13. | 60-64 | 5.385 | 5.549 | 5.728 | 6.020 | 6.210 |
| 14. | 65+ | 8.876 | 9.360 | 9.897 | 10.250 | 10.820 |
| Jumlah | | **139.576** | **141.184** | **143.325** | **144.830** | **146.731** |

**Sumber:** Payakumbuh Dalam Angka 2021–2025, 2025

Data jumlah penduduk tersebut jika ditampilkan dalam bentuk histogram, gambaran struktur penduduk Kota Payakumbuh dapat dilihat pada diagram berikut yang berkaitan erat dengan analisis tingkat ketergantungan pada struktur penduduk Kota Payakumbuh.

**Diagram 2.16** Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024




**Sumber:** Payakumbuh Dalam Angka 2021-2025, 2025

Tabel dan diagram jumlah penduduk perkelompok usia di atas memperlihatkan kondisi kependudukan di Kota Payakumbuh bercirikan ekspansif, di mana tingginya tingkat kelahiran dan rendahnya tingkat kematian, yang berarti kualitas layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah sudah cukup baik dari tahun ke tahun. Selain itu jumlah penduduk produktif (15 -64 tahun) lebih banyak dari jumlah penduduk non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas), di mana perbandingan ini akan menghasilkan rasio beban tanggungan penduduk yang ditampilkan pada tabel di bawah ini.

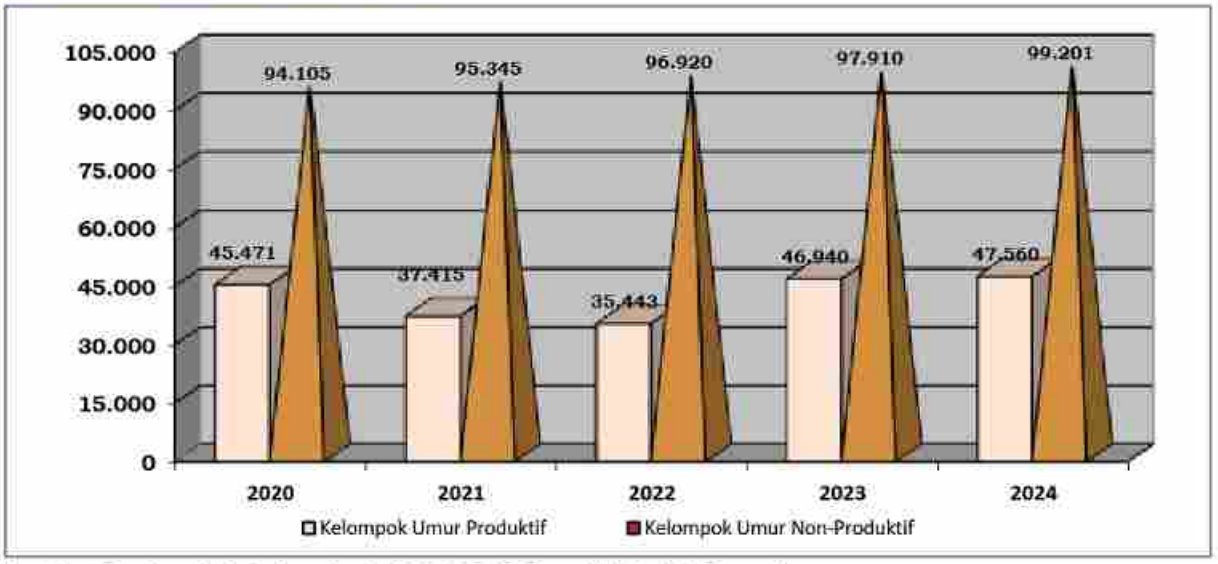
**Tabel 2.27** Perhitungan Rasio Beban Tanggungan Penduduk Tahun 2020– 2024

| NO | KELOMPOK UMUR | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelompok Umur Non-Produktif | 45.471 | 45.839 | 46.405 | 36.690 | 47.560 |
| 2 | Kelompok Umur Produktif | 94.105 | 95.345 | 96.920 | 97910 | 99.201 |
| 3 | Rasio Beban Tanggungan (:100) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |

**Sumber:** Payakumbuh Dalam Angka 2021-2025, Data diolah oleh Bappeda

Pengolahan data diatas menunjukan dari tahun 2020 sampai 2024 rasio tanggungan antara usia non produktif dengan usia produktif berada pada posisi 48 : 100, dimana setiap 100 jiwa usia produktif akan menanggung 48 jiwa non produktif.

**Diagram 2.17** Jumlah Kelompok Penduduk Usia Produktif dan Non Produktif Kota Payakumbuh Tahun 2020 – 2024




**Sumber:** Payakumbuh Dalam Angka 2021-2025. Data diolah oleh Bappeda

## (2). STRUKTUR PENDUDUK BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN

Jumlah penduduk angkatan kerja di Kota Payakumbuh pada tahun 2024 adalah 77.876 jiwa, di mana 74.085 jiwa merupakan penduduk yang sudah bekerja atau 95,13% dari angkatan kerja. Berdasarkan tabel berikut ini, sektor jasa masih merupakan sektor favorit yang terlihat dari meningkatnya serapan tenaga kerja pada sektor ini, dalam hal ini sektor jasa yang merupakan basis di Kota Payakumbuh. Untuk tahun 2024 sektor perdagangan menyerap 62,62% dari jumlah angkatan kerja pada tahun tersebut, yang melebihi setengah dari angkatan kerja aktif. Untuk sektor lainnya juga terdapat peningkatan dalam serapan tenaga kerja, termasuk sektor pertanian yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena mulai giat kegiatan masyarakat tani palawija/sayur-sayuran di sekitar Kecamatan Payakumbuh Utara.

**Tabel 2.28** Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2020-2024

| NO | LAPANGAN USAHA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pertanian, Kehutanan, Perburuhan, Perikanan | 6.259 | 7.100 | 9.008 | 10.902 | 9.281 |
| 2. | Industri Pengolahan | 13.891 | 14.419 | 14.459 | 14.445 | 15.372 |
| 3. | Jasa | 44.994 | 47.979 | 46.660 | 48.790 | 49.432 |
| Jumlah yang Bekerja | | 65.144 | 69.498 | 70.127 | 74.137 | 74.085 |
| Jumlah Pengangguran/ Mencari Kerja | | 4.664 | 4.805 | 3.812 | 3.770 | 3.791 |
| Total | | 69.808 | 74.303 | 73.939 | 77.907 | 77.876 |

**Sumber:** Payakumbuh Dalam Angka 2021–2025, 2025

## (3). STRUKTUR PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Tingkat partisipasi pendidikan di Kota Payakumbuh pada tabel 2.29 terlihat bahwa secara umum meningkat setiap jenjang pendidikan setiap tahun, ini terjadi karena peningkatan kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pendidikan. Data ini juga berguna bagi sebagai dasar bagi

pemerintah untuk menghitung jumlah guru, sekolah dan sarana pendidikan lainnya yang berguna untuk meningkatkan SDM yang berdaya saing.

**Tabel 2.29** Tingkat Partisipasi Pendidikan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

| NO | PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tidak/Belum Pernah Sekolah | 23.287 | 23.436 | 23.584 | 24.018 | 24.621 |
| 2. | Tidak/ Belum Tamat SD | 16.157 | 15.873 | 15.875 | 16.127 | 16.228 |
| 3. | SD | 18.800 | 17.607 | 17.293 | 17.033 | 17.564 |
| 4. | SMP | 20.258 | 20.065 | 19.804 | 20.033 | 20.205 |
| 5. | SMA | 44.713 | 46.653 | 47.350 | 48.968 | 49.052 |
| 6. | Diploma I/II | 706 | 668 | 668 | 678 | 631 |
| 7. | Akademisi/Diploma III/ Sarjana Muda | 3.759 | 3.863 | 3.877 | 3.990 | 4.035 |
| 8. | Diploma IV/ S1 | 11.709 | 12.272 | 12.479 | 12.956 | 13.426 |
| 9. | S2 dan S3 | 812 | 847 | 883 | 924 | 968 |
| **Total** | | **140.201** | **141.284** | **141.813** | **144.727** | **146.731** |

**Sumber:** Payakumbuh Dalam Angka 2021–2025, 2025

## E). PROYEKSI DEMOGRAFI

Untuk proyeksi kependudukan digunakan proyeksi terhadap *Total Fertility Rate* (TFR) dan *Infant Mortality Rate* (IMR), untuk proyeksi penduduk tahun 2025-2030 selanjutnya dapat dilihat pada beberapa tabel 2.30 berikut.

**Tabel 2.30** Parameter Proyeksi Penduduk 2025-2030

| PARAMETER | Baseline 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FERTILITAS** | | | | | | | |
| *Total Fertility Rate (TFR)* | 2,40 | 2,30 | 2,34 | 2,30 | 2,28 | 2,25 | 2,23 |
| **MORTALITAS** | | | | | | | |
| *Infant Mortality Rate* (IMR) | 13,98 | 10,84 | 12,11 | 11,45 | 10,27 | 9,86 | 9,36 |

**Sumber:** Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, Diolah oleh Bappeda 2024

Parameter hasil proyeksi penduduk Kota Payakumbuh tahun 2025-2030 dari *Total Fertility Rate* (TFR)/Fertilitas trennya cenderung mengalami penurunan. Dimana data realisasi tahun 2024 sebesar 2,40 menjadi 2,23 pada proyeksti TFR tahun 2030. Sedangkan *Infant Mortality Rate* (IMR)/ Mortalitas juga cenderung turun dari 13,98 pada kondisi tahun 2024 turun menjadi 9,36 pada proyeksi tahun 2030.

**Tabel 2.31** Proyeksi Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2025-2030

| JENIS KELAMIN | PENDUDUK TAHUN 2024 (ORANG) | PROYEKSI PENDUDUK (ORANG) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Laki-Laki | 73.761 | 74.658 | 75.550 | 76.420 | 77.260 | 78.100 | 78.909 |
| Perempuan | 72.970 | 73.939 | 74.900 | 75.860 | 76.800 | 77.730 | 78.664 |
| Jumlah penduduk | 146.731 | 148.597 | 150.450 | 152.270 | 154.060 | 155.830 | 157.573 |
| Sex ratio | 101,08 | 100,97 | 100,87 | 100,74 | 100,60 | 100,48 | 100,31 |

**Sumber:** Bappeda Kota Payakumbuh, 2025

Berdasarkan hasil proyeksi, penduduk Kota Payakumbuh tahun 2030 diperkirakan berjumlah 157.573 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 78.909 jiwa dan Perempuan 78.664 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk sebesar adalah sebesar 1,04% per tahun. Dari tabel 2.31 dapat dihitung rasio jenis kelamin (*sex ratio*) tahun 2030 sebesar 100,31. Sex ratio menunjukan komposisi penduduk laki-laki dan perempuan, dengan kata lain pada tahun 2030 populasi laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan.

**Tabel 2.32** Proyeksi Penduduk Kota Payakumbuh Menurut Kelompok Umur Tahun 2025-2030

| KELOMPOK UMUR | PENDUDUK TAHUN 2024 (ORANG) | PROYEKSI PENDUDUK (ORANG) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 0-4 | 13.115 | 12.723 | 12.700 | 12.670 | 12.650 | 12.640 | 12.640 |
| 5-9 | 11.971 | 12.606 | 12.850 | 13.050 | 13.140 | 13.070 | 12.680 |
| 10-14 | 11.662 | 11.511 | 11.450 | 11.490 | 11.660 | 11.990 | 12.630 |
| 15-19 | 12.397 | 12.421 | 12.330 | 12.150 | 11.930 | 11.730 | 11.580 |
| 20-24 | 11.472 | 11.583 | 11.740 | 11.930 | 12.120 | 12.240 | 12.270 |
| 25-29 | 11.334 | 11.271 | 11.260 | 11.280 | 11.330 | 11.420 | 11.530 |
| 30-34 | 11.350 | 11.518 | 11.600 | 11.590 | 11.540 | 11.470 | 11.410 |
| 35-39 | 10.442 | 10.536 | 10.710 | 10.960 | 11.220 | 11.460 | 11.640 |
| 40-44 | 10.343 | 10.411 | 10.440 | 10.440 | 10.440 | 10.470 | 10.570 |
| 45-49 | 9.612 | 9.744 | 9.880 | 10.020 | 10.140 | 10.240 | 10.310 |
| 50-54 | 8.687 | 8.876 | 9.050 | 9.220 | 9.360 | 9.500 | 9.640 |
| 55-59 | 7.385 | 7.592 | 7.820 | 8.060 | 8.300 | 8.530 | 8.730 |
| 60-64 | 6.213 | 6.399 | 6.580 | 6.760 | 6.930 | 7.130 | 7.340 |
| 65-69 | 4.731 | 4.953 | 5.170 | 5.370 | 5.570 | 5.750 | 5.930 |
| 70-74 | 3.082 | 3.282 | 3.480 | 3.690 | 3.900 | 4.100 | 4.300 |
| 75+ | 3.015 | 3.171 | 3.370 | 3.590 | 3.840 | 4.100 | 4.390 |
| **Jumlah** | **146.731** | **148.597** | **150.450** | **152.270** | **154.060** | **155.830** | **157.570** |

**Sumber:** Bappeda Kota Payakumbuh, 2025

Berdasarkan hasil proyeksi pada tabel 2.32 jumlah penduduk usia produktif mengalami penambahan pada Tahun 2025-2030, dengan adanya peningkatan pada jumlah penduduk usia lansia (65 tahun ke atas), sedangkan untuk usia anak-anak cenderung tetap, bahkan menurun.

**Tabel 2.33** Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2025-2030

| KELOMPOK UMUR | PENDUDUK TAHUN 2024 (Org) | PROYEKSI PENDUDUK (ORANG) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 0-14 | 36.708 | 36.840 | 36.840 | 37.000 | 37.210 | 37.450 | 37.953 |
| 15-64 | 99.205 | 100.351 | 100.351 | 101.410 | 102.410 | 103.310 | 105.002 |
| >65 | 10.818 | 11.406 | 11.406 | 12.020 | 12.650 | 13.310 | 14.618 |
| Rasio Ketergantungan | 47,91 | 48,04 | 48,08 | 48,34 | 48,69 | 49,13 | 50,07 |

**Sumber:** Bappeda Kota Payakumbuh, 2025

Tabel 2.33 di atas menunjukkan komposisi dari kelompok umur penduduk Kota Payakumbuh mengalami pergeseran. Kelompok usia tua (60

tahun ke atas) meningkat seiring dengan bertambahnya tahun. Di dalam ilmu demografi, jika proporsi penduduk usia tua di atas 10% dari total penduduk, mengindikasikan kondisi kependudukan suatu daerah memasuki fase struktur penduduk usia tua.

*Dependency ratio* atau angka ketergantungan di bawah 50 menunjukan kondisi beban ketergantungan oleh penduduk usia produktif relatif kecil. Sehingga ini adalah saatnya daerah yang memiliki kondisi ini dapat memanfaatkan momentum ini dengan baik. Hingga tahun 2030 *window of opportunity* sedang terbuka di Kota Payakumbuh. Untuk melihat gambaran penduduk selalu divisualkan dengan piramida penduduk. Dengan mengamati bentuk penduduk serta perubahan bentuk piramida penduduk dari waktu ke waktu banyak informasi kependudukan dari suatu wilayah. Informasi ini dapat memudahkan suatu negara dalam membentuk kebijakan demografi tertentu seperti mendorong jumlah kelahiran atau justru mengurangi jumlah kelahiran dengan metode keluarga berencana dan kontrasepsi. Hingga tahun 2030, *window of opportunity* sedang berlangsung karena adanya bonus demografi, di mana jumlah penduduk produktif di posisi yang optimal. Sehingga untuk pemanfaatan bonus demografi ini perlu rancangan untuk penyerapan tenaga kerja yang menggerakan faktor faktor ekonomi. Bisa dilihat dari sektor lapangan usaha yang memberi nilai tambah secara cepat atau sektor lapangan usaha yang bisa menyerap tenaga kerja yang banyak.

## B. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

### 1). KESEJAHTERAAN EKONOMI

Salah satu tujuan pokok pembangunan nasional adalah menciptakan kesejahteraan rakyat. Tujuan pembangunan ini diwujudkan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai bentuk desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota Payakumbuh telah melakukan perencanaan pembangunan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat pada tahun sebelumnya difokuskan pada aspek kesejahteraan ekonomi dan aspek kesejahteraan sosial budaya. Masing-masing aspek tersebut terdiri atas indikator-indikator yang relevan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

#### A) PDRB PERKAPITA

*Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) per-kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. PDRB perkapita merupakan perbandingan angka PDRB dengan jumlah penduduk di suatu daerah. Pada tabel 2.34 menjelaskan bahwa fluktuasi yang terjadi pada PDRB juga akan mempengaruhi angka PDRB perkapita, di mana mulai tahun 2021 kembali terjadi kenaikan PDRB perkapita di Kota Payakumbuh. Hal ini terjadi setelah normalnya aktivitas masyarakat baik sosial maupun ekonomi pasca pandemi Covid-19. Sepanjang

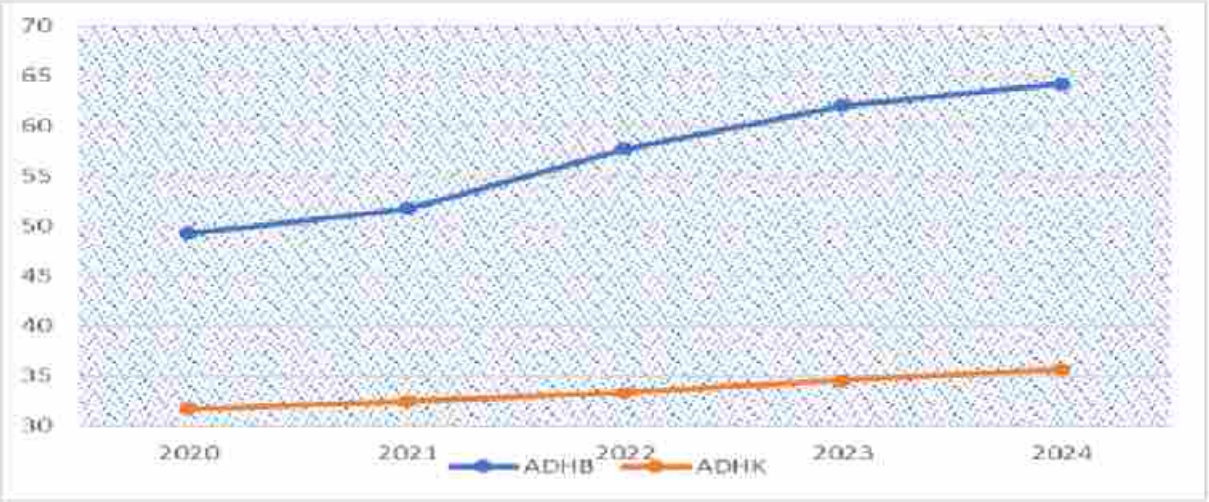
tahun 2020-2024, terjadi peningkatan PDRB perkapita, namun kenaikan jika ditinjau dari atas dasar harga konstan, kenaikan tidak terlalu signifikan.

**Tabel 2.34** Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

| NO | TAHUN | PDRB (JUTA RUPIAH) | | JUMLAH PENDUDUK | PDRB PER KAPITA (JUTA RUPIAH) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ADHB | ADHK | | ADHB | ADHK |
| 1 | 2020 | 6.823,64 | 4.414,29 | 139.576 | 49,28 | 31,75 |
| 2 | 2021 | 7.302,50 | 4.572,19 | 141.184 | 51,73 | 32,44 |
| 3 | 2022 | 8.250,30 | 4.778,35 | 143.330 | 57,73 | 33,34 |
| 4 | 2023 | 8.982,35 | 5.002,7 | 144.830 | 62,02 | 34,54 |
| 5 | 2024 | 9421 | 5229,45 | 146.731 | 64,21 | 35,64 |

Sumber: BPS Kota Payakumbuh, 2024

**Diagram 2.18** Perkembangan PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 (juta rupiah)




Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

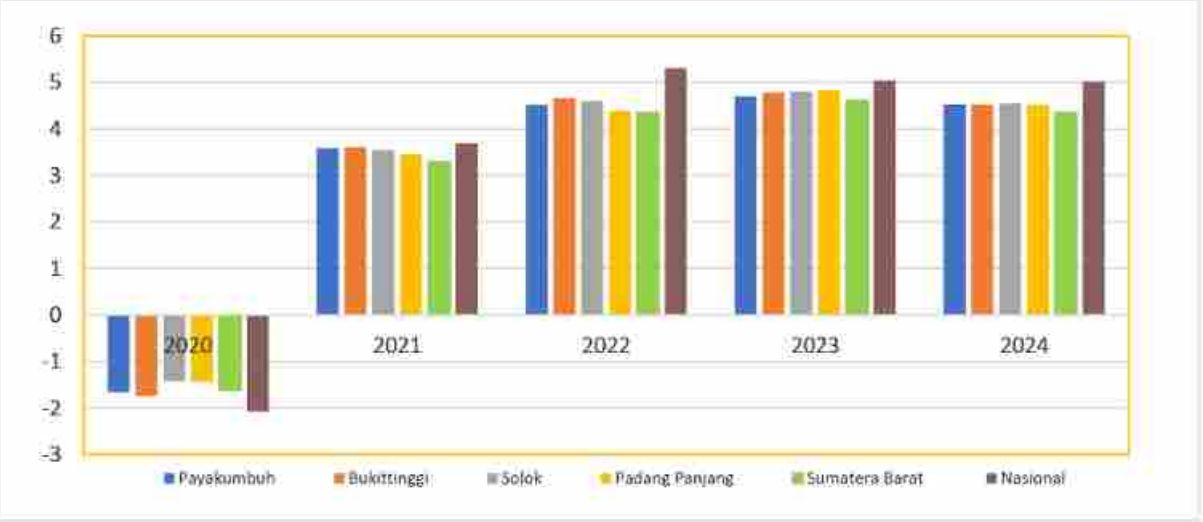
## B). PERTUMBUHAN EKONOMI

Salah satu indikator utama untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi daerah adalah Pertumbuhan Ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha pada suatu wilayah dan waktu tertentu.

PDRB mengukur seluruh transaksi ekonomi yang terjadi di wilayah domestik suatu daerah tanpa memperhatikan apakah transaksi dilakukan oleh masyarakat (*residen*) dari daerah tersebut atau masyarakat dari daerah lain (*non-residen*). Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tertentu pada tahun dasar di mana

penghitungannya menggunakan tahun dasar 2010. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh selama kurun waktu lima tahun terakhir berfluktuasi sebagaimana gambar di bawah ini.

**Diagram 2.19** Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Payakumbuh dibandingkan dengan Kota Bukittinggi, Solok, Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024




**Sumber:** BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Pada Tahun 2020, terjadi kontraksi pertumbuhan pada angka -1,66%, namun tahun 2021-2022 mulai terjadi pertumbuhan kembali, seiring pulihnya perekonomian pasca pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat, maka terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh berjalan hampir sama. Tahun 2023 perekonomian sudah tumbuh pada angka 4,70%, sedikit di atas angka Sumatera Barat yang hanya sebesar 4,62%, dan berada pada posisi ketiga dibandingkan dengan Kota Bukittinggi dan Kota Solok pada dua tahun terakhir (2022-2023).

Pada tahun 2024 Kota Payakumbuh sedikit unggul dibandingkan Kota Bukittinggi, namun masih di bawah Kota Solok dan Kota Padang dengan angka pertumbuhan 4,53%. Kota Bukittinggi masih unggul dengan potensi kota wisata dan pusat perdagangannya, sementara itu Kota Solok juga dengan potensi di sektor perdagangannya, sehingga ini adalah tantangan untuk Kota Payakumbuh bagaimana dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor yang menjadi unggulan daerah. Berikut ditampilkan perkembangan PDRB menurut kelompok lapangan usaha dihitung atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK 2010) selama kurun waktu 2020-2024 menurut lapangan usaha.

**Tabel 2.35** Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB ADHB Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

| NO | LAPANGAN USAHA | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (Rp Milyar) | % | (Rp Milyar) | % | (Rp Milyar) | % | (Rp Milyar) | % | (Rp Milyar) | % |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, danPerikanan | 439,60 | 6,44 | 444,03 | 6,08 | 486,08 | 5,89 | 512,80 | 5,71 | 524,23 | 5.56 |
| 2 | Pertambangan & Penggalian | 35,41 | 0,52 | 37,37 | 0,51 | 41,21 | 0,50 | 45 | 0,50 | 45,73 | 0.49 |
| 3 | Industri Pengolahan | 331,87 | 4,86 | 367,28 | 5,03 | 405,99 | 4,92 | 433,64 | 4,83 | 454,12 | 4.82 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 4,15 | 0,06 | 4,29 | 0,06 | 4,49 | 0,05 | 4,77 | 0,05 | 4,96 | 0.05 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 16,33 | 0,24 | 17,01 | 0,23 | 18,91 | 0,23 | 20,24 | 0,23 | 21,26 | 0.23 |
| 6 | Konstruksi | 933,35 | 13,67 | 993,95 | 13,61 | 1.113,07 | 13,49 | 1.230,47 | 13,70 | 1.285,03 | 13.64 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1.675,70 | 24,54 | 1.755,85 | 24,04 | 2.072,19 | 25,12 | 2.254,39 | 25,10 | 2.357,52 | 25.02 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 799,91 | 11,72 | 866,76 | 11,87 | 977,91 | 11,85 | 1.092,09 | 12,16 | 1.113,27 | 11.82 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan minum | 206,62 | 3,03 | 230,03 | 3,15 | 276,1 | 3,35 | 304,03 | 3,38 | 328,69 | 3.49 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 563,20 | 8,25 | 614,02 | 8,41 | 691,8 | 8,39 | 761,57 | 8,48 | 801,03 | 8.5 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 402,98 | 5,90 | 449,56 | 6,16 | 499,6 | 6,06 | 525,94 | 5,86 | 565,64 | 6 |
| 12 | Real Estate | 198,16 | 2,90 | 208,53 | 2,86 | 231,05 | 2,80 | 259,11 | 2,88 | 276,09 | 2.93 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 16,23 | 0,24 | 16,61 | 0,23 | 18,35 | 0,22 | 20,75 | 0,23 | 21,76 | 0.23 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 517,03 | 7,57 | 567,21 | 7,77 | 594,22 | 7,20 | 628,95 | 7,00 | 682 | 7.24 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 337,22 | 4,94 | 358,5 | 4,91 | 402,17 | 4,87 | 421,18 | 4,69 | 438,16 | 4.65 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan KegiatanSosial | 111,39 | 1,63 | 119,62 | 1,64 | 130,27 | 1,58 | 145,91 | 1,62 | 156,02 | 1.66 |
| 17 | Jasa Lainnya | 237,95 | 3,49 | 252,51 | 3,46 | 286,91 | 3,48 | 321,55 | 3,58 | 345,48 | 3.67 |
| **TOTAL** | | **6.827,09** | **100,00** | **7.303,2** | **100,00** | **8.250,30** | **100,00** | **8.982.35** | **100,00** | **9.421** | **100,00** |

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2025, 2025

**Tabel 2.36** Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB ADHK (2010) Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

| NO | LAPANGAN USAHA | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (Rp Milyar) | % | (Rp Milyar) | % | (Rp Milyar) | % | (Rp Milyar) | % | (Rp Milyar) | % |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 274,26 | 6,21 | 278,09 | 6,10 | 285,08 | 5,99 | 287,63 | 5,75 | 287,53 | 5.50 |
| 2 | Pertambangan & penggalian | 21,91 | 0,50 | 22,8 | 0,50 | 23,85 | 0,50 | 24,54 | 0,49 | 25,0 | 0.48 |
| 3 | Industri Pengolahan | 235,58 | 5,34 | 241,85 | 5,29 | 247,00 | 5,17 | 253,72 | 5,07 | 261,30 | 5.00 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 2,59 | 0,06 | 2,66 | 0,06 | 2,74 | 0,06 | 2,84 | 0,06 | 2,97 | 0.06 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 13,88 | 0,31 | 14,34 | 0,31 | 15,23 | 0,32 | 15,70 | 0,31 | 15,97 | 0.31 |
| 6 | Konstruksi | 559,59 | 12,67 | 567,57 | 12,41 | 586,67 | 12,27 | 620,94 | 12,41 | 643,87 | 12.31 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1.053,03 | 23,85 | 1.090,71 | 23,85 | 1.151,25 | 24,09 | 1.204,94 | 24,09 | 1.259,10 | 24.08 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 553.47 | 12,54 | 581,89 | 12,72 | 600,62 | 12,57 | 634,18 | 12,68 | 660,24 | 12.63 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan minum | 109,93 | 2,49 | 117,94 | 2,58 | 135,76 | 2,84 | 145,21 | 2,90 | 154,99 | 2.96 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 480,57 | 10,89 | 507,32 | 11,09 | 541,81 | 11,34 | 580,16 | 11,60 | 607,98 | 11.63 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 257,47 | 5,83 | 273,36 | 5,98 | 284,33 | 5,95 | 293,48 | 5,87 | 314,19 | 6.01 |
| 12 | Real Estate | 123,08 | 2,79 | 125,20 | 2,74 | 131,62 | 2,75 | 139,44 | 2,79 | 147,26 | 2.82 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 11,37 | 0,26 | 11,49 | 0,25 | 12,26 | 0,26 | 13,06 | 0,26 | 13,68 | 0.26 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 300,96 | 6,82 | 302,92 | 6,62 | 299,71 | 6,27 | 305,35 | 6,10 | 330,72 | 6.32 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 198,10 | 4,49 | 205,30 | 4,49 | 216,18 | 4,52 | 219,77 | 4,39 | 226,59 | 4.33 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 76,92 | 1,74 | 81,22 | 1,78 | 84,80 | 1,77 | 90,60 | 1,81 | 95,48 | 1.83 |
| 17 | Jasa Lainnya | 141,59 | 3,21 | 147,52 | 3,23 | 159,45 | 3,34 | 171,13 | 3,42 | 182,57 | 3.49 |
| **Total** | | **4.414,29** | **100** | **4.572,19** | **100** | **4.778,35** | **100** | **5.002,70** | **100** | **5.229,45** | **100,00** |

**Sumber:** Payakumbuh Dalam Angka 2025, 2025

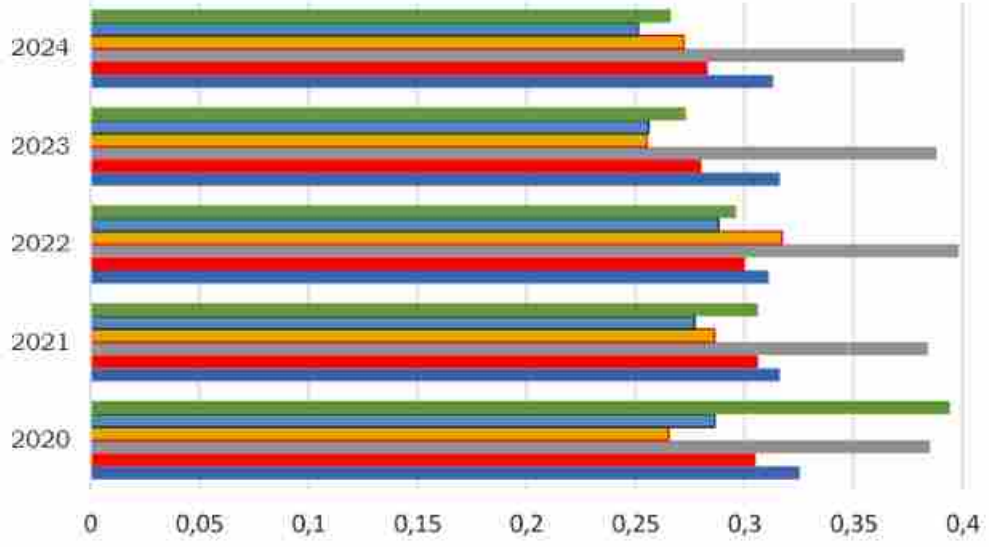
Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor masih menjadi sektor yang paling banyak berkontribusi terhadap produktivitas Kota Payakumbuh, kemudian disusul sektor transportasi dan pergudangan dan sektor kontruksi, walaupun pergerakannya fluktuatif. Laju pertumbuhan ekonomi belum bisa dijadikan acuan yang menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat meningkat. Untuk melihat dampak pertumbuhan ekonomi ini terhadap kesejahteraan, maka perlu dikonversi dengan tingkat inflasi dan dilihat tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat.

## C). INDEKS GINI

Indeks Gini adalah angka yang digunakan untuk menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Indeks Gini dimulai dari angka 0 sampai dengan angka 1. Jika Indeks Gini sama dengan 0, berarti distribusi pendapatan sudah merata dengan sempurna (dengan kata lain tidak terjadi ketimpangan distribusi pendapatan). Jika Indeks Gini sama dengan 1, berarti distribusi pendapatan tidak merata secara sempurna. Untuk lebih jelasnya, standar penilaian Indeks Gini dapat ditentukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. GR < 0,3 : ketimpangan rendah
2. 0,3 ≤ GR ≤ 0,5 : ketimpangan sedang
3. GR > 0,5 : ketimpangan tinggi

**Diagram 2.20** Perbandingan Indeks Gini Kota Payakumbuh dengan Kota Bukittinggi, Kota Solok, Padang Panjang, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Padang Panjang | 0,394 | 0,306 | 0,296 | 0,273 | 0,266 |
| Solok | 0,286 | 0,277 | 0,288 | 0,256 | 0,251 |
| Bukittinggi | 0,265 | 0,286 | 0,317 | 0,255 | 0,272 |
| Nasional | 0,385 | 0,384 | 0,398 | 0,388 | 0,373 |
| Sumatera Barat | 0,305 | 0,306 | 0,3 | 0,28 | 0,283 |
| Payakumbuh | 0,325 | 0,316 | 0,311 | 0,316 | 0,313 |

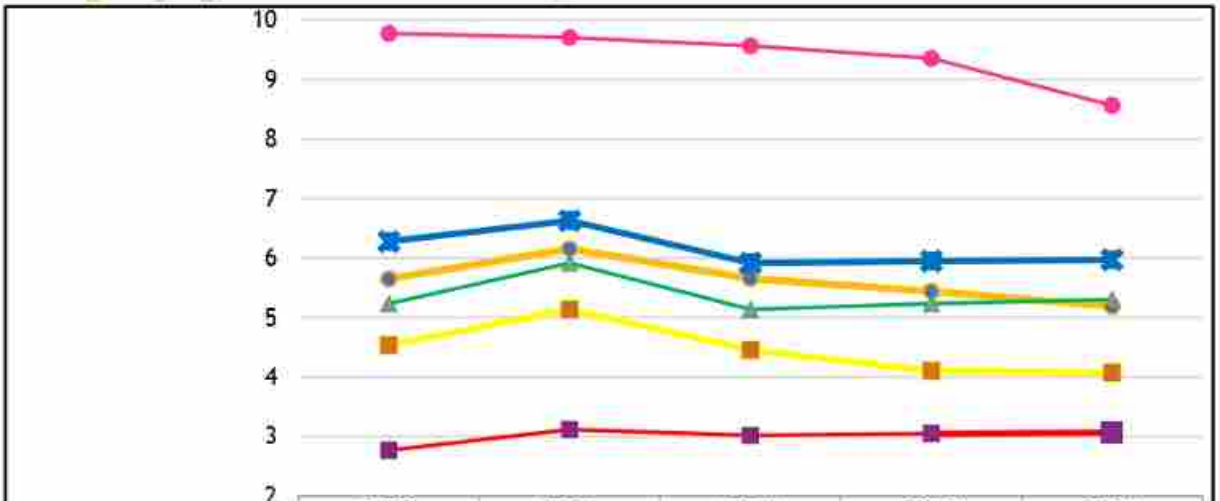
**Sumber:** BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025 (data diolah Bappeda)

Diagram 2.20 menjelaskan Indeks Gini Kota Payakumbuh berada di atas Provinsi Sumatera Barat. Kota Payakumbuh termasuk tingkat ketimpangan sedang. Secara keseluruhan, walaupun tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Payakumbuh berada pada ketimpangan sedang, namun ketimpangan itu berada di atas ketimpangan Sumatera Barat. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 terjadi peningkatan ketimpangan, yang diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi ternyata tidak cukup berdampak terhadap penurunan tingkat ketimpangan, yang artinya kesenjangan pendapatan antara masyarakat yang terkelompok pada beberapa sektor lapangan usaha cukup signifikan. Data dari BPS juga menunjukkan jika Indeks Gini Kota Payakumbuh tertinggi se-Sumatera Barat. Hal ini menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Payakumbuh.

### D) TINGKAT KEMISKINAN

Kemiskinan dan pengangguran telah menjadi masalah sosial diberbagai daerah. Pemerintah Kota Payakumbuh berusaha untuk terus melakukan penanggulangan kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir dan sudah memberikan hasil yang cukup baik, di mana setiap tahun terjadi penurunan tingkat kemiskinan.

**Diagram 2.21** Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Solok, Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dan Nasional Tahun 2020-2024




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Payakumbuh | 5,65 | 6,16 | 5,66 | 5,44 | 5,19 |
| Bukittinggi | 4,54 | 5,14 | 4,46 | 4,11 | 4,08 |
| Padang Panjang | 5,24 | 5,92 | 5,14 | 5,24 | 5,31 |
| Solok | 2,77 | 3,12 | 3,02 | 3,05 | 3,07 |
| Sumatera Barat | 6,28 | 6,63 | 5,92 | 5,95 | 5,97 |
| Nasional | 9,78 | 9,71 | 9,57 | 9,36 | 8,57 |

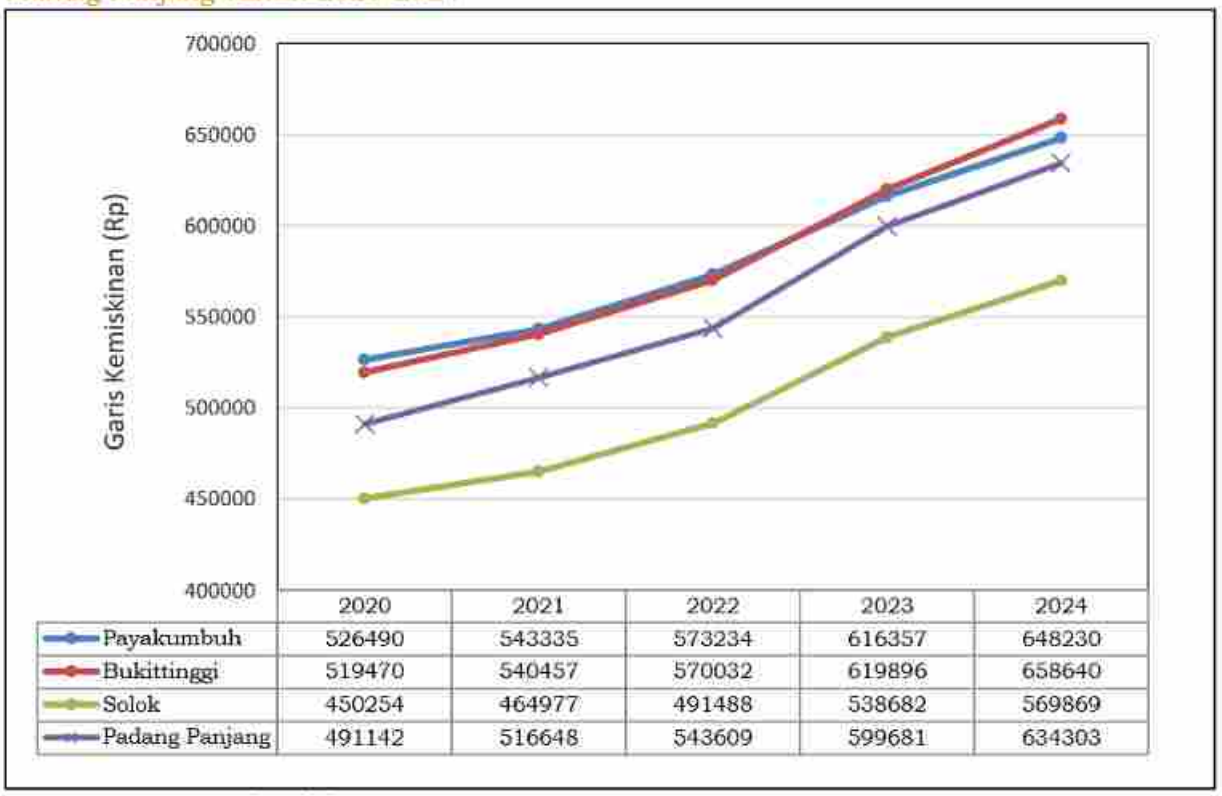
**Sumber:** BPS Kota Payakumbuh, 2024

Diagram 2.21 menunjukkan fluktuasi tingkat kemiskinan Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, dimana pada tahun 2021 tingkat kemiskinan Kota, Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan, hanya pada tingkat Nasional yang mengalami

penurunan.Jika dibandingkan dengan Kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat, tingkat kemiskinan di Kota Payakumbuh tertinggi pada tahun 2020-2023 dan barulah tahun 2024, tingkat kemiskinan Kota Payakumbuh lebih baik dari Kota Padang Panjang walaupun masih lebih tinggi dari kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat.

Untuk mengetahui tingkat kemiskinan suatu daerah, garis kemiskinan digunakan sebagai indikator, dimana garis kemiskinan merupakan tingkat minimum pendapatan yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Kota Payakumbuh mempunyai garis kemiskinan lebih tinggi dibandingkan dengan kota lainnya di Sumatera Barat pada tahun 2020-2023, dan untuk tahun 2024 beralih ke Kota Bukittinggi.

**Diagram 2.22** Perbandingan Garis Kemiskinan Kota Payakumbuh, Bukittinggi, Solok, dan Padang Panjang Tahun 2020-2024



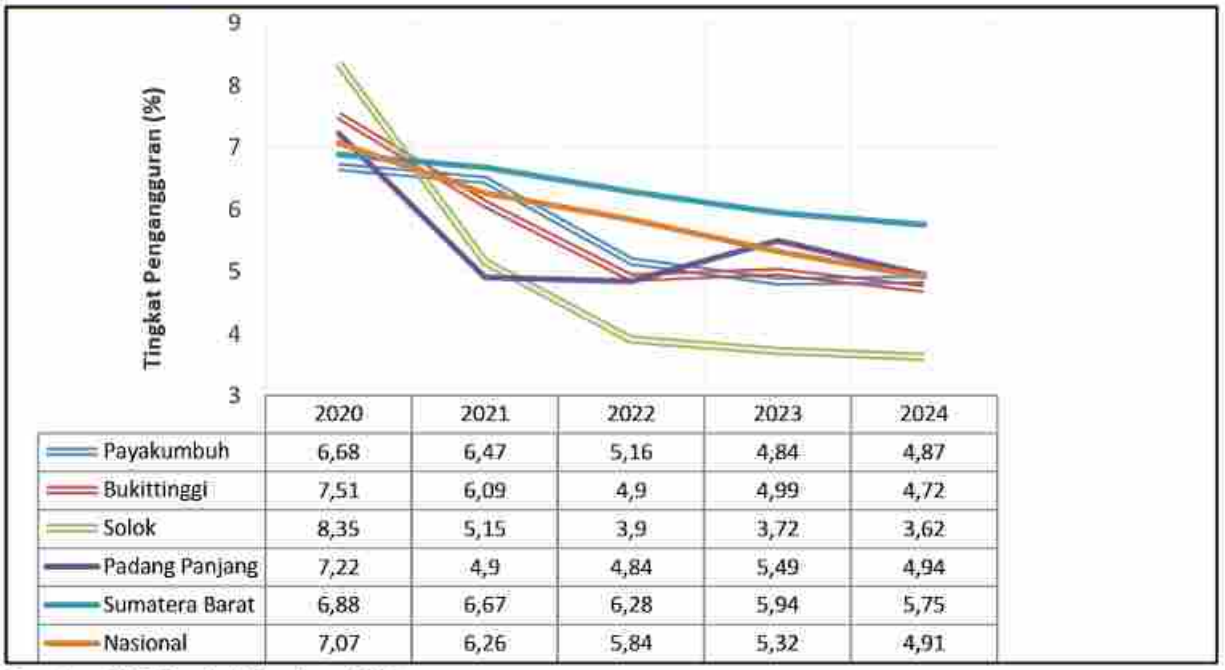

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Payakumbuh | 526490 | 543335 | 573234 | 616357 | 648230 |
| Bukittinggi | 519470 | 540457 | 570032 | 619896 | 658640 |
| Solok | 450254 | 464977 | 491488 | 538682 | 569869 |
| Padang Panjang | 491142 | 516648 | 543609 | 599681 | 634303 |

**Sumber:** BPS Kota Payakumbuh, 2024

## E) PENGANGGURAN TERBUKA

Semenjak tahun 2020, terjadi kenaikan tingkat pengangguran, baik di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, maupun Nasional. Hal ini disebabkan adanya pandemi COVID-19. Seiring dengan pulihnya perekonomian, tingkat pengangguran terus menurun pada tahun 2021-2023. Pada tahun 2023, tingkat pengangguran di Kota Payakumbuh mencapai 4,84%, namun pada tahun 2024 mengalami kenaikan 0,03% sehingga menjadi 4,87%.

**Diagram 2.23** Pengangguran Terbuka Kota Payakumbuh, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Payakumbuh | 6,68 | 6,47 | 5,16 | 4,84 | 4,87 |
| Bukittinggi | 7,51 | 6,09 | 4,9 | 4,99 | 4,72 |
| Solok | 8,35 | 5,15 | 3,9 | 3,72 | 3,62 |
| Padang Panjang | 7,22 | 4,9 | 4,84 | 5,49 | 4,94 |
| Sumatera Barat | 6,88 | 6,67 | 6,28 | 5,94 | 5,75 |
| Nasional | 7,07 | 6,26 | 5,84 | 5,32 | 4,91 |

**Sumber:** BPS Provinsi Sumbar, 2025

Diagram 2.23 diatas terlihat bahwa Tingkat pengangguran di Kota Payakumbuh lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, namun cukup tinggi jika dibandingkan dengan Kota lain di Provinsi Sumatera Barat, dimana tingkat pengangguran lebih banyak didominasi oleh perempuan dikarenakan penawaran/lapangan kerja yang tersedia kebanyakan untuk laki-laki, selain itu juga kebanyakan perempuan dikategorikan ke kelompok bukan angkatan kerja, karena status ibu rumah tangga.

## F). TINGKAT PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Produktifitas tenaga kerja adalah jumlah PDRB ADHK dibandingkan dengan jumlah orang bekerja. Tingkat produktivitas tenaga kerja Kota Payakumbuh berfluktuasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2020, produktivitas tenaga kerja mencapai Rp 67,76 juta. Kenaikan yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar RP.68,14 juta, namun mengalami penurunan Kembali dari tahun 2023 sampai tahun 2024 yang menyentuh Rp.67,15 juta yang jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 pada masa COVID-19, produktivitas tenaga kerja tahun 2023 dan tahun 2024 berada di bawah produktivitas tahun 2020 dengan nilai terendah pada tahun 2024.

**Tabel 2.37** Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

| URAIAN | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| PDRB ADHK (Rp) | 4.414.294,06 | 4.572.191,51 | 4.778.348,64 | 5.002.696,14 | 5.229.450 |

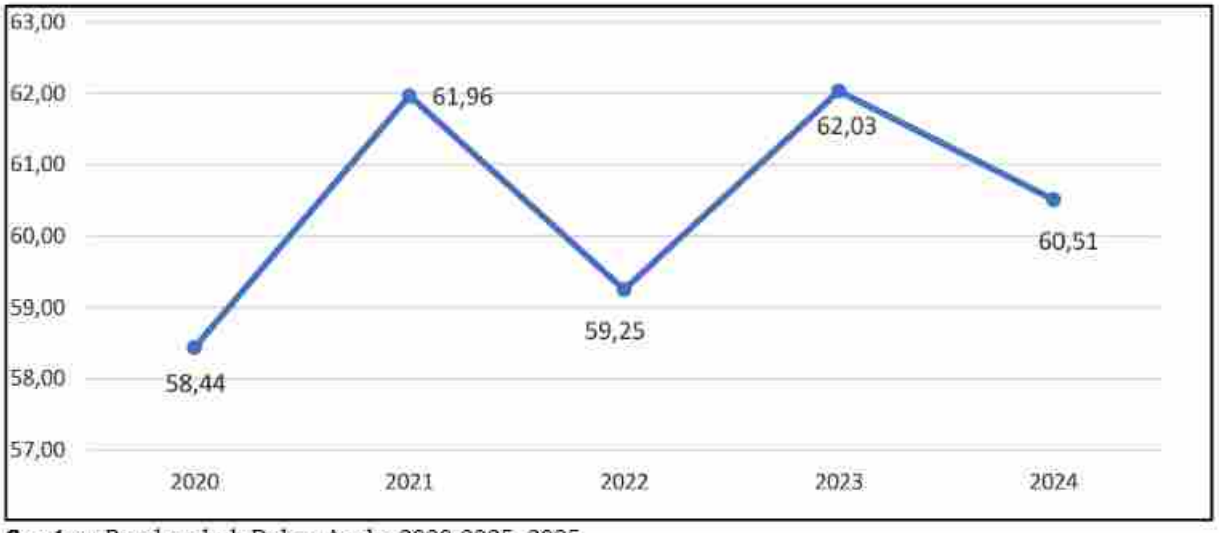
| URAIAN | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Jumlah Orang Bekerja (jiwa) | 65.144 | 69.498 | 70.127 | 74.137 | 77.876 |
| Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja (Rp. juta rupiah) | 67,76 | 65,79 | 68,14 | 67,48 | 67,15 |

**Sumber:** BPS Kota Payakumbuh, 2024 (data diolah oleh Bappeda)

## G). TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan, namun sementara tidak bekerja, dan pengganguran. Fluktuasi tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan terlihat pada diagram 2.24 dengan TPAK pada tahun 2024 sebesar 60,51%. Kondisi saat ini mayoritas kesempatan kerja lebih banyak ditujukan untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan yang berstatus ibu rumah tangga atau yang bekerja di sektor informal mayoritas pada perdagangan online.

**Diagram 2.24** Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024




**Sumber:** Payakumbuh Dalam Angka 2020-2025, 2025

## H) TINGKAT PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA PADA LAPANGAN USAHA SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN

Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan adalah perbandingan antara jumlah PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Rasio produktivitas

tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terlihat menurun dari tahun 2020, hal ini kemungkinan disebabkan rendahnya minat para generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian.

**Diagram 2.25** Tingkat Produktifitas Angkatan Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 (Juta/Kapita)

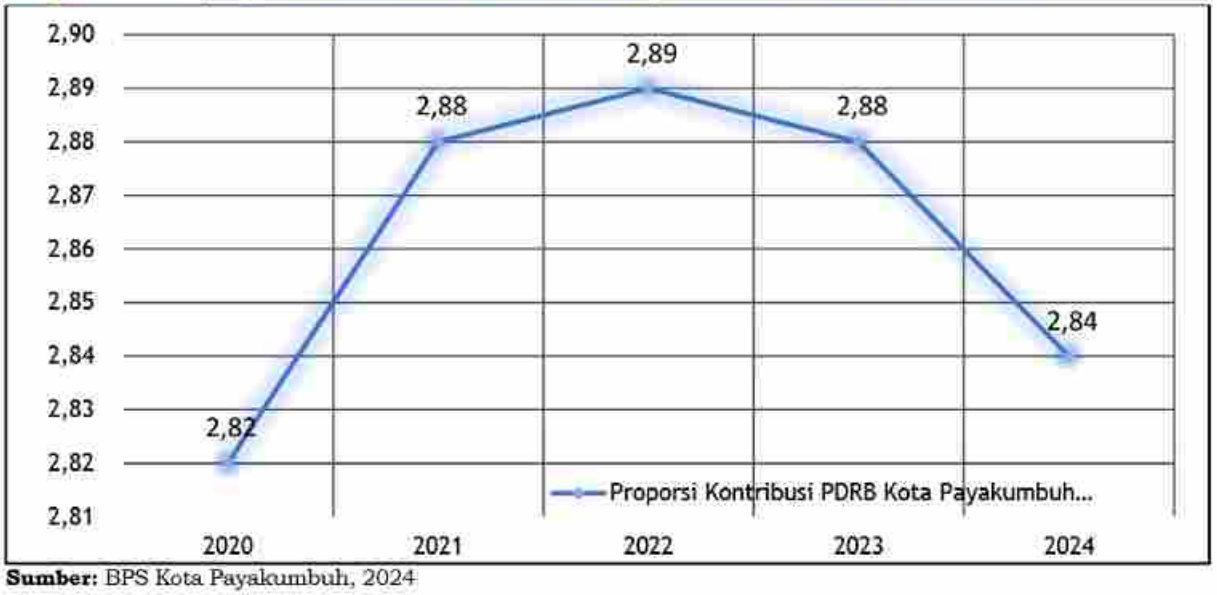



**Sumber:** BPS Kota Payakumbuh,2020-2024 (data diolah oleh Bappeda)

## I). PROPORSI KONTRIBUSI PDRB KOTA PAYAKUMBUH

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (*output*) dikurangi biaya antara.

**Diagram 2.26** Proporsi Kontribusi PDRB Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024




**Sumber:** BPS Kota Payakumbuh, 2024

Proporsi kontribusi PDRB Kota Payakumbuh terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat relatif kecil, hanya berkisar 2%-3% dari tahun 2020-2024, dimana setelah tahun 2022 terjadi penurunan kontribusi PDRB Kota Payakumbuh terhadap Provinsi Sumatera Barat. Oleh karenanya dapat dikatakan peningkatan sektor-sektor PDRB Kota Payakumbuh tidak berdampak besar terhadap peningkatan sektor-sektor PDRB Sumatera Barat.

## J) PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP HUNIAN LAYAK DAN TERJANGKAU

Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dimana disebutkan bahwa rumah yang layak huni, terjangkau dan berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:

1. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
2. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu.

**Diagram 2.27** Perkembangan RT Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024




**Sumber:** Dinas PKP Kota Payakumbuh, 2024

Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau terus meningkat dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2020 sebesar 95,26% dan terus naik sampai dengan pada tahun 2024 sebesar 97,04%. Kondisi terjadi didukung dengan komitmen dan kerja keras Pemerintah Kota Payakumbuh dalam penyediaan rumah layak huni, baik melalui pendanaan APBD Kota Payakumbuh maupun APBN.

## K) TOTAL DANA PIHAK KETIGA/PDRB

Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di suatu daerah. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu daerah terhadap PDRB daerah tersebut pada suatu waktu tertentu.

Rentang tahun 2020-2024 terjadi fluktuasi total dana pihak ketiga terhadap PDRB dengan kecenderungan menurun, dimana pada tahun 2020 tercatat total dana pihak ketiga terhadap PDRB Kota Payakumbuh sebesar 34,56%, dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 35,72%. Namun tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan, sehingga pada tahun 2024 menyentuh 28,1% total dana pihak ketiga terhadap PDRB yang lebih rendah dibandingkan tahun 2020.

**Diagram 2.28** Perkembangan Total Dana Pihak Ketiga Dibandingan dengan PDRB Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024




**Sumber:** Otoritas Jasa Keuangan Sumbar, 2025 (Data diolah oleh Bappeda)

## L) NILAI TRANSAKSI SAHAM BERUPA NILAI RATA-RATA TAHUNAN

Nilai transaksi saham adalah total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor berdasarkan domisili (kota/kabupaten). Nilai transaksi saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham. Nilai transaksi saham tahunan Kota Payakumbuh selama periode tahun 2020-2024 terlihat adanya fluktuasi, hal ini karena adanya gairah pasar modal dengan adanya stimulus pasar uang oleh pemerintah pasca wabah COVID-19. Secara umum, sesuai pantauan OJK Sumbar, nilai transaksi saham di Kota Payakumbuh cukup berkembang yang tercatat pada tahun 2024 sebesar Rp.500,95 Milyar atau meningkat hampir 2 kali lipat dari nilai tahun 2020 sebesar Rp.260.98 Milyar.

**Diagram 2.29** Perkembangan Nilai Transaksi Saham Tahunan Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024




**Sumber:** Otoritas Jasa Keuangan Sumbar, 2025

## M) TOTAL KREDIT/PDRB

Total kredit per-daerah adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di lingkup daerah tersebut. Total Kredit/PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu daerah terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) daerah tersebut pada suatu waktu tertentu.

Total kredit/PDRB Kota Payakumbuh cukup tinggi, di mana tahun 2020-2022 berada di atas 50%, namun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 dan 2024, dengan nilai pada tahun 2024 sebesar 48,20%. Walaupun ada penurunan pada tahun 2023-2024, peran perbankan dalam perekonomian Kota Payakumbuh cukup signifikan tanpa melihat jenis kredit yang diberikan, apakah kredit yang bersifat produktif atau konsumtif.

**Tabel 2.38** Total Kredit per PDRB Kota Payakumbuh tahun 2020-2024

| URAIAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Kredit (milyar rupiah) | 3.702,62 | 3.989,32 | 4.138,64 | 4.373,52 | 4.541,28 |
| PDRB (milyar rupiah) | 6.827,09 | 7.302,50 | 8.250,3 | 8.982,35 | 9.421 |
| **Total Kredit/PDRB (%)** | **54,23** | **54,63** | **50,16** | **48,69** | **48,20** |

**Sumber:** OJK Sumbar, BPS Kota Payakumbuh, 2025 (Data diolah oleh Bappeda)

## N). RASIO PDRB JASA KEUANGAN

Rasio PDRB jasa Keuangan adalah perbandingan antara PDRB jasa Keuangan dibandingkan dengan PDRB berdasarkan harga berlaku (ADHB). Rasio jasa keuangan terhadap PDRB adalah seberapa besar kontribusi sektor jasa keuangan terhadap total produktivitas daerah Kota Payakumbuh. Nilainya cenderung fluktuatif tergantung dengan kondisi perekonomian

secara umum, dan mengalami penurunan pada tahun 2022 dan kembali naik pada tahun 2023 dan 2024 dengan nilai sebesar 6,00% pada tahun 2024.

**Tabel 2.39** Rasio PDRB Jasa Keuangan Kota Payakumbuh tahun 2020-2024

| URAIAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jasa Keuangan dan Asuransi (milyar) | 402,98 | 449,56 | 449,59 | 525,94 | 565,64 |
| PDRB (milyar) | 6.827,09 | 7.302,50 | 8.250,30 | 8.982,35 | 9.421 |
| **% PDRB Jasa Keuangan** | **5,90** | **6,16** | **5,45** | **5,86** | **6,00** |

**Sumber:** Payakumbuh Dalam Angka 2025, 2025 (Data diolah oleh Bappeda)

## O). INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak hanya diukur oleh tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas manusia. Secara umum keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia dapat ditunjukkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dibentuk melalui 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu :

a) Umur panjang dan hidup sehat;
b) Pengetahuan;
c) Standar hidup layak.

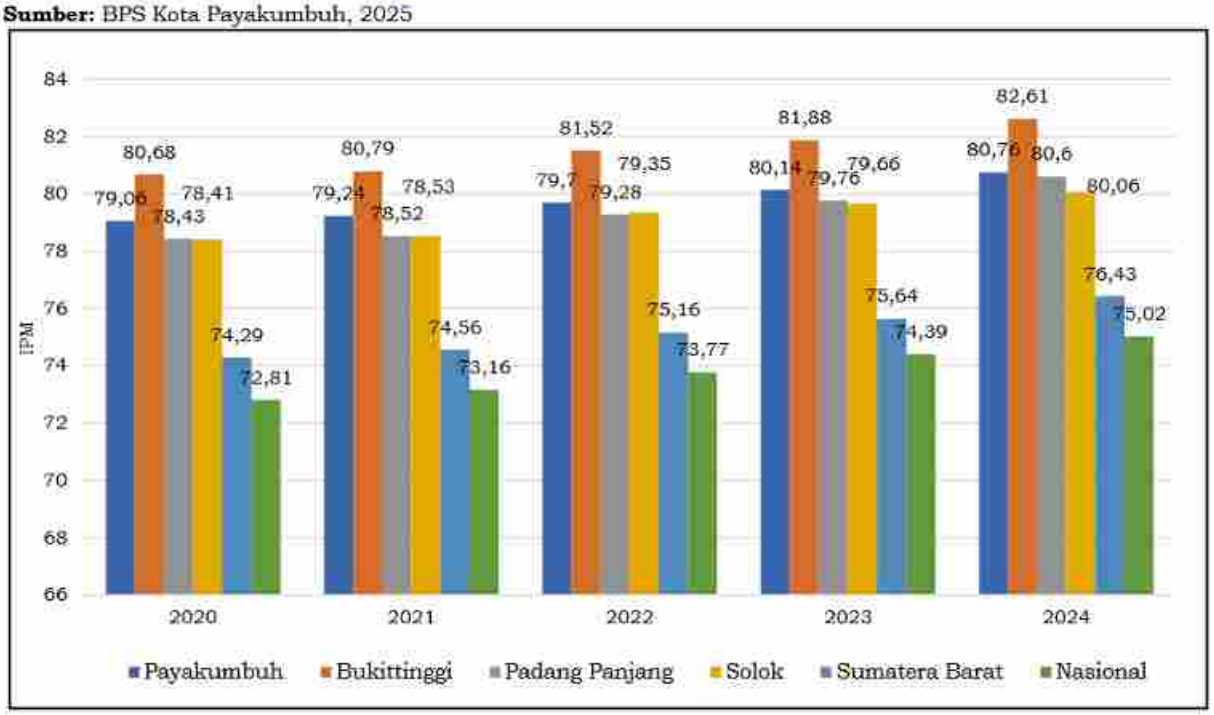
IPM dapat digunakan sebagai ukuran kinerja pemerintah dan juga sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Capaian IPM ini dikelompokan pada 4 (empat) kategori yaitu:

a. IPM < 60 : IPM Rendah;
b. 60 ≤ IPM < 70 : IPM Sedang;
c. 70 ≤ IPM < 80 : IPM Tinggi;
d. IPM ≥ 80 : IPM Sangat Tinggi

Upaya percepatan peningkatan IPM difokuskan kepada peningkatan pelayanan dasar baik pendidikan maupun kesehatan yang didukung oleh infrastruktur yang memadai yang bertujuan untuk mendorong perekonomian masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan wirausaha baru. IPM Kota Payakumbuh tahun 2020-2024 mengalami peningkatan dari angka 79,06 pada tahun 2020 menjadi 80,76 pada tahun 2024. Hal tersebut mengindikasi bahwa capaian pembangunan manusia di Kota Payakumbuh sangat tinggi, namun masih di bawah IPM Kota Bukittinggi, dan di atas IPM Kota Solok dan Padang Panjang. Perkembangan capaian IPM periode 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada diagram 2.30.

**Diagram 2.30** Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

**Sumber:** BPS Kota Payakumbuh, 2025




## P). PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA PER-BULAN

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan adalah ukuran rata-rata jumlah uang yang dikeluarkan oleh setiap individu dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi setiap bulannya. Pengeluaran ini mencerminkan tingkat kesejahteraan dan pola konsumsi masyarakat, dan biasanya dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran untuk non makanan. Tujuan adalah untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, menetapkan garis kemiskinan, merancang kebijakan sosial dan ekonomi, serta melihat kesenjangan konsumsi antar wilayah. Untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan dapat dilihat pada tabel 2.40

**Tabel 2.40** Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan di Kota Payakumbuh tahun 2020 s.d 2024

| URAIAN | SATUAN | REALISASI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita | Rp. Ribu | 1.964,89 | 1.990,31 | 1.576,52 | 15.790,30 | 16.350,03 |

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan di Kota Payakumbuh dari tahun 2020 semakin lama semakin besar yang mengidentifikan bahwa kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

## Q). PRODUKTIVITAS TOTAL DAERAH

Produktivitas Total Daerah adalah ukuran efisiensi dan efektivitas suatu daerah dalam memanfaatkan sumber daya (tenaga kerja, modal, lahan, teknologi, dll.) untuk menghasilkan output ekonomi. Ini merupakan indikator penting untuk melihat kinerja ekonomi suatu wilayah secara menyeluruh. Produktivitas Total Daerah mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola input seperti tenaga kerja, modal, SDA, dan teknologi untuk menghasilkan output berupa PDRB dan nilai tambah, yang diukur melalui indikator seperti PDRB per tenaga kerja dan pertumbuhan PDRB terhadap input, dengan manfaat menilai daya saing, menyusun kebijakan, membandingkan wilayah, serta mengidentifikasi sektor prioritas, dan dipengaruhi oleh kualitas SDM, infrastruktur, kebijakan, serta iklim investasi.

**Tabel 2.41** Produktivitas Total Daerah di Kota Payakumbuh tahun 2020 s.d 2024

| URAIAN | SATUAN | REALISASI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Produktivitas Total Daerah | Rp. Milyar | 95,84 | 98,12 | 199,9 | 115,3 | 120,97 |

Dari tabel diatas terlihat bahwa produktivitas total daerah di Kota Payakumbuh semakin tinggi yang mengidentifikasikan bahwa Kota Payakumbuh makin efisien dan efektif dalam memanfaatkan sumber daya (tenaga kerja, modal, SDA, teknologi) untuk menghasilkan output ekonomi.

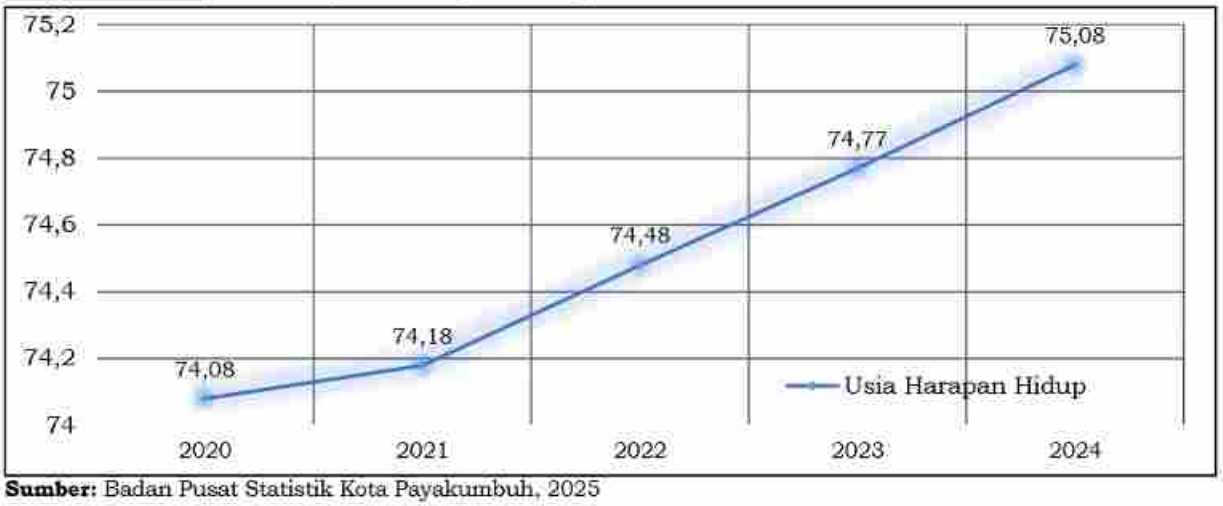
## 2). KESEHATAN UNTUK SEMUA

Kesehatan untuk semua diartikan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat yang akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Tahapan awal dalam memperhatikan kesehatan masyarakat yaitu dengan memperhatikan gizi masyarakat, karena memengaruhi kesehatan fisik dan mental masyarakat. Selain itu pengetahuan masyarakat terkait pengetahuan di bidang kesehatan juga perlu ditingkatkan karena dengan memberdayakan masyarakat, pemerintah telah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk membuat pilihan yang tepat dan cermat dalam meningkatkan derajat kesehatan mereka.

## A). USIA HARAPAN HIDUP

Kondisi Usia Harapan Hidup (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada diagram 2.31 terlihat dari tahun 2020-2024 terjadi peningkatan UHH masyarakat Kota Payakumbuh dari 74,08 menjadi 75,08 tahun pada tahun 2024 yang dapat diartikan adanya perbaikan status kesejahteraan masyarakat, termasuk peningkatan akses layanan kesehatan masyarakat di Kota Payakumbuh.

**Diagram 2.31** Usia Harapan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

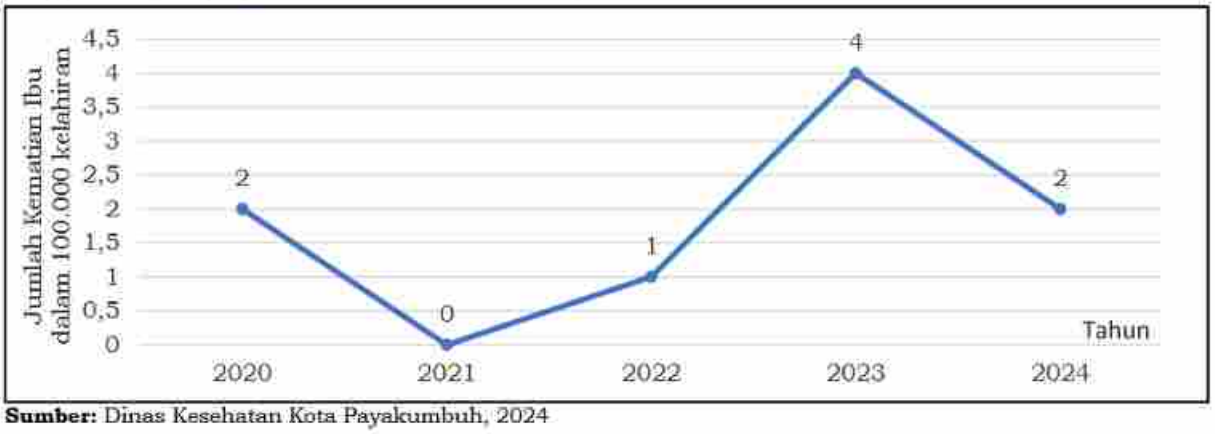



**Sumber:** Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh, 2025

## B). ANGKA KEMATIAN IBU

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal disebabkan kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. AKI Kota Payakumbuh berada pada posisi terbaik pada tahun 2021 dengan 0 kematian ibu. Namun pada tahun 2022, tercatat 1 orang dan naik pada tahun 2023 menjadi 4 orang, yang merupakan AKI tertinggi dalam 5 tahun terakhir, dan pada tahun 2024 menurun menjadi 2 orang AKI.

**Diagram 2.32** Angka kematian Ibu Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024



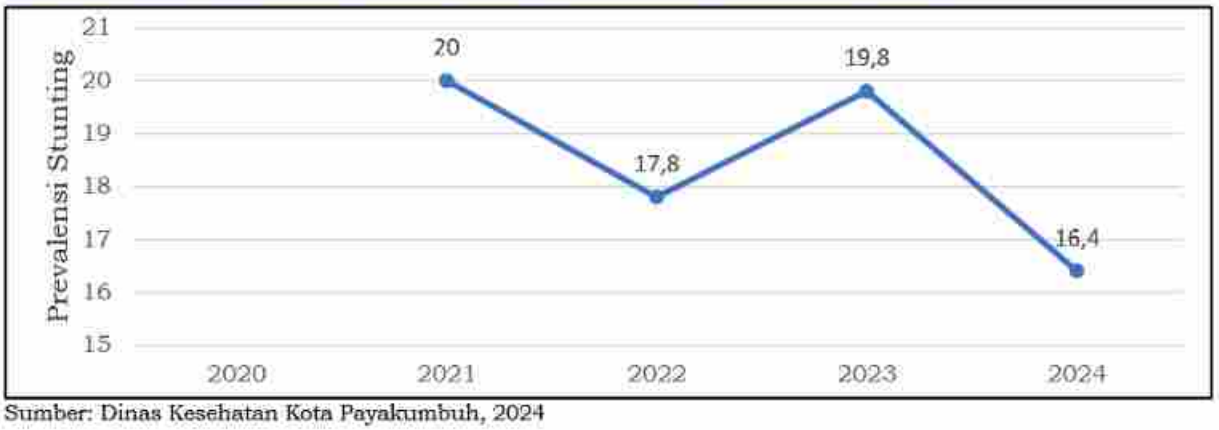

**Sumber:** Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2024

## C). PREVALENSI STUNTING

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak

balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (*Z-score*) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005.

**Diagram 2.33** Prevalensi Stunting Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024



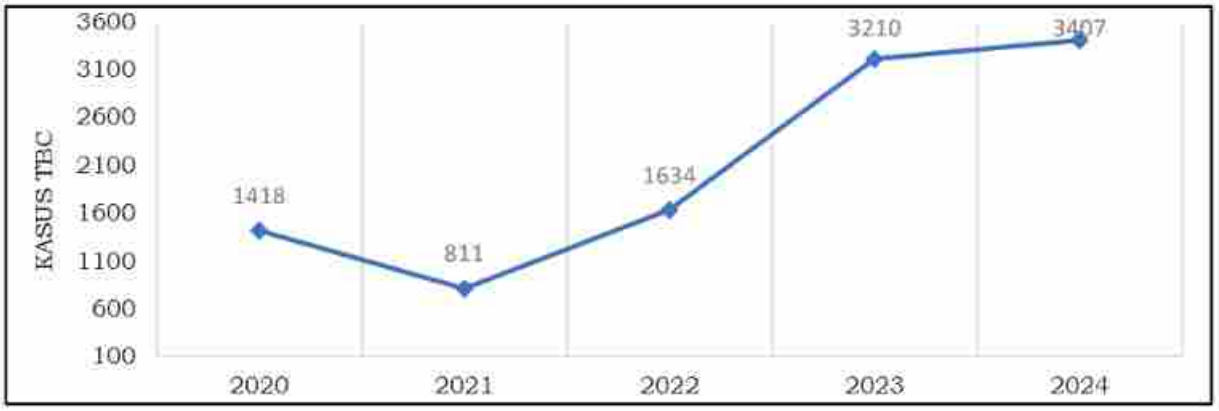

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2024

Prevalansi Stunting mulai terdata berdasarkan hasil SSGI (Survey Status Gizi Indonesia) pada tahun 2021 dengan angka 20,00, dan menurun pada tahun 2022 menjadi 17,8, namun mengalami kenaikan menjadi 19,8 dan kembali menurun pada tahun 2024 dengan angka 16,4. Sementara itu, di tingkat pemerintah kota, juga dilaksanakan pendataan stunting oleh setiap puskesmas dengan aplikasi E-PPGBM. E-PPGBM merupakan sistem elektonik pencatatan dan pelaporan Gizi berbasis masyarakat yang memuat data hasil pengukuran dan pelaporan gizi yang dientri setiap bulan oleh Pengelola Gizi di tiap-tiap Puskesmas.

## D). CAKUPAN PENEMUAN DAN PENGOBATAN KASUS TUBERKULOSIS

Kasus tuberkulosis dipengaruhi oleh faktor kurangnya cakupan penemuan, komitmen pengambil kebijakan dan pelaksana di lapangan, masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap Tuberkulosis, kurangnya kolaborasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait dan belum maksimalnya pelaksanaan Investigasi Kontak (IK) dilaksanakan di Kabupaten/ Kota.

**Diagram 2.34** Kasus Tuberkulosis di Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024



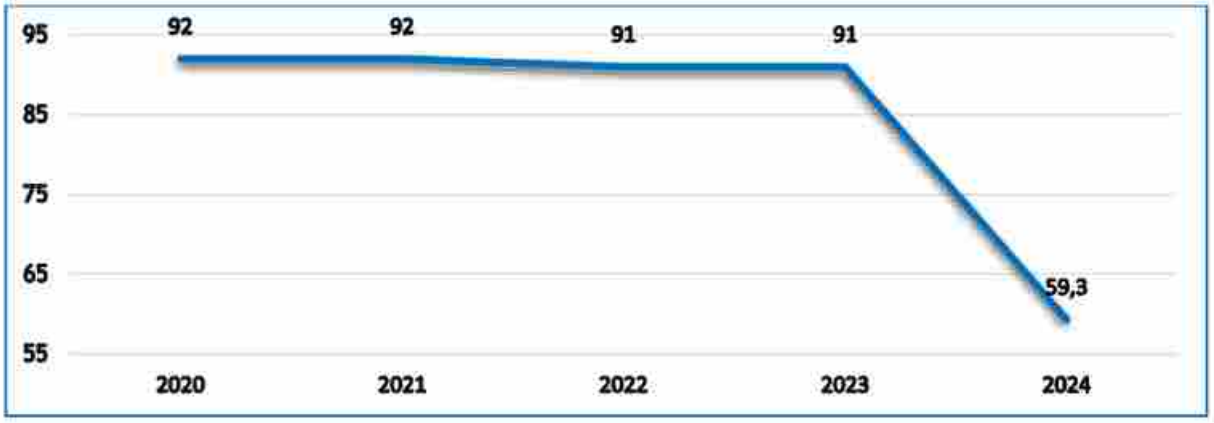

**Sumber:** Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2024

## E) ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN TUBERKULOSIS

Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap merupakan angka keberhasilan dalam pengobatan tuberkulosis. Untuk mencapai angka keberhasilan tersebut dibutuhkan layanan TB yang memadai, baik layanan pemerintah maupun swasta, Alat Penegakan Diagnosis TB sudah tersedia di Rumah Sakit Pemerintah, dan beberapa Puskesmas. Disamping itu, dengan beberapa daerah tersedia RS Khusus Paru berkontribusi besar untuk penemuan kasus TB dan pengobatannya. Dukungan anggaran dari Negara Donor (GF), Komunitas peduli TB dan Koalisi Organisasi Peduli TB (KOPI) di beberapa daerah serta keterlibatan LAPAS dalam penemuan kasus TB, dan dukungan lainnya sangat berpengaruh dalam upaya penanganan kasus TB.

Jika dilihat pada diagram 2.35 angka penyembuhan tuberkulosis di Kota Payakumbuh cukup baik, dengan kecenderungan menurun. Dengan titik terendah selama 5 (lima) tahun terakhir pada tahun 2024 yang tercatat sebesar 59,3%. Hal ini dikarenakan masih ada penderita yang tidak taat pengobatan sebagaimana prosedur pengobatan TB yang ditetapkan.

**Diagram 2.35** Angka Penyembuhan Kasus Tuberkulosis di Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024




**Sumber:** Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2024

## F). CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Penerapan *Universal Health Coverage* di kabupaten/kota terkendala pada terbatasnya pembiayaan yang cukup dan berkelanjutan. Keterbatasan sumber daya keuangan menjadi hambatan utama dalam mencapai UHC. Hal ini mempengaruhi terhadap jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.

**Tabel 2.42** Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

| URAIAN | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Jumlah Penduduk | 139.576 | 141.184 | 143.330 | 144.830 | 146.731 |
| Jumlah Kepesertaan JKN | 124.128 | 129.584 | 137.077 | 142.249 | 145.255 |

| URAIAN | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Jaminan Kesehatan (%) | 88,93 | 91,8 | 95,64 | 99,05 | 98,99 |

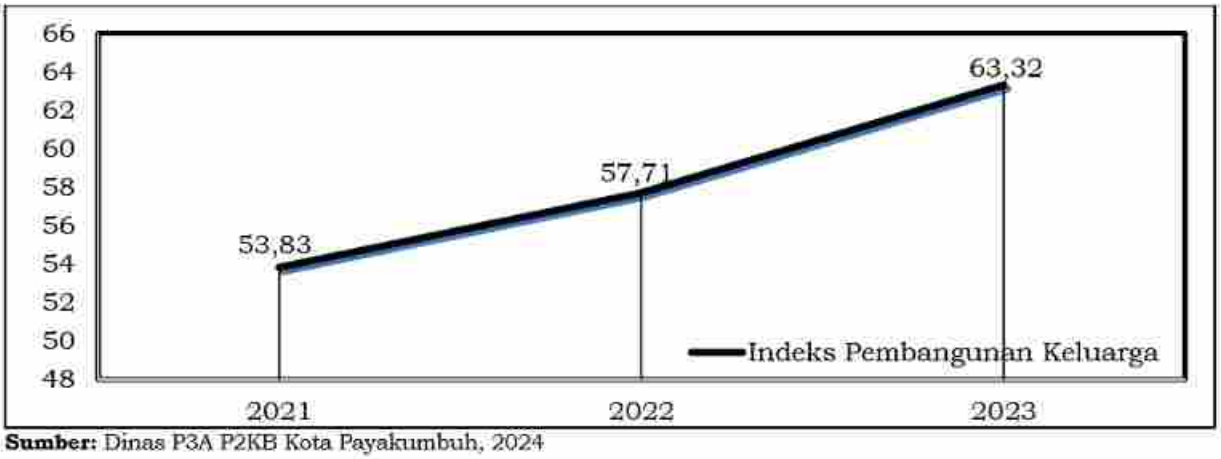
**Sumber:** Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2024

Dari tabel 2.42 menunjukan jaminan kesehatan di Kota Payakumbuh dari tahun 2020 sampai 2024 dapat dikatakan sudah terpenuhi. Di mana tahun 2024, jaminan kesehatan sudah mencapai 98,99%.

### G) INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA

Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) digunakan untuk menemukan permasalahan keluarga hingga ke dasar, sehingga penanganannya dapat dilakukan secara tepat dan juga bisa mengukur kemajuan pembangunan keluarga. IPK merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga yang dibentuk dari 17 variabel serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. IPK Kota Payakumbuh yang dimulai pengukurannya sejak tahun 2021 digambarkan pada diagram 2.35 IPK Kota Payakumbuh dalam 3 (tiga) tahun terakhir cenderung naik, dari 53,83 pada tahun 2021 menjadi 63,32 pada tahun 2023. Skala nilai tersebut dikategorikan cukup baik (berkembang). Nilai ini perlu ditingkatkan, sehingga IPK ini masuk dalam kategori baik (tangguh) direntang nilai 70-100.

**Diagram 2.36** Indeks Pembangunan Keluarga di Kota Payakumbuh Tahun 2021-2023




**Sumber:** Dinas P3A P2KB Kota Payakumbuh, 2024

### 3). PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG MERATA

Pendidikan berkualitas merupakan landasan penting dalam pembangunan suatu negara. Di Indonesia, pemerintah telah berkomitmen untuk mewujudkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, tantangan besar masih harus diatasi agar tujuan ini dapat tercapai sepenuhnya. Artikel ini akan membahas tentang upaya pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan berkualitas di Indonesia. Pendidikan merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa akses pendidikan berkualitas masih belum

merata di seluruh wilayah Indonesia. Terdapat kesenjangan antara kota dan desa, serta antara pulau-pulau di Indonesia. Faktor geografis, infrastruktur, dan ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas menjadi hambatan utama dalam mewujudkan akses pendidikan yang merata. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap anak di berbagai daerah memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

## A). PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN YANG MENCAPAI STANDAR KOMPETENSI MINIMUM PADA ASESMEN TINGKAT NASIONAL

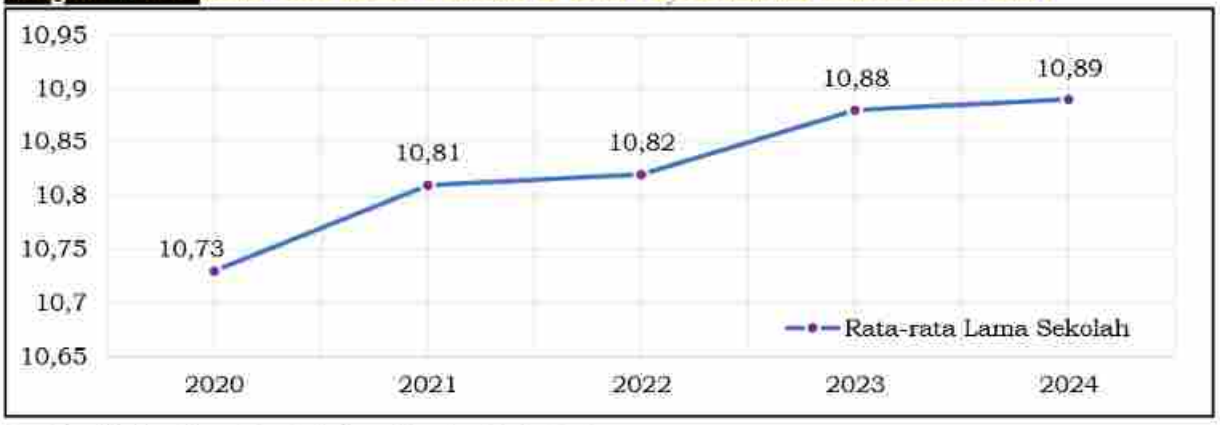
Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1). Perlu intervensi khusus 2). Dasar 3). Cakap 4). Mahir.

Dikategorikan sudah "mencapai kompetensi minimum" jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap". Hasil asesmen nasional terhadap satuan pendidikan Kota Payakumbuh yang mencapai standar kompetensi minimum pada tahun 2022 adalah 64,19% dan tahun 2023 mencapai 76,22%.

## B). RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Rata-rata lama sekolah merupakan waktu rata-rata (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah.

**Diagram 2.37** Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024




**Sumber:** Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh, 2024

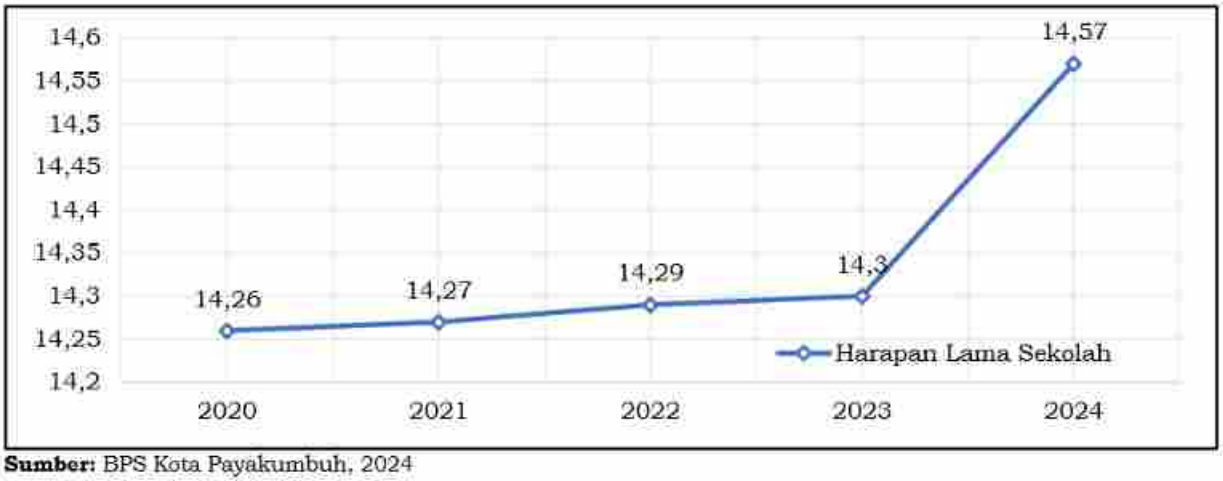
Diagram 2.37 memperlihatkan rata-rata lama sekolah di Kota Payakumbuh rentang 10 – 11 tahun atau pada kelas 1-2 SMA dimana terakhir tercatat pada tahun 2024 selama 10,89 tahun.

## C). HARAPAN LAMA SEKOLAH

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan waktu lamanya sekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak usia sekolah pada masa mendatang. Untuk meningkatkan harapan lama sekolah di Kota Payakumbuh, Pemerintah Kota Payakumbuh berupaya membuat kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah, disamping pemberian pendanaan /beasiswa yang cukup bagi peserta didik sehingga bisa mengakses pendidikan yang lebih baik, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, serta dukungan peningkatan kualitas tenaga pendidik/guru melalui pelatihan dan pendidikan lanjutannya, serta pengembangan kemitraan pemerintah masyarakat dan lembaga pendidikan dalam pengembangan pendidikan di Kota Payakumbuh.

Diagram 2.38 memperlihatkan HLS Kota Payakumbuh, cenderung meningkat dari tahun 2020-2024, namun peningkatannya relatif kecil, rata-rata hanya 0,01 tahun. Tahun 2024, mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 0,27 tahun dari tahun 2023 pada 14,57 tahun atau dengan kata lain level pendidikan D-III.

**Diagram 2.38** Harapan Lama Sekolah di Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

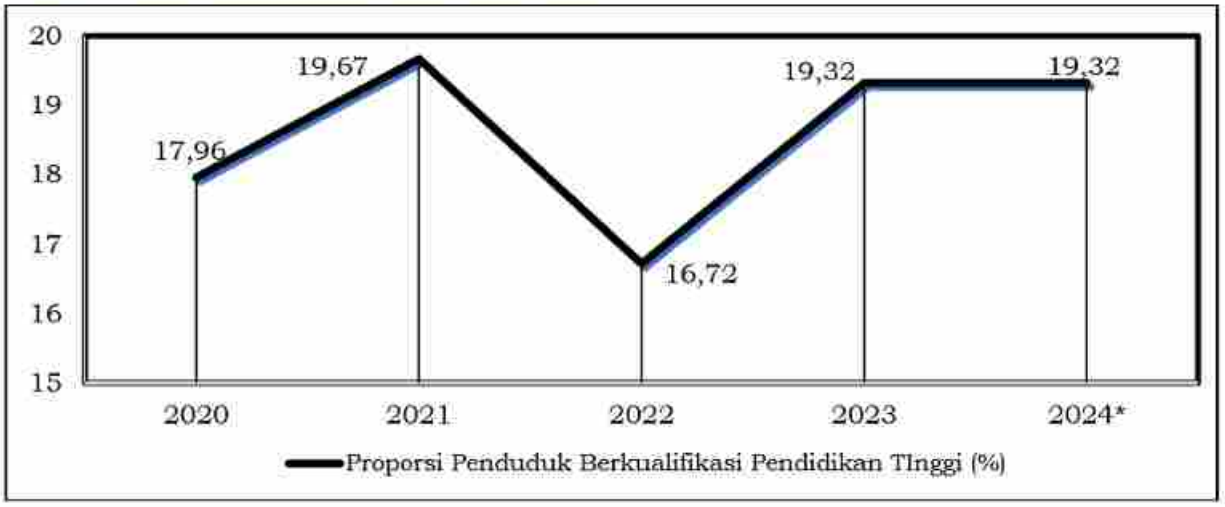



**Sumber:** BPS Kota Payakumbuh, 2024

## D). PROPORSI PENDUDUK BERUSIA 15 TAHUN KE ATAS YANG BERKUALIFIKASI PENDIDIKAN TINGGI

Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi digunakan untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Rata-rata penduduk Kota Payakumbuh berkualifikasi pendidikan tinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebesar 19,32% Jumlah ini tergolong masih rendah, disebabkan ketatnya persaingan masuk perguruan tinggi negeri dan mahalnya biaya pendidikan.

**Diagram 2.39** Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas dengan Kualifikasi Pendidikan Tinggi di Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024




**Sumber:** BPS Kota Payakumbuh, 2024 *) Angka Sementara

## E). PERSENTASE PEKERJA LULUSAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI BEKERJA DI BIDANG KEAHLIAN MENENGAH TINGGI

Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. Bidang keahlian menengah (*semi-skilled*) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan keahlian tinggi. Bidang keahlian tinggi (*skilled*) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya, sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan keahlian tinggi.

**Tabel 2.43** Klasifikasi Tingkat Pendidikan

| TINGKAT PENDIDIKAN RENDAH | TINGKAT PENDIDIKAN MENENGAH | TINGKAT PENDIDIKAN TINGGI |
|---|---|---|
| ➢ Tidak/ belum tamat SD<br>➢ SD/MI/SDLB/Paket A<br>➢ SMP/MTs/SMPB/Paket B | ➢ SMA/MA/SMLB/Paket C<br>➢ SMK<br>➢ MAK | ➢ Diploma I/II/III<br>➢ Diploma IV<br>➢ S1<br>➢ S2<br>➢ S2 Terapan<br>➢ S3 |

**Sumber:** Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2025

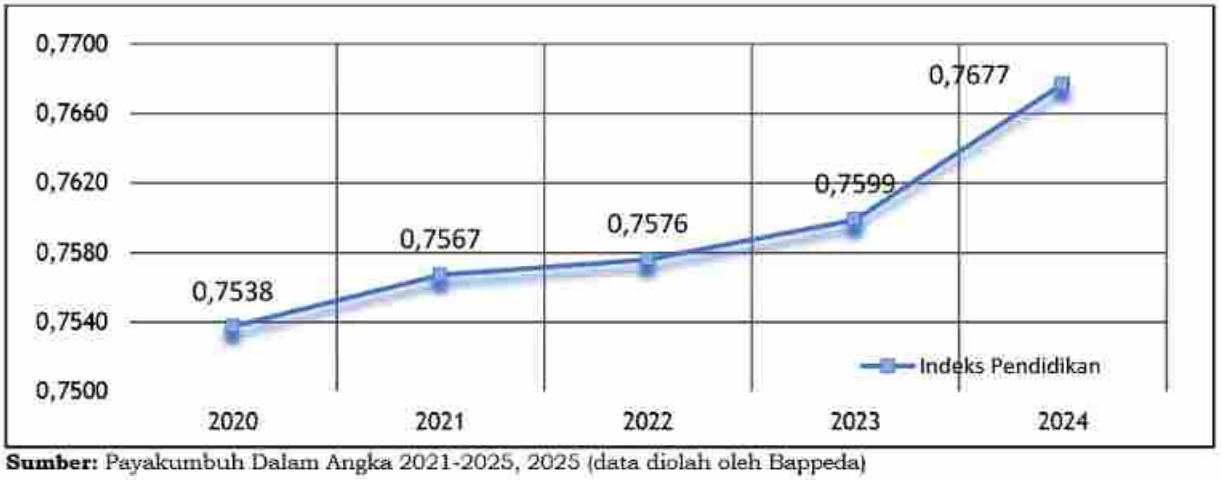
Indikator diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian rendah atau menengah atau tinggi. Untuk Kota Payakumbuh, data yang tersedia hanya pada tahun 2024, di

mana jumlah angkatan kerja yang mengenyam pendidikan menengah tinggi sebanyak 29.392 orang tamatan SMA/ sederajat, dan18.558 orang tamatan perguruan tinggi/diploma, sekitar 64,72% dari total angkatan kerja yang bekerja.

## F). INDEKS PENDIDIKAN

Indeks pendidikan merupakan komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia yang mencerminkan hasil pembangunan bidang pendidikan dan mempunyai kedudukan strategis, mengingat kualitas sumber daya manusia yang tercermin di dalamnya sangat menentukan tingkat produktivitas suatu daerah. Indeks Pendidikan diukur dari HLS dan RLS yang terlihat adanya peningkatan yang konstan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada diagram 2.40 terlihat indeks Pendidikan Kota Payakumbuh pada tahun 2020 sebesar 0,7538 dan terus meningkat sampai dengan tahun 2024 sebesar 0,7677.

**Diagram 2.40** Perkembangan Indeks Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024




**Sumber:** Payakumbuh Dalam Angka 2021-2025, 2025 (data diolah oleh Bappeda)

## G). PERPUSTAKAAN

Seiring dengan perkembangan multimedia yang memberikan kemudahan akses terhadap data, berita dan informasi. Menjadikan hal ini sebagai tantangan bagi perpustakaan daerah kedepannya. Perpustakaan harus menjadi sarana aktif/interaktif dan menjadi tempat dihasilkannya berbagai hal baru. Untuk mewujudkan kondisi perpustakaan sesuai dengan fungsi dan peranannya, maka perpustakaan harus diubah sistem operasionalnya dari perpustakaan manual/tradisional menjadi perpustakaan yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi.

Payakumbuh mengambil prinsip "**Literasi Menuju Kesejahteraan**", prinsip ini mengupayakan peningkatan budaya baca di tengah masyarakat. Dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi diharapkan setiap perpustakaan secara bertahap dapat mengejar ketertinggalan dari perpustakaan yang lebih maju dan lebih modern serta dapat mengoptimalkan fungsi perpustakaan bagi masyarakat. Selain hal tersebut diperlukan suatu

manajemen pengelolaan yang sesuai dengan standar dalam mengelola perpustakaan. Tahun 2023, jumlah judul koleksi buku yang ada di perpustakaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan jumlah buku dari 17.339 menjadi 19.246. Sedangkan untuk jumlah kunjungan perpustakaan menurun dari tahun 2022 menjadi 8.549 kunjungan di tahun 2023. Populasi yang harus dilayani adalah penduduk Kota Payakumbuh usia antara 5 s/d 69 tahun, dengan tidak menutup pelayanan untuk masyarakat dari luar kota. Jumlah perpustakaan yang berada di bawah kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh terdiri dari 1 (satu) unit Perpustakaan Daerah Kota Payakumbuh dan beberapa unit TBM (Taman Bacaan Masyarakat)/ Perpustakaan Kelurahan, sebagaimana digambarkan pada tabel 2.44 berikut.

**Tabel 2.44** Perkembangan Perpustakaan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 - 2023

| NO | URAIAN | SATUAN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah | Eks | 6.914 | 6.914 | 7.204 | 8.519 | 9.520 |
| | Jumlah Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah | Eks | 15.501 | 15.501 | 16.801 | 17.339 | 19.246 |
| | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | % | 44,60 | 44,60 | 44,80 | 49,13 | 49,46 |
| 2 | Kunjungan perpustakaan | Orang | 15.102 | 6.673 | 3.642 | 10.208 | 8.549 |
| | Orang dalam populasi yang harus dilayani | Orang | 118.704 | 123.907 | 125.149 | 125.349 | 144.727 |
| | Pengunjung perpustakaan | % | 12,72 | 5,39 | 2,91 | 8,14 | 5,91 |
| 3 | Jumlah perpustakaan | Unit | 38 | 42 | 42 | 40 | 40 |

**Sumber:** Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Payakumbuh, 2024

## H). INDEKS MASYARAKAT DIGITAL INDONESIA

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan sebuah *toolkit* yang dapat digunakan untuk mengukur kondisi literasi dan keterampilan digital masyarakat suatu daerah. Diharapkan dengan adanya *tool* ini dapat berperan penting dalam mendorong akselerasi transformasi digital masyarakat. Terdapat 4 (empat) pilar dalam menentukan indeks ini, yaitu infrastruktur dan ekosistem, keterampilan digital, pemberdayaan dan pekerjaan. Pengukuran pilar-pilar tersebut dapat memberikan gambaran mengenai kondisi masyarakat digital daerah secara lebih komprehensif, objektif, dan standardisasi.

Pengukuran IMDI untuk daerah baru dilakukan pada tahun 2022. IMDI Kota Payakumbuh pada tahun 2022 adalah 46,64 dan tahun 2023 turun menjadi 44,39 penurunan ini disebabkan belum optimalnya upaya peningkatan pilar pemberdayaan digital oleh pemerintah daerah dan masih rendahnya pemanfaatan digitalisasi bagi usaha-usaha pada UMKM yang ada di daerah. Pemerintah Kota Payakumbuh harus melakukan stimulus

ekonomi melalui pemberdayaan UMKM secara digital, sehingga menjadi momentum bagi UMKM untuk menguatkan dan menyelaraskan tumbuh kembangnya infrastruktur, meningkatnya SDM digital dengan langkah pemberdayaan digital tersebut.

### 4). PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF

Perlindungan Sosial yang Adaptif (*Adaptive Social Protection*/ ASP) adalah pendekatan perlindungan sosial yang dirancang untuk merespons risiko dan kerentanan yang terus berubah, terutama akibat krisis, bencana alam, perubahan iklim, dan guncangan ekonomi. Konsep ini menggabungkan elemen dari perlindungan sosial, penanggulangan bencana, dan adaptasi perubahan iklim, sehingga lebih fleksibel dan responsif terhadap berbagai kondisi darurat.

### A). CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja. Cakupan Jaminan Sosial Tenaga Kerja didapat dari jumlah peserta BPJS ketenagakerjaan dibagi jumlah penduduk bekerja dikali 100%, dimana peserta merupakan pekerja penerima upah (PPU), jasa kontruksi dan pekerja bukan penerima upah. Sedangkan penduduk yang bekerja merupakan penduduk bekerja yang berusia 15-65 tahun. Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap resiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak. Untuk tahun 2024, data dari BPJS Ketenagakerjaan, jumlah pekerja yang terdaftar dan memiliki program jaminan kecelakaan kerja sebanyak 14.785 jiwa, dan jumlah penduduk bekerja sebanyak 74.085 jiwa. Tercatat sekitar 19,96% cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di Kota Payakumbuh, angka yang masih sangat rendah dan perlu upaya dan kebijakan untuk meningkatkan cakupan ini.

### B). PERSENTASE DISABILITAS BEKERJA DI SEKTOR FORMAL

Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada

status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat.

Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal mendapatkan jobs security, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal. Dimana persentase disabilitas bekerja di sektor formal didapat dari jumlah pekerja penyandang disabilitas sektor formal dibagi jumlah angkatan kerja penyandang disabilitas dibagi 100%.

## 5). BERAGAMA MASLAHAT DAN BERKEBUDAYAAN MAJU

Beragama maslahat dan berkebudayaan maju adalah cara hidup yang menyatukan spiritualitas dan kemajuan, memadukan iman dan kemanusiaan, serta mendorong keharmonisan dan pembangunan sosial. Ini adalah pendekatan visioner, toleran, dan berkelanjutan yang sangat relevan untuk membangun masa depan bangsa yang beradab dan sejahtera.

### A). INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah ukuran kuantitatif yang disusun oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengukur tingkat kerukunan antar umat beragama di berbagai wilayah di Indonesia. IKUB menunjukkan seberapa harmonis kehidupan antar pemeluk agama, berdasarkan sikap saling menghormati, bekerja sama, dan toleransi antar kelompok agama. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah alat penting untuk mengukur, memahami, dan membina kehidupan lintas agama yang damai dan produktif. IKUB mencerminkan sejauh mana masyarakat Indonesia hidup dalam toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antar umat beragama. Indeks ini biasanya diukur melalui survei yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, bekerja sama dengan lembaga survei atau lembaga penelitian. Hasil survei ini kemudian dinilai dengan skala 0–100, di mana **0–50** = Rendah, **51–75** = Sedang, dan **76–100** = Tinggi. Untuk indeks kerukunan umat beragama di kota Payakumbuh belum tersedia.

### B). INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah sebuah indikator komposit yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia untuk mengukur sejauh mana pembangunan kebudayaan dilakukan secara terstruktur dan berdampak di berbagai wilayah Indonesia. Indeks ini bertujuan untuk menjadikan kebudayaan sebagai landasan pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Untuk data Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kota Payakumbuh hanya tersedia pada tahun 2024 mencapai skor 72,09 yang dikategorikan baik. IPK ini disusun berdasarkan pendekatan lokal khas Minangkabau, yaitu ABS–SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah), yang mengintegrasikan nilai-nilai adat dan agama dalam pembangunan kebudayaan di Kota Payakumbuh.

## 6). KELUARGA BERKUALITAS, KESETARAAN GENDER, DAN MASYARAKAT INKLUSIF

Keluarga berkualitas adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar fisik, psikologis, sosial, ekonomi, dan spiritual anggotanya secara seimbang dan berkesinambungan, serta memiliki kemampuan adaptif terhadap perubahan zaman. Kesetaraan gender adalah kondisi di mana perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang setara dalam semua aspek kehidupan di rumah, tempat kerja, pendidikan, politik, dan masyarakat. Masyarakat inklusif adalah masyarakat yang menerima, menghargai, dan melibatkan semua kelompok tanpa diskriminasi, termasuk penyandang disabilitas, minoritas agama, suku, etnis, gender, usia, status sosial, dan kelompok rentan lainnya.

### A). INDEKS PERLINDUNGAN ANAK

Indeks Perlindungan Anak adalah alat ukur atau indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana hak-hak anak terlindungi dan terpenuhi di suatu wilayah, baik secara nasional maupun daerah. Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai kondisi perlindungan anak agar dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan oleh pemerintah, lembaga, maupun masyarakat. Pada Tahun 2020, Kota Payakumbuh menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), sebagai pengakuan atas komitmen dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan Perempuan. Pada tahun 2021, APE meningkat menjadi Madya untuk peningkatan dalam implementasi strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). Pada tahun 2023, Kota Payakumbuh berhasil meraih penghargaan APE kategori Nindya dari KPPPA, menandakan peningkatan signifikan dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

**Tabel 2.45** Apresiasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kota Payakumbuh Tahun 2020 – 2023

| NO | TAHUN | INDEKS INOVASI |
|---|---|---|
| 1 | 2020 | Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Pratama |
| 2 | 2021 | Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Madya |

| NO | TAHUN | INDEKS INOVASI |
|---|---|---|
| 3 | 2022 | Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Madya |
| 4 | 2023 | Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Nindya |

**Sumber:** DP3AP2KB, 2025

## B). INDEKS PEMBANGUNAN KUALITAS KELUARGA

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga) adalah suatu ukuran komprehensif yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menilai kualitas keluarga di Indonesia. Indeks ini menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional berbasis keluarga, karena keluarga dianggap sebagai unit terkecil dan paling fundamental dalam masyarakat. Nilai iBangga berkisar dari 0 hingga 100, dimana < 60: Keluarga dalam kategori kurang berkualitas, 60 – 79,99: Cukup berkualitas dan 80 – 100: Sangat berkualitas.

Pada tahun 2024, Kota Payakumbuh meraih nilai iBangga tertinggi di antara kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, dengan skor 1465,5. Atas pencapaian tersebut, Kota Payakumbuh mewakili Provinsi Sumatera Barat dalam penilaian iBangga Award tingkat nasional dan berhasil masuk dalam lima besar nasional. Pada peringatan Hari Keluarga Nasional ke-31 tahun 2024 di Semarang, Pj Wali Kota Payakumbuh menerima penghargaan iBangga dari Kepala BKKBN, sebagai pengakuan atas konsistensi peningkatan indeks pembangunan keluarga di kota tersebut. Kota Payakumbuh telah menunjukkan komitmen dan keberhasilan dalam meningkatkan kualitas keluarga melalui berbagai program dan intervensi yang berfokus pada ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga.

## C). INDEKS KETIMPANGAN GENDER

Indeks Ketimpangan Gender (Gender Inequality Index atau GII) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia. Indeks ini dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) dan pertama kali diperkenalkan dalam Human Development Report tahun 2010. Skornya berkisar antara 0 hingga 1 dimana 0 berarti tidak ada ketimpangan gender dan 1 berarti ketimpangan total antara laki-laki dan perempuan. Untuk data indeks ketimpangan gender kota payakumbuh belum tersedia.

**Tabel 2.46** Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

| NO | TAHUN | IKG |
|---|---|---|
| 1 | 2020 | 0,279 |
| 2 | 2021 | 0,325 |
| 3 | 2022 | 0,295 |
| 4 | 2023 | 0,153 |
| 5 | 2024 | 0,175 |

**Sumber:** BPS, 2025

### D). INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

Indeks Pembangunan Gender (GDI) adalah sebuah ukuran yang dikembangkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) sebagai pelengkap dari Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*/HDI). GDI bertujuan untuk mengukur kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu negara atau wilayah. Data Indeks ketimpangan Gender Kota Payakumbuh hanya tersedia untuk tahun 2024 yaitu 0,175 yang dapat diartikan bahwa tingkat ketimpangan gender yang sangat rendah, hal ini menjadikan Kota Payakumbuh sebagai salah satu kota dengan kesetaraan gender terbaik di Provinsi Sumatera Barat.

**Tabel 2.47** Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

| NO | TAHUN | IPG |
|---|---|---|
| 1 | 2020 | 98,46 |
| 2 | 2021 | 98,60 |
| 3 | 2022 | 98,61 |
| 4 | 2023 | 98,58 |
| 5 | 2024 | 98,93 |

**Sumber:** BPS, 2025

### E) INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA

Indeks Pembangunan Pemuda (Youth Development Index/ YDI) adalah suatu alat pengukuran yang digunakan untuk menilai dan memantau kualitas hidup serta kemajuan pembangunan yang dialami oleh kaum muda (pemuda) di suatu negara atau wilayah, Indeks ini bertujuan untuk melihat secara komprehensif bagaimana kondisi pemuda dalam berbagai aspek penting yang mendukung perkembangan mereka menjadi individu yang produktif dan berkontribusi pada masyarakat. Untuk Indeks Pembangunan Pemuda Kota Payakumbuh belum tersedia.

## C. ASPEK DAYA SAING DAERAH

### 1). DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA

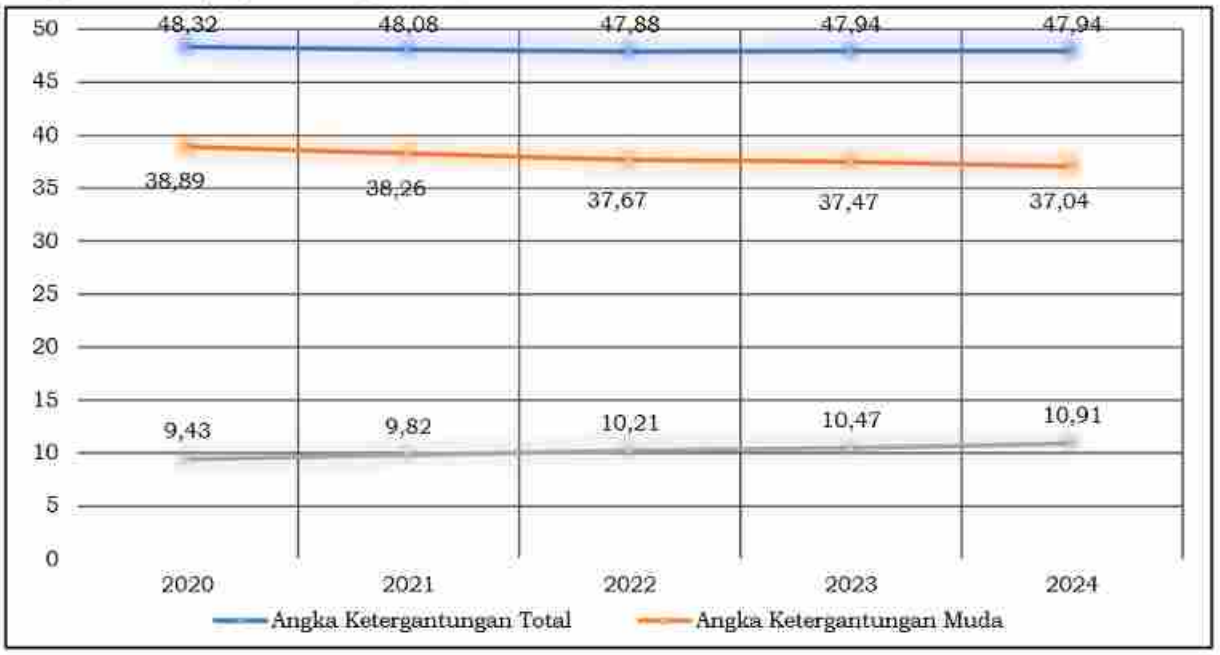
Sumber daya manusia merupakan faktor yang penting dalam menunjang daya saing suatu daerah, baik sebagai faktor produksi maupun pasar yang potensial terhadap hasil produksi yang dihasilkan. Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi salah satu indikasi keberhasilan pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat. Ada beberapa indikator yang dipergunakan untuk melihat daya saing sumber daya manusia, seperti Angka Ketergantungan.

### A) ANGKA KETERGANTUNGAN

Angka ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap

penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Angka ketergantungan rata-rata Kota Payakumbuh dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung menurun sebesar 0,38%. Walaupun adanya kecenderungan penurunan, tingkat ketergantungan tersebut masih tergolong cukup tinggi.

**Diagram 2.41** Angka Ketergantungan Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024




**Sumber:** Payakumbuh Dalam Angka, 2020-2024, 2024

Diagram 2.41 menunjukkan angka ketergantungan tahun 2024 sebesar 47,94, artinya setiap 100 orang penduduk usia kerja mempunyai tanggungan sebanyak 48 orang yang belum produktif atau dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 47,94 ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 37,04 dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 10,91. Dari beberapa indikator yang menjadi acuan untuk menggambarkan daya saing Kota Payakumbuh dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, maka hampir seluruhnya menunjukkan trend positif dalam menunjang daya saing.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat bersumber dari keahlian. Peningkatan keahlian dapat dilakukan melalui pelatihan dan kursus keterampilan sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Disamping itu, kesempatan kerja juga menjadi kebutuhan, yang diharapkan dengan kebijakan yang tepat dapat menciptakan *entrepreneur* yang pada akhirnya dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

## 2). IPTEK, INOVASI, DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), inovasi dan produktivitas ekonomi mencerminkan hubungan erat antara kemajuan IPTEK, kemampuan untuk menciptakan hal-hal baru (inovasi), dan peningkatan output ekonomi di mana IPTEK mencakup segala bentuk pengetahuan ilmiah dan teknologi yang digunakan untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kehidupan manusia di mana kemajuan IPTEK memungkinkan efisiensi dalam proses produksi, otomatisasi, dan peningkatan kualitas produk serta jasa. Inovasi adalah proses menciptakan atau memperbaharui produk, jasa, atau proses agar lebih efektif, efisien, dan bernilai. Sedangkan Produktivitas ekonomi mengukur efisiensi produksi, yaitu seberapa besar output yang dihasilkan dari input tertentu (tenaga kerja, modal, bahan baku). Peningkatan IPTEK dan inovasi sangat berperan dalam meningkatkan produktivitas, misalnya dengan penggunaan mesin otomatis dalam industri. IPTEK dan Inovasi yang menjadi pendorong untuk tidak hanya menjaga, melainkan juga mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan juga memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang.

### A) RASIO PDRB INDUSTRI PENGOLAHAN

Rasio PDRB industri pengolahan menunjukkan perbandingan antara nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan sektor industri pengolahan dengan PDRB secara keseluruhan. Tabel 2.48 memperlihatkan Rasio Industri pengolahan terhadap PDRB tidak terlalu besar dan ada kecenderungan menurun dengan data awal pada tahun 2020 memiliki rasio 0,049 dan pada akhir 2024 menjadi 0,048.

**Tabel 2.48** Rasio PDRB Industri Pengolahan Tahun 2020-2024

| NO | URAIAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lapangan Usaha Industri Pengolahan | 331,87 | 367,28 | 405,99 | 433,64 | 454,12 |
| 2. | PDRB | 6.827,09 | 7.302,50 | 8.250,30 | 8.982,35 | 9.421,00 |
| **Rasio** | | **0,049** | **0,050** | **0,049** | **0,048** | **0,048** |

**Sumber:** BPS Kota Payakumbuh, 2025

### B) RASIO PDRB AKOMODASI, MAKAN DAN MINUM

Rasio PDRB akomodasi makan dan minum menunjukkan perbandingan antara nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan sektor akomodasi, makan dan minum dengan PDRB secara keseluruhan. Tabel 2.49 memperlihatkan rasio akomodasi, makan dan minum terhadap PDRB tidak terlalu besar dan ada kecenderungan meningkat dengan data awal pada tahun 2020 memiliki rasio 0,031 dan pada akhir 2024 menjadi 0,035.

**Tabel 2.49** Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Tahun 2020-2024

| NO | URAIAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Penyediaan Usaha Industri Pengolahan | 206,62 | 230,03 | 276,10 | 304,03 | 328,69 |

| NO | URAIAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | PDRB | 6.087,09 | 7.302,50 | 8.250,30 | 8.982,35 | 9.421,00 |
| **Rasio** | | **0,031** | **0,315** | **0,033** | **0,033** | **0,035** |

sumber : BPS Kota Payakumbuh, 2025

## C) PROPORSI PDRB EKONOMI KREATIF

Proporsi PDB ekonomi kreatif adalah persentase kontribusi ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara atau wilayah. Ekonomi Kreatif dapat merangsang pertumbuhan pendapatan perkapita masyarakat. Hal ini karena ekonomi kreatif cenderung membutuhkan bahan baku dari masyarakat, sehingga terjadi simbiosis yang saling menguntungkan antara masyarakat dan pelaku usaha. Untuk Kota Payakumbuh, proporsi PDRB ekonomi kreatif belum dilakukan perhitungan.

## D) RASIO KEWIRAUSAHAAN

Rasio kewirausahaan adalah perbandingan jumlah wirausaha dengan jumlah angkatan kerja di suatu wilayah. Untuk negara-negara yang mulai menjadi negara maju, rata-rata memiliki angka 4% Rasio Kewirausahaan untuk Kota Payakumbuh, belum melakukan perhitungan.

## E) TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA

Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja digunakan untuk mengetahui persentase penduduk yang bekerja ataupun sedang mencari kerja. Rentang tahun 2020-2023 adanya peningkatan angkatan kerja yang bekerja, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 74.085 orang. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya penurunan peluang kerja, pemutusan hubungan kerja dan adanya peningkatan jumlah penduduk usia produktif yang tidak dapat diserap dalam pasar kerja karena keterbatasan kesempatan kerja

Sedangkan untuk angkatan kerja yang menganggur terlihat adanya peningkatan di tahun 2023 tercatat sebanyak 3.770 orang dan menjadi 3.791 di tahun 2024. Disisi lain, penurunan angkatan kerja di tahun 2023 adalah sebanyak 77.907 orang, dan menjadi 77.876 orang pada tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan jumlah yang bekerja, dan peningkatan angka pengangguran ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah pencari kerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia yang disebabkan ketidaksesuaian keterampilan dan penurunan permintaan dan perlambatan dalam sektor-sektor ekonomi.

**Tabel 2.50** Perkembangan Data Ketenagakerjaan Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

| URAIAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Angkatan Kerja** | **69.808** | **74.303** | **73.939** | **77.907** | **77.876** |
| Bekerja | 65.144 | 69.498 | 70.127 | 74.137 | 74.085 |
| Penganggur | 6,68 | 6,47 | 3,78 | 4,84 | 4,87 |

| URAIAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bukan Angkatan Kerja** | **31.830** | **29.279** | **31,593** | **30,515** | **32.544** |
| Sekolah | 9.734 | 10.607 | 9.093 | 9.796 | 9.015 |
| Mengurus Rumah Tangga | 16.937 | 14.159 | 18.160 | 16.037 | 17.935 |
| Lainnya | 5.159 | 4.513 | 4.340 | 4.682 | 5.594 |
| **Penduduk Usia Kerja** | **101.638** | **103.582** | **105,532** | **108,422** | 110.420 |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) | 68,68 | 71,73 | 70,49 | 71.86 | 70,53 |
| Tingkat Penganggur (%) | 6,68 | 6,47 | 3,78 | 4,84 | 4,87[4] |

**Sumber:** Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 2024

## F) PROPORSI PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA FORMAL

Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) adalah persentase pekerjaan baru yang tercipta di sektor formal dari total pekerjaan baru dalam suatu periode, yang mencerminkan kualitas pertumbuhan ekonomi dan digunakan untuk menilai keberhasilan kebijakan ketenagakerjaan, investasi, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) berguna untuk mengukur kualitas pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi proporsinya, semakin besar peluang pekerja memperoleh upah layak, jaminan sosial, dan perlindungan hukum. Indikator ini juga penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan ketenagakerjaan, investasi, dan pelatihan tenaga kerja yang diterapkan oleh pemerintah. Selain itu, proporsi ini mencerminkan daya saing daerah, karena menunjukkan seberapa besar sektor formal berkembang dan menyerap tenaga kerja. Dalam perencanaan pembangunan SDM, data ini membantu menyusun kebijakan pendidikan dan pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar formal. Lebih jauh, peningkatan proporsi kerja formal turut memperkuat inklusi sosial dan perlindungan bagi pekerja, mendukung pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Sebagai contoh, jika suatu daerah hanya memiliki 35% proporsi kerja formal, maka pemerintah setempat dapat merancang kebijakan seperti formalisasi UMKM, pengembangan industri padat karya, dan pelatihan kerja berbasis pasar. Untuk Kota Payakumbuh data belum tersedia. Untuk Kota Payakumbuh data belum tersedia.

## G). INDEKS INOVASI DAERAH

Indeks Inovasi Daerah adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat inovasi di suatu daerah atau wilayah tertentu. Indeks ini mencerminkan sejauh mana suatu daerah mampu mendorong dan mendukung kegiatan inovatif dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, ekonomi, teknologi, dan administrasi publik. Penilaian indeks ini dapat mencakup berbagai indikator yang menunjukkan tingkat keberhasilan dan kapasitas daerah dalam merangsang dan mendukung inovasi. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri di bawah Kementerian Dalam Negeri diberi mandat untuk melakukan Penilaian Inovasi Daerah sebagai bagian dari Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri. Langkah ini dimaksudkan untuk

merangsang kreativitas pemerintah daerah dan mendorong praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui fungsi pembinaannya, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri terus mendorong pemerintah daerah untuk menghasilkan ide-ide baru dan inisiatif-inisiatif yang inovatif.

Indeks inovasi untuk tahun 2020 belum dikategorikan antara Kab/Kota sedangkan untuk Tahun 2021 sampai dengan 2024 sudah dilakukan perhitungan setingkat Kabupaten/Kota. Indeks Inovasi Daerah Kota Payakumbuh tahun 2021-2023 mengalami penurunan, dari 51,99 pada tahun 2021 menjadi 44,47 dan 41,47 tahun 2022 dan 2023. Namun tahun 2024 naik menjadi 54,62.

**Tabel 2.51** Indeks Inovasi Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

| NO | TAHUN | INDEKS INOVASI | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 248 | Kurang Inovatif |
| 2 | 2021 | 51,99 | Inovatif |
| 3 | 2022 | 44,47 | Inovatif |
| 4 | 2023 | 41,47 | Inovatif |
| 5 | 2024 | 54,62 | Inovatif |

**Sumber:** Kementerian Dalam Negeri, 2024

## 3). PENERAPAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU

### A) INDEKS EKONOMI HIJAU

Indeks Ekonomi Hijau (*Green Economy Index*/GEI) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai efektivitas transformasi ekonomi Indonesia menuju pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon, yang diluncurkan oleh Bappenas pada Agustus 2022. GEI mencakup 15 indikator yang berfokus pada tiga pilar: lingkungan, ekonomi, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Untuk kawasan kota, indeks ekonomi hijau belum dikonversi dengan indeks lainnya dan di Kota Payakumbuh belum dilakukan perhitungan kondisi sekarang.

### B) RASIO PDRB SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN

Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%) adalah persentase kontribusi sektor tersebut terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah dalam periode tertentu. Untuk Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.52** Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dari tahun 2020-2024

| NO | URAIAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan | 6,21 | 6,10 | 5,99 | 5,75 | 5,50 |

Dari tabel diatas terlihat bahwa Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan. Ini berarti bahwa kontribusi sektor primer terhadap ekonomi daerah semakin kecil, yang dapat menandakan terjadinya transformasi dan diversifikasi ekonomi ke sektor lain yang lebih produktif.

## 4. TRANSFORMASI DIGITAL

Transformasi digital adalah proses mengintegrasikan teknologi digital dalam setiap aspek tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan proses bisnis lainnya yang menunjang kegiatan pemerintahan. Transformasi digital melibatkan penggunaan teknologi digital seperti komputasi awan, data besar, kecerdasan buatan, dan Internet untuk Segala (IoT) untuk mengubah proses bisnis, model operasional, dan pengalaman pelanggan. Ini adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan adaptasi terhadap perubahan lanskap digital yang terus berkembang.

Transformasi digital melibatkan penggunaan teknologi digital seperti komputasi awan, data besar, kecerdasan buatan, dan Internet untuk Segala (IoT) untuk mengubah proses bisnis, model operasional, dan pengalaman pelanggan. Ini adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan adaptasi terhadap perubahan lanskap digital yang terus berkembang. Adapun tujuan Transformasi Digital ini adalah:

1. Meningkatkan Efisiensi, otomatisasi proses, pengelolaan data yang lebih baik, dan penggunaan teknologi untuk mengurangi biaya operasional.
2. Meningkatkan Pengalaman Objek Layanan, menyediakan layanan yang lebih personal, cepat, dan mudah diakses melalui berbagai saluran digital.
3. Menciptakan Inovasi, mengembangkan produk dan layanan baru yang didukung oleh teknologi digital.
4. Mendapatkan Keunggulan Kompetitif, memungkinkan perusahaan untuk bersaing lebih efektif di pasar yang semakin digital.

### A). INDEKS PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) adalah ukuran standar untuk mengukur tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah, kesenjangan digital, serta potensi pengembangan TIK. IP-TIK bertujuan untuk mengukur dan membandingkan tingkat pembangunan TIK antar wilayah dan antar waktu. Komponen indeks ini terdiri dari beberapa sub-indeks yaitu: akses dan infrastruktur TIK, penggunaan TIK, dan keahlian TIK. Indeks ini dapat digunakan sebagai alat untuk pemantauan dan evaluasi kebijakan terkait TIK, identifikasi kesenjangan digital, serta perencanaan pengembangan TIK di masa depan. Untuk saat ini, di Kota Payakumbuh belum dilakukan pengukuran indeks ini, sehingga untuk data lima tahun terakhir belum tersedia.

## 5. INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL

Integrasi ekonomi domestik dan global dapat mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dalam mendukung partisipasi dalam rantai pasok global.

### A). PERSENTASE STABILITAS DAN JUMLAH KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK

Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok merupakan indikator yang menunjukkan seberapa terjamin dan konsisten pasokan barang kebutuhan dasar masyarakat, seperti beras, minyak goreng, gula, dan telur, baik dari sisi jumlah maupun ketersediaannya di pasaran dalam periode tertentu. Indikator ini berguna untuk menilai ketahanan pangan dan kecukupan pasokan, dengan melihat apakah stok barang pokok mampu memenuhi permintaan masyarakat dan mengidentifikasi potensi kelangkaan. Stabilitas ketersediaan barang pokok juga berperan penting dalam pengendalian inflasi daerah, karena pasokan yang memadai dapat mencegah lonjakan harga. Selain itu, data ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan distribusi, intervensi pasar, serta subsidi barang pokok.

Indikator ini juga digunakan untuk memantau dampak musim atau krisis, seperti bencana alam atau gejolak ekonomi, guna memastikan ketersediaan barang tetap terjaga. Sebagai contoh, jika persentase stabilitas dan ketersediaan beras mencapai 95%, maka dapat disimpulkan bahwa pasokan beras dalam kondisi aman, tersedia secara konsisten di pasar, dan tidak mengalami gangguan harga maupun distribusi. Untuk Kota Payakumbuh data belum tersedia.

### B) PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal seperti membeli aset tetap, seperti bangunan baik tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, jalan dan bandara, mesin, dan peralatan yang digunakan untuk produksi (tidak merupakan barang konsumsi) dengan umur pemakaian lebih dari satu tahun. Selain itu PMTB juga mencakup penambahan nilai aset yang tidak diproduksi dan pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup. PMTB merupakan salah satu indikator ekonomi penting untuk mengukur tingkat investasi dan juga dipakai dalam metode penghitungan PDRB.

**Tabel 2.53** Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

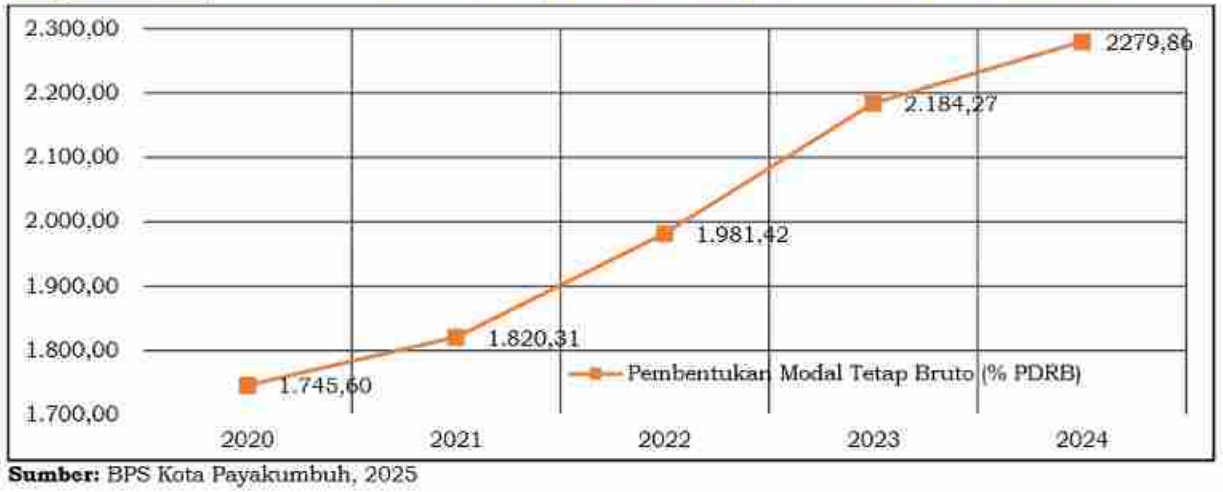
| NO | TAHUN | PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (MILYAR RUPIAH) |
|---|---|---|
| 1 | 2020 | 1.745,61 |
| 2 | 2021 | 1.830,31 |
| 3 | 2022 | 1.981,42 |
| 4 | 2023 | 2.184,27 |

| NO | TAHUN | PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (MILYAR RUPIAH) |
|---|---|---|
| 5 | 2024 | 2.279,86 |

**Sumber:** Sumatera Barat Dalam Angka 2025, 2025

Dilihat dari tabel 2.53 rentang tahun 2020-2024 terlihat adanya peningkatan PMTB di Kota Payakumbuh yang awalnya pada tahun 2020 senilai Rp1.745,61 Milyar naik sampai tahun 2024 menjadi Rp2.279,86 Milyar yang dapat diartikan investasi meningkat yang menyebabkan peningkatan tingkat produksi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Payakumbuh.

**Diagram 2.42** Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

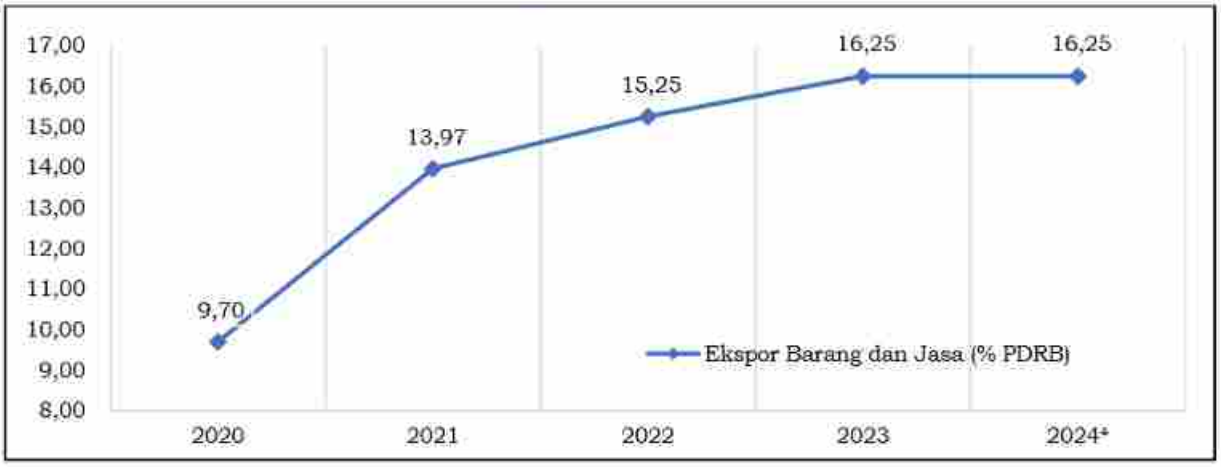



**Sumber:** BPS Kota Payakumbuh, 2025

## C) EKSPOR BARANG DAN JASA

Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap PDRB suatu wilayah. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk-produk domestik ke pasar regional dan internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan, maka pendapatan suatu wilayah juga meningkat karena peningkatan penjualan dan penerimaan.

**Diagram 2.43** Persentase Ekspor Barang dan Jasa Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024




**Sumber:** BPS Kota Payakumbuh, 2024

Peningkatan pendapatan ini mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor. Selain itu, ekspor juga meningkatkan efisiensi dan daya saing industri daerah untuk dapat bersaing di pasar regional dan global. Diagram 2.42 menunjukan nilai ekspor barang dan jasa Kota Payakumbuh dalam bentuk %PDRB dengan kecenderungan meningkat dari tahun 2020-2024, dengan nilai 9,70% pada tahun 2020 dan terus naik menjadi 16,25% pada tahun 2024.

## 6) PERKOTAAN DAN PERDESAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI

### A) INDEKS INFRASTRUKTUR KOTA

Indeks infrastruktur merupakan penilaian terhadap infrastruktur suatu daerah yang mencakup berbagai aspek seperti jalan dan transportasi publik, akses air bersih dan sanitasi, Listrik dan energi, infrastruktur pendidikan dan kesehatan dan telekomunikasi dan komunikasi. Indeks infrastruktur memiliki skala antara 0 hingga 1, di mana 0 berarti rendah/ buruk, sedangkan 1 berarti sangat baik atau sempurna. MedREP (Media Riset Ekonomi Pembangunan) melakukan estimasi indeks infrastruktur Kota Payakumbuh untuk tahun 2024 dan diperoleh indeks infrastruktur sebesar 0,1618 yang dapat diartikan tingkat ketersediaan dan kualitas infrastruktur rendah atau masih kurang memadai.

### B) RUMAH TANGGA DENGAN AKSES HUNIAN LAYAK

Perumahan dan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 40 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Sebagai hak dasar sekaligus menjadi prasyarat bagi setiap orang untuk bertahan hidup dan menikmati kehidupan yang bermartabat, damai, aman dan nyaman, maka penyediaan perumahan dan permukiman yang memenuhi prinsip-prinsip layak dan terjangkau bagi semua orang telah menjadi komitmen secara global sebagaimana dituangkan dalam Agenda Habitat dan *Sustainable* Development Goals (SDG's).

**Tabel 2.54** Rasio Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

| NO | URAIAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah Rumah Layak Huni | 28.891 | 28.933 | 30.693 | 30.814 | 34.025 |
| 2. | Jumlah Penduduk | 140.201 | 141.184 | 143.325 | 144.830 | 146.730 |
| 3. | Rasio | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,20 |

**Sumber:** Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, 2024

Tabel 2.54 menunjukan adanya peningkatan jumlah rumah layak huni di Kota Payakumbuh sebagai salah satu upaya pemerintah Kota Payakumbuh dalam memberikan hunian yang layak melalui program bantuan rehab rumah tidak layak huni (RTLH). Program ini merupakan bantuan bersifat rangsangan yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa memiliki rumah layak huni. Bantuan ini bersumber dari dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU) dan kolaborasi pendanaan lainnya. Namun secara rasio pada tahun 2024 adanya penurunan 0,01 dari tahun 2023 yang disebabkan adanya penambahan jumlah penduduk di Kota Payakumbuh.

## 7) STABILITAS EKONOMI MAKRO

### A) RASIO PAJAK DAERAH TERHADAP PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah yang tidak hanya berkontribusi bagi pembangunan daerah (kemandirian fiskal) namun juga menggambarkan geliat ekonomi di daerah.

**Tabel 2.55** Rasio Pajak Daerah terahadap PDRB Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

| URAIAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pajak Daerah (juta) | 17.067,52 | 20.359,63 | 22.033,33 | 23.089,81 | 23.691,08 |
| PDRB (juta) | 6.134.703 | 6.824.430,16 | 6,823,641,86 | 8.982.350 | 9.421,00 |
| Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,26 | 0,39 |

**Sumber:** BPS Kota Payakumbuh, 2024

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB berfluktuasi di mana pada tahun 2020 rasionya 0,28 dan naik terus sampai tahun 2022 menjadi 0,32 dan kembali turun pada tahun 2023 menjadi 0,26 sebelum kembali naik tahun 2024 naik lagi menjadi 0,39.

### B) TINGKAT INFLASI

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum pada suatu wilayah dalam rentang waktu yang berkelanjutan (kontinue) yang disebabkan ketidakseimbangan arus uang dan barang sesuai dengan mekanisme pasar. Inflasi disebabkan konsumsi masyarakat yang meningkat, tingginya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, atau ketidaklancaran distribusi barang. Tingginya inflasi berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Penghitungan tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat dilakukan pada 2 (dua) kota yaitu Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Inflasi Kota Payakumbuh mengikuti/ mengacu pada inflasi Kota Bukittinggi.

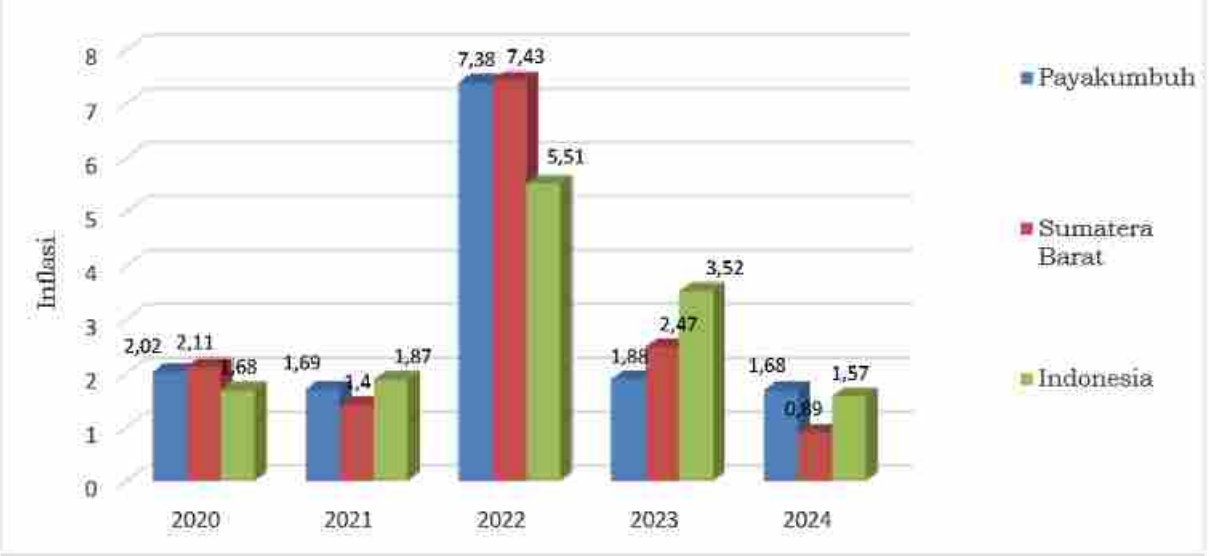
**Tabel 2.56** Perbandingan Tingkat Inflasi Kota Payakumbuh, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

| TAHUN | PAYAKUMBUH | SUMBAR | INDONESIA |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,02 | 2,11 | 1,68 |
| 2021 | 1,69 | 1,40 | 1,87 |
| 2022 | 7,38 | 7,43 | 5,51 |
| 2023 | 1,88 | 2,47 | 3,52 |
| 2024 | 1,68 | 0,89 | 1,57 |
| **Rata-rata** | **3,01** | **2,86** | **2,83** |

**Sumber:** BPS, 2024

Pada tabel 2.56 di atas terlihat bahwa rata-rata inflasi Kota Payakumbuh selama periode 2020-2024 mengalami fluktuasi dengan inflasi tertinggi 5 (lima) tahun terakhir sebesar 7,38 pada tahun 2022 dan semakin membaik pada tahun 2024 pada posisi 1,68 namun secara rata-rata tahun terakhir terbilang cukup tinggi yaitu 3,01 yang lebih tinggi dari nilai rata-rata inflasi Provinsi Sumatera dan Nasional.

**Diagram 2.44** Perbandingan Angka Inflasi



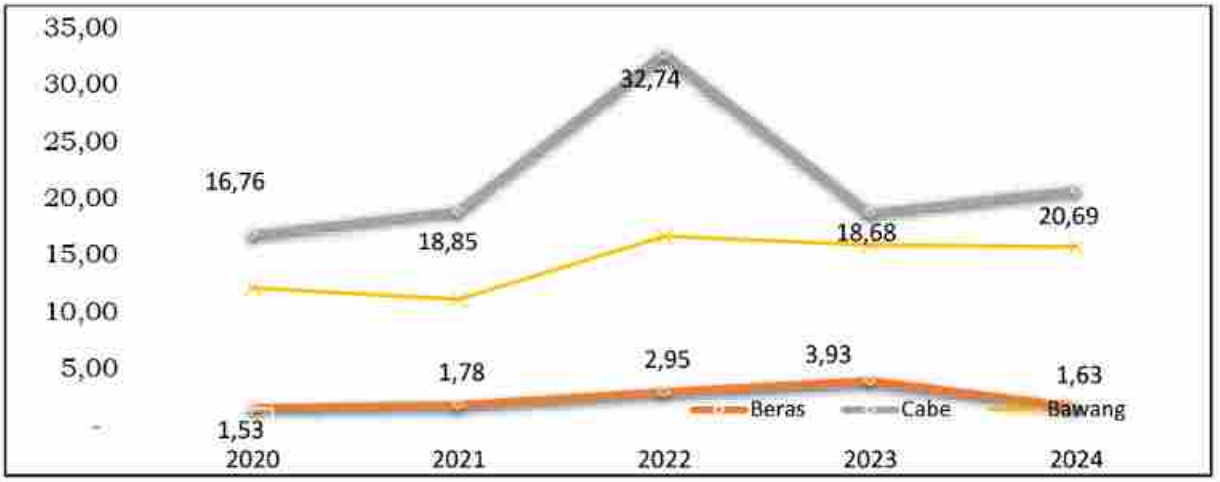

**Sumber:** Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024

### C) STABILISASI HARGA BERAS, CABE DAN BAWANG

Stabilitas harga merupakan upaya pemerintah dalam menjaga harga barang kebutuhan pokok agar tetap dalam kondisi normal, sehingga tidak membebani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok yang senantiasa dijaga stabilitas harganya adalah beras, cabe dan bawang. Pada Diagram 2.45 terlihat 3 (tiga) bahan pokok Kota Payakumbuh pada tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi terutama untuk beras dan cabe yang fluktuasinya cukup besar. Namun untuk stabilitas harga beras cenderung lebih baik, karena ketersediaan bahan pokok beras selalu tersedia oleh Bulog, sehingga setiap lonjakan harga dapat diantisipasi melalui operasi pasar dan pengaturan tata niaga. Namun untuk harga cabe dan bawang

memiliki fluktuasi harga yang sesuai dengan harga pasar, pemerintah hanya dapat mengatur tata niaga cabe dan bawang agar harganya tidak terlalu membebani masyarakat.

**Diagram 2.45** Perkembangan Stabilisasi Harga Tiga Bahan Pokok Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024




**Sumber:** Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, 2024

## D) NILAI TRANSAKSI SAHAM PER-KAPITA PER-RUPIAH

Nilai Transaksi Saham Per Kapita adalah indikator yang menunjukkan rata-rata nilai transaksi saham yang dilakukan oleh penduduk di suatu daerah dalam periode tertentu, yang dihitung dengan membagi total nilai transaksi saham dengan jumlah penduduk.

**Tabel 2.57** Transaksi saham perkapita per (Juta Rupiah)

| NO | URAIAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nilai saham tahunan (juta rupiah) | 260.980 | 436.150 | 328.770 | 229.720 | 500.950 |
| 2 | Jumlah penduduk | 139.576 | 141.184 | 143.325 | 144.830 | 146.731 |
| 3 | Nilai transaksi saham per kapita | 1,869 | 3,089 | 2,294 | 1,586 | 3,414 |

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai transaksi saham per kapita selama tahun 2020 sampai tahun 2024 bervariasi yang berarti bahwa Tingkat partisipasi masyarakat dalam aktivitas pasar modal tidak stabil dan mengalami perubahan dari tahun ke tahun, yang bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi nasional dan global, tingkat literasi keuangan, kebijakan pemerintah, pandemi COVID-19, serta perubahan perilaku investasi masyarakat.

## D. ASPEK PELAYANAN UMUM

### 1) REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF

Kondisi tata kelola pemerintahan yang baik merujuk pada bagaimana sektor publik dikelola secara bertanggung jawab, dengan prinsip-prinsip yang mendukung kepercayaan publik serta hasil pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini terkait dengan beberapa element antara lain:

1. Efisien dan Efektif, Efisien berarti sumber daya (anggaran, waktu, tenaga) digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal, dan Efektif berarti kebijakan dan program pemerintah benar-benar mencapai tujuan yang ditetapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2. Akuntabel, Akuntabilitas juga mencakup adanya sistem evaluasi kinerja dan mekanisme sanksi atas pelanggaran, dalam hal ini Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan semua tindakan, kebijakan, dan penggunaan anggaran kepada publik maupun lembaga pengawas.
3. Pertukaran Informasi yang Terbuka dan Transparan, Informasi pemerintahan harus mudah diakses oleh publik, termasuk data keuangan, proses pengambilan keputusan, serta hasil kinerja instansi pemerintah. Transparansi ini penting untuk mencegah praktik korupsi dan memperkuat partisipasi masyarakat.
4. Kepatuhan terhadap Kerangka Hukum, Seluruh proses dan keputusan pemerintahan harus berada dalam koridor hukum yang berlaku, tidak sewenang-wenang. Ini mencakup supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif memberikan gambaran terkait dengan kondisi daya dukung aspek-aspek pembangunan berkelanjutan dalam memantapkan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dan memastikan penggunaan data tentang kondisi pelayanan umum terhadap masyarakat, usaha pemanfaatan dan pemeliharaan kesinambungannya dalam mencapai target pembangunan di akhir tahun dokumen perencanaan, adapun indikator-indikatornya adalah sebagai berikut:

#### A) INDEKS REFORMASI HUKUM

Indeks Reformasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan de-regulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Penilaian Indeks Reformasi Hukum dilakukan pada pelaksanaan reformasi birokrasi pada level meso yang pengukurannya dilakukan pada 4 (empat) variabel yaitu: memperkuat koordinasi Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi; mendorong regulasi atau

deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu, mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level peraturan perundang-undangan, meningkatkan kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) pusat dan daerah. Indeks Reformasi Hukum Kota Payakumbuh telah mulai dilakukan pengukurannya pada tahun 2022 oleh Kementerian Hukum dan HAM.

**Tabel 2.58** Indeks Reformasi Hukum Kota Payakumbuh Tahun 2022-2024

| NO | TAHUN | INDEKS REFORMASI HUKUM | KATEGORI NILAI |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 71,85 | Baik |
| 2 | 2023 | 67,48 | Cukup Baik |
| 3 | 2024 | 87,00 | Baik |

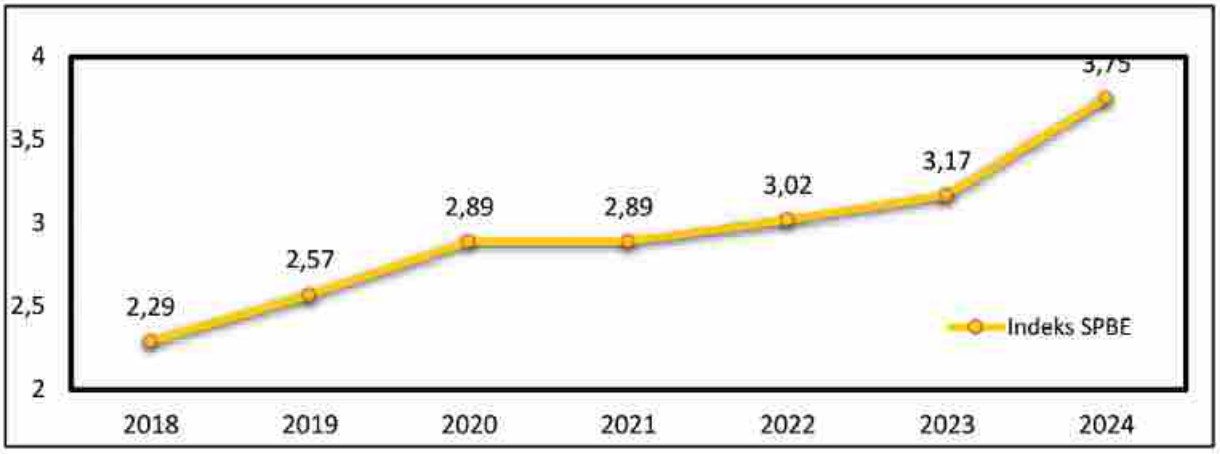
**Sumber:** Bagian Hukum Setdako Payakumbuh, 2025

## B) INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menyatakan SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

SPBE bukan hanya sekedar penggunaan aplikasi atau sistem informasi dalam pengerjaan operasional kegiatan keseharian pemerintahan. Lebih dari itu, SPBE meliputi beberapa domain antara lain Domain Kegiatan Pemerintahan, Teknologi dan Informasi serta Layanan. Di domain Kegiatan Pemerintahan ruang lingkup SPBE meliputi Rencana Induk SPBE, Proses Bisnis, Anggaran dan Belanja SPBE serta Data dan Informasi Elektronik. Di Domain Teknologi dan Informasi, SPBE meliputi Penyediaan Pusat Data Terpadu, Jaringan Intra Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Aplikasi Layanan SPBE serta Keamanan Informasi Pemerintah. Sementara di Domain Layanan, SPBE meliputi Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik. Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan. Perkembangan capaian SPBE Kota Payakumbuh dari tahun 2018-2024 fluktuatif, namun trendnya menunjukkan peningkatan, walaupun pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 dari 2,89 menjadi 2,42. Setelah itu kembali naik dan tahun 2024 sudah mencapai 3,75 atau masuk dalam kategori "baik".

**Diagram 2.46** Capaian SPBE Kota Payakumbuh Tahun 2018-2024




**Sumber:** Dinas Kominfo Kota Payakumbuh, 2024

## C) INDEKS PELAYANAN PUBLIK

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks. Perkembangan Indeks Pelayanan Publik Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.59** Indeks Pelayanan Publik Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

| NO | TAHUN | NILAI IPP | PREDIKAT | KATEGORI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 4,24 | A- | Sangat Baik |
| 2 | 2021 | 4,39 | A- | Sangat Baik |
| 3 | 2022 | 4,56 | A | Pelayanan Prima |
| 4 | 2023 | 4,41 | A- | Sangat Baik |
| 5 | 2024 | 4,50 | A- | Sangat Baik |

Sumber: Bagian Organisasi Setdako Payakumbuh, 2024

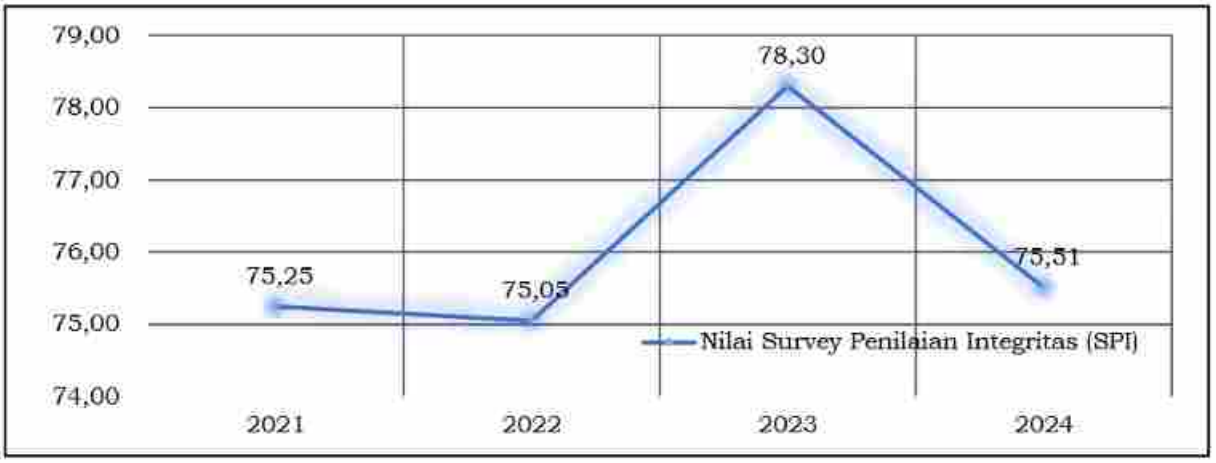
## D) SURVEY PENILAIAN INTEGRITAS (SPI)

Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah perangkat diagnostik yang dapat digunakan sebagai alat ukur obyektif untuk memetakan capaian dan kemajuan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/PD). SPI mengukur penilaian persepsi dan pengalaman sebagai pemangku kepentingan di instansi K/L/PD, yang terbagi menjadi dua penilaian, yaitu penilaian internal dengan responden adalah pegawai pada instansi tersebut dan penilaian eksternal dengan responden adalah pengguna layanan/mitra kerja sama.

Penghitungan Indeks Integritas dilakukan dengan menjumlahkan perkalian bobot dengan masing-masing penilaian pada tiga dimensi utama, kemudian hasilnya dikurangi dengan perkalian bobot dengan faktor koreksi. Nilai Indeks Integritas berkisar dari skala 0 sampai dengan 100. Semakin mendekati 100 menunjukkan suatu lembaga semakin berintegritas. Komponen-komponen penilaiannya sebagai berikut:

a. Indeks Penilaian Internal terdiri dari perdagangan pengaruh, pengelolaan PBJ, pengelolaan anggaran, pengelolaan SDM, integritas dalam pelaksanaan;
b. Indeks Penilaian Eksternal terdiri dari upaya pencegahan korupsi, transparansi dan keadilan layanan, integritas pegawai
c. *Focus Group Discussion* (FGD) dan *In Depth Interview* (IDI), Faktor Koreksi terdiri dari operasi tangkap tangan, investigasi, pengkondisian, informasi APH.

**Diagram 2.47** Capaian SPI Kota Payakumbuh Tahun 2021-2024




**Sumber:** Inspektorat Kota Payakumbuh, 2024

Capaian SPI Kota Payakumbuh dapat dilihat pada diagram 2.47, dimana Survey Penilaian Integritas (SPI) Kota Payakumbuh baru dilakukan pada tahun 2021-2024. Pada tahun 2021 dan 2022, nilai SPI Kota Payakumbuh adalah 75,25 dan 75,05 atau masih dalam kategori "waspada", sedangkan pada tahun 2023 nilainya naik cukup signifikan mencapai 78,30 atau berada pada level bawah kategori "hijau". Sedangkan pada tahun 2024 kembali turun menjadi 75,51. Tentunya ini perlu ditingkatkan dengan menggalakkan perilaku anti korupsi.

### 2) HUKUM BERKEADILAN, KEAMANAN NASIONAL YANG TANGGUH, DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL

Menjelaskan tentang kondisi pembangunan hukum yang diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia. Pembangunan demokrasi yang diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan

indikator-indikator seperti Persentase Penegakan Perda, Persentase Capaian Aksi HAM, Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Rasa Aman, Indeks Ketenteraman dan Ketertiban, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

Pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat, dan berlandaskan hak asasi manusia (HAM). Hal ini mencerminkan sistem hukum yang tidak hanya menegakkan aturan tetapi juga memberikan keadilan sosial bagi Masyarakat. Keamanan nasional yang tangguh bertujuan menciptakan stabilitas politik dan ketertiban sosial yang mendukung pembangunan. Keamanan ini melibatkan ketahanan dalam menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk ancaman terorisme, radikalisme, dan kriminalitas. Demokrasi substansial berarti demokrasi yang tidak hanya formal tetapi juga mencerminkan partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan dan pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial. Demokrasi ini memastikan bahwa rakyat memiliki kendali atas pemerintahan dan kebijakan yang dibuat mencerminkan kepentingan publik. Ketiga aspek ini merupakan fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, adil dan berorientasi pada kesejahteraan Masyarakat.

## A) PERSENTASE PENEGAKAN PERDA

Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat dilaksanakan untuk memastikan tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat. Pos Kamling adalah salah satu penyelenggaraan keamanan masyarakat dengan pola peningkatan partisipasi mayarakat dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Tingkat pelanggaran terhadap Perda di Kota Payakumbuh masih tinggi dan bervariasi tiap tahun dari tahun 2020-2024.

**Tabel 2.60** Tingkat Pelanggaran Perda Pekat Kota Payakumbuh dari Tahun 2020-2024

| NO | KATEGORI KASUS | SATUAN | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Pelanggaran Perda Pekat | Kasus | 44 | 107 | 95 | 95 | 78 |
| 2. | Selain Pelanggaran Perda Pekat | Kasus | 898 | 11.081 | 375 | 375 | 50 |
| | Jumlah Pelanggaran | Kasus | 942 | 11.188 | 470 | 470 | 128 |
| | Jumlah Pelanggaran yang di Proses/ tertangani | Kasus | 942 | 11.188 | 470 | 470 | 128 |
| | Persentase Perda yang tertangani | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Sumber:** Satuan Pol PP dan Damkar Kota Payakumbuh, 2024

Anomali data terlihat pada tahun 2021, dimana terjadi kenaikan yang sangat tinggi, dikarenakan pada tahun dimaksud banyak terjadi pelanggaran Perda No 6 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease.*

**Tabel 2.61** Tindak Kriminal Pelanggaran Perda di Kota Payakumbuh Tahun 2020 – 2024

| NO | URAIAN | SATUAN | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Tindak Pelanggaran Perda | kasus | 942 | 11.188 | 470 | 470 | 128 |
| 2 | Jumlah Penduduk | Jiwa | 139.576 | 141.184 | 143.325 | 146.731 | 146,731 |
| | Rasio Pelanggaran Perda per 10.000 Penduduk | % | 67,49 | 792,48 | 33,14 | 33,14 | 8,72 |

**Sumber:** Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh, 2024

## B) INDEKS KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN

Indeks Ketenteraman dan Ketertiban adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat di suatu wilayah. Indeks ini sering digunakan oleh pemerintah, khususnya aparat penegak hukum seperti kepolisian sebagai salah satu indikator untuk mengevaluasi keberhasilan upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

## C) ANGKA KRIMINALITAS

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan iklim investasi suatu wilayah melalui pengurangan kuantitas dan kualitas kriminalitas. Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu, artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti pencurian, pembunuhan, kejahatan seksual, kasus narkoba dan sebagainya. Tabel 2.62 menggambarkan fluktuasi kasus kriminal yang ada di Kota Payakumbuh dimana tahun 2024 terjadinya penurunan kasus kriminal sebesar 34 kasus menjadi 449 kasus dari 483 kasus.

**Tabel 2.62** Angka Kriminalitas di Kota Payakumbuh Tahun 2020 – 2024

| NO | JENIS KRIMINAL | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah kasus Narkoba | 177 | 45 | 49 | 49 | 49 |
| 2. | Jumlah kasus Pembunuhan | 5 | 1 | - | - | 1 |
| 3. | Jumlah Kejahatan Seksual | 2 | 46 | 42 | 42 | 50 |
| 4. | Jumlah kasus Penganiayaan | 42 | 8 | 60 | 60 | 75 |
| 5. | Jumlah kasus Pencurian | 62 | 117 | 136 | 136 | 64 |
| 6. | Jumlah kasus Penipuan | 6 | 28 | 5 | 5 | 4 |
| 7. | Jumlah kasus Pemalsuan uang | 2 | 2 | - | - | - |
| 8. | Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun | 296 | 456 | 483 | 483 | 449 |
| 9. | Jumlah Penduduk | 139.576 | 141.184 | 143.325 | 144.830 | 146.731 |
| 10. | Angka Kriminalitas (8)/(9) | 2,12 | 3,23 | 3,37 | 3,33 | 3,06 |

**Sumber:** Polres Kota Payakumbuh, 2024

### D) CAKUPAN LINMAS

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk mencerminkan kapasitas dan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menjamin, memelihara, menjalankan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah. Semakin tinggi rasio jumlah Polisi Pamong Praja, semakin besar ketersediaannya dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penegakan peraturan daerah.

**Tabel 2.63** Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

| NO. | URAIAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Petugas Pol PP dan Damkar | 204 | 208 | 255 | 204 | 208 |
| | Jumlah Petugas Satpol PP dan Damkar PNS | 51 | 48 | 46 | 30 | 43 |
| | Jumlah Petugas Satpol PP dan Damkar Non PNS | 153 | 160 | 163 | 128 | 122 |
| | Jumlah Petugas Damkar PNS | - | - | 11 | 13 | 17 |
| | Jumlah Petugas Damkar Non PNS | - | - | 35 | 33 | 26 |
| 2 | Jumlah Penduduk | 139.576 | 141.184 | 143.325 | 144.830 | 146,730 |
| 3 | Rasio (1:10.000) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |

**Sumber:** Satpol PP Kota Payakumbuh, 2024

Pada tabel 2.64 cakupan Petugas Linmas/10.000 penduduk di Kota Payakumbuh masih rendah, berkisar rata-rata 44 orang dalam 10.000 penduduk dalam 5 (lima) tahun terakhir dan kecenderungannya menurun seiring dengan pertambahan penduduk.

**Tabel 2.64** Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat Kota Payakumbuh tahun 2020-2024

| NO | URAIAN | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Jumlah Linmas (orang) | 554 | 554 | 596 | 596 | 589 |
| 2. | Jumlah Penduduk (orang) | 8.043 | 8.043 | 8.043 | 8.043 | 8,043 |
| 3 | Rasio (1:10.000) | 6,89 | 6,89 | 7,4 | 7,4 | 7,3 |

**Sumber:** Satpol PP Kota Payakumbuh, 2025

### E) PERSENTASE PENURUNAN PELANGGARAN TRANTIBUM

Untuk persentase penurunan pelanggaran trantibum dengan target 25% yang ditetapkan pada tahun 2024, realisasinya melebihi target yang ditetapkan sebesar 28,50% yang didukung oleh Kegiatan patroli rutin yang dilaksanakan aparat Satuan Polisi Pamong Praja.

## 3) KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN PERTAHANAN BERDAYA GENTAR KAWASAN

### A) PERSENTASE KERJASAMA WAJIB YANG DILAKSANAKAN

Kerjasama wajib merupakan kerjasama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan yang memiliki eksternalitas lintas daerah, dan

penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama. Untuk persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan oleh Kota Payakumbuh adalah 100 persen, di mana kerjasama yang dilakukan dengan Kabupaten Limapuluh Kota berbentuk MoU dan sudah ditindaklanjuti dengan berbagai kerjasama sesuai kepentingan dan kebutuhan masing-masing daerah.

### 4) KINERJA SETIAP URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam dokumen perencanaan strategis tingkat menengah Tahun 2025-2029 ditetapkan beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) di mana capaian kinerja indikator ini dijabarkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.65** Indikator Kinerja Kunci

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | SATUAN | Target | | | | | Realisasi | | | | | Capaian (%) | | | | | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Layanan Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Urusan Pendidikan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | % | | | | 65 | 67 | | | | | | | | | 0,00 | | DisDik |
| | **Urusan Kesehatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan | % | | | | 0,24 | 0,24 | | | | 2,41 | 2,33 | | | | 104,17 | 100,00 | Dinkes |
| 3 | Persentase RS Rujukan Tingkat Kab/Kota yang terakreditasi | % | | | | 100 | 100 | | | | 100 | 100 | | | | 100,00 | 100,00 | Dinkes |
| 4 | Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | % | | | | 92 | 94 | | | | 100 | 100 | | | | 91,76 | 106,38 | Dinkes |
| 5 | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | % | | | | 90 | 93 | | | | 100 | 100 | | | | 92,21 | 107,53 | Dinkes |
| 6 | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | % | | | | 93 | 93 | | | | 100 | 100 | | | | 92,17 | 107,53 | Dinkes |
| 7 | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | % | | | | 82 | 84 | | | | 82,82 | 100 | | | | 110,79 | 90,65 | Dinkes |
| 8 | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | | | | 88 | 90 | | | | 89,67 | 100 | | | | 109,35 | 112,08 | Dinkes |
| 9 | Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | % | | | | 93 | 94 | | | | 93,53 | 92,78 | | | | 101,51 | 108,60 | Dinkes |
| 10 | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | 65 | 70 | 100 | 58,22 | 100 | 102,01 | 100 | 100,00 | 58,22 | 100,00 | 153,85 | 126,03 | Dinkes |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | SATUAN | Target | | | | | Realisasi | | | | | Capaian (%) | | | | | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 11 | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | | | | 85 | 87 | | | | 100 | 100 | | | | 100,88 | 114,94 | Dinkes |
| 12 | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | | | | 100 | 100 | | | | 100 | 100 | | | | 111,71 | 100,00 | Dinkes |
| 13 | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | % | | | | 100 | 100 | | | | 100 | 100 | | | | 107,21 | 100,00 | Dinkes |
| 14 | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | % | | | | 30 | 50 | | | | 100 | 100 | | | | 344,27 | 172,00 | Dinkes |
| 15 | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | % | | | | 78 | 79 | | | | 100 | 100 | | | | 128,97 | 108,86 | Dinkes |
| | **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | % | | | | 90,48 | 91,03 | | | | 89,94 | 85,54 | | | | 99,40 | 90,62 | Dpupr |
| 17 | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota | % | | | | 100 | 100 | | | | 100 | 89,97 | | | | 99,81 | 100,00 | Dpupr |
| 18 | Persentase jumlah rumah tangga memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | % | | | | 96,56 | 96,89 | | | | 99,13 | 99,18 | | | | 102,66 | 102,36 | DPKP |
| 19 | Rasio kepatuhan IMB kab/kota | % | | | | 100 | 100 | | | | 0/NA | 100 | | | | 89,69 | 100,00 | Dpupr |
| 20 | Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota | % | | | | 84,88 | 85,76 | | | | 85,19 | 85,82 | | | | 100,15 | 100,07 | Dpupr |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | SATUAN | Target | | | | | Realisasi | | | | | Capaian (%) | | | | | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 21 | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | % | | | | 0,26 | 0,32 | | | | 46,24 | 86,60 | | | | 177.84 | 200,00 | Dpupr |
| 22 | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | % | | | | 85,00 | 86,00 | | | | 0 | 100 | | | | 117,65 | 116,28 | Dpupr |
| | **Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani | % | 1,34 | 0,82 | 0,3 | 0,24 | 0,18 | 0,77 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 142,54 | 143,90 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | DPKP |
| 24 | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) | % | | | | 3,76 | 3,4 | | | | 12,22 | 2,69 | | | | 272,61 | 224,12 | DPKP |
| 25 | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana. Sarana dan Utilitas Umum) | % | | | | 126 | 126 | | | | 1596/29,40 | 36,28 | | | | 124,60 | 124,60 | DPKP |
| | **Urusan Ketentraman. Ketertiban Umum. dan Perlindungan Masyarakat** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | % | | | | 100 | 100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | 100 | SatPol PP&PK |
| 27 | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | % | | | | 50 | 75 | | | | 100 | 100 | | | | 100,00 | 133,33 | KaSatPol PP&PK |
| 28 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | orang | | | | 1710 | 1710 | | | | 320/200 | 100/210 | | | | 100 | 100 | BPBD |
| 29 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | orang | | | | 525 | 525 | | | | 300/100 | 100/210 | | | | 100 | 100 | BPBD |
| 30 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan | orang | | | | 200 | 200 | | | | 0 | 100/463 | | | | 112,5 | 100 | BPBD |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | SATUAN | Target | | | | | Realisasi | | | | | Capaian (%) | | | | | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | penyelamatan dan evakuasi korban bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | % | | | | 100 | 100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | 100 | KaSatPol PP&PK |
| 32 | Waktu tanggap (response time) pananganan kebakaran | Menit | | | | 15 | 15 | | | | 100/15 | 5,6 | | | | 100 | 165 | KaSatPol PP&PK |
| | **Urusan Sosial** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM) | % | | | | 100 | 100 | | | | 100 | 100 | | | | 100,00 | 100,00 | Dinsos |
| 34 | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten / Kota | % | | | | 100 | 100 | | | | 100 | 100 | | | | 100,00 | 100,00 | Dinsos |
| | **Layanan Urusan Wajib Terkait Non Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Urusan Ketenagakerjaan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja | % | | | | 100 | 100 | | | | 100 | 100 | | | | | - | Disnakerperin |
| 36 | Persentase Tenaga Kerja Bersetifikat Kompetensi | % | | | | 47,29 | 47,90 | | | | 47,29 | 47,90 | | | | 124,74 | 160,25 | Disnakerperin |
| 37 | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | % | | | | 6350,7 | 6.350.7 | | | | | | | | | | - | Disnakerperin |
| 38 | Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) | % | | | | 3,23 | 3,23 | | | | 75 | 41,27 | | | | 100,00 | 2321,98 | Disnakerperin |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | SATUAN | Target | | | | | Realisasi | | | | | Capaian (%) | | | | | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 39 | Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota | % | | | | 46,24 | 46,24 | | | | 51,21 | 51,58 | | | | 110,75 | 39,73 | Disnakerperin |
| | **Urusan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | % | - | - | - | 3,82 | 3,92 | - | - | - | 4 | 12,22 | - | - | - | 104,71 | 311,73 | DP3AP2KB |
| 41 | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota | % | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | 100,00 | 100,00 | DP3AP2KB |
| 42 | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100,000 penduduk perempuan) | % | 0,06 | 0,055 | 0,04 | 0,25 | 0,249 | 0,041 | 0,026 | 0,247 | 0,248 | 1,92 | 131,67 | 152,73 | -417,50 | 100,80 | -571,08 | DP3AP2KB |
| | **Urusan Pertanahan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan | % | | | | 100 | 100 | | | | 100 | 100 | | | | 100,00 | 99,28 | Dpupr |
| 44 | Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum | % | | | | 100 | 100 | | | | 0/NA | 100 | | | | 255,73 | 100,00 | Dpupr |
| 45 | Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal | % | | | | 100 | 100 | | | | 99,94 | 100 | | | | 99.40 | 100,00 | Dpupr |
| 46 | Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi | % | | | | 2 | 2 | | | | 83,33/5 | 0 | | | | - | 400,00 | Dpupr |
| | **Urusan Lingkungan Hidup** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten/Kota | Nilai | | | | 58,26 | 58,26 | | | | 59,5 | 58,52 | | | | 102,13 | 100,45 | DLH |
| 48 | Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota | % | | | | 95,5 | 95,75 | | | | 97,11 | 94,63 | | | | 101,57 | 101,31 | DLH |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | SATUAN | Target | | | | | Realisasi | | | | | Capaian (%) | | | | | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 49 | Ketaatan penanggung jawab usaha da-tau kegiatan terhadap izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota | % | | | | 72 | 73 | | | | 26,42 | 25,93 | | | | 100,00 | 101,37 | DLH |
| | **Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Kepemilikan KTP Elektronik | % | 98,96 | 90 | 91 | 99,8 | 99,4 | 99,54 | 99,14 | 99,08 | 99,47 | 99,44 | 100,59 | 110,16 | 108,88 | 99,67 | 100,15 | Dis Dukcapil |
| 51 | Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | % | | | | 42,5 | 45 | | | | 50,41 | 62,84 | | | | 118,61 | 139,80 | Dis Dukcapil |
| 52 | Kepemilikan Akta Kelahiran | % | 94,52 | 91 | 92 | 98 | 99 | 96,41 | 97,15 | 98,41 | 98,99 | 99,08 | 102,00 | 106,76 | 106,97 | 101,05 | 100,12 | Dis Dukcapil |
| 53 | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama | nota kesepahaman | | | | 16 | 17 | | | | 30/100 | 100/80 | | | | 187,50 | 176,47 | Dis Dukcapil |
| | **Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | TFR (Angka Kelahiran Tortal) | % | | | | 2,69 | 2,67 | | | | 2,4 | 0,24 | | | | - | - | DP3AP2KB |
| 55 | Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | % | | | | 40,60 | 41,60 | | | | 60,03 | 63,63 | | | | 129,13 | 135,34 | DP3AP2KB |
| 56 | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | % | | | | 14,50 | 14 | | | | 16,61 | 13,56 | | | | 123,85 | 115,00 | DP3AP2KB |
| | **Perhubungan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota | % | | | | 65 | 67 | | | | 80 | 0,88 | | | | 123,08 | 119,40 | Dishub |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | SATUAN | Target | | | | | Realisasi | | | | | Capaian (%) | | | | | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 58 | Kinerja Lalu Lintas Kaupaten/ Kota | % | | | | 84 | 86 | | | | 0,8 | 0,86 | | | | 78,57 | 76,74 | Dishub |
| | **Urusan Komunikasi dan Informatika** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | % | | | | 40 | 50 | | | | 93,43 | 93,43 | | | | 232,50 | 200,00 | Dis Kominfo |
| 60 | Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik. Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | % | | | | 100 | 100 | | | | 100 | 100 | | | | 97,00 | 100,00 | Dis Kominfo |
| | **Urusan Penanaman Modal** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota | % | | | | 0,09 | 0,98 | | | | 135,88 | 33,38 | | | | 1500,00 | 3405,10 | DPMPTSP |
| | **Urusan Kepemudaan dan Olahraga** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial | organisasi | | | | 150 | 150 | | | | 9,2 | 17,07 | | | | 100 | 100 | Disparpora |
| 63 | Peningkatan prestasi olahraga (nasional. internasional) | medali | | | | 2 | 2 | | | | 109 | 67 | | | | 5450 | 3450 | Disparpora |
| 64 | Tingkat partisipasi pemuda dalam dalam kegiatan ekonomi mandiri | % | | | | 4,32 | 4,32 | | | | 2,00 | 13,73 | | | | 12,5 | 12,5 | Disparpora |
| | **Urusan Statistik** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | % | | | | 100 | 100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | 100 | Dis Kominfo |
| 66 | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | % | | | | 100 | 100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | 100 | Dis Kominfo |
| | **Urusan Kebudayaan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | SATUAN | Target | | | | | Realisasi | | | | | Capaian (%) | | | | | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 67 | Terlestarikan Cagar Budaya | % | | | | 3,75 | 4 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | 100 | Disparpora |
| | **Urusan Perpustakaan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | nilai | | | | 60 | 65 | | | | 64,17 | 66,18 | | | | 106,95 | 101,82 | DPK |
| | **Urusan Kearsipan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan) | % | | | | 71,36 | 75,48 | | | | 63,32 | 70,04 | | | | 100,90 | 100,69 | DPK |
| 70 | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | % | | | | 90 | 91,66 | | | | 100 | 100 | | | | 101,11 | 100,37 | DPK |
| | **Layanan Urusan Pilihan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Urusan Kelautan dan Perikanan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari Seluruh Kabupaten/Kota | ton | | | | 560 | 560 | | | | 101,98 | | | | | 103,99 | 103,01 | Distan |
| | **Urusan Pertanian** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | Produktivitas pertanian per hektar per tahun (Produktivitas padi ) | ton/Ha | | | | 5,18 | 5,18 | | | | 616,15 | 5,85 | | | | 118,92 | 108,30 | Distan |
| 77 | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | % | | | | 1 | 1 | | | | 0 | - 62,5 | | | | 0,00 | 6000,00 | Distan |
| | **Urusan Perdagangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | SATUAN | Target | | | | | Realisasi | | | | | Capaian (%) | | | | | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 78 | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) | % | | | | 17,47 | 45 | | | | 100 | 51,72 | | | | 572,41 | 222,22 | Diskodag UKM |
| 79 | Persentase kinerja realisasi pupuk | % | | | | 46 | 46 | | | | 62,49 | 55,32 | | | | 135,85 | 120,37 | Diskodag UKM |
| 80 | Persentase alat-alat ukur. takar. timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | % | | | | 69,15 | 74,12 | | | | 47,69 | 50,48 | | | | 68,97 | 68,11 | Diskodag UKM |
| | **Urusan Perindustrian** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota | % | | | | 1,5 | 2 | | | | 22,7 | 1,87 | | | | 1513.33 | 0,00 | Dis Nakerperin |
| 82 | Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait | % | | | | 10 | 10 | | | | 44,05 | 0 | | | | 440,50 | 100,00 | Dis Nakerperin |
| 83 | Persentase Jumalah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait | % | | | | 5 | 5 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | Dis Nakerperin |
| 84 | Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap Dan Terkini | % | | | | ada | ada | | | | 100 | 125 | | | | 100 | 100 | Dis Nakerperin |
| | **Fungsi Pendukung** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Kesekretariatan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | Indek kualitaa kebijakan | indeks | | | | 72 | 73 | | | | - | 50,49 | | | | - | - | Setdako |
| 86 | Indek pelayanan publik | indeks | | | | 4,24 | 4,26 | | | | 4,41 | 4,50 | | | | 104,72 | 98,67 | Setdako |
| 87 | Indek pemerintahan daerah | indeks | | | | 6,2 | 6,25 | | | | - | - | | | | - | - | Setdako |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | SATUAN | Target | | | | | Realisasi | | | | | Capaian (%) | | | | | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 88 | Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan secara kompetitif | % | | | | 70 | 70 | | | | 99,92 | 89,24 | | | | 104,63 | 0,00 | Setdako |
| | **Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Fungsi Penunjang** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Keuangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan | % | | | | 30 | 30 | | | | 17,99 | 28,23 | | | | 158,65 | 158,65 | BKD |
| 90 | Rasio PAD (thdp PAD non migas) | % | | | | 12 | 12 | | | | 16,62 | 18,41 | | | | 140,25 | 140,25 | BKD |
| 91 | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) | % | | | | 80 | 80 | | | | 84,01 | 85,87 | | | | 119,90 | 119,90 | BKD |
| 92 | Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | % | | | | -9 | -9 | | | | 9,28 | 7,36 | | | | 116,00 | 116,00 | BKD |
| 93 | Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD | % | | | | 600 | 600 | | | | 5,95 | 6,51 | | | | 198,84 | 198,84 | BKD |
| 94 | Manajemen Aset | ada/ tidak | | | | ada | ada | | | | 4 | 4 | | | | 100,00 | 100,00 | BKD |
| 95 | Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya | % | | | | 10 | 10 | | | | 11,07 | 11,45* | | | | 110,70 | 110,70 | BKD |
| | **Kepegawaian** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | % | | | | 327,25 | 332 | | | | 79,67 | 81,02 | | | | 24,35 | 24,40 | BKPSDM |
| 97 | Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | % | | | | 19,67 | 19,88 | | | | 25,53 | 29,29 | | | | 129,79 | 147,33 | BKPSDM |
| 98 | Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | % | | | | 43,21 | 44,6 | | | | 34,81 | 27,39 | | | | 80,56 | 61,41 | BKPSDM |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | SATUAN | Target | | | | | Realisasi | | | | | Capaian (%) | | | | | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | **Inspektorat** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) | level | | | | 2+ | 3 | | | | 3 | 3 | | | | 100 | 100 | Inspektorat |
| 100 | Maturitas Sistem Pengendalian Intrn Pemerintah (SPIP) | indeks | | | | 3 | 3 | | | | 2,982 | 3 | | | | 100 | 100 | Inspektorat |
| | **Kewilayahan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yg aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kecamatan |
| | **Kesatuan Bangsa dan Politi** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | Persentase penanganan konflik sosial yg terjadi di tengah masyarakat | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kes Bangpol |
| 103 | Persentase parpol dan ormas yang aktif | % | 90,64 | 90,64 | 90,64 | 90,64 | 90,64 | 86,27 | 90,2 | 90,9 | 90,72 | 91,78 | 95 | 100 | 100 | 100 | 101,26 | Kes Bangpol |

**Sumber:** Data Perangkat Daerah dan LPPD, 2025

## E. EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator kinerja yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan Provinsi, Nasional serta Rencana Strategis Kementerian/Lembaga.

Dalam mengevaluasi indikator kinerja, digunakan interpretasi interval nilai realisasi kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sehingga memudahkan dalam memahami capaian kinerja yang merupakan perbandingan realisasi dengan target yang ditetapkan, sebagaimana dijabarkan pada tabel 2.66 berikut ini:

**Tabel 2.66** Skala Nilai Peringkat Kinerja

| Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|---|---|
| 91% ≤ 100% | Sangat Tinggi |
| 76% ≤ 90% | Tinggi |
| 66% ≤ 75% | Sedang |
| 51% ≤ 65% | Rendah |
| x ≤ 50% | Sangat Rendah |

**Sumber:** Kemendagri, 2017

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja,
2. Hasil Sedang, Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal,
3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah, Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan,

Mempedomani dokumen RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022, indikator yang menjadi ukuran capaian target kinerja

pembangunan daerah dirinci ke indikator makro, indikator kinerja utama, dan indikator kinerja daerah. Berikut capaian indikator kinerja pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir.

### 1) INDIKATOR MAKRO

Untuk indikator makro pembangunan, terdapat 7 (tujuh) indikator, di mana 2 (dua) indikator pencapaian di tahun 2024 di bawah target yang ditetapkan, yaitu pertumbuhan ekonomi dan Indeks Gini, Untuk pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh lima tahun terakhir mengalami kenaikan pasca pandemi, namun sedikit mengalami penurunan pada tahun 2024. Sementara itu, realisasi indikator Indeks Gini selama lima tahun pada kategori sedang (moderat), perlu upaya untuk menurunkan Indeks Gini dengan meningkatkan pendapatan masyarakat serta menurunkan tingkat kemiskinan. Begitu juga dengan tingkat pengangguran mengalami kenaikan di tahun 2024 yaitu 4,87%, di mana sebelumnya pada tahun 2023 pada angka 4,84%, namun telah melebihi target yang ditetapkan dalam RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

**Tabel 2.67** Indikator Makro Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

| NO | BIDANG URUSAN/ INDIKATOR | SATUAN | Target | | | | | Realisasi | | | | | Capaian (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Nilai | 79,33 | 80,13 | 80,93 | 79,96 | 80,41 | 78,9 | 79,08 | 79,53 | 80,14 | 80,76 | 99,46 | 98,69 | 98,27 | 100,23 | 100,44 |
| 2 | Tingkat Kemiskinan | % | 5,54 | 5,41 | 5,27 | 5,52 | 5,41 | 5,65 | 6,16 | 5,66 | 5,44 | 5,19 | 98,01 | 86,14 | 92,60 | 101,45 | 104,07 |
| 3 | Tingkat Pengangguran | % | 5,9 | 5,83 | 5,8 | 6,05 | 5,81 | 6,68 | 6,47 | 5,16 | 4,84 | 4,87 | 86,78 | 89,02 | 111,03 | 120,00 | 116,18 |
| 4 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 1,18 | 4,18 | 5,00 | 4,36 | 4,71 | -1,66 | 3,58 | 5,41 | 4,7 | 4,53 | -140,68 | 85,65 | 108,20 | 107,80 | 96,18 |
| 5 | PDRB (ADHB) Perkapita | (Rp, Juta/ org) | 50,25 | 51,63 | 53,47 | 56,16 | 59,41 | 49,28 | 51,73 | 57,73 | 62,02 | 64,21 | 98,07 | 100,19 | 107,97 | 110,43 | 108,08 |
| 6 | PDRB (ADHK) Perkapita | (Rp, Juta/ org) | 33,05 | 33,96 | 35,16 | 33,53 | 34,6 | 31,75 | 32,44 | 33,44 | 34,54 | 35,64 | 96,07 | 95,52 | 95,11 | 103,01 | 103,01 |
| 7 | Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini) | Nilai | 0,276 | 0,273 | 0,271 | 0,277 | 0,276 | 0,325 | 0,316 | 0,311 | 0,316 | 0,313 | 82,25 | 84,25 | 85,24 | 85,92 | 86,59 |

**Sumber:** Bappeda Kota Payakumbuh, 2025

Indeks Gini menggambarkan ketimpangan pendapatan dimana Kota Payakumbuh berada pada level moderat, namun jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sumatera Barat, Indeks Gini Kota Payakumbuh merupakan rasio tertinggi, hal ini mengindikasikan tingkat pemerataan pertumbuhan ekonomi di setiap level masyarakat di Kota Payakumbuh masih rendah seperti halnya pada sektor ekonomi Kota Payakumbuh lebih didominasi oleh sektor perdagangan yang dikuasai oleh kalangan bermodal (kapitalis).

## 2) INDIKATOR KINERJA UTAMA

Capaian kinerja indikator kinerja utama (IKU) menjadi parameter keberhasilan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan yang dijabarkan pada tabel 2.68 berikut:

**Tabel 2.68** Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

| No | TUJUAN/ INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | REALISASI | | | | | CAPAIAN (%) | | | | | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| **Tujuan I: Terwujudnya Pengembangan Manusia Yang Berkualitas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Harapan lama sekolah | Tahun | 14,58 | 14,67 | 14,77 | 14,29 | 14,3 | 14,26 | 14,27 | 14,29 | 14,3 | 14,57 | 97,81 | 97,27 | 96,75 | 100,07 | 101,89 | DisDik |
| 2 | Rata-rata lama sekolah | Tahun | 10,79 | 10,85 | 10,9 | 11,14 | 11,26 | 10,73 | 10,81 | 10,82 | 10,88 | 10,89 | 99,44 | 99,63 | 99,27 | 97,67 | 96,71 | DisDik |
| 3 | Angka Usia Harapan Hidup | Tahun | 73,9 | 74,3 | 74,5 | 74,18 | 74,32 | 74,08 | 74,18 | 74,48 | 74,77 | 75,08 | 99,78 | 99,38 | 99,52 | 100,80 | 101,02 | DisDik |
| 4 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | % | 61,86 | 62,35 | 62,37 | 72,01 | 72,51 | 67,81 | 71,58 | 71,21 | 71,21 | 71,21 | 114,79 | 114,80 | 113,94 | 98,89 | 98,21 | DP3AP2KB |
| 5 | Prevalensi Stunting | Indeks | - | 20 | 18 | 16 | 14 | - | 20 | 17,8 | 19,8 | 16,4 | - | 100,00 | 101,11 | 76,25 | 82,86 | Dinkes |
| **Tujuan II: Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Tingkat kemiskinan | % | 5,54 | 5,41 | 5,27 | 5,52 | 5,41 | 5,65 | 6,16 | 5,66 | 5,44 | 5,19 | 98,01 | 86,14 | 92,60 | 101,45 | 104,07 | BPS |
| 7 | Tingkat pengangguran | % | 5,9 | 5,83 | 5,8 | 6,05 | 5,81 | 6,68 | 6,47 | 5,16 | 4,84 | 4,87 | 86,78 | 89,02 | 111,03 | 120,00 | 116,18 | BPS |
| 8 | Pertumbuhan PDRB sektor industri | % | - | - | - | 2,85 | 2,93 | -3,21 | 2,66 | 2,13 | 2,72 | 2,99 | - | - | - | 95,44 | 102,05 | BPS/ Nakerperin |
| 9 | Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan | % | - | - | - | 4,03 | 4,28 | -1 | 3,58 | 5,55 | 4,66 | 4,49 | - | - | - | 115,63 | 104,91 | BPS/ Kop dan UKM |
| 10 | Nilai Realisasi Investasi | Miliar Rupiah | 74,4 | 200,9 | 203,8 | 220 | 225 | 178,4 | 417,24 | 199,70 | 493,81 | 658,63 | 239,78 | 207,69 | 97,99 | 224,46 | 292,72 | BPS/ DPMPTSP |
| **Tujuan III: Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Nilai Evaluasi AKIP Kota | Nilai | A | A | A | BB(78) | A (80) | BB | BB | BB | BB(75,25) | 76,01 | 91,24 | 91,83 | 93,20 | 96,47 | 95,01 | Bag Organisasi |
| 12 | Indeks SPBE | Indeks | 2,7 | 2,8 | 3 | 2,5 | 2,7 | 2,89 | 2,42 | 3,02 | 3,17 | 3,75 | 107,04 | 86,43 | 100,67 | 126,80 | 138,89 | Kominfo |
| 13 | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | - | - | - | 88,41 | 88,5 | - | - | - | 89,65 | 88,37 | - | - | - | 101,40 | 99,85 | Bag Organisasi |
| 14 | Indek Pengelolaan Keuangan Daerah | Scor | - | - | - | 75 | 76 | - | - | - | 77,43 | 71,76 | - | - | - | 103,24 | 94,42 | Bappeda / BKD |
| **Tujuan IV: Meningkatnya keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | % | 57,5 | 57,75 | 58 | 58 | 58,26 | 58,3 | 58,58 | 64,09 | 59,5 | 58,51 | 101,39 | 101,44 | 110,50 | 102,59 | 100,43 | DLH |

| No | TUJUAN/ INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | REALISASI | | | | | CAPAIAN (%) | | | | | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 16 | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | % | 79,5 | 79,8 | 80,1 | 80,23 | 80,36 | 79,58 | 79,97 | 80,06 | 80,24 | 80,36 | 100,10 | 100,21 | 99,95 | 100,01 | 100,00 | DPUPR |
| 17 | Perentase Ketersediaan Fasilitas Umum Perkotaan | % | 69,84 | 71,39 | 71,98 | 73,09 | 74,2 | 69,84 | 70,87 | 71,61 | 71,98 | 71,98 | 100,00 | 99,27 | 99,49 | 98,48 | 97,01 | DPUPR |
| 18 | Persentase Panjang Jalan Status Kota dalam Kondisi Mantap | % | 75,9 | 75,56 | 77,31 | 84,88 | 85,76 | 75,9 | 83,12 | 84,06 | 85,01 | 85,82 | 100,00 | 110,01 | 108,73 | 100,15 | 100,07 | DPUPR |
| **Tujuan V: Meningkatnya Tata Kehidupan Masyarakat Yang Berkarakter dan Berbudaya** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Persentase lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai budaya | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81,82 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 81,82 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DisParpora |
| 20 | Persentase Sekolah dengan Pendidikan Karekter Berkategori Baik | % | 47,62 | 47,62 | 51,6 | 70,25 | 52 | 75,49 | 75,49 | 90 | 56,44 | 56,44 | 158,53 | 158,53 | 174,42 | 80,34 | 108,54 | DisDik |

**Sumber:** data diolah oleh Bappeda

Indikator kinerja utama sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan jangka menengah periode transisi RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 terdapat 20 indikator, di mana sebagian indikator juga dipakai pada dokumen RPJMD Perubahan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, sehingga ada beberapa indikator yang tidak tersedia data target dan capaian pada tahun 2020 – 2022. Sampai tahun 2024, capaian indikator kinerja utama yang masih di bawah target adalah: rata-rata lama sekolah, indeks pemberdayaan gender, prevalensi Stunting, Nilai Evaluasi AKIP Kota, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Persentase Ketersediaan Fasilitas Umum Perkotaan. Untuk rata-rata lama sekolah ditetapkan target 11,26 pada tahun 2024, dan dapat dicapai 10,89 tahun, dengan kata lain masih pada tingkat yang diharapkan yaitu rata-rata lama sekolah mendekati 11 tahun atau setara kelas 11 Sekolah Menengah Atas/ sederajat.

Untuk IPKD, pada tahun 2024 terjadi penurunan realisasi dimana IPKD berada pada 71,76 dimana pada tahun 2023 sebesar 77,43. Selain itu capaian ini juga masih lebih rendah dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2024, hal ini

terjadi dikarenakan kebijakan pusat yang berdampak kepada dokumen penganggaran, sehingga terdapat perbedaan antara perencanaan dengan penganggaran.

## 3) INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja daerah meliputi 3 aspek utama pembangunan daerah yaitu Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum dan Daya Saing Daerah, Aspek Kesejahteraan Masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial yang meliputi indikator kesejahteraan, pemerataan Ekonomi, dan kesejahteraan Sosial, Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang meliputi indikator kinerja dalam penyelenggaraan Pelayanan Urusan Wajib dan Pelayanan Urusan Pilihan, Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan, Tabel 2.69 di bawah ditampilkan capaian kinerja indikator kinerja daerah (IKD), yang diuraikan dalam dokumen RPD Kota Payakumbuh tahun 2023-2026.

**Tabel 2.69** Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Payakumbuh Tahun 2020- 2024

| NO | BIDANG URUSAN/ INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | REALISASI | | | | | CAPAIAN (%) | | | | | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Laju Inflasi | % | 3,91 | 3,38 | 2,85 | 1,7 | 1,94 | 2,12 | 1,69 | 0,94 | 1,88 | 1,68 | 145,78 | 150,00 | 167,02 | 90,43 | 113,40 | BPS |
| 2 | Angka Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 10,79 | 10,85 | 10,9 | 11,14 | 11,26 | 10,73 | 10,81 | 10,82 | 10,88 | 10,89 | 99,44 | 99,63 | 99,27 | 97,67 | 96,71 | Disdik |
| 3 | Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 14,58 | 14,67 | 14,29 | 14,29 | 14,3 | 14,26 | 14,27 | 14,29 | 14,3 | 14,5 | 97,81 | 97,27 | 100,00 | 100,07 | 101,40 | Disdik |
| 4 | Angka Usia Harapan Hidup (AHH) | Tahun | 73,9 | 74,3 | 74,5 | 74,18 | 74,32 | 73,74 | 73,84 | 74,14 | 74,77 | 75,08 | 99,78 | 99,38 | 99,52 | 100,80 | 101,02 | BPS |
| | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **LAYANAN URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **URUSAN PENDIDIKAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Angka Partisipasi Kasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | APK PAUD | % | 75,9 | 76,1 | 76,3 | 65 | 67 | 76,28 | 44,63 | 77,53 | 94,09 | 61,09 | 100,50 | 58,65 | 101,61 | 144,75 | 91,18 | Disdik |
| 6 | APK SD/MI/Paket A | % | 127,5 | 130,1 | 132,75 | 112 | 114 | 99,67 | 110,14 | 109,04 | 110,6 | 107,82 | 78,17 | 84,66 | 82,14 | 98,75 | 94,58 | Disdik |

| NO | BIDANG URUSAN/ INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | REALISASI | | | | | CAPAIAN (%) | | | | | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 7 | APK SMP/MTs/Paket B | % | 160,08 | 161,15 | 162,1 | 94 | 97 | 78,98 | 92,03 | 98,79 | 89,5 | 97,12 | 49,34 | 57,11 | 60,94 | 95,21 | 100,12 | Disdik |
| | **Angka Partisipasi Murni** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | APM SD/MI/ Paket A | % | 110,5 | 112,05 | 113,8 | 100 | 100 | 110,52 | 99,97 | 98,18 | 98,8 | 97,52 | 100,02 | 89,22 | 86,27 | 98,80 | 97,52 | Disdik |
| 9 | APM SMP/MTs/ Paket B | % | 121,3 | 122,1 | 124,15 | 80 | 82 | 93,74 | 78,93 | 78,97 | 80,01 | 80,55 | 77,28 | 64,64 | 63,61 | 100,01 | 98,23 | Disdik |
| 10 | Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik | % | 47,62 | 47,62 | 51,06 | 51,06 | 52 | 75,49 | 75,49 | 90 | 56,44 | 57,86 | 158,53 | 158,53 | 176,26 | 110,54 | 111,27 | Disdik |
| 11 | Persentase satuan pendidikan (SD/SMP) yang terakreditasi A | % | 77 | 80 | 82 | 73,26 | 74,26 | 75 | 74 | 76 | 76 | 76 | 97,40 | 92,50 | 92,68 | 103,74 | 102,34 | Disdik |
| | **URUSAN KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Indek Keluarga Sehat | % | - | - | - | 0,4 | 0,5 | - | - | - | 0,34 | 0,35 | - | - | - | 85,00 | 70,00 | Dinkes |
| 13 | Prevalensi stunting pada balita | % | - | 20 | 18 | 16 | 14 | - | 20 | 17,8 | 19,8 | 16,3 | - | 100,00 | 101,11 | 76,25 | 83,57 | Dinkes |
| | **URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Persentase rumah yg terlayani air minum perpipaan | % | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | 89,26 | 91 | - | - | - | 89,26 | 91,00 | DPUPR |
| 15 | Persentase Pelayanan Air Minum | % | 99,02 | 99,67 | 100 | 100 | 100 | 96,84 | 99,76 | 99,21 | 99,81 | 100 | 97,80 | 100,09 | 99,21 | 99,81 | 100,00 | DPUPR |
| 16 | Persentase irigasi dengan berkinerja baik | % | - | - | - | 92,04 | 93,31 | - | - | - | 94,08 | 94,5 | - | - | - | 102,22 | 101,28 | DPUPR |
| 17 | Persentase irigasi dengan kondisi baik | % | 87,62 | 86,4 | 89,49 | 90 | 91 | 82,08 | 84,4 | 89,5 | 89,69 | 93,31 | 93,68 | 97,69 | 100,01 | 99,66 | 102,54 | DPUPR |
| 18 | Persentase Penataan sungai | % | 23,52 | 24,81 | 26,37 | 27,91 | 29,45 | 23,52 | 24,83 | 26,74 | 27,95 | 28,21 | 100,00 | 100,08 | 101,40 | 100,14 | 95,79 | DPUPR |
| 19 | Persentase panjang jalan status Kota dalam kondisi mantap | % | 75,9 | 75,56 | 77,31 | 84,88 | 85,76 | 75,9 | 83,12 | 84,08 | 85,01 | 85,82 | 100,00 | 110,01 | 108,76 | 100,15 | 100,07 | DPUPR |
| 20 | Persentase jalan kota yang memiliki drainase | % | - | - | - | 65 | 66,44 | - | - | - | 66,97 | 68,97 | - | - | - | 103,03 | 103,81 | DPUPR |

| NO | BIDANG URUSAN / INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | REALISASI | | | | | CAPAIAN (%) | | | | | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 21 | Persentase Sistem drainase Skala Kota | % | 60,39 | 62,91 | 64,4 | 67,26 | 70,12 | 59,7 | 61,54 | 63,64 | 67,28 | 68,97 | 98,86 | 97,82 | 98,82 | 100,03 | 98,36 | DPUPR |
| 22 | Persentase Kepatuhan Pelaku Pembangunan sesuai dokumen tata ruang | % | 34,07 | 35,05 | 36,18 | 37,3 | 38,27 | 34,07 | 35,33 | 36,02 | 34,02 | 38,27 | 100,00 | 100,80 | 99,56 | 91,21 | 100,00 | DPUPR |
| 23 | Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan | % | 69,84 | 71,39 | 71,98 | 73,09 | 74,2 | 69,84 | 70,87 | 71,61 | 71,98 | 71,98 | 100,00 | 99,27 | 99,49 | 98,48 | 97,01 | DPUPR |
| 24 | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang | % | - | - | - | 80,23 | 80,36 | - | - | - | 80,24 | 80,36 | - | - | - | 100,01 | 100,00 | DPUPR |
| | **URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Persentase Rumah Layak Huni | % | 94,87 | 95,92 | 96,98 | 96,95 | 97,27 | 95,26 | 95,85 | 95,95 | 97,04 | 97,3 | 100,41 | 99,93 | 98,94 | 100,09 | 100,03 | DPKP |
| 26 | Persentase rumah tangga yang memiliki pengolahan air limbah akses aman | % | - | - | - | 22,55 | 23,98 | - | - | - | 21,73 | 22,87 | - | - | - | 96,36 | 95,37 | DPKP |
| 27 | Persentase penyerahan PSU Perumahan oleh Pengembang Perumahan Kepada Pemerintah Daerah | % | 3,92 | 5,88 | 7,84 | 19,75 | 22,93 | 14,7 | 20,59 | 26,47 | 21,02 | 24,2 | 375,00 | 350,17 | 337,63 | 106,43 | 105,54 | DPKP |
| | **URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Persentase penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum | % | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | 28,5 | - | - | - | - | 114,00 | SatPol PP&PK |
| 29 | Persentase penyelesaian gangguan Trantibum | % | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | SatPol PP&PK |
| | **URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT: PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yg siap menghadapi bencana | % | 74,47 | 74,47 | 100 | 100 | 100 | 18,36 | 14,89 | 100 | 100 | 100 | 24,6542 | 19,9946 | 100 | 100 | 100 | BPBD |

| NO | BIDANG URUSAN / INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | REALISASI | | | | | CAPAIAN (%) | | | | | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 31 | Persentase kejadian bencana yg bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BPBD |
| 32 | Persentase warga Kota Payakumbuh yang menerima pelayanan penanggulangan bencana | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | BPBD |
| 33 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana | % | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | BPBD |
| 34 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | % | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | BPBD |
| 35 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | % | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | BPBD |
| | **URUSAN SOSIAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Tingkat Kemiskinan | % | 5,54 | 5,41 | 5,27 | 5,52 | 5,41 | 5,65 | 6,16 | 5,66 | 5,44 | 5,19 | 98,01 | 86,14 | 92,60 | 101,45 | 104,07 | DinSos |
| 37 | Persentase PPKS yang terlayani | % | - | - | - | 80 | 85 | - | - | - | 94 | 100 | - | - | - | 117,50 | 117,65 | DinSos |
| | **LAYANAN URUSAN WAJIB TERKAIT NON PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **URUSAN KETENAGAKERJAAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Tingkat Pengangguran | % | 5,9 | 5,83 | 5,8 | 6,05 | 5,81 | 6,68 | 6,47 | 5,16 | 4,84 | 4,87 | 86,78 | 89,02 | 111,03 | 120,00 | 116,18 | Dis Nakerperin |
| 39 | Persentase Penyerapan Tenaga Kerja | % | - | - | - | 93,75 | 93,75 | - | - | - | 95,16 | 95,13 | - | - | - | 101,50 | 101,47 | Dis Nakerperin |
| | **URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Indeks Pembangunan gender (IPG) | Nilai | 98,55 | 98,56 | 98,57 | 98,5 | 98,52 | 98,51 | 98,51 | 98,57 | 98,61 | 98,93 | 99,96 | 99,95 | 100,00 | 100,11 | 100,42 | DP3AP2KB |
| 41 | Tingkat Kategori Capaian Anugerah | kategori | Utama | Utama | Utama | utama | utama | - | Utama | utama | Nindya | Nindya | - | 100 | 100 | 80 | 80 | DP3AP2KB |

| NO | BIDANG URUSAN/ INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | REALISASI | | | | | CAPAIAN (%) | | | | | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | Parahita Ekapraya (APE) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Tingkat Kategori Capaian Kota Layak Anak (KLA) | kategori | - | Madya | - | madya | madya | - | Madya | - | Madya | Madya | - | 100 | - | 100 | 100 | DP3AP2KB |
| | **URUSAN PANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Ketersediaan pangan utama | ton | - | - | - | 19735 | 19745 | - | - | - | 27544 | 19780 | - | - | - | 139,57 | 100,18 | Distapang |
| 44 | Skor PPH Konsumsi | skor | 83 | 84 | 85 | 85,1 | 85,2 | 83,07 | 84,2 | 85,09 | 87,3 | 87,7 | 100,08 | 100,24 | 100,11 | 102,59 | 102,93 | Distapang |
| 45 | Tingkat Keamanan Pangan | indeks | tinggi | tinggi | Tinggi | tinggi | sedang | tinggi | Tinggi | tinggi | Tinggi | tinggi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Distapang |
| 46 | Stabilisasi harga | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a, Beras | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | 1,53 | 1,78 | 2,95 | 3,93 | 1,63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Distapang |
| | b, Cabe | % | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | 16,76 | 18,85 | 32,74 | 18,68 | 20,69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Distapang |
| | c, Bawang | % | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | 12,08 | 11,08 | 16,64 | 15,87 | 13,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Distapang |
| 47 | Indek Ketahanan Pangan | indeks | - | - | - | 84 | 84,1 | - | - | - | 88,56 | 89,33 | - | - | - | 105,43 | 106,22 | Distapang |
| 48 | Persentase cadangan pangan pemerintah | % | - | - | - | 63 | 64 | - | - | - | 69,94 | 145,66 | - | - | - | 111,02 | 227,59 | Distapang |
| | **URUSAN PERTANAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Persentase sertifikasi aset tanah dan bangunan pemko | % | 15,56 | 16,4 | 17,46 | 18,52 | 20,63 | 15,56 | 16,83 | 19,47 | 37,66 | 39,83 | 100,00 | 102,62 | 111,51 | 203,35 | 193,07 | DPUPR |
| | **URUSAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Persentase RTH Publik | % | 16,5 | 16,75 | 17 | 14,88 | 14,89 | 14,87 | 14,87 | 14,32 | 14,88 | 14,87 | 90,12 | 88,78 | 84,24 | 100,00 | 99,87 | DLH |
| 51 | Indeks Kualitas Air | Nilai | 75 | 75 | 75 | 41 | 41 | 66 | 41 | 55,14 | 44,21 | 45,26 | 88,00 | 54,67 | 73,52 | 107,83 | 110,39 | DLH |
| 52 | Indeks Kualitas udara | Nilai | 80 | 80 | 80 | 92 | 92 | 92,94 | 92,66 | 93,11 | 90,92 | 87,59 | 116,18 | 115,83 | 116,39 | 98,83 | 95,21 | DLH |
| 53 | Indeks Kualitas lahan | Nilai | - | - | - | 25,5 | 25,55 | - | - | - | 27,63 | 27,5 | - | - | - | 108,35 | 107,63 | DLH |
| 54 | Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota | % | - | - | - | 95,5 | 95,75 | - | - | - | 97 | 96,4 | - | - | - | 101,57 | 100,68 | DLH |
| | **URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | BIDANG URUSAN / INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | REALISASI | | | | | CAPAIAN (%) | | | | | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 55 | Nilai IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | nilai | - | - | - | 93,1 | 93,2 | - | - | - | 96,25 | 96,31 | - | - | - | 103,38 | 103,34 | Disduk Capil |
| 56 | Persentase penduduk yg memiliki dokumen kependudukan | % | 90,77 | 91 | 86,25 | 98,5 | 98,55 | 100 | 98,13 | 100 | 99,52 | 99,5 | 110,17 | 107,84 | 115,94 | 101,04 | 100,96 | Disduk Capil |
| | **URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | Cakupan Pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) | % | 83 | 85 | 87 | 85 | 85 | 83 | - | 85 | 85 | 85 | 100,00 | - | 97,70 | 100,00 | 100,00 | DP3AP2KB |
| | **URUSAN PERHUBUNGAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Nilai survey IKM Pelayanan transportasi | angka | 100 | 100 | 100 | 85 | 87 | 88,36 | 88,58 | 88,72 | 88,33 | 90,66 | 88,36 | 88,58 | 88,72 | 103,92 | 104,21 | DisHub |
| 59 | Persentase Penurunan titik rawan kecelakaan | % | - | - | - | 82 | 84 | - | - | - | 78,46 | 77,49 | - | - | - | 104,51 | 108,40 | DisHub |
| | **URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Indeks SPBE | nilai | 2,7 | 2,8 | 3 | 2,5 | 2,7 | 2,89 | 2,42 | 3,02 | 3,17 | 3,75 | 107,04 | 86,43 | 100,67 | 126,80 | 138,89 | Diskominfo |
| 61 | Persentase Perangkat Daerah yang menyebarkan informasi melalui media | % | - | - | - | 75 | 80 | - | - | - | 100 | 81 | - | - | - | 133,33 | 101,25 | Diskominfo |
| 62 | Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Kominfo | % | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | 100,00 | 100,00 | Diskominfo |
| | **URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Persentase Koperasi yang Berkualitas | % | - | - | - | 25 | 25,69 | - | - | - | 72,31 | 36,36 | - | - | - | 289,24 | 141,53 | Diskop UKM |
| 64 | Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha | % | - | - | - | 14,53 | 14,96 | - | - | - | 23 | 62,74 | - | - | - | 158,29 | 419,39 | Diskop UKM |

| NO | BIDANG URUSAN / INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | REALISASI | | | | | CAPAIAN (%) | | | | | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | **URUSAN PENANAMAN MODAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Nilai Realisasi Investasi | (Milyar Rupiah) | 74,4 | 200,9 | 203,8 | 220 | 225 | 178,4 | 417,24 | 199,7 | 493,81 | 658,63 | 239,78 | 207,69 | 97,99 | 224,46 | 292,72 | DPMPTSP |
| | **URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional | Orang | 15 | 18 | 20 | 2 | 2 | - | - | - | 61 | 51 | - | - | - | 3050 | 2550 | Disparpora |
| | **URUSAN STATISTIK** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Persentase kepuasan pengguna data statistik | % | 85 | 90 | 90 | 80 | 85 | 87,52 | 87,5 | 87,72 | 91 | 85 | 102,96 | 97,22 | 97,47 | 113,75 | 100 | Diskominfo |
| | **URUSAN PERSANDIAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | Persentase penanganan cyber attack | % | 80 | 85 | 90 | 85 | 85 | 80 | 100 | 100 | 1965 | 85 | 100,00 | 117,65 | 111,11 | 2311,76 | 100,00 | Diskominfo |
| 69 | Tingkat keamanan informasi pemerintah | % | - | - | - | 85 | 85 | - | - | - | 100 | 85 | - | - | - | 117,65 | 100,00 | Diskominfo |
| | **URUSAN KEBUDAYAAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | Persentase lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai nilai budaya | % | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | Disparpora |
| 71 | Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan | % | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 100 | 100 | Disparpora |
| | **URUSAN PERPUSTAKAAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | Indeks pembangunan literasi masyarakat | % | - | - | - | 28,3 | 28,6 | - | - | - | 77,43 | 72,15 | - | - | - | 273,60 | 252,27 | DPK |
| | **URUSAN KEARSIPAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | Indek Pengawasan Kearsipan | nilai | - | - | - | 33 | 34 | - | - | - | 73,05 | 73,81 | - | - | - | 221,36 | 217,09 | DPK |
| | **LAYANAN URUSAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | Produksi Ikan Konsumsi | ton | 540 | 550 | 650 | 560 | 560 | 540,27 | 551,87 | 566,51 | 571,09 | 565,4 | 100,05 | 100,34 | 87,16 | 101,98 | 100,96 | DisTan |

| NO | BIDANG URUSAN / INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | REALISASI | | | | | CAPAIAN (%) | | | | | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | **URUSAN PARIWISATA** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan | % | | | | 1 | 1 | | | | 3,85 | 79,91 | | | | 385,00 | 7991,00 | Disparpora |
| 76 | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten / kota | % | | | | 11 | 11 | | | | 99,79 | 4,14 | | | | 553,55 | 37,64 | Disparpora |
| 77 | Tingkat Hunian Akomodasi | % | | | | 18 | 20 | | | | | | | | | 341,76 | 57,75 | Disparpora |
| 78 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD | % | | | | 0,45 | 0,5 | | | | 0,46 | 0,56 | | | | 100,00 | 2,00 | Disparpora |
| | **URUSAN PERTANIAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | Produksi padi | ton | 40,517 | 41,000 | 41,200 | 41,200 | 41,225 | 43,038 | 43,905 | 42,927 | 46,027 | 41,609,46 | 106,22 | 107,09 | 104,19 | 111,72 | 100,93 | DisTan |
| 80 | Populasi sapi | ekor | 5,962 | 5,992 | 6,025 | 5,400 | 5,427 | 5,965 | 5,995 | 4,182 | 2,919 | 2,951 | 100,05 | 100,05 | 69,41 | 54,06 | 54,38 | DisTan |
| | **URUSAN PERDAGANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | Konstribusi sector perdagangan terhadap PDRB | % | 24,07 | 24,12 | 24,17 | 25,13 | 25,23 | 24,53 | 24,12 | 24,01 | 25,13 | 25,1 | 101,91 | 100,00 | 99,34 | 100,00 | 99,48 | Diskop UKM |
| | **URUSAN PERINDUSTRIAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | Persentase peningkatan nilai produksi | % | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,25 | -13,8 | 15,3 | 15,3 | 5,63 | 3,3 | -690, 00 | 612,00 | 510,00 | 187,67 | 101,54 | Diskop UKM |
| | **FUNGSI PENDUKUNG** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | Nilai LPPD | nilai | - | 3,1500 | 3,1600 | 3,1700 | 3,1800 | - | 2,66 | 3,3922 | 3,078 | - | - | 84,44 | 107,35 | 97,12 | - | Setdako |
| 84 | Nilai IKM | nilai | 80,75 | 81,35 | 81,85 | 88,41 | 88,5 | 86,48 | 87,3 | 87,66 | 89,65 | 88,37 | 107,10 | 107,31 | 107,10 | 101,26 | 99,85 | Setdako |
| 85 | Indeks Reformasi Hukum | indeks | - | - | - | 72 | 73 | - | - | - | 67,48 | 87 | - | - | - | 93,72 | 119,18 | Setdako |

| NO | BIDANG URUSAN / INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | REALISASI | | | | | CAPAIAN (%) | | | | | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 86 | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa | indeks | - | - | - | 75 | 75 | - | - | - | 83,26 | 91,58 | - | - | - | 111,01 | 120,50 | Setdako |
| | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | Nilai IKM | nilai | - | - | - | 84 | 84 | - | - | - | 84,85 | 84,85 | - | - | - | 101,01 | 101,01 | Setwan |
| 88 | Persentase Ranperda yang ditetapkan | % | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | 100,00 | 100,00 | Setwan |
| | **FUNGSI PENUNJANG** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PERENCANAAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | Indek Kualitas Perencanaan | % | - | - | - | 90 | 90,5 | - | - | - | 90 | 90,5 | - | - | - | 100 | 100 | Bappeda |
| | **KEUANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | IPKD | scor | - | - | - | 75 | 75 | - | - | - | 77,4326 | 71,75 | - | - | - | 103,24 | 95,67 | BKD |
| 91 | Opini laporan keuangan pemerintah daerah dari BPK | opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | BKD |
| | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | Indeks Profesionalitas ASN | % | - | - | - | 60,79 | 60,82 | - | - | - | 65,29 | 78,22 | - | - | - | 107,40 | 128,61 | BKPSDM |
| 93 | Indek Merit Sistem | % | - | - | - | 0,82 | 0,84 | - | - | - | 0,62 | 0,63 | - | - | - | 75,61 | 75,00 | BKPSDM |
| | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | Kategori tingkat Inovasi Daerah | Kategori | - | - | - | inovatif | inovatif | - | - | - | inovatif | inovatif | - | - | - | 100,00 | 100 | Bappeda |
| | **PENGAWASAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **INSPEKTORAT** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | Nilai Indeks RB pada area pengawasan | indeks | 3,5 | 3,65 | 3,7 | 65 | 66 | 3,85 | 5,18 | - | - | - | 110,00 | 141,92 | - | - | - | Inspektorat |
| 96 | Persentase Perangkat Daerah yang meningkat nilai evaluasi Internal dan Eksternal | % | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | Inspektorat |
| 97 | Nilai AKIP Kota Komponen Evaluasi internal | nilai | - | - | - | 7,11 | 7,12 | 7,09 | 7,14 | 17,85 | 18,08 | 18,18 | - | - | - | 254 | 255 | Inspektorat |
| | **KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | BIDANG URUSAN/ INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | REALISASI | | | | | CAPAIAN (%) | | | | | OPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 98 | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yg aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kecamatan |
| | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | Persentase penanganan konflik sosial yg terjadi di tengah masyarakat | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kesbangpol |
| 100 | Persentase parpol dan ormas yang aktif | % | 90,64 | 90,64 | 90,64 | 90,64 | 90,64 | 86,27 | 90,2 | 90,9 | 90,72 | 91,78 | 95 | 100 | 100 | 100 | 101,26 | Kesbangpol |
| | **ASPEK DAYA SAING DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | Produktivitas Total Daerah | Rp, Milyar | 95,84 | 101,23 | 106,93 | 96,84 | 97,2 | 95,84 | 98,12 | 199,9 | 115,3 | 120,97 | 100,00 | 96,93 | 186,94 | 119,06 | 124,45 | BPS |
| 102 | Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita | Rp, Ribu | 2.060,03 | 2.165,69 | 2.271,42 | 1.768,06 | 1.908,02 | 1.964,89 | 1.990,31 | 1.576,52 | 15.790,30 | 16.350,03 | 95,38 | 91,90 | 69,41 | 893,09 | 856,91 | BPS |
| 103 | Rasio Ketergantungan | % | 54,42 | 54,43 | 54,44 | 45,64 | 44,46 | 48 | 48 | 48 | 47,94 | 47,94 | 111,80 | 111,81 | 111,83 | 94,96 | 92,17 | BPS |

**Sumber:** data diolah Bappeda dari berbagai sumber

Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berpedoman pada dokumen RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, sehingga ada beberapa indikator yang tidak tersedia datanya tahun 2020-2022, sedangkan khusus Nilai Indeks RB pada area pengawasan, sejak tahun 2022 ada lagi.

## F. STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Ini merupakan hak seluruh individu dan pemerintah wajib menjamin pemenuhannya. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan hal tersebut, bahkan menjadikan SPM sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar yang harus menjadi prioritas anggaran daerah. Peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait dengan penerapan SPM sudah diundangkan. Beberapa di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM; Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM; sampai dengan peraturan terkait standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM dari seluruh Kementerian Pengampu SPM, seperti Permenkes Nomor 4 Tahun 2019; Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018; Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018; Permensos Nomor 9 Tahun 2018; Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 dan Nomor 121 Tahun 2018.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Di dalam RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, SPM telah dijadikan acuan dan disinkronkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan. SPM merupakan salah satu kebijakan yang turut dievaluasi, karena ini merupakan elemen yang tidak bisa dipisahkan dalam perencanaan di tahun berikutnya. Evaluasi dilakukan terhadap capaian tahun 2020-2024.

**Tabel 2.70** Evaluasi Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020 sd 2024

| NO | JENIS PELAYANAN | INDIKATOR PENCAPAIAN | SATUAN | REALISASI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| A | PENDIDIKAN | | | | | | | |
| 1 | Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD | Orang | 2.620 | 3.836 | 3.836 | 4.974 | 4.325 |
| 2 | Pendidikan Dasar | Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartispasi dalam pendidikan dasar (SD, SMP, MTs) | Orang | 24.591 | 23.738 | 23.738 | 15.735 | 15.735 |
| 3 | Pendidikan Kesetaraan | Jumlah warganegara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan | Orang | 183 | 462 | 462 | 183 | 183 |

| NO | JENIS PELAYANAN | INDIKATOR PENCAPAIAN | SATUAN | REALISASI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **B** | **Kesehatan** | | | | | | | |
| 1 | Pelayanan kesehatan ibu hamil | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | % | 92,78 | 87,57 | 87,57 | 100 | 100 |
| 2 | Pelayanan kesehatan ibu bersalin | Persentase ibu bersalian mendapatkan pelayanan persalinan | % | 90,12 | 83,17 | 83,17 | 100 | 100 |
| 3 | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan bayi baru lahir | % | 90,12 | 89,12 | 89,12 | 100 | 100 |
| 4 | Pelayanan kesehatan balita | Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar | % | 78,26 | 78,44 | 78,44 | 100 | 100 |
| 5 | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 82,00 | 83,62 | 83,62 | 100 | 100 |
| 6 | Pelayanan kesehatan pada Usia Produktif | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | % | 65,47 | 91,39 | 91,39 | 100 | 100 |
| 7 | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard | % | 82,35 | 58,22 | 58,22 | 100 | 100 |
| 8 | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 80,15 | 80,65 | 80,65 | 100 | 100 |
| 9 | Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus | Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 89,34 | 105,89 | 105,89 | 100 | 100 |
| 10 | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | % | - | 98,31 | 98,31 | 100 | 100 |
| 11 | Pelayanan kesehatan orang terduga TB | Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | % | 38,79 | 67,69 | 67,69 | 100 | 100 |
| 12 | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia HIV | Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV (*Human Immunodeficiency virus*) mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | % | 74,35 | 76,62 | 76,62 | 100 | 100 |
| **C** | **Pekerjaan Umum** | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik | % | 95,98 | 97,52 | 97,52 | 98,91 | 100 |
| 2 | Penyediaan kebutuhan pokok | Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan | % | 96,84 | 91,78 | 91,78 | 100 | 100 |

| NO | JENIS PELAYANAN | INDIKATOR PENCAPAIAN | SATUAN | REALISASI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | air minum sehari-hari | pokok air minum sehari-hari yang akan dipenuhi | | | | | | |
| **D** | **PERUMAHAN** | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota | Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | orang | - | - | - | - | - |
| 2 | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota | Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kota/kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | orang | - | 8 | - | - | - |
| **E** | **Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat** | | | | | | | |
| 1 | Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Pelayanan penyelamatan dan evakausi korban bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan informasi rawan bencana | % | 15,09 | 33,23 | 49,26 | 100 | 100 |
| 3 | Pelayanan informasi rawan bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | % | 0,09 | 74,47 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **F** | **Sosial** | | | | | | | |
| 1 | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti; | Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | % | 37,39 | 100,27 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; | Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | % | 92,30 | 123,08 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; | Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | % | 100 | 131,84 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan | Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | % | 100 | 133,33 | 100 | 100 | 100 |

| NO | JENIS PELAYANAN | INDIKATOR PENCAPAIAN | SATUAN | REALISASI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | pengemis di luar panti | | | | | | | |
| 5 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota. | Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota | % | 39,47 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Sumber:** Laporan SPM Tahun 2020 - 2024

Capaian pelayanan SPM Kota Payakumbuh sejak tahun 2020 cukup baik, selalu menunjukkan kecenderungan meningkat, bahkan sebagian besar sudah mencapai angka maksimal 100%. Namun masih terdapat indikator yang belum mencapai 100%, seperti layanan pengolahan air limbah domestik yang baru mencapai angka 98,91%, artinya masih ada layanan air limbah domestik berupa septik tank yang belum layak sebesar 1,09%. Ini sudah menjadi target pemerintah daerah dalam menuntaskan layanan air limbah yang layak. Sedangkan pada sisi lain, Pemerintah Kota Payakumbuh tidak hanya berupaya untuk sekedar berstatus layak saja, namun yang utama adalah status "aman" dan saat ini kondisinya baru sekitar 15% saja. Pemerintah daerah dalam pencapaian SPM tetap perlu mempertahankan kondisi capaian yang sudah ada, sehingga pengalokasian program/kegiatan serta pendanaan tetap harus diprioritaskan, karena ini berkaitan pelayanan dasar kepada masyarakat.

## G. KERJA SAMA DAERAH

Kerja sama daerah adalah bentuk kerja sama Pemerintah Kota Payakumbuh dengan daerah lain atau pihak lain sebagai upaya untuk mencapai tujuan bersama dalam penyelenggaraan daerah. Di tatanan pemerintah kota, koordinasi kerja sama daerah dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan. Tujuan kerja sama daerah ini antara lain:

1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, melalui kerja sama, daerah dapat mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2. Efisiensi Pelayanan Publik, kerja sama antar daerah atau dengan pihak lain dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif.
3. Penyelarasan Pembangunan, kerja sama dapat membantu menyelaraskan pembangunan antar daerah, mengurangi kesenjangan, dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
4. Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah, kerja sama dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah melalui berbagai bentuk kerja sama ekonomi dan perdagangan.

Bentuk-bentuk kerja sama Daerah:

1. Kerja sama antar daerah, terjadi antara dua daerah atau lebih untuk mengelola urusan pemerintahan yang memiliki dampak lintas daerah atau untuk menyediakan layanan publik yang lebih efisien jika dilakukan bersama. Berikut kerja sama Pemerintah Kota Payakumbuh dengan pemerintah daerah lain:

**Tabel 2.71** Bentuk Kerjasama Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Pemerintah Lain Tahun 2021-2024

| TAHUN | DAERAH KERJA SAMA | BENTUK KERJA SAMA |
|---|---|---|
| 2021 | Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/ Kota se- Sumatera Barat | Kerja Sama Antar Daerah |
| | Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota | Kerja Sama Antar Daerah |
| 2023 | Provinsi Sumatera Barat Dengan Pemerintah Kota Solok | Kerja Sama Antar Daerah |
| 2024 | Pemerintah Kota Sawahlunto | Kerja Sama Antar Daerah |
| | Pemerintah Kabupaten Muko-Muko | Kerja Sama Antar Daerah Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Kelautan Dan Perikanan |
| | | Kerja Sama Antar Daerah Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pangan |
| | Pemerintah Kota Bengkulu | Pengembangan Potensi Daerah Dan Peningkatan Pelayanan Publik |

**Sumber:** Bagian Pemerintahan Setdako, 2025

2. Kerja sama dengan pihak ketiga, melibatkan daerah dengan pihak ketiga, seperti individu, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan. Berikut daftar kerja sama Pemerintah Kota dengan pihak ketiga tahun 2021-2025.

**Tabel 2.72** Daftar Kerjasama dengan Pihak ketiga Kota Payakumbuh Tahun 2021 s.d 2025

| TAHUN | PIHAK KETIGA | BENTUK KERJA SAMA |
|---|---|---|
| 2021 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat | Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengembangan, Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia |
| | Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia | Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia |
| | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Payakumbuh | Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional |
| | Koperasi Sentra Rendang Payo | Kerja sama Produksi Rendang di Sentra IKM Rendang Kota Payakumbuh |
| | PT Bank Nagari | Pengembangan Digitalisasi Ekonomi Daerah |
| 2022 | Koperasi Sentra Rendang Payo | Kerja sama Produksi Rendang di Sentra IKM Rendang Kota Payakumbuh |

| TAHUN | PIHAK KETIGA | BENTUK KERJA SAMA |
|---|---|---|
| | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Payakumbuh | Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Sosial |
| | Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta | Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Payakumbuh |
| | Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Barat | Sinergi Pemanfaatan Bersama Data Dan Informasi Serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Public Dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Kota Payakumbuh |
| | Badan Informasi Geospasial | Penyelenggaraan, Pengembangan, Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Geospasial Di Kota Payakumbuh |
| | PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Penyediaan Dan Penggunaan Layanan Jasa Perbankan Dalam Mendukung Program Smart City Kota Payakumbuh |
| | PT. Semen Padang | Kerja sama Dalam Pembangunan Daerah |
| | Universitas Bung Hatta | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi |
| | Universitas Negeri Padang | Tri Dharma Perguruan Tinggi Dan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka |
| | Universitas Andalas | Tri Dharma Perguruan Tinggi Dan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka |
| | Sekolah Tinggi Teknologi Payakumbuh | Kerja Sama Pendidikan, Penelitian Dan Pengembangan, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pemerintahan Serta Pengembangan Sumber Daya |
| | STKIP Abdi Pendidikan Payakumbuh | Kerja Sama Pendidikan, Penelitian Dan Pengembangan, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pemerintahan Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Program Kegiatan Pemerintahan |
| 2023 | Badan Informasi Geospasial | Penyelenggaraan, Pengembangan, Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Geospasial Di Kota Payakumbuh |
| | Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat | Kerja sama Dalam Rangka Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Di Daera, Pembinaan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Serta Penyelenggraan Kekayaan Intelektual |
| | Kejaksaan Negeri Payakumbuh | Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara |
| 2024 | Institut Teknologi Dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi | Sinergi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia |
| | Universitas Andalas | Tri Dharma Perguruan Tinggi Dan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka |

| TAHUN | PIHAK KETIGA | BENTUK KERJA SAMA |
|---|---|---|
| | PT Ruang Raya Indonesia (Ruang Guru) | Peningkatan Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Teknologi Di Kota Payakumbuh |
| 2025 | Badan Layanan Umum Daerah UPTD BKom Dan Pelatihan Terintegrasi Atau Peningkatan Kompetensi | Peningkatan Kompetensi SDM BLUD |
| | APEKSI | Kerja sama antar daerah |

**Sumber:** Bagian Pemerintahan Setdako, 2025

3. Kerja sama dengan Pemerintah Daerah Luar Negeri, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, kerjasama ini memperluas cakupan kerjasama daerah. Untuk saat ini, Pemerintah Kota Payakumbuh belum pernah melakukan kerjasama dengan pemerintah luar negeri.

## H. RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR OLEH APBN DAN/ ATAU PROVINSI DI KABUPATEN/ KOTA

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kota Payakumbuh, Pemerintah daerah mengupayakan untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Pemerintah Kota Payakumbuh terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas infrastruktur di Kota Payakumbuh guna mendukung pertumbuhan ekonomi, memperluas akses pelayanan dasar, dan mewujudkan pembangunan yang merata. Melalui dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, sejumlah proyek infrastruktur strategis di Kota Payakumbuh telah dilaksanakan, diantaranya:

1. Pembangunan infrastruktur normalisasi batang agam yang telah dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Kementerian Pekerjaan Umum dari tahun 2016 hingga tahun 2025 dengan total biaya mencapai lebih dari Rp.270 milyar,
2. Peningkatan jalan melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) pada tahun 2023 dengan total nilai sebesar Rp.13,88 milyar,
3. Rehabilitasi prasarana air baku batang agam yang dilaksanakan oleh BWS Sumatera V Kementerian PU dengan nilai kontrak Rp.3,8 milyar,
4. Pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan baik jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah Pusat maupun jalan provinsi yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi,
5. Pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi.

Keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Kota Payakumbuh untuk kedepannya Pemerintah Kota Payakumbuh tetap mengupayakan keberlanjutan kerjasama dengan Pemerintah Pusat ataupun pemerintah provinsi dengan harapan kebutuhan layanan dasar dan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dapat tersedia dengan optimal. Usulan

pembangunan infrastruktur di Kota Payakumbuh untuk tahun 2025 – 2029 diantaranya:

**Tabel 2.73** Usulan Pembangunan Infrastruktur

| NO | USULAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR | LOKASI | RENCANA TAHUN PELAKSANAAN | SUMBER PENDANAAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penanganan kawasan rawan banjir/ genangan berupa pembangunan Drainase pada jalan Nasional/ Provinsi | Jl. Diponegoro,<br>Jl Ahmad dahlan,<br>Jl Soekarno Hatta,<br>Jl Sudirman (Jalan Nasional)<br>Jl. Singa harau,<br>Jl. Khatib sulaiman,<br>Jl. Panglima polim,<br>Jl. Gajah Mada,<br>Jl. M. Yamin (Jalan provinsi) | 2025 - 2029 | APBN/ APBD Provinsi |
| 2 | Penataan sungai berupa normalisasi dan pembangunan perkuatan tebing sungai | Sungai Batang Agam,<br>Sungai Batang Pulau,<br>Sungai Batang Sikali,<br>Sungai Batang Lampasi | 2025 - 2029 | APBN/ APBD Provinsi |
| 3 | Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi | DI Batang agam,<br>DI Sei Dareh,<br>DI Batang Talawi,<br>DI Batang Tabik,<br>DI Batang lampasi | 2025 - 2029 | APBD Provinsi |
| 4 | Peningkatan kondisi jalan mantap | Jl. Diponegoro,<br>Jl Ahmad dahlan,<br>Jl Soekarno Hatta,<br>Jl Sudirman (Jalan Nasional)<br>Jl. Singa harau,<br>Jl. Khatib sulaiman,<br>Jl. Panglima polim,<br>Jl. Gajah Mada,<br>Jl. M. Yamin (Jalan provinsi) | 2025 - 2029 | APBN/ APBD Provinsi |

**Sumber:** Dpupr, 2025

## I. BUMD YANG MENDUKUNG KINERJA PELAYANAN PEMDA

BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemda, satu-satunya adalah Sumber Air PAMTIGO. Saat ini PAMTIGO mengandalkan 5 sumber air baku dengan total kapasitas produksi sebesar **320 liter/detik**, sementara kebutuhan riil mencapai **470 liter/detik**. Artinya, terdapat **defisit debit sekitar 150 liter/detik**. Kelima sumber air baku ini dibangun dari tahun 1975 (awal pembanguan PDAM) dan terakhir tahun 2018. WTP Batang Agam ditargetkan untuk ditingkatkan kapasitasnya hingga **100 liter/dt** dengan operasi penuh 24 jam, berikut rincian kelima sumber air baku:

**Tabel 2.74** Sumber Air Baku PAMTIGO Kota Payakumbuh

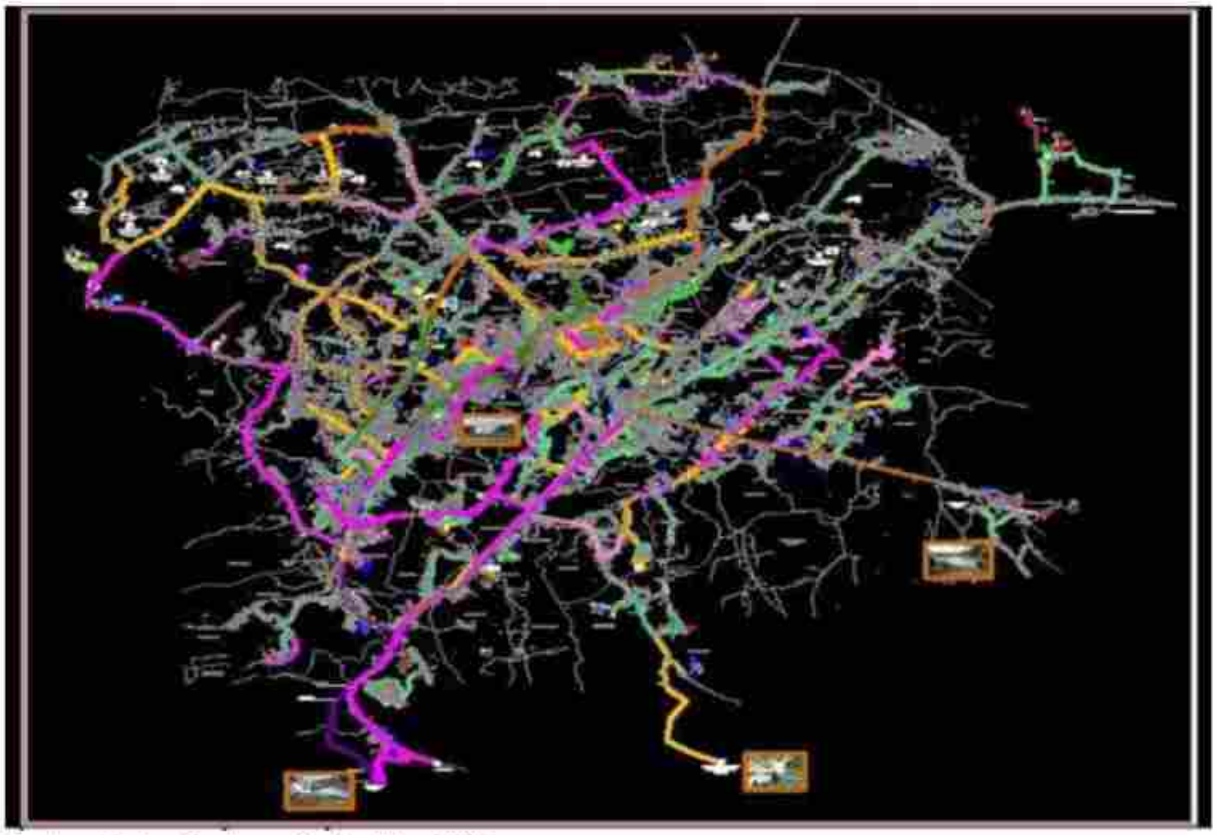
| NO | SUMBER AIR | KAPASITAS PRODUKSI | LOKASI | TAHUN DIBANGUN | SISTEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batang Tabik | 961/dt | Kab. Lima Puluh Kota | 1974 | Grativitasi |
| 2 | Sungai Dareh Situjuah | 2021/dt | Kab. Lima Puluh Kota | 1996 | Grativitasi |

| NO | SUMBER AIR | KAPASITAS PRODUKSI | LOKASI | TAHUN DIBANGUN | SISTEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sikamaruncing | 101/dt | Kab. Lima Puluh Kota | 2000 | Grativitasi |
| 4 | Balai Panjang | 51/dt | Kab. Lima Puluh Kota | 2017 | Grativitasi |
| 5 | WTP Batang Agam | 171/dt | Kota Payakumbuh | 2018 | Perpompaan |

**Sumber:** Bagian Perekonomian Setdako, 2025

1. Permasalahan teknis dan Non Teknis Sumber Air Masing-masing sumber air memiliki tantangan:
   a) Batang Tabik menghadapi dinamika sosial-politik setiap masa perpanjangan perjanjian sewa (5 tahunan).
   b) Ketiadaan SIPA (Surat Izin Pengusahaan Air): Dari lima sumber, hanya WTP Batang Agam yang telah memiliki izin resmi. Empat lainnya masih dalam proses yang telah berlangsung lebih dari dua tahun dan terhambat oleh perbedaan interpretasi antar instansi atas Permen PUPR No. 3 Tahun 2023 dan Permen PUPR No. 1 Tahun 2024.
   c) Ketergantungan terhadap pihak ketiga: Beberapa sumber masih berada di lahan milik pribadi, sehingga rawan tekanan non-teknis seperti intervensi dalam pengangkatan tenaga kerja atau penyesuaian kontribusi lahan.
2. Jaringan Perpipaan. Secara umum seluruh wilayah di kota Payakumbuh sudah terjangkau oleh perpipaan, dimana layanan saat ini masih interkoneksi. Data perpipaan yang terpasang saat ini sebagai berikut:

**Gambar 2.18** Peta Jaringan Pamtigo



**Sumber:** Bagian Perekonomian Setdako, 2025

Tantangan yang dihadapi saat ini adalah belum ada pemisahan jaringan pipa antar sumber dan belum terbentuknya zona pelayanan, sehingga menyebabkan rendahnya tekanan air di beberapa wilayah pelayanan. Di samping itu tingginya angka kehilangan air dimana pada tahun 2024 sebesar 37,80%.

**Tabel 2.75** Data perpipaan yang terpasang di Kota Payakumbuh

| NO | NAMA SUMBER | TOTAL PANJANG (Meter) | SISTEM PENGALIRAN AIR |
|---|---|---|---|
| 1 | Batang Tabik | 112.879 | Gravitasi |
| 2 | Sungai Dareh I | 112.879 | Gravitasi |
| 3 | Sungai Dareh II | 112.879 | Gravitasi |
| 4 | Sungai Dareh III | 1.395 | Kombinasi |
| 5 | Sungai Dareh IV | 3.030 | Kombinasi |
| 6 | Sikamuruncing | 6.252 | Gravitasi |
| 7 | WTP Batang Agam | 2.704 | Pompa |
| 8 | Balai Panjang | 112.879 | Kombinasi |

**Sumber:** Bagian Perekonomian Setdako, 2025

3. Pertumbuhan Pelanggan, Cakupan Pelayanan serta Tingkat kehilangan Air. Secara umum pertumbuhan pelanggan cakupan pelayan, serta tingkat kehilangan air selama 5 tahun dapat dilihat dalam tabel 2.76

**Tabel 2.76** Data jumlah pelanggan, cakupan pelanggan dan tingkat kehilangan air Pamtigo Kota Payakumbuh tahun 2020-2024

| TAHUN | JUMLAH PELANGGAN | CAKUPAN PELAYANAN | TINGKAT KEHILANGAN AIR |
|---|---|---|---|
| 2020 | 31.883 SR | 93,23% | 30,49% |
| 2021 | 32.620 SR | 94,36% | 33,11% |
| 2022 | 33.993 SR | 95,30% | 35,75% |
| 2023 | 34.499 SR | 75,98% | 36,91% |
| 2024 | 33.847 SR | 74,69% | 37,80% |

**Sumber:** Bagian Perekonomian Setdako, 2025

4. Keuangan. Perolehan laba dari tahun 2020 sampai dengan 2024 berfluktuasi dimana perolehan laba bersih terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp.3.003.874.738,- dan untuk tahun 2023 dan 2024 sudah dapat ditingkatkan sehingga posisi laba bersih tahun 2024 menjadi Rp.4.529.268.286,-. Sedangkan neraca perusahaan, aset perusahaan tahun 2020-2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp.86.180.451.985,- menjadi Rp.98.106.099.427,- pada tahun 2024.

**Tabel 2.77** Data Keuangan Pamtigo Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

| URAIAN | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Laba/Rugi** | | | | | |
| Pendapatan Usaha | 35.694.007.532 | 35.848.847.480 | 36.077.139.288 | 37.250.008.475 | 38.024.760.944 |
| Beban Usaha | 29.732.621.965 | 30.992.642.207 | 31.754.047.927 | 31.558.438.121 | 32.378.595.771 |
| Laba Usaha | 5.961.385.567 | 4.856.205.273 | 4.32.091.361 | 5.691.570.354 | 5.646.165.173 |
| Laba bersih | 4.682.768.830 | 3.500.613.160 | 3.003.874.738 | 4.421.440.240 | 4.529.268.286 |
| Neraca | | | | | |
| a. Total Aktiva | 86.180.451.985 | 87.983.150.485 | 88.663.674.368 | 93.601.652.680 | 98.106.099.427 |
| b. Total Liabilitas | 4.455.238.845 | 3.424.117.874 | 4.345.607.848 | 4.652.205.513 | 7.849.360.547 |
| c. Total Equitas | 81.725.213.140 | 84.559.032.611 | 84.318.066.520 | 88.949.447.167 | 90.256.738.880 |
| Investasi | 4.286.243.314 | 3.437.527.422 | 2.772.273.131 | 3.837.706.371 | 3.664.363.025 |

**Sumber:** Bagian Perekonomian Setdako, 2025

5. Kinerja Pamtigo dinilai berdasarkan Permendagri Nomor 47 tahun 1999 dan Penilaian berdasarkan Kementerian PUPR.

**Tabel 2.78** Penilaian Kinerja Menurut Permendagri No. 47 Tahun 1999

| NO | NILAI KINERJA | | ASPEK | NILAI KINERJA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | **KLASIFIKASI KINERJA** | | | | | | | |
| | NILAI KINERJA | KINERJA | | | | | | |
| | >75 | Baik Sekali | Keuangan | 30,00 | 30,00 | 29,25 | 30,75 | 30,75 |
| | >60-75 | Baik | Opersional | 24,68 | 22,98 | 23,83 | 22,13 | 22,13 |
| | >45-60 | Cukup | Administrasi | 12,08 | 11,67 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| | >30-45 | Kurang | | | | | | |
| | <=30 | Tidak Baik | | | | | | |
| 2 | **PENILAIAN KINERJA** | | | | | | | |

| NO | NILAI KINERJA | | | | ASPEK | NILAI KINERJA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | ASPEK | JUMLAH | | NILAI MAX | | | | | | |
| | | BOBOT | INDIKATOR | | | | | | | |
| | Keuangan | 45 | 10 | 60 | | | | | | |
| | Operasional | 40 | 10 | 47 | | | | | | |
| | Administrasi | 15 | 10 | 36 | Nilai Kinerja | **66,76** | **64,65** | **65,58** | **65,38** | **65,38** |
| | | **100** | **30** | **143** | Kinerja | **BAIK** | **BAIK** | **BAIK** | **BAIK** | **BAIK** |

**Sumber:** Bagian Perekonomian Setdako, 2025

**Tabel 2.79** Penilaian Kinerja Menurut Dinas PUPR Kota Payakumbuh

| NO | NILAI KINERJA | | | | ASPEK | NILAI KINERJA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | **KLASIFIKASI KINERJA** | | | | | | | | | |
| | NILAI SKORING | NILAI KINERJA | | | Keuangan | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| | >2,8 | Sehat | | | Pelayanan | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,69 | 0,70 |
| | >2,2 – 2,8 | Kurang Sehat | | | Operasional | 1,02 | 1,09 | 1,02 | 0,94 | 1,02 |
| | <2,2 | Sakit | | | SDM | 0,51 | 0,63 | 0,51 | 0,63 | 0,63 |
| 2 | **PENILAIAN KINERJA** | | | | | | | | | |
| | ASPEK | JUMLAH | | SKORING | | | | | | |
| | | BOBOT | NILAI MAX | | | | | | | |
| | Keuangan | 0,25 | 5 | 1,25 | | | | | | |
| | Pelayanan | 0,25 | 5 | 1,25 | | | | | | |
| | Operasional | 0,35 | 5 | 1,75 | | | | | | |
| | SDM | 0,15 | 5 | 0,75 | Nilai Kinerja | 3,30 | 3,50 | 3,31 | 3,24 | 3,32 |
| | | 1,00 | 20,00 | 5,00 | Kinerja | **SEHAT** | **SEHAT** | **SEHAT** | **SEHAT** | **SEHAT** |

**Sumber:** Bagian Perekonomian Setdako, 2025

Secara umum Penilaian kinerja Pamtigo menurut Permendagri Nomor 47 Tahun 1999 memperoleh nilai BAIK dari tahun 2020 sampai dengan 2024, sedangkan untuk penilaian menurut Kementerian PUPR adalah SEHAT.

6. Perbandingan Realisasi dengan target Rencana Bisnis Tahun 2020-2025

**Tabel 2.80** Perbandingan Realisasi dengan Target dan Rencana Bisnis Tahun 2020-2025

| KODE | INDIKATOR | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 (UNAUDIT) | | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BASELINE | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET |
| A1 | Cakupan Pelayanan Teknis (0%) | 99,53 | 100 | 96,47 | 100 | 94,90 | 100 | 75,98 | 100 | 74,69 | 100 |
| A2 | Pertumbuhan Pelanggan | 10,38 | 5,1 | -5,13 | 1,5 | 3,16 | 1,5 | 2,71 | 1,5 | -1,89 | 1,5 |
| A3 | Tingkat Penyelesaian Pengaduan | 96,91 | 97,53 | 98,75 | 98,14 | 96,66 | 98,76 | 98,33 | 99,38 | 98,03 | 100 |
| A4 | Efisiensi Penagihan | 99,96 | 99,97 | 98,87 | 99,98 | 95,43 | 99,98 | 96,23 | 99,99 | 99,13 | 100 |
| A5 | Kualitas Air Pelanggan | 7,5 | 26 | 0 | 44,5 | 0 | 63 | 41,9 | 81,5 | 41,9 | 100 |
| A6 | Konsumsi Air Domestik (m3/bulan) | 16,4 | 19,12 | 16,1 | 21,84 | 15,64 | 24,56 | 15,63 | 27,28 | 15,49 | 30 |
| A7 | Pemakaian rata-rata Pelanggan Perbulan (//org/hari) | 109,31 | 127,45 | 126,97 | 145,58 | 122,98 | 163,72 | 156,1 | 181,86 | 156,1 | 200 |
| B1 | Efesiensi Produksi | 89,41 | 93,6 | 80,07 | 77,35 | 80,29 | 87,72 | 88,16 | 96,39 | 89,58 | 93,99 |
| B3 | Air Tak berekening – ATR | 24,67 | 30,41 | 33,11 | 27,81 | 35,75 | 25,21 | 36,91 | 22,6 | 37,8 | 20 |
| B4 | Jam Operasional Layanan | 24 | 24 | 21,72 | 24 | 21 | 24 | 20,5 | 24 | 21,1 | 24 |
| B5 | Tekanan Air pada Sambungan Pelanggan (0,7 Atm) | 16,64 | 35,71 | 27,16 | 51,78 | 25,3 | 67,86 | 25,16 | 83,93 | 23,39 | 100 |
| C1 | Rasio Jumlah Pegawai per 100 Pelanggan | 2,463 | 2,57 | 3,08 | 2,678 | 2,59 | 2,785 | 2,7 | 2,893 | 2,73 | 3 |
| C2 | Ratio Diklat Pegawai | 15,07 | 28,05 | 88,35 | 41,04 | 38,54 | 54,03 | 96,81 | 67,01 | 96,81 | 80 |
| C3 | Beban diklat terhadap beban pegawai | 3,29 | 4,63 | 3,03 | 5,97 | 2,8 | 7,32 | 3,02 | 8,66 | 3,02 | 10 |
| C4 | Nilai kinerja karyawan | - | B | B | B | B | B | B | A | B | A |
| C5 | Nilai Kinerja Perusahan | BAIK | B | B | B | B | B | B | A | B | A |
| C6 | Tingkat kepuasan Penanganan pengaduan pelanggan | 95 | 96 | - | 96 | - | 97 | - | 97 | - | 98 |
| C7 | Indeks kepuasan pelanggan | 75,92 | 77 | - | 80 | 77,46 | 83 | | 88 | 87 | 89 |

| KODE | INDIKATOR | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 (UNAUDIT) | | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BASELINE | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET |
| C8 | Ratio laba | 4,61 | ,83 | 4,14 | 2,06 | 3,56 | 3,07 | 6,09 | 3,81 | 5,76 | 4,5 |
| C9 | Ratio operasi | 0,92 | 0,92 | 0,9 | 0,93 | 0,91 | 0,88 | 0,88 | 0,85 | 0,89 | 0,82 |

**Sumber:** Bagian Perekonomian Setdako, 2025

## J. CAPAIAN DAN PROYEKSI SDG`S/ TPB (TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN)

**Tabel 2.81** Capaian Tahun 2024 dan Proyeksi SDGS/TPB Kota Payakumbuh Tahun 2025

| NO | INDIKATOR TPB | TARGET (PERPRES 59/2017) | BASELINE 2024 | PROYEKSI | | | | | | OPD PENANGGUNG JAWAB | PILAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 1 | 1.2.1*. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | ↓ 7-8% | 5,44% | 5,94% | 6,03% | 6,12% | 6,22% | 6,31% | 6,4% | Dinas Sosial | Sosial |
| 2 | 1.3.1.(a). Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. | ↑ 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dinas Kesehatan | Sosial |
| 3 | 1.3.1.(b). Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. | ↑ 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal | % | 84% | 86% | 88% | 89% | 91% | 93% | Dinas Nakerperin | Sosial |
| 4 | 1.3.1.(c). Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. | ↑ 17,12% | 74% | 101% | 103% | 104% | 104% | 104% | 104% | Dinas Sosial | Sosial |
| 5 | 1.3.1.(d). Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. | ↓ 2,8 juta | 4.140 orang | 5.012 Org | 5.295 Org | 5.572 Org | 5.842 Org | 6.105 Org | 6.358 Org | Dinas Sosial | Sosial |
| 6 | 1.4.1.(a). Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan teraldhirnya di fasilitas kesehatan. | ↑ 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dinas Kesehatan | Sosial |
| 7 | 1.4.1.(b). Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. | ↑ 63% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | Dinas Kesehatan | Sosial |

| NO | INDIKATOR TPB | TARGET (PERPRES 59/2017) | BASELINE 2024 | PROYEKSI | | | | | | OPD PENANGGUNG JAWAB | PILAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 8 | 1.4.1.(c). Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. | ↑ 65% | 45,89% | 68% | 74% | 80% | 84% | 88% | 92% | Dinas P3AP2KB | Sosial |
| 9 | 1.4.1.(d). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. | ↑ 100% | 100,00% | 99,24 % | 99,25 % | 99,26 % | 99,27 % | 99,28 % | 99,28 % | Dinas PUPR | Sosial |
| 10 | 1.4.1.(e). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. | ↑ 100% | 100% | 96% | 96% | 97% | 97% | 97% | 98% | DPKP | Sosial |
| 11 | 1.4.1.(f). Persentase rumah tangga kumuh perkotaan. | ↑ 18,6 juta | 18,67% | 27,27 % | 29,15 % | 30,95 % | 32,68 % | 34,32 % | 35,88 % | DPKP | Sosial |
| 12 | 1.4.1.(g). Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat. | ↑ 94,78% | 92,22% | 73,57 % | 67,65 % | 61,85 % | 56,21 % | 50,75 % | 45,5% | Dinas Pendidikan | Sosial |
| 13 | 1.4.1.(h). Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat. | ↑ 82,2% | 110,08% | 95,85 % | 90,51 % | 85,23 % | 80,02 % | 74,9% | 69,88 % | Dinas Pendidikan | Sosial |
| 14 | 1.4.1.(j). Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. | ↑ 77,4%. | 99% | 103% | 105% | 107% | 108% | 110% | 111% | Dinas Pendidikan | Sosial |
| 15 | 1.4.1.(k). Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. | ↑ 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dinas Sosial | Sosial |
| 16 | 1.5.1*. Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Menurun | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BPBD | Sosial |
| 17 | 1.5.1.(a). Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. | ↑ 39 daerah | 5 Kec | 5 Kec | 5 Kec | 5 Kec | 5 Kec | 5 Kec | 5 Kec | BPBD | Sosial |
| 18 | 1.5.1.(b). Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. | ↑ 151 ribu | 20 Org | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Dinas Sosial | Sosial |
| 19 | 1.5.1.(c). Pendampingan psikososial korban bencana sosial. | ↑ 81,5 ribu | 20 Org | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Dinas Sosial | Sosial |

| NO | INDIKATOR TPB | TARGET (PERPRES 59/2017) | BASELINE 2024 | PROYEKSI | | | | | | OPD PENANGGUNG JAWAB | PILAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 20 | 1.5.1.(d). Jumlah daerah bencana alam/ bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) | ↑ 450 | - | 5 Kec. | 5 Kec. | 5 Kec. | 5 Kec. | 5 Kec. | 5 Kec. | Dinas Pendidikan | Sosial |
| 21 | 1.5.2.(a). Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. | Menurun | 19,68 juta rupiah | 258 Jt. Rp | 281 Jt. Rp | 301 Jt. Rp | 316 Jt. Rp | 329 Jt. Rp | 339 Jt. Rp | BPBD | Sosial |
| 22 | 1.5.3*. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. | ada | 1 Dok. KRB | 1 Dok. KRB | 1 Dok. KRB | 1 Dok. KRB | 1 Dok. KRB | 1 Dok. KRB | 1 Dok. KRB | BPBD | Sosial |
| 23 | 1.a.1*. Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan. | Meningkat | 14,7% | 25% | 27% | 28% | 29% | 29% | 29% | Dinas Sosial | Sosial |
| 24 | 1.a.2*. Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah. | Meningkat | 53% | 53% | 54% | 56% | 58% | 59% | 61% | Dinas Sosial | Sosial |
| 25 | 2.1.1*. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment). | Menurun | 3% | 3,5% | 3,4% | 3,3% | 3,2% | 3,1% | 3,0% | Distapang | Sosial |
| 26 | 2.1.1.(a). Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. | ↓ 17% | 2,35% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | Dinas Kesehatan | Sosial |
| 27 | 2.1.2*. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. | Menurun | - | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Distapang | Sosial |
| 28 | 2.1.2.(a). Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. | ↓ 8,5 % | 6,51% | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Distapang | Sosial |
| 29 | 2.2.1*. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. | Menurun | 2% | 0,14% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | Dinas Kesehatan | Sosial |
| 30 | 2.2.1.(a). Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. | ↓ 28% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | Dinas Kesehatan | Sosial |

| NO | INDIKATOR TPB | TARGET (PERPRES 59/2017) | BASELINE 2024 | PROYEKSI | | | | | | OPD PENANGGUNG JAWAB | PILAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 31 | 2.2.2*. Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. | Menurun | 4% | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | Dinas Kesehatan | Sosial |
| 32 | 2.2.2.(a). Prevalensi anemia pada ibu hamil. | ↓ 28% | 3,5% | 5% | 6% | 6% | 6% | 7% | 7% | Dinas Kesehatan | Sosial |
| 33 | 2.2.2.(b). Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. | ↑ 50% | 86% | 82% | 81% | 80% | 78% | 77% | 76% | Dinas Kesehatan | Sosial |
| 34 | 2.2.2.(c). Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. | ↑ skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun | 93,3 | 86,39 | 83 | 79,64 | 76,31 | 73 | 69,72 | Dinas Ketahanan Pangan | Sosial |
| 35 | 2.3.1*. Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja). | Meningkat | 0,026 Milyar. Rp/ Org. Thn | 0,0101 Milyar. Rp/ Org. Thn | 0,0062 Milyar. Rp/ Org. Thn | 0,0033 Milyar. Rp/ Org. Thn | 0,0015 Milyar. Rp/ Org. Thn | 0,0005 Milyar. Rp/ Org. Thn | 0,0001 Milyar. Rp/ Org. Thn | Dinas Pertanian | Sosial |
| 36 | 3.1.1*. Angka Kematian Ibu (AKI). | ↓ 306 | 1,69 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | Dinas Kesehatan | Sosial |
| 37 | 3.1.2*. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. | ↑ 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dinas Kesehatan | Sosial |
| 38 | 3.1.2.(a). Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. | ↑ 85 % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dinas Kesehatan | Sosial |
| 39 | 3.2.1*. Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. | Menurun | 1,7 | 1,19 | 1,19 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Dinas Kesehatan | Sosial |
| 40 | 3.2.2*. Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. | Menurun | 2,95 | 5,95 | 6,38 | 6,79 | 7,17 | 7,54 | 7,89 | Dinas Kesehatan | Sosial |
| 41 | 3.2.2.(a). Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. | ↓ 24 | 5,5 | 12,46 | 12,46 | 12,46 | 12,46 | 12,46 | 12,46 | Dinas Kesehatan | Sosial |

| NO | INDIKATOR TPB | TARGET (PERPRES 59/2017) | BASELINE 2024 | PROYEKSI | | | | | | OPD PENANGGUNG JAWAB | PILAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 42 | 3.2.2.(b). Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. | ↑ 95% | 100% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | Dinas Kesehatan | Sosial |
| 43 | 3.3.1.(a). Prevalensi HIV pada populasi dewasa. | ↓ <0,5% | 0,04% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | Dinas Kesehatan | Sosial |
| 44 | 3.3.2.(a). Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. | ↓ 245 | 208 | 408 | 430 | 443 | 451 | 455 | 457 | Dinas Kesehatan | Sosial |
| 45 | 3.3.3*. Kejadian Malaria per 1000 orang. | Menurun | 0,03 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | Dinas Kesehatan | Sosial |
| 46 | 3.3.3.(a). Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria. | ↑ 300 | 47 Kel. | 47 Kel. | 47 Kel. | 47 Kel. | 47 Kel. | 47 Kel. | 47 Kel. | Dinas Kesehatan | Sosial |
| 47 | 3.3.4.(a). Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B. | Meningkat | 47 Kel. | 47 Kel. | 47 Kel. | 47 Kel. | 47 Kel. | 47 Kel. | 47 Kel. | Dinas Kesehatan | Sosial |
| 48 | 3.3.5*. Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta). | Menurun | Nihil kasus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Dinas Kesehatan | Sosial |
| 49 | 3.3.5.(a). Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta. | ↑ 34 provinsi | Nihil kasus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Dinas Kesehatan | Sosial |
| 50 | 3.3.5.(b). Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis | ↑ 35. | Nihil kasus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Dinas Kesehatan | Sosial |
| 51 | 3.4.1.(a). Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun. | ↓ 5,4% | 29,65% | 28,50 % | 28,12 % | 27,74 % | 27,35 % | 26,97 % | 26,59 % | Dinas Kesehatan | Sosial |
| 52 | 3.4.1.(b). Prevalensi tekanan darah tinggi. | ↓ 24,3% | 19% | 33% | 33% | 33% | 34% | 34% | 34% | Dinas Kesehatan | Sosial |
| 53 | 3.4.1.(c). Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun. | Menurun | 15% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | Dinas Kesehatan | Sosial |
| 54 | 3.4.2*. Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri. | Menurun | NA | Nihil kasus | Nihil kasus | Nihil kasus | Nihil kasus | Nihil kasus | Nihil kasus | Dinas Kesehatan | Sosial |

| NO | INDIKATOR TPB | TARGET (PERPRES 59/2017) | BASELINE 2024 | PROYEKSI | | | | | | OPD PENANGGUNG JAWAB | PILAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 55 | 3.4.2.(a). Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa. | ↑ 280 | 47 Kel. | 47 Kel. | 47 Kel. | 47 Kel. | 47 Kel. | 47 Kel. | 47 Kel. | Dinas Kesehatan | Sosial |
| 56 | 3.5.1.(e). Prevalensi penyalahgunaan narkoba. | ↓ angka 0,02% | 0,05% | 0,09% | 0,09% | 0,10% | 0,10% | 0,11% | 0,12% | Dinas Kesehatan | Sosial |
| 57 | 3.5.2*. Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir. | Menurun | - | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Dinas Kesehatan | Sosial |
| 58 | 3.7.1*. Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. | ↑ 66% | 46% | 68% | 74% | 80% | 84% | 88% | 92% | Dinas P3AP2KB | Sosial |
| 59 | 3.7.1.(a). Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. | ↑ 65% | 46% | 68% | 74% | 80% | 84% | 88% | 92% | Dinas P3AP2KB | Sosial |
| 60 | 3.7.1.(b). Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern. | ↑ 23,5% | 5,11% | 7,16% | 7,78% | 8,34% | 8,85% | 9,31% | 9,72% | Dinas P3AP2KB | Sosial |
| 61 | 3.7.2*. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). | ↓ 38 | - | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Dinas Kesehatan | Sosial |
| 62 | 3.7.2.(a). Total Fertility Rate (TFR). | ↓ 2,28 | - | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Dinas Kesehatan | Sosial |
| 63 | 3.8.1.(a). Unmet need pelayanan kesehatan. | ↓ 9,91% | 0% (Seluruh pelayanan terpenuhi) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Dinas Kesehatan | Sosial |
| 64 | 3.8.2*. Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. | Meningkat | 98,29% | 115% | 120% | 126% | 132% | 137% | 143% | Dinas Kesehatan | Sosial |
| 65 | 3.8.2.(a). Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). | ↑ minimal 95% | 98% | 113% | 119% | 125% | 130% | 136% | 141% | Dinas Kesehatan | Sosial |

| NO | INDIKATOR TPB | TARGET (PERPRES 59/2017) | BASELINE 2024 | PROYEKSI | | | | | | OPD PENANGGUNG JAWAB | PILAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 66 | 3.9.3.(a). Proporsi kematian akibat keracunan. | Menurun | 0,00 (tidak ada korban keracunan) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dinas Kesehatan | Sosial |
| 67 | 3.a.1*. Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun. | Menurun | 29,65% | 28,50 % | 28,12 % | 27,74 % | 27,35 % | 26,97 % | 26,59 % | Dinas Kesehatan | Sosial |
| 68 | 3.b.1.(a). Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. | Meningkat | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dinas Kesehatan | Sosial |
| 69 | 3.c.1*. Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. | Meningkat | 0,96% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | Dinas Kesehatan | Sosial |
| 70 | 4.1.1*. Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika. | Meningkat | Literasi : SD = 82,5 SMP = 81,82 Numerasi : SD = 64,14 SMP = 60,84 | 109% | 111% | 112% | 114% | 115% | 116% | Dinas Pendidikan | Sosial |
| 71 | 4.1.1.(a). Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. | ↑ 84,2% | 88,37% | 121% | 135% | 148% | 158% | 167% | 175% | Dinas Pendidikan | Sosial |
| 72 | 4.1.1.(b). Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. | ↑ 81% | 81% | 111% | 124% | 135% | 145% | 153% | 160% | Dinas Pendidikan | Sosial |
| 73 | 4.1.1.(d). Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat. | ↑ 114,09% | 102,23% | 90,25 % | 85% | 79,82 % | 74,71 % | 69,70 % | 64,79 % | Dinas Pendidikan | Sosial |
| 74 | 4.1.1.(e). Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat. | ↑ 106,94% | 135,05% | 110,58% | 101,16% | 91,97 % | 83,04 % | 74,44 % | 66,21 % | Dinas Pendidikan | Sosial |
| 75 | 4.1.1.(g). Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun. | ↑ 8,8 tahun | 10,88 | 10,97 | 11,02 | 11,07 | 11,12 | 11,17 | 11,22 | Dinas Pendidikan | Sosial |
| 76 | 4.2.2.(a). Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). | ↑ 77,2% | 44,17% | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Dinas Pendidikan | Sosial |
| 77 | 4.4.1*. Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). | Meningkat | 61,74% | 27,73 % | 18,79 % | 11,63 % | 6,40% | 3,01% | 1,12% | DisKominfo | Sosial |

| NO | INDIKATOR TPB | TARGET (PERPRES 59/2017) | BASELINE 2024 | PROYEKSI | | | | | | OPD PENANGGUNG JAWAB | PILAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 78 | 4.5.1*. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi. | Meningkat | 119,55% | 133,79% | 135,54% | 137,28% | 139,02% | 140,76% | 142,50% | Dinas Pendidikan | Sosial |
| 79 | 4.6.1.(a). Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun. | ↑ 96,1% | 99,72% | 99,83% | 99,89% | 99,94% | 99,99% | 100,04% | 100,09% | Dinas Pendidikan | Sosial |
| 80 | 4.6.1.(b). Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun. | Meningkat | 100% | 99,83% | 99,89% | 99,94% | 99,99% | 100,04% | 100,09% | Dinas Pendidikan | Sosial |
| 81 | 4.a.1*. Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). | Meningkat | 85,71% | 95,86% | 99,44% | 102,99% | 106,51% | 110,00% | 113,44% | Dinas Pendidikan | Sosial |
| 82 | 4.c.1*. Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik. | Meningkat | 48% | 48% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | Dinas Pendidikan | Sosial |
| 83 | 5.1.1*. Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. | bertambah sebanyak 16 | 2 Kebijakan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Dinas P3AP2KB | Sosial |
| 84 | 5.2.1*. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. | Menurun | 0,00 Nihil kasus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dinas P3AP2KB | Sosial |
| 85 | 5.2.1.(a). Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. | ↓ kurang dari 20,48% | Nihi kasus | 0,016% | 0,011% | 0,007% | 0,005% | 0,002% | 0,001% | Dinas P3AP2KB | Sosial |
| 86 | 5.2.2*. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami | Menurun | Nihil kasus | 0,004% | 0,004% | 0,005% | 0,005% | 0,005% | 0,005% | Dinas P3AP2KB | Sosial |

| NO | INDIKATOR TPB | TARGET (PERPRES 59/2017) | BASELINE 2024 | PROYEKSI | | | | | | OPD PENANGGUNG JAWAB | PILAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. | | | | | | | | | | |
| 87 | 5.2.2.(a). Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. | ↑ 70% | Nihil kasus | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dinas P3AP2KB | Sosial |
| 88 | 5.3.1*. Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. | Menurun | - | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Dinas P3AP2KB | Sosial |
| 89 | 5.3.1.(a). Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. | ↑ 21 tahun | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | Dinas P3AP2KB | Sosial |
| 90 | 5.3.1.(b). Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). | ↓ 38 tahun | - | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Dinas P3AP2KB | Sosial |
| 91 | 5.5.1*. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. | Meningkat | 8 anggota | 10 anggota | 10 anggota | 12 anggota | 10 anggota | 10 anggota | 10 anggota | Dinas P3AP2KB | Sosial |
| 92 | 5.5.2*. Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. | Meningkat | 14% | 15% | 14% | 14% | 13% | 13% | 12% | BKPSDM | Sosial |
| 93 | 5.6.1*. Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. | Meningkat | - | - | - | - | - | - | - | Dinas PPKBP3A | Sosial |
| 94 | 5.6.1.(a). Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). | ↓ 9,9% | - | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Dinas P3AP2KB | Sosial |
| 95 | 5.6.1.(b). Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. | ↑ 85% | 5,11% | 7,16% | 7,78% | 8,34% | 8,85% | 9,31% | 9,72% | Dinas P3AP2KB | Sosial |
| 96 | 5.b.1*. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. | Meningkat | 90,71% | 96,38% | 97,37% | 98,37% | 99,37% | 100,36% | 101,36% | Diskominfo | Sosial |

| NO | INDIKATOR TPB | TARGET (PERPRES 59/2017) | BASELINE 2024 | PROYEKSI | | | | | | OPD PENANGGUNG JAWAB | PILAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 97 | 6.1.1.(a). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. | ↑ 100% | 100,00% | 99,24 % | 99,25 % | 99,26 % | 99,27 % | 99,28 % | 99,28 % | Dinas PUPR | Lingkungan |
| 98 | 6.1.1.(b). Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. | ↑ 118,6 m3/detik | 2.742 l/dtk | 2.742 l/dtk | 2.742 l/dtk | 2.742 l/dtk | 2.742 l/dtk | 2.742 l/dtk | 2.742 l/dtk | Dinas PUPR | Lingkungan |
| 99 | 6.1.1.(c). Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. | ↑ 100% | 89,26% | 104% | 105% | 106% | 108% | 109% | 111% | Dinas PUPR | Lingkungan |
| 100 | 6.2.1.(a). Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. | Meningkat | 91% | 92% | 92% | 91% | 91% | 91% | 91% | Dinas Kesehatan | Lingkungan |
| 101 | 6.2.1.(b). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. | ↑ 100% | 100% | 97% | 97% | 97% | 98% | 98% | 99% | Dinas Perkim | Lingkungan |
| 102 | 6.2.1.(c). Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). | ↑ 45.000 (skala nasional) | 47 Kel. | 47 Kel. | 47 Kel. | 47 Kel. | 47 Kel. | 47 Kel. | 47 Kel. | Dinas Perkim | Lingkungan |
| 103 | 6.2.1.(d). Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). | Meningkat | 47 Kel. | 47 Kel. | 47 Kel. | 47 Kel. | 47 Kel. | 47 Kel. | 47 Kel. | Dinas Perkim | Lingkungan |
| 104 | 6.2.1.(e). Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal. | ↑ 438 kabupaten/kota. | - | - | - | - | - | - | - | Dinas Perkim | Lingkungan |
| 105 | 6.2.1.(f). Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. | Meningkat | - | - | - | - | - | - | - | Dinas Perkim | Lingkungan |
| 106 | 6.3.1.(a). Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). | ↑ 409 kabupaten/kota | 1 IPLT | 1 IPLT | 1 IPLT | 1 IPLT | 1 IPLT | 1 IPLT | 1 IPLT | Dinas Perkim | Lingkungan |
| 107 | 6.3.1.(b). Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja. | Meningkat | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | Dinas Perkim | Lingkungan |

| NO | INDIKATOR TPB | TARGET (PERPRES 59/2017) | BASELINE 2024 | PROYEKSI | | | | | | OPD PENANGGUNG JAWAB | PILAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 108 | 6.3.2.(b). Kualitas air sungai sebagai sumber air baku. | Meningkat | 44,21 | 61,22 | 63,24 | 65,24 | 67,22 | 69,19 | 71,15 | DLH | Lingkungan |
| 109 | 6.4.1.(b). Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri. | ada | - | - | - | - | - | - | - | DLH | Lingkungan |
| 110 | 6.5.1.(a). Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). | ada | 1 RPDAST | 1 RPDAST | 1 RPDAST | 1 RPDAST | 1 RPDAST | 1 RPDAST | 1 RPDAST | Dinas PUPR | Lingkungan |
| 111 | 6.5.1.(c). Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk. | 8 WS | 2 Komunitas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Dinas PUPR | Lingkungan |
| 112 | 6.5.1.(f). Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau. | 10 WS (skala nasional) | 1 Komunitas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DLH | Lingkungan |
| 113 | 6.5.1.(g). Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air. | ada | - | - | - | - | - | - | - | DLH | Lingkungan |
| 114 | 8.1.1*. Laju pertumbuhan PDB per kapita. | Meningkat | 4,45% | 7,68% | 8,10% | 8,34% | 8,48% | 8,56% | 8,60% | Bappeda | Ekonomi |
| 115 | 8.1.1.(a). PDB per kapita. | ↑ lebih dari Rp 50 juta | 62,01 Juta Rupiah | 71,45 Juta Rupiah | 75,91 Juta Rupiah | 80,24 Juta Rupiah | 84,43 Juta Rupiah | 88,46 Juta Rupiah | 92,33 Juta Rupiah | Bappeda | Ekonomi |
| 116 | 8.2.1*. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. | Meningkat | 0,66% | 0,14 | 0,05 | 0,01 | - | - | - | Dinas Nakerperin | Ekonomi |
| 117 | 8.3.1*. Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin. | Meningkat | 59% | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Dinas Nakerperin | Ekonomi |
| 118 | 8.3.1.(a). Persentase tenaga kerja formal. | 51% | 40,83% | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Dinas Nakerperin | Ekonomi |
| 119 | 8.3.1.(b). Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian. | Meningkat | 15% | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Dinas Nakerperin | Ekonomi |

| NO | INDIKATOR TPB | TARGET (PERPRES 59/2017) | BASELINE 2024 | PROYEKSI | | | | | | OPD PENANGGUNG JAWAB | PILAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 120 | 8.3.1.(c). Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. | 25% | - | 37,65 | 41,04 | 43,77 | 45,91 | 47,56 | 48,83 | Dinas Koperasi dan UKM | Ekonomi |
| 121 | 8.5.1*. Upah rata-rata per jam pekerja. | Meningkat | 70.000 | 73.380 | 77.698 | 81.912 | 86.007 | 89.970 | 93.790 | Dinas Nakerperin | Ekonomi |
| 122 | 8.5.2*. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. | Menurun | 4,84% | 3,40% | 2,86% | 2,35% | 1,89% | 1,48% | 1,12% | Dinas Nakerperin | Ekonomi |
| 123 | 8.5.2.(a). Tingkat setengah pengangguran. | Menurun | 12,75% | 4,14% | 3,75% | 3,37% | 2,99% | 2,64% | 2,31% | Dinas Nakerperin | Ekonomi |
| 124 | 8.6.1*. Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). | Menurun | 28% | 27% | 28% | 30% | 32% | 34% | 35% | Dinas Pendidikan | Ekonomi |
| 125 | 8.9.1*. Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB. | ↑ 8% | - | - | - | - | - | - | - | Disparpora | Ekonomi |
| 126 | 8.9.1.(a). Jumlah wisatawan mancanegara. | ↑ 20 juta (skala nasional) | 22 Org. | 30 Org. | 32 Org. | 34 Org. | 38 Org. | 40 Org. | 45 Org. | Disparpora | Ekonomi |
| 127 | 8.9.1.(b). Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. | Meningkat | 38.907 Org. | 42.795 Org. | 44.083 Org. | 45.364 Org. | 46.638 Org. | 47.904 Org. | 49.159 Org. | Disparpora | Ekonomi |
| 128 | 8.9.1.(c). Jumlah devisa sektor pariwisata. | Meningkat | - | - | - | - | - | - | - | Disparpora | Ekonomi |
| 129 | 8.9.2*. Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja. | Meningkat | 0,6% | 0,58% | 0,59% | 0,59% | 0,60% | 0,61% | 0,61% | Dinas Nakerperin | Ekonomi |
| 130 | 8.10.1*. Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa | Meningkat | 17 ATM | 17 ATM | 17 ATM | 17 ATM | 17 ATM | 17 ATM | 17 ATM | Dinas Nakerperin | Ekonomi |
| 131 | 8.10.1.(a). Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum). | Menurun (mendekat) | 1 km | 1 km | 1 km | 1 km | 1 km | 1 km | 1 km | Dinas Nakerperin | Ekonomi |
| 132 | 8.10.1.(b). Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit. | Meningkat | 187,08 Milyar Rupiah | 241,98 Milyar Rupiah | 259,26 Milyar Rupiah | 275,81 Milyar Rupiah | 291,57Milyar Rupiah | 306,46 Milyar Rupiah | 320,47 Milyar Rupiah | Dinas Koperasi dan UKM | Ekonomi |

| NO | INDIKATOR TPB | TARGET (PERPRES 59/2017) | BASELINE 2024 | PROYEKSI | | | | | | OPD PENANGGUNG JAWAB | PILAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 133 | 9.2.1*. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita. | Meningkat | 8,98% | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | Bappeda | Ekonomi |
| 134 | 9.2.1.(a). Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur. | Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB | -0,07% | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Dinas Nakerperin | Ekonomi |
| 135 | 9.2.2*. Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur. | Meningkat | 10% | 8,86% | 8,73% | 8,60% | 8,47% | 8,35% | 8,22% | Dinas Nakerperin | Ekonomi |
| 136 | 9.3.1*. Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri. | Meningkat | 25% | 15% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | Dinas Nakerperin | Ekonomi |
| 137 | 9.3.2*. Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit. | Meningkat | - | - | - | - | - | - | - | Dinas Nakerperin | Ekonomi |
| 138 | 9.5.1*. Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB. | Meningkat | 160.000.000 | 210.740.210 | 210.762.358 | 210.764.138 | 210.764.281 | 210.764.293 | 210.764.294 | Bappeda | Ekonomi |
| 139 | 9.c.1*. Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband. | Meningkat | 74,51% | 72,94% | 72,42% | 71,89% | 71,37% | 70,85% | 70,33% | Diskominfo | Ekonomi |
| 140 | 9.c.1.(a). Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam | Meningkat | 91% | 96% | 97% | 98% | 99% | 100% | 101% | Diskominfo | Ekonomi |
| 141 | 9.c.1.(b). Proporsi individu yang menggunakan internet | Meningkat | 77,40% | 98% | 105% | 112% | 119% | 125% | 131% | Diskominfo | Ekonomi |
| 142 | 10.1.1*. Koefisien Gini. | ↓ 0,36 | 0,316 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | Bappeda | Ekonomi |
| 143 | 10.1.1.(a). Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | ↓ 7-8% | 5,44% | 6% | 6% | 6% | 7% | 7% | 7% | Bappeda | Ekonomi |
| 144 | 10.2.1*. Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50%dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas. | Menurun | 1095 orang (L=595, P=500) | 1.597 orang | 1.740 orang | 1.868 orang | 1.981 orang | 2.079 orang | 2.164 orang | Dinas Sosial | Ekonomi |
| 145 | 10.3.1.(a). Indeks Kebebasan Sipil. | Meningkat menjadi 87 | 72,15 | 68,05 | 66,68 | 65,32 | 63,96 | 62,60 | 61,25 | Kesbangpol | Ekonomi |

| NO | INDIKATOR TPB | TARGET (PERPRES 59/2017) | BASELINE 2024 | PROYEKSI | | | | | | OPD PENANGGUNG JAWAB | PILAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 146 | 10.3.1.(d). Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. | ada | 0,00 (Tidak ada kebijakan diskriminatif) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Bagian Hukum | Ekonomi |
| 147 | 10.4.1.(b). Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. | ↑ TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta | 79% | 84% | 86% | 88% | 89% | 91% | 93% | Dinas Nakerperin | Ekonomi |
| 148 | 11.1.1.(a). Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. | 3,7 juta rumah tangga | 81,33% | 77% | 76% | 75% | 74% | 73% | 72% | Dinas Perkim | Lingkungan |
| 149 | 11.2.1.(a). Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan. | ↑ 32% | < 50 | - | - | - | - | - | - | Dinas Perhubungan | Lingkungan |
| 150 | 11.3.2.(a). Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan. | Meningkat | 74 Institusi | 77 Institusi | 79 Institusi | 80 Institusi | 81 Institusi | 82 Institusi | 83 Institusi | Bappeda | Lingkungan |
| 151 | 11.3.2.(b). Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur. | Ada | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 1 Lembaga | Dinas PUPR | Lingkungan |
| 152 | 11.4.1.(a). Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil. | ada | 42 Objek | 42 Objek | 42 Objek | 42 Objek | 42 Objek | 42 Objek | 42 Objek | Disparpora | Lingkungan |
| 153 | 11.5.1*. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Menurun | 0,00 (tidak ada korban) | 0,00 | | | | | | BPBD | Lingkungan |
| 154 | 11.5.1.(a). Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). | ↓ 30% | 104.80 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | BPBD | Lingkungan |
| 155 | 11.5.1.(b). Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk. | Meningkat | - | - | - | - | - | - | - | BPBD | Lingkungan |
| 156 | 11.5.1.(c). Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. | ada | - | - | - | - | - | - | - | BPBD | Lingkungan |

| NO | INDIKATOR TPB | TARGET (PERPRES 59/2017) | BASELINE 2024 | PROYEKSI | | | | | | OPD PENANGGUNG JAWAB | PILAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 157 | 11.5.2.(a). Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. | Menurun | 19,68 juta rupiah | 258 juta rupiah | 281 juta rupiah | 301 juta rupiah | 316 juta rupiah | 329 juta rupiah | 339 juta rupiah | BPBD | Lingkungan |
| 158 | 11.6.1.(a). Persentase sampah perkotaan yang tertangani. | ↑ 80% | 95,88% | 108,49% | 111,45% | 114,39% | 117,33% | 120,24% | 123,14% | DLH | Lingkungan |
| 159 | 11.7.1.(a). Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang. | Meningkat/ada | 5 Kecamatan | 5 Kec. | 5 Kec. | 5 Kec. | 5 Kec. | 5 Kec. | 5 Kec. | DPKP | Lingkungan |
| 160 | 11.b.1*. Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana. | Meningkat/ada | 1 Dok. KRB | 1 Dok. KRB | 1 Dok. KRB | 1 Dok. KRB | 1 Dok. KRB | 1 Dok. KRB | 1 Dok. KRB | BPBD | Lingkungan |
| 161 | 11.b.2*. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. | ada | 1 Dok. KRB | 1 Dok. KRB | 1 Dok. KRB | 1 Dok. KRB | 1 Dok. KRB | 1 Dok. KRB | 1 Dok. KRB | BPBD | Lingkungan |
| 162 | 12.4.2.(a). Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). | ↑150 juta ton (skala nasional) | 45,31 Ton | 75,85 Ton | 77,90 Ton | 78,78 Ton | 79,15 Ton | 79,31 Ton | 79,38 Ton | DLH | Lingkungan |
| 163 | 12.5.1.(a). Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. | 20 ton per hari (skala nasional) | 5.400,73 ton/tahun | 5.983,80 ton/tahun | 6.167,90 ton/tahun | 6.351,05 ton/tahun | 6.533,07 ton/tahun | 6.713,78 ton/tahun | 6.893,03 ton/tahun | DLH | Lingkungan |
| 164 | 12.6.1.(a). Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. | Meningkat | 0,00 (tidak ada perusahaan besar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DLH | Lingkungan |
| 165 | 12.7.1.(a). Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister. | Meningkat | - | - | - | - | - | - | - | DLH | Lingkungan |
| 166 | 12.8.1.(a). Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister. | Meningkat | - | - | - | - | - | - | - | Dinas Perkim | Lingkungan |

| NO | INDIKATOR TPB | TARGET (PERPRES 59/2017) | BASELINE 2024 | PROYEKSI | | | | | | OPD PENANGGUNG JAWAB | PILAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 167 | 13.1.1*. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. | ada | 1 Dok. KRB | 1 Dok. KRB | 1 Dok. KRB | 1 Dok. KRB | 1 Dok. KRB | 1 Dok. KRB | 1 Dok. KRB | BPBD | Lingkungan |
| 168 | 13.1.2*. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Menurun | 0,00 (tidak ada korban) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BPBD | Lingkungan |
| 169 | 15.1.1.(a) . Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. | Meningkat | 8,50% | 10% | 10% | 11% | 11% | 11% | 12% | DLH | Lingkungan |
| 170 | 15.3.1.(a) . Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. | 5,5 juta ha (skala nasional) | - | - | - | - | - | - | - | DLH | Lingkungan |
| 171 | 15.6.1* . Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata. | ada | - | - | - | - | - | - | - | DLH | Lingkungan |
| 172 | 15.9.1.(a). Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati. | Meningkat | - | - | - | - | - | - | - | DLH | Lingkungan |
| 173 | 16.1.1.(a). Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. | Menurun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kesbangpol | Hukum & tata kelola |
| 174 | 16.1.2.(a). Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk. | Menurun | 0,00 (tidak ada korban) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kesbangpol | Hukum & tata kelola |
| 175 | 16.1.3.(a). Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. | Menurun | 62 Org | 71 Org | 42 Org | 21 Org | 9 Org | 3 Org | 1 Org | Kesbangpol | Hukum & tata kelola |
| 176 | 16.1.4*. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. | Meningkat | - | - | - | - | - | - | - | Kesbangpol | Hukum & tata kelola |
| 177 | 16.2.1.(a). Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik da-tau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. | Menurun | - | 12,49 | 10,49 | 8,62 | 6,91 | 5,39 | 4,08 | Dinas P3AP2KB | Hukum & tata kelola |
| 178 | 16.2.1.(b). Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. | Menurun | - | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | Dinas P3AP2KB | Hukum & tata kelola |

| NO | INDIKATOR TPB | TARGET (PERPRES 59/2017) | BASELINE 2024 | PROYEKSI | | | | | | OPD PENANGGUNG JAWAB | PILAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 179 | 16.2.3.(a). Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. | Menurun | - | Nihil Kasus | Nihil Kasus | Nihil Kasus | Nihil Kasus | Nihil Kasus | Nihil Kasus | Dinas P3AP2KB | Hukum & tata kelola |
| 180 | 16.5.1.(a). Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). | Meningkat menjadi 4,0 | - | 4,07 | 4,11 | 4,16 | 4,21 | 4,25 | 4,3 | Inspektorat | Hukum & tata kelola |
| 181 | 16.6.1*. Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. | Meningkat | 91% | 54% | 56% | 58% | 60% | 62% | 64% | BKD | Hukum & tata kelola |
| 182 | 16.6.1.(a). Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota). | ↑ Kementerian/ Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | BKD | Hukum & tata kelola |
| 183 | 16.6.1.(b). Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota). | ↑ Kementerian/ Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/ Kota: 50% | BB (75,25) | BB | BB | BB | BB | BB | BB | Bagian Organisasi | Hukum & tata kelola |
| 184 | 16.6.1.(c). Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan. | ↑ 80% | 30,62% | 53,96 % | 58,07 % | 60,92 % | 62,85 % | 64,14 % | 64,99 % | BagianPBJ Setdako | Hukum & tata kelola |
| 185 | 16.6.1.(d). Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota). | ↑Kementerian/ Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/ Kota: 45% | BB (77,27) | B | B | B | B | B | B | Bagian Organisasi | Hukum & tata kelola |
| 186 | 16.6.2.(a). Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota). | ↑ Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/ Kota: 80% | sangat Baik (4,41) (A) | A | A | A | A | A | A | Bagian Organisasi | Hukum & tata kelola |

| NO | INDIKATOR TPB | TARGET (PERPRES 59/2017) | BASELINE 2024 | PROYEKSI | | | | | | OPD PENANGGUNG JAWAB | PILAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 187 | 16.7.1.(a). Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). | Meningkat | 8 | 9,78% | 10,35 % | 10,92 % | 11,46 % | 11,99 % | 12,50 % | Dinas P3AP2KB | Hukum & tata kelola |
| 188 | 16.7.1.(b). Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). | Meningkat | 14% | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | Dinas P3AP2KB | Hukum & tata kelola |
| 189 | 16.9.1*. Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. | Meningkat | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Disdukcapil | Hukum & tata kelola |
| 190 | 16.9.1.(a). Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah. | ↑ 77,4% | 96,9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Disdukcapil | Hukum & tata kelola |
| 191 | 16.9.1.(b). Persentase anak yang memiliki akta kelahiran. | ↑ 85% | 99% | 1,03 | 1,05 | 1,07 | 1,08 | 1,1 | 1,11 | Disdukcapil | Hukum & tata kelola |
| 192 | 16.10.2.(c). Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. | Meningkat | - | - | - | - | - | - | - | Diskominfo | Hukum & tata kelola |
| 193 | 16.b.1.(a). Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. | ada | - | ** | ** | ** | ** | ** | ** | Bagian Hukum | Hukum & tata kelola |
| 194 | 17.1.1*. Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. | Meningkat | 13,1% | 0,173 135781 | 0,182 3612 | 0,191 414923 | 0,200 269465 | 0,208 90125 | 0,217 290487 | BKD | Ekonomi |
| 195 | 17.1.1.(a). Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. | Di atas 12% | 3% | 0,035 982261 | 0,038 874512 | 0,041 586538 | 0,044 104581 | 0,046 42238 | 0,048 539769 | BKD | Ekonomi |
| 196 | 17.1.2*. Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. | Meningkat | - | 0,035 982261 | 0,038 874512 | 0,041 586538 | 0,044 104581 | 0,046 42238 | 0,048 539769 | BKD | Ekonomi |

| NO | INDIKATOR TPB | TARGET (PERPRES 59/2017) | BASELINE 2024 | PROYEKSI | | | | | | OPD PENANGGUNG JAWAB | PILAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 197 | 17.6.2.(b). Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan. | ↑ Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi | 8.671 (PELANGGAN INDIHOME) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Diskominfo | Ekonomi |
| 198 | 17.6.2.(c). Proporsi penduduk terlayani mobile broadband | ↑ Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi. | 89,34% | 114,75% | 122,78% | 130,49% | 137,85% | 144,83% | 151,42% | Diskominfo | Ekonomi |
| 199 | 17.8.1*. Proporsi individu yang menggunakan internet. | Meningkat | 77,4% | 98,22% | 105,4% | 112,26% | 118,76% | 124,89% | 130,62% | Diskominfo | Ekonomi |
| 200 | 17.17.1.(a). Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). | ada | - | - | - | - | - | - | - | Bappeda | Ekonomi |
| 201 | 17.17.1.(b). Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). | ada | - | - | - | - | - | - | - | Bagian PBJ Setdako | Ekonomi |
| 202 | 17.18.1.(a). Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik. | Meningkat | 88,6% | 101,21% | 105,06% | 108,88% | 112,67% | 116,41% | 120,1% | BPS | Ekonomi |
| 203 | 17.18.1.(b). Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama. | Meningkat | tidak tersedia hasil survei BPS | 89,24% | 89,81% | 90,39% | 90,97% | 91,55% | 92,13% | BPS | Ekonomi |
| 204 | 17.18.1.(c). Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa). | Meningkat | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | BPS | Ekonomi |
| 205 | 17.18.1.(d). Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target. | Meningkat | - | - | - | - | - | - | - | Bappeda | Ekonomi |

| NO | INDIKATOR TPB | TARGET (PERPRES 59/2017) | BASELINE 2024 | PROYEKSI | | | | | | OPD PENANGGUNG JAWAB | PILAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 206 | 17.19.2.(b). Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) | Ada | ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Disdukcapil | Ekonomi |
| 207 | 17.19.2.(c). Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website. | Meningkat | 24.642 Org | 26.373 Org | 28.748 Org | 30.862 Org | 32.718 Org | 34.327 Org | 35.706 Org | BPS | Ekonomi |
| 208 | 17.19.2.(d). Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS). | Meningkat | 96,67% | 99,86% | 102,92% | 105,97% | 108,99% | 112% | 114,98% | BPS | Ekonomi |

**Sumber:** KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

Catatan:

↑: Meningkat menjadi

↓: Menurun menjadi

**: Tidak ada kebijakan diskriminatif

***: Tidak dapat diproyeksikan

# 2. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

## A. REALISASI KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020-2024

### 1). KINERJA PELAKSANAAN APBD

Kinerja keuangan daerah berkaitan erat dengan dua aspek utama yaitu aspek kinerja pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) serta aspek kondisi neraca daerah. Dalam pembangunan suatu daerah, penyusunan APBD bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya daerah yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah daerah dan mempersiapkan kondisi bagi pengelolaan anggaran secara baik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBD antara lain penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning), dengan penganggaran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam melihat kinerja keuangan daerah pada periode sebelumnya, dapat dilihat dari kemampuan keuangan daerah yang ditunjukkan oleh derajat desentralisasi fiskal. Derajat desentralisasi fiskal merupakan perbandingan antara kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Daerah, dan digunakan untuk melihat persentase kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah sehingga dapat diketahui kemampuan daerah dalam kemandirian keuangan. Perkembangan derajat desentralisasi fiskal dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.82** Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

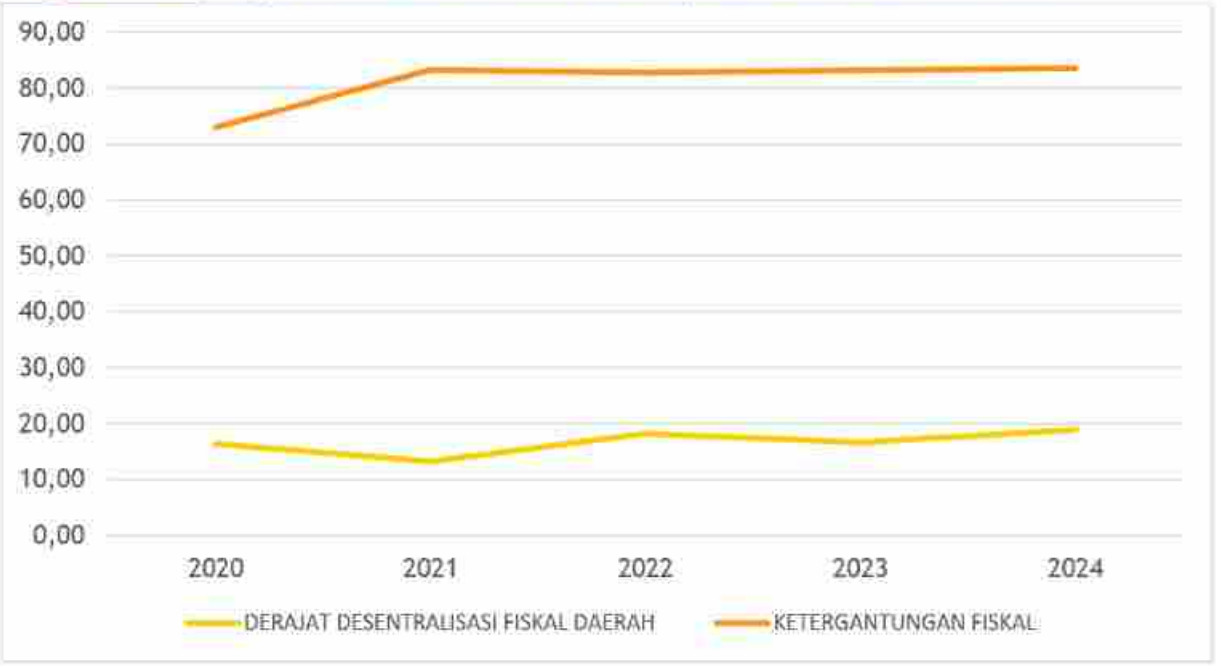
| TAHUN | TOTAL PENDAPATAN DAERAH | PENDAPATAN ASLI DAERAH | DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DAERAH | TRANSFER PUSAT | KETERGANTUNGAN FISKAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2*100 | 5 | 6 = 5/2*100 |
| 2020 | 717.701.105.678 | 115.996.425.752 | 16,16 | 583.260.279.926 | 81,27 |
| 2021 | 677.296.933.413 | 90.291.310.165 | 13,33 | 568.343.603.248 | 83,91 |
| 2022 | 704.772.804.629 | 126.962.402.643 | 18,01 | 576.910.401.986 | 81,86 |
| 2023 | 741.409.901.903 | 123.216.492.558 | 16,62 | 616.393.409.345 | 83,14 |
| 2024 | 753.320.524.913 | 138.649.853.624 | 18,41 | 613.134.671.289 | 81,39 |

**Sumber:** Badan Keuangan Daerah, 2025

Berdasarkan data di atas dapat terlihat capaian derajat desentralisasi fiskal yang mengalami perkembangan yang masih belum baik karena Derajat Desentralisasi Fiskal pada tahun 2020-2024 yang mencapai 18%. Derajat desentralisasi fiskal ini tidak diimbangi dengan penurunan ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (dana perimbangan). Dalam lima tahun terakhir, kemampuan fiskal daerah belum mampu menunjukkan capaian derajat desentralisasi fiskal yang lebih tinggi dari proporsi dana perimbangan terhadap total pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Payakumbuh belum mampu mengurangi ketergantungan fiskal terhadap

pemerintah pusat dalam pembangunan daerah. Dilihat dari kapasitas fiskal daerah, pada tahun 2019 Kota Payakumbuh memiliki nilai indeks kapasitas fiskal daerah yang termasuk dalam kategori sangat rendah. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2020).

**Diagram 2.48** Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024




**Sumber:** Badan Keuangan Daerah, 2025

## A). PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan daerah yang dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan terukur secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan daerah meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar minyak, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk memobilitasi Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan daerah lainnya. Pertumbuhan

komponen pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD nanti. Sedangkan untuk pendapatan transfer, komponen bagi hasil pajak serta komponen bagi hasil bukan pajak dan bantuan keuangan provinsi adalah dua unsur yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan dana perimbangan yang akan diperoleh nantinya. Untuk mencapai target APBD, Pemerintah Kota Payakumbuh perlu menggali sumber-sumber pendapatan daerah, antara lain mengintensifkan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan meningkatkan hasil kekayaan daerah serta sumber-sumber penghasilan lainnya yang tidak memberatkan masyarakat dan mengganggu jalannya proses produksi di wilayah Kota Payakumbuh.

Beberapa kebijakan pendapatan daerah dirumuskan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian target dan nomenklatur pendapatan asli daerah berdasarkan kondisi perekonomian daerah dan aturan yang berlaku.
2. Penyesuaian pendapatan transfer berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dari kerangka APBD yang tersaji pada tabel 2.83 tergambar bahwa sumber pendapatan daerah Kota Payakumbuh terbesar masih bersumber dari pendapatan transfer pusat maupun transfer daerah. Artinya tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat masih tinggi. Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan pendapatan daerah Kota Payakumbuh merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

**Tabel 2.83** Realisasi APBD Tahun 2020-2024

| NO | URAIAN | REALISASI TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | PENDAPATAN | | | | | |
| | a. Pendapatan asli daerah | 115.996.425.752,00 | 90.291.310.165,00 | 126.962.402.643,00 | 123.216.492.558,01 | 138.649.853.624,00 |
| | b. Pendapatan transfer | 583.260.279.926,00 | 568.343.603.248,00 | 576.910.401.986,00 | 616.393.409.345,00 | 613.134.671.289,00 |
| | c. Lain- lain pendapatan daerah yang sah | 18.444.400.000,00 | 18.660.770.000,00 | 900.000.000,00 | 1.800.000.000,00 | 1.536.000.000,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 717.701.105.678,00 | 677.295.683.413,00 | 704.772.804.629,00 | 741.409.901.903,01 | 753.320.524.913,00 |
| 2 | BELANJA | | | | | |
| | a. Belanja operasi | 561.638.767.318,00 | 567.600.948.466,00 | 577.363.467.901,00 | 649.290.098.516,00 | 668.220.386.847,00 |
| | b. Belanja modal | 119.993.262.139,00 | 110.125.661.671,00 | 118.552.496.274,00 | 83.816.101.803,00 | 73.985.819.648,00 |
| | c. Belanja tidak terduga | 20.627.001.075,00 | - | - | 208.190.400,00 | 518.850.784,00 |
| | d. Belanja transfer | 651.312.613,00 | - | - | - | - |
| | JUMLAH BELANJA | 702.910.343.145,00 | 677.726.610.137,00 | 695.915.964.175,00 | 733.314.390.719,00 | 742.725.057.279,00 |
| | SURPLUS/DEFISIT | 14.790.762.533,00 | (430.926.724,00) | 8.856.840.454,00 | 8.095.511.184,01 | 10.595.467.634,00 |
| 3 | PEMBIAYAAN | 59.945.152.495,00 | 74.735.915.027,00 | 68.166.238.303,00 | 77.023.078.757,00 | 77.618.589.941,00 |
| | a. Penerimaan pembiayaan | 59.945.152.495,00 | 74.735.915.027,00 | 74.306.238.303,00 | 77.023.078.757,00 | 85.118.589.941,00 |
| | b. Pengeluaran pembiayaan | - | - | 6.140.000.000,00 | - | 7.500.000.000,00 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 59.945.152.495,00 | 74.735.915.027,00 | 68.166.238.303,00 | 77.023.078.757,00 | 77.618.589.941,00 |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | 74.735.915.028 | 74.304.988.303,00 | 77.023.078.757,00 | 85.118.589.941,00 | 88.214.057.575,00 |

Dalam 5 tahun ke belakang terlihat pendapatan daerah mengalami fluktuatif baik pada komponen PAD maupun pendapatan transfer. Khusus untuk PAD, pasca covid-19 memperlihatkan geliat ekonomi yang semakin membaik dengan meningkat secara signifikan setiap tahunnya. PAD menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah, semakin tinggi persentasenya terhadap total pendapatan daerah maka daerah tersebut akan semakin mandiri dalam membiayai pembangunan. Secara umum pendapatan daerah masih di dominasi dari pendapatan transfer yang mencapai rata-rata 80% namun tidak dipungkiri walau dengan potensi PAD yang tidak besar namun apabila dikelola dengan baik maka akan memberikan dampak yang sangat signifikan untuk Kota Payakumbuh kedepannya.

**Tabel 2.84** Tingkat Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019-2024

| NO | TAHUN | TARGET | REALISASI | % | TINGKAT PERTUMBUHAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 818.001.019.824 | 796.837.014.305 | 97,41 | - |
| 2 | 2020 | 708.900.288.188 | 717.701.105.678 | 101,24 | -9,93 |
| 3 | 2021 | 682.401.082.138 | 677.296.933.413 | 99,25 | -5,63 |
| 4 | 2022 | 696.617.590.928 | 704.772.804.629 | 101,17 | 4,06 |
| 5 | 2023 | 740.546.410.861 | 741.409.901.903 | 100,12 | 5,20 |
| 6 | 2024 | 733.573.159.828 | 751.416.445.263 | 102,43 | 1,34 |
| **RATA- RATA** | | **730.006.591.961** | **731.572.367.532** | **100,27** | |

**Sumber:** Badan Keuangan Daerah, Data Diolah Tahun 2025

Pendapatan daerah Kota Payakumbuh menunjukkan perkembangan yang fluktuatif namun memiliki kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan selama lima tahun terakhir sebesar 100,27%. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2024 yang mencapai 102,43% dan terendah pada tahun 2019 dengan tingkat persentase realisasi sebesar 97,41%

## (1). PENDAPATAN ASLI DAERAH

Dilihat dari perkembangan penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Payakumbuh dalam lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 108,72%. Dari kontribusi penerimaan PAD terhadap total pendapatan daerah juga cenderung menunjukkan peningkatan dari 16,16% pada tahun 2020 menjadi 18,40% pada tahun 2024. Hal ini juga menunjukkan adanya penurunan ketergantungan Pemerintah Kota Payakumbuh terhadap Pendapatan Transfer.

**Tabel 2.85** Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020-2024

| TAHUN | TARGET | REALISASI | % | SELISIH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2*100 | 5 = 3 – 2 |
| **2020** | 98.325.518.029 | 115.996.425.752 | 117,97 | 17.670.907.723 |
| **2021** | 93.427.968.867 | 90.291.310.165 | 96,64 | (3.136.658.702) |
| **2022** | 108.913.694.154 | 126.962.402.643 | 116,57 | 18.048.708.489 |

| TAHUN | TARGET | REALISASI | % | SELISIH |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 116.297.319.145 | 123.216.492.558 | 105,95 | 6.919.173.413 |
| 2024 | 130.174.080.614 | 138.649.853.624 | 106,51 | 8.475.773.010 |
| RATA-RATA | | | 108,72 | |

**Sumber:** Badan Keuangan Daerah, 2025

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh adalah pajak. Pajak merupakan komponen yang memberikan sumbangan atau kontribusi dan sekaligus memberi gambaran akan pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh. Pada tahun 2024, pajak daerah memiliki kontribusi rata sebesar 14,71% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh turun bila dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 17,09%. Tentunya ini akan menjadi perhatian pemerintah daerah agar pajak daerah dapat dioptimalkan di tahun-tahun yang akan datang.

**Tabel 2.86** Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020-2024

| TAHUN | TOTAL REALISASI PAD | PAJAK | RETRIBUSI | HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN | LAIN-LAIN PAD YANG SAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 115.996.425.752 | 17.067.518.363 | 4.364.204.571 | 7.049.367.383 | 87.515.335.435 |
| 2021 | 90.291.310.165 | 20.359.631.895 | 5.448.725.559 | 7.693.095.695 | 56.789.857.016 |
| 2022 | 126.962.402.643 | 22.033.326.343 | 5.833.854.340 | 9.493.460.178 | 89.601.761.782 |
| 2023 | 123.216.492.558 | 23.089.810.971 | 6.247.762.192 | 11.226.634.662 | 82.652.284.733 |
| 2024 | 138.649.853.624 | 23.691.080.250 | 93.272.708.497 | 12.381.453.735 | 9.304.611.142 |

**Sumber:** Badan Keuangan Daerah, 2025

## (2). PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan transfer adalah pendapatan yang diperoleh dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Komponen transfer pemerintah pusat terdiri dari dana perimbangan (dana transfer umum dan dana transfer khusus), dana insentif fiskal, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa. Sedangkan transfer antar pemerintah daerah meliputi pendapatan bagi hasil daerah dan bantuan keuangan. Perkembangan realisasi pendapatan transfer Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel 2.87

**Tabel 2.87** Perkembangan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2020-2024

| TAHUN | TARGET | REALISASI | % | SELISIH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2*100 | 5 = 3 - 2 |
| 2020 | 527.550.498.349 | 517.671.060.783 | 98,13 | (9.879.437.566) |
| 2021 | 570.136.213.271 | 568.343.603.248 | 99,69 | (1.792.610.023) |
| 2022 | 586.803.896.774 | 576.910.401.986 | 98,31 | (9.893.494.788) |
| 2023 | 622.449.091.716 | 616.393.409.345 | 99,03 | (6.055.682.371) |
| 2024 | 601.863.079.214 | 613.134.671.289 | 101,87 | 11.271.592.075 |
| RATA-RATA | | | 99,41 | |

**Sumber:** Badan Keuangan Daerah, 2025

Dalam kurun waktu 2020-2024 realisasi pendapatan transfer Kota Payakumbuh yang melebihi target (anggaran) hanya di tahun 2024, dengan persentase sebesar 101,87 %. Sementara itu di tahun 2021-2022 terjadi penurunan realisasi pendapatan transfer dengan persentase terendah 98,13% di tahun 2020. Sub komponen yang memiliki proporsi atau kontribusi terbesar dalam pendapatan transfer Kota Payakumbuh adalah dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Besaran dana perimbangan yang diterima daerah ditentukan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya dengan memperhitungkan potensi objek pendapatan yang belum tergali.

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Transfer Khusus yang meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik. Dana Alokasi Umum merupakan pendapatan yang memberikan kontribusi terbesar dalam Dana Perimbangan. Dilihat dari perkembangan masing-masing komponen, penerimaan Dana Bagi Hasil Kota Payakumbuh menunjukkan perkembangan yang cenderung menurun. Realisasi Dana Bagi Hasil Kota Payakumbuh kurun waktu 2020-2024 secara rata-rata mencapai 121,17 % dan tahun 2023 merupakan realisasi terbesar mencapai 140,27%.

**Tabel 2.88** Perkembangan Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun 2020-2024

| TAHUN | TARGET | REALISASI | % | SELISIH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2*100 | 5 = 3 - 2 |
| **2020** | 12.977.414.936 | 10.688.396.768 | 82,36 | (2.289.018.168) |
| **2021** | 11.405.453.009 | 15.781.773.652 | 138,37 | 4.376.320.643 |
| **2022** | 13.005.930.000 | 16.024.100.564 | 123,21 | 3.018.170.564 |
| **2023** | 8.587.247.000 | 12.045.037.426 | 140,27 | 3.457.790.426 |
| **2024** | 9.285.130.000 | 11.296.067.000 | 121,66 | 2.010.937.000 |
| **RATA-RATA** | | | 121,17 | |

**Sumber:** Badan Keuangan Daerah, 2025

Komponen Dana Transfer Umum selain Dana Bagi Hasil adalah Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Realisasi Dana Alokasi Umum pada tahun 2020-2024 selalu 100% terhadap rencana anggaran di APBD (Anggaran Perubahan). Komponen Dana Perimbangan selanjutnya adalah Dana Alokasi Khusus. Dana Transfer Khusus atau Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah. Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, realisasi Dana Alokasi Khusus Kota Payakumbuh secara rata-rata adalah sebesar 90,61%.

### (3). LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Selain Pendapatan asli daerah dan Pendapatan Transfer Pemerintah baik Pusat maupun Antar-Daerah, komponen lain dalam pendapatan daerah adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Adapun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Hibah, Dana Darurat serta Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. dalam kurun 5 tahun terakhir penerimaan lain-lain pendapatan daerah ini mengalami penurunan baik akibat perubahan nomenklatur kebijakan maupun besaran yang mengalami penurunan. Secara rata-rata realisasi item pendapatan ini mencapai 100,06% seperti terlihat pada tabel 2.89 berikut ini.

**Tabel 2.89** Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020-2024

| TAHUN | TARGET | REALISASI | % | SELISIH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2*100 | 5 = 3 - 2 |
| **2020** | 83.024.271.810 | 84.033.619.143 | 101,22 | 1.009.347.333 |
| **2021** | 18.836.900.000 | 18.662.020.000 | 99,07 | (174.880.000) |
| **2022** | 900.000.000 | 900.000.000 | 100,00 | 0 |
| **2023** | 1.800.000.000 | 1.800.000.000 | 100,00 | 0 |
| **2024** | 1.536.000.000 | 1.536.000.000 | 100,00 | 0 |
| **RATA-RATA** | | | 100,06 | |

**Sumber:** Badan Keuangan Daerah, 2025

## B). BELANJA DAERAH

Belanja daerah merupakan seluruh kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah meliputi seluruh pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdapat perbedaan pada struktur belanja yang terletak pada klasifikasi belanja daerah. Klasifikasi belanja daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer.

Berbanding lurus dengan kondisi realisasi belanja daerah, dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir, belanja daerah juga meningkat seiring dengan perkembangan kenaikan pendapatan daerah. belanja operasi masih menjadi belanja terbesar terdiri dari belanja pegawai, barang jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Sementara untuk belanja modal cenderung mengalami penurunan realisasi anggaran. Tentunya kebijakan daerah yang efektif dalam meningkatkan persentase belanja modal terutama untuk pemenuhan minimal 40% belanja infrastruktur publik di tahun 2027. Termasuk juga pemenuhan belanja yang bersifat mandatory yang sampai tahun 2025 ini masih belum bisa dipenuhi seperti belanja pegawai maksimal

30%, Belanja fungsi pengawasan 1% diluar gaji dan belanja pemenuhan Standar Pelayanan Minimal lainnya.

Realisasi belanja daerah menunjukkan keterkaitan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan dengan habisnya anggaran belanja yang telah direncanakan pada APBD, namun masih adanya sisa anggaran belanja juga bisa menunjukkan efisiensi anggaran belanja apabila disertai terlaksananya fisik program/kegiatan 100%. Realisasi belanja daerah Kota Payakumbuh dalam 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Realisasi Kota Payakumbuh dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.90 berikut.

**Tabel 2.90** Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020-2024

| NO | URAIAN | REALISASI TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| A | Belanja operasi | 561.638.767.318,00 | 567.600.948.466,00 | 577.363.467.901,00 | 649.290.098.516,00 | 668.220.386.847,00 |
| | 1. Belanja Pegawai | 327.343.870.286,00 | 320.454.438.227,00 | 328.320.458.462,00 | 341.982.146.872,00 | 376.394.619.531,00 |
| | 2. Belanja Barang Jasa | 223.584.002.596,00 | 241.510.699.923,00 | 235.849.841.467,00 | 274.100.551.170,00 | 261.363.190.982,00 |
| | 3. Belanja Hibah | 6.803.494.436,00 | 5.635.810.316,00 | 11.869.567.972,00 | 28.555.400.474,00 | 27.373.461.334,00 |
| | 4. Belanja Bantuan Sosial | 3.907.400.000,00 | 0,00 | 1.323.600.000,00 | 4.652.000.000,00 | 3.089.115.000,00 |
| B | Belanja modal | 119.993.262.139,00 | 110.125.661.671,00 | 118.552.496.274,00 | 83.816.101.803,00 | 73.985.819.648,00 |
| | 1. Belanja Modal Tanah | 18.545.467.060,00 | 19.565.837.794,00 | 22.029.941.027,00 | 3.281.712.722,00 | 834.832.535,00 |
| | 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 32.702.444.149,00 | 20.835.763.861,00 | 19.429.430.097,00 | 25.428.835.045,00 | 21.973.427.518,00 |
| | 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 30.221.849.722,00 | 26.121.702.952,00 | 19.802.166.485,00 | 19.738.743.460,00 | 17.929.842.688,00 |
| | 4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 37.593.649.369 | 42.586.365.655,00 | 55.351.575.875,00 | 33.067.838.045,00 | 30.784.644.322,00 |
| | 5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 929.851.839,00 | 1.015.991.409,00 | 1.939.382.790,00 | 2.298.972.531,00 | 2.459.672.585,00 |
| | 6. Belanja Modal Aset lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.400.000,00 |
| C | Belanja tak terduga | 20.627.001.075,00 | 0 | 0 | 208.190.400,00 | 518.850.784,00 |
| D | Belanja transfer | 651.312.613,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **JUMLAH BELANJA** | **702.910.343.145,00** | **677.726.610.137,00** | **695.915.964.175,00** | **733.314.390.719,00** | **742.725.057.279,00** |

Perkembangan pendapatan dan belanja daerah Kota Payakumbuh dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Selama kurun waktu 5 tahun selalu memperlihatkan bahwa

belanja daerah lebih besar dari pada pendapatan sehingga menyebabkan kondisi defisit dalam anggaran daerah Kota Payakumbuh. Kondisi surplus dan defisit yang terjadi dalam kurun tahun 2020-2024 berpengaruh terhadap pembiayaan daerah di Kota Payakumbuh yang juga mengalami kondisi fluktuatif selama lima tahun terakhir.

## C). PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah Kota Payakumbuh merupakan selisih dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Dari tahun 2020-2024, penerimaan pembiayaan di Kota Payakumbuh berasal dari beberapa komponen, yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA); Penerimaan Pinjaman Daerah; dan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah. Sedangkan komponen pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo; Penyertaan Modal Daerah; dan Pemberian Pinjaman Daerah. Adapun realisasi pembiayaan daerah Kota Payakumbuh periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.91

**Tabel 2.91** Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2024

| TAHUN | TARGET | REALISASI | % | SELISIH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2*100 | 5 = 3 - 2 |
| **2020** | 42.047.582.714 | 59.945.152.495 | 142,57 | 17.897.569.781 |
| **2021** | 64.799.652.811 | 74.735.915.027 | 115,33 | 9.936.262.216 |
| **2022** | 61.878.416.384 | 74.306.238.303 | 120,08 | 12.427.821.919 |
| **2023** | 67.783.498.005 | 77.023.078.757 | 113,63 | 9.239.580.752 |
| **2024** | 68.181.212.325 | 77.618.589.941 | 113,84 | 9.437.377.616 |
| **RATA-RATA** | | | 121,09 | |

**Sumber:** Badan Keuangan Daerah, 2025

Perkembangan realisasi pembiayaan daerah dalam lima tahun terakhir menujukkan kondisi fluktuatif. Realisasi pembiayaan daerah pada tahun 2020-2024 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020-2021 realisasi pembiayaan daerah cenderung menunjukkan adanya penurunan. Kondisi serupa juga terjadi pada realisasi SiLPA Kota Payakumbuh dalam lima tahun terakhir. Fluktuatifnya angka SiLPA pada tahun 2020-2024 terjadi akibat dari alokasi anggaran pada program/kegiatan yang dapat terlaksana dan/atau alokasi anggaran yang dapat terserap. Fluktuasi realisasi pembiayaan daerah yang terjadi dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah selama periode 2020-2024 belum berjalan secara optimal.

Sementara, pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, Penyertaan Modal Daerah, Penyertaan Modal Daerah dan Pemberian

Pinjaman Daerah. Selama ini Kota Payakumbuh hanya mengalokasikan pengeluaran pembiayaan hanya untuk penyertaan modal kepada Bank Nagari dan Perumda Tirta Sago. Adapun realisasi pengeluaran pembiayaan daerah periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.92.

**Tabel 2.92** Perkembangan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2024

| TAHUN | TARGET | REALISASI | % | SELISIH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2*100 | 5 = 3 - 2 |
| 2020 | 0 | 0 | | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | | 0 |
| 2022 | 6.140.000.000 | 6.140.000.000 | 100 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | | 0 |
| RATA-RATA | | | 20,00 | |

**Sumber:** Badan Keuangan Daerah, 2025

Dari tabel terlihat, bahwa pemerintah Kota Payakumbuh hanya pada tahun 2022 melakukan penyertaan modal kepada Bank Nagari kurun waktu 5 tahun terakhir. Kemampuan keuangan menjadi alasan kebijakan tersebut diambil. Namun untuk tahun kedepan tentunya penyertaan modal ini tetap ditingkatkan sebagai upaya mempertahankan besaran persentase kepemilikan saham Kota Payakumbuh pada Bank Nagari.

## 2) NERACA DAERAH

Neraca daerah menggambarkan tentang perkembangan dari kondisi asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah yang tersedia. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan asset daerah penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah karena laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan Keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas pemerintah daerah merupakan bagian penting dari manajemen keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa aset pemerintah daerah diinvestasikan dengan bijak dan dikelola dengan baik untuk meningkatkan ekuitas. Hal ini akan memberikan manfaat yang luas, mulai dari mengurangi defisit anggaran hingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Dengan menggunakan ekuitas secara bijaksana, pemerintah

daerah akan dapat membangun kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kondisi ekonomi yang lebih baik.

Ekuitas pemerintah daerah merupakan nilai yang dimiliki daerah yang dapat memberikan keuntungan bagi daerah. Ini penting untuk membantu pemerintah daerah mengatur pengeluaran dan pendapatan, memfasilitasi perencanaan jangka panjang, membantu mengelola resiko, dan memastikan kelangsungan operasi yang stabil. Ekuitas pemerintah daerah bergantung pada perencanaan dan pengelolaan aset dan pendapatan yang efektif.

**Pertama**, pengelolaan aset yang efektif adalah kunci untuk meningkatkan ekuitas daerah. Hal ini penting karena aset daerah adalah sumber dana yang dapat digunakan untuk meningkatkan ekuitas. Aset daerah dapat berupa tanah, bangunan, peralatan, kendaraan, inventaris, dan lainnya. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa aset-aset tersebut diperlakukan dengan baik dan diatur dengan baik.

**Kedua**, pendapatan daerah juga harus meningkat agar ekuitas daerah dapat meningkat. Pendapatan daerah berasal dari berbagai sumber seperti pajak, bagi hasil, hibah, dan dana lainnya. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa pendapatan daerah dapat dikumpulkan dengan efisien dan efektif. Ini penting untuk memastikan bahwa pendapatan daerah dapat digunakan untuk meningkatkan ekuitas daerah.

**Ketiga**, pemerintah daerah harus memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik. Hal ini penting karena pengelolaan keuangan yang efektif akan memastikan bahwa aset daerah digunakan secara efektif dan pendapatan daerah disimpan dengan aman. Ini juga penting untuk memastikan bahwa ekuitas daerah dapat ditingkatkan.

**Keempat**, pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa perencanaan jangka panjang dilakukan dengan baik. Perencanaan jangka panjang akan memastikan bahwa pemerintah daerah dapat memaksimalkan pendapatan, meningkatkan aset, dan mengelola risiko dengan baik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa ekuitas daerah dapat ditingkatkan.

Ekuitas pemerintah daerah sangat penting untuk memberikan keuntungan bagi daerah. Untuk memastikan bahwa ekuitas daerah dapat ditingkatkan, pemerintah daerah harus memastikan bahwa pengelolaan aset dan pendapatan yang efektif dilakukan. Ini penting untuk memastikan bahwa aset digunakan secara efektif, pendapatan dapat disimpan dengan aman, dan perencanaan jangka panjang dapat dilakukan dengan baik. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, maka pemerintah daerah dapat memastikan bahwa ekuitas daerah dapat ditingkatkan.

Komponen Neraca Daerah:

1. Aset, Mencakup seluruh kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik aset lancar (seperti kas, piutang, dan persediaan) maupun aset tetap (seperti tanah, bangunan, dan infrastruktur).

2. Kewajiban, Mencakup seluruh utang yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, kepada pihak lain.
3. Ekuitas Dana, Menunjukkan selisih antara total aset dengan total kewajiban, mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah.

Neraca daerah sangat penting karena memberikan informasi yang akurat dan transparan mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah, yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan, dan evaluasi kinerja keuangan daerah.

**Tabel 2.93** Neraca Daerah Tahun 2020-2024

| NO | URAIAN | REALISASI TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | ASET | | | | | |
| | a. Aset lancar | 109.056.750.076 | 106.461.292.724 | 105.842.926.304 | 119.426.907.193 | 122.607.602.676 |
| | b. Investasi jangka panjang | 91.251.109.273 | 91.662.294.326 | 109.383.375.514 | 142.465.852.038 | 152.172.188.335 |
| | c. Aset tetap | 1.189.516.846.185 | 1.223.323.281.580 | 1.235.829.852.989 | 1.274.797.573.025 | 1.278.451.298.133 |
| | d. Aset lainnya | 11.825.004.269 | 13.083.865.256 | 31.836.234.472 | 13.864.496.776 | 10.774.589.613 |
| | JUMLAH ASET | **1.401.649.709.803** | **1.434.530.733.886** | **1.482.892.389.279** | **1.550.554.829.032** | **1.564.005.678.757** |
| 2 | KEWAJIBAN | | | | | |
| | a. Kewajiban jangka pendek | 10.440.552.100 | 9.508.805.857 | 23.299.063.737 | 13.629.077.459 | 32.570.763.338 |
| | b. Kewajiban jangka panjang | - | - | - | - | - |
| | JUMLAH KEWAJIBAN | **10.440.552.100** | **9.508.805.857** | **23.299.063.737** | **13.629.077.459** | **32.570.763.338** |
| 3 | EKUITAS | | | | | |
| | Ekuitas | 1.391.209.157.703 | 1.425.021.928.029 | 1.459.593.325.542 | 1.536.925.751.573 | 1.532.472.716.939 |
| | JUMLAH EKUITAS | 1.391.209.157.703 | 1.425.021.928.029 | 1.459.593.325.542 | 1.536.925.751.573 | 1.532.472.716.939 |
| | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | **1.401.649.709.803** | **1.434.530.733.886** | **1.482.892.389.279** | **1.550.554.829.032** | **1.565.043.480.277** |

**Sumber:** BKD Kota Payakumbuh, 2025

Dari tabel 2.93 di atas nampak bahwa posisi neraca keuangan pemerintah Kota Payakumbuh dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menggambarkan nilai aset setiap tahun berfluktuasi dan cenderung meningkat walaupun belum signifikan. Perhitungan neraca dilakukan setiap tahun per 31 Desember, pasca pandemi covid-19 beberapa tahun yang lalu cukup mempengaruhi terhadap kondisi perekonomian daerah sehingga kondisi nilai aset pada neraca Kota Payakumbuh per 31 Desember 2020 berjumlah sebesar Rp.1.401.649.709.803,- hingga pada periode per 31 Desember 2024 nilai aset daerah Kota Payakumbuh berjumlah Rp.1.565.043.480.277,-(*unaudited*). Sementara total kewajiban sampai akhir tahun 2024 berjumlah sebesar Rp.32.570.763.338,-(*unaudited*) dan nilai ekuitas dari tahun 2020 hingga tahun 2024 cenderung meningkat sebesar Rp.163.393.709.803,- dari Rp.1.401.649.709.803,- menjadi Rp. 1.565.043.480.277,-

## B. PROYEKSI KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026-2030

### 1) PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH

Proyeksi pendapatan daerah dilakukan dengan menggunakan data historis lima tahun terakhir. Adapun perhitungan proyeksi dilakukan pada masing-masing komponen pada Pendapatan Asli Daerah maupun Pendapatan Transfer dengan menggunakan asumsi kondisi perekonomian Kota Payakumbuh. Dengan mempertimbangkan pertumbuhan rata-rata realisasi Pendapatan Daerah 2020 – 2024 yang hanya mencapai 4,56%, Pemerintah Kota Payakumbuh mengeluarkan kebijakan proyeksi pertumbuhan Pendapatan Daerah 2025-2030 terbagi secara proporsional pada tiap komponen Pendapatan Daerah, yaitu PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah.

Secara umum peningkatan pendapatan daerah tersebut diasumsikan akan dapat tercapai seiring dengan asumsi dasar pertumbuhan makro ekonomi yang diperkirakan akan meningkat pesat pasca Pandemi Covid-19. Pembangunan infrastruktur strategis dari pemerintah pusat, Provinsi dan Kota Payakumbuh yang akan selesai dalam lima tahun ke depan diharapkan akan semakin meningkatkan potensi ekonomi di wilayah pengembangan. Pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh peningkatan konsumsi masyarakat yang dapat ditangkap menjadi peluang pengembangan basis pajak dan retribusi. Peningkatan pendapatan asli daerah diasumsikan akan dapat dicapai melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Peningkatan pendapatan transfer diasumsikan akan dapat dicapai dengan melihat tren pertumbuhan ekonomi nasional yang diharapkan akan meningkatkan transfer ke daerah. apalagi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, memberikan keleluasaan pada daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2026-2030 yang disusun berdasarkan kinerja keuangan tahun 2020-2024, kebijakan keuangan

terbaru, dan kondisi lingkungan dinamis. Proyeksi keuangan ini seyogyanya bersumber dari perangkat daerah yang mengampu pendapatan dan belanja keuangan daerah.

**Tabel 2.94** Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030

| NO | URAIAN | BASELINE TAHUN 2025 | PROYEKSI TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | PENDAPATAN | | | | | | |
| | a. Pendapatan Asli Daerah | 147.847.509.292 | 175,006.083.744 | 715.852.351.756 | 725.453.408.156 | 734.395.952.105 | 723.952.351.756 |
| | Pajak Daerah | 41.673.402.980 | 62.923.605.069 | 203.884.596.480 | 203.987.596.480 | 204.987.596.480 | 205.987.596.480 |
| | Retribusi Daerah | 87.572.567.148 | 89.568.081.585 | 191.951.195.505 | 192.951.195.505 | 193.951.195.505 | 194.951.195.505 |
| | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 12.381.453.735 | 12.752.897.348 | 133.000.526.422 | 133.500.526.422 | 134.000.526.422 | 134.500.526.422 |
| | Lain-Lain PAD yang sah | 6.220.085.429 | 9.761.499.742 | 187.016.033.349 | 195.014.089.749 | 201.456.633.698 | 188.513.033.349 |
| | b. Pendapatan Transfer | 608.030.979.480 | 522.925.767.425 | 628.030.979.480 | 628.030.979.480 | 628.030.979.480 | 628.030.979.480 |
| | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 583.551.636.133 | 498.446.424.078 | 583.551.636.133 | 583.551.636.133 | 583.551.636.133 | 583.551.636.133 |
| | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 24.479.343.347 | 24.479.343.347 | 44.479.343.347 | 44.479.343.347 | 44.479.343.347 | 44.479.343.347 |
| | c. Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah | 0 | 0 | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 |
| | Pendapatan Hibah | 0 | 0 | 100.000,000.000 | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 755.878.488.772 | 697.931.851.169 | 1.443.883.331.236 | 1.453.484.387.636 | 1.462.426.931.585 | 1.451.983.331.236 |
| 2 | BELANJA | | | | | | |
| | a. Belanja operasi | 749.026,189.911 | 647.877,589.577 | 858.320,998.741 | 861.933.429.875 | 869.936.558.423 | 860.317.081.295 |
| | Belanja Pegawai | 427.164.999.371 | 407.503.314.766 | 427.164.999.371 | 427.164.999.371 | 427.164.999.371 | 427.164.999.371 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 298.453.977.377 | 237.376.626.648 | 404.237.473.399 | 404.239.848.133 | 406.400.432.732 | 410.442.831.213 |
| | Belanja Subsidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Belanja Hibah | 22.270.713.163 | 1.972.248.163 | 25.818.525.971 | 29.428.582.371 | 35.271.126.320 | 21.609.250.711 |
| | Belanja Bantuan Sosial | 1.136.500.000 | 1.025.400.000 | 1.100,000.000 | 1.100.000.000 | 1.100,000.000 | 1.100.000.000 |
| | b. Belanja modal | 78,847,034,707 | 49.763.852.327 | 574.562.332.495 | 590.059.957.761 | 580.990.373.162 | 589.666.249.941 |
| | Belanja Modal Tanah | 1.786.010.650 | 220.450.000 | 106.447.498.447 | 106.947.498.447 | 107.447.498.447 | 107.947.498.447 |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 26.545.795.232 | 19.293.939.444 | 56.861.093.387 | 70.349.928.829 | 33.838.764.271 | 62.065.651.681 |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 26.587.381.533 | 11.322.398.975 | 108.159.897.103 | 109.159.897.103 | 110.159.897.103 | 111.159.897.103 |

| NO | URAIAN | BASELINE TAHUN 2025 | PROYEKSI TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 22.352.034.002 | 13.796.192.048 | 249.706.931.087 | 249.715.720.911 | 252.597.412.517 | 253.606.290.239 |
| | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.519.013.290 | 130.871.860 | 53.281.068.706 | 53.781.068.706 | 54.281.068.706 | 54.781.068.706 |
| | Belanja Modal Aset lainnya | 56.800.000 | 5.000.000.000 | 105.843.765 | 105.843.765 | 22.665.732.118 | 105.843.765 |
| | c. Belanja tak terduga | 788,556,513 | 290.409.265 | 1.000.000.000 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 2.000.000.000 |
| | Belanja Tidak Terduga | 788,556,513 | 290.409.265 | 1.000.000.000 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 2.000.000.000 |
| | d. Belanja transfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Belanja Bagi Hasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Belanja Bantuan Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | JUMLAH BELANJA | 828.661.781.131 | 697.931.851.169 | 1.433.883.331.236 | 1.453.484.387.636 | 1.452.426.931.585 | 1,451,983,331,236 |
| | SURPLUS/DEFISIT | (72,783,292,359) | 0 | 10,000,000,000 | 0 | 10,000,000,000 | 0 |
| 3 | PEMBIAYAAN | 72,783,292,359 | 0 | (10,000,000,000) | 0 | (10,000,000,000) | 0 |
| | a. Penerimaan pembiayaan | 72,783,292,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sisa lebih perhitugan anggaran tahun sebelumnya | 72,783,292,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b. Pengeluaran pembiayaan | 0 | 0 | 10,000,000,000 | - | 10,000,000,000 | 0 |
| | Penyertaan Modal Daerah | 0 | 0 | 10,000,000,000 | 0 | 10,000,000,000 | 0 |
| | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 72,783,292,359 | 0 | (10,000,000,000) | 0 | (10,000,000,000) | 0 |
| | silpa tahun berkenaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Sumber:** BKD Kota Payakumbuh, 2025

Dari tabel 2.94 terlihat upaya pemerintah Kota Payakumbuh untuk memenuhi belanja mandatory terutama untuk belanja pegawai maksimal 30% dan belanja infrastruktur publik minimal sebesar 40%. Komitmen ini tidak hanya untuk kedua jenis belanja itu saja tapi juga komitmen untuk memenuhi belanja yang diarahkan lainnya seperti belanja fungsi pendidikan 10%, fungsi pengawasan 1% diluar gaji serta pengembangan SDM 0,16% dari total belanja daerah di tahun 2027.

Sementara untuk antisipasi pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2029, pemerintah Kota Payakumbuh juga telah mengalokasikan belanja hibah kepada penyelenggara pelaksanaan pemilihan umum. Besaran hibah ini mempertimbangkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024 dan Kota Payakumbuh siap menyukseskan pelaksanaan agenda 5 tahunan tersebut.

## 2). ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Upaya untuk mencapai target proyeksi pendapatan dan penerimaan daerah tahun 2025 sampai dengan 2030 akan dilakukan upaya peningkatan kinerja pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifik. Secara rinci upaya-upaya dan strategi daerah dalam mencapai target pendapatan daerah sebagai berikut:

### A). PENDAPATAN ASLI DAERAH

a. Peningkatan basis data perpajakan

   Pemerintah daerah dapat meningkatkan basis data pajak melalui beberapa cara sebagai berikut:

   1. Melakukan pendataan ulang terhadap data wajib pajak dan objek pajak.
   2. Profilling Wajib Pajak.
   3. Meningkatkan koordinasi internal Pemda antara lain dengan bagian penerbitan izin.
   4. Memanfaatkan data pihak ketiga (KPP Pratama, dan BPN untuk PBB).

b. Penyesuaian dasar Pengenaan Pajak

   Cara ini dapat dilakukan melalui menilai ulang atas dasar pengenaan pajak yang disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak.

c. Penilaian, Penetapan, Penagihan dan Pemeriksaan

   Pemerintah daerah bisa meningkatkan PAD dengan solusi ini dengan cara:

   1. Di bidang penilaian dan penagihan dapat dikerjasamakan dengan DJP dan DJKN.
   2. Di bidang penetapan, menyiapkan tenaga pemeriksa yang bersertifikat keahlian.

3. Di bidang pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan kejaksaan, Polri, BPK dan BPKP.
4. Di bidang penagihan, menyiapkan tenaga juru sita.

d. Modernisasi
   1. Penguatan dibidang Teknologi Informasi terkait pendataan, penagihan dan pengolahan data pajak daerah, melakukan sistem monitoring transaksi secara online dan memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk melaporkan, memutakhirkan data, melakukan pembayaran secara online dengan menggunakan system informasi terintegrasi.
   2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan basis data (Integrated data bases).
   3. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan misalnya E-SPTPD dan E-Payment.
   4. Membangun organisasi perpajakan daerah berdasarkan fungsi: Pengelolaan data, pelayanan, penagihan, pemeriksaan dan pengawasan yang sejalan dengan tata kelola keuangan daerah.
   5. Menyusun SOP pelayanan.
   6. Peningkatan SDM
      a) Menambah jumlah diklat untuk ahli penilaian, penagihan dan pemeriksaan.
      b) Menambah jumlah diklat terkait dengan praktik pemungutan perpajakan yang baik.
      c) Kerjasama kemitraan dengan pemda lain yang dinilai sukses dalam pemungutan perpajakan.

e. Dalam rangka meningkatkan penerimaan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Kota Payakumbuh akan mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

f. Penyesuaian pendapatan daerah memperhatikan realisasi pada Semester I Tahun 2025

Permasalahan yang sering ditemui pada saat pemungutan pajak dan retribusi daerah dan masih menjadi kendala kedepannya, antara lain :

a. Belum optimalnya realisasi PAD terutama pada retribusi daerah karena untuk pengambilan keputusan harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan organisasi perangkat daerah yang mengelola retribusi
b. Kepatuhan wajib pajak yang masih rendah.
c. Penghindaran Pajak.

Dalam mengatasi kendala dan permasalahan diatas, Pemerintah Kota Payakumbuh melalui beberapa kebijakannya akan:

a. Meningkatkan koordinasi yang lebih intens dengan organisasi perangkat daerah pengelola PAD untuk satu komando dalam hal pencapaian realisasi PAD terutama retribusi daerah
b. Melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum vertikal dan horizontal untuk melakukan tindakan penagihan dan pemberian sanksi (*law enforcement*) kepada wajib pajak yang tidak patuh sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
c. Menggunakan sistem teknologi informasi untuk mendetect pemenuhan kewajiban wajib pajak.
d. Penerapan sistem pembayaran non-Tunai pada beberapa sumber pendapatan retribusi daerah
e. Melakukan evaluasi terhadap perjanjian kerja sama pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga
f. Mengoptimalkan pendapatan BLUD

### B). PENDAPATAN TRANSFER

Upaya yang dilakukan dalam kaitannya memperoleh Pendapatan Transfer terutama Transfer Pemerintah Pusat yaitu sebagai berikut:

a. Sinergisitas program strategis nasional dengan program yang direncanakan oleh pemerintah daerah.
b. Meningkatkan kinerja atas penyerapan dana transfer dan kepatuhan dalam pelaporan penggunaan atas penyaluran dana dari pusat baik dalam substansi maupun waktu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
c. Melakukan koordinasi dengan pemerintah (pusat) maupun provinsi dalam rangka optimalisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

### C). LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

1. Mengupayakan berbagai usulan program pembangunan yang dapat didanai melalui hibah dari pemerintah;
2. Mendorong upaya peningkatan pajak provinsi yang berkonsekuensi pada peningkatan bagi hasil pajak provinsi;
3. Melakukan koordinasi dengan provinsi untuk meraih bantuan keuangan dari Provinsi.

Selanjutnya, untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kota Payakumbuh juga terus melakukan pengembangan dan terobosan melalui penciptaan keuangan kreatif dalam mencari sumber pendanaan berupa inovasi dalam mengelola, merencanakan, dan menggunakan keuangan untuk mencapai tujuan tertentu sehingga dapat memberikan kontribusi lebih dalam pembangunan daerah. Adapun inovasi yang akan dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain:

1. Peningkatan akurasi data potensi pajak,
2. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pendapatan daerah yang berbasis teknologi informasi,
3. Peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan dan akses informasi yang akurat kepada masyarakat,
4. Penggalakan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat,
5. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah,
6. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah, atau
7. Mencari sumber pandanaan lain melalui pinjaman daerah.

Untuk meningkatkan penerimaan daerah diarahkan kepada pengelolaan pendapatan daerah melalui optimalisasi pendapatan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi daerah seperti optimalisasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, memperhatikan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam pengelolaan pendapatan daerah. Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil, proposional berdasarkan potensi dan pemerataan, serta memberi dorongan kepada masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka beberapa arah kebijakan dapat dilakukan sebagai berikut:

a) Optimalisasi Pajak Daerah Kendaraan Bermotor, dengan:
   1) Meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang saat ini hanya sekitar 50-60%. Ini dapat dicapai dengan menggunakan sistem digital untuk mempermudah pembayaran dan pengawasan,
   2) Program edukasi kepada wajib pajak mengenai manfaat pembayaran pajak dan dampaknya terhadap pembangunan daerah,
   3) Mengintegrasikan data kendaraan dengan sistem Samsat Online untuk mempermudah identifikasi kendaraan yang belum bayar pajak, serta meningkatkan efisiensi penagihan.

b) Sumber Pendapatan Lain, Terutama Aset, melalui
   1) Memaksimalkan pengelolaan aset daerah yang belum optimal, seperti tanah dan bangunan milik daerah yang dapat disewakan atau dijadikan objek kerjasama dengan pihak ketiga,
   2) Melakukan audit aset secara berkala untuk mengidentifikasi potensi aset yang dapat dikelola lebih produktif dan menguntungkan,
   3) Mengembangkan kerjasama dengan pihak swasta dalam bentuk *public-private partnership* (PPP) untuk mengelola aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

c) Kerjasama dengan Pihak Ketiga, melalui:

1) Mendorong kerjasama antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dalam pengelolaan proyek besar yang dapat menghasilkan pendapatan baru, baik dalam bentuk pembangunan bersama maupun kerjasama untuk pengelolaan layanan publik,
2) Menjalin kemitraan dengan lembaga internasional yang memiliki keahlian dalam pembiayaan pembangunan daerah atau program keberlanjutan

d) Pengembangan Kredit Karbon sebagai Sumber Pendapatan Daerah, melalui:

1) Identifikasi Potensi Sumber Kredit Karbon: Kota Payakubuh dapat mengeksplorasi berbagai sektor yang berpotensi menghasilkan kredit karbon, seperti sektor kehutanan, perkebunan, energi terbarukan, dan pengelolaan sampah. Proyek-proyek pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dapat diintegrasikan dalam mekanisme perdagangan karbon internasional,
2) Program Penanaman Pohon dan Reboisasi: Mengembangkan program reboisasi dan konservasi hutan untuk memperoleh sertifikat kredit karbon. Program ini tidak hanya akan berkontribusi pada pengurangan emisi CO2, tetapi juga memberikan manfaat lingkungan jangka panjang bagi daerah,
3) Pengelolaan Sampah: Implementasi sistem pengelolaan sampah berbasis *zero waste* dapat menghasilkan kredit karbon melalui pengurangan emisi dari landfill dan daur ulang sampah organik menjadi kompos atau bioenergy,
4) Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Kredit Karbon: Menyusun peraturan daerah yang memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan proyek-proyek kredit karbon di Kota Payakumbuh, termasuk mekanisme verifikasi, pemantauan, dan pelaporan emisi yang terlibat,
5) Sertifikasi dan Penjualan Kredit Karbon: Menjalin kerjasama dengan lembaga internasional yang menyediakan platform untuk sertifikasi dan perdagangan kredit karbon. Pemerintah daerah dapat menjual kredit karbon kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan offset emisi untuk memenuhi kewajiban lingkungan mereka,
6) Kerjasama dengan Pihak Ketiga: Menjalin kemitraan dengan lembaga internasional yang memiliki platform untuk perdagangan kredit karbon dan perusahaan yang tertarik untuk berkontribusi pada pengurangan emisi melalui proyek lokal.

e) Digitalisasi Pendapatan Daerah *Real-Time*, melalui:

1) Sistem Digital Pembayaran Pajak dan Retribusi: Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem digital yang memungkinkan pembayaran pajak dan retribusi daerah secara real-time. Sistem ini dapat mempermudah wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan memungkinkan pemantauan pendapatan secara langsung oleh

pemerintah daerah,

2) Integrasi Data Pendapatan: Memastikan bahwa seluruh data pendapatan dari pajak, retribusi, dan penggunaan aset dapat terintegrasi dalam satu platform digital. Ini akan meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan daerah,
3) Laporan Keuangan dan Pemantauan *Real-Time*: Implementasi dashboard digital untuk pemantauan dan pelaporan pendapatan daerah secara real-time. Ini akan memudahkan pengambilan keputusan berbasis data, serta mempercepat respons terhadap fluktuasi pendapatan

f) Target Pendapatan Perangkat Daerah dari Retribusi dan Penggunaan Aset:
1) Penyusunan Target Pendapatan Perangkat Daerah: Setiap Perangkat Daerah akan diberi target pendapatan berdasarkan potensi retribusi dan penggunaan aset yang dimiliki. Misalnya, Dinas Perhubungan dapat memiliki target dari retribusi parkir, sementara Dinas Pekerjaan Umum dapat memperoleh pendapatan dari penggunaan aset bangunan milik daerah.
2) Penetapan KPI untuk Perangkat Daerah: Menetapkan Key Performance Indicators (KPI) untuk setiap Perangkat Daerah dalam hal pencapaian target pendapatan dari sektor-sektor tersebut. Penilaian kinerja Perangkat Daerah akan lebih terfokus pada pencapaian target pendapatan yang berkelanjutan dan realistis.

## 3). PROYEKSI BELANJA DAERAH

Analisis proyeksi belanja daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi belanja daerah Kota Payakumbuh untuk lima tahun mendatang dalam memenuhi kebutuhan untuk membiayai belanja langsung atau belanja program RPJMD. Analisis proyeksi belanja juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan belanja tidak langsung daerah serta pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban pada pihak ketiga. Sedangkan, belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai dan barang dan jasa.

Analisis hasil proyeksi belanja selanjutnya digunakan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran yang juga berkaitan dengan kapasitas penerimaan pembiayaan daerah untuk lima tahun mendatang. Adapun beberapa kebijakan terkait penentuan belanja daerah yang harus dianggarkan, antara lain:

1. Mengutamakan belanja daerah yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah/Prioritas Walikota.
2. Menganggarkan belanja program/kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
2 Mengutamakan dukungan Program Strategis Nasional,
3 Mengutamakan pemenuhan belanja untuk urusan wajib yang tekait dengan pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal (SPM).
4 Memenuhi alokasi persentase belanja daerah yang sudah ditentukan besaran dan penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5 Mendorong peningkatan belanja modal tiap tahun.
6 Mengakomodir belanja operasional yang merupakan belanja wajib dan mengikat karena terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang merupakan belanja kebutuhan aparatur yang wajib dipenuhi.
7 Pemenuhan kebutuhan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak di tahun 2029 yang dialokasikan langsung pada program, kegiatan dan sub kegiatan OPD tanpa melalui pembentukan Dana Cadangan

Secara rinci proyeksi belanja daerah untuk tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.95** Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2026-2030

| No. | URAIAN | BASELINE TAHUN 2025 | PROYEKSI TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2 | BELANJA | | | | | | |
| | a. Belanja operasi | 749.026.189.911 | 647.877.589.577 | 858.320.998.741 | 861.933.429.875 | 869.936.558.423 | 860.317.081.295 |
| | Belanja Pegawai | 427.164.999.371 | 407.503.314.766 | 427.164.999.371 | 427.164.999.371 | 427.164.999.371 | 427.164.999.371 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 298.453.977.377 | 237.376.626.648 | 404.237.473.399 | 404.230.848.133 | 406.400.432.732 | 410.442.831.213 |
| | Belanja Subsidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Belanja Hibah | 22.270.713.163 | 1.972.248.163 | 25.818.525.971 | 29.428.582.371 | 35.271.126.320 | 21.609.250.711 |
| | Belanja Bantuan Sosial | 1.136.500.000 | 1.025.400.000 | 1.100.000.000 | 1.100.000.000 | 1.100.000.000 | 1.100.000.000 |
| | b. Belanja modal | 78.847.034.707 | 49.763.852.327 | 574.562.332.495 | 590.059.957.761 | 580.990.373.162 | 589.666.249.941 |
| | Belanja Modal Tanah | 1.786.010.650 | 220.450.000 | 106.447.498.447 | 106.947.498.447 | 107.447.498.447 | 107.947.498.447 |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 26.545.795.232 | 19.293.939.444 | 56.861.093.387 | 70.349.928.829 | 33.838.764.271 | 62.065.651.681 |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 26.587.381.533 | 11.322.398.975 | 108.159.897.103 | 109.159.897.103 | 110.159.897.103 | 111.159.897.103 |
| | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 22.352.034.002 | 13.796.192.048 | 249.706.931.087 | 249.715.720.911 | 252.597.412.517 | 253.606.290.239 |
| | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.519.013.290 | 130.871.860 | 53.281.068.706 | 53.781.068.706 | 54.281.068.706 | 54.781.068.706 |
| | Belanja Modal Aset lainnya | 56.800.000 | 5.000.000.000 | 105.843.765 | 105.843.765 | 22.665.732.118 | 105.843.765 |
| | c. Belanja tak terduga | 788.556.513 | 290.409.265 | 1.000.000.000 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 2.000.000.000 |
| | Belanja Tidak Terduga | 788.556.513 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 2.000.000.000 |
| | d. Belanja transfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Belanja Bagi Hasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Belanja Bantuan Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | JUMLAH BELANJA | 828.661.781.131 | 697.931.851.169 | 1.433.883.331.236 | 1.453.484.387.636 | 1.452.426.931.585 | 1.451.983.331.236 |

**Sumber:** BKD Kota Payakumbuh, 2025

## 4). ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Strategi pendapatan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas selanjutnya akan dilaksanakan melalui belanja daerah. Untuk itu maka belanja daerah harus disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Untuk kebijakan belanja daerah, Pemerintah Kota Payakumbuh akan terus konsisten untuk menjaga agar belanja daerah dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan. Untuk menjaga agar target belanja dapat dicapai, beberapa solusi yang dapat ditempuh Pemerintah Kota Payakumbuh diantaranya adalah:

1. Penyusunan Perubahan APBD tepat waktu
2. Meningkatkan peran dan fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan Unit Layanan Pengadaan dalam verifikasi rencana kerja dan anggaran (RKA), hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan paket pekerjaan dalam RKA perubahan dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa, sehingga diharapkan dapat mengurangi keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa;
3. Melakukan pembinaan kepada SKPD dalam menyusun rencana kegiatan terutama untuk melaksanakan kegiatan pengadaan belanja modal agar dapat dilaksanakan sesuai jadwal;
4. Penjadwalan kegiatan secara seksama dan pengendalian yang ketat terhadap pelaksanaan rencana kegiatan, melalui optimalisasi tugas pengendalian oleh pimpinan OPD;
5. Melakukan penjadwalan ulang terhadap kegiatan yang tidak prioritas atau kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan;
6. Melakukan kerjasama dengan Inspektorat untuk melaksanakan reviu terutama terhadap kegiatan bersumber dari dana transfer;

Selanjutnya, Arah Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh untuk RPJMD Tahun 2025-2029 yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Penganggaran

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/ pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah terkelompokkan dalam kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

Peraturan pemerintah ini menentukan proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

Indikator Kinerja dalam APBD sudah dimasukkan dalam format RKA, namun dalam proses pembahasan anggaran yang terjadi selama ini di Pemerintahan Daerah lebih fokus pada jumlah uang yang dikeluarkan dibandingkan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang akan dicapai. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penganggaran pendekatan kinerja lebih fokus pada keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari kegiatan.

Hal ini terjadi akibat kurangnya informasi tentang keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dalam dokumen penganggaran yang ada. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ini menyempurnakan pengaturan mengenai dokumen penganggaran, yaitu adanya unsur kinerja dalam setiap dokumen penganggaran yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yang selama ini masih belum tercapai.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang juga sudah banyak mengalami perubahan, maka Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi. Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan

sebagaimana mestinya dan jumtah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir.

Peraturan Pemerintah ini juga mempertegas fungsi verifikasi dalam Perangkat Daerah, sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada Perangkat Daerah atau unit Perangkat Daerah yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD. Peraturan Pemerintah ini juga mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK). Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan juga menjadi fokus Peraturan Pemerintah ini. Pemisahan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal Pemerintah Daerah.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan ini harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan juga harus mengalir sehingga bisa mendukung pencatatan berbasis akrual. Basis akrual ini merupakan basis yang baru untuk Pemerintah Daerah sehingga dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak di Pemerintahan Daerah diperlukan untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis akuntasi akrual.

3. Pertanggungiawaban Keuangan Daerah

Pertanggungiawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari Penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungiawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan tersendiri bagi setiap Pemerintah Daerah karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah salah satunya yaitu sumber daya manusia.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggararan dan perencanaan di tahun berikutnya.

Dalam pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Payakumbuh tetap berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah. Berdasarkan kepada kedua peraturan tersebut maka penganggaran daerah dikelola berdasarkan fungsi:

a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Perlunya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk memastikan efektivitas pembangunan. Prinsip penyusunan APBD harus menyesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah dan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah, dalam teknis penyusunan pemerintah daerah diharuskan menggunakan sistem informasi pemerintah daerah agar proses keuangan lebih transparan dan akuntabel, dan berbasis kinerja dalam pengelolaan anggaran dapat membantu mengurangi pemborosan.

a. Perhitungan *Fix Cost* dan Efisiensi *Variable Cost* Per Perangkat Daerah, dengan cara:
    1. *Fix Cost*: Melakukan perhitungan rinci terhadap biaya tetap yang harus dipenuhi oleh setiap Perangkat Daerah, seperti gaji pegawai, sewa, dan pengeluaran tetap lainnya. Menetapkan batasan maksimal *fix cost* untuk menjaga keseimbangan anggaran.
    2. *Variable Cost*: Memastikan bahwa biaya variabel dapat dioptimalkan dengan cara efisiensi, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Pendekatan berbasis kinerja dalam pengelolaan anggaran dapat membantu mengurangi pemborosan.
b. Perubahan *Mindset* untuk Efisiensi, melalui:

1. Menanamkan *mindset* kepada seluruh pegawai pemerintah bahwa meskipun biaya minimal, output yang besar tetap dapat tercapai dengan cara bekerja lebih cerdas melalui inovasi dan penerapan teknologi dalam pengelolaan anggaran dan layanan.
2. Program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam manajemen keuangan daerah dan efisiensi operasional.

c. Melakukan kerjasama dengan pihak lain, seperti:
   1. Meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan sektor swasta untuk pengelolaan proyek-proyek besar yang dapat mendatangkan pendapatan tambahan dan meningkatkan kualitas layanan publik.
   2. Penyusunan kemitraan strategis dengan lembaga internasional untuk mendapatkan akses kepada pendanaan atau teknologi yang mendukung efisiensi belanja daerah.

d. Melakukan sinkronisasi RPJMD dan RKPD dengan RPJMN, yakni:
   1. Memastikan bahwa semua program dan anggaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Payakumbuh selaras dengan tujuan RPJMN, terutama target pertumbuhan ekonomi sebesar 7,3% pada 2029.
   2. Identifikasi proyek prioritas yang mendukung tujuan nasional dan mendorong sinergi antara kebijakan fiskal daerah dan program pemerintah pusat.

## 5). PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH

Analisis proyeksi pembiayaan daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi pembiayaan daerah Kota Payakumbuh untuk lima tahun mendatang. Penerimaan pembiayaan daerah tahun 2025-2030 diproyeksikan berasal dari silpa tahun anggaran sebelumnya dan tidak tertutup kemungkinan bersumber dari Penerimaan Pinjaman Daerah yang direncanakan akan diperoleh dari Lembaga keuangan Bank dan NonBank. Sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan akan digunakan untuk penyertaan modal, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman daerah. Untuk proyeksi pembiayaan daerah dalam periode tahun 2025-2030, dapat dilihat pada tabel 2.96 berikut.

**Tabel 2.96** Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2025-2030

| URAIAN | BASELINE TAHUN 2025 | PROYEKSI TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| PEMBIAYAAN | 72.783.292.359 | 0 | (10.000.000.000) | 0 | (10.000.000.000) | 0 |
| **a. Penerimaan pembiayaan** | 72.783.292.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sisa lebih perhitugan anggaran tahun sebelumnya | 72.783.292.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| URAIAN | BASELINE TAHUN 2025 | PROYEKSI TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **b. Pengeluaran pembiayaan** | 0 | 0 | 10.000.000.000 | 0 | 10.000.000.000 | 0 |
| Penyertaan Modal Daerah | 0 | 0 | 10.000.000.000 | 0 | 10.000.000.000 | 0 |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEMBIAYAAN NETTO | 72.783.292.359 | 0 | (10.000.000.000) | 0 | (10.000.000.000) | 0 |
| Silpa tahun berkenaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Sumber:** BKD Kota Payakumbuh, 2025

## 6). ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Selanjutnya, untuk Strategi pembiayaan daerah terkait dengan upaya pemerintah dalam mengelola defisit maupun surplus anggaran. Pembiayaan netto dalam keadaan surplus maka Pemerintah Kota Payakumbuh dapat memanfaatkannya untuk membiayai pembangunan sesuai prioritas daerah atau dialokasikan sebagai dana cadangan. Jika pembiayaan netto dalam keadaan defisit maka strategi untuk menutupi defisit tersebut antara lain :

1. Melakukan pinjaman daerah untuk mendanai pembangunan yang bersumber dari pinjaman pusat, pemerintah daerah lainnya atau lembaga keuangan Bank/bukan Bank
2. Menerbitkan obligasi daerah yang berasal dari masyarakat yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dan menghasilkan penerimaan kepada APBD.
3. Optimalisasi Silpa untuk belanja daerah, dengan cara:
   a. Jika terdapat Silpa yang telah ditentukan penggunaannya, Pemerintah Kota Payakumbuh wajib menganggarkan silpa tersebut sesuai dengan penggunaannya
   b. Dalam hal Silpa daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, Silpa dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan dana abadi dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah

Dalam hal Silpa tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Kota Payakumbuh akan mengarahkan penggunaan Silpa tersebut untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi kepada pembangunan ekonomi daerah.

Berdasarkan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk 5 (lima) tahun kedepan, Kota Payakumbuh Rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah 5 tahun ke depan akan mengacu pada kebijakan umum APBN 2025 yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, penguatan belanja modal dan infrastruktur, efisiensi belanja nonprioritas, serta peningkatan kualitas belanja serta penyelarasan antara pusat dan daerah melalui implementasi UU HKPD (Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan

Daerah). Kemampuan fiskal daerah yang kuat akan mendukung pembiayaan pengeluaran untuk pembangunan daerah dalam jangka panjang, namun juga harus mempertimbangkan keseimbangan antara pendapatan daerah, kewenangan belanja, dan pembiayaan yang ada tidak memberatkan keuangan daerah.

UU HKPD akan mengatur pembagian kewenangan pendapatan dan belanja antara pusat dan daerah, sehingga rencana 5 tahunan daerah harus selaras dengan kerangka kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemampuan fiskal daerah harus ditingkatkan agar dapat membiayai program-program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas nasional dan daerah. Peningkatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi, dan didorong untuk meningkatkan investasi dalam infrastruktur

Dengan mempertimbangkan UU HKPD dan kemampuan fiskal daerah, Kota Payakumbuh sudah merencanakan sumber pendapatan, penggunaan belanja, dan strategi pembiayaan yang realistis dan berkelanjutan untuk 5 tahun ke depan.

## 7). PROYEKSI BELANJA BERSIFAT WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA DAN EARMARK

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah khususnya terkait dengan *mandatory spending* terhadap beberapa belanja yang harus dipenuhi pada tahun 2027 atau 5 tahun semenjak UU tersebut dikeluarkan. Untuk belanja yang bersifat mandatory, Pemerintah Kota Payakumbuh selalu berkomitmen untuk memenuhi persyaratan persentase anggaran yang diamanatkan. Dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk belanja yang bersifat *mandatory*, sampai TA 2025 ini Pemerintah Kota Payakumbuh memang belum semuanya dapat dipenuhi mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah, namun pemerintah Kota Payakumbuh selalu berupaya untuk memenuhi belanja minimal yang persyaratkan sebagaimana yang diamanatkan juga oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dimana Kabupaten/Kota sampai tahun 2027 sudah harus memenuhi semua belanja tersebut. Strategi dan kebijakan yang tepat harus bisa diambil Kota Payakumbuh untuk memenuhi amanat tersebut. Sebagai gambaran dalam APBD TA 2025, belanja mandatory Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.97** Belanja Mandatory Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

| NO. | URAIAN BELANJA | BESARAN DISYARATKAN | PERSENTASE |
|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Fungsi Pendidikan | 20% | 23,21% |
| 2 | Belanja Fungsi Kesehatan | - | 39,18% |
| 3 | Belanja Infrastruktur Publik | 40% | 32,50% |
| 4 | Belanja Pegawai | 30% | 46,55% |
| 5 | Belanja Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum | Memadai | Memadai |

**Sumber:** Badan Keuangan Daerah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dalam APBD TA 2025, Kota Payakumbuh sudah bisa memenuhi belanja fungsi Pendidikan dan fungsi kesehatan dan ini akan tetap menjadi belanja wajib yang harus disediakan anggaran yang cukup untuk tiap tahunnya. Walaupun belanja kesehatan tidak lagi menjadi belanja wajib sesuai amanah UU Kesehatan, akan tetapi kualitas belanja kesehatan perlu untuk diperkuat. Hal ini bertujuan agar kebijakan kesehatan yang disusun selaras dengan arah kebijakan kesehatan nasional.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, Pemerintah Kota Payakumbuh akan meningkatkan besaran dan kualitas belanja yang bersifat diarahkan. untuk belanja fungsi pendidikan ini biar selaras dengan kebijakan nasional. Beberapa kebijakan yang diambil antara lain :

1. Mengarahkan kebijakan belanja wajib pendidikan untuk mendukung prioritas nasional antara lain peningkatan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas.
2. Memprioritaskan belanja wajib pendidikan untuk program kegiatan yang mendukung pencapaian SPM pendidikan sesuai peraturan perundangan,
3. Melakukan pemutakhiran budget tagging dan budget tracking untuk memetakan subkegiatan yang berdampak pada kualitas belanja wajib pendidikan

### 8) ARAH KEBIJAKAN BELANJA BERSIFAT WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA DAN EARMARK

Arah kebijakan terkait belanja pegawai 30% di tahun 2027 merujuk pada aturan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang membatasi belanja pegawai daerah maksimal 30% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuannya adalah untuk mendorong daerah lebih produktif dengan mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk belanja modal dan program kesejahteraan masyarakat, bukan hanya untuk belanja rutin pegawai. Jika belanja pegawai melebihi 30%, daerah mungkin akan mengalami pengurangan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) atau kendala dalam pencairan Dana Transfer Umum.

Belanja *mandatory* lain yang menjadi perhatian Kota Payakumbuh sampai tahun 2027 adalah pemenuhan belanja pegawai maksimal 30%. Sesuai dengan Arah kebijakan fiskal daerah tahun 2025 bahwa untuk pemenuhan belanja pegawai 30% ada beberapa kebijakan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Moratorium penerimaan CPNS dan PPPK
2. Moratorium mutasi masuk ASN ke Kota Payakumbuh
3. Tidak memperpanjang kontrak PPPK
4. Melakukan restrukturisasi dan perampingan organisasi perangkat daerah
5. Peningkatan kualitas SDM ASN
6. Penerapan penerimaan tunjangan ASN dengan sistem *single salary*
7. Menghemat komponen belanja pegawai dengan melakukan penyesuaian kebijakan kepegawaian antara lain melalui penyusunan formasi PNS berdasarkan analisis jabatan dan atau analisis kebutuhan pegawai, penerapan kebijakan pengurangan jumlah pegawai secara bertahap (*minus growth*),

Untuk belanja pegawai sampai tahun 2025, Kota Payakumbuh mengalokasikan belanja pegawai sebesar 46,55% diluar TPG dan Tambahan Penghasilan Guru. Angka ini termasuk semua komponen belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dan Belanja Pegawai BLUD. Kalau kita merujuk kepada arah kebijakan fiskal tahun 2025 bahwa akan melakukan restrukturisasi belanja pegawai yang hanya mencakup gaji dan tunjangan melekat serta tunjangan kinerja daerah, maka besaran belanja pegawai Kota Payakumbuh untuk tahun 2025 sebesar 40,76%. dari total belanja daerah diluar belanja TPG dan Tamsil Guru. Persentase ini juga masih jauh dari target minimal 30% sebagaimana diamanatkan Pasal 146 ayat (1) UU nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Walaupun terasa berat untuk memenuhi target tersebut karena untuk belanja gaji ASN saja tanpa tambahan penghasilan, belanja pegawai sudah mencapai 37,20% ditambah lagi kebijakan pengangkatan PPPK yang juga akan menambah besaran belanja pegawai dan tentunya ini akan menjadi perhatian untuk mengurangi belanja pegawai sampai tahun 2027.

Sementara Belanja Infrastruktur publik juga belum sesuai atau belum dapat dipenuhi. Namun secara berangsur sampai tahun 2027, harus dapat kita penuhi minimal 40% akan tetap kita upayakan. Untuk belanja infrastruktur publik, dalam kerangka makro Nasional tahun 2025 mengamanatkan bahwa Arah kebijakan fiskal daerah tahun 2025 untuk mendorong pemenuhan belanja infrastruktur sebagai berikut:

1. Melakukan penguatan monitoring dan evaluasi atas pemenuhan belanja infrastruktur.

2. Melakukan budget tracking untuk memetakan subkegiatan yang berdampak pada kualitas belanja infrastruktur.
3. Mengarahkan kebijakan belanja infrastruktur untuk mendukung prioritas nasional antara lain peningkatan investasi melalui perbaikan konektivitas.
4. Mengevaluasi masa transisi belanja infrastruktur akan mempertimbangkan kondisi infrastruktur dan kapasitas fiskal daerah.

Berdasarkan arah kebijakan fiskal dalam kerangka makro ekonomi nasional tahun 2025, Pemerintah Kota Payakumbuh dalam APBD Tahun Anggaran 2025 telah mengalokasikan belanja infrastruktur publik sebesar 32,50% atau mencapai Rp.233.230.129.814. Persentase ini masih jauh dari target minimal yang ditetapkan undang-undang. Beberapa upaya percepatan pembangunan infrastruktur akan dilakukan sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan, peningkatan ekonomi daerah, mendorong peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dalam APBD tahun 2025 dan seterusnya, pembangunan Infrastruktur diarahkan pada sektor-sektor strategis yang mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan terkait belanja infrastruktur sebesar 40% di tahun 2027 adalah kebijakan wajib yang mengharuskan pemerintah daerah mengalokasikan minimal 40% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk belanja infrastruktur pelayanan publik. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas belanja daerah dan mendukung prioritas pembangunan nasional di bidang infrastruktur. Pemerintah daerah memiliki waktu hingga tahun 2027 untuk memenuhi target ini secara bertahap. Disamping itu, kebijakan mandatory lain yang harus dipenuhi setiap tahun dan selalu jadi komitmen daerah untuk dipenuhi adalah :

1. Belanja terkait dengan opsen PKB dan opsen BBNKB yang harus dialokasikan paling sedikit 10 % untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan kota serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
2. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedkit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana diamanatkan dalam ayat (2) Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak Air Tanah (PAT) paling rendah 10% digunakan untuk mendanai pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi penanaman pohon, pembuatan lubang atau sumur serapan, pelestarian hutan atau pepohonan, dan pengelolaan limbah

4. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional

## 9). PROYEKSI KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MENDANAI PEMBANGUNAN DAERAH

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, dihitung berdasarkan total penerimaan daerah dikurangi belanja wajib mengikat, antara lain belanja pegawai dan operasional Perangkat Daerah. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah adalah besarnya anggaran yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kapasitas riil kemampuan keuangan tersebut akan digunakan untuk membiayai program prioritas I, II, dan III. Yang dimaksud Prioritas I, antara lain belanja langsung wajib dan emngikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Prioritas II adalah dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah, sedangkan Prioritas III meliputi belanja alokasi lainnya, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

**Tabel 2.98** Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh

| NO | URAIAN | BASELINE TAHUN 2025 | PROYEKSI TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Pendapatan Daerah | 755.878.488.772 | 697.931.851.169 | 1.443.883.331.236 | 1.453.484.387.636 | 1.462.426.931.585 | 1.451.983.331.236 |
| 2 | Penerimaan pembiayaan | 72.783.292.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total Penerimaan | 828.661.781.131 | 697.931.851.169 | 1.443.883.331.236 | 1.453.484.387.636 | 1.462.426.931.585 | 1.451.983.331.236 |
| | Dikurangi belanja mengikat: | | | | | | |
| 1 | Belanja Pegawai | 427.164.999.371 | 407.503.314.766 | 427.164.999.371 | 427.164.999.371 | 427.164.999.371 | 427.164.999.371 |
| 2 | Belanja Operasional OPD | 298.453.977.377 | 237.376.626.648 | 404.237.473.399 | 404.230.848.133 | 406.400.432.732 | 410.442.831.213 |
| | Total Belanja Wajib dan Mengikat | 725.618.976.748 | 644.879.941.414 | 831.402.472.770 | 831.395.847.504 | 833.565.432.103 | 837.607.830.584 |
| | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan | 103.042.804.383 | 53.051.909.755 | 612.480.858.466 | 622.088.540.132 | 628.861.499.482 | 614.375.500.652 |

**Sumber:** Badan Keuangan Daerah, 2025

# 3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Perencanaan pembangunan didasarkan pada analisis masa lalu dan masa yang akan datang. Analisis masa lalu digunakan untuk menggambarkan permasalahan pembangunan dan analisis masa datang untuk mendapatkan isu strategis daerah. Permasalahan pembangunan daerah mencakup berbagai aspek yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah secara merata. Dimana permasalahan pembangunan daerah memberikan gambaran mengenai suatu kondisi atau keadaan yang memiliki perbedaan antara kondisi aktual dengan kondisi yang di inginkan. Kondisi aktual dapat dilihat berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah tahun sebelumnya sehingga akan menghasilkan gap atau perbedaan antara kinerja yang dihasilkan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat. Sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan dimasa datang. Hasil evaluasi terhadap kondisi daerah menjadi dasar identifikasi sejumlah permasalahan untuk penentuan prioritas, sasaran pembangunan dan isu strategis daerah yang harus diselesaikan dalam 5 (lima) tahun kedepan dalam periode tahun 2025-2029. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh tahun 2025-2029 sebagai berikut:

## A. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan Kota Payakumbuh mengacu kepada hasil analisis kondisi pembangunan daerah pada bab sebelumnya selama beberapa tahun terakhir, yang dapat dilihat dari aspek ekonomi, sosial, budaya, pelayanan publik maupun lingkungan. Ada 3 (tiga) aspek permasalahan yang dikelompokkan dalam permasalahan pembangunan daerah yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

### 1). PERMASALAHAN BERDASARKAN ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1. Belum optimalnya Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi Kota Payakumbuh hampir sama dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat. Jika dibandingkan dengan daerah sekitar pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh berada di bawah Kota Bukittinggi dan Kota Solok. Pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh tahun 2024 sebesar 4.53 persen.
2. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan. Selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024, Kota Payakumbuh menghadapi tantangan

dalam penanggulangan kemiskinan, meskipun telah ada upaya dan kebijakan yang dilaksanakan namun penurunannya tidak signifikan. Upaya penurunan kemiskinan Kota Payakumbuh belum optimal dibandingkan dengan penurunan angka kemiskinan di kota lainnya di Sumatera Barat. Selama 5 (lima) tahun terakhir Kota Payakumbuh berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0.46 persen dari 5.65 persen tahun 2020 ke 5.19 persen pada tahun 2024.

3. Belum optimalnya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka. Tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Payakumbuh masih berada pada angka 4.87 persen. Dalam lima tahun terakhir Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Payakumbuh menunjukkan angka fluktuatif yang relatif kecil.
4. Belum optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia. Indeks Pembangunan Manusia Kota Payakumbuh selama rentang tahun 2020 sampai tahun 2024 terjadi peningkatan dari angka 79.33 pada tahun 2020 menjadi 80.76 pada tahun 2024. Hal tersebut mengindikasi bahwa capaian pembangunan manusia di Kota Payakumbuh sangat tinggi, namun masih di bawah IPM Kota Bukittinggi, dan di atas IPM Kota Solok dan Padang Panjang.
5. Masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat. Dalam 5 (lima) tahun terakhir kualitas kesehatan masyarakat di Kota Payakumbuh masih dalam kategori rendah, ditandai dengan adanya beberapa indikator pelayanan kesehatan yang belum sepenuhnya optimal dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih tingginya angka prevalensi stunting Kota Payakumbuh tahun 2024 sebesar 16.4 persen. Hal ini menggambarkan masih lemahnya pemenuhan gizi anak usia dini dan kurangnya pemahaman orang tua mengenai pola asuh anak dan makanan bergizi.
6. Rata-rata Lama Sekolah yang belum optimal. Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Payakumbuh sampai dengan tahun 2024 berada pada angka 10.89 tahun. Rata-rata lama sekolah di Kota Payakumbuh sudah cukup baik dan cenderung naik setiap tahunnya.
7. Tingginya ketimpangan pendapatan Kota Payakumbuh/Distribusi pendapatan yang belum merata. Indeks Gini Kota Payakumbuh tahun 2024 masuk kategori ketimpangan sedang karena berada pada kisaran 0.3 sampai dengan 0.5. Pada tahun 2024 Indeks Gini Kota Payakumbuh sebesar 0.313 mengalami sedikit penurunan dibanding dari tahun sebelumnya, tetapi lebih tinggi dari Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat yaitu 0.283. Pada tahun 2024 Kota Payakumbuh menjadi Kota dengan Indeks Gini tertinggi di Provinsi Sumatera Barat.

## 2). PERMASALAHAN BERDASARKAN ASPEK DAYA SAING DAERAH

1. Masih tingginya angka ketergantungan penduduk Kota Payakumbuh. Pada tahun 2024 angka ketergantungan total Kota Payakumbuh sebesar 47.94, artinya setiap 100 orang penduduk usia kerja mempunyai tanggungan sebanyak 48 orang yang belum produktif atau dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 47.94 ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 37.04 dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 10.90. Perlu peningkatan dalam menunjang daya saing daerah melalui pendidikan, pelatihan dan kursus keterampilan sesuai dengan tuntutan pasar kerja, di samping pelatihan-pelatihan untuk menciptakan *entrepreneur* yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
2. Belum opimalnya partisipasi angkatan kerja. Pada tahun 2024, jumlah penduduk yang bekerja di Kota Payakumbuh mengalami penurunan dari 74.137 orang menjadi 74.085 orang. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya peluang kerja, pemutusan hubungan kerja, dan peningkatan jumlah usia produktif yang tidak terserap pasar kerja. Angka pengangguran juga naik dari 3.770 orang di tahun 2023 menjadi 3.791 orang pada 2024, mencerminkan ketidaksesuaian antara keterampilan pencari kerja dan kebutuhan pasar. Selain itu, jumlah angkatan kerja juga menurun tipis dari 77.907 menjadi 77.876 orang.

## 3). PERMASALAHAN BERDASARKAN ASPEK PELAYANAN UMUM

Permasalahan yang terjadi di daerah dapat diklasifikasikan berdasarkan kewenangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam regulasi ini, urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah dikelompokkan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap permasalahan yang muncul di daerah dapat dianalisis dan disesuaikan dengan tingkat pemerintahan yang berwenang dalam menanganinya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan daerah dibagi menjadi:

## A). URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

### (1). URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN

Pendidikan memegang peran strategis dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan dalam pembangunan sektor pendidikan akan berkontribusi pada terbentuknya individu yang mandiri dan memiliki martabat, dengan landasan nilai-nilai spiritual serta semangat kebangsaan. Beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian terkait

dengan urusan pendidikan di Kota Payakumbuh antara lain:

a. Masih rendahnya kualitas kompetensi guru/tenaga pendidik
b. Adanya ketimpangan jumlah peserta didik antar sekolah yang berdampak pada efektifitas pembelajaran dan pemenuhan standar Rombongan Belajar (Rombel).
c. Belum optimalnya capaian kompetensi minimum literasi dan numerasi pada satuan pendidikan.
d. Terbatasnya ketersediaan dan kualitas lembaga pendidikan keterampilan/pendidikan vokasi.
e. Belum optimalnya upaya penanganan dan reintegrasi Anak Tidak Sekolah (ATS)/Anak Putus Sekolah.
f. Rendahnya penerapan transformasi digital dan pendekatan bilingual di satuan pendidikan.
g. Belum optimalnya pengembangan dan implementasi kurikulum Muatan Lokal (Mulok) yang konstektual dan berbasis potensi daerah.
h. Belum optimalnya internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter di lingkungan satuan pendidikan.

### (2). URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN

Pembangunan di bidang kesehatan merupakan elemen strategis dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia secara menyeluruh. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan tingkat kesehatan seluruh lapisan masyarakat, mencakup setiap tahapan kehidupan mulai dari masa kehamilan hingga usia lanjut. Dalam upaya peningkatan dejarat kesehatan masyarkat di Kota Payakumbuh masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

a. Masih belum optimalnya kualitas pelayanan primer.
b. Masih belum optimalnya pelayanan kesehatan lanjutan.
c. Masih belum optimalnya kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional.
d. Belum optimalnya pelayanan kesehatan siklus hidup dan gizi masyarakat.
e. Masih belum optimalnya ketahanan kesehatan dan pengendalian penyakit.
f. Masih rendahnya cakupan imunisasi.
g. Masih tingginya angka prevalensi stunting.

### (3). URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sangat berpengaruh terhadap perkembangan sebuah daerah karena berhubungan langsung dengan penyediaan infrastruktur dasar dan pengelolaan tata ruang yang berkelanjutan untuk mendukung kehidupan masyarakat serta pertumbuhan

ekonomi nasional daerah. Beberapa permasalahan yang menjadi tantangan dalam pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain:

a. Belum optimalnya infrastruktur pelayanan dasar.
b. Masih rendahnya kesesuaian standar dan fungsi infrastruktur jalan.
c. Tingginya resiko banjir dan daya rusak sungai.
d. Belum optimalnya kinerja pengelolaan irigasi.
e. Belum tertatanya bangunan dan lingkungan kawasan strategis perkotaan.
f. Masih rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan rencana tata ruang.
g. Belum optimalnya pengelolaan sanitasi aman.
h. Belum adanya infrastruktur pengolahan sampah yang representatif.

### (4). URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Perumahan dan kawasan pemukiman menjadi salah satu urusan yang strategis dalam menjamin hak dasar masyarakat atas tempat tinggal yang layak, aman dan terjangkau. Selain itu kawasan pemukiman yang tertata dengan baik akan mendukung pemerataan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun dalam upaya pemenuhannya masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu:

a. Masih belum optimalnya pembangunan rumah layak huni.
b. Belum optimalnya pengelolaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan pemukiman.
c. Ketimpangan antara kebutuhan dengan ketersediaan rumah *(Backlog Rumah)* yang masih tinggi.

### (5). URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Untuk mewujudkan kondisi wilayah yang lebih kondusif di Kota Payakumbuh, telah dilakukan berbagai langkah strategis, seperti peningkatan ketertiban umum dan pelaksanaan upaya mitigasi dan penanggulangan bencana. Kendati demikian, sejumlah tantangan dan permasalahan masih memerlukan perhatian dan penanganan lebih lanjut.

a. Masih adanya kasus gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
b. Masih terdapat pelanggaran Perda dan Perkada.
c. Belum optimalnya mitigasi dan adaptasi terhadap risiko bencana.

### (6). URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL

Upaya pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian dari

strategi peningkatan kualitas hidup masyarakat guna menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar, serta menciptakan kehidupan yang bermartabat dan layak. Pelaksanaannya mencakup perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial bagi kelompok rentan seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kota Payakumbuh terus menjalankan program-program tersebut secara berkelanjutan. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial, antara lain:

a. Belum optimalnya kualitas data kemiskinan yang komprehensif, valid dan terintegrasi.
b. Belum optimalnya kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

## B). URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

### (1). URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA

Dalam menurunkan angka pengangguran berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh baik dari segi peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, namun secara umum belum mampu menghadapi tantangan kebutuhan pasar ekonomi global. Beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian kedepan antara lain:

a. Rendahnya produktivitas tenaga kerja.
b. Rendahnya daya saing pencari kerja.
c. Ketersediaan lapangan kerja yang terbatas.
d. Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja.

### (2). URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pembangunan sumber daya manusia yang berperspektif gender dilaksanakan sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi dalam berbagai aspek kehidupan. Di samping itu, peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak dipandang strategis dalam memperkuat ketahanan serta kesejahteraan keluarga, melalui peran serta aktif mereka dalam proses pembangunan. Meskipun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai permasalahan yang memerlukan perhatian dan penanganan secara serius oleh pemerintah diantaranya:

a. Belum optimalnya perlindungan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan.
b. Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan difabel.
c. Masih rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan.

### (3). URUSAN PEMERINTAH BIDANG PANGAN

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem komprehensif yang meliputi empat subsistem utama, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, konsumsi pangan, serta keamanan pangan. Dalam upaya pencapaian ketahanan pangan yang optimal, masih terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi tantangan dan memerlukan penanganan, di antaranya:

a. Masih rendahnya konsumsi kelompok pangan tertentu sesuai Angka Kecukupan Energi (AKE).
b. Masih belum optimalnya diversifikasi konsumsi pangan.
c. Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan.
d. Terbatasnya ketersediaan dan fluktuasi harga pangan pokok dan pangan lainnya

### (4). URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN

Dalam proses pembangunan, kepastian terhadap status dan pemanfaatan lahan menjadi hal yang sangat penting, khususnya dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi lahan pertanian, mendukung pembangunan infrastruktur strategis, serta melindungi aset tanah. Namun demikian, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai permasalahan di bidang pertanahan yang perlu mendapat perhatian yaitu:

a. Belum optimalnya penatagunaan tanah pemerintah dan tanah konsolidasi.
b. Masih rendahnya pemanfaatan tanah ulayat sebagai faktor pendorong dan menjadi modal ekonomi kota.
c. Belum optimlanya pengelolaan tanah untuk program strategis kota.

### (5). URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Pengelolaan lingkungan menjadi hal penting dalam menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan. Dalam pelaksanaanya, ditemukan beberapa permasalahan meliputi:

a. Belum optimalnya pengelolaan persampahan kota.
b. Belum optimalnya upaya pengelolaan lingkungan.
c. Belum terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau publik.

### (6). URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Penyediaan data dan informasi kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi secara nasional menjadi fondasi utama dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Data kependudukan memegang peranan strategis sebagai dasar penetapan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan

daerah, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian sasaran pembangunan di berbagai bidang. Namun demikian, sampai saat ini masih terdapat sejumlah permasalahan yaitu:

a. Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
b. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan.

## (7). URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pemberdayaan masyarakat menjadi elemen penting dalam mendorong partisipasi aktif warga dalam proses pembangunan. Melalui pemberdayaan, masyarakat didorong untuk memiliki inisiatif dan tanggung jawab dalam mengelola kegiatan ekonomi maupun sosial, sebagai upaya memperbaiki kondisi kehidupannya secara mandiri dan berkelanjutan. Namun demikian, proses pemberdayaan dan pembangunan berbasis masyarakat ini tidak lepas dari berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

a. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
b. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan, pemerintahan dan swasta dalam pemberdayaan masyarakat.

## (8). URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pelaksanaan pengendalian penduduk dan program keluarga berencana merupakan langkah strategis dalam mengupayakan keseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung sumber daya yang tersedia. Pertambahan jumlah penduduk perlu diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan dasar guna menjamin kualitas hidup yang layak bagi masyarakat. Namun demikian, masih terdapat berbagai isu yang memerlukan perhatian, seperti :

a. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketahanan keluarga.
b. Masih rendahnya kemauan masyarakat dalam ber KB.
c. Tingginya pertumbuhan penduduk.

## (9). URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERHUBUNGAN

Transportasi memegang peranan yang sangat vital dan strategis dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi serta mendukung pengembangan wilayah di Kota Payakumbuh. Meskipun demikian, sektor perhubungan masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

a. Belum tersedianya tempat parkir yang representatife.
b. Belum optimalnya pengelolaan terminal penumpang dan angkutan barang.
c. Belum adanya smart transportation di Kota Payakumbuh.

### (10). URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan penggunaan website perlu terus ditingkatkan guna memperkuat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat sejumlah kendala dan permasalahan yang perlu segera diatasi, antara lain:

a. Keterbatasan Infrastruktur jaringan dan Konektivitas Antar Wilayah.
b. Belum optimalnya penerapan SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan.

### (11). URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Kota Payakumbuh, sektor mikro merupakan salah satu tulang punggung ekonomi daerah, terutama dengan tingginya jumlah pelaku usaha mikro di bidang kuliner, kerajinan, dan perdagangan. Namun demikian, pengembangan sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius. Beberapa permasalahan utama yang diidentifikasi antara lain:

a. Belum optimalnya pengembangan dan penguatan koperasi.
b. Belum optimalnya pengembangan dan daya saing Usaha Mikro.

### (12). URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL

Investasi memegang peranan penting sebagai salah satu motor penggerak dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Kendati demikian, dalam upaya mendorong peningkatan realisasi investasi, masih dijumpai berbagai permasalahan yaitu:

a. Masih kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam menaati aturan berusaha.
b. Belum optimalnya pengelolaan potensi investasi daerah.
c. Masih lemahnya kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat.

### (13). URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas pemuda dalam pembangunan masih ditemukan beberapa permasalahan antara lain:

a. Belum optimalnya peran pemuda dalam Pembangunan.
b. Belum optimalnya prestasi pemuda dan olah raga.

### (14). URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK

Peningkatan kualitas penyediaan data dan informasi yang dapat dipercaya, mutakhir, dan sesuai dengan kebutuhan menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah secara terintegrasi dan berkelanjutan. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

a. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi daerah yang valid dan terintegrasi.
b. Belum optimalnya sistem informasi satu data yang dapat diakses masyarakat dengan mudah.

## (15). URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERSANDIAN

Penguatan sistem keamanan pada jaringan komunikasi dan sistem informasi perlu terus dilakukan sebagai langkah antisipatif terhadap pesatnya perkembangan teknologi informasi yang terus mengalami perubahan dan tantangan yang semakin kompleks. Permasalahan yang dihadapi antara lain:

a. Tingkat Kesadaran terhadap Cyber Security masih rendah.
b. Belum optimalnya keamanan informasi pemerintah daerah.

## (16). URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN

Beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan urusan kebudayaan antara lain:

a. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya.
b. Belum optimalnya promosi budaya daerah.
c. Belum optimalnya peran kelembagaan adat dan budaya dalam pelestarian budaya.

## (17). URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERPUSTAKAAN

Urusan perpustakaan merupakan bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan budaya literasi masyarakat. Perpustakaan berperan sebagai pusat belajar yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

a. Belum optimalnya pemanfaat teknologi informasi dalam pengelolaan layanan perpustakaan.
b. Rendahnya minat baca/ literasi masyarakat yang berdampak pada kurang optimalnya layanan perpustakaan.

## (18). URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan dukungan dari sistem penyelenggaraan kearsipan yang menyeluruh dan terintegrasi. Penyelenggaraan kearsipan harus mampu

menjamin ketersediaan, keutuhan, dan keamanan arsip yang autentik dan dapat dipercaya, sehingga berfungsi sebagai alat bukti pertanggungjawaban yang sah. Selain itu, arsip tersebut harus dapat diakses dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan urusan kearsipan masih ditemui beberapa permasalahan antara lain:

a. Belum optimalnya sistem pengelolaan arsip secara tertib sesuai dengan kaidah kearsipan.
b. Masih rendahnya penelusuran dan penyelamatan arsip bernilai sejarah.

## C). URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

### (1). URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Urusan bidang kelautan dan perikanan berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun memiliki potensi besar, sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan antara lain:

a. Alih fungsi lahan budidaya perikanan.
b. Masih rendahnya produktifitas sektor perikanan.

### (2). URUSAN PEMERINTAH BIDANG PARIWISATA

Sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Selain memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, sektor ini juga memiliki peran penting dalam memberdayakan perempuan dan generasi muda melalui pengembangan kreativitas, serta mendukung pengentasan kemiskinan melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Meskipun demikian, dalam proses pengembangannya, masih terdapat sejumlah aspek yang memerlukan perhatian dan penanganan lebih lanjut, antara lain:

a. Belum optimalnya pengembangan wisata daerah.
b. Belum tersedianya wisata unggulan daerah.
c. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif daerah.

### (3). URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANIAN

Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk menjaga tingkat produksi dan produktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Beberapa permasalahan yang dihadapi pada urusan pertanian yaitu:

a. Belum optimalnya produktifitas hasil pertanian.
b. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan lahan pertanian.
c. Masih rendahnya tingkat pendapatan petani.

### (4). URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN

Pembangunan sektor perdagangan memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, menciptakan lapangan usaha, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong terbentuknya harga yang wajar dan pemerataan pendapatan. Sektor ini juga sangat penting untuk terus dikembangkan karena memiliki keterkaitan yang erat dengan sektor lain, seperti pertanian, industri, pertambangan, keuangan, transportasi, dan telekomunikasi. Meski demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan perdagangan, antara lain:

a. Belum optimalnya penataan dan pengelolaan pasar serta pedagang kaki lima.
b. Belum optimalnya pengelolaan asset pasar pertokoan.
c. Masih lemahnya Perlindungan Konsumen.
d. Masih rendahnya nilai eksport produk dan komoditas perdagangan.

### (5). URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN

Pembangunan sektor industri memiliki peran strategis sebagai penggerak utama perekonomian karena nilai kapitalisasi modal yang besar, daya serap tenaga kerja yang tinggi, dan kemampuannya menciptakan nilai tambah dari bahan baku. Oleh karena itu, sektor ini dapat mendorong pembangunan sektor lain dan meningkatkan daya beli masyarakat. Namun masih ada beberapa permasalahan yang menjadi perhatian yaitu :

a. Masih rendahnya nilai produksi industri.
b. Masih rendahnya ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan.
c. Masih rendahnya penguasaan teknologi industri.
d. Belum optimalnya pengelolaan limbah industri.
e. Masih rendahnya kualitas dan standarisasi produk industry.

## D). UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

### (1). UNSUR SEKRETARIAT DAERAH

a. Belum optimalnya tata kelola Pemerintahan yang akuntabel.
b. Belum optimalnya penataan organisasi dan tata laksana pemerintahan
c. Belum optimalnya penguatan pembinaan lembaga keagamaan dan peningkatan kualitas mental masyarakat yang inklusif dan berkarakter

### (2). UNSUR SEKRETARIAT DPRD

a. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

b. Belum optimalnya peran DPRD dalam penataan produk hukum.

## E). UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

### (1). UNSUR PERENCANAAN

Perencanaan merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam proses pembangunan daerah. Kebutuhan terhadap perencanaan yang lebih partisipatif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan semakin meningkat, seiring dengan perkembangan pembangunan yang semakin cepat, tidak dapat diprediksi. Seluruh dinamika ini harus diintegrasikan sebagai bagian dari masukan dalam penyusunan rencana pembangunan. Namun demikian, terdapat berbagai permasalahan dalam proses perencanaan yaitu:

a. Belum optimalnya kualitas perencanaan.
b. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi dalam perumusan perencanaan pembangunan.

### (2). UNSUR KEUANGAN

Salah satu bentuk pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan terhadap pendapatan daerah yang efektif dan akuntabel yang akan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan yang dihadapi saat ini antara lain:

a. Belum optimalnya pengelolaan asset daerah.
b. Terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan daerah.
c. Belum optimalnya penerimaan pendapatan asli daerah.

### (3). UNSUR KEPEGAWAIAN

Untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, dibutuhkan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tangguh, berintegritas, profesional, netral, serta terbebas dari intervensi politik dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Namun, dalam upaya mewujudkan kondisi ideal tersebut, masih dijumpai sejumlah permasalahan yaitu:

a. Belum optimalnya penerapan merrit system.
b. Belum optimalnya manajemen pengelolaan ASN.

### (4). UNSUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pengembangan kompetensi, profesionalisme, dan kinerja baik pada tingkat individu maupun institusi merupakan bagian yang sangat krusial dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah. Kompetensi yang memadai akan memastikan setiap aparatur pemerintah mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Beberapa permasalahan yang dihadapi sampai saat ini antara lain:

a. Belum optimalnya pengembangan karir dan pelatihan yang terstruktur.
b. Belum optimalnya pengembangan SDM ASN.

### (5). UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kebutuhan akan hasil-hasil penelitian dan pengembangan (litbang) semakin meningkat sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan yang tepat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta untuk mendorong peningkatan daya saing daerah. Namun, dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yaitu :

a. Kebijakan kelitbangan yang belum sepenuhnya mendukung inovasi dan riset terapan.
b. Belum optimalnya peran perangkat daerah dalam pengembangan inovasi daerah.
c. Belum terintegrasinya pelaksanaan kajian pembangunan antar perangkat daerah.

## F). UNSUR PENGAWASAN

Pelaksanaan sistem integritas serta pengawasan internal yang independen, profesional, dan terkoordinasi masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di tengah meningkatnya harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih responsif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

a. Belum optimalnya pengawasan APIP
b. Belum optimalnya penerapan SPIP.
c. Belum optimalnya penguatan kapasitas APIP.

## G). UNSUR KEWILAYAHAN

a. Belum optimalnya pelayanan publik di kelurahan dan kecamatan.
b. Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat dan peran aktif Lembaga Kemasyarakatan.
c. Belum optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan.
d. Belum lengkapnya sarana prasarana pelayanan.

## H). UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan kondusivitas wilayah, beberapa upaya telah dilakukan antara lain peningkatan kualitas kehidupan demokrasi, ketertiban umum, pendidikan politik, menjaga kerukunan antar umat beragama, namun demikian masih ada permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

a. Belum optimal upaya penanganan potensi konflik sosial.
b. Masih rendahnya pengawasan dan pendampingan organisasi masyarakat.
c. Belum optimalnya peran serta ormas dalam Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat.
d. Rendahnya pengawasan terhadap izin tinggal WNA.

## 4). PERMASALAHAN TERKAIT KAJIAN LINGKUNGAN

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam RPJMD adalah proses analisis sistematis yang digunakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah dimasukkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). KLHS berfungsi sebagai alat bantu dalam perencanaan pembangunan daerah agar Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) yang disusun tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis Kota Payakumbuh dalam KLHS RPJMD 2025-2029 sebagai berikut:

Permasalahan berdasarkan hasil konsultasi Publik:

1. Belum optimalnya pengelolaan sampah
2. Penurunan kualitas air
3. Peningkatan alih fungsi lahan
4. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi
5. Belum optimalnya kualitas pendidikan
6. Belum optimalnya potensi pariwisata dan budaya
7. Ancaman ketahanan pangan
8. Lemahnya penegakan hukum
9. Masih tingginya angka stunting dan penyakit tidak menular

Permasalahan berdasarkan analisis capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjuan (TPB):

1. 43% luas Kota Payakumbuh mempunyai Daya Dukung Daya Tampung (DDDT) air terlampaui.
2. 71% Daya Dukung Daya Tampung (DDDT) air dalam kondisi kritis berat.
3. 1.537, 21 Ha berada pada resiko multi bahaya tinggi.
4. 29% luas wilayah Kota Payakumbuh mempunyai jasa lingkungan hidup kategori sangat rendah dan rendah.
5. Produksi padi Kota Payakumbuh turun 5,02% pada tahun 2023.
6. Empat nagari mempunyai kerentanan perubahan iklim kategori tinggi.
7. Belum adanya proklim yang berkelanjutan di Kota Payakumbuh.
8. Keanekaragaman hayati (flora dan fauna) di Kota Payakumbuh sudah banyak yang terdegradasi.

9. Turunnya persentase sampah yang terkelola.
10. Penurunan IKLH Tahun 2023.

Permasalahan berdasarkan dokumen KLHS RPJMD Kota Payakumbuh:

1. Pengelolaan persampahan
2. Penurunan kualitas dan kuantitas air
3. Alih fungsi lahan
4. Pengelolaan sampah.
5. Sumber air baku
6. Ruang Terbuka Hijau
7. Pengelolaan limbah cair
8. Kawasan rawan bencana

## B. ISU STRATEGIS DAERAH

### 1). IDENTIFIKASI ISU STRATEGIS

Identifikasi isu strategis lingkungan dalam RPJMD harus mempertimbangkan keterkaitan antara isu global, nasional, dan regional. Dengan memahami permasalahan lingkungan pada berbagai tingkatan, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan terintegrasi dengan kebijakan nasional serta komitmen global terhadap pelestarian lingkungan. Isu-isu ini dapat memengaruhi pembangunan daerah secara langsung maupun tidak langsung, sehingga perlu dianalisis secara komprehensif agar kebijakan yang disusun dalam RPJMD 2025-2029 mampu menjawab tantangan yang ada.

Dengan mengacu pada isu lingkungan dinamis pemerintah daerah dapat menyusun isu strategis lingkungan yang relevan, berbasis data, serta sesuai dengan perkembangan dinamika lingkungan global, nasional, dan regional. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD 2025-2029 lebih responsif, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan kebijakan yang lebih luas.

**Tabel 2.99** Isu Strategis Daerah

| POTENSI DAERAH | PERMASALAHAN | ISU KLHS | ISU LINGKUNGAN DINAMIS | | | ISU STRATEGIS DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | |
| **Angka Partisipasi Kasar**<br>- APK PAUD Tahun 2024: 44,17%<br>- APK SD/MI/Paket A Tahun 2024: 102,23%<br>- APK SMP/MTs/Paket B Tahun 2024: 106,94%<br><br>**Angka Partisipasi Murni**<br>- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Tahun 2024: 97,52%<br>- Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Tahun 2024: 80,01%<br>- Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik Tahun 2024 :57,86%<br>- Persentase satuan pendidikan (SD/SMP) yang terakreditasi A Tahun 2024: 76%<br>- Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tahun 2024: 67%<br><br>**Angka Putus Sekolah** | 1. Masih rendahnya kualitas kompetensi guru/tenaga pendidik<br>2. Adanya ketimpangan jumlah peserta didik antar sekolah yang berdampak pada efektifitas pembelajaran dan pemenuhan standar rombongan belajar (rombel).<br>3. Belum optimalnya capaian kompetensi minimum literasi dan numerasi pada satuan pendidikan.<br>4. Terbatasnya ketersediaan dan kualitas lembaga pendidikan keterampilan/ pendidikan vokasi.<br>5. Belum optimalnya upaya penanganan dan reintegrasi Anak Tidak Sekolah (ATS)/ anak putus | | Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's):<br>**Tujuan ke-1 :**<br>Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Menekankan pentingnya memperkuat pemahaman dan implementasi Pancasila sebagai ideologi negara, memperkokoh sistem demokrasi, serta menjunjung tinggi HAM. Langkah ini bertujuan menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban.<br>**Tujuan ke-3 :**<br>Menjamin kehidupan sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia<br>**Tujuan ke-4 :**<br>Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta menigkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua | **Asta Cita ke-4** : Memperkuat Pembangunan sumber Daya Manusia (SDM) Sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, kesetaraan gender, serta Penguatan peran perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | **Misi ke-1 Provinsi Sumbar :**<br>Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas | 1. Masih belum meratanya kualitas pendidikan yang bermutu |

| POTENSI DAERAH | PERMASALAHAN | ISU KLHS | ISU LINGKUNGAN DINAMIS | | | ISU STRATEGIS DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| - Angka Putus Sekolah SMP tahun 2024 : 6 orang<br><br>**Anak Tidak Sekolah (ATS)**<br>- Anak Tidak Sekolah Tahun 2024 jenjang pendidikan dasar sebanyak : 147 orang<br>- Anak Tidak Sekolah Tahun 2024 jenjang pendidikan menengah sebanyak : 213 orang | sekolah.<br>6. Rendahnya penerapan transformasi digital dan pendekatan bilingual di satuan pendidikan.<br>7. Belum optimalnya pengembangan dan implementasi kurikulum muatan local (Mulok) yang konstektual dan berbasis potensi daerah.<br>8. Belum optimalnya internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter di lingkungan satuan pendidikan. | | **Tujuan ke-5 :**<br>Mencapai kesejahteraan gender dan memberdayakan Perempuan | | | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | |
| 1. Indek Keluarga Sehat Tahun 2024 adalah 0.35%<br>2. Prevalensi stunting pada balita Tahun 2024 adalah 16,4%<br>3. Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan Tahun 2024 adalah 2,33%<br>4. Persentase RS Rujukan Tingkat Kab/Kota yang terakreditasi Tahun 2024 adalah 100% | 1. Masih belum optimalnya kualitas pelayanan primer.<br>2. Masih belum optimalnya pelayanan kesehatan lanjutan.<br>3. Masih belum optimalnya kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional. | - | Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's):<br>**Tujuan ke-3** :<br>Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia<br>**Tujuan ke-6** :<br>Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. | **Asta Cita ke-4** :<br>Memperkuat Pembangunan sumber Daya Manusia (SDM) Sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, kesetaraan gender, serta Penguatan peran perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | **Misi ke-1 Provinsi Sumbar :**<br>Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas | 1. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat dan prilaku hidup sehat |

| POTENSI DAERAH | PERMASALAHAN | ISU KLHS | ISU LINGKUNGAN DINAMIS | | | ISU STRATEGIS DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| 5. Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Tahun 2024 adalah 100%<br>6. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Tahun 2024 adalah 100%<br>7. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Tahun 2024 adalah 100%<br>8. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standard Tahun 2024 adalah 100%<br>9. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard Tahun 2024 adalah 100%<br>10. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard Tahun 2024 adalah 92,78%<br>11. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard Tahun 2024 adalah 100%<br>12. Persentase penderita hipertensi yang | 4. Belum optimalnya pelayanan kesehatan siklus hidup dan gizi masyarakat.<br>5. Masih belum optimalnya ketahanan kesehatan dan pengendalian penyakit.<br>6. Masih rendahnya cakupan imunisasi.<br>7. Masih tingginya angka prevalensi stunting. | | | | | |

| POTENSI DAERAH | PERMASALAHAN | ISU KLHS | ISU LINGKUNGAN DINAMIS | | | ISU STRATEGIS DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard Tahun 2024 adalah 100%<br>13. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard Tahun 2024 adalah 100%<br>14. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standard Tahun 2024 adalah 100%<br>15. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standard Tahun 2024 adalah 100%<br>16. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standard Tahun 2024 adalah 100% | | | | | | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | |
| 1. Persentase rumah yg terlayani air minum perpipaan Tahun 2024 adalah 91%<br>2. Persentase Pelayanan Air Minum Tahun 2024 adalah 100%<br>3. Persentase irigasi dengan berkinerja baik Tahun 2024 adalah 94,5% | 1. Belum optimalnya infrastruktur pelayanan dasar<br>2. Masih rendahnya kesesuian standar dan fungsi infrastruktur jalan<br>3. Tingginya resiko banjir dan daya | 1. Pengelolaan sampah<br>2. Penurunan kualitas dan kuantitas air<br>3. Alih fungsi lahan<br>4. Sumber air baku<br>5. Ruang terbuka hijau | Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's):<br>**Tujuan ke-6**:<br>Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua | **Asta Cita ke-2** : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru | **Misi ke-5 Provinsi Sumbar :** Membangun infrastruktur berkeadilan dan siap tanggap bencana | 1. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur berkelanjutan<br>2. Belum optimalnya pengelolaan persampahan dan lingkungan |

| POTENSI DAERAH | PERMASALAHAN | ISU KLHS | ISU LINGKUNGAN DINAMIS | | | ISU STRATEGIS DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| 4. Persentase Penataan sungai Tahun 2024 adalah 28,21%<br>5. Persentase panjang jalan status Kota dalam kondisi mantap Tahun 2024 adalah 85,82%<br>5. Persentase jalan kota yang memiliki drainase Tahun 2024 adalah 68,97%<br>7. Persentase Kepatuhan Pelaku Pembangunan sesuai dokumen tata ruang Tahun 2024 adalah 38,27%<br>8. Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan Tahun 2024 adalah 71,98%<br>9. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang Tahun 2024 adalah 80,35%<br>10. Rasio kepatuhan IMB kab/kota Tahun 2024 adalah 100%<br>11. Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota Tahun 2024 adalah 85,82%<br>12. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi Tahun 2024 adalah 0,64<br>13. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi Tahun 2024 adalah 100% | rusak sungai yang rusak<br>4. Belum optimalnya kinerja pengelolaan irigasi.<br>5. Belum tertatanya bangunan dan lingkungan kawasan strategis perkotaan.<br>6. Masih rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan rencana tata ruang.<br>7. Belum optimalnya pengelolaan sanitasi<br>8. Belum adanya infrastruktur pengolahan sampah yang representative | 6. Pengelolaan limbah cair<br>7. Kawasan rawan bencana | **Tujuan ke-9**: Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industry inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi<br>**Tujuan ke-11**: Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan | | | |

| POTENSI DAERAH | PERMASALAHAN | ISU KLHS | ISU LINGKUNGAN DINAMIS | | | ISU STRATEGIS DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| **URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | |
| 1. Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2024 adalah 97,30%<br>2. Persentase rumah tangga yang memiliki pengolahan air limbah akses aman Tahun 2024 adalah 22,87%<br>3. Persentase penyerahan PSU Perumahan oleh Pengembang Perumahan Kepada Pemerintah Daerah Tahun 2024 adalah 24,20%<br>4. Persentase Kawasan Pemukiman Kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani Tahun 2024 adalah 0%<br>5. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Tahun 2024 adalah 2.69%<br>6. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Tahun 2024 adalah 36.28% | 1. Masih belum optimalnya pembangunan rumah layak huni.<br>2. Belum optimalnya pengelolaan prasarana sarana utilitas (PSU) perumahan dan kawasan pemukiman<br>3. Ketimpangan antara kebutuhan dengan ketersediaan rumah *(Backlog Rumah)* yang masih tinggi. | - | Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's):<br>**Tujuan ke-1**:<br>Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun<br>**Tujuan ke-6** :<br>Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.<br>**Tujuan ke-11**:<br>Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. | **Asta Cita ke-6** :<br>Membanguna dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan | **Misi ke-3 Provinsi Sumbar :**<br>Nagari/desa sebagai basis kemajuan | 1. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur berkelanjutan |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | |
| **Penanggulangan Bencana:**<br>1. Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yg siap menghadapi bencana Tahun 2024 adalah 100% | Belum optimalnya mitigasi dan adaptasi terhadap risiko bencana. | Kawasan rawan bencana | Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) :<br>**Tujuan ke-9** :<br>Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan | **Asta Cita ke-8 :**<br>Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta | **Misi ke-5 Provinsi Sumbar :**<br>Membangun infrastruktur berkeadilan dan siap tanggap bencana | **Penanggulangan Bencana:**<br>1. Masih adanya gangguan ketentraman dan |

| POTENSI DAERAH | PERMASALAHAN | ISU KLHS | ISU LINGKUNGAN DINAMIS | | | ISU STRATEGIS DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| 2. Persentase kejadian bencana yg bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana Tahun 2024 adalah 100%<br>3. Persentase warga Kota Payakumbuh yang menerima pelayanan penanggulangan bencana Tahun 2024 adalah 100%<br>4. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Tahun 2024 adalah 100%<br>5. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Tahun 2024 adalah 100%<br>6. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2024 adalah 100% | | | industry inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi<br>**Tujuan ke-11**: Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan<br>**Tujuan ke-13**: Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya | peningkatan toleransi antarumat beragama untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur | | ketertiban ditengah masyarakat |
| **Satpol PP dan Damkar**<br>1. Persentase penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum, tahun 2024 adalah 100%.<br>2. Persentase penyelesaian gangguan Trantibum tahun 2024 adalah 100%<br>3. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan tahun 2024 100%<br>4. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tahun 2024 100% | 1. Masih adanya kasus gangguan ketentraman dan ketrtiban masyarakat.<br>2. Masih terdapat pelanggaran Perda dan Perkada | | Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's):<br>**Tujuan ke-16 :**<br>Menguatkan masyarakat yang Inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untul semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. | **Asta Cita ke-8 :**<br>Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur | **Misi ke-6 Provinsi Sumbar :**<br>Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas | 1. Masih adanya gangguan ketentraman, dan ketertiban umum di tengah masyarakat |

| POTENSI DAERAH | PERMASALAHAN | ISU KLHS | ISU LINGKUNGAN DINAMIS | | | ISU STRATEGIS DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | |
| 1. Tingkat Kemiskinan tahun tahun 2024 adalah 5.19<br>2. Persentase PPKS yang terlayani tahun 2024 adalah 100 persen<br>3. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM tahun 2024 adalah 100 persen<br>4. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten / Kota tahun 2024 adalah 100 persen | 1. Belum optimalnya kualitas data kemiskinan yang komprehensif, valid dan terintegrasi.<br>2. Belum optimalnya kemandirian PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial). | | Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's):<br>**Tujuan ke-1 :**<br>Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun<br>**Tujuan ke-2 :**<br>Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan<br>**Tujuan ke -10 :**<br>Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara. | **Asta Cita ke-4** :<br>Memperkuat Pembangunan sumber Daya Manusia (SDM) Sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, kesetaraan gender, serta Penguatan peran perempuan, Pemuda, Generasi Milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas<br>**Asta Cita ke-6** :<br>Membanguna dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan | **Misi ke-3 Provinsi Sumbar :**<br>Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan | 1. Masih tingginya tingkat kemiskinan |
| **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | |
| **URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | |
| 1. Tingkat Pengangguran tahun 2024 adalah 4.87%<br>2. Persentase serapan tenaga kerja tahun 2024 adalah 95.13%<br>3. Persentase Tenaga Kerja Bersetifikat Kompetensi tahun 2024 adalah 47.90% | 1. Rendahnya produktivitas tenaga kerja.<br>2. Rendahnya daya saing pencari kerja.<br>3. Ketersediaan lapangan kerja yang terbatas. | Berdasarkan Analisa capaian TPB: Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak (Analisa capaian TPB) | Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's):<br>**Tujuan ke-8** :<br>Meningkatkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta | **Asta Cita ke-4** :<br>Memperkuat Pembangunan sumber Daya Manusia (SDM) Sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, kesetaraan gender, serta Penguatan peran | **Misi ke-4 Provinsi Sumbar :**<br>Sumatera Barat pusat perdagangan dan bisnis Sumatera Bagian Barat | 1. Masih tingginya kesenjangan pendapatan antar masyarakat |

| POTENSI DAERAH | PERMASALAHAN | ISU KLHS | ISU LINGKUNGAN DINAMIS | | | ISU STRATEGIS DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| 4. Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB.LKS Bipartit. Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) tahun 2024 adalah 41.27%<br>5. Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota tahun 2024 adalah 51.58% | | Berdasarkan karakteristik wilayah<br>1. Masih rendahnya jumlah pekerja industri pariwisata<br>2. Masih rendahnya jumlah tenaga kerja pada sektor industri manufaktur | pekerjaan yang layak untuk semua. | perempuan, Pemuda, Generasi Milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | | |
| **URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | |
| 1. Indeks Pembangunan Gender Tahun 2024 adalah 98.93<br>2. Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2022 adalah 71.21<br>3. Tingkat kategori capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2024 adalah Nindya<br>4. Tingkat kategori capaian Kota Layak Anak (KLA) tahun 2024 adalah Madya<br>5. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100,000 penduduk perempuan) tahun 2024 adalah 1,92 | 1. Belum optimalnya perlindungan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan.<br>2. Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan difabel.<br>3. Masih rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan. | - | Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's):<br>**Tujuan ke-5**:<br>Mencapai kesetaraan dan Memberdayaan Perempuan<br>**Tujuan ke-8**:<br>Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.<br>**Tujuan ke-16**:<br>Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan | **Asta Cita ke-4** :<br>Memperkuat Pembangunan sumber Daya Manusia (SDM) Sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, kesetaraan gender, serta Penguatan peran perempuan, Pemuda, Generasi Milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | **Misi ke-6 Provinsi Sumbar :**<br>Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas | 1. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak |

| POTENSI DAERAH | PERMASALAHAN | ISU KLHS | ISU LINGKUNGAN DINAMIS | | | ISU STRATEGIS DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| 6. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota tahun 2024 adalah 100% | | | berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. | | | |
| **URUSAN PEMERINTAH BIDANG PANGAN** | | | | | | |
| 1. Ketersediaan Pangan Utama tahun 2024 yaitu 19.780 ton<br>2. Skor PPH Konsumsi tahun 2024 yaitu 87,7 skor<br>3. Tingkat Keamanan Pangan tahun 2024 yaitu sedang<br>4. Stabilisasi harga Beras tahun 2024 yaitu 1,63%<br>5. Stabilisasi harga Cabe tahun 2024 yaitu 20,69%<br>6. Stabilisasi harga Bawang tahun 2024 yaitu 13,40%<br>7. Indeks Ketahanan Pangan tahun 2024 yaitu 89,33 indeks<br>8. Persentase Cadangan Pangan Pemerintah tahun 2024 yaitu 145,66% | 1. Masih rendahnya konsumsi kelompok pangan tertentu sesuai Angka Kecukupan Energi (AKE)<br>2. Masih belum optimalnya diversifikasi konsumsi pangan.<br>3. Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan<br>4. Terbatasnya ketersedaan dan fluktuasi harga pangan pokok dan pangan lainnya | - | Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's):<br>**Tujuan ke-2** : Menghilangkan kelaparan, mencapai k<br>**Tujuan ke-12**: Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan | **Asta Cita ke-2** : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru | **Misi ke-2 Provinsi Sumbar** :<br>Lumbung pangan nasional dan ekonomi berkelanjutan | 1. Belum optimalnya pengembangan sektor strategis berbasis potensi lokal<br>2. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat dan perilaku hidup sehat |
| **URUSAN PEMERINTAH PERTANAHAN** | | | | | | |
| 1. Persentase sertifikasi aset tanah dan bangunan pemko Tahun 2024 adalah 39,83% | 1. Belum optimalnya penatagunaan tanah | Peningkatan alih fungsi lahan | Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's): | **Asta Cita ke-3** : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan | **Misi ke-5 Provinsi Sumbar** : | 1. Belum optimalnya pemerataan pembangunan |

| POTENSI DAERAH | PERMASALAHAN | ISU KLHS | ISU LINGKUNGAN DINAMIS | | | ISU STRATEGIS DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| 2. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan Tahun 2024 adalah 100%<br>3. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum Tahun 2024 adalah 0/NA<br>4. Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal Tahun 2024 adalah 99,94%<br>5. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi Tahun 2024 adalah 5% | pemerintah dan tanah konsolidasi<br>2. Masih rendahnya pemanfaatan tanah ulayat sebagai faktor pendorong dan menjadi modal ekonomi kota.<br>3. Belum optimlanya pengelolaan tanah untuk program strategis kota. | | **Tujuan ke-2**: Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.<br>**Tujuan ke-10**: Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara<br>**Tujuan ke-11**: Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan<br>**Tujuan ke-17**: Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan | meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Membangun infrastruktur berkeadilan dan siap tanggap bencana | infrastruktur berkelanjutan |
| **URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | |
| 1. Persentase RTH Publik Tahun 2024 adalah 14.87%<br>2. Indeks Kualitas Air Tahun 2024 adalah 45.26%<br>3. Indeks Kualitas udara Tahun 2024 adalah 87.59%<br>4. Indeks Kualitas lahan Tahun 2024 adalah 27.5% | 1. Belum optimalnya pengelolaan persampahan kota.<br>2. Belum optimalnya upaya pengelolaan lingkungan<br>3. Belum terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau publik | 1. Pengelolaan sampah<br>2. Penurunan kualitas dan kuantitas air<br>3. Alih fungsi lahan<br>4. Sumber air baku<br>5. Ruang terbuka hijau<br>6. Pengelolaan limbah cair | Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's):<br>**Tujuan ke-6**: Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua<br>**Tujuan ke-11**: Menjadikan kota dan permukiman inklusif, | **Asta Cita ke-8** : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyaarakat adil dan makmur | **Misi ke-5 Provinsi Sumbar :** Membangun infrastruktur berkeadilan dan siap tanggap bencana | 1. Belum optimalnya pengelolaan persampahan dan lingkungan |

| POTENSI DAERAH | PERMASALAHAN | ISU KLHS | ISU LINGKUNGAN DINAMIS | | | ISU STRATEGIS DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| 5. Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/KotaTahun 2024 adalah 96.4 %<br>6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten/Kota) Tahun 2024 adalah 58.52<br>7. Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota Tahun 2024 adalah 94,63%<br>8. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota Tahun 2024 adalah 25,93%<br>9. Adanya laboratarium lingkungan yang sudah terakreditasi | | | aman, tangguh dan berkelanjutan.<br>**Tujuan ke-15**: Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan yang berkelanjutan ekoistem daratan mengelola hutan secara lestari menghentikan penggurunan, memulihkan degradari lahan serta menghentikan kehilangan keaneka ragaman hayati | | | |
| **URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | |
| 1. Persentase penduduk yg memiliki dokumen kependudukan pada tahun 2024 mencapai 99,5%.<br>2. Kepemilikan KTP Elektronik pada tahun 2024 mencapai 99,55% | 1. Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.<br>2. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan. | - | Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's):<br>**Tujuan ke-16 :** Menguatkan masyarakat yang Inklusif dan damai Untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang | **Asta Cita ke-4** : Memperkuat Pembangunan sumber Daya Manusia (SDM) Sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, kesetaraan gender, serta Penguatan peran perempuan, Pemuda, Generasi Milenial dan | **Misi ke-8 Provinsi Sumbar:** Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif | 1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan |

| POTENSI DAERAH | PERMASALAHAN | ISU KLHS | ISU LINGKUNGAN DINAMIS | | | ISU STRATEGIS DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| | | | efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. | generasi Z), dan penyandang disabilitas | | |
| **URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | |
| | 1. Belum optimalnya program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan<br>2. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan, pemerintah dan swasta dalam pemberdayaan masyarakat. | - | Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's):<br>**Tujuan ke-9 :**<br>Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara | **Asta Cita ke-6** :<br>Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan | **Misi ke-3 Provinsi Sumbar :**<br>Nagari/ Desa sebagai basis kemajuan | 1. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan |
| **URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | |
| 1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) tahun 2023 adalah 65,23<br>2. Cakupan Pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tahun 2024 adalah 85%<br>3. TFR (Angka Kelahiran Tortal) tahun 2024 adalah 0,24%<br>4. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) tahun 2024 adalah 63,63% | 1. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketahanan keluarga.<br>2. Masih rendahnya kemauan masyarakat dalam ber KB.<br>3. Tingginya pertumbuhan penduduk. | - | Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's):<br>**Tujuan ke-16** :<br>Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. | **Asta Cita ke-4** :<br>Memperkuat Pembangunan sumber Daya Manusia (SDM) Sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, kesetaraan gender, serta Penguatan peran perempuan, Pemuda, Generasi Milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | **Misi ke-6 Provinsi Sumbar :**<br>Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas | 1. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan |

| POTENSI DAERAH | PERMASALAHAN | ISU KLHS | ISU LINGKUNGAN DINAMIS | | | ISU STRATEGIS DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| 5. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need) tahun 2024 adalah 13,56% | | | | | | |
| **URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | |
| 1. Indikator Nilai survey IKM Pelayanan transportasi Tahun 2024 adalah 90,66<br>2. Persentase Penurunan titik rawan kecelakaan Tahun 2024 adalah 77,49 %<br>3. Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota ditahun 2024 sebesar 0,88%<br>4. Kinerja Lalu Lintas Kaupaten/ Kota Tahun 2024 adalah 0,86%% | 1. Belum tersedianya tempat parkir yang representatif.<br>2. Belum optimalnya pengelolaan terminal penumpang dan angkutan barang.<br>3. Belum adanya smart transportation. | - | Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's):<br>**Tujuan ke-11 :**<br>Membangun infrastruttur yaag tangguh, meningkatkan industri inllusif dan berkelanjutan, serta mendorong Inovasi dengan sasaran menyediakan akses terhadap system transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas dan oranq tua. | **Asta Cita ke-3 :**<br>Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | **Misi ke-5 Provinsi Sumbar :**<br>Membangun infrastruktur berkeadilan dan siap tanggap bencana | 1. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur berkelanjutan |
| **URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | |

| POTENSI DAERAH | PERMASALAHAN | ISU KLHS | ISU LINGKUNGAN DINAMIS | | | ISU STRATEGIS DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| 1. Indeks SPBE) tahun 2024 adalah 3,75<br>2. Persentase Perangkat Daerah yang menyebarkan informasi melalui media tahun 2024 sebesar 81%<br>3. Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Kominfo Tahun 2024 sebesar 100%<br>4. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Tahun 2024 sebesar 93,43%<br>5. Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebesar 100% | 1. Keterbatasan Infrastruktur jaringan dan Konektivitas Antar Wilayah<br>2. Belum optimalnya penerapan SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan. | - | Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's):<br>**Tujuan ke-11 :**<br>Membangun infrastruktur yaag tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong Inovasi dengan sasaran Secara signifikan meningkatkan alses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020. | **Asta Cita ke-3 :**<br>Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | **Misi ke-8 Provinsi Sumbar :**<br>Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif | 1. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur berkelanjutan<br>2. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan |
| **URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH** | | | | | | |
| 1. Persentase koperasi yang berkualitas tahun 2024 adalah 36,36%<br>2. Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha tahun 2024 adalah 62,74%<br>2. Total UMKM yang ada di kota Payakumbuh per | 1. Belum optimalnya pengembangan dan penguatan koperasi.<br>2. Belum optimalnya pengembangan dan daya saing usaha mikro. | - | Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's):<br>**Tujuan ke-9 :**<br>Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap | **Asta Cita ke-3 :**<br>Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, | **Misi ke-4 Provinsi Sumbar :**<br>Sumatera Barat pusat perdagangan dan bisnis sumatera bagian barat | 1. Belum optimalnya pengembangan sektor strategis berbasis potensi lokal |

| POTENSI DAERAH | PERMASALAHAN | ISU KLHS | ISU LINGKUNGAN DINAMIS | | | ISU STRATEGIS DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| desember 2024 adalah sebanyak 16.008 UMKM<br>3. Persentase Koperasi yang Berkualitas tahun 2024 adalah 36,35%<br>4. Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha tahun 2024 adalah 62,74% | | | jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar | mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | | |
| **URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | |
| 1. Nilai Realisasi Investasi pada tahun tahun 2024 yaitu 658.63 Milyar<br>2. Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota pada tahun tahun 2024 yaitu 33.38 % | 1. Masih Kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam menaati aturan berusaha.<br>2. Belum optimalnya pengelolaan potensi investasi daerah.<br>3. Masih lemahnya kolaborasi pemerinta, swasta dan masyarakat. | | Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's):<br>**Tujuan ke-17 :**<br>Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk Pembangunan berkelanjutan. | **Asta Cita ke-5** :<br>Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | **Misi ke-4 Provinsi Sumbar :**<br>Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat | 1. Belum optimalnya iklim investasi dalam mendukung kepastian berusaha bagi investor |
| **URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMERINTAH BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA** | | | | | | |
| 1. Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional tahun 2024 adalah 51 orang<br>2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial tahun 2024 adalah 150 organisasi<br>3. Peningkatan prestasi olahraga (nasional, internasional) tahun 2024 adalah 67 medali | 1. Belum optimalnya peran pemuda dalam Pembangunan.<br>2. Belum optimalnya prestasi pemuda dan olah raga. | - | Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's):<br>**Tujuan ke-3 :**<br>Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia<br>**Tujuan ke-8 :**<br>Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, | **Asta Cita ke-4**:<br>Memperkuat Pembangunan sumber Daya Manusia (SDM) Sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, kesetaraan gender, serta Penguatan peran perempuan, Pemuda, Generasi Milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | **Misi ke-3 Provinsi Sumbar :**<br>Nagari/ desa sebagai basis kemajuan | 1. Masih belum meratanya kualitas pendidikan yang bermutu |

| POTENSI DAERAH | PERMASALAHAN | ISU KLHS | ISU LINGKUNGAN DINAMIS | | | ISU STRATEGIS DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| 4. Tingkat partisipasi pemuda dalam dalam kegiatan ekonomi mandiri tahun 2024 adalah 13,73% | | | kesempatan kerja dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua | | | |
| **URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK** | | | | | | |
| 1. Persentase kepuasan pengguna data statistic Tahun 2024 sebesar 85%<br>2. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah tahun 2024 adalah 100%<br>3. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah tahun 2024 adalah 100% | 4. Belum optimalnya pengelolaan satu data dan informasi daerah yang valid dan terintegrasi.<br>5. Belum optimalnya sistem informasi satu data yang dapat diakses masyarakat dengan mudah. | - | Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's):<br>**Tujuan ke-16 :**<br>Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. | **Asta Cita ke-7 :**<br>Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan | **Misi ke-8 Provinsi Sumbar :**<br>Tata kelola pemerintahan bersih dan pelayanan publik yang efektif | 1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan |
| **URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | |
| 1. Persentase penanganan cyber attack Tahun 2024 sebesar 85%<br>2. Tingkat keamanan informasi pemerintah Tahun 2024 sebesar 85% | 1. Tingkat Kesadaran terhadap Cyber Security masih rendah .<br>2. Belum optimalnya keamanan informasi pemerintah daerah. | | Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's):<br>**Tujuan 16 :**<br>Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan | **Asta Cita ke-7 :**<br>Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan | **Misi ke-8 Provinsi Sumbar :**<br>Tata kelola pemerintahan bersih dan pelayanan publik yang efektif | 1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan |

| POTENSI DAERAH | PERMASALAHAN | ISU KLHS | ISU LINGKUNGAN DINAMIS | | | ISU STRATEGIS DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| | | | inklusif di semua tingkatan. | | | |
| **URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | |
| 1. Persentase lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai nilai budaya tahun 2024 adalah 100 %<br>2. Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan tahun 2024 sebanyak 4 %<br>3. Terlestarikan cagar Budaya tahun 2024 sebanyak 100% | 1. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya.<br>2. Belum optimalnya promosi budaya daerah<br>3. Belum optimalnya peran kelembagaan adat dan budaya dalam pelestarian budaya. | - | Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's):<br>**Tujuan ke-8 :**<br>Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua | **Asta Cita ke-8 :**<br>Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | **Misi ke 6 Provinsi Sumbar :**<br>Membangun kehidupan beradat dan berbudaya berbasiakan agama, kearifan lokal melalui dukungan keluarga yang berkualitas | 1. Belum optimalnya implementasi nilai-nilai agama serta falsafah ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | |
| 1. Nilai tingkat kegemaran membaca Masyarakat Tahun 2024 : 66,18%<br>2. Indeks pembangunan literasi Masyarakat Tahun 2024 : 72,15% | 1. Belum optimalnya pemanfaat teknologi informasi dalam pengelolaan dan layanan perpustakaan<br>2. Rendahnya minat baca dan literasi masyarakat yang berdampak pada kurang optimalnya layanan perpustakaan. | - | Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's):<br>**Tujuan ke-4 :**<br>Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta menigkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua<br>**Tujuan ke-9 :**<br>Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong Inovasi.<br>**Tujuan ke-16 :** | **Asta Cita ke-4 :**<br>Memperkuat Pembangunan sumber Daya Manusia (SDM) Sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, kesetaraan gender, serta Penguatan peran perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | **Misi ke-8 Provinsi Sumbar :**<br>Tata kelola pemerintahan bersih dan pelayanan publik yang efektif | 1. Masih belum meratanya kualitas pendidikan yang bermutu |

| POTENSI DAERAH | PERMASALAHAN | ISU KLHS | ISU LINGKUNGAN DINAMIS | | | ISU STRATEGIS DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| | | | Menguatkan masyarakat yang Inklusif dan damai Untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untul semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. | | | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | |
| 1. Indek Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 : 73,81%<br>2. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja. alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan) Tahun 2024 : 70,04%<br>3. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara. pemerintahan. pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat Tahun 2024 : 100% | 1. Belum optimalnya sistem pengelolaan arsip secara tertib sesuai dengan kaidah kearsipan.<br>2. Masih rendahnya penelusuran dan penyelamatan arsip bernilai sejarah. | - | Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's):<br>**Tujuan ke-4 :**<br>Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta menigkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua<br>**Tujuan ke-16**<br>Menguatkan masyarakat yang Inklusif dan damai Untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untul semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. | **Asta Cita ke-7 :**<br>Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan | **Misi ke-8 Provinsi Sumbar :**<br>Tata kelola pemerintahan bersih dan pelayanan publik yang efektif | 1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan |
| **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | |

| POTENSI DAERAH | PERMASALAHAN | ISU KLHS | ISU LINGKUNGAN DINAMIS | | | ISU STRATEGIS DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| **URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | |
| 1. Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi pada tahun 2024 sebanyak 576,85 ton<br>2. Produksi Ikan konsumsi tahun 2024 sebanyak 565,4 ton | 1. Alih fungsi lahan budidaya perikanan.<br>2. Masih rendahnya produktifitas sektor perikanan. | - | Isu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's)<br>**Tujuan ke-14 :**<br>Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan | **Asta Cita ke-2 :**<br>Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru | **Misi ke-2 Provinsi Sumbar :**<br>Lumbung pangan nasional dan ekonomi berkelanjutan | 1. Belum optimalnya pengembangan sektor strategis berbasis potensi lokal |
| **URUSAN PEMERINTAH BIDANG PARIWISATA** | | | | | | |
| 1. Persentase Peningkatan Kunjungan wisatawan tahun 2024 sebanyak 4,14 %<br>2. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan tahun 2024 sebanyak 79,91%<br>3. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten / kota tahun 2024 sebanyak 4,14 %<br>4. Tingkat Hunian Akomodasi tahun 2024 sebanyak 11,55 %<br>5. Kontribusi tahun sektor pariwisata terhadap PAD sebanyak 0,56 % | 1. Belum optimalnya pengembangan wisata daerah.<br>2. Belum tersedianya wisata unggulan daerah.<br>3. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif daerah. | - | Isu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's)<br>**Tujuan ke-8 :**<br>Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. | **Asta Cita ke-3 :**<br>Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan Industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | **Misi ke-7 Provinsi Sumbar :**<br>Tingkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif untuk UMKM | 1. Belum optimalnya pengembangan sektor strategis berbasis potensi lokal<br>2. Belum optimalnya pengelolaan potensi daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah |
| **URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANIAN** | | | | | | |

| POTENSI DAERAH | PERMASALAHAN | ISU KLHS | ISU LINGKUNGAN DINAMIS | | | ISU STRATEGIS DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| 1. Produksi padi tahun 2024 sebanyak 41.669,46 ton<br>2. Populasi sapi sebanyak 2.951 ekor<br>3. Produktivitas pertanian per hektar per tahun (Produktivitas padi) sebanyak 5,85 ton<br>4. Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular sebanyak 62,5% | 1. Belum optimalnya produktifitas hasil pertanian.<br>2. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan lahan pertanian.<br>3. Masih rendahnya tingkat pendapatan petani. | | Isu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's)<br>**Tujuan ke-2 :**<br>Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahana pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan | **Asta Cita ke-2 :**<br>Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru | **Misi ke-2 Provinsi Sumbar :**<br>Lumbung Pangan Nasional dan ekonomi berkelanjutan | 1. Belum optimalnya pengembangan sektor strategis berbasis potensi lokal |
| **URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | |
| 1. Konstribusi sector perdagangan terhadap PDRB tahun 2024 adalah 25,13%<br>2. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) tahun 2024 adalah 51,72%<br>3. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku tahun 2024 adalah 50,48% | 1. Belum optimalnya penataan dan pengelolaan pasar serta pedagang kaki lima.<br>2. Belum optimalnya pengelolaan asset pasar pertokoan.<br>3. Masih lemahnya Perlindungan Konsumen.<br>4. Masih rendahnya nilai eksport produk dan komoditas perdagangan. | - | Isu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's)<br>**Tujuan ke-17 :**<br>Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan | **Asta Cita ke-5 :**<br>Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | **Misi ke-4 Provinsi Sumbar :**<br>Sumatera Barat pusat perdagangan dan bisnis sumatera bagian barat | 1. Belum optimalnya pengembangan sektor strategis berbasis potensi lokal |
| **URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | |

| POTENSI DAERAH | PERMASALAHAN | ISU KLHS | ISU LINGKUNGAN DINAMIS | | | ISU STRATEGIS DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| 1. Persentase peningkatan nilai produksi tahun 20234 adalah 3,3%<br>2. Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota tahun 2024 adalah 1,87% | 1. Belum optimalnya pengembangan sektor-sektor strategis berbasis potensi lokal.<br>2. Masih rendahnya ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan.<br>3. Masih rendahnya penguasaan teknologi industri.<br>4. Belum optimalnya pengelolaan limbah industri. | - | Isu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's)<br><br>**Tujuan ke-9**<br>Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi | **Asta Cita ke-5** :<br>Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | **Misi ke 4 Provinsi Sumbar:**<br>Sumatera barat pusat perdagangan dan bisnis sumatera bagian barat | 1. Belum optimalnya pengembangan sektor strategis berbasis potensi lokal |
| **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | |
| **UNSUR KESEKRETARIATAN DAERAH** | | | | | | |
| 1. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan secara kompetitif tahun 2024 adalah 89,24%<br>2. Nilai IKM tahun 2024 adalah 89,65%<br>3. Indeks Reformasi Hukum tahun 2024 adalah 91,58%<br>4. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2024 adalah 91,58% | 1. Belum optimalnya tata kelola Pemerintahan yang akuntabel.<br>2. Belum optimalnya penataan organisasi dan tata laksana pemerintahan.<br>3. Belum optimalnya penguatan | - | Isu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) :<br>**Tujuan ke-16**:<br>Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. | **Asta Cita ke-7** :<br>Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan | **Misi ke-8 Provinsi Sumbar :**<br>Tata kelola pemerintahan bersih dan pelayanan publik yang efektif | 1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan<br>2. Belum optimalnya transparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan birokrasi |

| POTENSI DAERAH | PERMASALAHAN | ISU KLHS | ISU LINGKUNGAN DINAMIS | | | ISU STRATEGIS DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| | pembinaan lembaga keagamaan dan peningkatan kualitas mental masyarakat yang inklusif dan berkarakter. | | | | | |
| **UNSUR KESEKRETARIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** | | | | | | |
| 1. Nilai IKM tahun 2024 adalah 84.85<br>2. Persentase Ranperda yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100% | 1. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.<br>2. Belum optimalnya peran DPRD dalam penataan produk hukum. | - | Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's):<br>**Tujuan ke-16 :**<br>Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. | **Asta Cita ke-7** : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan | **Misi ke-8 Provinsi Sumbar :**<br>Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif | 1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan |
| **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | |
| **UNSUR PERENCANAAN** | | | | | | |
| 1. Indek Kualitas Perencanaan tahun 2024 adalah 90,5% | 2. Belum optimalnya kualitas perencanaan.<br>3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi dalam perumusan perencanaan pembangunan | - | Isu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's)<br>**Tujuan ke-16**:<br>Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang | **Asta Cita ke-7** : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan | **Misi ke-8 Provinsi Sumbar :**<br>Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif | 1. Belum optimalnya transparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan birokrasi |

| POTENSI DAERAH | PERMASALAHAN | ISU KLHS | ISU LINGKUNGAN DINAMIS | | | ISU STRATEGIS DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| | | | efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. | | | |
| **UNSUR KEUANGAN** | | | | | | |
| 1. Opini laporan keuangan pemerintah daerah dari BPK tahun 2024 adalah WTP<br>2. Nilai IPKD tahun 2024 adalah 71,75<br>3. Rasio PAD (thdp PAD Non Migas) tahun 2024 adalah 18,41%<br>4. Manajemen Aset tahun 2024 ada<br>5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) tahun 2024 adalah 85,87%<br>6. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD tahun 2024 adalah 7,36%<br>7. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD tahun 2024 adalah 6,51%<br>8. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya tahun 2024 adalah 11,45% | 1. Belum optimalnya pengelolaan asset daerah.<br>2. Terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan daerah.<br>3. Belum optimalnya penerimaan pendapatan asli daerah. | - | Isu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) :<br>**Tujuan ke 9 :**<br>Membangun infrastruktur yang Tangguh, meningkatkan inklusif dan keberlanjutan serta mendorong inovasi.<br>**Tujuan ke 17:**<br>Menguatkan sarana dan merevitalisasi kemitraan global untuk Pembangunan berkelanjutan | **Asta Cita ke-7** :<br>Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan | **Misi ke-8 Provinsi Sumbar :**<br>Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif | 1. Belum optimalnya transparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan birokrasi<br>2. Belum optimalnya pengelolaan potensi daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah |
| **UNSUR KEPEGAWAIAN** | | | | | | |
| 1. Indeks merit sistem tahun 2024 adalah 0,84<br>2. Rasio pegawai pendidikan tinggi dan | 1. Belum optimalnya penerapan merit system. | - | Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's ): | **Asta Cita ke-7** :<br>Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta | **Misi ke-8 Provinsi Sumbar :** | 1. Belum optimalnya transparasi dan akuntabilitas |

| POTENSI DAERAH | PERMASALAHAN | ISU KLHS | ISU LINGKUNGAN DINAMIS | | | ISU STRATEGIS DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| menengah/ dasarl (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) tahun 2024 adalah 81,02<br>3. Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) tahun 2024 adalah 29,29%<br>4. Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) tahun 2024 adalah 27,39<br>5. Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasarl (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) tahun 2024 adalah 81,02%<br>6. Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) tahun 2024 adalah 29,29<br>7. Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) tahun 2024 adalah 27,39% | 2. Belum optimalnya manajemen pengelolaan ASN. | | **Tujuan ke-16**: Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. | memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan | Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif | penyelenggaraan birokrasi |
| **UNSUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | |
| 1. Indeks Profesionalisme ANS tahun 2024 adalah 60,82% | 2. Belum optimalnya pengembangan karir dan pelatihan yang terstruktur | - | Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's):<br>**Tujuan ke-16** : Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai | **Asta Cita ke-7** : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan | **Misi ke-8 Provinsi Sumbar :** Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif | 1. Belum optimalnya transparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan birokrasi |

| POTENSI DAERAH | PERMASALAHAN | ISU KLHS | ISU LINGKUNGAN DINAMIS | | | ISU STRATEGIS DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| | 3. Belum optimalnya pengembangana SDM ASN | | untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. | pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan | | |
| **UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | |
| 1. Kategori tingkat inovasi daerah tahun 2024 adalah *inovatif* | 2. Kebijakan kelitbangan yang belum sepenuhnya mendukung inovasi dan riset terapan.<br>3. Belum optimalnya peran perangkat daerah dalam pengembangan inovasi daerah.<br>4. Belum terintegrasinya pelaksanaan kajian pembangunan antar perangkat daerah. | - | Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) :<br>**Tujuan ke-16** : Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. | **Asta Cita ke-7** : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan | **Misi ke-8 Provinsi Sumbar** : Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif | 1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan |
| **UNSUR PENGAWASAN** | | | | | | |
| 1. Persentase Perangkat Daerah yang meningkat nilai evaluasi Internal dan Eksternal tahun 2024 sebesar 100<br>2. Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) tahun 2024 adalah 3 | 1. Belum optimalnya pengawasan APIP<br>2. Belum optimalnya penerapan SPIP.<br>3. Belum optimalnya penguatan kapasitas APIP. | - | Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's):<br>**Tujuan ke-16** : Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, | **Asta Cita ke-7 :** Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyeludupan | **Misi ke-8 Propinsi Sumbar** : Tata Kelola Pemerintahan bersih dan Pelayanan Publik yang efektif | 1. Belum optimalnya transparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan birokrasi |

| POTENSI DAERAH | PERMASALAHAN | ISU KLHS | ISU LINGKUNGAN DINAMIS | | | ISU STRATEGIS DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| 3. Maruritas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tahun 2024 adalah 3<br>4. Nilai AKIP Kota Komponen Evaluasi internal tahun 2024 sebesar 18,18% | | | dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. | | | |
| **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | |
| Persentase Lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK,RT/RW ) yang aktif tahun 2024 adalah 100% | 1. Belum optimalnya pelayanan public di kelurahan dan kecamatan<br>2. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan peran aktif Lembaga kemasyarakatan<br>3. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan<br>4. Belum lengkapnya sarana prasarana pelayanan | | Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's):<br>**Tujuan ke-16**:<br>Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.<br>**Tujuan ke-17:**<br>Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk Pembangunan berkelanjutan | **Asta Cita ke-6 :**<br>Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan | **Misi ke-3 Provinsi Sumbar :**<br>Nagari/Desa sebagai basis kemajuan | 1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan |
| **URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | |
| 1. Persentase penanganan konflik sosial yg terjadi di tengah masyarakat Tahun 2024 adalah 100% | 1. Belum optimal upaya penanganan potensi konflik sosial<br>2. Masih rendahnya pengawasan dan | - | Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's):<br>**Tujuan ke-10:**<br>Mengurangi kesenjangan Intra dan antarnegara | **Asta Cita ke-1:**<br>Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Azazi Manusia (HAM) | **Misi ke-6 Provinsi Sumbar :**<br>Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal melalui | 1. Masih adanya gangguan ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat |

| POTENSI DAERAH | PERMASALAHAN | ISU KLHS | ISU LINGKUNGAN DINAMIS | | | ISU STRATEGIS DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| 2. Persentase parpol dan ormas yang aktif Tahun 2024 adalah 90,72% | pendampingan organisasi masyarakat.<br>3. Belum optimalnya peran serta ormas dalam Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat<br>4. Rendahnya pengawasan terhadap izin tinggal WNA | | **Tujuan ke-16 :**<br>Menguatkan masyarakat yang Inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyedliakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. | | Dukungan Keluarga yang Berkualitas | |

## 2). RUMUSAN ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah suatu kondisi atau hal baik suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan, artinya bahwa jika suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan kota sesuai dengan kondisi objektif daerah dan perkembangan pelaksanaan pembangunan yang sudah berjalan sampai dengan saat ini, sehingga dapat digambarkan beberapa isu-isu strategis yang memerlukan perhatian dalam pelaksanaan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029.

Perumusan isu strategis RPJMD dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis dari berbagai sumber diantaranya yaitu permasalahan pembangunan Daerah, dinamika internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi pembangunan Daerah serta KLHS RPJMD. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan RPJMD karena dari tahap ini akan diketahui tantangan utama yang harus diselesaikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta seluruh Perangkat Daerah sampai tahun 2029.

Selain memperhatikan lingkungan strategis, dalam penetuan isu strategis pembagunan daerah juga memperhatikan isu global, nasional, maupun regional yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.100** Isu Pembangunan Global, Nasional, dan Daerah

| ISU GLOBAL (SDG'S) | ISU NASIONAL (RPJMN 2025-2029) | ISU DAERAH (RPJPD 2025-2045) |
|---|---|---|
| 1. Kemiskinan<br>2. Pangan dan Gizi<br>3. Kesehatan<br>4. Pendidikan<br>5. Gender<br>6. Air Bersih<br>7. Energi<br>8. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja<br>9. Infrastruktur<br>10. Kesenjangan<br>11. Kota dan Pemukiman | 1. Memperkokoh ideologi pancasila dan Hak Azazi Manusia (HAM)<br>2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru<br>3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan | 1. Pelayanan dasar Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial,<br>2. Produktifitas ekonomi dan pusat pusat pertumbuhan ekonomi,<br>3. Kelembagaan tepat fungsi, kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, implementasi SPBE, pemberdayaan |

| ISU GLOBAL (SDG'S) | ISU NASIONAL (RPJMN 2025-2029) | ISU DAERAH (RPJPD 2025-2045) |
|---|---|---|
| Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan<br>Perubahan Iklim<br>Sumberdaya Kelautan<br>Ekosistem Daratan<br>Masyarakat Inklusif dan Damai, Akses Keadilan dan Membangun Kelembagaan<br>Kemitraan Global | meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangankan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi<br>4. Memperkuat pembangunan sumber daya (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z). dan penyandang disabilitas<br>5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri<br>6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan<br>7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan<br>8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harminis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | masyarakat sipil, penataan aset dan pendanaan pembangunan,<br>4. Penegakan hukum, stabilitas keamanan dan ekonomi daerah,<br>5. Ketahanan agama, sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar Pembangunan,<br>6. Pembangunan wilayah sesuai potensi dan kearifan lokal,<br>7. Infrastruktur layanan dasar berkelanjutan dan aksesibilitas yang terintegrasi, serta<br>8. Konsistensi RPJPN dan RPJPD. |

Berdasarkan hasil telaahan permasalahan dan potensi berdasarkan kinerja existing dan memperhatikan capain indikator SDG's untuk

pemenuhan target pada tujuan, maka dapat dirumuskan isu strategis RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Masih belum meratanya kualitas pendidikan yang bermutu (Peningkatan pemerataan kualitas pendidikan).
2. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat dan perilaku hidup sehat (Peningkatan derajat kesehatan masyarakat).
3. Masih tingginya tingkat kemiskinan (Percepatan penanggulangan kemiskinan).
4. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan (Peningkatan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak).
5. Masih tingginya kesenjangan pendapatan antar masyarakat (Peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat).
6. Belum optimalnya pengembangan sektor strategis berbasis potensi lokal (Peningkatan pengembangan sektor strategis berbasis potensi lokal).
7. Belum optimalnya iklim investasi dalam mendukung kepastian berusaha bagi investor (Peningkatan iklim investasi dalam mendukung kepastian berusaha bagi investor).
8. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan (Peningkatan kualitas pelayanan publik).
9. Belum optimalnya transparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan birokrasi (Peningkatan transparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan birokrasi).
10. Belum optimalnya pengelolaan potensi daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah (Peningkatan pendapatan daerah).
11. Masih adanya gangguan ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat (Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat).
12. Belum optimalnya implementasi nilai-nilai agama serta falsafah ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat (Peningkatan penerapan nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat).
13. Masih belum optimalnya pengelolaan persampahan dan lingkungan (Peningkatan kualitas lingkungan hidup).
14. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur berkelanjutan (Peningkatan pembangunan infrastruktur berkelanjutan).

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai isu dalam pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, memperhatikan janji-janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka isu strategis dalam lima tahun mendatang adalah:

1. Masih belum meratanya kualitas pendidikan yang bermutu

Pemerataan Kualitas Pendidikan di Kota Payakumbuh, Pendidikan merupakan investasi masa depan terhadap masyarakat. Pendidikan yang baik dan berkualitas akan mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing yang dibutuhkan dunia kerja namun juga dapat menciptakan usaha atau lapangan kerja baru baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat lainnya. Peningkatan kualitas manusia tidak hanya menyangkut kualitas fisik atau intelektual saja. Kualitas psikologi atau spiritual dari manusia juga perlu ditingkatkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat.

Pembangunan sektor pendidikan difokuskan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi seluruh lapisan Masyarakat. Pendidikan agama tidak terpisahkan dari pendidikan umum dalam menciptakan manusia yang berkualitas dan berkepribadian luhur/ berkarakter atau dapat diartikan pendidikan umum memberikan peningkatan kualitas intelektual dan kreatifitas dari manusia, sedangkan pendidikan keagamaan akan menciptakan etika atau adab serta kematangan psikologi manusia dalam mengambil keputusan, sehingga perwujudan investasi manusia dalam pendidikan diperlukan tidak hanya menyangkut kemampuan umum namun juga kemampuan spiritual/kepribadian yang dilakukan melalui pendidikan keagamaan dan penguatan karakter berbudi luhur, dimana pendidikan ini tidak hanya menjamin manusia yang berpengetahuan tinggi namun juga bermartabat. Selain itu, melihat kondisi lingkungan di Kota Payakumbuh saat ini dan kemungkinan yang akan terjadi dalam jangka panjang, pengelolaan persampahan perlu juga dijadikan bagian dari pendidikan dari anak usia dini.

Hal ini sangat berarti dalam menanamkan rasa kepedulian terhadap lingkungan dan akan membantu dalam mengatasi permasalahan persampahan kedepannya. Selain itu dengan menambahkan pendidikan dalam pengelolaan persampahan tersebut, juga akan merangsang pemikiran masyarakat semenjak dini untuk membuka alternatif baru dalam berusaha ke depannya, sehingga setiap pendidikan yang diberikan akan menghasilkan peningkatan kapasitas, kematangan psikologi serta peluang usaha baru sekaligus menjaga lingkungan. Oleh karenanya melihat kondisi dan dinamika dunia yang selalu dinamis, pemerintah perlu memikirkan konteks pendidikan masyarakat dalam skala formal, informal dan non formal. Pendidikan formal yaitu pendidikan yang diterima masyarakat di lembaga sekolah, baik negeri, maupun swasta. Pendidikan informal yaitu pendidikan yang diterima masyarakat di keluarga dan lingkungannya. Sedangkan pendidikan non formal adalah pendidikan yang diterima masyarakat melalui pelaksanaan pelatihan dan pemberdayaan. Bentuk pendidikan yang dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk pengembangan pendidikan vokasi/keterampilan yang dapat membantu masyarakat peluang kerja

dan lapangan usaha, sehingga pendidikan tidak hanya dijadikan beban, namun pada akhirnya akan menjadi investasi penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat baik Kota Payakumbuh khususnya dan Indonesia pada umumnya. Terkait pendidikan formal perlu pembenahan manajemen dan tata kelola internal pendidikan, baik sekolah negeri, swasta, maupun sekolah yang tidak berada langsung di bawah Dinas Pendidikan, karena secara harfiah urusan pendidikan adalah salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan pemerintah daerah, dan ini berhak diterima seluruh masyarakat. Secara keseluruhan ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah daerah sesuai ketentuan perundangan.

2. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat dan perilaku hidup sehat

   Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan, Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan, hal ini terbukti dengan masuknya kesehatan sebagai komponen dalam penentuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan data yang ada, komponen IPM bidang kesehatan Kota Payakumbuh masih berada dibawah angka rujukan nasional terutama pada AKI, AKB dan Gizi. Oleh karenanya upaya peningkatan kesehatan tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah tanpa dukungan dan perubahan pola hidup sehat dari masyarakat. Pola hidup sehat ini merupakan suatu perilaku yang dapat diwujudkan melalui tindakan preventif dan promotif dengan mengalahkan program PHBS yang dilakukan oleh pemerintah dan didukung oleh masyarakat melalui saling mengingatkan sesama masyarakat secara terus menerus.

   Pemerintah selaku institusi yang memberikan layanan kepada masyarakat sembari melakukan perubahan pola hidup masyarakat ke hidup sehat, juga perlu memberikan layanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat baik itu melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, kapasitas dan karakter tenaga medis dan tenaga administrasi kesehatan serta regulasi yang mengatur pelayanan kesehatan yang juga tentunya disertai pengawasan yang terintegrasi terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan untuk mewujudkan layanan kesehatan yang *exellence*.

   Perkembangan teknologi dan masih adanya kebiasaan buruk masyarakat seperti merokok, sanitasi tidak sehat, LGBT, penyalahgunaan narkoba dan lainnya yang memungkinkan pengaruh buruk tersebut mudah diakses secara konstan oleh siapapun tanpa pandang usia dalam jangka panjang akan menjadi permasalahan kesehatan lebih besar jika tidak ditangani segera. Edukasi dan pembinaan yang melibatkan berbagai unsur di Kota Payakumbuh menyangkut kesehatan fisik dan psikologi masyarakat akan banyak

memberikan pengaruh dalam penciptaan kualitas kesehatan dan menganulir kebiasaan buruk tersebut.

6. Masih tingginya tingkat kemiskinan

Masih tingginya kemiskinan di Kota Payakumbuh mencerminkan bahwa banyak masyarakat yang masih menghadapi kesulitan ekonomi dan belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Kondisi ini menunjukkan adanya berbagai tantangan dalam pertumbuhan ekonomi, distribusi kesejahteraan, serta akses terhadap peluang kerja di sektor formal maupun informal. Keterbatasan lapangan pekerjaan, rendahnya keterampilan tenaga kerja, serta kurangnya investasi di bidang industri menjadi faktor utama yang melemahkan kondisi ini. Selain itu, ketimpangan akses terhadap pendidikan dan pelatihan kerja juga menyebabkan banyak masyarakat tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dampak dari tingginya angka kemiskinan dan kemiskinan ini tidak hanya dirasakan secara ekonomi, tetapi juga memicu berbagai permasalahan sosial, seperti meningkatnya angka pekerja informal, rendahnya daya beli masyarakat, serta meningkatnya risiko kriminalitas.

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif, termasuk peningkatan investasi, pengembangan keterampilan tenaga kerja, serta penguatan sektor UMKM untuk menciptakan lebih banyak peluang kerja yang berkualitas. Meskipun angka kemiskinan di Kota Payakumbuh selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, tetapi secara angka absolut jumlah penduduk miskin di Kota Payakumbuh masih cukup tinggi. Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi dan krusial yang harus ditangani oleh berbagai kebijakan sektoral yang saling bersinergi. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui tiga strategi yakni, perlindungan sosial yang komprehensif; penyediaan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar; dan penyediaan mata pencarian yang layak serta berkelanjutan. Pola permasalahan kemiskinan yang relatif sama yaitu dimana jumlah penduduk miskin dominan dipengaruhi pada dimensi infrastruktur dasar dan ketenagakerjaan, namun dimensi kesehatan dan pendidikan juga penting untuk diintervensi karena dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Pendampingan pelaksanaan program belum memadai, baik dari sisi kualitas sumber daya manusia maupun dari sisi dukungan pemerintah daerah.

Upaya peningkatan jaminan sosial masyarakat menjadi suatu hal yang mesti dilakukan Pemerintah Daerah agar kesejahteraan masyarakat tidak semakin buruk. Penjaminan sosial yang dilakukan pemerintah harus mulai difikirkan ke arah stimulan dan pemberdayaan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat serta

kebijakan yang akan memberikan angin segar bagi masyarakat dalam berusaha dan beraktifitas, sehingga dalam jangka panjang masyarakat itu sendiri dapat berdaya dan berdiri diatas kakinya sendiri. Pemberian jaminan sosial dalam rangka perlindungan masyarakat tersebut tentunya perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, seperti Jaminan kesehatan, Jaminan pendidikan, Jaminan keselamatan kerja dll dalam rangka mengurangi beban masyarakat.

7. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan.

   Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan perlu ditingkatkan, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Meskipun telah tersedia berbagai forum partisipatif seperti Musrenbang di tingkat kelurahan hingga kota, namun tingkat partisipasi aktif masyarakat belum merata. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan dalam pembangunan daerah serta keterbatasan kapasitas kelembagaan masyarakat seperti LPM, Karang Taruna, dan kelompok swadaya lainnya.

   Selain itu, tingkat kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi lokal, termasuk potensi ekonomi berbasis UMKM, pertanian perkotaan, dan industri rumah tangga, masih belum optimal. Keterbatasan akses terhadap informasi, pelatihan, permodalan, dan pendampingan menjadi hambatan dalam mendorong tumbuhnya inisiatif lokal secara mandiri. Sebagai kota dengan dinamika sosial ekonomi yang cukup tinggi dan sumber daya manusia yang potensial, Payakumbuh memiliki peluang besar untuk memperkuat pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Dibutuhkan strategi yang lebih terfokus untuk memperkuat kapasitas masyarakat, memperluas akses terhadap sumber daya pembangunan, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal guna mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Payakumbuh.

   Kota Payakumbuh sebagai salah satu daerah dengan dinamika sosial yang cukup tinggi terus menghadapi tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap anak. Meskipun berbagai kebijakan dan program telah dijalankan, seperti pembentukan Forum Anak, Pusat Pembelajaran Keluarga, serta kampanye stop kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun masih ditemukan berbagai permasalahan krusial. Partisipasi perempuan dalam sektor publik dan pengambilan keputusan, khususnya di bidang pemerintahan, ekonomi, dan pembangunan, masih belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh masih adanya stereotip peran gender serta keterbatasan akses perempuan terhadap

pendidikan keterampilan, modal usaha, dan jaringan ekonomi. Selain itu, perlindungan anak juga menghadapi tantangan, ditandai dengan masih adanya kasus kekerasan terhadap anak, eksploitasi, serta kurangnya pemenuhan hak anak atas pendidikan, pengasuhan yang layak, dan ruang tumbuh yang aman.

Keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap isu kesetaraan dan perlindungan juga menjadi faktor penghambat. Padahal, perempuan dan anak merupakan kelompok strategis dalam pembangunan jangka panjang. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih integratif dan partisipatif dalam memberdayakan perempuan dan melindungi anak di Kota Payakumbuh. Hal ini meliputi penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kapasitas ekonomi dan pendidikan perempuan, penyediaan layanan pengaduan dan pendampingan yang responsif, serta peningkatan edukasi masyarakat terkait hak-hak perempuan dan anak.

Pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan perempuan dan anak dikarenakan mereka merupakan kelompok yang rentan terhadap kasus-kasus penganiayaan, pelecehan dan pengeksploitasian selain itu perempuan dan anak juga merupakan ujung tombak dalam menciptakan kualitas SDM yang handal dan menjamin masa depan yang lebih baik kedepannya. Hal ini dikarenakan pendidikan di rumah lebih banyak akan diakomodir oleh perempuan, dan anak-anak merupakan generasi penerus kemajuan atau kemunduran suatu wilayah kedepannya, apalagi dengan adanya kemajuan teknologi yang memungkinkan pengaksesan informasi tidak hanya yang baik namun juga dapat mengubah perilaku masyarakat.

8. Masih tingginya kesenjangan pendapatan antar masyarakat akibat belum meratanya akses terhadap sumber daya ekonomi, lapangan kerja, serta kesempatan berusaha

   Kota Payakumbuh sebagai kota dengan potensi sektor perdagangan, jasa, pertanian perkotaan, dan UMKM yang cukup berkembang, menghadapi tantangan dalam mewujudkan pemerataan pendapatan masyarakat secara berkeadilan. Meskipun angka kemiskinan relatif rendah dibandingkan rata-rata provinsi, namun kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat dan antar wilayah di dalam kota masih terlihat. Sebagian besar pelaku ekonomi di Payakumbuh masih bergerak di sektor informal, dengan produktivitas dan pendapatan yang belum stabil. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah mengalami keterbatasan dalam mengakses peluang ekonomi, pendidikan vokasi, pembiayaan usaha, serta pendampingan bisnis. Hal ini didukung oleh ketimpangan penguasaan aset ekonomi dan

belum meratanya distribusi infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi seperti pasar rakyat, jalan produksi, dan akses digital.

Selain itu, program pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang ada belum sepenuhnya menyasar kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga, pemuda putus sekolah, dan difabel. Akibatnya, sebagian kelompok masyarakat belum merasakan hasil pembangunan secara merata, dan potensi daerah belum termanfaatkan secara maksimal.

Kota Payakumbuh perlu memperkuat strategi pembangunan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal. Upaya ini dapat dilakukan melalui perluasan akses masyarakat terhadap pelatihan keterampilan, penguatan UMKM, dukungan permodalan, pembangunan infrastruktur ekonomi rakyat, serta peningkatan sinergi lintas sektor dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

9. Belum optimalnya pengembangan sektor strategis berbasis potensi lokal.

   Kota Payakumbuh memiliki berbagai potensi lokal yang dapat dikembangkan menjadi sektor strategis unggulan, seperti industri olahan pangan, UMKM, pertanian perkotaan (urban farming), peternakan, serta sektor pariwisata berbasis budaya dan kuliner lokal. Keunggulan geografis sebagai kota penyangga jalur perdagangan antara provinsi serta identitas budaya Minangkabau yang kuat, menjadi modal besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.

   Namun, hingga saat ini pengembangan sektor-sektor strategis tersebut belum optimal. UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses permodalan, teknologi produksi, sertifikasi produk, serta pemasaran yang masih bersifat konvensional. Begitu juga dengan sektor pertanian dan peternakan, yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan kota, namun terkendala oleh alih fungsi lahan, rendahnya regenerasi petani, dan kurangnya hilirisasi produk pertanian. Sementara itu, sektor pariwisata yang berpotensi tumbuh, terutama di bidang wisata kuliner dan budaya, belum terkelola secara terpadu dan belum dikemas menjadi produk wisata yang menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Kurangnya promosi dan infrastruktur pendukung turut memperlambat perkembangan sektor ini.

   Permasalahan lain adalah belum adanya sinergi kuat antara pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas lokal dalam mengembangkan potensi-potensi tersebut secara berkelanjutan dan kompetitif.

Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan strategis dan kolaboratif untuk mendorong penguatan sektor strategis berbasis potensi lokal di Payakumbuh. Langkah tersebut dapat berupa fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku usaha, dukungan teknologi dan inovasi, pengembangan kawasan ekonomi lokal, serta promosi potensi unggulan secara digital dan berkelanjutan.

10. Belum optimalnya iklim investasi dalam mendukung kepastian berusaha bagi investor

    Kota Payakumbuh memiliki potensi strategis untuk menarik investasi, terutama di sektor industri kecil menengah (IKM), pengolahan hasil pertanian, perdagangan, jasa, dan pariwisata berbasis budaya dan kuliner Minangkabau. Letak geografis yang strategis, berada pada jalur penghubung antar kabupaten/kota di Sumatera Barat, memberikan keunggulan dalam aksesibilitas dan distribusi barang dan jasa.

    Namun demikian, iklim investasi di Kota Payakumbuh masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah belum optimalnya sistem pelayanan perizinan dan kepastian regulasi, meskipun telah diterapkan sistem OSS (Online Single Submission). Proses perizinan terkadang masih memerlukan pendampingan manual, dan koordinasi antar instansi teknis belum sepenuhnya terintegrasi secara efisien.

    Selain itu, dukungan infrastruktur kawasan usaha seperti sentra industri, akses jalan produksi, dan utilitas dasar belum sepenuhnya mendukung kemudahan berusaha, terutama di wilayah pengembangan ekonomi baru. Minimnya promosi potensi daerah serta kurangnya informasi investasi yang terpublikasi secara digital dan terintegrasi juga menjadi penghambat dalam menarik minat investor dari luar daerah. Faktor lainnya adalah keterbatasan insentif dan fasilitasi investasi, seperti pembebasan lahan, insentif fiskal/non-fiskal, serta belum terbangunnya sistem satu pintu yang benar-benar efektif dalam mendampingi investor dari awal hingga pasca-penanaman modal.

11. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan

    Kota Payakumbuh terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sejumlah inovasi pelayanan telah mulai dikembangkan oleh Perangkat Daerah (PD), termasuk melalui digitalisasi sistem administrasi dan penggunaan aplikasi layanan publik.

Namun, tantangan terhadap kualitas dan kemudahan pelayanan publik masih cukup nyata. Pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Masih ditemukan keluhan terkait waktu pelayanan yang lambat, prosedur yang belum seragam antar unit layanan, serta kurangnya saluran pengaduan masyarakat yang responsif.

Dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), memang telah dilakukan digitalisasi pada beberapa sektor, seperti sistem perizinan melalui OSS, layanan administrasi kependudukan berbasis online, serta penyediaan informasi melalui website dan media sosial pemerintah. Akan tetapi, pemanfaatan TIK secara menyeluruh belum merata di seluruh PD, dan kapasitas SDM untuk mengelola sistem digital juga masih terbatas.

Selain itu, akses dan literasi digital masyarakat terutama di kalangan usia lanjut dan wilayah pinggiran kota juga menjadi tantangan dalam penerapan layanan publik berbasis digital. Hal ini berdampak pada efektivitas pemanfaatan layanan daring yang telah disediakan.

Untuk itu, perbaikan kualitas pelayanan publik di Kota Payakumbuh perlu diarahkan pada:

1. Penguatan standar pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat,
2. Pengembangan sistem layanan digital yang terintegrasi dan *user-friendly*,
3. Peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam pelayanan berbasis TIK,
4. Serta perluasan akses, literasi, dan pendampingan digital kepada masyarakat.

Langkah-langkah ini akan mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan inklusif, selaras dengan semangat reformasi birokrasi dan transformasi digital di tingkat daerah. Selain itu perwujudan *Good Governance,* Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi kehidupan masyarakat global dengan berbagai kemudahan beraktivitas yang diberikan, mulai dari ilmu pengetahuan, kemudahan bertransaksi baik itu perbankan maupun non perbankan, pelacakan lokasi dan sebagainya. Dengan adanya kemudahan tersebut, peningkatan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dalam upaya mewujudkan good governance berupa penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintahan berbasis elektronik atau dikenal dengan *e government* dapat memanfaatkan teknologi informasi melalui optimalisasi pemenuhan sarana dan prasarana SPBE, regulasi penguatan SPBE, kuantitas dan kualitas SDM aparatur negara. Penerapan e-government akan memberikan data yang terstruktur dan

akurat sehingga menghasilkan informasi yang valid, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu adanya kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia memastikan data yang diproduksi oleh produsen data berkualitas (sesuai standar, metadata baku dari pembina data dan dapat dimanfaatkan bersama) dengan menggabungkan antara data statistik dan data geospasial.

12. Belum optimalnya transparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan birokrasi

    Tata kelola pemerintahan yang akuntabel adalah sistem pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas dalam pemerintahan mencakup aspek pengelolaan keuangan negara, pelayanan publik, serta kebijakan yang dibuat berdasarkan prinsip keadilan dan efisiensi. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan yang menyebabkan tata kelola pemerintahan belum optimal.

    Untuk menjalankan pemerintahan yang handal diperlukan penempatan SDM aparatur sesuai kompetensi/profesional yang diwujudkan` melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sistem Negara (ASN) yang menempatkan sistem merit sebagai kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa memandang latar belakang politik, warna kulit, ras, agama, jenis kelamin, asal daerah, usia, ataupun kecamatan sehingga melindungi karir ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit. ASN sebagai pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah harus memiliki karakter customer oriented (berorientasi dalam melayani masyarakat), dimana seorang ASN harus mengedepankan kepentingan masyarakat dengan memberikan berbagai kemudahan dalam pelayanan, berempati tinggi dan merespon dengan baik setiap keluhan yang disampaikan oleh masyarakat yang dapat diterapkan melalui upskilling dan reskilling bagi ASN serta penetapannya melalui SOP yang harus diikuti dalam pelayanan kepada masyarakat. Selain manajemen pegawai, penataan terhadap organisasi pemerintah daerah melalui restrukturisasi perangkat daerah sesuai urusan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Restrukturisasi tersebut bertujuan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antar perangkat daerah sekaligus efektivitas dan efisiensi sumber daya daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pelaksanaan good governance tidak hanya menyangkut pada pemerintahan, namun merupakan konsensus yang dicapai oleh pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan

pemerintahan pada suatu wilayah. Untuk mewujudkan konsensus tersebut, disepakati koridor-koridor yang harus dipatuhi dan dijalankan yang telah terumus dalam aturan-aturan daerah dengan pemberlakuan bagi seluruh masyarakat di wilayah tersebut. Tujuan dari pembuatan aturan adalah untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat.

13. Belum optimalnya pengelolaan potensi daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah

    Kota Payakumbuh memiliki beragam potensi daerah yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor UMKM dan industri rumah tangga, pariwisata berbasis budaya dan kuliner, serta jasa dan perdagangan. Keunggulan Payakumbuh dalam produk olahan pangan seperti rendang, keripik, dan aneka jajanan khas, memberikan peluang besar untuk dikembangkan menjadi sumber ekonomi daerah yang berdaya saing.

    Namun demikian, hingga saat ini kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap PAD masih tergolong rendah. Salah satu penyebab utamanya adalah belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi lokal secara terstruktur dan berkelanjutan. Banyak potensi yang belum digarap secara maksimal karena keterbatasan data, kurangnya perencanaan sektoral yang berbasis potensi wilayah, serta minimnya dukungan kebijakan insentif. Selain itu, pengelolaan aset daerah dan retribusi daerah juga masih menghadapi tantangan, mulai dari pendataan aset yang belum lengkap dan akurat, pemanfaatan aset yang belum produktif, hingga lemahnya sistem pengawasan dan penagihan retribusi secara elektronik dan transparan.

    Dalam aspek tata kelola pajak daerah, masih ditemukan tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah serta terbatasnya inovasi dalam sistem pemungutan pajak daerah berbasis digital. Hal ini berdampak pada rendahnya optimalisasi PAD dari sektor pajak seperti pajak restoran, hotel, reklame, hiburan, dan PBB.

14. Masih adanya gangguan ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat

    Kota Payakumbuh sebagai kota yang berkembang dan beragam secara sosial, menghadapi tantangan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat (trantibmas) secara menyeluruh. Meskipun kondisi keamanan secara umum relatif kondusif, namun masih terdapat berbagai gangguan sosial yang muncul secara sporadis dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial masyarakat.

    Beberapa permasalahan yang mencuat antara lain adalah penyalahgunaan narkoba, pelanggaran ketertiban umum, serta

potensi konflik sosial di tengah masyarakat. Selain itu, pelanggaran terhadap peraturan daerah (Perda), seperti pelanggaran jam operasional usaha, kebersihan lingkungan, dan ketertiban di ruang publik juga masih sering terjadi yang menyebabkan terganggunya rasa aman dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, serta menurunnya kualitas kehidupan sosial di lingkungan perkotaan.

Permasalahan ini diperparah oleh masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya peran serta aktif tokoh masyarakat dan pemuda dalam menjaga ketertiban lingkungan, serta belum optimalnya upaya preventif dan represif dari aparat penegak Perda, dan instansi terkait lainnya. Kurangnya edukasi, sosialisasi hukum, dan forum komunikasi sosial juga turut memperlemah ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menyelesaikan konflik secara damai.

15. Belum optimalnya implementasi nilai-nilai agama serta falsafah ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat.

    Mulai Pudarnya Nilai ABS SBK, Hasil penelitian bidang Litbang Bappeda tahun 2019 menunjukkan bahwa, generasi muda pada tingkat pendidikan dasar dan menengah di Kota Payakumbuh tidak lagi dipengaruhi olah adat dan budaya Minang yang berlandaskan "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah". Ini terlihat dari tingkat kepatuhan mereka terhadap mamak kepala waris dan mamak dalam pasukuan. Kondisi ini harus diperbaiki dan direhabilitasi agar generasi muda kembali menyadari kondisi adat dan budaya yang melekat selama ini. Dimana secara budaya minangkabau telah dikenal "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Adat Bapaneh Syarak Balinduang", dengan kondisi "syara' balinduang", maka penerapannya dalam kehidupan sehari-hari digunakan istilah "Syarak mangato, adat mamakai". Ini diterapkan karena secara agama Islam, ada kitab suci Al-Qur'an dan Hadist yang tertulis dan berkekuatan hukum tetap sepanjang masa serta tidak bisa berubah. Sedangkan hukum adat hanya berupa hukum tidak tertulis yang disepakati oleh setiap nagari dan "barajo ka mufakaik". Maka hukum agama dianggap lebih tegas dan pasti. Maka upaya dan himbauan "kembali ke musajik/surau" menjadi seruan lama yang perlu di wujutkan kembali. Disamping itu, persoalan masih minimnya dokumentasi daerah terhadap sejarah dan budaya daerah menyebabkan nilai – nilai dan kekayaan budaya menjadi luntur dan tidak terwariskan ke generasi selanjutnya. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama agar budaya dan sejarah daerah tidak hilang begitu saja.

16. Masih belum optimalnya pengelolaan persampahan dan lingkungan

Sampah merupakan hasil sisa produksi atau konsumsi. Kondisi sampah yang selalu bertambah dan tidak dilakukan pengolahan kembali kedepannya akan menjadi problematika yang dihadapi ditambah lagi Kota Payakumbuh memiliki TPA Regional yang menjadi tempat pembuangan akhir sampah yang sudah hampir penuh kapasitas daya tampungnya. Menghadapi kondisi diatas perlunya pengelolaan Persampahan yang benar-benar dapat mengatasi persoalan Persampahan dan dampak lingkungan yang mungkin nantinya dapat terjadi. Pengelolaan Persampahan dapat dilakukan melalui pemilahan sampah dari rumah tangga yang dapat dilakukan melalui sosialisasi secara terus menerus, penerapan aturan melalui penerapan efek jera sampai akhirnya masyarakat terbiasa, dan pengolahan sampah melalui daur ulang, pembudidayaan magot, dan penguatan bank sampah sebagai garda terdepan bagi pemerintah dalam pengelolaan sampah sehingga sampah tidak lagi menjadi permasalahan dan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber keuangan bagi masyarakat kedepannya. Selain itu dari sisi Lingkungan hidup, berdasarkan hasil kajian KLHS RPJPD Kota Payakumbuh, Daya Dukung Daya Tampung dan IKLH di Kota Payakumbuh cenderung terus menurun. Kondisi ini jika terus dibiarkan, jangka panjang akan menjadi persoalan bagi berbagai sektor kehidupan yang ada di Kota Payakumbuh ditambah lagi dengan masih sedikitnya ruang terbuka hijau (RTH) yang ada di Kota Payakumbuh.

17. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur berkelanjutan

Ketersediaan Infrastruktur yang Berkelanjutan, Ketersediaan infrastruktur berkelanjutan merupakan suatu wadah yang akan memberikan kemudahan, ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan aktifitasnya. Kota Payakumbuh memiliki kewajiban untuk menyediakan infrastruktur yang memadai untuk masyarakatnya terutama dalam fasilitas umum perkotaan. Berdasarkan hasil analisis KLHS, ada beberapa fasilitas umum perkotaan yang harus dipenuhi ataupun dioptimalisasi oleh pemerintah Kota Payakumbuh diantaranya infrastruktur dasar (air minum, sanitasi, dan listrik), infrastruktur penunjang (jalan, irigasi, dan sungai), infrastruktur lainnya (pembangunan masjid agung, balai pertemuan), dan sebagainya.

# BAB III

# VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bagian ini disajikan visi, misi, program kerja, tujuan dan sasaran untuk pembangunan Kota Payakumbuh tahun 2025-2029, dan keselarasan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Visi, misi dan program kerja yang menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 merupakan visi, misi dan program kerja dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode tahun 2025-2029. Visi memberi gambaran masa depan yang ingin dicapai.

Tujuan merupakan langkah-langkah spesifik untuk mewujudkan visi tersebut dengan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dalam jangka waktu kepemimpinan Wali Kota bersama Wakil Wali Kota. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam jangka waktu berkala sehingga tujuan dapat diwujudkan. Sasaran adalah kondisi yang ingin dicapai dalam waktu lebih singkat dari waktu pencapaian tujuan dengan indikator kuantitatif dapat diukur sehingga dapat diukur dan dievaluasi. Sasaran ditetapkan agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian proses penyusunan tahapan kegiatan yang mengikutsertakan berbagai pemangku kepentingan, dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang ada. RPJMD Kota Payakumbuh 2025-2029 adalah penjabaran strategik dari rencana pelaksanaan periode I (2025-2029) dari RPJPD Kota Payakumbuh 2005-2025. Pada RPJPD Kota Payakumbuh periode I (2025-2029), penekanan pembangunan diarahkan untuk memperkuat pondasi pembangunan.

## 1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi merupakan satu gambaran kondisi atau keadaan yang diinginkan. Visi merupakan gabungan antara keinginan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi saat ini, sekaligus keinginan yang diharapkan untuk lebih baik di masa depan. Visi bukan satu impian, tetapi rumusan keinginan yang rasional dan dapat dicapai, yang telah mempertimbangkan sumber daya dan kondisi-kondisi yang ada dan dimiliki. Oleh karenanya, rumusan Visi harus tajam dan jelas, dan dapat diterjemahkan dalam beberapa variabel dan indikator yang terukur. Visi dan Misi RPJMD ini juga merupakan penjabaran pelaksanaan Visi dan Misi RPJPD serta harus selaras dengan visi dan misi RPJMN dan RPJMD Provinsi. Berikut diuraikan kembali secara singkat visi dan misi dalam RPJPD, RPJMD dan RPJMD Provinsi.

## A. VISI DAN MISI RPJPD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2045

Sesuai dengan Perda nomor 6 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045, maka visi, misi, sasaran, tujuan dan arah kebijakan Pembangunan untuk tahap pertama pelaksanaan RPJPD diuraikan sebagai berikut:

### 1). VISI DAN SASARAN VISI RPJPD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2045

Visi Jangka Panjang Kota Payakumbuh periode tahun 2025-2045 adalah **PAYAKUMBUH BERMARTABAT, MAJU DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI PERWUJUDAN ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH,** dengan sasaran visi sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.1** Sasaran Visi RPJPD Tahun 2025-2045 Tahap 1

| NO | SASARAN VISI | INDIKATOR | BASELINE 2025 | TAHAP I |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peningkatan Pendapatan Per Kapita | 1. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp Juta) | 64,25 | 156,62 |
| | | 2. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%) | 4,95 | 5,55 |
| 2 | Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan | 3. Tingkat Kemiskinan (%) | 3,98 – 4,51 | 3,28 – 3,84 |
| | | 4. Indeks Gini | 0,314 | 0,275 |
| | | 5. Pertumbuhan ekonomi (%) | 5,87 | 6,18 |
| 3 | Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 6. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 3,40 | 3,5 |
| | | 7. Indeks Inovasi Daerah | 48,74 | 56,05 |
| 4 | Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | 8. Indeks Pembangunan Manusia | 80,61 | 82,83 |
| | | 9. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rp/Tenaga Kerja) | 70 | 75 |
| 5 | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | 10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 68,37 | 69,43 |

**Sumber:** RPJPD Payakumbuh 2025-2045, 2024

### 2). MISI RPJPD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2045

Penjabaran misi RPJPD selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2** Misi RPJPD Tahun 2025-2045 Tahap 1

| VISI RPJPD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2045 | MISI RPJPD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2045 |
|---|---|
| Payakumbuh Bermartabat, **Maju Dan Berkelanjutan** Sebagai Perwujudan Adat | 1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang unggul, berkualitas dan berdaya saing melalui transformasi sosial |
| | 2. Mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan |

| VISI RPJPD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2045 | MISI RPJPD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2045 |
|---|---|
| Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah | 3. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan inovatif |
| | 4. Memantapkan keamanan masyarakat daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah |
| | 5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan sebagai perwujudan "ABS-SBK"; |
| | 6. Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan |
| | 7. Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan |
| | 8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah |

**Sumber:** RPJPD Payakumbuh 2025-2045, 2024

## 3). ARAH DAN SASARAN PEMBANGUNAN RPJPD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2045

Visi misi RPJPD ini selanjutnya dijabarkan dalam arah dan sasaran Pembangunan 5 tahunan pertama sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.3** Arah dan Sasaran Pokok Pembangunan dalam RPJPD Tahun 2025-2045 Tahap 1

| NO | SASARAN POKOK | ARAH PEMBANGUNAN (17) | INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (45) | TARGET | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | BASELINE 2025 | TAHAP I |
| 1 | Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat | Kesehatan untuk Semua | Usia Harapan Hidup (tahun) | 75,23 | 77,53 |
| | | | Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup) | 45 | 25 |
| | | | Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%) | 17,8 | 12,6 |
| | | | Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage*) (%) | 80 | 100 |
| | | | Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*) (%) | 94 | 96 |
| | | | Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%) | 99,05 | 100 |
| 2 | Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata | Pendidikan Berkualitas yang Merata | Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:<br>- Literasi membaca<br>- Numerasi | <br><br>56,14<br>42,40 | <br><br>60,84<br>48,25 |
| | | | Rata-rata Lama Sekolah (tahun) | 11,2 | 11,63 |
| | | | Harapan Lama Sekolah (tahun) | 14,54 | 14,91 |
| | | | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) | 18,50 | 20,26 |

| NO | SASARAN POKOK | ARAH PEMBANGUNAN (17) | INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (45) | TARGET | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | BASELINE 2025 | TAHAP I |
| | | | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) | 79,09 | 81,98 |
| 3 | Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif | Perlindungan Sosial yang Adaptif | Tingkat Kemiskinan (%) | 3,98 – 4,51 | 3,28 – 3,84 |
| | | | Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) | 31,38 | 43,39 |
| | | | Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%) | 29,17 | 34,17 |
| 4 | Berkembangnya IPTEK dan inovasi dalam meningkatkan produktivitas ekonomi | Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi | Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) | 4,95 | 5,55 |
| | | | Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum (%) | 3,6 | 3,98 |
| | | | Jumlah Tamu wisatawan mancanegara (hotel berbintang) (ribu orang) | 0 | 2,3 |
| | | | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi (%) | 3,595 | 3,963 |
| | | | Proporsi jumlah UKM non pertanian (%) | 13,146 | 13,636 |
| | | | Proporsi jumlah IKM (%) | 3,43 | 3,82 |
| | | | Rasio Kewirausahaan (%) | 8,99 | 9,78 |
| | | | Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB (%) | 2,365 | 2,82 |
| | | | ROA BUMD (%) | 6,18 | 6,22 |
| | | | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,62 | 4,51 |
| | | | Proporsi penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) | 54,78 | 61,66 |
| | | | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) | 63,89 | 65,21 |
| | | | Indeks Inovasi Daerah | 48,74 | 56,05 |
| 5 | Meningkatnya penerapan ekonomi hijau | Penerapan Ekonomi Hijau | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 68,37 | 69,43 |
| | | | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (juta rupiah/orang) | 35,27 | 36,03 |
| 6 | Meningkatnya transformasi digital | Transformasi Digital | Indeks Masyarakat Digital Indonesia | 52 | 59 |
| 7 | Menguatnya integrasi ekonomi domestik dan regional | Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional | Ketersediaan Pangan Utama (ton) | 19.755 | 19.805 |
| | | | Stabilisasi Harga Beras, Cabe dan Bawang (%) | 0 - 10<br>0 - 25<br>0 - 25 | 0 - 10<br>0 - 25<br>0 - 25 |
| | | | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) | 25,1 | 24 |
| | | | Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) | 17 | 20 |

| NO | SASARAN POKOK | ARAH PEMBANGUNAN (17) | INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (45) | TARGET | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | BASELINE 2025 | TAHAP I |
| 8 | Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. | Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi | Proporsi kontribusi PDRB Kota Payakumbuh terhadap PDRB Provinsi (%) | 2,96 | 3,24 |
| | | | Persentase RT yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau | 83,76 | 95,93 |
| 9 | Terwujudnya regulasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif | Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif | Indeks Reformasi Hukum | 82,55 | 85,55 |
| | | | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 3,17 | 3,63 |
| | | | Indeks Pelayanan Publik | 4,45 | 4,47 |
| | | | Survey penilaian integritas (SPI) KPK (Nilai) | 78,50 | 80,00 |
| 10 | Meningkatnya keadilan hukum, keamanan dan demokrasi yang berkualitas | Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, Dan Demokrasi Substansial | Persentase Penegakan Perda | 100 | 100 |
| | | | Angka Kriminalitas (per 1000 penduduk) | 3,84 | 3,80 |
| | | | Persentase Partai Politik dan Organisasi Masyarakat yang Aktif | 90,64 | 91 |
| 11 | Meningkatnya stabilitas ekonomi makro daerah | Stabilitas Ekonomi Makro | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) | 0,35 | 0,4 |
| | | | Tingkat inflasi | | - |
| | | | Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%) | 4,26 | 17,75 |
| | | | Nilai Transaksi Saham Per Kapita (rupiah) | 3.791.998 | 7.642.640 |
| | | | Total Kredit/PDRB (%) | 24,4 | 31,08 |
| | | | Rasio PDRB sektor Jasa Keuangan (%) | 5,77 | 6,86 |
| 12 | Meningkatnya kerja sama dan keamanan daerah | Penguatan Kerja Sama dan Keamanan Daerah | Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan | 100 | 100 |
| | | | Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum | 5 | 5 |
| 13 | Meningkatnya Penerapan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah sebagai wujud masyarakat yang religius dan berketahanan budaya | Berkebudayaan maju sebagai perwujudan adat basandi syara', syara' basandi kitabullah | Karya Budaya yang Ditetapkan | 1 | 5 |
| | | | IPK berbasis ABS SBK | 72,10 | 75,71 |
| | | | Persentase Penanganan Konflik Sosial yang Terjadi di Tengah Masyarakat | 100 | 100 |
| 14 | Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender, dan inklusivitas masyarakat | Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif | Indeks Pembangunan Keluarga | 63,57 | 64,70 |
| | | | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | 0,29-0,28 | 0,26-0,24 |
| | | | Indeks Perlindungan Khusus Anak | 82,92 | 84,33 |
| 15 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Lingkungan Hidup Berkualitas | Indeks Tutupan Lahan | 52,73 | 53,1 |
| | | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 68,37 | 69,43 |
| | | | RT dengan Akses Sanitasi Aman (%) | 18 | 30 |

| NO | SASARAN POKOK | ARAH PEMBANGUNAN (17) | INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (45) | TARGET | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | BASELINE 2025 | TAHAP I |
| | | | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) | 14,82 | 34,54 |
| | | | Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) | 20 | 49,98 |
| 16 | Meningkatnya ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan | Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan | Konsumsi listrik per kapita (kWh/kapita) | 1.273 | 1.885 |
| | | | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%) | 5,81 | 4,42 |
| | | | Kapasitas Air Baku ($m^3$/detik) | 0,32 | 0,36 |
| | | | Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%) | 85 | 88,75 |
| 17 | Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim | Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim | Indeks Risiko Bencana (IRBI) | 120,2 | 113,88 – 107,57 |
| | | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 68,37 | 69,43 |

**Sumber:** RPJPD Payakumbuh 2025-2045, 2024

## B. VISI DAN MISI RPJMN TAHUN 2025-2029

### 1). VISI MISI RPJMN TAHUN 2025-2029

Visi Presiden periode 2025–2029 yang dituangkan ke dalam RPJMN yaitu "**BERSAMA INDONESIA MAJU, MENUJU INDONESIA EMAS 2045**". Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam delapan Asta Cita, sebagaimana terdapat pada diagram berikut.

**Gambar 3.1** Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029




Sumber : RPJMN Tahun 2025-2029, 2024

## 2). SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN TAHUN 2025-2029

RPJMN Tahun 2025–2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang berfokus pada penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan, serta diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

**Gambar 3.2** Sasaran Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029




**Sumber:** RPJMN Tahun 2025-2029, 2024

## C. VISI DAN MISI RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029

### 1). VISI MISI RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029, yaitu: SUMATERA BARAT MADANI YANG MAJU DAN BERKEADILAN. Upaya pencapaian visi ini diuraikan kedalam 8 misi sebagaimana terdapat pada diagram berikut.

**Gambar 3.3** Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029




**Sumber:** RPJMD Prop. Sumbar Tahun 2025-2029

### 2). SASARAN PEMBANGUNAN RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029

Sasaran Pembangunan Sumatera Barat 5 tahun kedepan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.4** Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

| MISI/ TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | BASELINE 2025 | TARGET 2030 |
|---|---|---|---|---|
| 1.PENDIDIKAN MERATA, KESEHATAN BERKUALITAS | | | | |
| Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing | | Indeks Pembangunan Manusia | 77,19 | 81,1 |
| | | Indeks Modal Manusia | 0,58 | 0,63 |
| | Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia | Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) | 9,91 | 10,59 |
| | | Harapan Lama Sekolah | 14,39 | 14,79 |
| | Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat | Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) | 74,26 | 75,66 |
| | | Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) | 130 | 85 |

| MISI/ TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | BASELINE 2025 | TARGET 2030 |
|---|---|---|---|---|
| | untuk mendukung produktivitas | Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | 20,5 | 16,11 |
| 2.LUMBUNG PANGAN NASIONAL DAN EKONOMI BERKELANJUTAN | | | | |
| Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan | | Indeks Ketahanan Pangan | 84,01 | 87,98 |
| | | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,4 | 5,9 |
| | Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas berdaya saing serta keberlanjutan dengan transformasi sektor pertanian, Perkebunan, kehutanan dan peternakan. | Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) | 8,88 | 5,20 |
| | Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan | Indeks Ekonomi Hijau | 68,69 | 72,79 |
| | | Indeks Ekonomi Biru | 25,19 | 36,41 |
| | | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah | 0,613 | 0,622 |
| | | Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer | 51,7 | 61,27 |
| 3. NAGARI/DESA BASIS KEMAJUAN | | | | |
| Kota sebagai pusat pertumbuhan dengan nagari/desa sebagai basis kemajuan yang mandiri dan berdaya saing | | Persentase Desa Mandiri (%) | 7,83 | 11,83 |
| | | Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi | 39,22 | 40,12 |
| | Meningkatnya kemandirian ekonomi desa/nagari berbasis potensi lokal | Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%) | 1,24 | 1,79 |
| | | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 5,37 - 5,76 | 4,43 - 5,28 |
| | | Tingkat Kemiskinan (%) | 4,5- 5,1 | 3,39 - 3,96 |
| | Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/kelurahan | Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) | 64 | 73,77 |
| | | Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman | 8,57 | 18,57 |
| | | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) | 41,23 | 55,92 |
| | | Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) | 29 | 46,66 |
| | | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) | 11 | 30,83 |
| 4.SUMATERA BARAT PUSAT PERDAGANGAN DAN BISNIS SUMATERA BAGIAN BARAT | | | | |
| Terwujudnya pertumbuhan | | Indeks Daya Saing Daerah | 3,58 | 3,94 |
| | | Tingkat Inflasi (%) | 2,8 - 3,6 | 2,33 |

| MISI/ TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | BASELINE 2025 | TARGET 2030 |
|---|---|---|---|---|
| ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, investasi, industri, dan inovasi | | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) | 29,79 | 31,61 |
| | Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah | Rasio PDRB Industri Pengolahan (% PDRB) | 8,46 - 8,53 | 9,23 - 9,38 |
| | Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) | 75,31 | 77,73 |
| | | Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) | 38 | 46 |
| | Mendorong pertumbuhan UMKM dan industri kecil-menengah sebagai pilar ekonomi daerah | Tingkat Inklusi Keuangan Provinsi (%) | 86,72 | 89,87 |
| 5. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR BERKEADILAN DAN SIAP TANGGAP BENCANA | | | | |
| Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata , kesejahteraan Masyarakat dan mitigasi bencana | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 77,95 | 79 |
| | | Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca | 52,62 | 62,27 |
| | Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim | Indeks Risiko Bencana (IRB) | 170,51 | 157,87 |
| | | Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) (kumulatif) | 18,08 | 22,54 |
| | | Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) (tahunan) | 28,05 | 36,62 |
| | Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif dan berkelanjutan | Kapasitas Air Baku ($m^3$/detik) | 1,08 | 2,82 |
| | Memperkuat konektivitas dan aksesibilitas wilayah, Kawasan pariwisata serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur | Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikas | 6,1 | 6,41 |
| | | Rata-rata Waktu Tempuh pada Lintas Utama Jalan Provinsi | 2,95 | 2,50 |
| 6. MEMBANGUN KEHIDUPAN BERADAT DAN BERBUDAYA BERBASISKAN AGAMA, KEARIFAN LOKAL MELALUI DUKUNGAN KELUARGA YANG BERKUALITAS | | | | |
| Terwujudnya masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas | | Indeks Demokrasi Indonesia | | |
| | | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga | 69,53 - 69,54 | 70,78 - 70,8 |
| | Memperkuat nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | 60,58 - 60,65 | 62,98 - 63,18 |
| | Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) | 72,23 - 72,31 | 73,84 - 74,12 |
| | | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | 0,405 - 0,390 | 0,35 - 0,33 |

| MISI/ TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | BASELINE 2025 | TARGET 2030 |
|---|---|---|---|---|
| | Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas | Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) | 57,76 | 62,11 |
| | | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | 66,15 | 66,65 |
| 7. TINGKAT DAYA SAING PARIWISATA DAN AKSELERASI EKONOMI KREATIF UNTUK UMKM | | | | |
| Pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan | | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) | 1,43 | 1,68 |
| | Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah | Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu orang) | 43,08 | 59,24 |
| | | Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (orang) | 21.104.516 | 30.899.122 |
| | Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan UMKM | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Kreatif Nasional (%) | 1,11 | 1,13 |
| | | Rasio kewirausaahan Provinsi (%) | 3,59 | 5,04 |
| 8. TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERSIH DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF | | | | |
| Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektifyang efektifdan berbasis digital | | Indeks Integritas Nasional | 73,16 | 76,9 |
| | Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 3,9 | 4,18 |
| | | Indeks Reformasi Hukum | 70 | 77,65 |
| | Meningkatnya kualitas layanan publik dan kinerja keuangan daerah | Indeks Pelayanan Publik | 3,84 | 4,13 |
| | Meningkatnya pendapatan daerah | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) | 1,17 | 1,3 |

**Sumber:** RPJMD Prov. Sumbar Tahun 2025-2029

## D. VISI DAN MISI RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2029

### 1). VISI RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2029

Gambaran kondisi yang diinginkan dalam 5 tahun ke depan adalah meningkatnya kualitas Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, yang didukung dengan kinerja aparatur sepenuh hati dan penuh integritas, sehingga Payakumbuh maju, sehat, dan sejahtera dapat diwujudkan. Merujuk kepada pengumuman Komisi Pemilihan Umum nomor 27/PL.02.2-Pu/1376/2024 tentang visi, misi dan program pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh tahun 2024 dan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, maka visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih adalah sebagai berikut:

**"PAYAKUMBUH MAJU BERMARTABAT MELALUI PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN, DAN SENTRA UMKM YANG KOMPETITIF"**

**Visi** ini selanjutnya akan menjadi visi kota Payakumbuh yang menjadi arah pandang semua komponen penyelenggara pemerintahan, Masyarakat dan seluruh stakeholders untuk menyatukan gerak dan langkah dalam Pembangunan kota Payakumbuh. Berdasarkan pendekatan perencanaan secara politis maka pada visi ini terdapat penekanan kebijakan daerah sehingga tanpa mengubah substansi politik. Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut:

**Payakumbuh** meliputi wilayah Payakumbuh dengan kesatuan geografis, kesatuan demografis dan kesatuan budaya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu dan berkembang sejak Pemerintah Kotamadya Payakumbuh disahkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970.

**Maju** memiliki arti menjadi **terdepan dan unggul** hal ini menunjukkan adanya progres untuk mencapai kualitas hidup yang relatif tinggi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan ketersediaan infrastruktur, sarana dan utilitas yang memperhatikan efek keberlanjutan lingkungan. Kota Maju merupakan sebuah kota yang dipahami maju dari kedua belah pihak: dari kota dan juga masyarakatnya. Kota yang maju tidak hanya terlihat pada ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, tetapi juga pada masyarakatnya yang seimbang baik dari segi kualitas dan juga distribusi kesejahteraannya. Kota yang maju juga ditandai dengan dukungan oleh infrastruktur yang memadai untuk memastikan kualitas hidup yang lebih tinggi dan kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi.

**Bermartabat** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia "bermartabat" yaitu memiliki harga diri, kesadaran, dan kebanggaan akan identitas dan jati diri. Kota yang bermartabat memberikan kepercayaan dari masyarakatnya bahwa Kota mereka memiliki karakteristik yang menjadikan mereka bangga akan kotanya. Harga diri menunjukkan eksistensi masyarakat kota dengan karakteristik dan budaya masyarakat yang dapat dijadikan teladan karena ketaatan, ketaqwaan, dan kedisiplinannya, berangkat dari akar budaya minang "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah" dalam arti seluas-luasnya tanpa mengabaikan pluralitas budaya yang ada disekitar kita. Oleh karena itu untuk memunculkan sebuah kota yang bermartabat, kota tersebut harus mampu memberikan kualitas hidup yang tinggi, kemajuan ekonomi, ketersediaan infrastruktur, pola pemerintahan yang efektif dan efisien serta keberlanjutan terhadap lingkungan perkotaan, kebudayaan dan identitas jati diri kota.

**Pemberdayaan** adalah proses membangun dan meningkatkan kemampuan, kesadaran, dan kemandirian individu, kelompok, atau masyarakat untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Pemberdayaan dilaksanakan pada berbagai bidang, tidak hanya pada kemampuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran dan

kemandirian dalam menghadapi masalah sosial ataupun berpartisipasi dalam proses politik dan memperjuangkan hak-hak mereka tetapi juga pemberdayaan lingkungan dalam mengelola dan melestarikan lingkungan hidup. Pemberdayaan selain meningkatkan kemampuan, dan kemandirian juga meningkatkan kesadaran dan partisipasi individu atau kelompok dalam proses pembangunan sehingga terjadi peningkatan kualitas hidup, dan tercapainya keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat.

**Pengembangan Kualitas Pendidikan** adalah proses meningkatkan atau memperbaiki kemampuan sistem pendidikan dalam mencapai tujuan dan sasaran pendidikan. Pengembangan diartikan adalah peningkatan yang sifatnya tematik, dan parsial tetapi berkelanjutan. Kualitas pendidikan yang baik dipengaruhi oleh kurikulum, metode pembelajaran, kualifikasi guru, infrastruktur, dan tata kelola pendidikan. Pengembangan yang diharapkan dilakukan per-individu melalui peningkatan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan individu, pengembangan organisasi melalui peningkatan kemampuan, efisiensi dan efektifitas dan pengembangan masyarakat melalui meningkatkan kualitas hidup, serta memiliki kemampuan bersaing dan berinovasi. Kualitas pendidikan yang baik dipengaruhi oleh kurikulum, metode pembelajaran, kualifikasi guru, infrastruktur, dan tata kelola pendidikan. Walaupun begitu tidak hanya faktor internal saja yang diperhatikan, tetapi juga faktor luar diantaranya Kondisi sosial ekonomi: Kemiskinan, malnutrisi, dan kurangnya akses terhadap pendidikan yang berdampak negatif pada prestasi siswa. Pengembangan Kualitas pendidikan diharapkan mendorong budaya Pendidikan yang menghargai Pendidikan

**Sentra UMKM yang Kompetitif** adalah Sentra UMKM yang memiliki kemampuan atau keadaan di mana produk dapat bersaing dengan efektif dalam lingkungan yang sama. Secara literal Sentra UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah suatu lokasi atau kawasan yang dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM. Tetapi secara konsep pembentukan Sentra UMKM bertujuan untuk memudahkan pembinaan dan pengembangan kapasitas UMKM karena ter-konsentrasi pada satu wilayah, dan memudahkan dalam penyediaan fasilitas pendukung, baik infrastruktur maupun utilitas, serta memudahkan pengelolaan manajemen dan perluasan akses pasar. Sehingga nantinya UMKM tersebut akan meningkat kemampuan produksi, manajemen, pemasaran, dan pendapatan UMKM yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Jadi sentra UMKM yang kompetitif merupakan Sentra UMKM yang dalam konteks bisnis, memiliki kemampuan untuk meningkatkan pangsa pasar, pendapatan, pengembangan produk atau jasa yang inovatif, dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selain itu juga mampu meningkatkan keterampilan, prestasi dan pencapaiannya hingga siap bersaing dengan kabupaten/ Kota lainnya.

Dari uraian visi dapat dituangkan pokok-pokok visi adalah maju, sehat dan sejahtera: dari Kota yang maju, masyarakat yang sehat akan melahirkan Payakumbuh yang Sejahtera. walaupun diungkap dalam susunan kata dan kalimat yang berbeda, namun ketiga pokok visi tersebut memiliki isi, esensi,

pesan, dan makna yang saling mengait dan melanjut, antara yang awal dan yang kemudian, yang bertujuan untuk melahirkan arahan rinci program yang sesuai dengan konteks permasalahan dan bahasa perencanaan.

Dengan visi ini dapat diartikan bahwa pemerintah berkomitmen, berkonsisten dan berupaya dalam menyediakan sebuah kota, kota Payakumbuh yang maju dan bermartabat melalui pemberdayaan dan pengembangan warga dan kotanya dengan peningkatan kualitas dan kompetensi pada sektor pendidikan dan UMKM. Dengan harapan ***Kota Payakumbuh mampu bertransformasi dari kota persinggahan menjadi kota destinasi; destinasi pendidikan, destinasi kesehatan, destinasi kuliner, seni budaya dan olahraga***. Untuk mencapai Payakumbuh maju dan bermartabat tersebut, dapat dilihat dari pencapaian sasaran visi sebagaimana tabel 3.5. Beberapa target sasaran visi ini mengacu pada target imperative sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 050-459-2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

**Tabel 3.5** Sasaran Visi RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

| NO | SASARAN VISI | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 | TAHUN 2030 |
| 1 | Peningkatan Pendapatan Per Kapita | 1. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp Juta) | 64,21 | 72,02 | 82,14 | 92,57 | 103,84 | 116,29 | 129,51 |
| | | 2. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%) | 4,82 | 4,95 | 5,06 | 5,17 | 5,31 | 5,43 | 5,55 |
| 2 | Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan | 3. Tingkat Kemiskinan (%) | 5,19 | 4,54 | 4,32 | 4,17 | 3,99 | 3,84 | 3,63 |
| | | 4. Rasio Gini (indeks) | 0,313 | 0,311 | 0,310 | 0,309 | 0,308 | 0,306 | 0,305 |
| | | 5. Pertumbuhan ekonomi (%) | 4,53 | 5,02 | 5,79 | 7,12 | 7,36 | 7,65 | 6,22 |
| 3 | Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 6. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 3,0788 | 3,4000 | 3,4150 | 3,4400 | 3,4630 | 3,4824 | 3,5000 |
| | | 7. Indeks Inovasi Daerah | 54,62 | 54,85 | 55,15 | 55,25 | 55,50 | 55,95 | 56,05 |
| 4 | Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | 8. Indeks Pembangunan Manusia (indeks) | 80,76 | 81,43 | 81,97 | 82,50 | 83,09 | 83,79 | 84,23 |
| | | 9. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rp/Tenaga Kerja) | 70,58 | 70,80 | 71,50 | 72,02 | 73,3 | 74,03 | 75 |
| 5 | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | 10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 58,52 | 68,37 | 68,56 | 68,74 | 68,97 | 69,20 | 69,43 |

**Sumber:** RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

## 2). MISI RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2029

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

**Misi Pertama "Mewujudkan SDM yang berkualitas"**. Mewujudkan SDM yang berkualitas dimaksudkan untuk melahirkan SDM yang memiliki kemampuan, pengetahuan, loyal, dan sikap yang dapat meningkatkan kinerja didukung dengan kesehatan yang baik. Karakteristik SDM yang berkualitas akan tercapai jika memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kepercayaan diri, watak yang dinamis, siap menghadapi perubahan, memiliki keterampilan yang relevan dengan bidang pekerjaan, memiliki sikap toleransi yang tinggi, memiliki semangat yang tinggi, mampu bekerjasama dengan pihak lain, memahami bidangnya, mempunyai watak yang bermoral tinggi antara lain: jujur, menepati janji serta peka dengan hak dan kepentingan pihak lain. Sumber daya manusia yang berkualitas menciptakan bukan saja nilai komparatif tetapi juga nilai kompetitif-generatif-inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti: *intelligence, creativity dan imagination*; tidak lagi semata- mata menggunakan energi kasar seperti bahan mentah, lahan, air, energi otot, sehingga produktivitasnya meningkat dan mampu bersaing dengan SDM daerah lain. Intinya SDM yang berkualitas menyangkut aspek fisik (kualitas fisik) dan aspek non fisik (kualitas non fisik). Kondisi ini diharapkan melahirkan SDM yang dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya baik dalam kehidupan pribadi, maupun kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

**Misi Kedua: "Mewujudkan iklim ekonomi yang kompetitif"** Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif, mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan, dan mendorong terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial-ekonomi masyarakat, dan meningkatkan investasi di Kota Payakumbuh. Salah satu amanah pembangunan adalah memajukan kesejahteraan umum, memastikan dampak pembangunan dirasakan semua golongan serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Payakumbuh diwujudkan melalui penyediaan lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran, mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat melalui munculnya wirausaha-wirausaha baru yang mampu membuka lapangan kerja sendiri. Memastikan keterjangkauan dan kestabilan harga-harga kebutuhan pokok terutama bagi masyarakat tidak mampu. Menciptakan iklim ekonomi dan investasi yang kondusif menjadi kunci utama dalam mendukung pembangunan ekonomi di Kota Payakumbuh. Lokomotif perekonomian Kota Payakumbuh merupakan sektor potensial yang mampu menggerakan pertumbuhan ekonomi dengan cepat namun mengedepankan potensi lokal sebagai motor dan pilar utama perekonomian guna kemandirian ekonomi

lokal dan daya saing daerah. Sampai tahun 2024, tiga sektor penyumbang utama PDRB Kota Payakumbuh adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (25.02%), sektor konstruksi (13,64) serta sektor Transportasi dan Pergudangan (11,82%).

**Misi Ketiga: "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Kondusif"** Pemerintah memegang peranan penting bagi perkembangan daerah melalui fungsi sebagai regulator serta fasilitator. Dukungan pemerintah dalam pembangunan daerah harus didukung oleh layanan publik yang prima. Untuk mencapai kondisi layanan prima tersebut perlu terwujud pemerintahan yang baik (***good government***) dan tata kelola yang baik (***good governance***). Layanan publik perlu didukung birokrasi yang bersih agar tidak menimbulkan biaya birokrasi tinggi. Pelayanan publik juga diharapkan mampu dinamis dan tangkas menjawab kebutuhan dan permasalahan yang terjadi dilapangan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang semakin bervariatif kebutuhannya maka dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaan yang efektif dan efisien dengan melalui digitalisasi manajemen dan birokrasi sehingga tata kelola pemerintah dapat berjalan efektif. Sistem birokrasi yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama dalam mendukung iklim investasi.

**Misi Keempat**: **"Mewujudkan nuansa imani melalui pendekatan budaya dan adat"** Kebudayaan menjadi aset utama pembangunan. Kota Payakumbuh sebagai pusat perekonomian luhak 50 tidak bisa mengesampingkan sejarah panjang Kota Payakumbuh yang mewariskan generasi saat ini dengan budaya, kesenian dan aspirasi kebudayaan lainnya untuk dikembangkan dengan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat. Kebudayaan-kebudayaan lokal akan didorong untuk terus dikembangkan, tidak sekedar untuk melestarikan namun juga menjadi pemberi warna atas kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Payakumbuh. Kebudayaan juga tidak hanya dipandang sebagai kondisi statis, namun terus berkembang. Kreativitas masyarakat menjadi faktor penting dalam mengembangkan kebudayaan sekaligus melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan kebudayaan tetap terus relevan dalam perkembangan zaman. Kota Payakumbuh sejatinya adalah rumah besar bagi semua orang di luak limopuluah. Nilai-nilai kekeluargaan menjadi pusat gravitasi semua aktivitas individunya. Nilai moral, kesusilaan, agama dan religius digerakkan di lingkup masyarakat terkecil atau keluarga. Keluarga yang harmonis dan sehat secara mental juga akan melahirkan masyarakat yang mampu menempatkan dirinya dalam dinamika zaman yang terus berubah.

**Misi Kelima**: "**Mewujudkan sarana perkotaan yang humanis ramah lingkungan dan berkelanjutan**" Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Payakumbuh yang tertib, dan inklusif dengan pemenuhan infrastruktur kota yang memadai dan aman bagi setiap penghuninya terutama rasa aman bagi perempuan dan anak. Keamanan tersebut tercipta melalui kuatnya kesadaran kolektif masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Peran serta masyarakat tersebut dibarengi dengan upaya perbaikan layanan Pemerintah, serta penggunaan teknologi yang mampu meningkatkan

pengawasan keamanan di tempat-tempat publik serta respons atas pengaduan korban kekerasan secara baik dan cepat. Misi ini juga dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan pengelolaan tata ruang dan wilayah, mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial. Prinsip pembangunan yang berkelanjutan menjadi kunci perbaikan kualitas lingkungan di Kota Payakumbuh.

**Tabel 3.6** Keterkaitan Visi dengan Misi RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

| VISI | POKOK-POKOK VISI | MISI |
|---|---|---|
| **Payakumbuh Maju Bermartabat Melalui Pemberdayaan, Pengembangan Kualitas Pendidikan, dan Sentra UMKM yang Kompetitif** | Maju | **Misi Pertama**: Mewujudkan SDM yang berkualitas<br>**Misi Ketiga**: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Kondusif.<br>**Misi Kelima**: Mewujudkan sarana perkotaan yang humanis ramah lingkungan dan berkelanjutan. |
| | Sehat | **Misi Pertama**: Mewujudkan SDM yang berkualitas |
| | Sejahtera | **Misi Kedua**: Mewujudkan iklim ekonomi yang kompetitif<br>**Misi Keempat**: Mewujudkan nuansa imani melalui pendekatan budaya dan adat |

**Sumber:** Bappeda Kota Payakumbuh, 2025

Pokok-pokok visi dalam RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 dapat dijelaskan sebagai berikut:

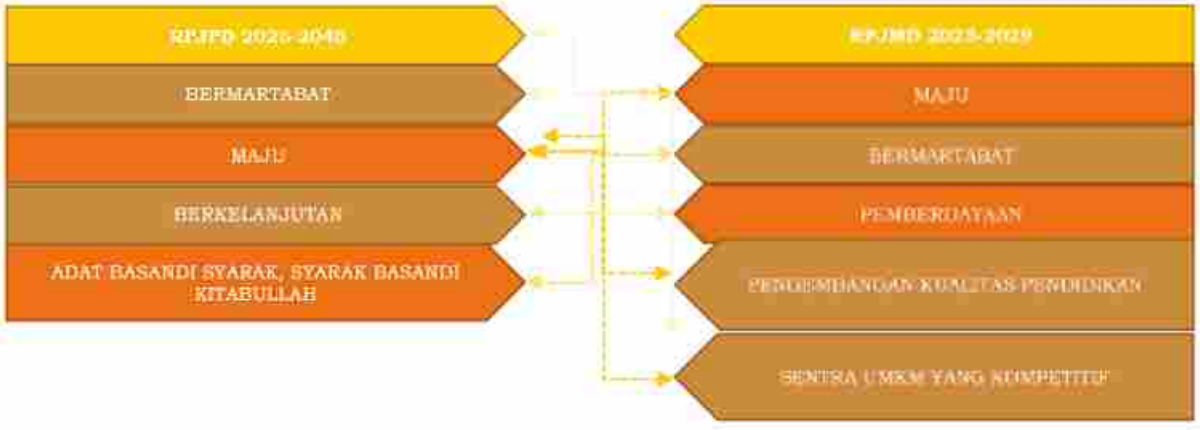
1. **Payakumbuh Maju:** Memiliki sarana perkotaan yang humanis ramah lingkungan dan berkelanjutan, antara lain menghadirkan pusat perbelanjaan yang nyaman melalui Revitalisasi dan modernisasi Pasar Tradisional Ibuh tematik, tertata, rapi serta bersih. Selain itu juga pendidikan yang berkualitas dan menciptakan sumberdaya manusia yang kompetitif dan berdaya saing. Ditindaklanjuti melalui pemerataan pendidikan dasar dan mendukung sekolah rakyat serta memastikan kelanjutan pendidikan melalui insentif atau kerjasama dengan satuan pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Disamping itu juga maju dari sisi pemerintahan yang menghadirkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan kondusif dengan aparatur yang jujur dan loyal.
2. **Payakumbuh Sehat:** Peningkatan pelayanan kesehatan yang **paripurna**. Bidang kesehatan membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, peningkatan fasilitas dan pelayanan RSUD di Kota Payakumbuh. Juga meliputi Gizi Balita, TBC, Kelembagaan layanan kesehatan, kesehatan lingkungan dan sanitasi.
3. **Payakumbuh Sejahtera :** Peningkatan ekonomi masyarakat yang mampu bersaing dengan daerah sekitarnya, lapangan kerja yang berkualitas dengan prioritas pada kemandirian Masyarakat secara sosial dan ekonomi dengan kawasan pilihan untuk produksi komoditas dari hulu ke hilir, termasuk peningkatan ekonomi berbasis masjid serta partisipasi masyarakat dan dukungan pihak terkait.

## 3). KESELARASAN VISI DAN MISI RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2029 DENGAN VISI DAN MISI RPJPD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2045

Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah tidak terlepas dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Visi jangka menengah adalah bentuk dari sebuah visi antara menuju visi jangka panjang. Visi jangka panjang Kota Payakumbuh adalah "**Payakumbuh Bermartabat, Maju dan Berkelanjutan sebagai Perwujudan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah**", diwujudkan melalui visi jangka menengah yaitu "Payakumbuh Kota Maju yang Bermartabat Melalui Pemberdayaan, Pengembangan Kualitas Pendidikan, dan Sentra UMKM yang Kompetitif".

Pada RPJPD 2025-2045, dinyatakan bahwa Kota Payakumbuh yang akan dituju di masa depan adalah **"Payakumbuh Bermartabat, Maju dan berkelanjutan sebagai Perwujudan Adat basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".** Visi ini kemudian diturunkan dan diperkuat di dalam RPJMD 2025-2029 dengan penambahan penekanan pada fokus di pemberdayaan dan pengembangan, kualitas pendidikan dan Sentra UMKM, atas dasar ketiga ide tersebut, maka visi RPJMD 2025-2029 dirangkum dalam susunan kata dan kalimat **"Payakumbuh Maju Bermartabat Melalui Pemberdayaan, Pengembangan Kualitas Pendidikan, dan Sentra UMKM yang Kompetitif",** yang menyandang arti bahwa (1) **"Maju"** sehingga Kota Payakumbuh dapat menjalankan kegiatan ekonomi secara mandiri, dan lebih baik lagi, untuk menuju pada masyarakat yang sejahtera. (2) **"Martabat"** sehingga dengan kemajuan yang diraih, Kota Payakumbuh dapat menjalankan kehidupan sosial budayanya dengan berkarakter yang mencerminkan harga diri, kesadaran, dan kebanggaan warga atas kotanya. (3) **"Pemberdayaan"** yang menjadi fokus dari pembangunan kota, bahwa tidak hanya menciptakan kota yang maju dan bermartabat tetapi pembangunan daerah tahun 2025-2029 bertujuan untuk membangun masyarakat Payakumbuh lebih berdaya dan lebih berkembang. (4) **"Pengembangan Kualitas Pendidikan"** Pendidikan yang berkualitas menjadi fokus pengembangan Kota, dengan menjadikan (5) **"Sentra UMKM yang Kompetitif"** sebagai motor penggerak perekonomian daerah.

**Diagram 3.1** Keterkaitan Visi RPJPD dengan Visi RPJMD




**Sumber:** Bappeda Kota Payakumbuh, 2025

Dengan perkataan lain yang lebih singkat dapat disimpulkan, bahwa keterkaitan antara visi daerah pada RPJPD tahun 2025-2045 dan visi RPJMD 2025-2029 adalah pada penekanan pentingnya membangun manusia dan Kota Payakumbuh yang maju, sehat dan dan sejahtera. Misi yang dibawa/diemban dalam jangka menengah adalah misi antara yang mendukung misi jangka panjang. Dimana dapat dianalisis keselarasan kandungan antara Misi Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah.

**Diagram 3.2** Keterkaitan Misi RPJPD dengan Misi RPJMD




**Sumber:** Bappeda Kota Payakumbuh, 2025

Misi 1 jangka panjang **"Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas dan Berdaya Saing Melalui Transformasi Sosial"** diwujudkan melalui misi 1 jangka menengah **"Mewujudkan SDM yang Berkualitas"**.

Misi 2 jangka panjang **"Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** diwujudkan melalui misi 2 jangka menengah **"Mewujudkan Iklim Ekonomi yang Kompetitif".**

Misi 3 jangka panjang **"Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Inovatif"** diwujudkan melalui misi 3 jangka menengah **"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Kondusif"**.

Misi 4 jangka panjang **"Memantapkan Keamanan Masyarakat Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro dan Daerah"** diwujudkan melalui misi 3 jangka menengah **"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Kondusif"**.

Misi 5 jangka panjang **"Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Berkelanjutan sebagai Perwujudan ABS-SBK"** diwujudkan melalui misi 4 jangka menengah **"Mewujudkan Nuansa Imani Melalui Pendekatan Budaya dan Adat"**.

Misi 6 jangka panjang **"Membangun Wilayah secara Merata dan Berkeadilan"** diwujudkan melalui misi 2 jangka menengah **"Mewujudkan Iklim Ekonomi yang Kompetitif".**

Misi 7 jangka panjang **"Memantapkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan"** diwujudkan melalui misi 5 jangka menengah **"Mewujudkan Sarana Perkotaan yang Humanis Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan".**

Misi 8 jangka panjang **"Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Daerah"** diwujudkan melalui misi 3 jangka menengah **"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Kondusif".**

## 4). KESELARASAN VISI DAN MISI RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2029 DENGAN VISI, MISI RPJMN TAHUN 2025-2029, DAN VISI, MISI RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT 2025-2029

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, Visi Pembangunan Nasional Republik Indonesia adalah: "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Dokumen RPJMN ini telah ditetapkan pemerintah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam delapan Asta Cita.

Adapun Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029 adalah Sumatera Barat madani yang maju dan berkeadilan, dimana madani dimaknai sebagai Masyarakat Sumbar yang religius & berperadaban maju. Berbasiskan pada nilai-nilai, norma-norma, hukum dan moral Agama, dan 'Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai. Masyarakat yang berlandaskan ukhuwah islamiyyah, menghormati perbedaan, bersikap demokratis, terbuka (inklusif), gotong royong dan kekeluargaan. Sedangkan "maju" adalah provinsi yang berkembang secara holistik, mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional, serta terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan warganya secara berkelanjutan. Dan berkeadilan diartikan sebagai Propinsi yang menerapkan makna keadilan dalam pembangunan berbagai aspeknya, yang tidak ada keberpihakan, proporsional dan profesional. Adil dalam arti kewilayahan dan seluruh dimensi sektor kehidupan.

Adapun Visi Pembangunan Kota Payakumbuh mendatang (2025-2029) yaitu **"Payakumbuh Maju Bermartabat Melalui Pemberdayaan,**

**Pengembangan Kualitas Pendidikan, dan Sentra UMKM yang Kompetitif".** Dengan visi ini dapat diartikan bahwa pemerintah berkomitmen, berkonsisten dan berupaya dalam menyediakan sebuah kota, Kota Payakumbuh yang maju dan bermartabat melalui pemberdayaan dan pengembangan warga dan kotanya dengan peningkatan kualitas dan kompetensi pada sektor pendidikan dan UMKM.

**Diagram 3.3** Keterkaitan Visi RPJMN, RPJMD Prov. Sumbar dengan RPJMD Kota Payakumbuh




**Sumber:** Bappeda Kota Payakumbuh, 2025

Lebih lanjut, uraian keterkaitan antara Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan Misi RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 dijabarkan dalam Diagram diatas.

Diagram 3.4 Keterkaitan Misi RPJMN, RPJMD Provinsi Sumbar dengan RPJMD Kota Payakumbuh




**Sumber:** Bappeda Kota Payakumbuh, 2025

## 5). TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategis tingkat tinggi yang nantinya menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Misi Pertama: **"Mewujudkan SDM yang Berkualitas"**. Dimaksudkan untuk menciptakan sumberdaya manusia yang berpendidikan, kesehatan yang baik sehingga mampu bersaing.

Tujuan: Terwujudnya SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing

Sasaran:

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan
3. Menurunkan Tingkat Kemiskinan
4. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak

Misi Kedua: **"Mewujudkan Iklim Ekonomi yang Kompetitif"**. Dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil, berkelanjutan, dan inklusif.

Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif

Sasaran:

1. Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat
2. Meningkatnya Sektor Strategis Berbasis Potensi Lokal
3. Meningkatnya Iklim Investasi Daerah

Misi Ketiga: **"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Kondusif"**. Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang efisien, transparan, akuntabel, serta mampu bersaing dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Tujuan : Terwujudnya tata Kelola pemerintahan dan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel

Sasaran:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
3. Meningkatnya Pendapatan Daerah
4. Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat

Misi Keempat: **"Mewujudkan Nuansa Imani melalui Pendekatan Budaya dan Adat"**, dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang berlandaskan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan, dengan tetap menghormati serta memanfaatkan kearifan lokal, budaya, dan adat istiadat sebagai sarana dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis.

Tujuan: Terwujudnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK

Sasaran: Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Budaya dalam Kehidupan Bermasyarakat

Misi Kelima: "**Mewujudkan Sarana Perkotaan yang Humanis Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan**", dimaksudkan untuk menciptakan infrastruktur dan fasilitas kota yang nyaman bagi masyarakat, selaras dengan alam, serta dapat bertahan dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan.

Tujuan: Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan.

Sasaran:

1. Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup
2. Meningkatnya Pembangunan infrastruktur yang berkualitas .

Selanjutnya rumusan tujuan dan sasaran serta indikator dan target indikator kinerja utama (IKU) dan indikator utama Pembangunan (IUP) dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut. Terkait beberapa target di tetapkan imperative sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 050-459-2025 tentang Evaluasi Rancangan Perda Kota Payakumbuh tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

**Tabel 3.7** Rumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD

| VISI/ MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| **VISI**<br>**Payakumbuh Maju Bermartabat Melalui Pemberdayaan, Pengembangan Kualitas Pendidikan, dan Sentra UMKM Yang Kompetitif** | | | | | | | | | | | |
| **MISI-1:** | | | | | | | | | | | |
| **Mewujudkan SDM yang berkualitas** | Terwujudnya SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing | | Indeks Pembangunan Manusia (indeks) | 80,76 | 81,43 | 81,97 | 82,50 | 83,09 | 83,72 | 84,23 | IKU |
| | | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Usia Harapan Hidup (tahun) | 75,08 | 75,31 | 75,57 | 75,83 | 76,10 | 76,36 | 76,62 | IKU/IUP |
| | | | Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%) | 16,40 | 13,70 | 12,45 | 11,20 | 9,95 | 8,70 | 7,45 | IKU/IUP |
| | | | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) | 8,17 | 5,81 | 5,45 | 5,09 | 4,73 | 4,01 | 3,65 | IKU/IUP |
| | | | Jumlah Kematian Ibu (jiwa) ***** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | IUP |
| | | | Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) (%) | 70,14 | 80,00 | 84,00 | 88,00 | 92,00 | 96,00 | 100,00 | IUP |
| | | | Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate) (%) | 88,90 | 94,00 | 94,00 | 95,00 | 95,00 | 96,00 | 96,00 | IUP |
| | | Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan | Harapan Lama Sekolah (tahun) | 14,57 | 14,62 | 14,75 | 14,91 | 15,02 | 15,16 | 15,29 | IKU/IUP |
| | | | Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk: Literasi (%) | 87,50 | 87,50 | 87,90 | 88,20 | 88,80 | 89,25 | 89,50 | IUP |
| | | | Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk: Numerasi (%) | 84,40 | 84,40 | 85,65 | 86,50 | 87,75 | 89,00 | 90,25 | IUP |

| VISI/ MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | | Rata-rata Lama Sekolah (tahun) | 10,89 | 11,16 | 11,30 | 11,38 | 11,48 | 11,62 | 11,79 | IUP |
| | | | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) | 21,65 | 21,70 | 21,90 | 22,00 | 22,20 | 22,40 | 22,50 | IUP |
| | | | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) | 76,17 | 79,09 | 79,67 | 80,85 | 80,82 | 81,40 | 81,98 | IUP |
| | | Menurunkan Tingkat Kemiskinan | Tingkat Kemiskinan (%) | 5,19 | 4,54 | 4,32 | 4,17 | 3,99 | 3,84 | 3,63 | IKU/IUP |
| | | | Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%) | 98,99 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IUP |
| | | | Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) | 19,96 | 31,38 | 33,78 | 36,18 | 38,58 | 40,98 | 43,39 | IUP |
| | | | Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan dan/atau dari dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan (orang)***** | 3 | 5 | 15 | 25 | 35 | 37 | 40 | IUP |
| | | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (indeks) | 65,6 | 66,8 | 68,0 | 69,10 | 70,10 | 71,10 | 72,10 | IKU/IUP |
| | | | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | 0,175 | 0,151 | 0,127 | 0,103 | 0,079 | 0,055 | 0,031 | IKU/IUP |
| | | | Indeks Perlindungan Khusus Anak | 81,51 | 82,92 | 83,25 | 83,62 | 83,85 | 84,01 | 84,33 | IUP |
| | | | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) | 60,51 | 63,89 | 64,00 | 64,20 | 64,60 | 64,90 | 65,21 | IUP |
| **MISI-2 Mewujudkan Iklim** | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang | | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 4,53 | 5,02 | 5,79 | 7,12 | 7,36 | 7,65 | 6,22 | IKU/ Indikator sasaran visi RPJPD |

| VISI/ MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| **Ekonomi yang kompetitif** | Berkualitas dan inklusif | | Indek Daya Saing Daerah (IDSD) | 3,89 | 3,93 | 3,96 | 4,00 | 4,04 | 4,09 | 4,14 | IKU |
| | | | Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap PDRB Provinsi (%) | 2,84 | 2,89 | 2,97 | 3,00 | 3,04 | 3,07 | 3,10 | IKU |
| | | | PDRB Per-kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp Juta) | 64,21 | 72,02 | 82,14 | 92,57 | 103,84 | 116,29 | 129,51 | IKU/Indikator sasaran visi RPJPD |
| | | Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat | Rasio Gini (indeks) | 0,313 | 0,311 | 0,310 | 0,309 | 0,308 | 0,306 | 0,305 | IKU/ indikator sasaran Visi RPJPD |
| | | | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,87 | 4,75 | 4,64 | 4,52 | 4,43 | 4,33 | 4,26 | IKU/IUP |
| | | | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rp/ tenaga kerja) | 70,58 | 70,80 | 71,50 | 72,02 | 73,3 | 74,03 | 75 | Indikator sasaran visi RPJPD |
| | | | Proporsi penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) | 53,73 | 53,81 | 54,38 | 55,58 | 56,78 | 57,98 | 61,66 | IUP |
| | | | Rasio Kewirausahaan (%) | 7,52 | 9,30 | 9,34 | 9,38 | 9,41 | 9,45 | 9,78 | IUP |
| | | Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal | Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%) | 33,33 | 33,34 | 33,35 | 33,36 | 33,37 | 33,38 | 33,39 | IKU |
| | | | Proporsi jumlah UKM non pertanian (%) | 1,88 | 4,69 | 4,71 | 4,73 | 4,75 | 4,77 | 13,636 | IUP |
| | | | Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB (%) | 1,59 | 2,365 | 2,407 | 2,449 | 2,491 | 2,533 | 2,820 | IUP |
| | | | Proporsi jumlah IKM (%) | 1,85 | 3,43 | 3,51 | 3,59 | 3,66 | 3,74 | 3,82 | IUP |
| | | | Ketersediaan Pangan Utama (ton) | 19.780 | 19.785 | 19.790 | 19.795 | 19.800 | 19.805 | 19.810 | IUP |
| | | | Stabilisasi Harga Beras (%) | 1.63 | ≤10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤10 | IUP |
| | | | Stabilisasi Harga Cabe (%) | 20,69 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | IUP |
| | | | Stabilisasi Harga Bawang (%) | 13,40 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | IUP |
| | | | Tingkat Inflasi * | - | - | - | - | - | - | - | IUP |
| | | | Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) | 19,65 | 19,70 | 19,75 | 19,80 | 19,85 | 19,90 | 20,00 | IUP |

| VISI/ MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | | Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%) | 4,82 | 4,95 | 5,06 | 5,17 | 5,31 | 5,43 | 5,55 | IUP |
| | | | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum (%) | 3,49 | 3,60 | 3,62 | 3,64 | 3,66 | 3,68 | 3,98 | IUP |
| | | | Jumlah Tamu wisatawan mancanegara (ribu orang) | 0,01 | 0,02 | 0,025 | 0,03 | 0,035 | 0,04 | 2,30 | IUP |
| | | | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (juta rupiah/orang) | 30,97 | 35,27 | 35,52 | 35,68 | 35,83 | 35,98 | 36,03 | IUP |
| | | | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi (%) | 1,938 | 3,595 | 3,585 | 3,575 | 3,555 | 3,545 | 3,963 | IUP |
| | | | Return Of Asset (ROA) BUMD (%) | 6,17 | 6,18 | 6,19 | 6,20 | 6,20 | 6,21 | 6,22 | IUP |
| | | Meningkatnya Iklim Investasi Daerah | Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rp) | 658,63 | 660 | 665 | 670 | 675 | 680 | 685 | IKU |
| | | | Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%) | 5,98 | 6,00 | 6,95 | 9,65 | 12,35 | 15,05 | 17,75 | IUP |
| | | | Nilai Transaksi Saham Per Kapita (rupiah) | 3.800.000 | 3.891.998 | 4.562.126 | 5.332.255 | 5.332.254,8 | 6.102.383,2 | 7.642.640 | IUP |
| | | | Total Kredit/PDRB (%) | nA | 24,40 | 25,73 | 27,07 | 28,40 | 29,74 | 31,08 | IUP |
| | | | Rasio PDRB sektor Jasa Keuangan (%) | 6,00 | 6,05 | 6,08 | 6,18 | 6,41 | 6,63 | 6,86 | IUP |
| | | | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) | 25,48 | 24,86 | 24,52 | 24,19 | 23,85 | 23,51 | 23,18 | IUP |
| **MISI-3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan kondusif** | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | | Indeks Reformasi Birokrasi (indeks) | 83,28 | 84,00 | 85,00 | 86,00 | 87,00 | 88,00 | 89,00 | IKU |
| | | | Survey penilaian integritas (SPI) KPK (Nilai) | 75,51 | 78,50 | 78,88 | 79,18 | 79,48 | 79,78 | 80,00 | IUP |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (indeks) | 3,75 | 3,75 | 3,84 | 3,93 | 4,03 | 4,12 | 4,21 | IKU/IUP |
| | | | Indeks Pemerintahan Digital (Indeks) | - | - | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | IKU |

| VISI/ MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | | Indeks Pelayanan Publik | 4,50 | 4,51 | 4,52 | 4,53 | 4,54 | 4,55 | 4,56 | IKU/IUP |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | 88,37 | 88,60 | 88,80 | 88,85 | 88,90 | 88,95 | 89,00 | IKU |
| | | Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel | Nilai Evaluasi AKIP | 76,01 | 78,00 | 80,00 | 81,00 | 82,00 | 83,00 | 84,00 | IKU |
| | | | Opini BPK atas laporan keuangan (opini) | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | IKU |
| | | | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah | 3,0788 | 3,4000 | 3,4150 | 3,4400 | 3,4630 | 3,4824 | 3,5000 | Indikator Sasaran visi |
| | | | Indeks Masyarakat Digital Indonesia (indeks) | 44,39 | 52 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | IUP |
| | | | Indeks Reformasi Hukum (nilai) | 87,00 | 87,20 | 87,40 | 87,60 | 87,80 | 87,90 | 88,00 | IUP |
| | | | Indeks Inovasi Daerah (indeks) | 54,62 | 54,85 | 55,15 | 55,25 | 55,50 | 55,95 | 56,05 | Indikator Sasaran visi |
| | | Meningkatnya Pendapatan Daerah | Rasio PAD terhadap APBD | 0,165 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | IKU |
| | | | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) | 0,25 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | IUP |
| | | Terciptanya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum (%) | 28,49 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | IKU/IUP |
| | | | Persentase penegakan Perda (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | IUP |

| VISI/ MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | | Angka Kriminalitas (per 1000 penduduk) | 3,06 | 3,84 | 3,83 | 3,82 | 3,81 | 3,80 | 3,80 | IUP |
| | | | Persentase Partai Politik dan Organisasi Masyarakat yang Aktif (%) | 91,78 | 91,95 | 92,58 | 93,21 | 93,84 | 94,47 | 95,10 | IUP |
| | | | Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | IUP |
| | | | Persentase Penanganan Konflik Sosial yang Terjadi di Tengah Masyarakat (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | IUP |
| | | | Indeks Risiko Bencana (IRBI) | 104,80 | 103,52 | 103,51 | 102,23 | 100,95 | 99,67 | 98,39 | IUP |
| **MISI-4: Mewujudkan nuansa imani melalui pendekatan budaya dan adat** | Terwujudnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK | | IPK berbasis ABS SBK (indeks) | 72,09 | 72,40 | 73,00 | 73,80 | 74,86 | 75,05 | 75,71 | IKU/IUP |
| | | Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat | Karya Budaya yang Ditetapkan | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | IKU |
| | | | Cakupan Penguatan idiologi Pancasila dan Karakter kebangsaan (%) | 57,65 | 58,35 | 58,70 | 58,90 | 59,10 | 59,30 | 60,00 | IKU |
| **MISI-5: Mewujudkan sarana perkotaan yang humanis ramah lingkungan dan berkelanjutan** | Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (indeks) | 58,52 | 68,37 | 68,58 | 68,80 | 69,01 | 69,22 | 69,43 | IKU/IUP |
| | | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) | 15,90 | 19,68 | 23,54 | 27,42 | 30,90 | 34,79 | 38,48 | IKU/IUP |

| VISI/ MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | | Indeks Kualitas Lahan (indeks) **** | 27,50 | 52,73 | 52,80 | 52,87 | 52,94 | 53,01 | 53,10 | IUP |
| | | | RT dengan Akses Sanitasi Aman (%) | 19,48 | 20,48 | 22,31 | 24,19 | 25,08 | 26,16 | 30,00 | IUP |
| | | | Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) | nA | 33,13 | 39,68 | 46,05 | 52,26 | 58,37 | 64,82 | IUP |
| | | Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas | Indeks Infrastruktur | 63,19 | 64,09 | 64,62 | 65,76 | 66,91 | 67,51 | 68,13 | IKU |
| | | | Persentase RT yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau (%) | 81,04 | 82,73 | 85,37 | 88,01 | 90,65 | 94,93 | 95,93 | IUP |
| | | | Konsumsi listrik per kapita (kWh/kapita) | 1.138 | 1.273 | 1.407 | 1.513 | 1.652 | 1.749 | 1.885 | IUP |
| | | | Kapasitas Air Baku (m3/detik) | 5,21 | 5,21 | 5,46 | 6,60 | 6,61 | 6,62 | 6,62 | IUP |
| | | | Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%) | 89,97 | 90,41 | 90,61 | 90,81 | 91,52 | 92,23 | 92,94 | IUP |

**Catatan:**

**IUP**: Indikator Utama Pembangunan, merupakan indikator yang terdapat dalam RPJPD

**IKU**: Indikator Kinerja Utama

*Perhitungan inflasi tidak dilakukan untuk Kota Payakumbuh.

** Proyeksi menggunakan formula sesuai RPJPD

**** Indikator Indeks Kualitas Lahan merupakan indikator pengganti indeks tutupan lahan, sesuai dengan formula baru dalam penghitungan IKLH

***** Indikator Jumlah kematian ibu merupakan indikator pengganti Angka kematian Ibu sesuai surat Kemenkes nomor PR.01.01/A/2952/2025 tanggal 17 Juli 2025 perihal Penyelarasan Indikator Kinerja Kesehatan RIBK 2025-2029 dalam RPJMD Renstra-PD 2025-2029

****** "Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan dan/atau dari dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan " merupakan indikator proxy pengganti indikator IUP " Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal" sesuai surat Keputusan Gubernur Sumbar nomor 050-459-2025 tentang Evaluasi Ranperda Kota Payakumbuh tentang RPJMD 2025-2029.

# 2. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

## A. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029

### 1). STRATEGI

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, pentahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Dengan kata lain strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan yang telah ditetapkan.

Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan yang bersifat operasional. Secara sederhana, perumusan strategi dapat memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah agar diperoleh strategi yang lebih terarah dalam pencapaian sasaran pembangunan.

RPJMN 2025-2029 secara khusus menekankan strategi pembangunan nasional sebagaimana terdapat pada gambar berikut:




**Tabel 3.8** Strategi Pentahapan Pembangunan RPJMD

| TAHAP 1 (2025) | TAHAP II (2026) | TAHAP III (2027) | TAHAP IV (2028) | TAHAP V (2029) |
|---|---|---|---|---|
| Peningkatan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat melalui:<br>1. peningkatan produktivitas sektor sektor perekonomian dan UMKM;<br>2. melakukan perbaikan kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan tenaga kerja) dan upaya | Pengembangan ekonomi masyarakat dan pembangunan sosial melalui:<br>1. keberlanjutan pembangunan sumberdaya pendidikan, Kesehatan dan peningkatan keterampilan kerja bagi masyarakat,<br>2. melanjutkan pembangunan infrastruktur | Sebagai *midle of term* dari rencana pembangunan jangka menengah daerah adalah pemantapan pembangunan diberbagai bidang dengan memperhatikan capaian sasaran tahun-tahun sebelumnya sebagai fokus pembangunan dan akan mengedepankan | Dalam rangka menuju daya saing daerah, maka arah kebijakan pembangunan tahun keempat difokuskan pada pemantapan produktivitas semua sektor ekonomi dengan semakin meluasnya dunia usaha yang didukung dengan pengembangan infrastruktur yang | Diarahkan pada Pemenuhan target-target pembangunan pada sektor-sektor atau bidang yang masih tertinggal; pemenuhan layanan dasar yang berkualitas; Penyediaan infrastuktur dan tata Kelola yang mantap mencapai |

| TAHAP 1 (2025) | TAHAP II (2026) | TAHAP III (2027) | TAHAP IV (2028) | TAHAP V (2029) |
|---|---|---|---|---|
| penanggulangan kemiskinan;<br>3. perbaikan kinerja birokrasi dan layanan publik di berbagai bidang dengan dukungan teknologi informasi diarahkan untuk meraih prestasi;<br>4. perbaikan dan pembangunan infrastruktur juga terus dilakukan dan difokuskan pada pembangunan dan peningkatan jalan sebagai penghubung pusat-pusat pertumbuhan/Kawasan strategis dan infrastruktur publik lainnya menuju msyarakat maju bermartabat dan sejahtera dalam tatanan kehidupan yang religi | daerah yang diharapkan telah berdampak nyata terhadap perkembangan ekonomi masyarakat khususnya sektor UMKM;<br>3. Pemantapan kinerja layanan birokrasi dan layanan publik sudah pada tahap pemenuhan SDM berkualitas dengan cakupan system layanan berbasis elektronik hingga tingkat Kelurahan;<br>4. upaya penanggulangan kemiskinan melalui sinergitas program diharapkan telah berdampak pada penurunan angka kemiskinan. | sektor-sektor yang tertinggal. Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik, pemenuhan infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung serta peningkatan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, akan terus ditata dan semakin disempurnakan. Pada tahap ini nilai-nilai pemberdayaan masyarakat diharapkan sudah mulai berkembang dengan baik dan bersinergi antar sektor pembangunan yang memang menjadi perhatian dan akan dikedepankan menuju masyarakat Kota Payakumbuh yang maju dan berdaya saing | semakin mantap, pengembangan sumberdaya manusia yang semakin berkualitas, masyarakat yang semakin sejahtera dan mandiri dalam tatanan masyarakat yang religi. Dukungan pengarusutamaan tata kelola juga telah baik dan semakin akuntabel dengan budaya melayani yang semakin cepat. tepat dan terjangkau. | masyarakat yang maju dan berdaya saing. |

Sedangkan berdasarkan permasalahan serta isu strategis yang telah dikemukakan yang kemudian dikaitkan dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program prioritas daerah Tahun 2025-2029 yang dijabarkan sebagai berikut.

**Tabel 3.9** Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

| MISI/ SASARAN | | STRATEGI | |
|---|---|---|---|
| **A** | **Mewujudkan SDM yang berkualitas** | | |
| 1 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 1 | Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat |
| 2 | Meningkatnya pemerataan kualitas Pendidikan | 2 | Meningkatkan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu, merata dan berkeadilan |
| | | 3 | Meningkatkan literasi dan budaya baca masyarakat |
| | | 4 | Meningkatkan Kualitas Pemuda dan Olah Raga |
| | | 5 | Meningkatkan derajat Pendidikan masyarakat |
| 3 | | 6 | Meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial masyarakat |

| MISI/ SASARAN | | STRATEGI | |
|---|---|---|---|
| | Menurunkan Tingkat Kemiskinan | 7 | Meningkatkan penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan terintegrasi |
| 4 | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak | 8 | Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat |
| | | 9 | Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak |
| | | 10 | Meningkatkan Pengendalian penduduk Ketahanan Keluarga |
| **B** | **Mewujudkan Iklim Ekonomi yang kompetitif** | | |
| 5 | Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat | 11 | Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja |
| | | 12 | Meningkatkan kesempatan kerja |
| 6 | Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal | 13 | Meningkatkan kualitas Usaha mikro dan koperasi |
| | | 14 | Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan |
| | | 15 | Meningkatkan pertumbuhan sektor industri |
| | | 16 | Menumbuhkembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif |
| | | 17 | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor jasa pendidikan dan jasa kesehatan |
| | | 18 | Mengoptimalkan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi |
| | | 19 | Meningkatkan produksi, nilai tambah dan daya saing pertanian, peternakan, perikanan dan Ketahanan Pangan |
| | | 20 | Meningkatkan penerapan ekonomi hijau dalam pembangunan |
| 7 | Meningkatnya Iklim Investasi Daerah | 21 | Meningkatkan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi |
| **C** | **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan kondusif** | | |
| 8 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | 22 | Meningkatkan kualitas pelayanan publik |
| | | 23 | Mengembangkan pemerintahan berbasis digital |
| 9 | Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel | 24 | Mewujudkan kelembagaan yang tepat fungsi |
| | | 25 | Mewujudkan SDM aparatur yang berkualitas |
| | | 26 | Meningkatkan transparansi dalam perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset daerah |
| 10 | Meningkatnya Pendapatan daerah | 27 | Optimalisasi sumber pendapatan daerah |
| | | 28 | Pengembangan BUMD |
| 11 | Terciptanya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | 29 | Meningkatkan ketertiban umum dan pelayanan perlindungan masyarakat |
| | | 30 | Meningkatkan kualitas pelayanan Penanggulangan Bencana |
| **D** | **Mewujudkan nuansa imani melalui pendekatan budaya dan adat** | | |
| 12 | Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat | 31 | Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan |
| | | 32 | Meningkatkan pengembangan kebudayaan |
| **E** | **Mewujudkan sarana perkotaan yang humanis ramah lingkungan dan berkelanjutan** | | |
| 13 | | 33 | Meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan |

| MISI/ SASARAN | | STRATEGI | |
|---|---|---|---|
| | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | | |
| | | 34 | Meningkatkan pengelolaan sampah kota secara terpadu dan komprehensif |
| | | 35 | Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman |
| 14 | Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas | 36 | Meningkatkan infrastruktur perkotaan yang inklusif dan ramah lingkungan |
| | | 37 | Meningkatkan kualitas penataan kota |

## 2). ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan arah kebijakan memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan dirumuskan untuk mendukung strategi. Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada tujuan dan sasaran.

Arah kebijakan disusun sebagai pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalisasikan pilihan strategi hingga memiliki fokus sesuai waktu pelaksanaannya. Sementara penekanan tema/fokus pembangunan setiap tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Arah kebijakan Kota Payakumbuh ditetapkan berdasarkan capaian sasaran pembangunan jangka menengah periode sebelumnya agar terdapat kesinambungan dalam pencapaian tujuan jangka panjang daerah.

Arah kebijakan Pembangunan jangka menengah Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.10** Strategi, Arah Kebijakan dan Pentahapan RPJMD 2025-2029

| VISI | PAYAKUMBUH MAJU BERMARTABAT MELALUI PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN SENTRA UMKM YANG KOMPETITIF | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MISI** | **STRATEGI** | | **ARAH KEBIJAKAN** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| **MEWUJUDKAN SDM YANG BERKUALITAS** | 1 | Meningkatkan kualitas Kesehatan masyarakat | Peningkatan dan pemerataan kualitas dan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan (Pemenuhan sarpras puskesmas) | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan (Sekolahkan dokter umum yang ada menjadi spesialis dan tenaga kesehatan lainnya) | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Peningkatan cakupan jaminan kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam penjaminan kesehatan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Pengoptimalan upaya promotif dan preventif kesehatan melalui gaya hidup bersih dan sehat (Mengoptimalkan upaya deteksi dini, vaksin dll) | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Pengoptimalan sistem pengawasan obat dan makanan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Penanggulangan permasalahan gizi mikro dan gizi makro dan penuntasan masalah stunting. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Pengembangan kemitraan dengan organisasi non-pemerintah dan swasta dalam mendukung kampanye imunisasi. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Dukungan pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui dan anak Balita. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Pemenuhan konsumsi pangan masyarakat | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 2 | Meningkatkan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu, merata dan berkeadilan | Pemerataan dan peningkatan akses dan sarana prasarana Pendidikan PAUD, dasar dan menengah (Pembangunan PAUD di setiap kelurahan) | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Penguatan digitalisasi sekolah | | √ | √ | √ | √ |
| | | | Penyediaan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan | | √ | √ | √ | √ |

| VISI | PAYAKUMBUH MAJU BERMARTABAT MELALUI PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN SENTRA UMKM YANG KOMPETITIF | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISI | STRATEGI | | ARAH KEBIJAKAN | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi (Beasiswa utk anak masyarakat miskin dan anak berprestasi) | | | | | |
| | | | Peningkatan kualitas kurikulum yang adaptif serta asesmen kompetensi minimum (Menunjang mulok, Pendidikan karakter dan inovasi) | | √ | √ | √ | √ |
| | | | Peningkatan Kompetensi guru dan pengembangan guru berkarakter (Pelatihan dan kunjungan ke daerah yang lebih maju) | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Penguatan Pendidikan inklusif yang responsif untuk anak-anak disabilitas atau berkebutuhan khusus | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Menyiapkan kebijakan yang mengatur tentang pendidikan sekolah negeri dan swasta (Kolaborasi Lembaga swasta, negeri dan diknas dalam meningkatkan kualitas pendidikan) | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Meningkatkan kualitas dan perijinan sekolah non formal, sehingga siswa dari sekolah non formal berbasis agama/sekolah tahfiz/*home schooling* yang belum memiliki izin dari Dinas Pendidikan, tetap mendapatkan fasilitasi pendampingan dan dukungan untuk peningkatan kualitas pendidikannya (Siswa sekolah non formal berbasis agama/sekolah tahfiz/*home schooling* tidak tercatat di dapodik sehingga berpengaruh ke APK APM) | | √ | √ | √ | √ |
| | | | Mengembangkan masing-masing sekolah dengan keunggulan (mata pelajaran) tertentu | | √ | √ | √ | √ |
| | | | Meningkatkan pendidikan karakter, sehingga tercipta budaya yang berkarakter dan berakhlak (Melalui kearifan lokal) | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Pemberian insentif untuk Guru TPA, guru PAUD dan Guru Non ASN (Menaikkan insentif secara berkala) | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Penguatan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama. | | | √ | √ | √ |
| | | | Pemetaan kebutuhan satuan pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Regrouping sekolah) | √ | √ | √ | √ | √ |

| VISI | PAYAKUMBUH MAJU BERMARTABAT MELALUI PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN SENTRA UMKM YANG KOMPETITIF | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISI | STRATEGI | | ARAH KEBIJAKAN | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | Pembangunan sekolah Garuda | | | | √ | √ |
| | 3 | Meningkatkan literasi dan budaya baca masyarakat | Pengembangan budaya literasi berbasis masyarakat | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Mendorong layanan pengelolaan perpustakaan berbasis IT | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 4 | Meningkatkan kualitas pemuda dan olah raga | Peningkatan pembibitan atlit dan pembinaan olahraga prestasi | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Peningkatan sarana dan prasarana Olahraga | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 5 | Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat | Pemberian beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu dan/ atau bagi yang berprestasi. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 6 | Meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial masyarakat | Perluasan cakupan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi masyarakat miskin, kelompok marjinal dan rentan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Meningkatkan kualitas dan tata kelola data kemiskinan yang komprehensif, valid dan terintegrasi sebagai dasar dalam rancangan program yang lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 7 | Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan yang komprehensif dan terintegrasi | Meningkatkan pengentasan kemiskinan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Meningkatkan perlindungan sosial adaptif terintegrasi untuk memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran berbasis fakta | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Pemberian fasilitasi bantuan modal usaha dalam peningkatan pendapatan masyarakat miskin | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Percepatan penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan graduasi yang terintegrasi | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemiskinan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Pemberian insentif untuk tenaga relawan sosial | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan | √ | √ | √ | √ | √ |

| VISI | PAYAKUMBUH MAJU BERMARTABAT MELALUI PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN SENTRA UMKM YANG KOMPETITIF | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISI | STRATEGI | | ARAH KEBIJAKAN | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | Peningkatan sarana dan prasarana penggulangan masalah sosial dan pengembangan sumber daya tenaga kesejahteraan sosial | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Pendirian sekolah rakyat untuk masyarakat miskin | | | | √ | √ |
| | 8. | Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat | Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Pembentukan dan penataan kelembagaan LKK, dan Penyusunan pedoman pengelolaan administrasi tata kelola kelembagaan) | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan (Meningkatkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat) | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Mendorong peningkatan kapasitas masyarakat antara lain melalui pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan, | | √ | √ | √ | √ |
| | | | Penguatan dukungan anggaran operasional dan sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK: RT, RW, LPM, Karang Taruna, PKK, Posyandu) | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Penyediaan insentif bagi petugas RT, RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Meningkatkan kolaborasi dan kemitraan dengan LKK dalam mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam pembangunan | | √ | √ | √ | √ |
| | | | Penguatan peran organisasi kemasyarakatan dalam pendidikan keluarga dan kelompok masyarakat pada aspek sosial, ekonomi serta politik | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 9 | Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak | Peningkatan sistem perlindungan perempuan dan anak | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Meningkatkan peran keluarga dalam melindungi hak-hak anak. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Meningkatkan peran serta perempuan dalam ketahanan keluarga | √ | √ | √ | √ | √ |

| VISI | PAYAKUMBUH MAJU BERMARTABAT MELALUI PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN SENTRA UMKM YANG KOMPETITIF | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MISI** | **STRATEGI** | | **ARAH KEBIJAKAN** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| | | | Meningkatkan peran serta Perempuan dan anak dalam pembangunan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 10 | Meningkatkan Pengendalian penduduk dan Ketahanan Keluarga | Fasilitasi pembimbingan, pengembangan dan penguatan penyiapan pengasuhan 1.000 hari pertama kelahiran. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan potensi lahan pekarangan. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat & kesejahteraan keluarga | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Meningkatkan pembangunan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Pemantapan model kebijakan dan implementasi membangun ketahanan keluarga dan lingkungan berbasis kearifan lokal | √ | √ | √ | √ | √ |
| **MEWUJUDKAN IKLIM EKONOMI YANG KOMPETITIF** | 11 | Meningkatkan kualitas dan produktivitas Tenaga kerja | Peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi bagi masyarakat. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Menyiapkan program magang, pelatihan industri dan sertifikat keahlian bagi tamatan sekolah kejuruan. | | √ | √ | √ | √ |
| | 12 | Meningkatkan kesempatan kerja | Memperkuat kerjasama, kemitraan dan pemanfaatan teknologi untuk menyerap dan/atau menciptakan lapangan kerja baru | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Mengembangkan kluster industry dan inkubasi bisnis dalam penciptaan pengusaha baru | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Meningkatkan kualitas SDM *entrepreneur* melalui pemberdayaan, pendampingan serta pendidikan formal dan informal | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 13 | Meningkatkan kualitas usaha mikro dan koperasi | Mendorong peningkatan skala usaha mikro melalui penguatan modal usaha mikro | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Penguatan proses bisnis dan kapasitas layanan Usaha mikro melalui perluasan peran ekosistem digital | √ | √ | √ | √ | √ |

| VISI | PAYAKUMBUH MAJU BERMARTABAT MELALUI PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN SENTRA UMKM YANG KOMPETITIF | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISI | STRATEGI | | ARAH KEBIJAKAN | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | Perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Peningkatan produktivitas dan daya saing produk industri berbasis sumberdaya lokal. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Penataan basis data dan penyederhanaan regulasi pemberdayaan usaha mikro, pengembangan kewirausahaan, dan koperasi | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar (baik dalam pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan kemitraan usaha, pengembangan kapasitas kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)) | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Penguatan kelembagaan koperasi (Pengawasan, pembinaan koperasi) | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi (mencakup peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi, pendampingan kelompok untuk berkoperasi, pengembangan jangkauan dan cakupan usaha koperasi, serta pengembangan inovasi koperasi) | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Pemberdayaan ekonomi lokal melalui pembentukan koperasi merah putih | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 14 | Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan | Meningkatkan upaya pengendalian harga pangan strategis (inflasi daerah, terkait upaya pengendalian inflasi/ stabilitas harga.). | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Revitalisasi dan penataan pasar tradisional, pertokoan Payakumbuh dan Pedagang Kaki Lima | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Penerapan kebijakan perlindungan konsumen dan tertib niaga. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Mendorong pertumbuhan dan menciptakan iklim yg kondusif serta perluasan pangsa pasar yang potensial. | √ | √ | √ | √ | √ |

| VISI | PAYAKUMBUH MAJU BERMARTABAT MELALUI PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN SENTRA UMKM YANG KOMPETITIF | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISI | STRATEGI | | ARAH KEBIJAKAN | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | Peningkatan kualitas, inovasi dan promosi perdagangan secara berkelanjutan. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Pemanfaatan peluang terhadap Pembangunan Tol Trans Sumatera: Bukittinggi - Payakumbuh - Bangkinang – Pekanbaru | | √ | √ | √ | √ |
| | 15 | Meningkatkan pertumbuhan sektor industri | Mendorong bertumbuhnya industri dari hulu ke hilir. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Penguatan kelembagaan sentra-sentra industri | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Meningkatnya industri halal dan standarisasi produk sebagai bagian dari pengembangan ekonomi syariah | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Penguatan infrastruktur pendukung industri. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Mendorong pengembangan layanan usaha, pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM) dan kemudahan akses pembiayaan usaha | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Peningkatan kualitas pendataan dan pengawasan industri | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Mendorong tumbuhnya industri manufaktur | | √ | √ | √ | √ |
| | 16. | Menumbuhkembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif | Inovasi pariwisata berkelanjutan (*Sustainability Tourism)* berbasis komunitas (*Community Based Tourism*), budaya dan kearifan lokal | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Peningkatan promosi pariwisata Kota Payakumbuh antara lain melalui pelaksanaan *event-event* pariwisata, budaya dan olah raga | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Penguatan integrasi Pengembangan Pariwisata Halal dengan industry pariwisata yang adaptif. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Pengembangan Ekonomi Kreatif dan UMKM dengan Mendorong tumbuhnya sektor ekonomi kreatif dan UMKM melalui penyediaan akses pelatihan, pembiayaan, serta pemasaran produk produk lokal, terutama yang dapat diekspor ke negara negara *Global South* serta memberikan insentif bagi pelaku usaha yang berinovasi dalam produk dan | √ | √ | √ | √ | √ |

| VISI | PAYAKUMBUH MAJU BERMARTABAT MELALUI PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN SENTRA UMKM YANG KOMPETITIF | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISI | STRATEGI | | ARAH KEBIJAKAN | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | layanan yang mendukung keberlanjutan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing | | | | | |
| | 17 | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor jasa pendidikan dan jasa kesehatan | Meningkatkan dukungan terhadap pendidikan tinggi dan vokasi menjadi kampus dan sekolah unggulan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Meningkatkan layanan spesifik/ khusus rumah sakit. | | √ | √ | √ | √ |
| | 18 | Mengoptimalkan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi | Meningkatkan fungsi pelayanan perdagangan dan jasa di Kota Payakumbuh dengan menata kembali pusat-pusat kegiatan ekonomi | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Meningkatkan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang memadai (Baik oleh pemerintah maupun swasta) | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Meningkatkan ketersediaan ruang usaha bagi pengusaha informal, mikro dan kecil di Kota Payakumbuh | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 19 | Meningkatkan produksi, nilai tambah dan daya saing pertanian, peternakan, perikanan dan Ketahanan Pangan | Penerapan teknologi untuk peningkatan produtivitas hasil pertanian, peternakan dan perikanan. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Penyediaan bantuan sarana dan prasarana Pertanian, peternakan dan perikanan (Termasuk pemberian subsidi sarana pertanian untuk menekan biaya produksi, serta Penyediaan bibit dan benih varietas unggul) | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Penguatan infrastruktur pertanian, peternakan dan perikanan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Meningkatkan pengawasan penerapan LP2B dengan penerapan insentif dan disisentif penggunaan lahan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Fasilitasi pemasaran dan pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Peningkatan kualitas SDM petani, peternak dan pembudidaya ikan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Pembinaan dan pengembangan komoditi pertanian (padi, jagung, cabe, bawang, jamur, florikultura, dll ) | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Penguatan lumbung pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian | √ | √ | √ | √ | √ |

| VISI | PAYAKUMBUH MAJU BERMARTABAT MELALUI PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN SENTRA UMKM YANG KOMPETITIF | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MISI** | **STRATEGI** | | **ARAH KEBIJAKAN** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| | | | Meningkatkan ketersediaan pangan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 20 | Meningkatkan Penerapan ekonomi hijau dalam pembangunan | Optimalisasi upaya sirkular ekonomi (pengelolaan sampah, produksi dan konsumsi berkelanjutan) | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Meningkatkan pelatihan dan sertifikasi pekerjaan sektor energi terbarukan, pertanian organik, dan usaha/industri ramah lingkungan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Pemanfaatan transportasi ramah lingkungan | | | √ | √ | √ |
| | | | Penerapan insentif ekonomi hijau melalui *green procurement.* | | √ | √ | √ | √ |
| | | | Pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan akibat kegiatan ekonomi | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Penataan kota yang rendah emisi dan ramah lingkungan | | | √ | √ | √ |
| | | | Mengoptimalkan potensi kredit karbon dan pengelolaan sampah dengan prinsip zero waste untuk menghasilkan pendapatan baru dan mengurangi biaya operasional daerah dalam pengelolaan lingkungan | | √ | √ | √ | √ |
| | | | Menerapkan kebijakan ramah lingkungan di setiap proyek pembangunan dan memprioritaskan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam | | √ | √ | √ | √ |
| | 21 | Meningkatkan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi | Peningkatan data potensi dan peluang investasi | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Peningkatan upaya promosi investasi | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Meningkatkan kualitas layanan PTSP kepada masyarakat dan dunia usaha. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Penataan regulasi daerah dalam mendukung kemudahan berusaha. | | √ | √ | √ | √ |
| | | | Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan mitra pembangunan dalam pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 22 | | Pengoptimalan layanan publik masyarakat | √ | √ | √ | √ | √ |

| VISI | PAYAKUMBUH MAJU BERMARTABAT MELALUI PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN SENTRA UMKM YANG KOMPETITIF | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MISI** | **STRATEGI** | | **ARAH KEBIJAKAN** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| **MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN KONDUSIF** | | Meningkatkan kualitas pelayanan publik | Peningkatan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Peningkatan fasilitasi dan koordinasi kerjasama daerah | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Optimalisasi pengelolaan arsip daerah | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 23 | Mengembangkan pemerintahan berbasis digital | Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Penguatan aspek pemerintahan digital melalui implementasi SPBE | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Meningkatkan penerapan *Smartcity* | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Peningkatan dan pengembangan Infrastruktur Digital untuk mendukung pelayanan publik yang lebih efisien, termasuk penerapan sistem berbasis cloud untuk administrasi pemerintahan dan sistem pembayaran pajak online yang lebih luas dan mudah diakses oleh masyarakat. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 24 | Mewujudkan kelembagaan yang tepat fungsi | Penataan organisasi dan kelembagaan yang tepat fungsi dan adaptif | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Penguatan kelembagaan berbasis kinerja | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Penguatan fungsi koordinasi dan sinergi antar lembaga | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 25 | Mewujudkan SDM Aparatur yang berkualitas | Peningkatan kualitas ASN yang professional dan bebas korupsi. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, *reward* dan *punishment*. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Peningkatan/ perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Optimalisasi pemenuhan sumber daya aparatur berbasis kebutuhan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 26 | Meningkatkan transparansi dalam | Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pemerintah daerah | √ | √ | √ | √ | √ |

| VISI | PAYAKUMBUH MAJU BERMARTABAT MELALUI PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN SENTRA UMKM YANG KOMPETITIF | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISI | STRATEGI | | ARAH KEBIJAKAN | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | perencanaan, pengelolaan keuangaan dan aset daerah | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Mengoptimalkan pengembangan dan penelitian serta inovasi daerah dalam layanan publik | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Optimalisasi pengelolaan asset- aset daerah, terutama aset sekolah, sarana kesehatan, aset pasar, perkantoran dan infrastruktur. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten Lima Puluh Kota, terkait dengan pengelolaan aset | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Peningkatan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan independensi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Optimalisasi kualitas pengadaan barang dan jasa | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Peningkatan fasilitasi dan koordinasi bidang hukum | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Peningkatan kebijakan bidang perekonomian | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 27 | Optimalisasi Sumber Pendapatan Daerah | Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, pembayaran retribusi non tunai, dsb) | | √ | √ | √ | √ |
| | | | Transformasi sumber pendapatan, ekspansi objek pajak dan reribusi, monetisasi asset daerah, digitalisasi sistim penerimaan serta kontribusi fiskal dari investasi dan perdagangan karbon. | | √ | √ | √ | √ |

| VISI | PAYAKUMBUH MAJU BERMARTABAT MELALUI PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN SENTRA UMKM YANG KOMPETITIF | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MISI** | **STRATEGI** | | **ARAH KEBIJAKAN** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| | 28 | Pengembangan BUMD | Meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMD | | √ | √ | √ | √ |
| | | | Peningkatan kualitas layanan BUMD | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Kerjasama BUMD dengan pihak lain | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas BUMD | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Pembentukan BUMD potensial | | √ | √ | √ | √ |
| | 29 | Meningkatkan ketertiban Umum dan pelayanan perlindungan masyarakat | Peningkatan fasilitas dalam menunjang keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Peningkatan kemampuan personal pelayanan ketertiban dan penanganan situasi darurat | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Meningkatkan kerjasama dan sinergi dengan penegak hukum, masyarakat dan stake *holders*. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Meningkatkan pengamalan pancasila, demokrasi dan HAM dalam kehidupan bermasyarakat | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Penguatan peran serta dan koordinasi dengan lembaga dan organisasi budaya | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 30 | Meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan bencana | Mengembangkan sistim informasi kebencanaan yang valid secara terbuka ke masyarakat | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Optimalisasi dan pengembangan infrastruktur pengendalian bencana | | √ | √ | √ | √ |
| | | | Mengembangkan sistim deteksi dini kebencanaan | | √ | √ | √ | √ |
| | | | Memperkuat masyarakat Tangguh bencana | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Meningkatkan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Penguatan mitigasi bencana pada saat bencana dan pasca bencana. | √ | √ | √ | √ | √ |
| **MEWUJUDKAN NUANSA IMANI** | 31 | Meningkatkan pemahaman dan | Meningkatkan penguatan pendidikan karakter berbasis agama kepada tenaga pendidik dan siswa | √ | √ | √ | √ | √ |

| VISI | PAYAKUMBUH MAJU BERMARTABAT MELALUI PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN SENTRA UMKM YANG KOMPETITIF | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MISI** | **STRATEGI** | | **ARAH KEBIJAKAN** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| **MELALUI PENDEKATAN BUDAYA DAN ADAT** | | pengamalan ajaran agama dalam kehidupan | Pembangunan Mesjid Agung | | √ | √ | √ | √ |
| | | | Pemberian insentif kepada guru TPA dan Garin masjid | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Pemberian bantuan operasional sarana ibadah di Kota Payakumbuh | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Pengembangan kelurahan madani | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Mendorong munculnya kader ulama pembina umat dari mesjid | | | | √ | √ |
| | | | Peningkatan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 32 | Meningkatkan pengembangan kebudayaan | Mengoptimalkan pemberdayaan lembaga adat dalam mendukung kebudayaan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Pelestarian adat dan budaya dengan pendekatan ABS SBK melalui edukasi dan digitalisasi | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Meningkatnya upaya penggalian dan penyelamatan literasi Sejarah, budaya dan cagar budaya | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Peningkatan dan penguatan peran dan potensi budaya lokal dalam aktivitas sosial dan ekonomi kemasyarakatan melalui pengembangan kegiatan bernuansa kebudayaan. | √ | √ | √ | √ | √ |
| **MEWUJUDKAN SARANA PERKOTAAN YANG HUMANIS RAMAH LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN** | 33 | Meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan | Menigkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH), taman kota dan Tempat Pemakaman Umum (TPU). | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Meningkatnya pengelolaan limbah domestik dan non domestik | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Meningkatnya pengawasan dan pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Meningkatkan upaya mitigasi perubahan iklim melalui program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Revitalisasi kearifan lokal dalam pengendalian alih fungsi lahan, dan perlindungan hutan dan lahan (Termasuk terkait pemberdayaan/ peran serta masyarakat dalam rehabilitasi lahan/hutan) | | | √ | √ | √ |

| VISI | PAYAKUMBUH MAJU BERMARTABAT MELALUI PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN SENTRA UMKM YANG KOMPETITIF | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISI | STRATEGI | | ARAH KEBIJAKAN | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 34 | Meningkatkan pengelolaan persampahan secara terpadu dan komprehensif. | Intensifikasi Pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pengurangan sampah (Terkait Sumber daya manusia) | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Meningkatkan kualitas sarana prasarana pengelolaan persampahan kota | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Penyediaan infrastruktur TPA/TPST/TPS3R yang respresentatif. | | √ | √ | √ | √ |
| | | | Optimalisasi pemanfaatan teknologi dan inovasi pengelolaan sampah kota, ditingkat sumber dan Kawasan (Terkait sarana prasarana) | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Memperkuat kelembagaan dan regulasi pengelolaan persampahan kota, termasuk tingkat local dan non formal (Terkait kelembagaan dan regulasi) | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Optimalisasi penyediaan anggaran pengelolaan sampah | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Meningkatkan upaya desentralisasi pengelolaan sampah | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 35 | Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman | Meningkatkan pemenuhan prasarana, sarana, utilitas (PSU) permukiman. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Meningkatkan akses kepemilikan rumah dan hunian yang layak. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Bantuan sanitasi dan peningkatan RTLH bagi masyarakat berpenghasilan rendah. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Pencegahan dan revitalisasi kawasan kumuh | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Ikut memsukseskan program strategis nasional 3 juta rumah | | √ | √ | √ | √ |
| | 36 | Meningkatkan infrastruktur perkotaan yang inklusif dan ramah lingkungan | Pengembangan kawasan strategis perkotaan (7 kawasan strategis) | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pembangunan *Smart Transportation* (termasuk konektivitas dengan destinasi wisata luak nan bungsu, berupa jalan, jembatan, moda transpotasi, dan kerjasama dengan kab 50 kota/ daerah hinterland). | √ | √ | √ | √ | √ |

| VISI | PAYAKUMBUH MAJU BERMARTABAT MELALUI PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN SENTRA UMKM YANG KOMPETITIF | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISI | STRATEGI | | ARAH KEBIJAKAN | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | Ketersediaan prasarana dan sarana perkantoran pemerintahan yang memadai | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Meningkatkan kualitas infrastruktur layanan dasar (PADM, Listrik, Drainase, Persampahan, limbah domestik/ sanitasi (PHBS dan STBM), dll) | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Penataan parkir yang representatif | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Meningkatnya kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan (Sarana Perkotaan meliputi berbagai fasilitas publik yang langsung dimanfaat oleh masyarakat seperti taman rekrasi, pasar, pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan peribadatan) dll. Sedangkan prasarana perkotaan merupakan penunjang berfungsinya sarana perkotaan seperti jalan, air limbah, persampahan, drainase dll) | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Mengembangkan upaya untuk menjamin ketersediaan air minum dan memperluas jangkauannya | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 37 | Meningkatkan kualitas penataan kota | Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan penataan ruang | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Optimalisasi penataan kota dan pedestrian | √ | √ | √ | √ | √ |

## B. PROGRAM-PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029

Pentahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Pentahapan pembangunan dapat disajikan dengan tabel. Penyajian lokus pembangunan untuk kabupaten/kota dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.

Program prioritas dihasilkan dari cascading kinerja (bukan cascading indikator) yang dimulai dari visi sampai dengan outcome serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya.

**Tabel 3.11** Rumusan Program Prioritas RPJMD

| VISI/MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VISI<br>Payakumbuh Maju Bermartbat Melalui Pemberdayaan, Pengembangan Kualitas Pendidikan, dan Sentra UMKM Yang Kompetitif | | | | | | |
| MISI-1:<br>Mewujudkan SDM yang berkualitas | | | | | | |
| | Terwujudnya SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing | | | Indeks Pembangunan Manusia | | |
| | | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | | 1. Usia Harapan Hidup<br>2. Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita<br>3. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence Of Undernourishment)<br>4. Jumlah Kematian Ibu<br>5. Cakupan Penemuan Dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)<br>6. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate) | | |
| | | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | 1. Prevalensi Stunting berdasarkan E-PPGBM<br>2. Jumlah Kematian Ibu | Program pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | PD Pengampu Urusan Kesehatan |
| | | | Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan, dan | Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | PD Pengampu Urusan Kesehatan |

| VISI/MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | makanan dan minuman | | | |
| | | | Meningkatnya penanganan kerawanan pangan | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan | Program Penanganan Kerawanan Pangan | PD Pengampu Urusan Pangan |
| | | | Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan | Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan | Program Pengawasan Keamanan Pangan | PD Pengampu Urusan Pangan |
| | | Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan | | 1. Harapan Lama Sekolah<br>2. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi<br>3. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi<br>4. Rata-rata Lama Sekolah (tahun)<br>5. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi<br>6. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi | | |
| | | | Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah | 1. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam PAUD<br>2. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar<br>3. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13- 15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Pertama | Program Pengelolaan Pendidikan | PD Pengampu Urusan Pendidikan |

| VISI/MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan | | |
| | | | Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan | 1. Indeks pemerataan guru<br>2. Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik | Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | PD Pengampu Urusan Pendidikan |
| | | | Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan | Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat | Program Pembinaan Perpustakaan | PD pengampu Urusan perpustakaan |
| | | | Persentase pemuda yang berwirausaha | Rasio Wirausaha Pemuda | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | PD pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga |
| | | | Jumlah medali pada event olahraga tingkat daerah | Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas | Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan | PD pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Menurunkan Tingkat Kemiskinan | | 1. Tingkat Kemiskinan<br>2. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional<br>3. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan<br>4. Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan dan/atau dari dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan | | |
| | | | Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar | Program Perlindungan Jaminan Sosial | PD Pengampu Urusan Sosial |
| | | | Meningkatnya Pemberdayaan Sosial | Persentase SDM Kesejahteraan Sosial Yang Meningkat | Program Pemberdayaan Sosial | PD Pengampu Urusan Sosial |

| VISI/MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kompetensinya Dalam Pelayanan Sosial | | |
| | | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak | | 1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)<br>2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)<br>3. Indeks Perlindungan Khusus Anak<br>4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | | |
| | | | Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pembinaan Keluarga Sejahtera (KS) | 1. Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga<br>2. Median Usia Kawin Pertama (MUKP) wanita<br>3. Indeks Lansia Berdaya<br>4. Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja<br>5. Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif | 1. Nilai IKM<br>2. Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif | Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat |
| | | | Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak | 1. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)<br>2. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif<br>3. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten/ Kota | Program Perlindungan Khusus Anak | PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG | 1. Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD | Program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan | PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan |

| VISI/MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dan peran perempuan dalam pembangunan | 2. Tingkat Kategori Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) | | Perlindungan Anak |
| | | | Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat | Skor Pola Pangan Harapan | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | PD Pengampu Urusan Pangan |
| MISI-2:<br>Mewujudkan Iklim Ekonomi yang kompetitif | | | | | | |
| | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif | | | 1. Pertumbuhan Ekonomi<br>2. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)<br>3. Proporsi kontribusi PDRB kota Payakumbuh terhadap PDRB Provinsi<br>4. PDRB Per-kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) | | |
| | | Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat | | 1. Rasio Gini<br>2. Tingkat Pengangguran Terbuka<br>3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja<br>4. Proporsi penciptaan Lapangan Kerja Formal<br>5. Rasio Kewirausahaan | | |
| | | | Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan | Indek Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa | Program Perekonomian Dan Pembangunan | PD Pengampu Fungsi Sekretariat Daerah |
| | | | Meningkatnya produktivitas tenaga kerja | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | PD Pengampu Urusan Ketenagakerjaan |
| | | Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal | | 1. Kontribusi UMKM terhadap PDRB | | |

| VISI/MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2. Proporsi jumlah UKM non pertanian<br>3. Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB<br>4. Proporsi jumlah IKM<br>5. Ketersediaan Pangan Utama (ton)<br>6. Stabilisasi Harga Beras<br>7. Stabilisasi Harga Cabe<br>8. Stabilisasi Harga Bawang<br>9. Tingkat Inflasi<br>10. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)<br>11. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB<br>12. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum<br>13. Jumlah Tamu wisatawan mancanegara (hotel berbintang) (ribu orang<br>14. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (juta rupiah/orang<br>15. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi<br>16. ROA BUMD | | |
| | | | Meningkatnya produktivitas koperasi | Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | PD Pengampu Urusan Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah |
| | | | Meningkatnya daya saing UMKM | Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor | Program Pengembangan Usaha, Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) | PD Pengampu Urusan Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah |

| VISI/MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri | 1. Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal<br>2. Pertumbuhan Wirausaha | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | PD Pengampu Urusan Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah |
| | | | Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi | Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya | Program peningkatan sarana distribusi perdagangan | PD Pengampu Urusan Perdagangan |
| | | | Meningkatnya penanganan kerawanan pangan | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan | Program Penanganan Kerawanan Pangan | PD Pengampu Urusan Pangan |
| | | | Meningkatnya kualitas pelijnan berusaha sektor perindustrian | Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan | Program Pengendalian Izin Usaha Industri | PD Pengampu Urusan Perindustrian |
| | | | Jumlah Fasilitasi Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | PD Pengampu Urusan Pariwisata |
| | | | Persentase objek wisata unggulan dalam kondisi baik, Jumlah pengembangan destinasi pariwisata, Persentase promosi kepariwisataan yang dilaksanakan | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | PD Pengampu Urusan Pariwisata |
| | | | Meningkatnya tata kelola aset daerah | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | PD Pengampu Fungsi Keuangan |
| | | | Meningkatnya distribusi dan | 1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | PD Pengampu Urusan Pertanian |

| VISI/MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | kualitas sarana pertanian | 2. Peningkatan Produksi Hortikultura<br>3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan<br>4. Produktivitas pertanian per hektar per tahun | | |
| | | | Meningkatnya produksi perikanan budidaya | 1. Produksi Perikanan Budidaya<br>2. Persentase Pembudidaya Yang Tergabung Dalam Kelompok Yang Menerapkan Anjuran KKP | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | PD Pengampu Urusan Pertanian |
| | | | Meningkatnya kepatuhan usaha dan / atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup |
| | | Meningkatnya Iklim Investasi Daerah | | 1. Nilai Realisasi Investasi<br>2. Total Dana Pihak Ketiga / PDRB<br>3. Nilai Transaksi Saham Per Kapita (rupiah)<br>4. Total Kredit/PDRB<br>5. Rasio PDRB sektor Jasa Keuangan<br>6. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) | | |
| | | | Meningkatnya kemudahan berinvestasi | Realisasi Total terhadap Target Investasi | Program Iklim Pengembangan Penanaman Modal | PD Pengampu Urusan Penanaman Modal |
| | | | Meningkatnya realisasi pembangunan industri | Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | PD Pengampu Urusan Perindustrian |
| MISI-3: | | | | | | |

| VISI/MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan kondusif | | | | | | |
| | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | | | 1. Indeks RB<br>2. Survey penilaian integritas (SPI) KPK | | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | | 1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik<br>2. Indeks Pemerintahan Digital<br>3. Indeks Pelayanan Publik<br>4. Indeks Kepuasan Masyarakat | | |
| | | | Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | PD Pengampu Urusan Komunikasi Dan Informatika |
| | | | Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk | 1. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak<br>2. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) | Program Pendaftaran Penduduk | PD Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan | Program Pelayanan Penanaman Modal | PD Pengampu Urusan Penanaman Modal |
| | | | Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah | Nilai IKM | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | PD Pengampu Semua Urusan/Fungsi |
| | | Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel | | 1. Nilai Evaluasi AKIP<br>2. Opini BPK atas Laporan Keuangan<br>3. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah | | |

| VISI/MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4. Indeks Masyarakat Digital Indonesia<br>5. Indeks Reformasi Hukum<br>6. Indeks Inovasi Daerah | | |
| | | | Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Program Penyelenggaraan Pengawasan | PD Pengampu Fungsi Inspektorat |
| | | | Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah | Nilai IKM | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Sekretariat Daerah) | PD Pengampu Fungsi Sekretariat Daerah |
| | | | Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional | Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | PD Pengampu Fungsi Pendidikan dan Pelatihan |
| | | | Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | PD Pengampu Fungsi Penelitian Dan Pengembangan |
| | | | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | 1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD<br>2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD | Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | PD Pengampu Fungsi Perencanaan |
| | | | Meningkatnya tata kelola anggaran, Meningkatnya tata kelola | 1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | PD Pengampu Fungsi Keuangan |

| VISI/MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | perbendaharaan, Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan | 2. Persentase Penurunan SILPA<br>3. Opini BPK Atas Laporan Keuangan | | |
| | | Meningkatnya Pendapatan Daerah | | 1. Rasio PAD terhadap APBD<br>2. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB | | |
| | | | Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah, Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital | 1. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah<br>2. Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | PD Pengampu Fungsi Keuangan |
| | | Terciptanya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | | 1. Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum<br>2. Persentase penegakan Perda<br>3. Angka Kriminalitas (per 1000 penduduk)<br>4. Persentase Partai Politik dan Organisasi Masyarakat yang Aktif<br>5. Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan<br>6. Persentase Penanganan Konflik Sosial yang Terjadi di Tengah Masyarakat<br>7. Indeks Risiko Bencana (IRB) | | |
| | | | Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada, Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat, | 1. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan<br>2. Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya<br>3. Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat<br>4. Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas | Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | PD Pengampu Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |

| VISI/MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatnya kapasitas SDM PPNS | | | |
| | | | Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan | Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | PD Pengampu Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat, Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana | 1. Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana<br>2. Persentase Penanganan Pasca Bencana<br>3. Persentase penanganan tanggap bencana darurat | Program Penanggulangan Bencana | PD Pengampu Urusan Penanggulangan Bencana |
| | | | Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran, Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 1. Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran<br>2. Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran | PD Pengampu Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
| MISI-4 :<br>Mewujudkan nuansa imani melalui pendekatan budaya dan adat | | | | | | |
| | Terwujudnya ketahanan sosial budaya masyarakat | | | IPK berbasis ABS SBK | | |

| VISI/MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | yang berlandaskan ABS SBK | | | | | |
| | | Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat | | 1. Karya Budaya yang Ditetapkan<br>2. Cakupan Penguatan idiologi Pancasila dan Karakter kebangsaan | | |
| | | | Persentase objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan | Program Pengembangan Kebudayaan | PD Pengampu Urusan Kebudayaan |
| | | | Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan | Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | PD Pengampu Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | PD Pengampu Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat | 1. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah<br>2. Indeks Reformasi Hukum | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | PD Pengampu Fungsi Sekretariat Daerah |
| MISI-5:<br>Mewujudkan sarana perkotaan yang humanis ramah lingkungan dan berkelanjutan | | | | | | |
| | Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan | | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | | |

| VISI/MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | | 1. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah<br>2. Indeks Kualitas Lahan<br>3. RT dengan Akses Sanitasi Aman<br>4. Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah | | |
| | | | Menurunnya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup | 1. Indeks Kualitas Air<br>2. Indeks Kualitas Udara | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup |
| | | | Meningkatnya tata kelola persampahan | Persentase Timbulan Sampah Yang Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah | Program Pengelolaan Persampahan | PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup |
| | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan limbah | 1. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Pengolahan Air Limbah Akses Aman<br>2. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Meningkatnya kualitas kawasan permukiman | 1. Persentase Peningkatan RTLH Untuk Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 (sepuluh) Ha<br>2. Persentase Rumah Layak Huni | Program Kawasan Permukiman | PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | Meningkatnya Rumah Layak huni | Persentase Rumah Layak Huni | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh | PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas | | 1. Indeks Infrastruktur<br>2. Persentase RT yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau<br>3. Konsumsi listrik per kapita<br>4. Kapasitas Air Baku | | |

| VISI/MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5. Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan | | |
| | | | Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman | Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota | Program Penyelenggaraan Jalan | PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi | 1. Persentase sungai yang berfungsi baik<br>2. Persentase daerah irigasi berkinerja baik<br>3. Kapasitas Air Baku | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat | Persentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan Yang Ramah Lingkungan | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | PD Pengampu Urusan Perhubungan |
| | | | Meningkatnya kualitas bangunan gedung | Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik | Program Penataan Bangunan Gedung | PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

**Tabel 3.12** Program Prioritas Pembangunan Daerah Disertai Pagu Indikatif sesuai Tujuan dan Sasaran

| KODE | MISI/ TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2025) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | |
| 1 | **Misi : Mewujudkan SDM yang berkualitas** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Tujuan :** Terwujudnya SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | **Sasaran :** Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Prevalensi Stunting berdasarkan E-PPBGM | 2,12 | 2,08 | 32.853.583.250,00 | 2.04 | 36.230.290.768,00 | 2.00 | 37.496.916.438,00 | 1.94 | 38.785.674.979,00 | 1.90 | 39.903.204.744,00 | PD Pengampu Urusan Kesehatan |
| | | Jumlah Kematian Ibu (jiwa) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | |
| | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase) | 93 | 94 | 104.999.550,00 | 95 | 79.600.000,00 | 96 | 82.475.000,00 | 97 | 85.493.750,00 | 98 | 87.285.313,00 | PD Pengampu Urusan Kesehatan |
| | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase) | 85 | 85,1 | 50.988.475,00 | 85.15 | 410.000.000,00 | 85.2 | 450.000.000,00 | 85.25 | 381.077.141,00 | 85.3 | 410.000.000,00 | PD Pengampu Urusan Pangan |
| | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%) | 11,5 | 11 | 52.714.900,00 | 10.5 | 899.852.736,00 | 10 | 970.000.000,00 | 9.5 | 795.000.000,00 | 9 | 920.000.000,00 | PD Pengampu Urusan Pangan |

| KODE | MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2025) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | |
| 1.1.2 | **Sasaran :** Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pengelolaan Pendidikan | Tingkat partisipasi warganegara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%) | 98,00 | 98,00 | 24.297.773.465,00 | 98,30 | 131.805.561.660,00 | 98,90 | 135.695.080.825,00 | 99,00 | 135.452.590.579,00 | 99,30 | 135.332.561.482,00 | PD Pengampu Urusan Pendidikan |
| | | Tingkat partisipasi warganegara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | Tingkat partisipasi warganegara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama(%) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | Tingkat partisipasi warganegara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%) | 74,55 | 75,55 | | 76,55 | | 77,55 | | 78,55 | | 79,55 | | |

| KODE | MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2025) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | |
| | Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | Indeks pemerataan guru (%) | 81,00 | 82,00 | 173.335.150,00 | 83,00 | 350.000.000,00 | 84,00 | 350.000.000,00 | 85,00 | 350.000.000,00 | 86,00 | 350.000.000,00 | PD Pengampu Urusan Pendidikan |
| | | Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase) | 58,00 | 60,00 | | 62,00 | | 64,00 | | 66,00 | | 68,00 | | |
| | Program Pembinaan Perpustakaan | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai) | 66,20 | 66,30 | 230.140.650,00 | 66,40 | 2.964.401.228,00 | 66,80 | 2.800.425.000,00 | 67,20 | 2.437.628.000,00 | 67,50 | 2.704.400.600,00 | PD pengampu urusan perpustakaan |
| | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase) | 65 | 65 | 118.591.225,00 | 65 | 1.310.591.421,00 | 70 | 1.260.500.000,00 | 75 | 591.525.000,00 | 75 | 643.101.250,00 | PD pengampu urusan Kepemudaan dan Olahraga |
| | Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan | Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase) | 14 | 15 | 4.287.752.896,00 | 16 | 9.825.000.000,00 | 17 | 9.458.750.000,00 | 18 | 9.151.687.530,00 | 19 | 10.454.271.875,00 | PD pengampu urusan Kepemudaan Dan Olahraga |
| 1.1.3 | **Sasaran: Menurunkan Tingkat Kemiskinan** | | | | | | | | | | | | | |
| | Program perlindungan jaminan sosial | Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase) | 85 | 90 | 890.977.750,00 | 95 | 4.190.977.750,00 | 100 | 4.190.977.750,00 | 100 | 4.190.977.750,00 | 100 | 4.190.977.750,00 | PD Pengampu Urusan Sosial |
| | Program pemberdayaan sosial | Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya | 100 | 100 | 476.882.225,00 | 100 | 1.274.920.110,00 | 100 | 1.691.076.184,00 | 100 | 1.220.576.802,00 | 100 | 1.635.969.332,00 | PD Pengampu Urusan Sosial |

| KODE | MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2025) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | |
| | | dalam Pelayanan Sosial (%) | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | **Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak** | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase) | 71 | 72 | 505.900.200,00 | 73 | 2.695.211.425,00 | 74 | 3.182.665.457,00 | 75 | 2.590.217.336,00 | 76 | 2.898.785.902,00 | PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Median Usia Kawin Pertama (MUKP) wanita (Angka) | 23,2 | 23,3 | | 23,4 | | 23,5 | | 23,6 | | 23,7 | | |
| | | Indeks Lansia Berdaya (Indeks) | 59,3 | 60,0 | | 60,8 | | 61,5 | | 62,2 | | 62,8 | | |
| | | Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks) | 89,6 | 90,4 | | 91,3 | | 92,0 | | 92,7 | | 93,3 | | |
| | | Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (Persentase) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Program pemberdayaan kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase) | 100 | 100 | - | 100 | 909.920.000,00 | 100 | 909.920.000,00 | 100 | 909.920.000,00 | 100 | 909.920.000,00 | PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat |

| KODE | MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2025) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | |
| | Program Perlindungan Khusus Anak | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks) | 82,92 | 83,25 | 2.000.000,00 | 83,62 | 842.708.234,00 | 83,85 | 866.518.638,00 | 84,01 | 814.122.341,00 | 84,33 | 898.133.814,00 | PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten/ Kota (%) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan | Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD (%) | 3,82 | 4,09 | 3.000.300,00 | 6,5 | 362.733.811,00 | 7 | 372.982.718,00 | 7,5 | 350.429.350,00 | 8 | 386.591.097,00 | PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Tingkat Kategori Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) (Kategori) | Utama | Utama | | Utama | | Utama | | Mentor | | Mentor | | |
| | Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat | Skor Pola Pangan Harapan (nilai) | 85,3 | 87,9 | 364.645.445,00 | 88 | 2.930.000.000,00 | 88,1 | 3.205.000.000,00 | 88,2 | 2.995.000.000,00 | 88,3 | 3.170.000.000,00 | PD Pengampu Urusan Pangan |
| 2 | **Misi 2: Mewujudkan Iklim Ekonomi yang kompetitif** | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2025) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | |
| 2.1 | **Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | **Sasaran : Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat** | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Perekonomian Dan Pembangunan | Indek Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Indeks) | 91,58 | 91,58 | 336.965.200,00 | 91,58 | 1.198.181.700,00 | 91,58 | 1.198.181.700,00 | 91,58 | 1.198.181.700,00 | 91,58 | 1.198.181.700,00 | PD Pengampu Fungsi Sekretariat Daerah |
| | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%) | 47,91 | 47,92 | 538.983.824,00 | 47,93 | 1.718.912.461,00 | 47,94 | 1.810.803.707,00 | 47,95 | 1.911.884.078,00 | 47,96 | 2.023.072.486,00 | PD Pengampu Urusan Ketenagakerjaan |
| 2.1.2 | **Sasaran 2.2: Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal** | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase) | 8,33 | 11,54 | 19.999.850,00 | 13,79 | 455.000.000,00 | 15,15 | 500.500.000,00 | 15,79 | 550.550.000,00 | 15,91 | 550.550.000,00 | PD Pengampu Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah |
| | Program Pengembangan Usaha, Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) | Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase) | 1,84 | 1,99 | 99.347.000,00 | 2,07 | 250.000.000,00 | 2,15 | 275.000.000,00 | 2,24 | 302.500.000,00 | 2,32 | 302.500.000,00 | PD Pengampu Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah |
| | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan | Persentase Usaha mikro yang Bertransformasi dari Informal ke | 4,84 | 4,95 | 113.336.775,00 | 5,02 | 1.545.000.000,00 | 5,07 | 1.850.000.000,00 | 5,13 | 1.655.000.000,00 | 5,34 | 1.805.000.000,00 | PD Pengampu Urusan Koperasi dan Usaha |

| KODE | MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2025) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | |
| | Usaha Mikro (Umkm) | Formal (Persentase) | | | | | | | | | | | | Kecil Dan Menengah |
| | | Pertumbuhan Wirausaha (Persentase) | 11,26 | 12,35 | | 12,94 | | 13,56 | | 14,20 | | 14,88 | | |
| | Program peningkatan sarana distribusi perdagangan | Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase) | 90 | 90 | 2.737.327.100,00 | 90 | 9.979.454.661,00 | 90 | 9.979.454.661,00 | 90 | 9.173.929.328,00 | 90 | 9.599.748.376,00 | PD Pengampu Urusan Perdagangan |
| | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%) | 11,5 | 11 | 52.714.900,00 | 10,5 | 899.852.736,00 | 10 | 970.000.000,00 | 9,5 | 795.000.000,00 | 9 | 920.000.000,00 | PD Pengampu Urusan Pangan |
| | Program Pengendalian Izin Usaha Industri | Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase) | 72,32 | 72,57 | 60.657.325,00 | 72,77 | 117.313.670,00 | 73,02 | 148.610.510,00 | 73,27 | 96.911.635,00 | 73,52 | 108.479.510,00 | PD Pengampu Urusan Perindustrian |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase) | 1 | 30 | 175.000.000,00 | 50 | 1.325.000.000,00 | 60 | 941.000.000,00 | 70 | 950.000.000,00 | 80 | 1.100.000.000,00 | PD Pengampu Urusan Pariwisata |
| | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase) | 45 | 50 | 498.600.130,00 | 50 | 1.477.539.031,00 | 50 | 1.420.539.031,00 | 55 | 1.470.539.031,00 | 55 | 1.470.539.031,00 | PD Pengampu Urusan Pariwisata |
| | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase) | 2,00 | 3,00 | 915.189.650,00 | 4,00 | 1.046.611.640,00 | 5,00 | 1.046.611.640,00 | 6,00 | 1.046.611.640,00 | 7,00 | 1.050.000.000,00 | PD Pengampu Fungsi Keuangan |
| | Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase) | 0,06 | 0,73 | 1.601.019.686,00 | 0,73 | 2.520.233.356,00 | 0,16 | 2.557.966.367,00 | 1,29 | 1.713.763.004,00 | 0,71 | 1.885.139.304,00 | PD Pengampu Urusan Pertanian |

| KODE | MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2025) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | |
| | | Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| | | Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (%) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| | | Produktivitas pertanian per hektar per tahun (%) | 5,60 | 5,61 | | 5,62 | | 5,63 | | 5,64 | | 5,65 | | |
| | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Produksi Perikanan Budidaya (Ton) | 560 | 565 | 575.504.050,00 | 570 | 1.080.937.983,00 | 575 | 639.031.781,00 | 580 | 702.934.959,00 | 585 | 773.228.455,00 | PD Pengampu Urusan Pertanian |
| | | Persentase Pembudidaya Yang Tergabung Dalam Kelompok Yang Menerapkan Anjuran KKP (%) | 45 | 50 | | 55 | | 60 | | 65 | | 70 | | |
| | Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota (%) | 75.00 | 76.00 | 14.848.750,00 | 77.00 | 100.000.000,00 | 78.00 | 100.000.000,00 | 79.00 | 100.000.000,00 | 80.00 | 100.000.000,00 | PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup |
| **2.1.3** | **Sasaran : Meningkatnya Iklim Investasi Daerah** | | | | | | | | | | | | | |
| | Program pengembangan | Realisasi Total terhadap | 100 | 100 | 53.388.500,00 | 100 | 700.000.000,00 | 100 | 800.000.000,00 | 100 | 500.000.000,00 | 100 | 500.000.000,00 | PD Pengampu |

| KODE | MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2025) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | |
| | iklim penanaman modal | Target Investasi (Persentase) | | | | | | | | | | | | Urusan Penanaman Modal |
| | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase) | 25 | 26 | 719.630.190,00 | 27 | 2.113.255.285,00 | 28 | 2.451.098.782,00 | 29 | 1.862.209.751,00 | 30 | 2.048.752.457,00 | PD Pengampu Urusan Perindustrian |
| **3** | **Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan kondusif** | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel** | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1.1** | **Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik** | | | | | | | | | | | | | |
| | Program pengelolaan aplikasi informatika | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks) | 3,75 | 3,84 | 3.626.127.600,00 | 3,93 | 9.545.000.000,00 | 4,03 | 6.140.000.000,00 | 4,12 | 5.743.670.033,00 | 4,21 | 5.545.000.000,00 | PD Pengampu Urusan Komunikasi Dan Informatika |
| | Program Pendaftaran Penduduk | Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase) | 62,50 | 64 | 139.285.250,00 | 66 | 400.000.000,00 | 68 | 400.000.000,00 | 70 | 400.000.000,00 | 70 | 400.000.000,00 | PD Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%) | 10 | 10 | | 12 | | 14 | | 16 | | 16 | | |

| KODE | MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2025) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | |
| | Program Pelayanan Penanaman Modal | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase) | 100 | 100 | 160.166.030,00 | 100 | 1.500.000.000,00 | 100 | 1.400.000.000,00 | 100 | 800.000.000,00 | 100 | 800.000.000,00 | PD Pengampu Urusan Penanaman Modal |
| | Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota | Nilai IKM (Indeks) | 88,60 | 88,80 | 105.126.608.950,00 | 88,85 | 154.371.104.587,00 | 88,90 | 154.401.796.702,00 | 89,00 | 154.432.795.738,00 | 89,50 | 154.464.104.765,00 | PD Pengampu Urusan Pendidikan |
| | | | 89 | 91 | 174.279.466.416,00 | 91 | 186.435.335.247,00 | 91 | 186.481.290.997,00 | 91 | 186.517.774.091,00 | 92 | 186.834.189.375,00 | PD Pengampu Urusan Kesehatan |
| | | | 94,00 | 94,10 | 14.319.063.517,00 | 94,50 | 25.462.171.538,00 | 94,60 | 29.057.430.788,00 | 94,80 | 27.132.556.077,00 | 95,00 | 34.392.507.981,00 | PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | 87 | 87 | 4.710.867.890,00 | 87 | 5.060.000.000,00 | 87 | 5.565.999.999,00 | 87 | 6.122.600.000,00 | 87 | 6.734.860.000,00 | PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | 91 | 91 | 6.520.599.992,00 | 91 | 8.045.791.618,00 | 91 | 8.061.483.349,00 | 91 | 8.077.331.997,00 | 91 | 8.093.339.131,00 | PD Pengampu Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
| | | | 92 | 93 | 4.619.629.630,00 | 93 | 5.981.807.213,00 | 93 | 5.992.177.004,00 | 93 | 6.002.650.493,00 | 93 | 6.013.228.717,00 | PD Pengampu Urusan Ketentrama |

| KODE | MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2025) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | |
| | | | | | | | | | | | | | | n, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
| | | | 93 | 93 | 3.793.914.419,00 | 93 | 5.818.756.158,00 | 93 | 5.033.664.167,00 | 93 | 5.033.664.167,00 | 93 | 5.033.664.167,00 | PD Pengampu Urusan Sosial |
| | | | 92,00 | 92,50 | 4.755.942.927,00 | 93,00 | 6.685.230.838,00 | 93,30 | 6.854.395.993,00 | 93,50 | 6.684.126.559,00 | 93,70 | 6.881.803.046,00 | PD Pengampu Urusan Ketenagakerjaan dan Urusan Perindustrian |
| | | | 82,00 | 82,50 | 5.532.433.599,00 | 81,25 | 6.787.831.158,00 | 85,25 | 6.802.226.678,00 | 87,25 | 6.816.770.174,00 | 89,00 | 6.831.457.085,00 | PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | 86 | 86,5 | 2.688.902.606,00 | 87 | 4.634.923.427,00 | 87,5 | 4.651.134.786,00 | 88 | 4.667.508.258,00 | 88,5 | 4.684.045.465,00 | PD Pengampu Urusan Pangan |
| | | | 89,00 | 89,00 | 5.818.187.930,00 | 89,00 | 7.262.835.769,00 | 89,00 | 7.446.559.614,00 | 89,00 | 8.182.120.697,00 | 89,00 | 8.369.537.391,00 | PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup |
| | | | 94,10 | 94,10 | 4.232.570.332,00 | 94,20 | 6.878.135.612,00 | 94,30 | 6.421.314.022,00 | 94,40 | 6.078.517.851,00 | 94,50 | 6.303.936.247,00 | PD Pengampu Urusan |

| KODE | MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2025) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | |
| | | | | | | | | | | | | | | Adminidtrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | 89 | 85 | 6.580.275.343,00 | 87 | 9.209.036.322,00 | 89 | 9.922.830.702,00 | 91 | 9.049.672.718,00 | 93 | 9.652.232.775,00 | PD Pengampu Urusan Perhubungan |
| | | | 86,3 | 87 | 4.975.798.846,00 | 87,5 | 5.760.522.388,00 | 88 | 6.380.104.963,00 | 88,5 | 5.480.721.438,00 | 89 | 5.257.669.416,00 | PD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika |
| | | | 87,1 | 87,6 | 7.506.696.314,00 | 88,1 | 8.539.522.402,00 | 88,6 | 8.567.132.552,00 | 89,1 | 8.595.018.804,00 | 89,6 | 8.623.183.918,00 | PD Pengampu Urusan Koperasi, dan Usaha kecil dan Menengah dan Urusan Perdagangan |
| | | | 3,74 | 3,74 | 4.384.451.086,00 | 3,80 | 7.169.434.306,00 | 3,85 | 6.780.518.581,00 | 3,90 | 7.427.876.413,00 | 3,95 | 7.943.328.425,00 | PD Pengampu Urusan Penanaman Modal |
| | | | 86,75 | 87,00 | 3.409.248.509,00 | 87,25 | 8.344.798.039,00 | 87,50 | 4.354.933.734,00 | 87,75 | 4.365.170.786,00 | 88,00 | 4.375.510.208,00 | PD Pengampu Urusan perpustakaan dan Urusan Kearsipan |
| | | | 86 | 90 | 5.791.365.742,00 | 90 | 7.162.156.678,00 | 90 | 6.984.277.585,00 | 90 | 6.439.716.678,00 | 90 | 6.439.716.678,00 | PD Pengampu Urusan Pariwisata dan Urusan Pemuda dan |

| KODE | MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2025) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | |
| | | | | | | | | | | | | | | Olahraga |
| | | | 88 | 89 | 14.026.603.669,00 | 89,5 | 14.617.276.141,00 | 90 | 16.079.003.742,00 | 90,5 | 15.737.821.125,00 | 91 | 15.942.023.991,00 | PD Pengampu Urusan Pertanian |
| | | | 85 | 85 | 17.457.799.276,00 | 85 | 19.593.931.084,00 | 86 | 19.593.931.084,00 | 86 | 19.593.931.084,00 | 86 | 19.286.364.484,00 | PD Pengampu Fungsi Sekretariat DPRD |
| | | | 91,50 | 91,70 | 7.000.537.499,00 | 92,00 | 18.120.066.534,00 | 92,50 | 12.956.251.665,00 | 92,70 | 11.694.099.461,00 | 93,00 | 12.400.136.795,00 | PD Pengampu Fungsi Perencanaan |
| | | | 85,00 | 85,00 | 12.787.171.344,00 | 86,00 | 14.365.451.104,00 | 87,00 | 14.369.090.654,00 | 88,00 | 14.369.090.654,00 | 89,00 | 14.369.090.654,00 | PD Pengampu Fungsi Keuangan |
| | | | 91,00 | 91,30 | 18.411.258.998,00 | 91,60 | 27.006.935.837,00 | 91,90 | 27.006.935.837,00 | 92,20 | 27.006.935.837,00 | 92,50 | 27.006.935.837,00 | PD Pengampu Fungsi Kepegawaian |
| | | | 89,00 | 89,00 | 9.445.241.772,00 | 89,25 | 14.076.283.049,00 | 89,50 | 14.076.283.049,00 | 89,75 | 14.076.283.049,00 | 90,00 | 14.076.283.049,00 | PD Pengampu Fungsi Inspektorat |
| | | | 91 | 91 | 13.855.281.865,00 | 92 | 12.986.929.234,00 | 92 | 12.986.929.234,00 | 92 | 12.986.929.234,00 | 92 | 12.986.929.234,00 | PD Pengampu Urusan Kewilayahan |
| | | | 91 | 91 | 9.330.016.133,00 | 91 | 8.663.712.228,00 | 91 | 8.663.712.228,00 | 91 | 8.663.712.228,00 | 91 | 8.663.712.228,00 | PD Pengampu Urusan Kewilayahan |
| | | | 91 | 91 | 9.098.759.554,00 | 91 | 11.266.867.502,00 | 91 | 11.170.867.502,00 | 91 | 11.170.867.502,00 | 91 | 11.170.867.502,00 | PD Pengampu Urusan Kewilayahan |

| KODE | MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2025) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | |
| | | | 90 | 90 | 6.475.476.445,00 | 90 | 7.545.595.121,00 | 90 | 7.545.595.121,00 | 90 | 7.545.595.121,00 | 90 | 7.545.595.121,00 | PD Pengampu Urusan Kewilayahan |
| | | | 90 | 90 | 6.400.038.291,00 | 90 | 7.491.928.663,00 | 90 | 7.469.178.663,00 | 90 | 7.470.928.663,00 | 90 | 7.471.678.663,00 | PD Pengampu Urusan Kewilayahan |
| | | | 93 | 93 | 1.873.693.299,00 | 94 | 3.027.631.581,00 | 94 | 2.755.736.557,00 | 94 | 2.602.152.322,00 | 95 | 2.602.152.322,00 | PD Pengampu Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **3.1.2** | **Sasaran 3.2: Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel** | | | | | | | | | | | | | |
| | Program penyelenggaraan pengawasan | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level) | 3 | 3 | 955.566.300,00 | 3 | 3.015.566.300,00 | 3 | 3.191.975.807,00 | 3 | 3.182.458.703,00 | 4 | 3.178.466.300,00 | PD Pengampu Fungsi Inspektorat |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Sekretariat Daerah) | Nilai IKM (Indeks) | 88,60 | 88,80 | 26.922.122.285,00 | 88,85 | 32.552.733.836,00 | 88,90 | 32.958.474.191,00 | 88,95 | 31.290.513.544,00 | 89,00 | 34.669.363.852,00 | PD Pengampu Fungsi Sekretariat Daerah |
| | Program pengembangan sumber daya manusia | Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase) | 12,00 | 12,00 | 15.081.550,00 | 12,00 | 2.294.213.330,00 | 12,00 | 2.325.575.020,00 | 12,00 | 2.323.883.091,00 | 12,00 | 2.323.173.330,00 | PD Pengampu Fungsi Pendidikan Dan Pelatihan |
| | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | Persentase Kajian Berbasis Bukti | 75 | 80 | 300.000.000,00 | 82 | 3.000.000.000,00 | 85 | 3.150.000.000,00 | 90 | 2.500.000.000,00 | 90 | 2.605.000.000,00 | PD Pengampu Fungsi |

| KODE | MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2025) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | |
| | | dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase) | | | | | | | | | | | | Penelitian Dan Pengembangan |
| | Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase) | 100 | 100 | 545.303.825,00 | 100 | 2.260.000.000,00 | 100 | 2.373.000.000,00 | 100 | 2.373.000.000,00 | 100 | 2.491.650.000,00 | PD Pengampu Fungsi Perencanaan |
| | | Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Belanja Pegawai diLuar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase) | 46,55 | 35,00 | 3.097.918.280,00 | 30,00 | 12.043.508.706,00 | 30,00 | 13.841.434.151,00 | 30,00 | 11.593.017.003,00 | 30,00 | 13.106.930.379,00 | PD Pengampu Fungsi Keuangan |
| | | Persentase Penurunan SILPA (Persentase) | 11,00 | 10,00 | | 10,00 | | 9,00 | | 9,00 | | 9,00 | | |
| | | Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai) | Wajar Tanpa Pengecualian | Wajar Tanpa Pengecualian | | Wajar Tanpa Pengecualian | | Wajar Tanpa Pengecualian | | Wajar Tanpa Pengecualian | | Wajar Tanpa Pengecualian | | |
| **3.1.3** | **Sasaran 3.3: Meningkatnya Pendapatan Daerah** | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah | 19,00 | 20,00 | 1.125.970.000,00 | 21,00 | 1.460.764.600,00 | 22,00 | 1.460.764.600,00 | 23,00 | 1.460.764.600,00 | 23,00 | 1.460.764.600,00 | PD Pengampu Fungsi Keuangan |

| KODE | MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2025) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | |
| | | (Persentase) | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase) | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 3.1.4 | **Sasaran 3.4: Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat** | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%) | 100 | 100 | 3.552.927.585,00 | 100 | 4.552.927.585,00 | 100 | 4.552.927.585,00 | 100 | 4.552.927.585,00 | 100 | 4.650.845.281,00 | PD Pengampu Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
| | | Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase) | 80 | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | |
| | | Persentase Penyelenggaran Tibumtranmas (Persentase) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan | Persentase konflik sosial yang diselesaikan (Persentase) | 100 | 100 | 429.014.000,00 | 100 | 986.917.480,00 | 100 | 448.362.675,00 | 100 | 350.652.230,00 | 100 | 448.362.675,00 | PD Pengampu Fungsi Kesatuan |

| KODE | MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2025) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | |
| | Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | | | | | | | | | | | | | Bangsa dan Politik |
| | Program Penanggulangan Bencana | Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase) | 100 | 100 | 273.642.550,00 | 100 | 3.835.410.627,00 | 100 | 3.911.368.352,00 | 100 | 3.437.334.446,00 | 100 | 3.753.590.854,00 | PD Pengampu Urusan Penanggulangan Bencana |
| | | Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Program pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran | Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase) | 50 | 60 | 3.627.736.875,00 | 70 | 9.674.485.839,00 | 80 | 5.619.407.742,00 | 90 | 4.897.370.913,00 | 90 | 4.984.668.992,00 | PD Pengampu Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
| | | Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase) | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| **4** | **Misi 4: Mewujudkan nuansa imani melalui pendekatan budaya dan adat** | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1** | **Tujuan : Terwujudnya ketahanan sosial budaya** | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2025) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | |
| | **masyarakat yang berlandaskan ABS SBK** | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1.1** | **Sasaran 4.1: Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat** | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pengembangan Kebudayaan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase) | 75 | 75 | 1.544.908.250,00 | 75 | 4.891.610.162,00 | 80 | 4.267.493.900,00 | 80 | 3.678.227.220,00 | 85 | 3.582.768.506,00 | PD Pengampu Urusan Kebudayaan |
| | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase) | 90 | 90 | 684.197.225,00 | 91 | 1.441.133.294,00 | 92 | 1.183.601.617,00 | 93 | 790.973.251,00 | 94 | 1.083.601.617,00 | PD Pengampu Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase) | 100 | 100 | 103.024.850,00 | 100 | 1.058.045.582,00 | 100 | 713.912.248,00 | 100 | 633.995.623,00 | 100 | 713.912.248,00 | PD Pengampu Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | Program Penerintahan dan | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraa | 3,4 | 3,415 | 5.654.335.950,00 | 3.44 | 8.655.066.350,00 | 3.463 | 8.855.066.350,00 | 3.4824 | 8.855.066.350,00 | 3,5 | 8.855.066.350,00 | PD Pengampu |

| KODE | MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2025) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | |
| | Kesejahteraan Rakyat | n Pemerintah daerah (Nilai) | | | | | | | | | | | | Fungsi Sekretariat Daerah |
| | | Indeks Reformasi Hukum (Indeks) | 87,2 | 87,4 | | 87,6 | | 87,8 | | 87,9 | | 88 | | |
| **5** | **Misi 5 : Mewujudkan sarana perkotaan yang humanis ramah lingkungan dan berkelanjutan** | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1** | **Tujuan : Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan** | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1.1** | **Sasaran : Meningkatnya Resiliensi Bencana dan kualitas lingkungan hidup** | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Air (Nilai) | 66,95 | 67,15 | 1.021.173.190,00 | 67,35 | 1.300.000.000,00 | 67,55 | 1.300.000.000,00 | 67,75 | 1.300.000.000,00 | 67,95 | 1.300.000.000,00 | PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup |
| | | Indeks Kualitas Udara (Nilai) | 78,15 | 78,45 | | 78,75 | | 79,05 | | 79,35 | | 79,65 | | |
| | Program Pengelolaan Persampahan | Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah (%) | 19,68 | 23,54 | 10.311.756.455,00 | 27,42 | 12.500.000.000,00 | 30,90 | 12.500.000.000,00 | 34,79 | 12.000.000.000,00 | 38,48 | 12.000.000.000,00 | PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup |
| | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Persentase rumah tangga yang memiliki pengolahan air | 22,74 | 23,57 | 1.760.883.240,00 | 24,39 | 5.940.000.000,00 | 25,21 | 3.087.000.000,00 | 27,68 | 3.241.350.000,00 | 30,14 | 3.403.417.500,00 | PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan |

| KODE | MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2025) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | |
| | | limbah akses aman (%) | | | | | | | | | | | | Penataan Ruang |
| | | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) | 18,00 | 20,23 | 315.301,00 | 22,76 | 6.015.000.000,00 | 24,94 | 6.157.000.000,00 | 27,42 | 6.306.350.000,00 | 30,00 | 6.458.417.000,00 | |
| | Program Kawasan Permukiman | Persentase Peningkatan RTLH Untuk Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 (sepuluh) Ha (%) | 100 | 100 | 2.551.114.800,00 | 100 | 945.000.000,00 | 100 | 992.250.000,00 | 100 | 1.041.862.500,00 | 100 | 1.093.955.625,00 | PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Persentase Rumah Layak Huni (%) | 97,61 | 97,80 | | 97,99 | | 98,19 | | 98,38 | | 98,57 | | |
| | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | Persentase Rumah Layak Huni (%) | 97,61 | 97,80 | - | 97,99 | 10.625.000.000,00 | 98,19 | 11.156.250.000,00 | 98,38 | 11.714.062.500,00 | 98,57 | 11.736.145.473,00 | PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| **5.1.2** | **Sasaran : Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas** | | | | | | | | | | | | | |
| | Program penyelenggaraan jalan | Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota (%) | 82,00 | 82,80 | 5.728.409.238,00 | 83,60 | 116.527.148.000,00 | 84,40 | 104.739.047.000,00 | 85,20 | 100.667.135.000,00 | 86,00 | 103.216.954.000,00 | PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | Program pengelolaan sumber daya air (SDA) | Persentase sungai yang berfungsi baik (%) | 77,97 | 77,98 | 6.716.049.100,00 | 77,99 | 77.541.361.326,00 | 78,00 | 78.936.587.691,00 | 78,01 | 86.059.003.029,00 | 78,02 | 110.834.325.497,00 | PD Pengampu Urusan Pekerjaan |

| KODE | MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2025) | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | |
| | | | | | | | | | | | | | | Umum dan Penataan Ruang |
| | | Persentase daerah irigasi berkinerja baik (%) | 75,29 | 75,33 | | 75,48 | | 75,55 | | 75,70 | | 75,99 | | |
| | | Kapasitas Air Baku (m3/detik) (m3/detik) | 5,21 | 5,46 | | 6,60 | | 6,61 | | 6,62 | | 6,62 | | |
| | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Persentase ketersediaan infrastruktur perhubungan yang ramah lingkungan (%) | 86 | 86 | 2.718.114.785,00 | 87 | 6.092.294.000,00 | 88 | 15.792.294.000,00 | 89 | 15.792.294.000,00 | 90 | 5.792.294.000,00 | PD Pengampu Urusan Perhubungan |
| | Program Penataan Bangunan Gedung | Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase) | 35,24 | 35,68 | 758.481.175,00 | 36,11 | 92.665.000.000,00 | 36,54 | 100.665.000.000,00 | 36,96 | 103.665.000.000,00 | 37,38 | 85.665.000.000,00 | PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | Program penyelenggaraan penataan ruang | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%) | 74,55 | 74,65 | 848.333.760,00 | 74,75 | 2.225.000.000,00 | 74,85 | 2.000.000.000,00 | 74,95 | 2.650.000.000,00 | 75,05 | 3.050.000.000,00 | PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

## C. ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TERHADAP FOKUS PRIORITAS RPJMN TAHUN 2025-2029

### 1). PENURUNAN KEMISKINAN

Arah kebijakan pengentasan kemiskinan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, serta meningkatkan kualitas hidup individu dan kelompok rentan melalui berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Secara lebih luas, kebijakan ini juga bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan inklusif, serta menjamin hak-hak dasar Masyarakat.

Berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan Nasional Tahun 2025 2029, dijelaskan bahwa tiga masalah utama yang dihadapi terkait kemiskinan: diskriminasi terhadap kelompok rentan, keterbatasan dan ketimpangan akses, serta rendahnya kesadaran, kapasitas, dan produktivitas masyarakat miskin. Ini termasuk upaya untuk mengatasi diskriminasi finansial dan akses terhadap layanan dasar, serta meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat miskin untuk meningkatkan produktivitas mereka.

Arah kebijakan Pembangunan Kota Payakumbuh terhadap fokus prioritas RPJMN Tahun 2025-2029 dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan melalui :

a. Perluasan cakupan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi masyarakat miskin, kelompok marginal dan rentan
b. Meningkatkan kualitas data kemiskinan yang komprehensif valid, dan terintegrasi
c. Meningkatkan Tata kelola data kemiskinan yang lebih efektif sebagai dasar dalam rancangan program yang lebih efisien dalam mengurangi kemiskinan
d. Meningkatkan pengentasan kemiskinan dengan satu sistem registrasi sosial ekonomi (regsosek) dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi untuk memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran berbasis fakta, serta penentuan target perlindungan sosial dalam mewujudkan integrasi program perlindungan sosial dan pembangunan SDM secara menyeluruh
e. Meningkatkan integrasi program jaminan social yang mencakup asuransi kesehatan dan bantuan bagi kelaurga yang membutuhkan
f. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien
g. Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui bantuan sosial dan pelatihan kerja

h. Percepatan penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan graduasi yang terintegrasi
i. Pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemiskinan
j. Pemberian fasilitasi bantuan modal usaha dalam peningkatan pendapatan masyarakat miskin
k. Pemberian insentif untuk tenaga relawan social
l. Peningkatan penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS)
m. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan
n. Peningkatan kesejahteraan sosial berbasis keluarga
o. Pendirian sekolah rakyat untuk masyarakat miskin

Program prioritas yang dapat dilaksanakan dalam rangka mendukung arah kebijakan tersebut antara lain :

a. Program rehabilitasi sosial
b. Program perlindungan jaminan sosial
c. Program pemberdayaan sosial

## 2). PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Arah kebijakan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan individu serta masyarakat secara keseluruhan. Peningkatan kualitas SDM juga menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global dan mencapai tujuan pembangunan jangka Panjang.

Arah kebijakan Pembangunan Kota Payakumbuh terhadap fokus prioritas RPJMN Tahun 2025-2029 dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah :

a. Pemerataan dan peningkatan akses dan sarana prasarana Pendidikan PAUD, dasar dan menengah.
b. Penguatan digitalisasi sekolah
c. Penyediaan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi
d. Peningkatan kualitas kurikulum dan asesmen kompetensi minimun
e. Penguatan Pendidikan inklusif yang responsif untuk anak-anak disabilitas atau berkebutuhan khusus
f. Peningkatan Kompetensi guru
g. Meningkatkan Literasi dan numerasi peserta didik
h. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pendidikan sekolah negeri dan swasta

i. Diterapkannya kurikulum yang adaptif, tenaga pendidik yang berkualitas, sarana pendidikan yang representatif untuk peningkatan kualitas pendidikan sekolah negeri.
j. Meningkatkan kualitas dan perijinan sekolah non formal, sehingga siswa dari sekolah non formal berbasis agama/sekolah tahfiz/*home schooling* yang belum memiliki izin dari Dinas Pendidikan, tetap mendapatkan fasilitasi pendampingan dan dukungan untuk peningkatan kualitas pendidikannya
k. Mengembangkan masing-masing sekolah dengan keunggulan (mata pelajaran) tertentu
l. Meningkatkan pendidikan karakter, sehingga tercipta budaya yang berkarakter dan berakhlak
m. Pemberian insentif untuk Guru TPA
n. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama.
o. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan dasar yang adaptif berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah serta Pengembangan layanan pendidikan berbasis digital dan TIK
p. Pemberian insentif untuk guru PAUD dan Guru Non ASN
q. Pemetaan kebutuhan satuan pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
r. Pembangunan sekolah Garuda
s. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular
t. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan.
u. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat
v. Peningkatan standar layanan kesehatan masyarakat
w. Penguatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam program kesehatan
x. Pengoptimalan upaya promotif dan preventif kesehatan melalui kampanye polah hidup sehat
y. Pengoptimalan Sistem pengawasan obat dan makanan
z. Penanggulangan permasalahan gizi mikro dan gizi makro, penuntasan masalah stunting (pemenuhan gizi anak dan balita untuk terciptanya SDM berkualitas di masa mendatang
aa. Pemerataan akses layanan kesehatan melalui peningkatan layanan primer
bb. Deteksi dini terhadap penyakit menular dan tidak menular
cc. Pengembangan kemitraan dengan organisasi non-pemerintah dan swasta dalam mendukung kampanye imunisasi.
dd. Dukungan Pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui dan anak Balita

Program prioritas yang dapat dilaksanakan dalam rangka mendukung arah kebijakan tersebut antara lain:

a. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
b. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
e. Program Pengawasan Keamanan Pangan
f. Program Pengelolaan Pendidikan
g. Program pengembangan kurikulum
h. Program pengendalian perizinan pendidikan
i. Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
j. Program Pembinaan Perpustakaan
k. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
l. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
m. Program Perlindungan Khusus Anak
n. Program pemenuhan hak anak
o. Program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan
p. Program pengelolaan sistim data gender dan anak
q. Program Penempatan Tenaga Kerja

### 3). PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN

Arah kebijakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bertujuan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menghasilkan peningkatan pendapatan, tetapi juga menciptakan kesempatan yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

Arah kebijakan Pembangunan Kota Payakumbuh terhadap fokus prioritas RPJMN Tahun 2025-2029 dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan adalah :

a. Perluasan pangsa pasar dan iklim perdagangan yang kondusif
b. Mewujudkan penataan lokasi sektor informal
c. Mendorong pertumbuhan dan menciptakan iklim yg kondusif dan meningkatkan pemasaran kawasan potensial
d. Peningkatan kualitas dan inovasi produk dan Promosi secara berkelanjutan
e. Pemanfaatan peluang terhadap Pembangunan Tol Trans Sumatera: Bukittinggi - Payakumbuh - Bangkinang – Pekanbaru
f. Penerapan kebijakan perlindungan konsumen dan tertib niaga
g. Revitalisasi dan penataan pasar tradisional, pertokoan Payakumbuh dan Pedagang Kaki Lima

h. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk industri berbasis sumberdaya lokal
i. Peningkatan keahlian dan keterampilan bagi pelaku industri kecil
j. Mendorong bertumbuhnya industri dari hulu ke hili
k. Berkembangnya sentra-sentra industri melalui penguatan kelembagaan
l. Meningkatnya industri halal sebagai bagian dari pengembangan ekonomi syariah
m. Meningkatnya penguatan industri jasa
n. Adanya penguatan infrastruktur pendukung industri
o. Meningkatnya penerapan standarisasi produk (halal, kualitas, dll)
p. Peningkatan profesionalisme petani
q. Peningkatan produksi hasil pertanian strategis
r. Penerapan teknologi untuk peningkatan produksi dan pengolahan hasil pertanian sektor strategis
s. Penyediaan bantuan sarana dan prasarana Pertanian untuk petani/kelompok tani
t. Penguatan infrastruktur pertanian dalam rangka mencapai produktivitas pertanian 8 ton/ha
u. Meningkatkan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan serta kepastian pasar
v. Penyediaan bibit dan varietas unggul
w. Mengembangkan insentif dan disinsentif untuk implementasi LP2B
x. Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian Dengan Lumbung Pangan
y. Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sustainability Tourism dan berbasis communitas (CBT), budaya dan kearifan lokal
z. Peningkatan promosi pariwisata Kota Payakumbuh
aa. Peningkatan event-event pariwisata dan budaya
bb. Penguatan integrasi Pengembangan Pariwisata Halal dengan industry pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan
cc. Inovasi Pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisata nusantara
dd. Mendorong peningkatan skala usaha UMKM melalui penguatan modal UMKM
ee. Penumbuhan dan Peningkatan kualitas SDM entrepreneur
ff. Peningkatan pemberdayaan dan pendampingan entrepreneur
gg. Mendukung tumbuh kembangnya ekonomi kerakyatan melalui penguatan kelembagaan Koperasi
hh. Meningkatkan peran ekonomi berbasis elektronik
ii. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital (Mengembangkan UMKM berbasis digitalisasi) disertai

perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis

jj. Tersedianya penataan basis data dan penyederhanaan regulasi di bidang pemberdayaan UMKM pengembangan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi

kk. Terciptanya inkubasi usaha, penguatan kapasitas layanan usaha, pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM) dan kemudahan akses pembiayaan usaha

ll. Tumbuh dan berkembangnya jiwa kewirausahaan masyarakat melalui pendidikan formal dan informal

mm. Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi mencakup peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi, pendampingan kelompok untuk berkoperasi, pengembangan jangkauan dan cakupan usaha koperasi, serta pengembangan inovasi koperasi.

nn. Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha, melalui penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM, termasuk modal awal usaha, serta pendampingan mengakses kredit/pembiayaan

oo. Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar baik dalam pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan kemitraan usaha, pengembangan kapasitas kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

pp. Meningkatkan fungsi koperasi

qq. Pendirian koperasi merah putih di setiap kelurahan

rr. Peningkatan Data Potensi dan Peluang Investasi

ss. Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

tt. Peningkatan Upaya Promosi Investasi

uu. Meningkatnya peran PTSP sebagai percepatan pelayanan dan perijinan kepada masyarakat dan dunia usaha, serta penataan regulasi daerah dalam mendukung kemudahan berusaha, sehingga iklim investasi semakin kondusif

vv. Pelaksanaan Kerjasama dalam dan luar negeri, kemitraan dan kolaborasi pemerintah daerah dengan mitra pembangunan dalam pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

ww. Meningkatkan kualitas, produktivitas dan kesempatan kerja

xx. Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Angkatan Kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar

yy. Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi untuk menyerap tenaga kerja

zz. Pelaksanaan inkubasi bisnis penciptaan pengusaha muda baru

aaa. Menciptakan entrepreneur dari berbagai sektor

bbb. Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat, khususnya para pemuda yang merupakan angkatan kerja potensial

ccc. Memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak

ddd. Perluasan kesempatan kerja

eee. Meningkatkan produktivitas melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja

Program prioritas yang dapat dilaksanakan dalam rangka mendukung arah kebijakan tersebut antara lain:

a. Program Perekonomian Dan Pembangunan
b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
c. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
d. Program Pengembangan Usaha, Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)
e. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
f. Program penanganan kerawanan pangan
g. Program Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
h. Program Pengawasan Keamanan Pangan
i. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
j. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
k. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
l. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
m. Program Pengembangan Kebudayaan
n. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
o. Program pendidikan dan latihan perkoperasian
p. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
q. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
r. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
s. Program perekonomian dan pembangunan
t. Program iklim pengembangan penanaman modal
u. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
v. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
w. Program pelayanan Penanaman Modal
x. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
y. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
z. Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
aa. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
bb. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
cc. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan

# BAB IV

# PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

# 1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

## A. DAFTAR PROGRAM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 DALAM MENCAPAI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pemilihan umum serentak yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 menghasilkan untuk Kota Payakumbuh, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh dengan visi dan misi periode tahun 2025-2029. Visi dan misi tersebut perlu diterjemahkan dalam rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah pada masa pemerintahan yang dituangkan ke dalam dokumen perencanaan 5 tahun (RPJMD). Penyusunan program pada RPJMD Tahun 2025-2029 memuat daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dan Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang dijabarkan berdasarkan urusan dan kewenangan pemerintah daerah.

Program perangkat daerah yang sesuai dengan urusan dan kewenangannya pada Bab V dijabarkan dengan merujuk pada nomenklatur program pembangunan yang ada pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan beberapa kali melalui Keputusan Mendagri. Terakhir, Keputusan Kemendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. Program dan indikator kinerja dikelompokkan ke dalam 6 urusan wajib pelayanan dasar, 16 urusan wajib non pelayanan dasar, 7 urusan penunjang, 2 urusan pendukung, 5 urusan pilihan dan 1 urusan kewilayahan.

Urusan wajib pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan rakyat, Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial. Urusan Wajib non pelayanan dasar terdiri dari Urusan Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pasar, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Penduduk dan Catatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pemuda dan Olah Raga, Statistik, Kebudayaan, Perpustakaan dan Urusan Kearsipan. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan karakteristik daerah yang bersangkutan yaitu Urusan: Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Pariwisata, Perdagangan, dan Perindustrian.

Urusan Penunjang adalah urusan pemerintahan yang berfungsi sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan sehingga pemerintahan dapat berjalan sebagaimana kaidah tata kelola pemerintahan yang baik, terdiri dari Urusan Inspektorat, Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Penelitian dan Pengembangan, serta Kesatuan Bangsa dan Politik dan Urusan Penanggulangan Bencana. Berikutnya urusan pendukung merupakan urusan pemerintahan yang terkait dengan fungsi fasilitasi dan koordinasi operasional Pemerintahan Daerah baik Eksekutif maupun Legislatif yang terdiri dari Urusan Kesekretariatan Daerah dan Urusan Kesekretariatan

DPRD.

Sedangkan Urusan kewilayahan menjadi urusan tersendiri yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Kecamatan. Untuk dapat merumuskan program secara terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing-masing program diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Indikator dan target kinerja ini ditetapkan dengan memperhatikan kondisi awal dan disusun bersama Perangkat Daerah. Pada target kinerja diperkirakan *outcome* yang akan dihasilkan dari masing-masing program. Selanjutnya program dan kinerja program tersebut menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang dijabarkan hingga level kegiatan. Pendanaan program dan kegiatan setiap tahunnya mengacu kepada pagu indikatif yang ditetapkan pada tahun berjalan, sedangkan pada penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 disesuaikan dengan proyeksi pagu setiap tahunnya.

## B. INDIKATOR PROGRAM, TARGET DAN PAGU INDIKATIF PROGRAM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026-2030

**Tabel 4.1** Program Perangkat Daerah Tahun 2026-2030

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | 139.626.947.265 | | 286.776.666.247 | | 290.696.877.527 | | 290.485.386.317 | | 290.396.666.247 | |
| 1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | | 105.126.608.950 | | 154.371.104.587 | | 154.401.796.702 | | 154.432.795.738 | | 154.464.104.765 | |
| Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah | Nilai IKM (Indeks) | 88,37 | 88,6 | 88,8 | 105.126.608.950 | 88,85 | 154.371.104.587 | 88,9 | 154.401.796.702 | 89 | 154.432.795.738 | 89,5 | 154.464.104.765 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidkan |
| 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | 24.297.773.465 | | 131.805.561.660 | | 135.695.080.825 | | 135.452.590.579 | | 135.332.561.482 | |
| Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%) | 98 | 98 | 98 | 24.297.773.465 | 98,3 | 131.805.561.660 | 98,9 | 135.695.080.825 | 99 | 135.452.590.579 | 99,3 | 135.332.561.482 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidkan |
| | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidkan |
| | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidkan |
| | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%) | 74,55 | 74,55 | 75,55 | | 76,55 | | 77,55 | | 78,55 | | 79,55 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidkan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | | | | | 29.229.700 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | |
| Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan | Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 29.229.700 | 100 | 250.000.000 | 100 | 250.000.000 | 100 | 250.000.000 | 100 | 250.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| 1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | | | | 173.335.150 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | |
| Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan | Indeks pemerataan guru (%) | 81 | 81 | 82 | 173.335.150 | 83 | 350.000.000 | 84 | 350.000.000 | 85 | 350.000.000 | 86 | 350.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| | Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase) | 58 | 58 | 60 | | 62 | | 64 | | 66 | | 68 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan |
| 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | 210.388.048.641 | | 225.166.976.015 | | 226.609.844.923 | | 228.067.142.519 | | 229.539.013.091 | |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | | 174.279.466.416 | | 186.435.335.247 | | 186.481.290.997 | | 186.517.774.091 | | 186.834.189.375 | |
| Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah | Nilai IKM (Indeks) | 79 | 89 | 91 | 174.279.466.416 | 91 | 186.435.335.247 | 91 | 186.481.290.997 | 91 | 186.517.774.091 | 92 | 186.834.189.375 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 79 | 89 | 91 | | 91 | | 91 | | 91 | | 92 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 79 | 89 | 91 | | 91 | | 91 | | 91 | | 92 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 79 | 89 | 91 | | 91 | | 91 | | 91 | | 92 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 79 | 89 | 91 | | 91 | | 91 | | 91 | | 92 | | Dinas/Badan yang menangani |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | | | | | | | | | | | | | | Bidang Kesehatan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 79 | 89 | 91 | | 91 | | 91 | | 91 | | 92 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 79 | 89 | 91 | | 91 | | 91 | | 91 | | 92 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 79 | 89 | 91 | | 91 | | 91 | | 91 | | 92 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 79 | 89 | 91 | | 91 | | 91 | | 91 | | 92 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 79 | 89 | 91 | | 91 | | 91 | | 91 | | 92 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | 32.853.583.250 | | 36.230.290.768 | | 37.496.916.438 | | 38.783.674.979 | | 39.903.204.744 | |
| Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | Prevalensi Stunting berdasarkan E-PPGBM (%) | 2,16 | 2,12 | 2,08 | 32.853.583.250 | 2,04 | 36.230.290.768 | 2 | 37.496.916.438 | 1,94 | 38.783.674.979 | 1,9 | 39.903.204.744 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Jumlah Kematian Ibu (Jiwa) | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Prevalensi Stunting berdasarkan E-PPGBM (%) | 2,16 | 2,12 | 2,08 | | 2,04 | | 2 | | 1,94 | | 1,9 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| | Jumlah Kematian Ibu (Jiwa) | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| 1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | | 119.999.700 | | 88.000.000 | | 92.400.000 | | 97.020.000 | | 101.871.564 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Meningkatnya mutu dan distribusi dinas kesehatan | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase) | 30 | 32 | 35 | 119.999.700 | 37 | 88.000.000 | 39 | 92.400.000 | 41 | 97.020.000 | 45 | 101.871.564 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| 1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | | | | | 104.999.550 | | 79.600.000 | | 82.475.000 | | 85.493.750 | | 87.285.313 | |
| Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan, dan makanan dan minuman | Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase) | 93 | 93 | 94 | 104.999.550 | 95 | 79.600.000 | 96 | 82.475.000 | 97 | 85.493.750 | 98 | 87.285.313 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | 3.029.999.725 | | 2.333.750.000 | | 2.456.762.488 | | 2.583.179.699 | | 2.612.462.095 | |
| Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 3.029.999.725 | 100 | 2.333.750.000 | 100 | 2.456.762.488 | 100 | 2.583.179.699 | 100 | 2.612.462.095 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
| 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | 38.038.883.853 | | 371.465.680.863 | | 370.664.065.479 | | 369.880.704.106 | | 389.472.711.978 | |
| 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 14.319.063.516,7 | | 25.462.171.538 | | 29.057.430.788 | | 27.132.556.077 | | 34.392.507.981 | |
| Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah | Nilai IKM (Indeks) | 93,58 | 94 | 94,1 | 14.319.063.516,7 | 94,5 | 25.462.171.538 | 94,6 | 29.057.430.788 | 94,8 | 27.132.556.077 | 95 | 34.392.507.981 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | Nilai IKM (Indeks) | 93,58 | 94 | 94,1 | | 94,5 | | 94,6 | | 94,8 | | 95 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Nilai IKM (Indeks) | 93,58 | 94 | 94,1 | | 94,5 | | 94,6 | | 94,8 | | 95 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | | 6.716.049.100 | | 77.541.361.325 | | 78.936.587.691 | | 86.059.003.029 | | 110.834.325.497 | |
| Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi | Persentase sungai yang berfungsi baik (%) | 77,96 | 77,97 | 77,98 | 6.716.049.100 | 77,99 | 77.541.361.325 | 78 | 78.936.587.691 | 78,01 | 86.059.003.029 | 78,02 | 110.834.325.497 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | Persentase daerah irigasi berkinerja baik (%) | 75 | 75,29 | 75,33 | | 75,48 | | 75,55 | | 75,7 | | 75,99 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | Kapasitas Air Baku (m3/detik) (m3/detik) | 5,21 | 5,21 | 5,46 | | 6,6 | | 6,61 | | 6,62 | | 6,62 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | | 174.923.750 | | 9.700.000.000 | | 11.327.000.000 | | 9.259.310.000 | | 9.447.090.000 | |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum | Persentase Pelayanan Air Minum (%) | 100 | 100 | 100 | 174.923.750 | 100 | 9.700.000.000 | 100 | 11.327.000.000 | 100 | 9.259.310.000 | 100 | 9.447.090.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | | | | | 551.000.000 | | 7.000.000.000 | | 8.200.000.000 | | 3.800.000.000 | | 3.800.000.000 | |
| Meningkatnya layanan persampahan regional | Persentase sampah yang dikelola TPA/TPST/TPS3R (%) | 0 | 17,79 | 17,32 | 551.000.000 | 28,4 | 7.000.000.000 | 39,25 | 8.200.000.000 | 38,57 | 3.800.000.000 | 37,89 | 3.800.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | | | 1.761.198.540 | | 11.955.000.000 | | 9.244.000.000 | | 9.547.700.000 | | 9.861.834.500 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan limbah | Persentase rumah tangga yang memiliki pengolahan air limbah akses aman (%) | 21,92 | 22,74 | 23,57 | 1.760.883.240 | 24,39 | 5.940.000.000 | 25,21 | 3.087.000.000 | 27,68 | 3.241.350.000 | 30,14 | 3.403.417.500 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Limbah | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) | 19,48 | 20,48 | 22,31 | 315.300 | 24,19 | 6.015.000.000 | 25,08 | 6.157.000.000 | 26,16 | 6.306.350.000 | 30 | 6.458.417.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | | | | | 4.816.169.748,3 | | 27.520.000.000 | | 25.620.000.000 | | 26.220.000.000 | | 28.320.000.000 | |
| Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan | Persentase sistem drainase skala kota (%) | 68,97 | 69,99 | 70,99 | 4.816.169.748,3 | 71,99 | 27.520.000.000 | 73,32 | 25.620.000.000 | 74,65 | 26.220.000.000 | 75,97 | 28.320.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | | 758.481.175 | | 92.665.000.000 | | 100.665.000.000 | | 103.665.000.000 | | 85.665.000.000 | |
| Meningkatnya kualitas bangunan gedung | Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase) | 34,79 | 35,24 | 35,68 | 758.481.175 | 36,11 | 92.665.000.000 | 36,54 | 100.665.000.000 | 36,96 | 103.665.000.000 | 37,38 | 85.665.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | | | | | 2.016.900.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata | Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase) | 10 | 15 | 48,27 | 2.016.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | | 5.728.409.238 | | 116.527.148.000 | | 104.739.047.000 | | 100.667.135.000 | | 103.216.954.000 | |
| Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman | Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota (%) | 81,2 | 82 | 82,8 | 5.728.409.238 | 83,6 | 116.527.148.000 | 84,4 | 104.739.047.000 | 85,2 | 100.667.135.000 | 86 | 103.216.954.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | | | | | 348.355.025 | | 870.000.000 | | 875.000.000 | | 880.000.000 | | 885.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi | Persentase Kualitas Pengelolaan Jasa Konstruksi (%) | 97,5 | 94 | 94,1 | 348.355.025 | 94,2 | 870.000.000 | 94,3 | 875.000.000 | 94,4 | 880.000.000 | 94,5 | 885.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | | | 848.333.760 | | 2.225.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.650.000.000 | | 3.050.000.000 | |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%) | 74,45 | 74,55 | 74,65 | 848.333.760 | 74,75 | 2.225.000.000 | 74,85 | 2.000.000.000 | 74,95 | 2.650.000.000 | 75,05 | 3.050.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | 7.857.420.775 | | 21.212.038.946 | | 34.290.896.299 | | 34.364.902.225 | | 24.433.721.410 | |
| 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 4.710.867.890 | | 5.060.000.000 | | 5.565.999.999 | | 6.122.600.000 | | 6.734.860.000 | |
| Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja Perangkat Daerah | Nilai IKM (Indeks) | 87 | 87 | 87 | 4.710.867.890 | 87 | 5.060.000.000 | 87 | 5.565.999.999 | 87 | 6.122.600.000 | 87 | 6.734.860.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| 1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | | | 472.621.325 | | 1.390.038.946 | | 13.024.796.300 | | 11.757.197.225 | | 953.121.312 | |
| Terpenuhinya rumah layak huni bagi korban bencana dan terkena relokasi akibat program pemerintah | Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kota (%) | 100 | 100 | 100 | 472.621.325 | 100 | 1.390.038.946 | 100 | 13.024.796.300 | 100 | 11.757.197.225 | 100 | 953.121.312 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| 1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | 2.551.114.800 | | 945.000.000 | | 992.250.000 | | 1.041.862.500 | | 1.093.955.625 | |
| Meningkatnya kualitas kawasan permukiman | Persentase Peningkatan RTLH Untuk Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan | 100 | 100 | 100 | 2.551.114.800 | 100 | 945.000.000 | 100 | 992.250.000 | 100 | 1.041.862.500 | 100 | 1.093.955.625 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Luas Dibawah 10 [sepuluh] Ha (%) | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase Rumah Layak Huni (%) | 97,61 | 97,61 | 97,8 | | 97,99 | | 98,19 | | 98,38 | | 98,57 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| 1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | | | | | 0 | | 10.625.000.000 | | 11.156.250.000 | | 11.714.062.500 | | 11.736.145.473 | |
| Meningkatnya Rumah Layak huni | Persentase Rumah Layak Huni (%) | 97,41 | 97,94 | 98,04 | 0 | 98,48 | 10.625.000.000 | 98,91 | 11.156.250.000 | 99,34 | 11.714.062.500 | 99,76 | 11.736.145.473 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| 1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM [PSU] | | | | | 122.816.760 | | 3.192.000.000 | | 3.351.600.000 | | 3.519.180.000 | | 3.695.139.000 | |
| Meningkat penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan | Persentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Yang Dibangun Pengembang Yang Telah Dikelola Oleh Pemerintah Kota (%) | 21,84 | 24,71 | 27,59 | 122.816.760 | 30,46 | 3.192.000.000 | 33,33 | 3.351.600.000 | 36,21 | 3.519.180.000 | 39,08 | 3.695.139.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| 1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | | 210.000.000 | | 220.500.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasaran, Sarana dan Utilitas (PSU) tingkat kemampuan menengah | Persentase Pelayanan Sertifikasi Kualifikasi Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (%) | - | - | - | 0 | - | 0 | 2,87 | 200.000.000 | 5,74 | 210.000.000 | 8,62 | 220.500.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | 18.594.536.632 | | 32.090.422.882 | | 28.137.364.032 | | 26.967.615.434 | | 27.495.672.975 | |
| 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | | 11.140.229.622 | | 14.027.598.831 | | 14.053.660.353 | | 14.079.982.490 | | 14.106.567.848 | |
| Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah | Nilai IKM (Indeks) | 90,43 | 91 | 91 | 6.520.599.992 | 91 | 8.045.791.618 | 91 | 8.061.483.349 | 91 | 8.077.331.997 | 91 | 8.093.339.151 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah | Nilai IKM (Indeks) | 92,13 | 92 | 93 | 4.619.629.630 | 93 | 5.981.807.213 | 93 | 5.992.177.004 | 93 | 6.002.650.493 | 93 | 6.013.228.717 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | 3.552.927.585 | | 4.552.927.585 | | 4.552.927.585 | | 4.552.927.585 | | 4.650.845.281 | |
| Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada, Meningkatnya penanganan | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%) | 100 | 100 | 100 | 3.552.927.585 | 100 | 4.552.927.585 | 100 | 4.552.927.585 | 100 | 4.552.927.585 | 100 | 4.650.845.281 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| gangguan ketentraman dan ketertiban umum, Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat, Meningkatnya kapasitas SDM PPNS | | | | | | | | | | | | | | Perlindungan Masyarakat |
| | Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase) | 0 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| | Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase) | 0 | 80 | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| | Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| 1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | | | 273.642.550 | | 3.835.410.627 | | 3.911.368.352 | | 3.437.334.446 | | 3.753.590.854 | |
| Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat, Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana | Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 273.642.550 | 100 | 3.835.410.627 | 100 | 3.911.368.352 | 100 | 3.437.334.446 | 100 | 3.753.590.854 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| | Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| | Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | | | | | 3.627.736.875 | | 9.674.485.839 | | 5.619.407.742 | | 4.897.370.913 | | 4.984.668.992 | |
| Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran, Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase) | 0 | 50 | 60 | 3.627.736.875 | 70 | 9.674.485.839 | 80 | 5.619.407.742 | 90 | 4.897.370.913 | 90 | 4.984.668.992 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| | Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase) | 0 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | 5.833.303.794 | | 14.430.212.768 | | 14.474.276.851 | | 14.033.777.469 | | 14.419.169.999 | |
| 1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 3.793.914.419 | | 5.818.756.158 | | 5.033.664.167 | | 5.033.664.167 | | 5.033.664.167 | |
| Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah | Nilai IKM (Indeks) | 90 | 93 | 93 | 3.793.914.419 | 93 | 5.818.756.158 | 93 | 5.033.664.167 | 93 | 5.033.664.167 | 93 | 5.033.664.167 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |
| 1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | | | 476.882.225 | | 1.274.920.110 | | 1.691.076.184 | | 1.220.576.802 | | 1.635.969.332 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Sosial | Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%) | 100 | 100 | 100 | 476.882.225 | 100 | 1.274.920.110 | 100 | 1.691.076.184 | 100 | 1.220.576.802 | 100 | 1.635.969.332 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |
| 1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | | 507.688.425 | | 2.319.685.700 | | 2.732.685.700 | | 2.732.685.700 | | 2.732.685.700 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Meningkatnya Rehabilitasi Sosial | Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi (%) | 80 | 90 | 100 | 507.688.425 | 100 | 2.319.685.700 | 100 | 2.732.685.700 | 100 | 2.732.685.700 | 100 | 2.732.685.700 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |
| 1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | | 890.977.750 | | 4.190.977.750 | | 4.190.977.750 | | 4.190.977.750 | | 4.190.977.750 | |
| Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase) | 80 | 85 | 90 | 890.977.750 | 95 | 4.190.977.750 | 100 | 4.190.977.750 | 100 | 4.190.977.750 | 100 | 4.190.977.750 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |
| 1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | | | | 91.792.300 | | 320.823.800 | | 320.823.800 | | 320.823.800 | | 320.823.800 | |
| Meningkatnya Penanganan Bencana | Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 91.792.300 | 100 | 320.823.800 | 100 | 320.823.800 | 100 | 320.823.800 | 100 | 320.823.800 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |
| 1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | | | | | 72.048.675 | | 505.049.250 | | 505.049.250 | | 505.049.250 | | 505.049.250 | |
| Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan | Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik (%) | 100 | 100 | 100 | 72.048.675 | 100 | 505.049.250 | 100 | 505.049.250 | 100 | 505.049.250 | 100 | 505.049.250 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial |
| 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | 5.933.963.446 | | 10.010.347.529 | | 10.383.835.273 | | 10.135.180.155 | | 10.482.206.002 | |
| 2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | | 4.755.942.927 | | 6.685.230.838 | | 6.854.295.993 | | 6.684.126.559 | | 6.881.803.046 | |
| Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah | Nilai IKM (Indeks) | 88,25 | 92 | 92,5 | 4.755.942.927 | 93 | 6.685.230.838 | 93,3 | 6.854.295.993 | 93,5 | 6.684.126.559 | 93,7 | 6.881.803.046 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | | | | | 100.000.000 | | 160.000.000 | | 140.066.920 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | |
| Terkelolanya informasi tenaga kerja | Persentase dokumen rencana tenaga kerja yang tersedia (%) | 35 | 25 | 25 | 100.000.000 | 50 | 160.000.000 | 50 | 140.066.920 | 75 | 25.000.000 | 75 | 25.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja |
| 2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | | | 538.983.824 | | 1.718.912.461 | | 1.810.803.707 | | 1.911.884.078 | | 2.023.072.486 | |
| Meningkatnya produktivitas tenaga kerja | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%) | 47,9 | 3,87 | 3,87 | 538.983.824 | 3,88 | 1.718.912.461 | 3,88 | 1.810.803.707 | 3,89 | 1.911.884.078 | 3,9 | 2.023.072.486 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja |
| 2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | | | 156.095.245 | | 290.080.705 | | 319.088.776 | | 350.997.653 | | 385.097.419 | |
| Meningkatnya penempatan tenaga kerja | Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase) | 16,33 | 16,53 | 16,73 | 156.095.245 | 16,93 | 290.080.705 | 17,13 | 319.088.776 | 17,33 | 350.997.653 | 17,53 | 385.097.419 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja |
| 2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | | | 382.941.450 | | 1.156.123.525 | | 1.159.479.877 | | 1.163.171.865 | | 1.167.233.051 | |
| Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi | Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang) | 1.404 | 1.424 | 1.444 | 382.941.450 | 1.464 | 1.156.123.525 | 1.484 | 1.159.479.877 | 1.504 | 1.163.171.865 | 1.524 | 1.167.233.051 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja |
| 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | 5.592.433.749 | | 10.171.299.080 | | 10.384.120.676 | | 10.082.073.782 | | 10.444.005.419 | |
| 2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 5.592.433.599 | | 6.787.831.158 | | 6.802.228.678 | | 6.816.770.174 | | 6.831.457.085 | |
| Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah | Nilai IKM (Indeks) | 78,75 | 82 | 82,5 | 5.592.433.599 | 81,25 | 6.787.831.158 | 85,25 | 6.802.228.678 | 87,25 | 6.816.770.174 | 89 | 6.831.457.085 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | | | | | | | | | | | | | | Perlindungan Anak |
| 2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | | 3.000.300 | | 362.733.811 | | 372.982.718 | | 350.429.350 | | 386.591.097 | |
| Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan | Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD (%) | 12,22 | 0,82 | 4,09 | 3.000.300 | 6,5 | 362.733.811 | 7 | 372.982.718 | 7,5 | 350.429.350 | 8 | 386.591.097 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | Tingkat Kategori Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) (Kategori) | Nindya | Utama | Utama | | Utama | | Utama | | Mentor | | Mentor | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | | | 999.450 | | 486.619.816 | | 500.369.076 | | 470.112.962 | | 518.625.182 | |
| Menurunnya kekerasan terhadap perempuan | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%) | 100 | 100 | 100 | 999.450 | 100 | 486.619.816 | 100 | 500.369.076 | 100 | 470.112.962 | 100 | 518.625.182 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan) (%) | 0,02 | 0,019 | 0,016 | | 0,014 | | 0,012 | | 0,011 | | 0,011 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan) (%) | 0,02 | 0,019 | 0,016 | | 0,014 | | 0,012 | | 0,011 | | 0,011 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | | | 51.000.400 | | 1.469.340.732 | | 1.613.681.861 | | 1.416.106.403 | | 1.572.557.498 | |
| Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak | Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks) | 0 | 0 | 100 | 51.000.400 | 100 | 1.469.340.732 | 100 | 1.613.681.861 | 100 | 1.416.106.403 | 100 | 1.572.557.498 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | Jumlah organisasi perempuan aktif (Organisasi) | 21 | 21 | 21 | | 21 | | 21 | | 21 | | 21 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | | | | | 1.000.000 | | 18.038.284 | | 18.547.949 | | 17.426.399 | | 19.224.676 | |
| Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak | Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 1.000.000 | 100 | 18.038.284 | 100 | 18.547.949 | 100 | 17.426.399 | 100 | 19.224.676 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | Jumlah Perwako, himbauan, MoU terkait perlindungan anak (Dokumen) | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | | | | 2.000.000 | | 204.027.048 | | 209.791.756 | | 197.106.153 | | 217.446.067 | |
| Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks) | 61,11 | 61,31 | 61,51 | 2.000.000 | 61,71 | 204.027.048 | 61,91 | 209.791.756 | 62,11 | 197.106.153 | 62,31 | 217.446.067 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Jumlah perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) (Desa/ Kelurahan) | 5 | 5 | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | Tingkat Kategori Capaian Kota Layak Anak (KLA) (Kategori) | Madya | Madya | Madya | | Madya | | Madya | | Nindya | | Nindya | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | | | 2.000.000 | | 842.708.234 | | 866.518.638 | | 814.122.341 | | 898.133.814 | |
| Meningkatnya penecegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks) | 81,51 | 82,92 | 83,25 | 2.000.000 | 83,62 | 842.708.234 | 83,85 | 866.518.638 | 84,01 | 814.122.341 | 84,33 | 898.133.814 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten/ Kota (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks) | 81,51 | 82,92 | 83,25 | | 83,62 | | 83,85 | | 84,01 | | 84,33 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Komprehensif (Persentase) | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/ Kota (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | | 3.157.351.426 | | 9.196.776.163 | | 9.636.087.139 | | 9.108.537.752 | | 9.480.164.042 | |
| 2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | | 2.688.902.606 | | 4.634.923.427 | | 4.651.134.786 | | 4.667.508.258 | | 4.684.045.465 | |
| Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah | Nilai IKM (Indeks) | 85,6 | 86 | 86,5 | 2.688.902.606 | 87 | 4.634.923.427 | 87,5 | 4.651.134.786 | 88 | 4.667.508.258 | 88,5 | 4.684.045.465 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan |
| 2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | | | | | 0 | | 322.000.000 | | 359.952.353 | | 269.952.353 | | 296.118.577 | |
| Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan | Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase) | 89,61 | 90 | 91 | 0 | 92 | 322.000.000 | 93 | 359.952.353 | 94 | 269.952.353 | 95 | 296.118.577 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan |
| 2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | | 364.645.445 | | 2.930.000.000 | | 3.205.000.000 | | 2.955.000.000 | | 3.170.000.000 | |
| Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat | Skor Pola Pangan Harapan (Nilai) | 87,7 | 85,3 | 87,9 | 364.645.445 | 88 | 2.930.000.000 | 88,1 | 3.205.000.000 | 88,2 | 2.955.000.000 | 88,3 | 3.170.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan |
| 2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | | | | 52.714.900 | | 899.852.736 | | 970.000.000 | | 795.000.000 | | 920.000.000 | |
| Meningkatnya penanganan kerawanan pangan | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%) | 12 | 11,5 | 11 | 52.714.900 | 10,5 | 899.852.736 | 10 | 970.000.000 | 9,5 | 795.000.000 | 9 | 920.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | | | | 50.988.475 | | 410.000.000 | | 450.000.000 | | 381.077.141 | | 410.000.000 | |
| Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan | Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase) | 78 | 85 | 85,1 | 50.988.475 | 85,15 | 410.000.000 | 85,2 | 450.000.000 | 85,25 | 381.077.141 | 85,3 | 410.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan |
| 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | | | 136.788.000 | | 550.000.000 | | 600.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | |
| 2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | | | | | 0 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan | Persentase Tanah Sengketa, Konflik Yang Difasilitasi (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,78 | 50.000.000 | 81,48 | 50.000.000 | 85,19 | 50.000.000 | 88,89 | 50.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan |
| 2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT | | | | | 0 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 0 | | 0 | |
| Meningkatnya tata kelola tanah ulayat | Persentase Tanah Ulayat Yang Dipetakan (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,67 | 150.000.000 | 33,33 | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan |
| 2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | | | | | 136.788.000 | | 350.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | |
| Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah | Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (%) | 100 | 100 | 100 | 136.788.000 | 100 | 350.000.000 | 100 | 400.000.000 | 100 | 400.000.000 | 100 | 400.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan |
| 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 19.986.311.470 | | 24.712.835.769 | | 24.896.359.614 | | 25.082.120.697 | | 25.269.537.391 | |
| 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 5.818.187.930 | | 7.262.835.769 | | 7.446.359.614 | | 8.182.120.697 | | 8.369.537.391 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja Perangkat Daerah | Nilai IKM (Indeks) | 89 | 89 | 89 | 5.818.187.930 | 89 | 7.262.835.769 | 89 | 7.446.559.614 | 89 | 8.182.120.697 | 89 | 8.369.537.391 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| 2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 113.341.805 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | |
| Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP | Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Yang Di tindak Lanjuti (Dokumen) | 5 | 5 | 5 | 113.341.805 | 5 | 300.000.000 | 5 | 300.000.000 | 5 | 300.000.000 | 5 | 300.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 1.021.173.190 | | 1.300.000.000 | | 1.300.000.000 | | 1.300.000.000 | | 1.300.000.000 | |
| Menurunnya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup | Indeks Kualitas Air (Nilai) | 45,26 | 66,95 | 67,15 | 1.021.173.190 | 67,35 | 1.300.000.000 | 67,55 | 1.300.000.000 | 67,75 | 1.300.000.000 | 67,95 | 1.300.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| | Indeks Kualitas Udara (Nilai) | 87,59 | 78,15 | 78,45 | | 78,75 | | 79,05 | | 79,35 | | 79,65 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| | Indeks Kualitas Air (Nilai) | 45,26 | 66,95 | 67,15 | | 67,35 | | 67,55 | | 67,75 | | 67,95 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| | Indeks Kualitas Udara (Nilai) | 87,59 | 78,15 | 78,45 | | 78,75 | | 79,05 | | 79,35 | | 79,65 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| 2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | | | | 1.862.944.530 | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | |
| Meningkatnya pengelolaan keaneka ragaman hayati | Persentase RTH (Persentase) | 14,87 | 14,9 | 14,91 | 1.862.944.530 | 14,93 | 2.000.000.000 | 14,95 | 2.000.000.000 | 14,97 | 2.000.000.000 | 15 | 2.000.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | | | | | 12.646.300 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun ( B3) limbah bahan berbahaya dan limbah beracun limbah (B3) | Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase) | 50 | 50 | 50 | 12.646.300 | 50 | 50.000.000 | 50 | 50.000.000 | 50 | 100.000.000 | 50 | 100.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| 2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | | | | 14.848.750 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| Meningkatnya kepatuhan usaha dan / atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/ Kota (%) | 74 | 75 | 76 | 14.848.750 | 77 | 100.000.000 | 78 | 100.000.000 | 79 | 100.000.000 | 80 | 100.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| 2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | | 779.755.260 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | |
| Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup | Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase) | 20 | 20 | 20 | 779.755.260 | 23,4 | 1.000.000.000 | 25,53 | 1.000.000.000 | 27,66 | 1.000.000.000 | 31,91 | 1.000.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| 2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 51.557.250 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| UNTUK MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase) | - | - | 95,54 | 51.557.250 | 95,76 | 200.000.000 | 96,25 | 200.000.000 | 96,35 | 100.000.000 | 95,5 | 100.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| 2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | | | 10.311.756.455 | | 12.500.000.000 | | 12.500.000.000 | | 12.000.000.000 | | 12.000.000.000 | |
| Meningkatnya tata kelola persampahan | Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah (%) | 15,9 | 19,68 | 23,54 | 10.311.756.455 | 27,42 | 12.500.000.000 | 30,9 | 12.500.000.000 | 34,79 | 12.000.000.000 | 38,48 | 12.000.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup |
| 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | 4.617.745.532 | | 6.123.135.612 | | 7.701.314.022 | | 7.368.517.851 | | 7.603.936.247 | |
| 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 4.232.570.332 | | 6.878.135.612 | | 6.421.314.022 | | 6.078.517.851 | | 6.303.936.247 | |
| Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah | Nilai IKM (Indeks) | 94,08 | 94,1 | 94,1 | 4.232.570.332 | 94,2 | 6.878.135.612 | 94,3 | 6.421.314.022 | 94,4 | 6.078.517.851 | 94,5 | 6.303.936.247 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | | | 139.285.250 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | |
| Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk | Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase) | 62,34 | 62,5 | 64 | 139.285.250 | 66 | 400.000.000 | 68 | 400.000.000 | 70 | 400.000.000 | 70 | 400.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| | Persentase kepemilikan Identitas | 8,16 | 10 | 10 | | 12 | | 14 | | 16 | | 16 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Kependudukan Digital (IKD) (%) | | | | | | | | | | | | | Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | | | | 88.927.200 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | | 350.000.000 | |
| Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil | Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 88.927.200 | 100 | 350.000.000 | 100 | 350.000.000 | 100 | 350.000.000 | 100 | 350.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| | Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| | Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| | Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | | | | 138.438.800 | | 425.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | |
| Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan | Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan (Persentase) | 90 | 91 | 92 | 138.438.800 | 93 | 425.000.000 | 94 | 450.000.000 | 95 | 450.000.000 | 95 | 450.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | | | | | 18.523.950 | | 70.000.000 | | 80.000.000 | | 90.000.000 | | 100.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Meningkatnya kualitas profil kependudukan | Cakupan pengelolaan profil kependudukan (Laporan) | 3 | 3 | 3 | 18.523.950 | 3 | 70.000.000 | 3 | 80.000.000 | 3 | 90.000.000 | 3 | 100.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | 0 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | |
| 2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | | | 0 | | 90.080.000 | | 90.080.000 | | 90.080.000 | | 90.080.000 | |
| Meningkatnya Kualitas Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90.080.000 | 1 | 90.080.000 | 1 | 90.080.000 | 1 | 90.080.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | | | | 0 | | 909.920.000 | | 909.920.000 | | 909.920.000 | | 909.920.000 | |
| Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 909.920.000 | 100 | 909.920.000 | 100 | 909.920.000 | 100 | 909.920.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | 793.330.700 | | 6.662.078.984 | | 7.776.651.152 | | 6.465.852.053 | | 7.159.762.566 | |
| 2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | | | | 1.000.000 | | 513.668.890 | | 528.182.411 | | 496.244.492 | | 547.453.295 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Terkendalinya pertambahan penduduk | Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun) | 8,5 | 6,7 | 5,5 | 1.000.000 | 4,6 | 513.668.890 | 4 | 528.182.411 | 3,5 | 496.244.492 | 3,2 | 547.453.295 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita) | 2,32 | 2,3 | 2,29 | | 2,28 | | 2,26 | | 2,25 | | 2,24 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| 2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | | 286.430.500 | | 3.453.498.669 | | 4.065.203.284 | | 3.319.390.225 | | 3.713.523.369 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%) | 63,5 | 63,7 | 63,8 | 286.430.500 | 63,9 | 3.453.498.669 | 64 | 4.065.203.284 | 64,1 | 3.319.390.225 | 64,15 | 3.713.523.369 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%) | 11,4 | 11,3 | 11,2 | | 11,15 | | 11,1 | | 11,05 | | 11 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase) | 16,1 | 15 | 14,1 | | 13,3 | | 12,6 | | 11,9 | | 11,4 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| 2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | | | 505.900.200 | | 2.695.211.425 | | 3.182.665.457 | | 2.590.217.336 | | 2.898.785.902 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pembinaan Keluarga Sejahtera (KS) | Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase) | 70 | 71 | 72 | 505.900.200 | 73 | 2.695.211.425 | 74 | 3.182.665.457 | 75 | 2.590.217.336 | 76 | 2.898.785.902 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Median Usia Kawin Pertama (MUKP) wanita (Angka) | 23,1 | 23,2 | 23,3 | | 23,4 | | 23,5 | | 23,6 | | 23,7 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | Indeks Lansia Berdaya (Indeks) | 58,5 | 59,3 | 60 | | 60,8 | | 61,5 | | 62,2 | | 62,8 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks) | 88,6 | 89,6 | 90,4 | | 91,3 | | 92 | | 92,7 | | 93,3 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (Persentase) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | 9.298.390.128 | | 15.301.330.322 | | 25.715.124.702 | | 24.841.966.718 | | 15.444.526.775 | |
| 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | | 6.580.275.343 | | 9.209.036.322 | | 9.922.830.702 | | 9.049.672.718 | | 9.652.232.775 | |
| Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah | Nilai IKM (Indeks) | 87 | 89 | 85 | 6.580.275.343 | 87 | 9.209.036.322 | 89 | 9.922.830.702 | 91 | 9.049.672.718 | 93 | 9.652.232.775 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan |
| 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | 2.718.114.785 | | 6.092.294.000 | | 15.792.294.000 | | 15.792.294.000 | | 5.792.294.000 | |
| Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat | Persentase ketersediaan infrastruktur perhubungan | 84 | 86 | 86 | 2.718.114.785 | 87 | 6.092.294.000 | 88 | 15.792.294.000 | 89 | 15.792.294.000 | 90 | 5.792.294.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | yang ramah lingkungan (%) | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase ketersediaan infrastruktur perhubungan yang ramah lingkungan (%) | 84 | 86 | 86 | | 87 | | 88 | | 89 | | 90 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan |
| | Persentase ketersediaan infrastruktur perhubungan yang ramah lingkungan (%) | 84 | 86 | 86 | | 87 | | 88 | | 89 | | 90 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan |
| | Persentase ketersediaan infrastruktur perhubungan yang ramah lingkungan (%) | 84 | 86 | 86 | | 87 | | 88 | | 89 | | 90 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan |
| 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | 9.690.850.266 | | 18.205.522.388 | | 17.020.104.963 | | 15.724.391.471 | | 16.452.669.416 | |
| 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | | 4.975.798.846 | | 5.760.522.388 | | 6.380.104.963 | | 5.480.721.438 | | 5.257.669.416 | |
| Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah | Nilai IKM (Indeks) | 86,3 | 86,3 | 87 | 4.975.798.846 | 87,5 | 5.760.522.388 | 88 | 6.380.104.963 | 88,5 | 5.480.721.438 | 89 | 5.257.669.416 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika |
| 2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | | | 1.088.933.820 | | 2.900.000.000 | | 4.500.000.000 | | 4.500.000.000 | | 5.650.000.000 | |
| Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%) | - | 78 | 78 | 1.088.933.820 | 80 | 2.900.000.000 | 84 | 4.500.000.000 | 87 | 4.500.000.000 | 90 | 5.650.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | | | 3.626.127.600 | | 9.545.000.000 | | 6.140.000.000 | | 5.743.670.033 | | 5.545.000.000 | |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks) | 3,75 | 3,75 | 3,84 | 3.626.127.600 | 3,93 | 9.545.000.000 | 4,03 | 6.140.000.000 | 4,12 | 5.743.670.033 | 4,21 | 5.545.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika |
| 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | 7.904.377.539 | | 11.339.522.402 | | 11.787.632.552 | | 11.584.568.804 | | 11.925.733.918 | |
| 2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 7.506.696.314 | | 8.539.522.402 | | 8.567.132.552 | | 8.595.018.804 | | 8.623.183.918 | |
| Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah | Nilai IKM (Indeks) | 87,1 | 87,1 | 87,6 | 7.506.696.314 | 88,1 | 8.539.522.402 | 88,6 | 8.567.132.552 | 89,1 | 8.595.018.804 | 89,6 | 8.623.183.918 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| 2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | | | | | 0 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam | Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase) | 12,74 | 13,11 | 13,31 | 0 | 13,57 | 50.000.000 | 13,79 | 50.000.000 | 13,93 | 50.000.000 | 14,07 | 50.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| 2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | | | 19.999.150 | | 100.000.000 | | 110.000.000 | | 121.000.000 | | 121.000.000 | |
| Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi | Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase) | 38,46 | 34,21 | 36,89 | 19.999.150 | 39,47 | 100.000.000 | 42,11 | 110.000.000 | 44,74 | 121.000.000 | 47,37 | 121.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| 2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | | | | | 14.999.250 | | 100.000.000 | | 105.000.000 | | 110.500.000 | | 110.500.000 | |
| Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi | Persentase Koperasi Aktif (Persentase) | 46,15 | 50 | 60,53 | 14.999.250 | 61,05 | 100.000.000 | 61,58 | 105.000.000 | 62,11 | 110.500.000 | 62,63 | 110.500.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | | | | | | | | | | | | | | Usaha Kecil, Dan Menengah |
| 2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | | | | 129.999.200 | | 300.000.000 | | 330.000.000 | | 200.000.000 | | 363.000.000 | |
| Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian | Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase) | 4,66 | 10,47 | 10,94 | 129.999.200 | 11,7 | 300.000.000 | 13,45 | 330.000.000 | 14,62 | 200.000.000 | 17,54 | 363.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| 2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | | | | 19.999.850 | | 455.000.000 | | 500.500.000 | | 550.550.000 | | 550.550.000 | |
| Meningkatnya produktivitas koperasi | Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase) | 4,35 | 8,33 | 11,54 | 19.999.850 | 13,79 | 455.000.000 | 15,15 | 500.500.000 | 15,79 | 550.550.000 | 15,91 | 550.550.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| 2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | | | 113.336.775 | | 1.545.000.000 | | 1.850.000.000 | | 1.655.000.000 | | 1.805.000.000 | |
| Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri | Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase) | 4,84 | 4,84 | 4,95 | 113.336.775 | 5,02 | 1.545.000.000 | 5,07 | 1.850.000.000 | 5,13 | 1.655.000.000 | 5,24 | 1.805.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| | Pertumbuhan Wirausaha (Persentase) | 11,26 | 11,26 | 12,35 | | 12,94 | | 13,56 | | 14,2 | | 14,88 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |
| 2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | | | 99.347.000 | | 250.000.000 | | 275.000.000 | | 302.500.000 | | 302.500.000 | |
| Meningkatnya daya saing UMKM | Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase) | 1,84 | 1,84 | 1,99 | 99.347.000 | 2,07 | 250.000.000 | 2,15 | 275.000.000 | 2,24 | 302.500.000 | 2,32 | 302.500.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | 4.700.143.926 | | 11.069.434.306 | | 10.980.518.581 | | 10.227.876.413 | | 10.743.328.425 | |
| 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | | 4.384.451.086 | | 7.169.434.306 | | 6.780.518.581 | | 7.427.876.413 | | 7.943.328.425 | |
| Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah | Nilai IKM (Indeks) | 93,5 | 94 | 94,5 | 4.384.451.086 | 95 | 7.169.434.306 | 95,5 | 6.780.518.581 | 96 | 7.427.876.413 | 96,5 | 7.943.328.425 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal |
| 2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | | | 53.388.500 | | 700.000.000 | | 800.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | |
| Meningkatnya kemudahan berinvestasi | Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase) | 292,72 | 100 | 100 | 53.388.500 | 100 | 700.000.000 | 100 | 800.000.000 | 100 | 500.000.000 | 100 | 500.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal |
| 2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | | | 40.707.810 | | 700.000.000 | | 800.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | |
| Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal | Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase) | 0 | 10 | 10 | 40.707.810 | 10 | 700.000.000 | 10 | 800.000.000 | 10 | 500.000.000 | 10 | 500.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal |
| 2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | | | 160.166.030 | | 1.500.000.000 | | 1.400.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | |
| Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 160.166.030 | 100 | 1.500.000.000 | 100 | 1.400.000.000 | 100 | 800.000.000 | 100 | 800.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal |
| 2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | | 21.430.600 | | 800.000.000 | | 900.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | |
| Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka | 100 | 100 | 100 | 21.430.600 | 100 | 800.000.000 | 100 | 900.000.000 | 100 | 600.000.000 | 100 | 600.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Usaha (Persentase) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | | | | | 39.999.900 | | 200.000.000 | | 300.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | |
| Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 39.999.900 | 100 | 200.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 400.000.000 | 100 | 400.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal |
| 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | 4.848.809.221 | | 12.113.091.421 | | 11.725.625.000 | | 10.579.906.280 | | 11.965.901.563 | |
| 2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | | | | 118.591.225 | | 1.310.591.421 | | 1.260.500.000 | | 591.525.000 | | 643.101.250 | |
| Persentase pemuda yang berwirausaha | Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase) | 65 | 65 | 65 | 118.591.225 | 65 | 1.310.591.421 | 70 | 1.260.500.000 | 75 | 591.525.000 | 75 | 643.101.250 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga |
| 2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | | | 4.287.752.896 | | 9.825.000.000 | | 9.458.750.000 | | 9.151.687.530 | | 10.454.271.875 | |
| Jumlah medali pada event olahraga tingkat daerah | Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase) | 0 | 14 | 15 | 4.287.752.896 | 16 | 9.825.000.000 | 17 | 9.458.750.000 | 18 | 9.151.687.530 | 19 | 10.454.271.875 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga |
| 2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | | | | | 442.465.100 | | 977.500.000 | | 1.006.375.000 | | 836.693.750 | | 868.528.438 | |
| Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase) | 65 | 65 | 65 | 442.465.100 | 70 | 977.500.000 | 70 | 1.006.375.000 | 75 | 836.693.750 | 75 | 868.528.438 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga |
| 2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | 100.654.050 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| 2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN | | | | | 100.654.050 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| STATISTIK SEKTORAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Indeks Pembangunan Statistik | Indeks Pembangunan Statistik (Nilai) | 2,69 | 2,7 | 2,71 | 100.654.050 | 2,72 | 100.000.000 | 2,73 | 100.000.000 | 2,74 | 100.000.000 | 2,75 | 100.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik |
| 2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | 418.957.980 | | 670.000.000 | | 620.000.000 | | 315.000.000 | | 650.000.000 | |
| 2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | | | 418.957.980 | | 670.000.000 | | 620.000.000 | | 315.000.000 | | 650.000.000 | |
| Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah | Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka) | 46,2 | 46,2 | 50 | 418.957.980 | 53 | 670.000.000 | 58 | 620.000.000 | 60 | 315.000.000 | 62,5 | 650.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian |
| 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | 1.794.897.250 | | 6.124.672.920 | | 5.463.404.860 | | 4.752.406.930 | | 4.765.630.404 | |
| 2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | | | | 1.544.908.250 | | 4.891.610.162 | | 4.267.493.900 | | 3.678.227.220 | | 3.582.768.506 | |
| Persentase objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase) | 75 | 75 | 75 | 1.544.908.250 | 75 | 4.891.610.162 | 80 | 4.267.493.900 | 80 | 3.678.227.220 | 85 | 3.582.768.506 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan |
| 2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | | | | | 103.249.800 | | 541.499.790 | | 529.999.800 | | 379.999.800 | | 479.999.800 | |
| Persentase Komunitas /pelaku seni yang ditingkatkan kapasitasnya | Presentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase) | 5 | 5 | 5 | 103.249.800 | 5 | 541.499.790 | 5 | 529.999.800 | 5 | 379.999.800 | 5 | 479.999.800 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan |
| 2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | | | | | 0 | | 157.500.000 | | 165.375.000 | | 173.643.750 | | 182.325.938 | |
| Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 157.500.000 | 7 | 165.375.000 | 7 | 173.643.750 | 10 | 182.325.938 | Dinas/Badan yang menangani |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| dan dapat mengakses data dan informasi sejarah lokal | Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase) | | | | | | | | | | | | | Bidang Kebudayaan |
| 2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | | | | | 21.542.750 | | 81.857.168 | | 80.340.160 | | 80.340.160 | | 80.340.160 | |
| Persentasi cagar budaya yang dilestarikan | Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase) | 10 | 10 | 10 | 21.542.750 | 10 | 81.857.168 | 10 | 80.340.160 | 10 | 80.340.160 | 10 | 80.340.160 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan |
| | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%) | 10 | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan |
| 2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | | | | | 125.196.450 | | 452.205.800 | | 440.196.000 | | 440.196.000 | | 440.196.000 | |
| Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaa kegiatan museum | Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase) | 10 | 10 | 10 | 125.196.450 | 10 | 452.205.800 | 10 | 440.196.000 | 10 | 440.196.000 | 10 | 440.196.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan |
| | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase) | 10 | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan |
| 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | | 3.651.792.209 | | 11.372.702.267 | | 7.229.663.734 | | 6.878.028.786 | | 7.157.625.808 | |
| 2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | | 3.409.248.509 | | 8.344.798.039 | | 4.354.933.734 | | 4.365.170.786 | | 4.375.510.208 | |
| Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah | Nilai IKM (Indeks) | 86,17 | 86,75 | 87 | 3.409.248.509 | 87,25 | 8.344.798.039 | 87,5 | 4.354.933.734 | 87,75 | 4.365.170.786 | 88 | 4.375.510.208 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan |
| 2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | | | | | 230.140.650 | | 2.964.401.228 | | 2.800.425.000 | | 2.437.628.000 | | 2.704.400.600 | |
| Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai) | 66,18 | 66,2 | 66,3 | 230.140.650 | 66,4 | 2.964.401.228 | 66,8 | 2.800.425.000 | 67,2 | 2.437.628.000 | 67,5 | 2.704.400.600 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Standar Nasional Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | | | | | 12.403.050 | | 63.503.000 | | 74.305.000 | | 75.230.000 | | 77.715.000 | |
| Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno | Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase) | 1,16 | 1,6 | 2,05 | 12.403.050 | 2,5 | 63.503.000 | 2,9 | 74.305.000 | 3,4 | 75.230.000 | 3,8 | 77.715.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan |
| 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | | | 174.105.210 | | 1.618.077.300 | | 1.618.295.462 | | 1.366.895.573 | | 1.498.000.174 | |
| 2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | | | | | 174.105.210 | | 1.363.077.300 | | 1.473.295.462 | | 1.101.895.573 | | 1.363.000.174 | |
| Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis | Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase) | 70,04 | 70,15 | 70,3 | 174.105.210 | 70,5 | 1.363.077.300 | 70,75 | 1.473.295.462 | 71,05 | 1.101.895.573 | 71,3 | 1.363.000.174 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan |
| 2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | | | | | 0 | | 240.000.000 | | 130.000.000 | | 250.000.000 | | 120.000.000 | |
| Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK | Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase) | - | - | - | 0 | 30 | 240.000.000 | 35 | 130.000.000 | 40 | 250.000.000 | 45 | 120.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan |
| 2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP | | | | | 0 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup | Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase) | - | - | - | 0 | 30 | 15.000.000 | 32 | 15.000.000 | 34 | 15.000.000 | 36 | 15.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan |
| 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | 751.577.720 | | 1.217.478.901 | | 789.226.791 | | 868.149.469 | | 954.964.417 | |
| 3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | | | 575.504.050 | | 1.080.937.983 | | 639.031.781 | | 702.934.959 | | 773.228.455 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Meningkatnya produksi perikanan budidaya | Produksi Perikanan Budidaya (Ton) | 565,4 | 560 | 565 | 575.504.050 | 570 | 1.080.937.983 | 575 | 639.031.781 | 580 | 702.934.959 | 585 | 773.228.455 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan |
| | Persentase Pembudidaya Yang Tergabung Dalam Kelompok Yang Menerapkan Anjuran KKP (%) | 45 | 45 | 50 | | 55 | | 60 | | 65 | | 70 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan |
| | Produksi Perikanan Budidaya (Ton) | 565,4 | 560 | 565 | | 570 | | 575 | | 580 | | 585 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan |
| 3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | | | | | 176.073.680 | | 136.540.918 | | 150.195.010 | | 165.214.510 | | 181.735.962 | |
| Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat | Angka Konsumsi Ikan (Kg/ KAP/ TH) | 33,4 | 33,4 | 33,5 | 176.073.680 | 39,35 | 136.540.918 | 39,4 | 150.195.010 | 39,45 | 165.214.510 | 50 | 181.735.962 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan |
| | Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton) | 7,1 | 7,1 | 7,15 | | 7,2 | | 7,25 | | 7,3 | | 7,35 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan |
| 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | | 6.721.291.422 | | 13.336.376.399 | | 12.267.497.306 | | 11.731.936.399 | | 11.931.936.399 | |
| 3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | | 5.791.365.742 | | 7.162.156.678 | | 6.984.277.585 | | 6.439.716.678 | | 6.439.716.678 | |
| Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah | Nilai IKM (Indeks) | 86 | 86 | 90 | 5.791.365.742 | 90 | 7.162.156.678 | 90 | 6.984.277.585 | 90 | 6.439.716.678 | 90 | 6.439.716.678 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata |
| 3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | | | 498.600.130 | | 1.477.539.031 | | 1.420.539.031 | | 1.470.539.031 | | 1.470.539.031 | |
| Persentase objek wisata unggulan dalam kondisi baik, Jumlah pengembangan destinasi pariwisata, Persentase promosi | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase) | 45 | 45 | 50 | 498.600.130 | 50 | 1.477.539.031 | 50 | 1.420.539.031 | 55 | 1.470.539.031 | 55 | 1.470.539.031 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| kepariwisatnan yang dilaksanakan | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase) | 45 | 50 | 50 | | 50 | | 50 | | 55 | | 55 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata |
| 3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | | | | 201.325.550 | | 2.450.000.000 | | 2.300.000.000 | | 2.250.000.000 | | 2.300.000.000 | |
| Jumlah kerjasama yang dilakukan dengan pelaku usaha jasa pariwisata, Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota, Jumlah media/ informasi yang disediakan dan disebarluaskan, Jumlah event yang dilaksanakan, difasilitasi dan diikuti | Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase) | 6 | 6 | 7 | 201.325.550 | 7 | 2.450.000.000 | 7 | 2.300.000.000 | 7 | 2.250.000.000 | 7 | 2.300.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata |
| 3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | | | | | 55.000.000 | | 921.680.690 | | 621.680.690 | | 621.680.690 | | 621.680.690 | |
| Jumlah karya ekonomi kreatif yang difasilitasi | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase) | 10 | 15 | 21 | 55.000.000 | 30 | 921.680.690 | 42 | 621.680.690 | 57 | 621.680.690 | 75 | 621.680.690 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata |
| 3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | | | 175.000.000 | | 1.325.000.000 | | 941.000.000 | | 950.000.000 | | 1.100.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Jumlah Fasilitasi Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase) | 1 | 1 | 30 | 175.000.000 | 50 | 1.325.000.000 | 60 | 941.000.000 | 70 | 950.000.000 | 80 | 1.100.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata |
| 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | 20.986.462.835 | | 24.874.026.927 | | 26.352.858.629 | | 24.542.420.718 | | 25.627.083.543 | |
| 3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | | 14.026.603.669 | | 14.617.276.141 | | 16.079.003.742 | | 15.737.821.125 | | 15.942.023.991 | |
| Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah | Nilai IKM (Indeks) | 87 | 88 | 89 | 14.026.603.669 | 89,5 | 14.617.276.141 | 90 | 16.079.003.742 | 90,5 | 15.737.821.125 | 91 | 15.942.023.991 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| 3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | 1.601.019.686 | | 2.520.233.356 | | 2.557.966.367 | | 1.713.763.004 | | 1.885.139.304 | |
| Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase) | 0,06 | 0,06 | 0,73 | 1.601.019.686 | 0,73 | 2.520.233.356 | 0,16 | 2.557.966.367 | 1,29 | 1.713.763.004 | 0,71 | 1.885.139.304 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| | Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase) | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| | Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (%) | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| | Produktivitas pertanian per hektar per tahun (%) | 5,6 | 5,6 | 5,61 | | 5,62 | | 5,63 | | 5,64 | | 5,65 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase) | 0,06 | 0,06 | 0,73 | | 0,73 | | 0,16 | | 1,29 | | 0,71 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| | Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase) | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Produktivitas pertanian per hektar per tahun (%) | 5,6 | 5,6 | 5,61 | | 5,62 | | 5,63 | | 5,64 | | 5,65 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| 3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | | 3.550.394.100 | | 4.767.005.312 | | 5.027.669.610 | | 4.683.795.788 | | 5.152.175.367 | |
| Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian | Persentase Pemenuhan Prasarana Cakupan Luas Lahan Pertanian Yang Ditetapkan Menjadi LP2B (JUT) (%) | 42,82 | 42,82 | 49,84 | 3.550.394.100 | 50,54 | 4.767.005.312 | 51,31 | 5.027.669.610 | 52,16 | 4.683.795.788 | 53,09 | 5.152.175.367 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| | Persentase Pemenuhan Prasarana Cakupan Luas Lahan Pertanian Yang Ditetapkan Menjadi LP2B (KUT) (%) | 57,18 | 57,18 | 66,54 | | 67,48 | | 68,51 | | 69,64 | | 70,89 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| | Persentase Prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) dalam kondisi baik (%) | 50 | 55 | 60 | | 65 | | 70 | | 75 | | 80 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| 3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | | 1.080.825.230 | | 2.169.129.953 | | 1.807.798.528 | | 1.438.578.381 | | 1.582.436.219 | |
| Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase) | 1 | 1 | 1 | 1.080.825.230 | 1 | 2.169.129.953 | 1 | 1.807.798.528 | 1 | 1.438.578.381 | 1 | 1.582.436.219 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| | Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (%) | 100 | 100 | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%) | 9 | 9 | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| | Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen) | 100 | 100 | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%) | 9 | 9 | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| | Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase) | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| 3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | | | | | 154.000.000 | | 169.400.000 | | 186.340.000 | | 204.974.000 | | 225.471.400 | |
| Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase) | 60 | 60 | 60 | 154.000.000 | 100 | 169.400.000 | 100 | 186.340.000 | 100 | 204.974.000 | 100 | 225.471.400 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| | Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase) | - | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| 3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | | | | | 69.000.000 | | 75.900.000 | | 83.490.000 | | 91.839.000 | | 101.022.900 | |
| Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian | Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 69.000.000 | 100 | 75.900.000 | 100 | 83.490.000 | 100 | 91.839.000 | 100 | 101.022.900 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | | 504.620.150 | | 555.082.165 | | 610.590.382 | | 671.649.420 | | 738.814.362 | |
| Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian | Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase) | 100 | 100 | 90 | 504.620.150 | 90 | 555.082.165 | 90 | 610.590.382 | 90 | 671.649.420 | 95 | 738.814.362 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| | Persentase Luas Tanam Yang Menerapkan Teknologi Pertanian (%) | 45 | 45 | 50 | | 52 | | 54 | | 56 | | 58 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |
| 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | 3.176.501.150 | | 12.179.454.661 | | 12.766.805.248 | | 11.719.229.915 | | 12.201.719.637 | |
| 3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | | | | | 19.679.200 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | |
| Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha | Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 19.679.200 | 100 | 30.000.000 | 100 | 30.000.000 | 100 | 30.000.000 | 100 | 30.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan |
| 3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | | | 2.737.327.100 | | 9.979.454.661 | | 9.979.454.661 | | 9.173.929.328 | | 9.599.748.376 | |
| Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi | Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase) | 91,47 | 90 | 90 | 2.737.327.100 | 90 | 9.979.454.661 | 90 | 9.979.454.661 | 90 | 9.173.929.328 | 90 | 9.599.748.376 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan |
| 3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | | | | | 113.898.350 | | 470.000.000 | | 470.000.000 | | 470.000.000 | | 470.000.000 | |
| Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan bahan penting | Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase) | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 113.898.350 | 21,15 | 470.000.000 | 21,15 | 470.000.000 | 23,08 | 470.000.000 | 23,08 | 470.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | | | | | 0 | | 600.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | |
| Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor | Persentase pelaku usaha yang difasilitasi dalam upaya pelaksanaan ekspor (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 600.000.000 | 0,02 | 800.000.000 | 0,03 | 800.000.000 | 0,04 | 800.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan |
| 3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | | | 52.586.700 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | |
| Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk | Persentase penanganan pengaduan konsumen (%) | 100 | 100 | 100 | 52.586.700 | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan |
| 3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | | | | | 253.009.800 | | 900.000.000 | | 1.227.350.587 | | 1.045.300.587 | | 1.101.971.261 | |
| Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri | Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase) | 80 | 80 | 80 | 253.009.800 | 80 | 900.000.000 | 80 | 1.227.350.587 | 80 | 1.045.300.587 | 80 | 1.101.971.261 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan |
| | Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase) | 80 | 80 | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan |
| 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | 797.227.815 | | 3.280.759.853 | | 2.654.900.192 | | 2.004.121.386 | | 2.203.231.967 | |
| 3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | | | 719.630.190 | | 2.113.255.285 | | 2.451.098.782 | | 1.862.209.751 | | 2.048.752.457 | |
| Meningkatnya realisasi pembangunan industri | Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase) | 25 | 25 | 26 | 719.630.190 | 27 | 2.113.255.285 | 28 | 2.451.098.782 | 29 | 1.862.209.751 | 30 | 2.048.752.457 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase) | 25 | 26 | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian |
| 3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | | | | | 60.657.325 | | 117.313.670 | | 148.610.510 | | 96.911.635 | | 108.479.510 | |
| Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian | Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase) | 72,07 | 72,32 | 72,57 | 60.657.325 | 72,77 | 117.313.670 | 73,02 | 148.610.510 | 73,27 | 96.911.635 | 73,52 | 108.479.510 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian |
| 3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | | | | | 16.940.300 | | 50.190.900 | | 55.190.900 | | 45.000.000 | | 46.000.000 | |
| Meningkatnya pemanfaatan informasi industri nasional | Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase) | 0 | 60 | 61,67 | 16.940.300 | 66,67 | 50.190.900 | 71,67 | 55.190.900 | 72,33 | 45.000.000 | 73,33 | 46.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian |
| 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH | | | | | 32.913.423.435 | | 42.405.981.886 | | 43.011.732.241 | | 41.343.761.594 | | 44.722.611.902 | |
| 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | | 26.922.122.285 | | 32.552.733.836 | | 32.958.474.191 | | 31.290.513.544 | | 34.669.363.852 | |
| Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah | Nilai IKM (Indeks) | 89,01 | 89,02 | 89,04 | 26.922.122.285 | 89,06 | 32.552.733.836 | 89,08 | 32.958.474.191 | 90 | 31.290.513.544 | 90,02 | 34.669.363.852 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
| 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | | 5.654.335.950 | | 8.655.066.350 | | 8.855.066.350 | | 8.855.066.350 | | 8.855.066.350 | |
| Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Nilai) | 3,0788 | 3,4 | 3,415 | 5.654.335.950 | 3,44 | 8.655.066.350 | 3,463 | 8.855.066.350 | 3,4824 | 8.855.066.350 | 3,5 | 8.855.066.350 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
| | Indeks Reformasi Hukum (Indeks) | 87 | 87,2 | 87,4 | | 87,6 | | 87,8 | | 87,9 | | 88 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | | | 336.965.200 | | 1.198.181.700 | | 1.198.181.700 | | 1.198.181.700 | | 1.198.181.700 | |
| Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan | Indek Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Indeks) | 91,58 | 91,58 | 91,58 | 336.965.200 | 91,58 | 1.198.181.700 | 91,58 | 1.198.181.700 | 91,58 | 1.198.181.700 | 91,58 | 1.198.181.700 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
| 4.02 - SEKRETARIAT DPRD | | | | | 23.797.097.151 | | 40.245.607.613 | | 40.607.023.519 | | 40.972.053.584 | | 43.340.733.950 | |
| 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | | 17.457.799.276 | | 19.593.931.084 | | 19.593.931.084 | | 19.593.931.084 | | 19.286.364.484 | |
| Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah | Nilai IKM (Indeks) | 84 | 85 | 85 | 17.457.799.276 | 85 | 19.593.931.084 | 86 | 19.593.931.084 | 86 | 19.593.931.084 | 86 | 19.286.364.484 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD |
| 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | | | 6.339.297.875 | | 20.651.676.529 | | 21.013.092.435 | | 21.378.122.500 | | 24.054.369.466 | |
| Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD | Persentase Ranperda Yang Ditetapkan (%) | 100 | 100 | 100 | 6.339.297.875 | 100 | 20.651.676.529 | 100 | 21.013.092.435 | 100 | 21.378.122.500 | 100 | 24.054.369.466 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD |
| 5.01 - PERENCANAAN | | | | | 7.986.571.099 | | 24.150.066.534 | | 19.287.751.665 | | 18.025.599.461 | | 19.048.211.795 | |
| 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | | 7.000.537.499 | | 18.120.066.534 | | 12.956.251.665 | | 11.694.099.461 | | 12.400.136.795 | |
| Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah | Nilai IKM (Indeks) | 91 | 91,5 | 91,7 | 7.000.537.499 | 92 | 18.120.066.534 | 92,5 | 12.956.251.665 | 92,7 | 11.694.099.461 | 93 | 12.400.136.795 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan |
| 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | 545.303.825 | | 2.260.000.000 | | 2.373.000.000 | | 2.373.000.000 | | 2.491.650.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 545.303.825 | 100 | 2.250.000.000 | 100 | 2.373.000.000 | 100 | 2.373.000.000 | 100 | 2.491.650.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan |
| | Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan |
| 5.01.02 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | 440.729.775 | | 3.770.000.000 | | 3.958.500.000 | | 3.958.500.000 | | 4.156.425.000 | |
| 1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan 3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 440.729.775 | 100 | 3.770.000.000 | 100 | 3.958.500.000 | 100 | 3.958.500.000 | 100 | 4.156.425.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan |
| | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan |
| | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan |
| 5.02 - KEUANGAN | | | | | 17.927.219.274 | | 28.916.336.050 | | 30.717.901.045 | | 28.469.483.897 | | 29.986.785.633 | |
| 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | | 12.787.171.344 | | 14.365.451.104 | | 14.369.090.654 | | 14.369.090.654 | | 14.369.090.654 | |
| Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah | Nilai IKM (Indeks) | 84,25 | 85 | 85 | 12.787.171.344 | 86 | 14.365.451.104 | 87 | 14.369.090.654 | 88 | 14.369.090.654 | 89 | 14.369.090.654 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 85 | 85 | 85 | | 86 | | 87 | | 88 | | 89 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | | 3.097.918.280 | | 12.043.508.706 | | 13.841.434.151 | | 11.593.017.003 | | 13.106.930.379 | |
| Meningkatnya tata kelola anggaran, Meningkatnya tata kelola perbendaharaan, Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan | Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase) | 40,76 | 46,55 | 35 | 3.097.918.280 | 30 | 12.043.508.706 | 30 | 13.841.434.151 | 30 | 11.593.017.003 | 30 | 13.106.930.379 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan |
| | Persentase Penurunan SILPA (Persentase) | 11,49 | 11 | 10 | | 10 | | 9 | | 9 | | 9 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan |
| | Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai) | Wajar Tanpa Pengecualian | Wajar Tanpa Pengecualian | Wajar Tanpa Pengecualian | | Wajar Tanpa Pengecualian | | Wajar Tanpa Pengecualian | | Wajar Tanpa Pengecualian | | Wajar Tanpa Pengecualian | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan |
| 5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | | 915.159.650 | | 1.046.611.640 | | 1.046.611.640 | | 1.046.611.640 | | 1.050.000.000 | |
| Meningkatnya tata kelola aset daerah | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase) | 0,3 | 2 | 3 | 915.159.650 | 4 | 1.046.611.640 | 5 | 1.046.611.640 | 6 | 1.046.611.640 | 7 | 1.050.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan |
| 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | | 1.126.970.000 | | 1.460.764.600 | | 1.460.764.600 | | 1.460.764.600 | | 1.460.764.600 | |
| Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah, Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase) | 18,19 | 19 | 20 | 1.126.970.000 | 21 | 1.460.764.600 | 22 | 1.460.764.600 | 23 | 1.460.764.600 | 23 | 1.460.764.600 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan |
| | Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan |
| | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase) | 18,19 | 19 | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 23 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan |
| 5.03 - KEPEGAWAIAN | | | | | 18.679.947.398 | | 31.233.943.986 | | 32.427.859.904 | | 30.878.094.168 | | 31.908.994.614 | |
| 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | 18.411.258.998 | | 27.006.935.837 | | 27.006.935.837 | | 27.006.935.837 | | 27.006.935.837 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah | Nilai IKM (Indeks) | 91 | 91 | 91,3 | 18.411.258.998 | 91,6 | 27.006.935.837 | 91,9 | 27.006.935.837 | 92,2 | 27.006.935.837 | 92,5 | 27.006.935.837 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian |
| 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | | 268.688.400 | | 4.227.008.149 | | 5.420.924.067 | | 3.871.158.331 | | 4.902.058.777 | |
| Meningkatnya peningkatakan kompetensi ASN | Perzentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase) | 11,64 | 12 | 12 | 268.688.400 | 12 | 4.227.008.149 | 12 | 5.420.924.067 | 12 | 3.871.158.331 | 12 | 4.902.058.777 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian |
| 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | 15.081.550 | | 2.294.213.330 | | 2.325.575.020 | | 2.323.883.091 | | 2.323.173.330 | |
| 5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | 15.081.550 | | 2.294.213.330 | | 2.325.575.020 | | 2.323.883.091 | | 2.323.173.330 | |
| Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional | Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase) | 11,64 | 12 | 12 | 15.081.550 | 12 | 2.294.213.330 | 12 | 2.325.575.020 | 12 | 2.323.883.091 | 12 | 2.323.173.330 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidkan Dan Pelatihan |
| 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | 399.999.500 | | 3.700.000.000 | | 3.885.000.000 | | 2.630.000.000 | | 2.735.000.000 | |
| 5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | | 300.000.000 | | 3.000.000.000 | | 3.150.000.000 | | 2.500.000.000 | | 2.605.000.000 | |
| Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase) | 0 | 75 | 80 | 300.000.000 | 82 | 3.000.000.000 | 85 | 3.150.000.000 | 90 | 2.500.000.000 | 90 | 2.605.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan |
| 5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH | | | | | 99.999.500 | | 700.000.000 | | 735.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah | Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase) | 0 | 81 | 85 | 99.099.500 | 87,5 | 700.000.000 | 90 | 735.000.000 | 95 | 130.000.000 | 95 | 130.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan |
| 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH | | | | | 10.534.402.272 | | 18.004.262.106 | | 18.180.671.613 | | 18.171.154.509 | | 18.167.162.106 | |
| 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 9.445.241.772 | | 14.076.283.049 | | 14.076.283.049 | | 14.076.283.049 | | 14.076.283.049 | |
| Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah | Nilai IKM (Indeks) | 88,93 | 89 | 89 | 9.445.241.772 | 89,25 | 14.076.283.049 | 89,5 | 14.076.283.049 | 89,75 | 14.076.283.049 | 90 | 14.076.283.049 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah |
| 6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | | | 955.566.300 | | 3.015.566.300 | | 3.191.975.807 | | 3.182.458.703 | | 3.178.466.300 | |
| Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level) | 3 | 3 | 3 | 955.566.300 | 3 | 3.015.566.300 | 3 | 3.191.975.807 | 3 | 3.182.458.703 | 4 | 3.178.466.300 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah |
| 6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | | | | 133.594.200 | | 912.412.757 | | 912.412.757 | | 912.412.757 | | 912.412.757 | |
| Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level) | 3 | 3 | 3 | 133.594.200 | 3 | 912.412.757 | 3 | 912.412.757 | 3 | 912.412.757 | 4 | 912.412.757 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | | 56.059.723.314 | | 71.694.166.562 | | 72.674.219.382 | | 72.621.346.579 | | 72.599.166.562 | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 45.159.572.288 | | 47.955.032.748 | | 47.836.282.748 | | 47.838.032.748 | | 47.838.782.748 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah | Nilai IKM (Indeks) | 92 | 91 | 91 | 13.855.281.865 | 92 | 12.986.929.234 | 92 | 12.986.929.234 | 92 | 12.986.929.234 | 92 | 12.986.929.234 | Kecamatan Payakumbuh Barat |
| Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah | Nilai IKM (Indeks) | 91 | 91 | 91 | 9.330.016.133 | 91 | 8.663.712.228 | 91 | 8.663.712.228 | 91 | 8.663.712.228 | 91 | 8.663.712.228 | Kecamatan Payakumbuh Timur |
| Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah | Nilai IKM (Indeks) | 91 | 91 | 91 | 9.098.750.554 | 91 | 11.266.867.502 | 91 | 11.170.867.502 | 91 | 11.170.867.502 | 91 | 11.170.867.502 | Kecamatan Payakumbuh Utara |
| Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah | Nilai IKM (Indeks) | 90 | 90 | 90 | 6.475.476.445 | 90 | 7.545.595.121 | 90 | 7.545.595.121 | 90 | 7.545.595.121 | 90 | 7.545.595.121 | Kecamatan Payakumbuh Selatan |
| Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah | Nilai IKM (Indeks) | 90 | 90 | 90 | 6.400.038.291 | 90 | 7.491.928.663 | 90 | 7.469.178.663 | 90 | 7.470.928.663 | 90 | 7.471.678.663 | Kecamatan Lampasi Tigo Nagori |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | 180.091.350 | | 2.061.960.797 | | 2.229.910.306 | | 2.229.910.306 | | 2.229.910.306 | |
| Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan | Persentase pelayanan masyarakat yang diproses tepat waktu (%) | 85 | 85 | 85 | 40.102.150 | 85 | 896.010.564 | 85 | 896.010.564 | 85 | 896.010.564 | 85 | 896.010.564 | Kecamatan Payakumbuh Barat |
| | Persentase usulan Musrenbang yang diterima Perangkat Daerah (%) | 75 | 75 | 75 | | 75 | | 75 | | 75 | | 75 | | Kecamatan Payakumbuh Barat |
| Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan | Persentase usulan Musrenbang yang diterima Perangkat Daerah (%) | 70 | 70 | 70 | 53.702.250 | 70 | 787.000.000 | 70 | 887.000.000 | 70 | 887.000.000 | 70 | 887.000.000 | Kecamatan Payakumbuh Timur |
| | Persentase pelayanan masyarakat yang diproses tepat waktu (%) | 85 | 85 | 85 | | 85 | | 85 | | 85 | | 85 | | Kecamatan Payakumbuh Timur |
| Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan | Persentase pelayanan masyarakat yang diproses tepat waktu (%) | 85 | 85 | 85 | 31.677.800 | 85 | 238.999.798 | 85 | 293.999.798 | 85 | 293.999.798 | 85 | 293.999.798 | Kecamatan Payakumbuh Utara |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Persentase usulan Musrenbang yang diterima Perangkat Daerah (%) | 75 | 75 | 75 | | 75 | | 75 | | 75 | | 75 | | Kecamatan Payakumbuh Utara |
| Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan | Persentase pelayanan masyarakat yang diproses tepat waktu (%) | 85 | 85 | 85 | 31.181.600 | 85 | 84.950.435 | 85 | 97.899.944 | 85 | 97.899.944 | 85 | 97.899.944 | Kecamatan Payakumbuh Selatan |
| | Persentase usulan Musrenbang yang diterima Perangkat Daerah (%) | 75 | 75 | 75 | | 75 | | 75 | | 75 | | 75 | | Kecamatan Payakumbuh Selatan |
| Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan | Persentase usulan Musrenbang yang diterima Perangkat Daerah (%) | 70 | 70 | 70 | 23.427.550 | 70 | 55.000.000 | 70 | 55.000.000 | 70 | 55.000.000 | 70 | 55.000.000 | Kecamatan Lamposi Tigo Nagori |
| | Persentase pelayanan masyarakat yang diproses tepat waktu (%) | 85 | 85 | 85 | | 85 | | 85 | | 85 | | 85 | | Kecamatan Lamposi Tigo Nagori |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | 10.276.104.151 | | 18.431.650.909 | | 19.198.117.469 | | 19.145.244.666 | | 19.123.064.649 | |
| Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif | Nilai IKM (Indeks) | 92 | 91 | 91 | 3.704.195.535 | 92 | 6.311.968.308 | 92 | 6.892.021.128 | 92 | 6.839.148.325 | 92 | 6.816.968.308 | Kecamatan Payakumbuh Barat |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Kecamatan Payakumbuh Barat |
| | Nilai IKM (Indeks) | 92 | 91 | 91 | | 92 | | 92 | | 92 | | 92 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Nilai IKM (Indeks) | 92 | 91 | 91 | | 92 | | 92 | | 92 | | 92 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 92 | 91 | 91 | | 92 | | 92 | | 92 | | 92 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 92 | 91 | 91 | | 92 | | 92 | | 92 | | 92 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 92 | 91 | 91 | | 92 | | 92 | | 92 | | 92 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 92 | 91 | 91 | | 92 | | 92 | | 92 | | 92 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Nilai IKM (Indeks) | 92 | 91 | 91 | | 92 | | 92 | | 92 | | 92 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 92 | 91 | 91 | | 92 | | 92 | | 92 | | 92 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 92 | 91 | 91 | | 92 | | 92 | | 92 | | 92 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 92 | 91 | 91 | | 92 | | 92 | | 92 | | 92 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 92 | 91 | 91 | | 92 | | 92 | | 92 | | 92 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Nilai IKM (Indeks) | 92 | 91 | 91 | | 92 | | 92 | | 92 | | 92 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 92 | 91 | 91 | | 92 | | 92 | | 92 | | 92 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 92 | 91 | 91 | | 92 | | 92 | | 92 | | 92 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 92 | 91 | 91 | | 92 | | 92 | | 92 | | 92 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 92 | 91 | 91 | | 92 | | 92 | | 92 | | 92 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Nilai IKM (Indeks) | 92 | 91 | 91 | | 92 | | 92 | | 92 | | 92 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | 2.002.338.550 | 100 | 4.700.000.000 | 100 | 4.700.000.000 | 100 | 4.700.000.000 | 100 | 4.700.000.000 | Kecamatan Payakumbuh Timur |
| | Nilai IKM (Indeks) | 90 | 90 | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | Kecamatan Payakumbuh Timur |
| | Nilai IKM (Indeks) | 90 | 90 | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 90 | 90 | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 90 | 90 | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Nilai IKM (Indeks) | 90 | 90 | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 90 | 90 | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 90 | 90 | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 90 | 90 | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 90 | 90 | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Nilai IKM (Indeks) | 90 | 90 | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | 1.969.011.223 | 100 | 3.264.135.450 | 100 | 3.320.135.450 | 100 | 3.320.135.450 | 100 | 3.320.135.450 | Kecamatan Payakumbuh Utara |
| | Nilai IKM (Indeks) | 91 | 91 | 91 | | 91 | | 91 | | 91 | | 91 | | Kecamatan Payakumbuh Utara |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 91 | 91 | 91 | | 91 | | 91 | | 91 | | 91 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 91 | 91 | 91 | | 91 | | 91 | | 91 | | 91 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 91 | 91 | 91 | | 91 | | 91 | | 91 | | 91 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 91 | 91 | 91 | | 91 | | 91 | | 91 | | 91 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 91 | 91 | 91 | | 91 | | 91 | | 91 | | 91 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 91 | 91 | 91 | | 91 | | 91 | | 91 | | 91 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 91 | 91 | 91 | | 91 | | 91 | | 91 | | 91 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 91 | 91 | 91 | | 91 | | 91 | | 91 | | 91 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 91 | 91 | 91 | | 91 | | 91 | | 91 | | 91 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif | Nilai IKM (Indeks) | 90 | 90 | 90 | 1.323.559.325 | 90 | 2.030.776.202 | 90 | 2.085.960.891 | 90 | 2.085.960.891 | 90 | 2.085.960.891 | Kecamatan Payakumbuh Selatan |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Kecamatan Payakumbuh Selatan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 90 | 90 | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 90 | 90 | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 90 | 90 | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Nilai IKM (Indeks) | 90 | 90 | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 90 | 90 | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 90 | 90 | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif | Nilai IKM (Indeks) | 90 | 90 | 90 | 1.276.999.518 | 90 | 2.124.970.949 | 90 | 2.200.000.000 | 90 | 2.200.000.000 | 90 | 2.200.000.000 | Kecamatan Lamposi Tigo Nagori |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Kecamatan Lamposi Tigo Nagori |
| | Nilai IKM (Indeks) | 90 | 90 | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Nilai IKM (Indeks) | 90 | 90 | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 90 | 90 | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 90 | 90 | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 90 | 90 | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Nilai IKM (Indeks) | 90 | 90 | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | 54.940.175 | | 1.009.274.912 | | 1.034.274.912 | | 1.034.274.912 | | 1.034.274.912 | |
| Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan | Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti (%) | 100 | 100 | 100 | 12.515.425 | 100 | 627.207.372 | 100 | 627.207.372 | 100 | 627.207.372 | 100 | 627.207.372 | Kecamatan Payakumbuh Barat |
| Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan | Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti (%) | 100 | 100 | 100 | 24.519.300 | 100 | 220.000.000 | 100 | 220.000.000 | 100 | 220.000.000 | 100 | 220.000.000 | Kecamatan Payakumbuh Timur |
| Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan | Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti (%) | 100 | 100 | 100 | 3.270.000 | 100 | 83.270.000 | 100 | 108.270.000 | 100 | 108.270.000 | 100 | 108.270.000 | Kecamatan Payakumbuh Utara |
| Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan | Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti (%) | 100 | 100 | 100 | 4.619.700 | 100 | 28.797.540 | 100 | 28.797.540 | 100 | 28.797.540 | 100 | 28.797.540 | Kecamatan Payakumbuh Selatan |
| Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan | Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti (%) | 100 | 100 | 100 | 10.015.750 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | Kecamatan Lamposi Tigo Nagori |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | 389.015.350 | | 2.236.047.196 | | 2.375.633.947 | | 2.373.883.947 | | 2.373.133.947 | |
| Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan | Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi (%) | 100 | 100 | 100 | 83.882.200 | 100 | 312.881.950 | 100 | 372.881.950 | 100 | 372.881.950 | 100 | 372.881.950 | Kecamatan Payakumbuh Utara |
| Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan | Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi (%) | 100 | 100 | 100 | 106.963.600 | 100 | 1.164.813.756 | 100 | 1.164.813.756 | 100 | 1.164.813.756 | 100 | 1.164.813.756 | Kecamatan Payakumbuh Barat |
| Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan | Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi (%) | 100 | 100 | 100 | 97.427.250 | 100 | 393.000.000 | 100 | 393.000.000 | 100 | 393.000.000 | 100 | 393.000.000 | Kecamatan Payakumbuh Timur |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan | Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi (%) | 100 | 100 | 100 | 62.517.950 | 100 | 170.351.490 | 100 | 202.217.292 | 100 | 202.217.292 | 100 | 202.217.292 | Kecamatan Payakumbuh Selatan |
| Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan | Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi (%) | 100 | 100 | 100 | 38.224.350 | 100 | 195.000.000 | 100 | 242.720.949 | 100 | 240.970.949 | 100 | 240.220.949 | Kecamatan Lampasi Tigo Nagori |
| 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | 4.045.472.162 | | 7.867.532.239 | | 6.163.712.240 | | 26.352.845.480 | | 5.882.541.531 | |
| 8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | | 1.873.693.299 | | 3.027.631.581 | | 2.755.736.557 | | 2.602.152.322 | | 2.602.152.322 | |
| Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah | Nilai IKM (Indeks) | 92,69 | 93 | 93 | 1.873.693.299 | 94 | 3.027.631.581 | 94 | 2.755.736.557 | 94 | 2.602.152.322 | 95 | 2.602.152.322 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | | | 684.197.225 | | 1.441.133.294 | | 1.183.601.617 | | 790.973.251 | | 1.083.601.617 | |
| Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan | Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase) | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 684.197.225 | 91,00 | 1.441.133.294 | 92,00 | 1.183.601.617 | 93,00 | 790.973.251 | 94,00 | 1.083.601.617 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | | | 881.046.463 | | 1.162.577.839 | | 954.627.388 | | 21.897.600.299 | | 954.627.388 | |
| Meningkatnya etika dan budaya politik | Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai | 100 | 100 | 100 | 881.046.463 | 100 | 1.162.577.839 | 100 | 954.627.388 | 100 | 21.897.600.299 | 100 | 954.627.388 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR OUTCOME | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | Politik (Persentase) | | | | | | | | | | | | | Bangsa Dan Politik |
| 8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | | | | 74.496.325 | | 191.225.463 | | 107.471.755 | | 77.471.755 | | 79.885.281 | |
| Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase) | 92,19 | 93 | 93 | 74.496.325 | 93 | 191.225.463 | 93,5 | 107.471.755 | 93,5 | 77.471.755 | 94 | 79.885.281 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | | | | 103.024.850 | | 1.058.045.582 | | 713.912.248 | | 633.995.623 | | 713.912.248 | |
| Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika; Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 103.024.850 | 100 | 1.058.045.582 | 100 | 713.912.248 | 100 | 633.995.623 | 100 | 713.912.248 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | | | 429.014.000 | | 986.917.480 | | 448.362.675 | | 350.652.230 | | 448.362.675 | |
| Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan | Persentase konflik sosial yang diselesaikan (Persentase) | 100 | 100 | 100 | 429.014.000 | 100 | 986.917.480 | 100 | 448.362.675 | 100 | 350.652.230 | 100 | 448.362.675 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| **TOTAL KESELURUHAN** | | | | | **697.931.851.169** | | **1.433.883.331.236** | | **1.453.484.387.636** | | **1.452.426.931.585** | | **1.451.983.331.236** | |

**Sumber:** Bappeda Kota Payakumbuh, 2025

## C. KESELARASAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

### 1). KESELARASAN PROGRAM PRIORITAS RPJMN DENGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kegiatan Prioritas Utama merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, dan menjadi fokus penekanan pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029. Sebagai langkah konkret mencapai sasaran jangka menengah terutama untuk pencapaian sasaran penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang berkelanjutan. Kegiatan prioritas utama ini disusun dengan memperhatikan kontribusi dari berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta, dan *stakeholders* lainnya. Diidentifikasi beberapa Kegiatan Prioritas Utama dalam RPJMN Tahun 2025–2029, terdapat 83 (delapan puluh tiga) program prioritas utama nasional, yang sesuai dengan arahan kemendagri untuk Kota Payakumbuh terdapat 10 (sepuluh) program yang perlu ditampung dan diselaraskan dengan program daerah.

**Tabel 4.2** Keselarasan Program Prioritas RPJMN dengan Program Kerja RPJMD

| NO. | PROGRAM PRIORITAS RPJMN | RPJMD KOTA PAYAKUMBUH | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM | KEGIATAN | SUB-KEGIATAN | PROJECT/ AKTIVITAS | PERANGKAT DAERAH PENGAMPU | TAHUN | | | | | |
| | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Konservasi Sumber Daya Air | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Sub Kegiatan Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing | Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir di daerah Payakumbuh Timur, Payakumbuh Selatan dan Payakumbuh Utara pada kawasan Rawan Banjir | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | Pemeliharaan Sungai pada 7 (tujuh) Ruas Sungai dalam bentuk pembuangan sedimen dan menjaga lebar sungai | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing dilakukan pada tebing sungai rawan lonsor | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan Kesehatan bergerak dan daerah sulit akses | Program Penunjang Urusan Pemerintah | Kegiatan Peningkatan pelayanan BLUD | Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Adnan WD | Belanja Modal, operasional dalam pemenuhan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Adnan WD yang lengkap berkualitas | Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan | Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan | Sub Kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit | Rehabilitasi dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit | Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| NO. | PROGRAM PRIORITAS RPJMN | RPJMD KOTA PAYAKUMBUH | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM | KEGIATAN | SUB-KEGIATAN | PROJECT/ AKTIVITAS | PERANGKAT DAERAH PENGAMPU | TAHUN | | | | | |
| | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Daerah Kabupaten/ Kota | Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit | Pengembangan Rumah Sakit Sarana dan Prasarana Rumah Sakit | Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan | Belanja Modal Alat Kesehatan dalam pemenuhan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Adnan WD yang lengkap berkualitas | Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik dalam pemenuhan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Adnan WD yang lengkap berkualitas | Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | Bimbingan teknis keahlian/profesi dalam Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP | Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia | Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| NO. | PROGRAM PRIORITAS RPJMN | RPJMD KOTA PAYAKUMBUH | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM | KEGIATAN | SUB-KEGIATAN | PROJECT/ AKTIVITAS | PERANGKAT DAERAH PENGAMPU | TAHUN | | | | | |
| | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | | dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota | Kesehatan Sesuai Standar | | | | | | | | |
| 3 | Pengembangan Hilirisasi Kelapa | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Pelatihan Industri Olahan Kelapa | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh | | | √ | √ | √ | √ |
| 4 | Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga | Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana olahraga | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5 | Pengembangan Pangan Akuatik (*Blue Food*) | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil | Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan | Dinas Pertanian | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan | Pelatihan / Sekolah Lapang Pembudidaya Ikan | Dinas Pertanian | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| NO. | PROGRAM PRIORITAS RPJMN | RPJMD KOTA PAYAKUMBUH | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM | KEGIATAN | SUB-KEGIATAN | PROJECT/ AKTIVITAS | PERANGKAT DAERAH PENGAMPU | TAHUN | | | | | |
| | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | | | Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | |
| 6 | Pengembangan Pangan Hewani | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Higiene sanitasi (Fasilitilasi NKV) | Dinas Pertanian | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | Sub Kegiatan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan | Sosialisasi NKV bagi Pelaku Usaha | Dinas Pertanian | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | Pelatihan Olahan Hasil | Dinas Pertanian | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota | Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | Fasilitasi Pemotongan Hewan di RPH | Dinas Pertanian | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | Fasilitasi Pasar Ternak | Dinas Pertanian | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | Program Pengendalian Izin Usaha Industri | Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota | Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single *Submission Risk Base Approach* (OSS-RBA) | Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi IKM (Termasuk Komoditi Produk Pangan Hewani) | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| NO. | PROGRAM PRIORITAS RPJMN | RPJMD KOTA PAYAKUMBUH | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM | KEGIATAN | SUB-KEGIATAN | PROJECT/ AKTIVITAS | PERANGKAT DAERAH PENGAMPU | TAHUN | | | | | |
| | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat | Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal | Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal Hewani | Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | Lomba Pengolahan Pangan Lokal | Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7 | Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati | Program Pengembangan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota | Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Pengembangan Padi, Jagung, dan Tanaman Hortikultura (Cabe, Bawang, Terung) dengan memberikan Bantuan Benih, Kompos, dan Benih Siap Tanam | Dinas Pertanian | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | Program Pengendalian Izin Usaha Industri | Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota | Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single *Submission Risk Base Approach* (OSS-RBA) | Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi IKM (Termasuk Komoditi Produk Pangan Lokal dan Nabati) | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| NO. | PROGRAM PRIORITAS RPJMN | RPJMD KOTA PAYAKUMBUH | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM | KEGIATAN | SUB-KEGIATAN | PROJECT/ AKTIVITAS | PERANGKAT DAERAH PENGAMPU | TAHUN | | | | | |
| | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat | Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal | Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal Nabati | Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | Lomba Pengolahan Pangan Lokal | Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | | Bantuan Bahan dan Benih Tanaman Lokal | Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat | Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan | Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Pelatihan dan pemberian bantuan pengembangan usaha pangan keluarga | Dinas Ketahanan Pangan | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kab/Kota | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik | Rapat korodinasi persiapan penumbuhan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) | Dinas Ketahanan Pangan | | | √ | √ | √ | √ |
| | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | Penumbuhan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) | Dinas Ketahanan Pangan | | | | √ | √ | √ |

| NO. | PROGRAM PRIORITAS RPJMN | RPJMD KOTA PAYAKUMBUH | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM | KEGIATAN | SUB-KEGIATAN | PROJECT/ AKTIVITAS | PERANGKAT DAERAH PENGAMPU | TAHUN | | | | | |
| | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 8 | Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh | | | √ | | | |
| | | | | Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan | Pembangunan *reservoar* sebagai penampungan air minum untuk kebutuhan domestik atau industri | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh | | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Pembangunan Sambungan Rumah (SR) untuk pelayanan air minum ke masyarakat | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh | | | | √ | | |
| 9 | Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Ikdim Berbasis CWIS | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam daerah Kabupaten/ Kota | Sub Kegiatan Penyediaan Unit pengolahan setempat | Pembangunan Tangki Septik Individu | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10 | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrash yang berkualitas (PHTC) | Program Pengelolaan Pendidikan | Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| NO. | PROGRAM PRIORITAS RPJMN | RPJMD KOTA PAYAKUMBUH | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM | KEGIATAN | SUB-KEGIATAN | PROJECT/ AKTIVITAS | PERANGKAT DAERAH PENGAMPU | TAHUN | | | | | |
| | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | | Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah | Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non-Formal | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan NonFormal | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan NonFormal | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan NonFormal | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

**Sumber:** Bappeda Kota Payakumbuh, 2025

# 2. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan. Target pembangunan daerah Kota Payakumbuh meliputi Taregt Indikator Makro dan target Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 bersifat imperative.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terdiri atas capaian kinerja makro dan capaian kinerja dapat diukur dari beberapa indikator, yakni Indikator Makro, Indikator Utama dan Indikator Kinerja Daerah. Selain indikator tersebut diatas, indikator sasaran visi juga dapat menggambarkan kondisi yang diinginkan dalam 5 tahun ke depan.

## A. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR MAKRO

**Tabel 4.3** Indikator Kinerja Makro Tahun 2024-2030

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | indeks | 80.76 | 81.43 | 81.97 | 82.50 | 83.09 | 83.72 | 84.23 |
| 2 | Tingkat Kemiskinan | % | 5.19 | 4.54 | 4.32 | 4.17 | 3.99 | 3.84 | 3.63 |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 4.87 | 4.75 | 4.64 | 4.52 | 4.43 | 4.33 | 4.26 |
| 4 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 4.53 | 5.02 | 5.79 | 7.12 | 7.36 | 7.65 | 6.22 |
| 5 | PDRB Per-kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) | Rp Juta | 64.21 | 72.02 | 82.14 | 92.57 | 103.84 | 116.29 | 129.51 |
| 6 | PDRB Per-Kapita atas dasar Harga Konstan (ADHK) Perkapita | Rp Juta | 35,64 | 36.96 | 38.62 | 40.87 | 43.37 | 46.16 | 48.49 |
| 7 | Rasio Gini | Indeks | 0.313 | 0.311 | 0.310 | 0.309 | 0.308 | 0.306 | 0.305 |
| 8 | Usia Harapan Hidup | Tahun | 75.08 | 75.31 | 75.57 | 75.83 | 76.10 | 76.36 | 76.62 |
| 9 | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 14.57 | 14.62 | 14.75 | 14.91 | 15.02 | 15.16 | 15.29 |
| 10 | Rata – Rata Lama Sekolah | Tahun | 10.89 | 11.16 | 11.30 | 11.38 | 11.48 | 11.62 | 11.79 |
| 11 | Pengeluaran Perkapita | Rp. Ribu | 20894.84 | 20900 | 20930 | 20950 | 20975 | 20980 | 21000 |
| 12 | Jumlah Penduduk Miskin | Jiwa | 7615 | 6747 | 6500 | 6350 | 6140 | 5978 | 5725 |

**Sumber:** Bappeda Kota Payakumbuh, 2025

## B. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR SASARAN VISI

Visi merupakan satu gambaran kondisi atau keadaan yang diinginkan. Visi merupakan gabungan antara keinginan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi saat ini, sekaligus keinginan yang diharapkan untuk lebih baik di masa depan. Sasaran visi yang ingin dicapai 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut:

**Tabel 4.4** Indikator Sasaran Visi Tahun 2024-2030

| NO | SASARAN VISI | INDIKATOR | BASELINE 2024 | TARGET | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TAHUN 2027 | TAHUN 2028 | TAHUN 2029 | TAHUN 2030 |
| 1 | Peningkatan Pendapatan Per Kapita | 1. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp Juta) | 64,21 | 72.02 | 82.14 | 92.57 | 103.84 | 116.29 | 129.51 |
| | | 2. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%) | 4,82 | 4,95 | 5,06 | 5,17 | 5,31 | 5,43 | 5,55 |
| 2 | Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan | 3. Tingkat Kemiskinan (%) | 5.19 | 4.54 | 4.32 | 4.17 | 3.99 | 3.84 | 3.63 |
| | | 4. Rasio Gini (indeks) | 0.313 | 0.311 | 0.310 | 0.309 | 0.308 | 0.306 | 0.305 |
| | | 5. Pertumbuhan ekonomi (%) | 4.53 | 5.02 | 5.79 | 7.12 | 7.36 | 7.65 | 6.22 |
| 3 | Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 6. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 3.0788 | 3.4000 | 3.4150 | 3.4400 | 3.4630 | 3.4824 | 3.5000 |
| | | 7. Indeks Inovasi Daerah | 54.62 | 54.85 | 55.15 | 55.25 | 55.50 | 55.95 | 56.05 |
| 4 | Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | 8. Indeks Pembangunan Manusia | 80.76 | 81.43 | 81.97 | 82.50 | 83.09 | 83.72 | 84.23 |
| | | 9. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rp/Tenaga Kerja) | 70.58 | 70.80 | 71.50 | 72.02 | 73.03 | 74.03 | 75.00 |
| 5 | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | 10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 58.52 | 68.37 | 68.58 | 68.80 | 69.01 | 69.22 | 69.43 |

**Sumber:** Bappeda Kota Payakumbuh, 2025

## C. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD melalui Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang

terseleksi.

**Tabel 4.5** Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2030

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia | indeks | 80.76 | 81.43 | 81.97 | 82.50 | 83.09 | 83.72 | 84.23 | |
| 2 | Usia Harapan Hidup (tahun) | Tahun | 75.08 | 75.31 | 75.57 | 75.83 | 76.10 | 76.36 | 76.62 | |
| 3 | Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita | % | 16.40 | 13.70 | 12.45 | 11.20 | 9.95 | 8.70 | 7.45 | |
| 4 | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) | % | 8.17 | 5.81 | 5.45 | 5.09 | 4.73 | 4.01 | 3.65 | |
| 5 | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 14.57 | 14.62 | 14.75 | 14.91 | 15.02 | 15.16 | 15.29 | |
| 6 | Tingkat Kemiskinan | % | 5.19 | 4.54 | 4.32 | 4.17 | 3.99 | 3.84 | 3.63 | |
| 7 | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | Indeks | 65.6 | 66.8 | 68.0 | 69.10 | 70.10 | 71.10 | 72.10 | |
| 8 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Indeks | 0.175 | 0.151 | 0.127 | 0.103 | 0.079 | 0.055 | 0.031 | |
| 9 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 4.53 | 5.02 | 5.79 | 7.12 | 7.36 | 7.65 | 6.22 | |
| 10 | Indek Daya Saing Daerah (IDSD) | Indeks | 3.89 | 3.93 | 3.96 | 4.00 | 4.04 | 4.09 | 4.14 | |
| 11 | Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap PDRB Provinsi | % | 2.84 | 2.89 | 2.97 | 3.00 | 3.04 | 3.07 | 3.10 | |
| 12 | PDRB Per-kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) | Rp Juta | 64.21 | 72.02 | 82.14 | 92.57 | 103.84 | 116.29 | 129.51 | |
| 13 | Rasio Gini | Indeks | 0.313 | 0.311 | 0.310 | 0.309 | 0.308 | 0.306 | 0.305 | |
| 14 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 4.87 | 4.75 | 4.64 | 4.52 | 4.43 | 4.33 | 4.26 | |
| 15 | Kontribusi UMKM terhadap PDRB | % | 33.33 | 33.34 | 33.35 | 33.36 | 33.37 | 33.38 | 33.39 | |
| 16 | Nilai Realisasi Investasi | Milyar/Rp | 658.63 | 660 | 665 | 670 | 675 | 680 | 685 | |
| 17 | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) | Indeks | 83.28 | 84.00 | 85.00 | 86.00 | 87.00 | 88.00 | 89.00 | |
| 18 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Indeks | 3.75 | 3.75 | 3.84 | 3.93 | 4.03 | 4.12 | 4.21 | |
| 19 | Indeks Pemerintahan Digital | Indeks | - | - | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | |
| 20 | Indeks Pelayanan Publik | Indeks | 4.50 | 4.51 | 4.52 | 4.53 | 4.54 | 4.55 | 4.56 | |
| 21 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 88.37 | 88.60 | 88.80 | 88.85 | 88.90 | 88.95 | 89.00 | |
| 22 | Nilai Evaluasi AKIP | Nilai | 76.01 | 78.00 | 80.00 | 81.00 | 82.00 | 83.00 | 84.00 | |
| 23 | Opini BPK atas Laporan Keuangan | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | |
| 24 | Rasio PAD terhadap APBD | Rasio | 0.165 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 25 | Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum | % | 28.49 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 26 | IPK berbasis ABS SBK | Indeks | 72.09 | 72.40 | 73.00 | 73.80 | 74.86 | 75.05 | 75.71 | |
| 27 | Karya Budaya yang Ditetapkan | Unit | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 28 | Cakupan Penguatan idiologi Pancasila dan Karakter kebangsaan | % | 57.65 | 58.35 | 58.70 | 58.90 | 59.10 | 59.30 | 60.00 | |
| 29 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Indeks | 58.52 | 68.37 | 68.58 | 68.80 | 69.01 | 69.22 | 69.43 | |
| 30 | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah | % | 15.90 | 19.68 | 23.54 | 27.42 | 30.90 | 34.79 | 38.48 | |
| 31 | Indeks Infrastuktur | % | 63.19 | 64.09 | 64.62 | 65.76 | 66.91 | 67.51 | 68.13 | |

**Sumber:** Bappeda Kota Payakumbuh, 2025

## D. TARGET PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (IKD)

Penentuan target penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD). IKU dan IKD berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode berikutnya.

**Tabel 4.6** Indikator Kinerja Daerah 2024-2030

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| **I** | **ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI** | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Ketahanan Pangan | Indeks | 89,33 | 89,40 | 89,50 | 89,60 | 89,70 | 89,80 | 89,90 | |
| 2 | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) | % | 8,17 | 5,81 | 5,45 | 5,09 | 4,73 | 4,01 | 3,65 | |
| 3 | Konsumsi Listrik Per Kapita | Kwh/ kapita | 1138 | 1273 | 1407 | 1513 | 1652 | 1749 | 1885 | |
| 4 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Indeks | 58,52 | 68,37 | 68,58 | 68,80 | 69,01 | 69,22 | 69,43 | |
| 5 | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman | % | 19,48 | 20,48 | 22,31 | 24,19 | 25,08 | 26,16 | 30,00 | |
| 6 | Rumah tangga yang memiliki pengolahan air limbah akses aman | % | 21,92 | 22,74 | 23,57 | 24,39 | 25,21 | 27,68 | 30,14 | |
| 7 | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah | % | 15,90 | 19,68 | 23,54 | 27,42 | 30,90 | 34,79 | 38,48 | |
| 8 | Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah | % RT | - | 33,13 | 39,68 | 46,05 | 52,26 | 58,37 | 64,82 | |
| 9 | Indeks Risiko Bencana (IRB) | Indeks | 104,80 | 103,52 | 103,51 | 102,23 | 100,95 | 99,67 | 98,39 | |
| 10 | Laju Pertumbuhan Penduduk | % | 1,37 | 1,35 | 1,38 | 1,40 | 1,41 | 1,42 | 1,43 | |
| 11 | Rasio Penduduk | % | 101,08 | 100,97 | 101,09 | 101,10 | 101,11 | 101,12 | 101,13 | |
| 12 | Kepadatan Penduduk | Org/km² | 1845 | 1848 | 1904 | 1933 | 1961 | 1989 | 2017 | |
| 13 | Jumlah Penduduk | jiwa | 146.700 | 148.597 | 150.450 | 152.270 | 154.050 | 155.830 | 157.573 | |
| **II** | **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 4,53 | 5,02 | 5,79 | 7,12 | 7,36 | 7,65 | 6,22 | |
| 2 | Tingkat Kemiskinan | % | 5,19 | 4,54 | 4,32 | 4,17 | 3,99 | 3,84 | 3,63 | |
| 3 | PDRB Per-kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)) | Rp Juta | 64,21 | 72,02 | 82,14 | 92,57 | 103,84 | 116,29 | 129,51 | |
| 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 4,87 | 4,75 | 4,64 | 4,52 | 4,43 | 4,33 | 4,26 | |
| 5 | Rasio Gini | Indeks | 0,313 | 0,311 | 0,310 | 0,309 | 0,308 | 0,306 | 0,305 | |
| 6 | Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | 80,76 | 81,43 | 81,97 | 82,50 | 83,09 | 83,72 | 84,23 | |
| 7 | Usia Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 75,08 | 75,31 | 75,57 | 75,83 | 76,10 | 76,36 | 76,62 | |
| 8 | Indek Keluarga Sehat | Nilai | 0,35 | 0,38 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | |
| 9 | Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita | % | 16,40 | 13,70 | 12,45 | 11,20 | 9,95 | 8,70 | 7,45 | |
| 10 | Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 10,89 | 11,16 | 11,30 | 11,38 | 11,48 | 11,62 | 11,79 | |
| 11 | Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 14,57 | 14,62 | 14,75 | 14,91 | 15,02 | 15,16 | 15,29 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 12 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Indeks | 72,15 | 72,20 | 72,25 | 72,29 | 72,33 | 72,38 | 72,43 | |
| 13 | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | % | 19,96 | 31,38 | 33,78 | 36,18 | 38,58 | 40,98 | 43,39 | |
| 14 | IPK berbasis ABS SBK | Indeks | 72,09 | 72,40 | 73,00 | 73,80 | 74,86 | 75,05 | 75,71 | |
| 15 | Karya Budaya yang Ditetapkan | Unit | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 16 | Indeks Perlindungan Khusus Anak | Indeks | 81,51 | 82,92 | 83,25 | 83,62 | 83,85 | 84,01 | 84,33 | |
| 17 | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | Indeks | 65,6 | 66,8 | 68,0 | 69,10 | 70,10 | 71,10 | 72,10 | |
| 18 | Indeks Ketimpangan Gender | Indeks | 0,175 | 0,151 | 0,127 | 0,103 | 0,079 | 0,055 | 0,031 | |
| 19 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Nilai | 98,52 | 98,54 | 98,56 | 98,58 | 98,60 | 98,62 | 98,64 | |
| **III** | **ASPEK DAYA SAING DAERAH** | | | | | | | | | |
| 1 | Angka Ketergantungan | % | 46 | 45 | 44 | 43 | 43 | 42 | 41 | |
| 2 | Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB | % | 4,82 | 4,95 | 5,06 | 5,17 | 5,31 | 5,43 | 5,55 | |
| 3 | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum | % | 3,49 | 3,6 | 3,62 | 3,64 | 3,66 | 3,68 | 3,98 | |
| 4 | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi | % | 1,938 | 3,595 | 3,585 | 3,575 | 3,555 | 3,545 | 3,963 | |
| 5 | Rasio Kewirausahaan | % | 7,52 | 9,3 | 9,34 | 9,38 | 9,41 | 9,45 | 9,78 | |
| 6 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | % | 60,51 | 63,89 | 64,00 | 64,20 | 64,60 | 64,90 | 65,21 | |
| 7 | Indeks Inovasi Daerah | Indeks | 54,62 | 54,85 | 55,15 | 55,25 | 55,50 | 55,95 | 56,05 | |
| 8 | Ekspor Barang dan Jasa | (% PDRB) | 19,65 | 19,70 | 19,75 | 19,80 | 19,85 | 19,90 | 20,00 | |
| 9 | Indeks Infrastruktur | % | 63,19 | 64,09 | 64,62 | 65,76 | 66,91 | 67,51 | 68,13 | |
| 10 | Persentase RT yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau | % | 81,04 | 82,73 | 85,37 | 88,01 | 90,65 | 94,93 | 95,93 | |
| 11 | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB | % | 0,25 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | |
| 12 | Tingkat Inflasi | % | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Pembentukan modal tetap bruto | % PDRB | 25,48 | 24,86 | 24,52 | 24,19 | 23,85 | 23,51 | 23,18 | |
| 14 | Total Dana Pihak Ketiga / PDRB | % | 5,98 | 6,00 | 6,95 | 9,65 | 12,35 | 15,05 | 17,75 | |
| 15 | Nilai Transaksi Saham Per kapita | Rupiah | 3.800.000 | 3.891.998 | 4.562.126 | 5.332.255 | 5.332.254.8 | 6.102.383.2 | 7.642.640 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 16 | Total Kredit/PDRB | % | - | 24,40 | 25,73 | 27,07 | 28,40 | 29,74 | 31,08 | |
| 17 | Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan | % | 6,00 | 6,05 | 6,08 | 6,18 | 6,41 | 6,63 | 6,86 | |
| 18 | Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | % | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | |
| **IV** | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | | | | | |
| **I** | **Layanan Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | |
| **1** | **Urusan Pendidikan** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Rata – rata Lama Sekolah | Tahun | 10,89 | 11,16 | 11,30 | 11,38 | 11,48 | 11,62 | 11,79 | |
| 1.2 | Angka Partisipasi Kasar | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | APK PAUD | % | 61,09 | 69,00 | 71,00 | 72 | 73 | 74 | 75 | |
| 1.2.2 | APK SD/MI/Paket A | % | 107,82 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | |
| 1.2.3 | APK SMP/MTs/Paket B | % | 97,12 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1.3 | Angka Partisipasi Murni | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1.3.2 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B | % | 80,44 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | |
| 1.3.3 | Cakupan Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | % | 57,65 | 58,35 | 58,70 | 58,90 | 59,10 | 59,30 | 60,00 | |
| 1.3.4 | Persentase satuan pendidikan (SD/SMP) yang terakreditasi A | % | 76 | 76,24 | 76,5 | 77 | 77,5 | 78 | 78,5 | |
| 1.4 | Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi | % | 87,50 | 87,50 | 87,90 | 88,20 | 88,80 | 89,25 | 89,50 | |
| 1.5 | Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi | % | 84,4 | 84,4 | 85,65 | 86,5 | 87,75 | 89 | 90,25 | |
| 1.6 | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi | % | 21,65 | 21,70 | 21,90 | 22,00 | 22,20 | 22,40 | 22,50 | |
| **2** | **Urusan Kesehatan** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Jumlah Kematian Ibu | Jiwa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 2.2 | Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)) | % | 70,14 | 80,00 | 84,00 | 88,00 | 92,00 | 96,00 | 100,00 | |
| 2.3 | Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate) | % | 88,90 | 94,00 | 94,00 | 95,00 | 95,00 | 96,00 | 96,00 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 2.4 | Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional | % | 98,99 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 2.5 | Indek Keluarga Sehat | Nilai | 0,35 | 0,38 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | |
| 2.6 | Prevalensi Stunting berdasarkan E-PPGBM | % | 2,16 | 2,12 | 2,08 | 2,04 | 2,00 | 1,94 | 1,90 | |
| **3** | **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Kapasitas Air Baku | (m3/detik | 5,21 | 5,21 | 5,46 | 6,60 | 6,61 | 6,62 | 6,62 | |
| 3.2 | Persentase Infrastruktur daerah yang dibangun sesuai dengan rencana tata ruang | % | 79,55 | 79,61 | 80,12 | 80,77 | 81,19 | 81,60 | 81,88 | |
| 3.3 | Indeks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan tata ruang | Indeks | 82,71 | 86,23 | 87,38 | 88,52 | 89,60 | 90,61 | 91,55 | |
| 3.4 | Akses Rumah tangga terhadap sumber air minum jaringan perpipaan | % | 89,97 | 90,41 | 90,61 | 90,81 | 91,52 | 92,23 | 92,94 | |
| **4** | **Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Persentase rumah layak huni | % | 97,41 | 97,61 | 97,80 | 97,99 | 98,19 | 98,38 | 98,57 | |
| 4.2 | Persentase RT yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau | % | 81,04 | 82,73 | 85,37 | 88,01 | 90,65 | 94,93 | 95,93 | |
| 4.3 | Persentase PSU Perumahan yang dibangun pengembang yang telah dikelola oleh Pemerintah Kota | % | 21,84 | 24,71 | 27,59 | 30,46 | 33,33 | 36,21 | 39,08 | |
| **5** | **Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Persentase penegakan Perda | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5.2 | Angka Kriminalitas (per 1000 penduduk) | % | 3,06 | 3,84 | 3,83 | 3,82 | 3,81 | 3,80 | 3,80 | |
| 5.3 | Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum | % | 28,49 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 5.4 | Pesentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **6** | **Penanggulangan Bencana Daerah** | | | | | | | | | |
| 6.1 | Persentase Warga Kota Payakumbuh yang menerima pelayanan penanggulangan bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **7** | **Urusan Sosial** | | | | | | | | | |
| 7.1 | Tingkat Kemiskinan | % | 5,19 | 4,54 | 4,32 | 4,17 | 3,99 | 3,84 | 3,63 | |
| 7.2 | Persentase PPKS yang terlayani | % | 100 | 100 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 7.3 | Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | % | - | - | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
| **II** | **Layanan Urusan Wajib Terkait Non Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | |
| **1** | **Urusan Ketenagakerjaan** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | Juta Rp/ Tenaga Kerja | 70,58 | 70,80 | 71,50 | 72,02 | 73,30 | 74,03 | 75,00 | |
| 1.2 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | % | 70,53 | 71 | 71,02 | 71,04 | 71,06 | 71,08 | 71,1 | |
| 1.3 | Proporsi penciptaan Lapangan Kerja Formal | % | 53,73 | 53,81 | 54,38 | 55,58 | 56,78 | 57,98 | 61,66 | |
| 1.4 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | % | 60,51 | 63,89 | 64,00 | 64,20 | 64,60 | 64,90 | 65,21 | |
| 1.5 | Tingkat Pengangguran terbuka | % | 4,87 | 4,75 | 4,64 | 4,52 | 4,43 | 4,33 | 4,26 | |
| 1.6 | Persentase Penyerapan Tenaga Kerja | % | 95,13 | 95,25 | 95,36 | 95,48 | 95,57 | 95,67 | 95,74 | |
| 1.7 | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi | % | 76,17 | 79,09 | 79,67 | 80,85 | 80,82 | 81,40 | 81,98 | |
| 1.8 | Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | % | 19,96 | 31,38 | 33,78 | 36,18 | 38,58 | 40,98 | 43,39 | |
| 1.9 | Jumlah Penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau Dari Dinas yang menangani bidang ketengakerjaan | Orang | 3 | 5 | 15 | 25 | 35 | 37 | 40 | |
| 1.10 | Jumlah unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan di Tingkat Kab/Kota | Unit layanan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| **2** | **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Indeks | 0,175 | 0,151 | 0,127 | 0,103 | 0,079 | 0,055 | 0,031 | |
| 2.2 | Indeks Perlindungan Khusus Anak | Indeks | 81,51 | 82,92 | 83,25 | 83,62 | 83,85 | 84,01 | 84,33 | |
| 2.3 | Indeks Perlindungan Anak | Indeks | 66,67 | 65,02 | 65,206 | 65,392 | 65,578 | 65,764 | 65,95 | |
| 2.4 | Indeks Pembangunan gender (IPG) | Nilai | 98,52 | 98,54 | 98,56 | 98,58 | 98,60 | 98,62 | 98,64 | |
| 2.5 | Tingkat Kategori Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) | Kategori | Nindya | Utama | Utama | Utama | Utama | Mentor | Mentor | |
| 2.6 | Tingkat Kategori Capaian Kota Layak Anak (KLA) | Kategori | Madya | Madya | Madya | Madya | Madya | Madya | Madya | |
| 2.7 | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | % | 6,69 | 6,72 | 6,84 | 6,86 | 7,25 | 7,50 | 7,75 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 2.8 | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **3** | **Urusan Pangan** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ketersediaan pangan utama | Ton | 19.780 | 19.785 | 19.790 | 19.795 | 19.800 | 19.805 | 19.810 | |
| 3.2 | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) | % | 8,17 | 5,81 | 5,45 | 5,09 | 4,73 | 4,01 | 3,65 | |
| 3.3 | Skor PPH Konsumsi | skor | 87,7 | 87,8 | 87,9 | 88,00 | 88,1 | 88,2 | 88,3 | |
| 3.4 | Tingkat Keamanan Pangan | Level | sedang | tinggi | tinggi | tinggi | tinggi | tinggi | tinggi | |
| 3.5 | Stabilisasi harga | | | | | | | | | |
| | Beras | % | 1,63 | ≤10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤10 | |
| | Cabe | % | 20,69 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | |
| | Bawang | % | 13,40 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | |
| 3.6 | Indek Ketahanan Pangan | indeks | 89,33 | 89,40 | 89,50 | 89,60 | 89,70 | 89,80 | 89,90 | |
| **4** | **Urusan Pertanahan** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Indeks Tertib Administrasi Pertanahan | % | 38,47 | 40,79 | 56,88 | 64,93 | 72,98 | 74,60 | 76,22 | |
| **5** | **Urusan Lingkungan Hidup** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah | % | 15,90 | 19,68 | 23,54 | 27,42 | 30,90 | 34,79 | 38,48 | |
| 5.2 | Persentase RTH | % | 14,87 | 14,90 | 14,91 | 14,93 | 14,95 | 14,97 | 15,00 | |
| 5.3 | Indeks Kualitas Air | Indeks | 45,26 | 66,95 | 67,15 | 67,35 | 67,55 | 67,75 | 67,95 | |
| 5.4 | Indeks Kualitas udara | Indeks | 87,59 | 78,15 | 78,45 | 78,75 | 79,05 | 79,35 | 79,65 | |
| 5.5 | Indeks Kualitas Lahan | Indeks | 27,50 | 52,73 | 52,80 | 52,87 | 52,94 | 53,01 | 53,10 | |
| 5.6 | Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota | % | 96,4 | 96,45 | 96,65 | 96,80 | 97,00 | 97,40 | 97,65 | |
| **6** | **Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | | | | | | | | |
| 6.1 | Nilai IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Nilai | 94,08 | 94,10 | 94,10 | 94,20 | 94,30 | 94,40 | 94,50 | |
| 6.2 | Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk | % | 74,05 | 75 | 78 | 81 | 84 | 88 | 90 | |
| 6.3 | Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil | % | 78 | 80 | 82 | 83 | 85 | 90 | 90 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 6.4 | Persentase peningkatan penggunaan data kependudukan dalam pelayanan publik | % | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | |
| **7** | **Urusan Pemberdayaan Masyarakat** | | | | | | | | | |
| 7.1 | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **8** | **Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | | | | | | | | |
| 8.1 | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | Indeks | 65,6 | 66,8 | 68,0 | 69,10 | 70,10 | 71,10 | 72,10 | |
| 8.2 | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per wanita usia subur (15-49 tahun) | Rata-rata anak per Wanita | 2,32 | 2,30 | 2,29 | 2,28 | 2,26 | 2,25 | 2,24 | |
| 8.3 | Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) | Indeks | 76,6 | 81,8 | 85,0 | 86,9 | 88,1 | 88,9 | 89,3 | |
| 8.4 | Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern | % | 84,5 | 86,1 | 87,5 | 88,8 | 89,9 | 91,0 | 91,9 | |
| 8.5 | Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) | % | 16,1 | 15,0 | 14,1 | 13,3 | 12,6 | 11,9 | 11,4 | |
| 8.6 | Angka Kelahiran Rema Umur 15-19 tahun/Age Spesific Fertility Rate (ASFR 15-19) | Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun | 8,5 | 6,7 | 5,5 | 4,6 | 4,0 | 3,5 | 3,2 | |
| 8.7 | Indeks Lansia Berdaya | Indeks | 58,5 | 59,3 | 60,0 | 60,8 | 61,5 | 62,2 | 62,8 | |
| 8.8 | Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja | Indeks | 88,6 | 89,6 | 90,4 | 91,3 | 92,0 | 92,7 | 93,3 | |
| 8.9 | Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **9** | **Perhubungan** | | | | | | | | | |
| 9.1 | Nilai survey IKM Pelayanan transportasi | angka | 87 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | |
| 9.2 | Persentase ketersediaan Infrastruktur Perhubungan yang ramah Lingkungan | % | 84 | 86 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
| **10** | **Urusan Komunikasi dan Informatika** | | | | | | | | | |
| 10.1 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Indeks | 3,75 | 3,75 | 3,84 | 3,93 | 4,03 | 4,12 | 4,21 | |
| 10.2 | Indeks Masyarakat Digital Indonesia | Indeks | 44,39 | 52 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | |
| 10.3 | Nilai Keterbukaan Informasi Publik | Nilai | 76,4 | 76,5 | 78 | 80 | 84 | 87 | 90 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 10.4 | Indeks Pemerintahan Digital | Indeks | - | - | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | |
| **11** | **Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah** | | | | | | | | | |
| 11.1 | Kontribusi UMKM terhadap PDRB | % | 33,33 | 33,34 | 33,35 | 33,36 | 33,37 | 33,38 | 33,39 | |
| 11.2 | Proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian | % | 1,88 | 4,69 | 4,71 | 4,73 | 4,75 | 4,77 | 13,636 | |
| 11.3 | Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB | % | 1,59 | 2,365 | 2,407 | 2,449 | 2,491 | 2,533 | 2,820 | |
| 11.4 | Rasio Kewirausahaan | % | 7,52 | 9,3 | 9,34 | 9,38 | 9,41 | 9,45 | 9,78 | |
| **12** | **Urusan Penanaman Modal** | | | | | | | | | |
| 12.1 | Nilai Realisasi Investasi | Milyar/Rupiah | 658,63 | 660 | 665 | 670 | 675 | 680 | 685 | |
| **13** | **Urusan Kepemudaan dan Olahraga** | | | | | | | | | |
| 13.1 | Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional | Org | 51 | 51 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 13.2 | Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas | % | 0 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| **14** | **Urusan Statistik** | | | | | | | | | |
| 14.1 | Indeks Pembangunan Statistik | Nilai | 2,69 | 2,70 | 2,71 | 2,72 | 2,73 | 2,74 | 2,75 | |
| **15** | **Urusan Persandian** | | | | | | | | | |
| 15.1 | Indeks Keamanan Informasi | % | 46,2 | 46,2 | 50 | 53 | 58 | 60 | 62,5 | |
| **16** | **Urusan Kebudayaan** | | | | | | | | | |
| 16.1 | Karya Budaya yang Ditetapkan | unit | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 16.2 | Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 16.3 | Persentase lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai nilai budaya | % | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 16.4 | Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan | unit | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| **17** | **Urusan Perpustakaan** | | | | | | | | | |
| 17.1 | Indeks pembangunan literasi masyarakat | Indeks | 72,15 | 72,20 | 72,25 | 72,29 | 72,33 | 72,38 | 72,43 | |
| 17.2 | Rasio Kunjungan Perpustakaan Perkapita | Rasio | 0,066 | 0,0664 | 0,067 | 0,068 | 0,069 | 0,07 | 0,071 | |
| **18** | **Urusan Kearsipan** | | | | | | | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 18.1 | Indek Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkup Pemerintahan Daerah | Indeks | 73,81 | 73,9 | 73,94 | 73,99 | 74,08 | 74,09 | 74,15 | |
| 18.2 | Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan sistem kearsipan sesuai standar | % | 32,25 | 35,5 | 41,25 | 45,55 | 51,2 | 54,75 | 59,4 | |
| **II** | **Layanan Urusan Pilihan** | | | | | | | | | |
| **1** | **Urusan Kelautan dan Perikanan** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya) | Ton | 576,81 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | |
| **2** | **Urusan Pariwisata** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Jumlah Tamu wisatawan mancanegara | ribu orang | 0,014 | 0,02 | 0,025 | 0,03 | 0,035 | 0,04 | 2,3 | |
| 2.2 | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara | orang | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2.3 | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual | % | 10 | 15 | 21 | 30 | 42 | 57 | 75 | |
| 2.4 | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi | % | 1,938 | 3,595 | 3,585 | 3,575 | 3,555 | 3,545 | 3,963 | |
| 2.5 | Persentase Peningkatan Kunjungan wisatawan | % | 4,14 | 5,00 | 5,20 | 5,25 | 5,30 | 5,35 | 5,40 | |
| 2.6 | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum | % | 3,49 | 3,6 | 3,62 | 3,64 | 3,66 | 3,68 | 3,98 | |
| **3** | **Urusan Pertanian** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan (ADHB) | % | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | |
| 3.2 | Produksi padi | Ton | 41609,46 | 41250 | 39604 | 39896 | 39992 | 40479 | 40770 | |
| 3.3 | Populasi sapi | Ekor | 2951 | 3119 | 3154 | 3189 | 3259 | 3294 | 3329 | |
| 3.4 | Indeks Pertanaman | Indeks | 2,66 | 2,64 | 2,69 | 2,74 | 2,79 | 2,83 | 2,86 | |
| 3.5 | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | Juta/Org | 30,97 | 35,27 | 35,52 | 35,68 | 35,83 | 35,98 | 36,03 | |
| **4** | **Urusan Perdagangan** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | % | 25,02 | 25,02 | 25,03 | 25,04 | 25,05 | 25,06 | 25,07 | |
| 4.2 | Ekspor Barang dan Jasa | % PDRB | 19,65 | 19,70 | 19,75 | 19,80 | 19,85 | 19,90 | 20,00 | |
| 4.3 | Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan | % | 4,30 | 4,31 | 4,32 | 4,33 | 4,34 | 4,35 | 4,36 | |
| **5** | **Urusan Perindustrian** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Persentase peningkatan nilai produksi | % | 5,99 | 6 | 6,1 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 5.2 | Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB | % | 4,82 | 4,95 | 5,06 | 5,17 | 5,31 | 5,43 | 5,55 | |
| 5.3 | Proporsi jumlah IKM | % | 1,85 | 3,43 | 3,51 | 3,59 | 3,66 | 3,74 | 3,82 | |
| **III** | **Fungsi Pendukung** | | | | | | | | | |
| **1** | **Kesekretariatan Daerah** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Indeks Pelayanan Publik | Indeks | 4,50 | 4,51 | 4,52 | 4,53 | 4,54 | 4,55 | 4,56 | |
| 1.2 | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 83,28 | 84,00 | 85,00 | 86,00 | 87,00 | 88,00 | 89,00 | |
| 1.3 | Indeks Reformasi Hukum | Nilai | 87,00 | 87,20 | 87,40 | 87,60 | 87,80 | 87,90 | 88,00 | |
| 1.4 | Indeks BerAKHLAK | Nilai | 72,94 | 73,00 | 73,50 | 74,00 | 74,50 | 75,00 | 75,50 | |
| 1.5 | Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) | Indeks | 5,23 | 5,26 | 5,27 | 5,28 | 5,29 | 5,31 | 5,31 | |
| 1.6 | Indeks Kualitas Kebijakan | Indeks | 50,49 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
| 1.7 | Indeks Zakat Nasional | Indeks | 0,32 | 0,39 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | |
| 1.8 | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Nilai | 3,0788 | 3,4000 | 3,4150 | 3,4400 | 3,4630 | 3,4824 | 3,5000 | |
| 1.9 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 88,37 | 88,60 | 88,80 | 88,85 | 88,90 | 88,95 | 89,00 | |
| 1.10 | Nilai Evaluasi AKIP | Nilai | 76,01 | 78,00 | 80,00 | 81,00 | 82,00 | 83,00 | 84,00 | |
| 1.11 | Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1.13 | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa | Indeks | 91,58 | 91,58 | 91,58 | 91,58 | 91,58 | 91,58 | 91,58 | |
| 1.14 | Indeks Kematangan Organisasi | Indeks | 39,09 | 39,09 | 40,03 | 40,05 | 40,07 | 40,09 | 41,01 | |
| 1.15 | ROA BUMD | % | 6,17 | 6,18 | 6,19 | 6,20 | 6,20 | 6,21 | 6,22 | |
| **2** | **Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Nilai IKM DPRD | Nilai | 84,26 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | |
| 2.2 | Persentase Ranperda Yang Ditetapkan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **IV** | **Fungsi Penunjang** | | | | | | | | | |
| **1** | **Perencanaan** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah | Angka | - | 90,00 | 90,50 | 91,00 | 91,50 | 92,00 | 92,50 | |
| 1.2 | Nilai Evaluasi AKIP Komponen Perencanaan Kinerja | Nilai | 25,50 | 26,00 | 26,01 | 26,02 | 26,03 | 26,04 | 26,05 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| **2** | **Keuangan** | | | | | | | | | |
| 2.1 | IPKD | scor | 71,75 | 72 | 72,75 | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 | |
| 2.2 | Opini BPK atas Laporan Keuangan | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | |
| 2.3 | Persentase belanja pegawai terhadap belanja daerah diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD | % | 40,76 | 46,55 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 2.4 | Persentase penurunan SILPA | % | 11,49 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | |
| 2.5 | Persentase laporan keuangan tepat waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2.6 | Persentase penambahan nilai aset tetap | % | 0,30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2.7 | Persentase penerimaan PAD terhadap total penerimaan pendapatan | % | 18,19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | |
| 2.8 | Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **3** | **Kepegawaian** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN | Indeks | 75,60 | 75,70 | 75,80 | 75,90 | 76,00 | 76,10 | 76,20 | |
| 3.2 | Indeks Profesionalitas ASN | Indeks | 78,22 | 79 | 80 | 80,50 | 81,00 | 81,50 | 82,00 | |
| **4** | **Pendidikan dan Pelatihan** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi | Indeks | 26,58 | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 30,00 | 31,00 | 32,00 | |
| **5** | **Penelitian dan Pengembangan** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Indeks Inovasi Daerah | Indeks | 54,62 | 54,85 | 55,15 | 55,25 | 55,50 | 55,95 | 56,05 | |
| 5.2 | Persentase kebijakan berbasis bukti | % | - | 86 | 87 | 88 | 90 | 92 | 93 | |
| **6** | **Inspektorat** | | | | | | | | | |
| 6.1 | Persentase Pemenuhan Indikator MSCP | % | - | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | |
| 6.2 | Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) | Level | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 6.3 | Survey penilaian integritas (SPI) KPK | Nilai | 75,51 | 78,50 | 78,88 | 79,18 | 79,48 | 79,78 | 80,00 | |
| 6.4 | Nilai Evaluasi Akuntabel Kinerja Internal | Nilai | | 18,20 | 18,22 | 18,25 | 18,27 | 18,30 | 18,32 | |
| **7** | **Kewilayahan** | | | | | | | | | |
| 7.1 | Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif (LPM, PKK, RT/RW, Posyandu, karang taruna) yg aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 7.2 | Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **8** | **Kesatuan Bangsa dan Politik** | | | | | | | | | |
| 8.1 | Persentase Partai Politik dan Organisasi Masyarakat yang Aktif | % | 91,78 | 91,95 | 92,58 | 93,21 | 93,84 | 94,47 | 95,10 | |
| 8.2 | Persentase penanganan konflik sosial yg terjadi di tengah masyarakat | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 8.3 | Indeks Harmoni Indonesia | indeks | 0 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
| | | | | | | | | | | |

**Sumber:** Bappeda Kota Payakumbuh, 2025

## E. TARGET PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

**Tabel 4.7** Indikator Kinerja Kunci 2024-2030

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| **I** | **Layanan Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | |
| **1** | **Pendidikan** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | % | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,30 | 98,90 | 99,00 | 99,30 | |
| 1.2 | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1.3 | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1.4 | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | % | 74,55 | 74,55 | 75,55 | 76,55 | 77,55 | 78,55 | 79,55 | |
| **2** | **Kesehatan** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Rasio Daya tampung Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk | % | 0,24 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 2.2 | Persentase RS Rujukan Tingkat Kab/Kota yang terakreditasi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2.3 | Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2.4 | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2.5 | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2.6 | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | % | 76,15 | 86 | 90 | 92 | 94 | 96 | 100 | |
| 2.7 | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2.8 | Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2.9 | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2.10 | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2.11 | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2.12 | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2.13 | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2.14 | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **3** | **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | % | 94,50 | 75,29 | 75,33 | 75,48 | 75,55 | 75,70 | 75,99 | |
| 3.2 | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota | % | 89,97 | 90,41 | 90,61 | 90,81 | 91,52 | 92,23 | 92,94 | |
| 3.3 | Rasio kepatuhan IMB kab/kota | % | 34,79 | 35,24 | 35,68 | 36,11 | 36,54 | 36,96 | 37,38 | |
| 3.4 | Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota | % | 85,82 | 82,00 | 82,80 | 83,60 | 84,40 | 85,20 | 86,00 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 3.5 | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | % | 0,64 | 0,73 | 0,78 | 0,82 | 0,87 | 0,92 | 0,95 | |
| 3.6 | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | % | 100 | 87,00 | 88,00 | 88,00 | 89,00 | 89,00 | 90,00 | |
| **4** | **Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban bencana Kabupaten/Kota | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4.2 | Persentase Kawasan pemukiman Kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani. | % | - | - | - | - | 30 | 60 | 100 | |
| 4.3 | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni | % | 2,58 | 2,38 | 2,19 | 2,05 | 1,81 | 1,62 | 1,43 | |
| 4.4 | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | % | 15,90 | 15,98 | 16,06 | 16,14 | 16,23 | 16,31 | 16,39 | |
| **5** | **Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Persentase penyelesaian gangguanTrantibum | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5.2 | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5.3 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5.4 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5.5 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5.6 | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5.7 | Waktu tanggap (response time) pananganan kebakaran | mnt | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| **6** | **Urusan Sosial** | | | | | | | | | |
| 6.1 | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 6.2 | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten / Kota | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **II** | **Layanan Urusan Wajib Terkait Non Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| **1** | **Urusan Ketenagakerjaan** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1.2 | Persentase Tenaga Kerja Bersetifikat Kompetensi | % | 47,90 | 3,87 | 3,87 | 3,88 | 3,88 | 3,89 | 3,90 | |
| 1.3 | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | Juta Rp/Tenaga Kerja | 70,58 | 70,80 | 71,50 | 72,02 | 73,30 | 74,03 | 75,00 | |
| 1.4 | Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) | % | 49,21 | 50,00 | 50,79 | 51,59 | 52,38 | 53,17 | 53,97 | |
| 1.5 | Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota | % | 16,33 | 16,53 | 16,73 | 16,93 | 17,13 | 17,33 | 17,53 | |
| **2** | **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | % | 12,22 | 3,82 | 4,09 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | |
| 2.2 | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2.3 | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | % | 0,02 | 0,019 | 0,016 | 0,014 | 0,012 | 0,011 | 0,011 | |
| **3** | **Urusan Pangan** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Pesentase Cadangan Pangan | % | 145,66 | 145,66 | 145,66 | 145,66 | 145,66 | 145,66 | 145,66 | |
| **4** | **Urusan Pertanahan** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4.2 | Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4.3 | Tersedianya pembangunan lokasi dalam rangka penanaman modal | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4.4 | Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **5** | **Urusan Lingkungan Hidup** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten/Kota | Indeks | 58,52 | 68,37 | 68,58 | 68,80 | 69,01 | 69,22 | 69,43 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 5.2 | Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota | % | 97,00 | 98,00 | 98,50 | 98,70 | 98,80 | 99,00 | 100 | |
| 5.3 | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota | % | 74,00 | 75,00 | 76,00 | 77,00 | 78,00 | 79,00 | 80,00 | |
| **6** | **Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | | | | | | | | |
| 6.1 | Perekaman KTP elektronik | % | 99,54 | 99,55 | 99,56 | 99,57 | 99,58 | 99,59 | 99,60 | |
| 6.2 | Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | % | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | |
| 6.3 | Kepemilikan Akta Kelahiran | % | 99,11 | 99,15 | 99,20 | 99,25 | 99,30 | 99,35 | 99,40 | |
| 6.4 | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **7** | **Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | | | | | | | | |
| 7.1 | TFR (Angka Kelahiran Total) | % | 2,32 | 2,30 | 2,29 | 2,28 | 2,26 | 2,25 | 2,24 | |
| 7.2 | Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | % | 63,5 | 63,7 | 63,8 | 63,9 | 64,0 | 64,10 | 64,15 | |
| 7.3 | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | % | 11,40 | 11,30 | 11,20 | 11,15 | 11,10 | 11,05 | 11,00 | |
| **8** | **Perhubungan** | | | | | | | | | |
| 8.1 | Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota | % | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | |
| 8.2 | Kinerja Lalu Lintas Kabupaten Kota | % | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | |
| **9** | **Urusan Komunikasi dan Informatika** | | | | | | | | | |
| 9.1 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 9.2 | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | % | 93,43 | 93,43 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | |
| 9.3 | Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | % | 100 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
| **10** | **Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah** | | | | | | | | | |
| 10,1 | Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas | % | 36,36 | 25,66 | 30,09 | 34,51 | 38,94 | 43,36 | 47,79 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 10.2 | Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha | % | 62,74 | 63,10 | 65,20 | 67,25 | 68,30 | 69,25 | 70,30 | |
| **11** | **Urusan Penanaman Modal** | | | | | | | | | |
| 11.1 | Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota | % | 33,37 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | |
| **12** | **Urusan Kepemudaan dan Olahraga** | | | | | | | | | |
| 12.1 | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | % | 17,08 | 17,35 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,80 | 18 | |
| 12.2 | peningkatan prestasi olahraga | % | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
| 12.3 | Tingkat partisipasi pemuda dalam dalam kegiatan ekonomi mandiri | % | 0,6 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | |
| **13** | **Urusan Statistik** | | | | | | | | | |
| 13.1 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 13.2 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **14** | **Persandian** | | | | | | | | | |
| 14.1 | Tingkat keamanan informasi pemerintah | % | 85 | 46,2 | 50 | 53 | 58 | 60 | 62,5 | |
| **15** | **Urusan Kebudayaan** | | | | | | | | | |
| 15.1 | Terlestarikannya cagar Budaya | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **16** | **Urusan Perpustakaan** | | | | | | | | | |
| 16.1 | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | Nilai | 66,18 | 66,20 | 66,30 | 66,40 | 66,80 | 67,20 | 67,50 | |
| 16.2 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Indeks | 72,15 | 72,20 | 72,25 | 72,29 | 72,33 | 72,38 | 72,43 | |
| **17** | **Urusan Kearsipan** | | | | | | | | | |
| 17.1 | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan) | % | 70,04 | 70,15 | 70,30 | 70,50 | 70,75 | 71,05 | 71,30 | |
| 17.2 | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | % | - | - | - | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| **III** | **Layanan Urusan Pilihan** | | | | | | | | | |
| **1** | **Urusan Kelautan dan Perikanan** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya) | Ton | 576,81 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | |
| **2** | **Urusan Pariwisata** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku | % | 23,81 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| 2.2 | Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota | % | 4,14 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | |
| 2.3 | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan | % | 78,91 | 80,00 | 80,25 | 80,50 | 80,75 | 81 | 81,25 | |
| 2.4 | Tingkat hunian akomodasi | % | 22,82 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 25 | |
| 2.5 | Kontribusi sektor parawisata terhadap PAD | % | 0,56 | 0,80 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
| **3** | **Urusan Pertanian** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | % | 5,60 | 5,60 | 5,61 | 5,62 | 5,63 | 5,64 | 5,65 | |
| 3.2 | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | % | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| **4** | **Urusan Perdagangan** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) | % | 51,72 | 57,47 | 63,22 | 68,97 | 74,71 | 80 | 86 | |
| 4.2 | Persentase kinerja realisasi pupuk | % | 55,82 | 55,85 | 55,90 | 55,95 | 56,00 | 56,05 | 56,10 | |
| 4.3 | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan erlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | % | 50,48 | 51,00 | 52,00 | 53,00 | 54,00 | 55,00 | 60,00 | |
| **5** | **Urusan Perindustrian** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota | % | 1,87 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | |
| 5.2 | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK | % | 67,67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | |
| 5.3 | Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait | % | 12,99 | 13,5 | 13,7 | 13,9 | 14,5 | 15 | 15,5 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 5.4 | Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait | % | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| 5.5 | Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat Dan Terkini | % | 0 | 60,00 | 61,67 | 66,67 | 71,67 | 72,33 | 73,33 | |
| | **Fungsi Pendukung** | | | | | | | | | |
| **1** | **Kesekretariatan Daerah** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif | % | 89,24 | 89,30 | 89,40 | 89,50 | 89,60 | 89,70 | 89,80 | |
| 1.2 | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan | % | 17,31 | 17,35 | 17,40 | 17,45 | 17,50 | 17,55 | 17,60 | |
| 1.3 | Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah | % | -7,08 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | **Fungsi Penunjang** | | | | | | | | | |
| **1** | **Keuangan** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan | % | 28,23 | 31,58 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 1.2 | Rasio PAD (thdp PAD non migas) | % | 18,40 | 12,50 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 1.3 | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) | % | 85,87 | 82,92 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 1.4 | Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | % | 7,36 | -9,30 | -9,00 | -9,00 | -9,00 | -9,00 | -9,00 | |
| 1.5 | Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD | % | 6,51 | 669,76 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 1.6 | Manajemen Aset | Kategori | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | |
| 1.7 | Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya | % | 11,49 | 10,63 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| **2** | **Kepegawaian** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | % | 81,02 | 81,05 | 81,10 | 81,15 | 81,20 | 81,25 | 81,30 | |
| 2.2 | Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | % | 29,29 | 29,35 | 29,40 | 29,45 | 29,50 | 30,00 | 30,25 | |
| 2.3 | Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | % | 27,39 | 27,50 | 27,55 | 27,60 | 27,65 | 27,70 | 27,75 | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| **3** | **Inspektorat** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Level | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 3.2 | Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) | level | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |

**Sumber:** Bappeda Kota Payakumbuh, 2025

# BAB V
# PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen hukum yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan daerah Kota Payakumbuh selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang terhitung dari pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh. Dokumen ini memuat berbagai program dan isu strategis yang akan dijalankan selama 5 (lima) tahun, disertai dengan metode pencapaian dan strategi pelaksanaannya untuk memenuhi sasaran dengan terpadu dan searah dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Payakumbuh. Untuk menjamin pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, maka diperlukan penjabaran secara teknis dalam Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Sedangkan untuk penjabaran tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan teknisnya pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) secara sinergi dan berkesinambungan.

## 1. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

Pengendalian dan evaluasi merupakan tahapan krusial dalam proses pembangunan daerah. Pengendalian berfungsi sebagai instrumen pengawasan untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana serta target yang telah ditetapkan. Sementara itu, evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana program atau kegiatan yang telah dilaksanakan mencapai keberhasilan atau mengalami hambatan, sehingga hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di masa mendatang.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakan oleh Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) sebagai perangkat daerah yang mengampu urusan perencanaan pembangunan daerah. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa seluruh proses pembangunan berjalan sesuai dengan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Dalam kapasitasnya, Bappeda berperan sebagai koordinator lintas perangkat daerah untuk menjamin keselarasan antara perencanaan strategis dengan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Mempedomani Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan daerah. Disebutkan juga bahwa pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara efisien dan efektif.

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah juga bertujuan untuk mewujudkan konsistensi untuk kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional, konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah, konsistensi antara RKPD dan RPJMD dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Pada aspek pengendalian, Bappeda bertugas memastikan bahwa pelaksanaan program/kegiatan oleh Perangkat daerah sesuai dengan target dan arah kebijakan yang telah dirumuska. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan rutin terhadap capaian target kinerja secara triwulanan, semesteran, maupun tahunan, serta melalui analisis realisasi fisik dan keuangan. Bappeda juga berperan dalam memberikan peringatan dini apabila ditemukan deviasi atau penyimpangan dari rencana awal, serta mengarahkan kebijakan agar tetap fokus pada prioritas pembangunan daerah.

Pada fungsi evaluasi, Bappeda menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan RPJMD berdasarkan indikator kinerja daerah, baik Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD). Evaluasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul selama pelaksanaan. Selain itu, evaluasi juga menjadi acuan untuk penyesuaian kebijakan atau perubahan RPJMD, Perubahan RPJMD tidak hanya didasarkan atas hasil evaluasi namun dapat dilakukan perubahan apabila ada perubahan signifikan yang disebabkan bencana atau kebijakan nasional baru.

## 2. MANAJEMEN RISIKO PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran pembangunan dicapai melalui berbagai program/kegiatan prioritas yang dijalankan oleh lintas instansi dan antar jenjang pemerintahan. Kompleksitas pelaksanaan program/kegiatan prioritas diiringi dengan ketidakpastian dan konektivitas global yang semakin tinggi akan berdampak pada meningkatnya intensitas risiko yang dihadapi. Mengingat pelaksanaan program/kegiatan prioritas selalu bersifat lintas instansi dan kewenangan, maka risiko program/kegiatan prioritas sudah seharusnya dikelola dan dikendalikan secara kolaboratif, sistematis, dan terintegrasi.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam mengelola risiko pembangunan nasional secara kolaboratif untuk mengarahkan dan mengendalikan kementerian/lembaga/daerah/badan usaha/badan lainnya sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional. Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional diwujudkan melalui pembentukan Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional dan

penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah menegaskan bahwa Sistem Pengelolaan Risiko merupakan upaya untuk membangun budaya risiko yang bertujuan untuk peningkatan kualitas dan untuk memperkuat serta menunjang efektifitas penyelenggaraan pengendalian intern pemerintah daerah.

Pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan strategis pemerintah daerah, tujuan strategis perangkat daerah dan tujuan yang melekat pada pelaksanaan kegiatannya. Tidak hanya mempersiapkan ketidakberhasilan pencapaian target, pengelolaan risiko juga diperuntukkan untuk pencegahan kecurangan dalam penyelenggaraan pembangunan. Pengelolaan risiko ini dilaksanakan melalui:

1. Pengembangan budaya sadar risiko;
2. Pembentukan struktur pengelolaan risiko;
3. Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko; dan
4. Pengendalian risiko kecurangan.

Guna mendukung pengelolaan risiko pemerintah daerah, maka Wali Kota membentuk komite pengelolaan risiko yang bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah. Proses pengelolaan risiko ini nantinya dikenal dengan Unit Pemilik Risiko (UPR) yang berjenjang dari UPR tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon II, Eselon III sampai dengan Eselon IV. Pengelolaan Risiko dalam prosesnya merupakan sesuatu yang strategis yang melekat pada proses perencanaan pembangunan daerah. Karena itu untuk Perencanaan Pembangunan daerah Strategis 5 tahunan, pada dokumen RPJMD disusun daftar risiko strategis di tingkat tujuan strategis yang nantinya akan didukung dengan dokumen arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 (lima) tahunan.

## 3. TATA KELOLA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Tata Kelola Satu Data Indonesia (SDI) tingkat daerah merupakan upaya strategis untuk mewujudkan data yang terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pemerintah maupun masyarakat. Di tingkat daerah, Satu Data Indonesia menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan berbasis data, perencanaan pembangunan, serta pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Pemerintah daerah melalui perangkat daerah dan walidata, memiliki tanggung jawab penting dalam menyelenggarakan pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data yang sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.

Secara hukum, implementasi Satu Data Indonesia diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Perpres ini menetapkan bahwa setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, wajib menghasilkan dan menyampaikan data sesuai dengan prinsip satu data, yakni: standar data, metadata, interoperabilitas

data, dan menggunakan kode referensi serta data induk yang terstandar. Dijelaskan juga bahwa penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah terdiri atas penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat provinsi dan penyelenggaraan satu data tingkat kabupaten/ kota, Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah dilaksanakan oleh Pembina Data tingkat daerah, walidata tingkat daerah, walidata pendukung dan produsen data tingkat daerah dan Pembina Data tingkat daerah, walidata tingkat daerah, dan walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah serta Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.

Pembina Data bertugas memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan, pengumpulan data dan melakukan pembinaan penyelenggaran SDI di Kota Payakumbuh diampu oleh Badan Pusat Statistik (BPS), walidata bertugas memeriksa kesesuaian data dari produsen data, menyebarluaskan data dan metadata di portal SDI, dan membantu pembina data tingkat daerah dalam membina produsen data tingkat daerah (Dinas Komunikasi dan Informatika). Walidata Pendukung bertugas membantu walidata yang berada di Perangkat Daerah (Produsen Data) serta merupakan salah satu unit kerja yang mengkordinir data Perangkat Daerah (melekat pada subbag program dan perencanaan Perangkat Daerah) dan Produsen data bertugas untuk memberikan masukan kepada pembina data, menghasilkan data sesuai Prinsip SDI, menyampaikan data dan metadata kepada walidata tingkat Daerah (Perangkat Daerah /bidang-bidang di Perangkat Daerah).

Regulasi pendukung lainnya di samping Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, adalah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang mengamanatkan pemanfaatan data dan informasi secara sistematis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. SIPD menjadi salah satu *platform* penguatan integrasi data antar sektor dan lintas perangkat daerah. Pemerintah daerah juga perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah atau Surat Keputusan sebagai payung hukum teknis untuk membentuk Forum Satu Data Daerah, menetapkan Walidata, dan menyusun rencana aksi implementasi SDI. Melalui tata kelola yang baik, Satu Data Indonesia di tingkat daerah mendorong terciptanya ekosistem data yang mendukung keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, serta mempercepat transformasi digital pemerintahan. Oleh karena itu, komitmen kepala daerah, kesiapan kelembagaan, SDM, serta infrastruktur data sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan SDI secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Badan perencanaan pembangunan daerah membentuk Forum Data Indonesia Tingkat Kota Payakumbuh yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kota Payakumbuh. Dimana Bappeda sebagai Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat kota Payakumbuh yang bertugas untuk memberikan dukungan dalam bentuk pendampingan dan penerbitan regulasi Satu Data Indonesia tingkat daerah.

Konteks implementasi kebijakan SDI, data prioritas merupakan komponen penting yang harus dikelola secara konsisten, akurat, dan terpadu. Data prioritas adalah jenis data yang dianggap strategis dan krusial untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Dalam peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 144 disebutkan bahwa data dan informasi pembangunan terdiri atas 4 (empat) aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Didalam data prioritas juga dijelaskan tentang indikator kinerja makro, indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah, indikator kinerja kunci dan indikator kinerja program yang digunakan untuk mengevaluasi capaian pembangunan yang termuat dalam dokumen perencanaan.

Pemanfaatan sistem pengendalian yang terstruktur dan evaluasi yang berbasis kinerja membuat Pemerintah Kota Payakumbuh dapat secara berkala menilai konsistensi, efektivitas, serta efisiensi pelaksanaan pembangunan. Hasil evaluasi yang komprehensif menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan perencanaan tahunan dan perbaikan pelaksanaan di tahun-tahun berikutnya, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kepada masyarakat.

Pengendalian dan evaluasi juga menjadi refleksi terhadap komitmen Pemerintah Kota Payakumbuh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil. Melalui proses ini, arah pembangunan daerah diharapkan dapat senantiasa adaptif terhadap dinamika dan tantangan yang berkembang, sehingga visi pembangunan Kota Payakumbuh yang maju, sejahtera, dan berdaya saing dapat dicapai secara berkelanjutan.

Pencapaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan membutuhkan peran aktif seluruh stakeholder dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Keberhasilan Kota Payakumbuh dalam membangun kota dan masyarakatnya akan tercermin pada SDM masyarakat yang berkualitas, iklim ekonomi kota yang kompetitif, tata kelola pemerintahan yang profesional, nuansa hidup yang beriman dan berbudaya yang terwujudkan dan sarana perkotaan yang humanis dan berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Payakumbuh sebagai bagian dari proses pencapaian visi daerah untuk "Payakumbuh Maju Bermartabat Melalui Pemberdayaan, Pengembangan Kualitas Pendidikan, dan Sentra UMKM yang Kompetitif".

WALI KOTA PAYAKUMBUH

ZULMAETA

# LAMPIRAN

# LAMPIRAN 1
# METADATA
# INDIKATOR KINERJA

# I. METADATA INDIKATOR KINERJA MAKRO

## A. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (INDEKS)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Pembangunan Manusia (Indeks) |
| Definisi | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup |
| Rumus Perhitungan | $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \; x \; I_{pendidikan} \; x \; I_{pengeluaran}} \; x \; 100$<br>Keterangan :<br>$I_{kesehatan}$ =Indeks kesehatan<br>$I_{pendidikan}$ =Indeks pendidikan<br>$I_{pengeluaran}$ =Indeks pengeluaran<br>dimana<br>$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$<br>AHH = Angka Harapan Hidup<br>$I_{pendidikan} = \left[\frac{\frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}} + \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}}{2}\right]$<br>RLS = Rata-rata lama sekolah<br>HLS = Harapan lama sekolah<br>$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(PPP) - \ln(PPP_{min})}{\ln(PPP_{max}) - \ln(PPP_{min})}$<br>PPP = Paritas daya beli |
| Interpretasi | IPM dihitung menggunakan rata-rata ukur (geometrik) dalam melihat capaian pembangunan manusia di suatu wilayah, dimana IPM ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu :<br>a. Kelompok "sangat tinggi" IPM ≥ 80<br>b. Kelompok "tinggi" 70 ≤ IPM < 80<br>c. Kelompok "sedang" 60 ≤ IPM < 70<br>d. Kelompok "rendah" IPM < 60 |
| Sumber Data | Badan Pusat Satistik |
| Frekuensi | Setiap tahun |

## B. TINGKAT KEMISKINAN (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Tingkat Kemiskinan (%) |
| Definisi | Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). |

| | |
|---|---|
| Rumus Perhitungan | $$P_\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{z - y_i}{z}\right]^\alpha$$<br>Keterangan :<br>α = 0<br>z = Garis kemiskinan<br>$y_i$ = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i=1,2,3,...,q), $y_i < z$<br>q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan<br>n = Jumlah penduduk |
| Interpretasi | Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia.<br>Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat |
| Sumber Data | Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) |
| Frekuensi | Maret dan September / tahun |

## C. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) |
| Definisi | **Tingkat pengangguran terbuka** adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. **Angkatan Kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. **Pengangguran** yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/ pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja |
| Rumus Perhitungan | $$TPT = \frac{PP}{PAK} x100\%$$<br>Ket : TPT =Tingkat pengangguran terbuka (%)<br>PP =Jumlah pengangguran (orang)<br>PAK =Jumlah angkatan kerja (orang) |
| Interpretasi | Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan.<br>Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi |

| | |
|---|---|
| | tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) |
| Frekuensi | Dua kali per tahun (Februari dan Agustus) |

## D. PERTUMBUHAN EKONOMI (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) |
| Definisi | Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi barang dan jasa selama periode tertentu. Agar paling akurat, pengukuran tersebut harus menghilangkan pengaruh inflasi |
| Rumus Perhitungan | $$G_t = \frac{(PDRB_t - PDRB_{t-1})}{PDRB_t} x100\%$$ Ket : $G_t$ =Pertumbuhan ekonomi periode t<br>$PDRB_t$ =Produk Domestik Regional Bruto periode t<br>$PDRB_{t-1}$ =Produk Domestik Regional Bruto periode sebelumnya |
| Interpretasi | Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya menjelaskan tentang kemajuan ekonomi, perkembangan ekonomi, kesejahteraan ekonomi serta perubahan fundamental perekonomian suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu |
| Sumber Data | BPS |
| Frekuensi | Tahunan |

## E. PDRB PER KAPITA ADHB (Rp. Juta)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta) |
| Definisi | PDRB per Kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun |
| Rumus Perhitungan | $$\text{PDRB per Kapita} = \frac{\text{PDRB}_{ADHB}}{populasi}$$ Keterangan :<br>$PDRB_{ADHB}$ = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku<br>Populasi = Jumlah penduduk regional<br>t = Periode |
| Interpretasi | Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak |

| | |
|---|---|
| | mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang kesetaraan ekonomi |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Tahunan |

## F. PDRB PER KAPITA ADHK (Rp. Juta)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | PDRB per Kapita ADHK (Rp. Juta) |
| Definisi | PDRB per Kapita ADHK menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar perhitungan yang bertujuan untuk menghilangkan pengaruh inflasi terhadap nilai PDRB. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga konstan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun |
| Rumus Perhitungan | $$\text{PDRB per Kapita} = \frac{\text{PDRB}_{ADHK}}{populasi}$$ Keterangan :<br>$PDRB_{ADHK}$ = PDRB Atas Dasar Harga Konstan<br>Populasi = Jumlah penduduk regional<br>t = Periode |
| Interpretasi | Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk ditambah lagi dengan penetapan harga pada tahun tertentu akan menghilangkan pengaruh inflasi terhadap nilai PDRB. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang kesetaraan ekonomi |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Tahunan |

## G. RASIO GINI (INDEKS)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Rasio Gini (Indeks) |
| Definisi | Rasio Gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva *lorenz* dan aspek matematis |
| Rumus Perhitungan | $$Rasio\ Gini = 1 - \sum_{i=1}^{n} (p_i - p_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$$ dimana :<br>$p_i$ = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i<br>$Y_i$ = Proporsi kumulatif pengeluaran per kapita i |

| | |
|---|---|
| | n = Jumlah observasi |
| Interpretasi | Angka Rasio Gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari Rasio Gini adalah sebagai berikut:<br>A. Nilai Rasio Gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang<br>B. Nilai Rasio Gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang<br>C. Nilai Rasio Gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukkan pemerataan relatif baik.<br>Secara visual, Rasio Gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva *lorenz*, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio Gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (*perfect equality*) dan kurva l*orenz*. Semakin jauh jarak kurva l*orenz* dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) |
| Frekuensi | Maret dan September / tahun |

## H. USIA HARAPAN HIDUP (TAHUN)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Usia Harapan Hidup (tahun) |
| Definisi | Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. |
| Rumus Perhitungan | Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate*/ ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau *Mortpack* |
| Interpretasi | Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. |

| | |
|---|---|
| Sumber Data | Proyeksi dari SUPAS dan SP sebagai proksi/ pendekatan |
| Frekuensi | SP: 10 tahunan<br>SUPAS: 10 tahunan |

## I. HARAPAN LAMA SEKOLAH (TAHUN)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Harapan Lama Sekolah (tahun) |
| Definisi | Perkiraan berapa lama seseorang akan bersekolah dalam satuan tahun, dihitung dari usia tertentu di masa depan |
| Rumus Perhitungan | HLS = Σ (Proporsi Siswa pada Usia x *) * (Lama Waktu Belajar pada Jenjang x) |
| Interpretasi | Peningkatan HLS menunjukkan adanya peningkatan partisipasi sekolah dan potensi peningkatan kualitas pendidikan, karena lebih banyak anak yang memiliki harapan untuk menyelesaikan pendidikan lebih lama |
| Sumber Data | BPS |
| Frekuensi | Tahunan |

## J. RATA-RATA LAMA SEKOLAH (TAHUN)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Rata-rata Lama Sekolah (tahun) |
| Definisi | Jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk, biasanya usia 15 tahun ke atas, untuk menempuh semua jenjang pendidikan formal yang pernah mereka jalani. |
| Rumus Perhitungan | RLS = (Σ xi) / n<br>Dimana:<br>• **RLS**: adalah Rata-rata Lama Sekolah<br>• **Σ xi**: adalah jumlah total tahun pendidikan yang ditempuh oleh semua individu dalam kelompok usia tertentu<br>**n**: adalah jumlah total individu dalam kelompok usia tersebut |
| Interpretasi | Angka ini juga dapat menjadi indikator kualitas pendidikan secara umum. Peningkatan rata-rata lama sekolah dapat menunjukkan bahwa sistem pendidikan berhasil menarik dan mempertahankan siswa hingga jenjang yang lebih tinggi |
| Sumber Data | BPS |
| Frekuensi | Tahunan |

## K. PENGELUARAN PER KAPITA (Rp. RIBU)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu) |
| Definisi | Pendapatan per kapita merupakan indikator yang digunakan secara luas untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara |

| | |
|---|---|
| Rumus Perhitungan | Pendapatan Per Kapita = (Pendapatan Nasional)/(Jumlah Penduduk) |
| Interpretasi | Pendapatan per kapita juga disebut sebagai nilai perbandingan pendapatan rakyat dari besarnya pendapatan nasional dengan jumlah penduduk.<br>Semakin tinggi nilai pendapatan per kapita suatu negara, berarti masyarakat tersebut semakin makmur. Sebaliknya, jika nilai pendapatan per kapita rendah, maka penduduk di negara tersebut masih jauh dari kata sejahtera |
| Sumber Data | BPS |
| Frekuensi | Tahunan |

### L. JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JIWA)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) |
| Definisi | Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). |
| Rumus Perhitungan | GK > y - GK<br>Keterangan :<br>GK = Garis kemiskinan<br>y = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan<br>Akumulasi jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan berada dibawah garis kemiskinan |
| Interpretasi | Penduduk miskin merupakan jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan. |
| Sumber Data | BPS |
| Frekuensi | Maret dan September / tahun |

## II. METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN VISI

### A. PDRB PER KAPITA ADHB (Rp Juta)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.E)

### B. KONTRIBUSI PDRB INDUSTRI PENGOLAHAN (KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PDRB) (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%) |
| Definisi | Kontribusi PDRB yang bersumber dari sektor industri pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB |
| Rumus Perhitungan | $\text{Kontribusi} = \frac{\text{PDRB}_{industri\ pengolahan}}{PDRB_{Kota}} x100\%$ |

| | |
|---|---|
| Interpretasi | Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB Kota, *ceteris paribus* |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Triwulanan, Tahunan |

## C. TINGKAT KEMISKINAN (%)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.B)

## D. RASIO GINI (INDEKS)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.G)

## E. PERTUMBUHAN EKONOMI (%)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.D)

## F. NILAI EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai) |
| Definisi | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan adalah ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), berdasarkan indikator dan kriteria yang ditetapkan dalam sistem evaluasi kinerja. |
| Rumus Perhitungan | Nilai Kinerja Pemerintahan Daerah = $\frac{\sum(Skor\ Indikator \times Bobot)}{Total\ Bobot}$ |
| Interpretasi | Skor tinggi berarti pelaksanaan pemerintahan berjalan baik sesuai aturan dan berdampak nyata bagi masyarakat |
| Sumber Data | Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) |
| Frekuensi | Tahunan |

## G. INDEKS INOVASI DAERAH (INDEKS)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indek Inovasi Daerah (Indeks) |
| Definisi | Indeks Inovasi Daerah merupakan himpunan inovasi yang telah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi ini didasarkan pada urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya |

| | |
|---|---|
| Rumus Perhitungan | Indeks bersumber dari balitbang Kementerian Dalam Negeri setiap tahunnya |
| Interpretasi | Pengukuran indeks sendiri akan menggunakan 36 indikator. Setelah dilakukan pengukuran, maka akan menghasilkan ranking Indeks Inovasi Daerah di tiap klaster provinsi, kabupaten, kota, daerah tertinggal, daerah perbatasan, Papua dan Papua Barat |
| Sumber Data | Kementerian Dalam Negeri |
| Frekuensi | Tahunan |

## H. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (INDEKS)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.A)

## I. TINGKAT PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (RP JUTA/ TENAGA KERJA)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp Juta/Tenaga Kerja) |
| Definisi | Produktivitas tenaga kerja adalah kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi |
| Rumus Perhitungan | $$PTK = \frac{PDRB}{JTkB}$$ Dimana : PTK = Produktivitas Tenaga Kerja PDRB = PDRB ADHB tahun n JTkB = Jumlah penduduk bekerja tahun n |
| Interpretasi | Tingkat produktivitas tenaga kerja digunakan untuk mengukur kemampuan tenaga kerja dalam mengerjakan pekerjaannya dalam waktu kerja yang sudah ditentukan dengan metode penghitungan adalah nilai tambah dibagi dengan jumlah tenaga kerja yang dibayar. |
| Sumber Data | Badan Pusat Satistik |
| Frekuensi | Tahunan |

## J. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/ KOTA (INDEKS)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota (Indeks) |
| Definisi | Nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) |
| Rumus Perhitungan | IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKTL) Dimana : IKLH =Rasio kualitas lingkungan hidup IKA =Rasio kualitas air IKU =Rasio kualitas udara |

| | IKTL =Rasio kualitas tutupan lahan |
|---|---|
| Interpretasi | Kategori Rasio Lingkungan Hidup yaitu :<br>a. sangat baik 90 ≤ IKLH ≤ 100<br>b. baik 70 ≤ IKLH ≤ 90<br>c. sedang 50 ≤ IKLH ≤ 70<br>d. kurang 25 ≤ IKLH ≤ 50<br>e. sangat kurang 0 ≤ IKLH ≤ 25 |
| Sumber Data | Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan Permen LHK Nomor 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup |
| Frekuensi | Data pemantauan yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH adalah data pemantauan tahun berjalan dengan durasi pemantauan 1 tahun |

# III. METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA

## 1) INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (INDEKS)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.A)

## 2) USIA HARAPAN HIDUP (TAHUN)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.H)

## 3) PREVALENSI *STUNTING* (PENDEK DAN SANGAT PENDEK) PADA BALITA (%)

| Nama Indikator | Prevalansi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%) |
|---|---|
| Definisi | *Stunting* (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (*Z-score*) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010.<br>a. Sangat pendek: *Z-score* < -3,0<br>b. Pendek: *Z-score* ≥ -3,0 s/d *Z-score* < -2,0 |
| Rumus Perhitungan | Cara perhitungan (1)<br>(1) Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).<br>$PAB(5)P_{stunting} = \frac{JAB(5)P_{Stunting}}{JAB(5)} x100\%$ |

| | |
|---|---|
| | Keterangan : $PAB(5)P_{stunting}$ =Prevalensi anak balita yang menderita pendek (*stunting*)<br>$JAB(5)P_{stunting}$ =Jumlah anak balita pendek (*stunting*) pada waktu tertentu<br>JAB(5) =Jumlah anak balita pada waktu yang sama<br>Cara perhitungan (2)<br>(2) Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).<br>$$PAB(5)SP_{stunting} = \frac{JAB(5)SP_{Stunting}}{JAB(5)} x100\%$$<br>Keterangan: $PAB(5)SP_{stunting}$ =Prevalensi anak balita yang menderita sangat pendek (*stunting*)<br>$JAB(5)SP_{stunting}$ =Jumlah anak balita sangat pendek (*stunting*) pada waktu tertentu<br>JAB(5) =Jumlah anak balita pada waktu yang sama<br><br>Cara perhitungan (3)<br>*Prevalensi stunting* = PAB(5) P + PAB(5) SP |
| Interpretasi | *Prevalensi stunting* yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk:<br>a. **Kekurangan Gizi** : *Stunting* adalah indikator kekurangan gizi kronis. *Prevalensi stunting* yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama.<br>b. **Akses Pelayanan Kesehatan** : *Prevalensi stunting* yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak.<br>c. **Kemiskinan** : *Stunting* sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan stunting.<br>d. **Pendidikan** : Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap *prevalensi stunting*. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.<br>e. **Faktor Lingkungan** : Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap *prevalensi stunting*. |
| Sumber Data | SSGI<br>Survei Kesehatan Rasio perlu dieksplor penggunaan data program Kementerian Kesehatan (E-PPGBM) untuk penyediaan data tahunan |

| | |
|---|---|
| Frekuensi | SSGI: tahunan<br>Survei Kesehatan Rasio : 5 tahunan |

**4) PREVALENSI KETIDAKCUKUPAN KONSUMSI PANGAN (*PREVALENCE OF UNDERNOURISHMENT*) (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%) |
| Definisi | a. Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif<br>b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment/ PoU*) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara regular mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya |
| Rumus Perhitungan | $$PoU = \int_{x<MDER} f(x)dx$$<br>Keterangan :<br>PoU : Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimun energi (MDER) yang diukur dengan kkal<br>MDER : Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kka (*Minimum Dietery Energi Requirement*)<br>f(x) : Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu |
| Interpretasi | Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Tahunan |

## E. JUMLAH KEMATIAN IBU (JIWA)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Jumlah Kematian Ibu (Jiwa) |
| Definisi | Indikator ini menunjukkan jumlah kematian ibu selama kehamilan, persalinan atau dalam 42 hari setelah melahirkan |
| Rumus Perhitungan | $jki = kki_n$<br>dimana :<br>jki = jumlah kematian ibu (jiwa)<br>$kki_n$ = kasus kematian ibu pada tahun berkenaan |
| Interpretasi | Jumlah kematian ibu menjadi indikator penting menilai kualittas layanan kesehatan ibu di suatu wilayah, yang berarti dengan layanan yang berkualitas kasus kematian ibu dapat ditekan atau tidak ada sama sekali |
| Sumber Data | Dinas Kesehatan |
| Frekuensi | Tahunan |

## F. HARAPAN LAMA SEKOLAH (TAHUN)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.I)

## G. TINGKAT KEMISKINAN (%)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.B)

## H. INDEKS KETAHANAN KELUARGA (INDEKS)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Ketahanan Keluarga (Indeks) |
| Definisi | Indikator ini digunakan sebagai ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga yang dibentuk dari 17 variabel serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. |
| Rumus Perhitungan | $$ibangga = \frac{it + im + ib}{3}$$<br>dimana :<br>$$it = \frac{stt - minst}{maxst - minst} x100$$<br>$$im = \frac{stm - minsm}{maxsm - minsm} x100$$<br>$$ib = \frac{stb - minsb}{maxsb - minsb} x100$$<br>Ket :<br>ibangga = Indeks ketahanan keluarga<br>it = Indeks ketentraman<br>im = Indeks kemandirian<br>ib = Indeks kebahagiaan |

| | |
|---|---|
| | stt = Skor total ketentraman<br>minst = Min skor ketentraman<br>maxst = Maks skor ketentraman<br>stm = Skor total kemandirian<br>minsm = Min skor kemandirian<br>maxsm = Maks skor kemandirian<br>stb = Skor total kebahagiaan<br>minsb = Min skor kebahagiaan<br>maxsb = Maks skor kebahagiaan |
| Interpretasi | Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: a. iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40. B. iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40–70. C. iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70 |
| Sumber Data | BKKBN |
| Frekuensi | Tahunan |

## I. INDEKS KETIMPANGAN GENDER – IKG (INDEKS)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Ketimpangan Gender – IKG (Indeks) |
| Definisi | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan Pendidikan SMA/sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan |
| Rumus Perhitungan | Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut:<br><br>a. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki<br>$G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0{,}005}{MTF} x \frac{0{,}01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} x \left(PR_p x SE_p\right)^{\frac{1}{2}} x TPAK_p}$<br>$G_L = \sqrt[3]{1x(PR_L x SE_L)^{\frac{1}{2}} x TPAK_L}$<br>b. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonic<br>$HARM(G_p, G_L) = \left[\frac{(G_p)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2}\right]^{-1}$<br>c. Menghitung indeks masing – masing dimensi |

| | |
|---|---|
| | $$IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0{,}005}{MTF}} x \frac{0{,}01}{MHPK20} + 1\right)}{2}$$<br>$$IPK = \frac{TPAK_p + TPAK_L}{2}$$<br>$$IP = \frac{\left(\sqrt{PR_p x SE_p} + \sqrt{PR_L x SE_L}\right)}{2}$$<br>d. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometric<br>$$G_{p,L} = \sqrt[3]{IKR x IP x IPK}$$<br>e. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender<br>$$Indeks\ Kesetaraan\ Gender = \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$$<br>f. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender<br>$$IKG = 1 - \frac{HARM\ (G_p, G_L)}{G_{p,L}}$$<br>Keterangan :<br>$G_p$ =Indeks Perempuan<br>$G_L$ =Indeks Laki-Laki<br>MTF =Proporsi Perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan<br>MHPK20 =Proporsi Perempuan usia 15-40 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun<br>$PR_p$ =Persentase Perempuan di legislatif<br>$PR_L$ =Persentase Laki-laki di legislatif<br>$SE_p$ =Persentase Perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas<br>$SE_L$ =Persentase Laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas<br>$TPAK_p$ =Persentase angkatan kerja Perempuan terhadap penduduk Perempuan usia kerja<br>$TPAK_L$ =Persentase angkatan kerja Laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja<br>$HARM(G_p,G_L)$ = Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dalam rata-rata harmonik<br>IKR =Indeks dimensi Kesehatan reproduksi<br>IP =Indeks dimensi pemberdayaan<br>IPK =Indeks dimensi pasar tenaga kerja<br>$G_{p,L}$ =Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometric<br>IKG =Indeks ketimpangan gender |
| Interpretasi | IKG bernilai antara 0 – 1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya. |

| | |
|---|---|
| Sumber Data | Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, dan Sekretaris Dewan (Sekwan) |
| Frekuensi | Tahunan |

## J. PERTUMBUHAN EKONOMI (%)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.D)

## K. INDEKS DAYA SAING DAERAH – IDSD (INDEKS)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indek Daya Saing Daerah (Indeks) |
| Definisi | Daya saing daerah merupakan salah satu kriteria untuk menentukan keberhasilan dan pencapaian sebuah tujuan yang lebih baik oleh suatu daerah dalam peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah, sehingga dapat dikatakan IDSD ini merupakan penilaian terhadap keberhasilan dan pencapaian tujuan yang lebih baik pada suatu daerah. |
| Rumus Perhitungan | Angka Indeks merupakan agregat dari seluruh variabel yang digunakan, dikarenakan variabel mempunyai strata, maka perhitungannya sebagai berikut :<br>1. Dimensi, merupakan rata-rata dari indikator $Dimensi = \frac{\sum_{i=1}^{n} indikator_i}{n}$<br>2. Pilar, merupakan rata-rata dari dimensi $Pilar = \frac{\sum_{i=1}^{n} dimensi_i}{n}$<br>3. Aspek, merupakan rata-rata dari pilar $Aspek = \frac{\sum_{i=1}^{n} pilar_i}{n}$<br>4. Indeks, merupakan rata-rata dari indikator $Indeks = \frac{\sum_{i=1}^{n} aspek_i}{n}$ |

| | |
|---|---|
| Interpretasi | Daya saing diidentifikasikan dengan masalah produktivitas, yakni dengan melihat tingkat output yang dihasilkan untuk setiap input yang digunakan. Pendekatan yang sering digunakan untuk mengukur daya saing dilihat dari beberapa indikator keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif.<br>Komponen IDSD terdiri dari 4 aspek, 12 pilar dan 23 dimensi, 78 indikator, dimana komposisi ini dihasilkan berdasarkan berbagai studi literatur dan masukan dari para pakar. |

| NO | ASPEK/ FAKTOR | PILAR | DIMENSI | INDIKATOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspek/ Faktor Penguat Enabling Environment | Pilar Kelembagaan | Tata Kelola Pemerintahan | 4 |
| | | | Keamanan Dan Ketertiban | 1 |
| | | Pilar Infrastruktur | Infrastruktur Transportasi | 2 |
| | | | Infrastruktur Air Bersih Dan Kelistrikan | 2 |
| | | Pilar Perekonomian Daerah | Keuangan Daerah | 5 |
| | | | Stabilitas Ekonomi | 4 |
| Ii | Aspek Sumber Daya Manusia/ Human Capital | Pilar Kesehatan | Kesehatan | 1 |
| | | Pilar Pendidikan Dan Keterampilan | Pendidikan | 6 |
| | | | Keterampilan | 3 |
| | | | Kopetensi Dalam Negeri | 2 |
| Iii | Aspek Pasar/Market | Pilar Efisiensi Pasar Produk | Pajak Dan Resribusi | 3 |
| | | | Stabilitas Pasar | 1 |
| | | Pilar Ketenagakerjaan | Ketenagakerjaan | 2 |
| | | | Kapasitas Tenaga Kerja | 3 |
| | | Pilar Akses Keuangan | Akses Keuangan | 6 |
| | | Pilar Ukuran Pasar | Ukuran Pasar | 3 |
| Iv | Aspek Ekosistem Inovasi | Pilar Dinamika Bisnis | Regulasi | 4 |
| | | | Kewirausahaan | 5 |
| | | Pilar Kapasitas Inovasi | Interaksi Dan Keberagaman | 6 |
| | | | Penelitian Dan Pengembangan (R & D) | 9 |
| | | Pilar Kesiapan Teknologi | Komersialisasi | 3 |
| | | | Telematika | 2 |
| | | | Teknologi | 1 |

| | |
|---|---|
| Sumber Data | Badan Riset dan Inovasi Nasional |
| Frekuensi | Tahunan |

## L. PROPORSI KONTRIBUSI PDRB KOTA TERHADAP PDRB PROVINSI (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Proporsi Kontribusi PDRB Kota Terhadap PDRB Proinsi (%) |
| Definisi | Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah.<br>Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. |
| Rumus Perhitungan | $\%PDRBk = \frac{\sum(PDRB\ ADHB\ Kota)}{\sum PDRB\ ADHB\ Provinsi} x100\%$<br>Ket :<br>%PDRBk = Proporsi Rasio PDRB Kota |
| Interpretasi | Mempertimbangkan delineasi wilayah kota yang dapat mencakup seluruh/ sebagian kecamatan dalam kota, maka perhitungan PDRB Kota yang dilakukan dengan menggunakan data kota yang berpeluang bernilai lebih tinggi (*overestimate*). |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Tahunan |

## M. PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.E)

## N. RASIO GINI (INDEKS)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.G)

## O. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.C)

## P. KONTRIBUSI UMKM TERHADAP PDRB (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | **Kontribusi UMKM Terhadap PDRB** (%) |
| Definisi | Kontribusi PDRB yang bersumber dari Sub sektor UMKM yang mencerminkan proporsi nilai tambah sub sektor UMKM terhadap PDRB<br>Karena UMKM bukan merupakan sektor langsung yang terdapat dari 17 sektor pembentuk PDRB, maka untuk nilainya diambil dari sektor yang utamanya merupakan usaha mikro, kecil dan menengah yaitu sektor:<br>- Industri pengolahan<br>- Pertanian, kehutanan dan perikanan<br>- Industri pengolahan |

| | |
|---|---|
| Rumus Perhitungan | $\text{Kontribusi} = \frac{\text{PDRB}_{UMKM}}{PDRB_{Kota}} x100\%$ |
| Interpretasi | Kontribusi subsektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB Kota, *ceteris paribus* |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Triwulanan, Tahunan |

## Q. NILAI REALISASI INVESTASI (Milyar/ Rp)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Realisasi Nilai Investasi (Milyar/ Rp) |
| Definisi | Nilai Realisasi Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu.<br>Cakupan:<br>▪ PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)<br>▪ PMA (Penanaman Modal Asing)<br>▪ Semua sektor usaha (industri, jasa, pertanian, pertambangan, dll.)<br>▪ Jenis Investasi yang Dihitung:<br>▪ Investasi fisik: pembangunan gedung, fasilitas produksi, infrastruktur penunjang<br>▪ Pengadaan alat dan mesin<br>▪ Belanja modal lainnya yang tercatat dalam laporan<br>▪ realisasi |
| Rumus Perhitungan | *Nilai Realisasi Investasi = Nilai realisasi investasi PMA + Nilai realisasi investasi PMDN* |
| Interpretasi | ▪ Semakin tinggi nilai realisasi investasi, semakin baik karena mencerminkan keberhasilan menarik dan mempertahankan investor untuk merealisasikan komitmen investasinya.<br>▪ Kenaikan nilai dari waktu ke waktu menunjukkan iklim investasi yang membaik. |
| Sumber Data | OSS RBA |
| Frekuensi | Bulanan, Triwulan dan Tahunan |

## R. INDEKS RISIKO BENCANA – IRBI (INDEKS)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Risiko Bencana – IRBI (Indeks) |
| Definisi | IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, |

| | |
|---|---|
| | dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. |
| Rumus Perhitungan | $$Risk = Hazard x \frac{Vulnerability}{Capacity}$$<br>Keterangan :<br>*Hazard* (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya.<br>*Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.<br>Kapasitas (*Capacity*) dinilai dengan menggunakan<br>pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5)<br>Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana |
| Interpretasi | Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut:<br>• Indeks <13 adalah Rendah<br>• Indeks 13 – 144 adalah Sedang<br>• Indeks >144 adalah Tinggi |
| Sumber Data | BPBD |
| Frekuensi | Tahunan |

## S. INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK – SPBE (INDEKS)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik – SPBE (Indeks) |
| Definisi | SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain |

| | |
|---|---|
| | yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. |
| Rumus Perhitungan | Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut: $$Indeks\ Domain_i = \frac{1}{BD_i}\sum_{j=m}^{n} NA_{ij} x BA_{ij}$$ |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan |
| Sumber Data | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. |
| Frekuensi | Tahunan |

## T. INDEKS PEMERINTAHAN DIGITAL (INDEKS)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Pemerintahan Digital (Indeks) |
| Definisi | Indeks pemerintah digital adalah ukuran kinerja atau kematangan transformasi digital di instansi pemerintah, seperti yang diukur dalam Indeks Pemdi di Rasio, yang mencakup penilaian terhadap tata kelola, layanan, dan infrastruktur digital untuk mendorong modernisasi dan penciptaan nilai publik melalui pemanfaatan teknologi dan data digital. Indeks ini membantu pemerintah mengevaluasi kesiapan mereka dalam transformasi digital secara menyeluruh dan menjadi dasar untuk menyusun program pengembangan SDM digital dan peningkatan pelayanan publik |
| Rumus Perhitungan | Total skor dari 9 aspek Pemdi berdasarkan evaluasi Kemen PAN RB, dengan bobot nilai masing-masing aspek sebagai berikut :<br>1. Strategi dan Rencana (bobot 5 %)<br>2. Tata Kelola dan Manajemen (bobot 5 %)<br>3. Teknologi Digital (bobot 20 %)<br>4. Audit Teknologi Digital (bobot 6 %)<br>5. Kemananan Siber (bobot 9 %)<br>6. Kapabilitas dan Budaya Digital (bobot 10 %)<br>7. Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi (bobot 10 %)<br>8. Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah (bobot 15 %)<br>Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (bobot 20 %) |
| Interpretasi | Indeks ini dirancang untuk mengukur kinerja transformasi digital di instansi pemerintah Rasio, sesuai dengan arahan RPJMN 2025-2029 dan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Indeks ini berfungsi |

| | |
|---|---|
| | Memberikan gambaran tentang tingkat kesiapan dan kualitas transformasi digital di instansi pemerintah. Skala indeks yang lebih tinggi menunjukkan kematangan transformasi digital yang lebih baik dalam penggunaan teknologi digital pemerintahan. |
| Sumber Data | Kementerian PANRB berdasarkan hasil evaluasi |
| Frekuensi | Tahunan |

## U. INDEKS PELAYANAN PUBLIK (INDEKS)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Pelayanan Publik (Indeks) |
| Definisi | Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Rasio berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.<br>Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks. |
| Rumus Perhitungan | Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik.<br>a. Menentukan nilai untuk setiap indikator<br>$Nilai\ per\ indikator = \left(\frac{nilai\ F01 + nilai\ F02 + nilai\ F03}{3}\right) x\ bobot\ per\ indikator$<br>b. Menentukan nilai setiap aspek<br>$Nilai\ per\ aspek : \sum nilai\ per\ indikator$<br>c. Menentukan Indeks<br>$Nilai\ indeks : \sum (nilai\ aspek_n\ x\ bobot_n)$ |
| Interpretasi | Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.<br>Prinsip-prinsip tersebut adalah:<br>a. Keadilan (Fairness);<br>b. Partisipasi (Participation);<br>c. Akuntabilitas (Accountability);<br>d. Transparansi (transparency);<br>e. Berdayaguna (useful);<br>f. Aksesibilitas (accessibility) |

<table>
<tr><td></td><td>Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan).<br>Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi:
<table>
<tr><th>RANGE NILAI</th><th>KATEGORI</th><th>MAKNA</th></tr>
<tr><td>0-1,00</td><td>F</td><td>GAGAL</td></tr>
<tr><td>1,01 – 1,50</td><td>E</td><td>SANGAT BURUK</td></tr>
<tr><td>1,51 – 2,00</td><td>D</td><td>BURUK</td></tr>
<tr><td>2,01 – 2,50</td><td>C</td><td>CUKUP (DENGAN CATATAN)</td></tr>
<tr><td>2,51 – 3,00</td><td>C</td><td>CUKUP</td></tr>
<tr><td>3,01 – 3,50</td><td>B-</td><td>BAIK (DENGAN CATATAN)</td></tr>
<tr><td>3,51 – 4,00</td><td>B</td><td>BAIK</td></tr>
<tr><td>4,01 – 4,50</td><td>A-</td><td>SANGAT BAIK</td></tr>
<tr><td>4,51 – 5,00</td><td>A</td><td>PELAYANAN PRIMA</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
</table>

## V. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (INDEKS)

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan tolok ukur dari pemberian layanan kepada masyarakat oleh suatu instansi</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>a. Penentuan bobot<br>$$bobot = \frac{1}{jumlah\ parameter}$$<br>b. SKM<br>$$SKM = \frac{total\ nilai\ persepsi\ responden\ per\ parameter}{total\ parameter\ yang\ terisi} x\ bobot$$<br>c. IKM<br>$$IKM = SKM\ x\ 25$$</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Semakin tinggi nilai dari IKM pada suatu instansi menandakan adanya tingginya kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh instansi tersebut dan sebaliknya yang dinotasikan dengan tabel berikut :
<table>
<tr><th>NILAI PERSEPSI</th><th>NILAI INTERVAL</th><th>NILAI INTERVAL KONVERSI</th><th>KATEGORI MUTU PELAYANAN</th><th>MUTU PELAYANAN</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1,00 – 1,75</td><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr>
<tr><td>2</td><td>1,76 – 2,50</td><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2,51 – 3,25</td><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>4</td><td>3,26 – 4,00</td><td>88,31 - 100</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| Sumber Data | Survei kepuasan masyarakat |
| Frekuensi | Semesteran dan Tahunan |

## W. NILAI EVALUASI AKIP

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Nilai Evaluasi AKIP (NILAI) |
| Definisi | Nilai Evaluasi AKIP merupakan Nilai terhadap aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. |
| Rumus Perhitungan | |

| KOMPONEN | SUB KOMPONEN 1 KEBERADAAN 20% | SUB KOMPONEN 2 KUALITAS 30% | SUB KOMPONEN 3 PEMANFAATAN 50% | TOTAL BOBOT |
|---|---|---|---|---|
| Perencanaan Kinerja | 6 | 9 | 15 | 30 |
| Pengukuran Kinerja | 6 | 9 | 15 | 30 |
| Pelaporan Kinerja | 3 | 4,5 | 7,5 | 15 |
| Evaluasi Ekuntabilitas Kinerja Internal | 5 | 7,5 | 12,5 | 25 |
| Nilai Akuntabilitas Kinerja | 20 | 30 | 50 | 100 |

| | |
|---|---|
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai evaluasi AKIP semakin tinggi pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah. |
| Sumber Data | Kementerian PAN RB |
| Frekuensi | Tahunan |

## X. OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN (OPINI)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Opini BPK atas Laporan Keuangan (Opini) |
| Definisi | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah pernyataan profesional yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kewajaran penyajian informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan kriteria akuntansi yang berlaku umum di Rasio |
| Rumus Perhitungan | Persentase WTP = $\left(\frac{Jumlah\ Pemerintah\ Daerah\ dengan\ WTP}{Total\ Pemerintah\ Daerah}\right)$ x 100 |
| Interpretasi | Semakin tinggi kualitas opini (misal WTP), maka semakin baik pengelolaan keuangan daerah |
| Sumber Data | Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD |
| Frekuensi | Tahunan (setelah LKPD selesai diaudit oleh BPK) |

## Y. RASIO PAD TERHADAP APBD (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Rasio PAD terhadap APBD (%) |

| | |
|---|---|
| Definisi | Indikator ini menggambarkan proporsi pendapatan asli daerah dalam pemenuhan belanja pada APBD |
| Rumus Perhitungan | $\%PAD = \frac{PAD}{APBD} x100\%$ |
| Interpretasi | Semakin tinggi rasio PAD terhadap APBD maka semakin meningkat kemandirian keuangan suatu daerah |
| Sumber Data | BKD |
| Frekuensi | Tahunan |

## Z. PERSENTASE PENURUNAN PELANGGARAN TRANTIBUM (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum (%) |
| Definisi | Pelanggaran adalah perbuatan atau perkara melanggar, tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Satpol PP sebagai Penegak Peraturan Daerah, melakukan upaya mewujudkan kondisi Tertib dengan cara menyelesaikan setiap pelanggaran yang terlaporkan. |
| Rumus Perhitungan | $\frac{Jumlah\ pelanggaran\ tahun\ (n-1) - Jumlah\ pelanggaran\ tahun\ n}{Jumlah\ pelanggaran\ tahun\ (n-1)}\ X\ 100$ |
| Interpretasi | Jumlah pelanggaran tahun N-1 adalah jumlah pelanggaran pada tahun lalu (sebelumnya).<br>Jumlah pelanggaran pada tahun N adalah jumlah pelanggaran pada tahun berjalan (tahun dimana indikatornya dihitung).<br>Semakin tinggi persentase tingkat penyelesaian Penegakan Peraturan Daerah yang terlaporkan, maka semakin tinggi pula tingkat pencapaian kondisi Tertib di Kota Payakumbuh. |
| Sumber Data | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| Frekuensi | Tahunan |

## AA. INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN – IPK – BERBASIS ABS SBK (INDEKS)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | **Indeks Pembangunan Kebudayaan Berbasis ABS SBK (Indeks)** |
| Definisi | IPK ABS-SBK adalah instrumen yang mengukur capaian pembangunan kebudayaan di tingkat daerah Kota Payakumbuh berdasarkan nilai-nilai Budaya Minang Kabau yang berlandaskan ABS- SBK |
| Rumus Perhitungan | $\boldsymbol{IPK_{ABSSBK}} = \sum_{i=1}^{8}(\boldsymbol{Wj}\ \mathbf{x}\ \boldsymbol{Indeks\ Dj})$ dimana<br>$IPK_{ABSSBK}$ = Indeks Pembangunan Kebudayaan<br>$D_j$ = Dimensi ke-j<br>$W_j$ = Bobot Dimensi ke-j<br><br>$\boldsymbol{Indeks\ D_j} = \frac{\sum_1^J sxj}{n_j}$ x100 dimana |

| | |
|---|---|
| | $SX_j$ =Nilai indikator i pada dimensi ke-j yang sudah dinormalisasi<br>$n_j$ =Banyaknya indikator dimensi ke-j<br>Indeks $D_j$=Indeks Dimensi ke-j |
| Interpretasi | Indeks Pembangunan Kebudayaan ABS SBK berkisar antara 0 – 100 dengan menggunakan 8 (delapan) dimensi |

| DIMENSI | INDIKATOR | BOBOT |
|---|---|---|
| Bakorong-Bakampuang, | 3 | 9 |
| Basuku-Banagari, | 4 | 15 |
| Basawah-Baladang, | 3 | 15 |
| Bahuma-Babendang, | 3 | 15 |
| Balabuah-Batapian, | 2 | 9 |
| Babalai Bamusajik, | 2 | 20 |
| Bahalaman-Bapamedanan | 2 | 9 |
| Bapandam-Bapakuburan | 2 | 8 |
| Total | 21 | 100 |

| INTERVAL | KRITERIA |
|---|---|
| 86-100 | Unggul |
| 76-85 | Baik Sekali |
| 66-75 | Baik |
| ≤ 65 | Cukup Baik |

| | |
|---|---|
| Sumber Data | Kuisioner yang diolah, Kesra, Kebudayaan, Litbang Bappeda |
| Frekuensi | Tahunan |

## BB. KARYA BUDAYA YANG DITETAPKAN

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Karya Budaya yang Ditetapkan |
| Definisi | Indikator ini digunakan untuk mengukur penetapan karya budaya melalui proses penetapan resmi sebagai cagar budaya atau warisan budaya oleh lembaga berwenang |
| Rumus Perhitungan | $kbd = kbd_{n-1} + kbd_n$<br>dimana : kbd = Karya Budaya yang ditetapkan |
| Interpretasi | Menunjukkan tingkat legalitas, perlindungan, dan pengakuan resmi terhadap kekayaan budaya daerah. Semakin tinggi nilai indikator, semakin banyak unsur budaya yang telah mendapatkan status hukum yang sah |
| Sumber Data | Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga |
| Frekuensi | Tahunan |

## CC. CAKUPAN PENGUATAN IDIOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%) |
| Definisi | Upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila serta nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini mencakup pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi terbuka, serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pembentukan karakter, dan pengembangan wawasan kebangsaan |
| Rumus Perhitungan | Nilai Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dari Rapor Pendidikan |
| Interpretasi | **1. Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila:**<br>• Memahami dan menghayati makna dari lima sila Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia).<br>• Mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam pengambilan keputusan, interaksi sosial, dan perilaku sehari-hari.<br>• Menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bertindak, dan bersikap.<br><br>**2. Penguatan Karakter Kebangsaaan:**<br>• Membentuk karakter individu yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, seperti religius, jujur, tanggung jawab, disiplin, toleran, adil, dan cinta tanah air.<br>• Memperkuat rasa nasionalisme dan identitas bangsa, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman.<br>• Mencegah masuknya paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila, seperti radikalisme, intoleransi, dan individualisme.<br><br>**3. Implementasi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara:**<br>• Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti dalam sistem pemerintahan, hukum, ekonomi, dan pendidikan.<br>• Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memperjuangkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. |

| | |
|---|---|
| | • Berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional dan menjaga stabilitas negara.<br><br>**4. Peran Generasi Muda:**<br>• Memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda sejak dini melalui pendidikan formal dan informal.<br>• Mengembangkan kreativitas dan inovasi generasi muda dalam melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.<br>• Memberdayakan generasi muda sebagai agen perubahan dalam membangun karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila.<br><br>**5. Tantangan dan Ancaman:**<br>• Menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan zaman yang dapat mengikis nilai-nilai luhur Pancasila.<br>• Memperkuat ketahanan ideologi bangsa dari berbagai ancaman, seperti radikalisme, intoleransi, dan paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila.<br>Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. |
| Sumber Data | Rapor Pendidikan (Kemendikbud) |
| Frekuensi | Tahunan |

## DD. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/ KOTA (INDEKS)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator Sasaran Visi (II.J)

## EE. TIMBULAN SAMPAH TEROLAH DI FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) |
| Definisi | **Timbulan Sampah**<br>Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, Kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/ atau fasilitas lainnya.<br>Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/ atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, |

| | |
|---|---|
| | dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/ atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.<br>Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan:<br>a. Pengolahan sampah organik seperti pengompasan, dan/ atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, vermi composting, biodigester, dsb.<br>b. Daur ulang materi (material recovery) merupakan Upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir.<br>Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/ atau swasta.<br>**Catatan:**<br>Mengacu pada definisi global dari UN-Habitat, bahwa makna dari waste recovery sepadan dengan kegiatan pengolahan sampah. Pemulihan (recovery) itu sendiri merupakan setiap kegiatan yang secara prinsip utamanya adalah sampah memiliki fungsi untuk mengganti bahan material lain untuk memenuhi fungsi tertentu, dalam alur produksi atau ekonomi yang lebih luas. Kegiatan pengolahan sampah menjadi energi dan/ atau bahan bakar lainnya tidak dihitung ke dalam indikator sampah terolah. |
| Rumus Perhitungan | **Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah**<br>Terdapat dua alternatif menghitung jumlah sampah terolah:<br>**Cara (1)**<br>$SO = ST - MFPA + RDP$<br>Keterangan:<br>SO : Sampah terolah (ton/hari)<br>ST : Sampah terkumpul (ton/hari)<br>MFPA : Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari) |

| | |
|---|---|
| | RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari)<br>**Cara (2)**<br>$SO = MFPD + DPA - RPD$<br>Keterangan:<br>SO : Sampah terolah (ton/hari)<br>MFPD : Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan daur ulang sampah (ton/hari)<br>DPA : Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari)<br>RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari)<br>**Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah**<br>$TS = TP\ x\ (TPRT + TPNRT)$<br>Keterangan:<br>TS : Timbulan sampah (kg/hari)<br>RASIO : Total populasi (orang)<br>TPRT : Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari)<br>TPNRT: Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari)<br>Jika tidak terdapat informasi TPNRT, maka pendekatan dapat di estimasi menggunakan perhitungan berikut.<br>$TS$ = 70% *dari rumah tangga* + 30% *dari non – rumah tangga*<br>$$TS = \frac{TSRT}{70\%}$$<br>Keterangan:<br>TS : Timbulan sampah (ton/hari)<br>TSRT : Timbulan sampah rumah tangga (ton/hari)<br>**Langkah ke-3: Menghitung Tingkat Sampah Terolah**<br>$$\%SO = \frac{SO}{TS} x100\%$$<br>Keterangan:<br>%SO : Tingkat sampah terolah (%)<br>SO : Sampah terolah (ton/hari)<br>TS : Timbulan sampah (ton/hari) |
| Interpretasi | Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah |
| Sumber Data | a. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS dan Podes (masih dalam proses uji coba<br>b. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan<br>c. SI INSAN Kementerian PUPR |
| Frekuensi | a. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS dan Podes : Tahunan |

| | |
|---|---|
| | b. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan : Tahunan<br>c. SI INSAN Kementerian PUPR : Tahunan |

### FF. INDEKS INFRASTUKTUR (NILAI)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Infrastruktur (Nilai) |
| Definisi | Indeks Infrastruktur adalah alat untuk menilai kualitas infrastruktur yang mencakup jalan, transportasi, air bersih dan drainase |
| Rumus Perhitungan | Indeks Infrastruktur = (18% x Kondisi Jalan mantap) + (7% x Penyediaan PJU) + (8% x Penyediaan Trotoar) + (12% x Kinerja Irigasi) + (10% x Fungsi Sungai) + (17% x Pemenuhan Drainase) + (5% x Pelayanan Air Minum) + (5% x Penataan bangunan Gedung) + (8% x Pengelolaan Jasa konstruksi) + (5% x Prasarana Sampah + 5% Pengelolaan Air limbah) |
| Interpretasi | Indeks ini diperoleh melalui pembobotan beberapa kriteria diatas, dan hasil dari indeks yang terus meningkat menandakan semakin berkualitasnya infrastruktur daerah (terutama untuk komponen yang digunakan) dan begitu juga sebaliknya |
| Sumber Data | Dinas PUPR Kota Payakumbuh (Dibantu data dari Dinas Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah) |
| Frekuensi | Tahunan |

# IV. METADATA INDIKATOR KINERJA DAERAH

## A. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

### 1) INDEKS KETAHANAN PANGAN (INDEKS)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Ketahanan Pangan (Indeks) |
| Defenisi | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan pangan suatu wilayah (provinsi/ kabupaten/ kota) berdasarkan tiga dimensi utama. |
| Rumus Perhitungan | $$IKP = \frac{\sum(Skor\ Dimensi \times Bobot\ Dimensi)}{\sum Bobot}$$<br>Atau jika bobot sama rata:<br>$$\frac{Skor\ Ketersediaan + Skor\ Akses + Skor\ Pemanfaatan}{3}$$<br>**Keterangan Rumus:**<br>Tiga Dimensi Utama IKP:<br>1. Ketersediaan Pangan<br>o Indikator: Produksi pangan lokal, cadangan pangan, luas panen, distribusi pangan. |

| | |
|---|---|
| | ○ Sumber: Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, BPS.<br>2. Akses Pangan<br>○ Indikator: Persentase penduduk miskin, harga pangan, aksesibilitas geografis, infrastruktur distribusi.<br>○ Sumber: BPS, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan.<br>3. Pemanfaatan Pangan<br>○ Indikator: Angka gizi buruk, stunting, ketersediaan air bersih dan sanitasi, pengetahuan gizi.<br>○ Sumber: Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BPS.<br>Setiap dimensi memiliki skor 0–100 berdasarkan normalisasi indikator turunan. |
| Interpretasi | Nilai IKP semakin tinggi menunjukkan ketahanan pangan yang semakin baik |
| Sumber Data | Badan Pangan Nasional (Bapanas), BPS, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian |
| Frekuensi | Tahunan |

**2) PREVALENSI KETIDAKCUKUPAN KONSUMSI PANGAN (PREVALENCE OF UNDERNOURISHMENT) (%)**

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.D)

**3) KONSUMSI LISTRIK PER KAPITA (KWH/KAPITA)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) |
| Definisi | Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung. |
| Rumus Perhitungan | $$KLpk = \frac{KLpln + KLnonpln}{P}$$<br>Keterangan :<br>KLpk : Konsumsi Listrik per kapita<br>KLpln : Total konsumsi Listrik yang disalurkan oleh RASIO PLN<br>Klnonpln : Total konsumsi Listrik yang disalurkan non RASIO PLN<br>P : Jumlah penduduk<br>Catatan :<br>a. Jumlah pemakaian tenaga listrik adalah total penjualan listrik RASIO. PLN dan non RASIO. PLN yang disalurkan ke pelanggan; |

| | |
|---|---|
| | b. Perhitungan indikator masih difokuskan pada wilayah usaha RASIO. PLN. |
| Interpretasi | Indikator ini diperlukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan guna mencapai keberhasilan pembangunan nasional. |
| Sumber Data | Kementerian ESDM, RASIO PLN, dan BPS |
| Frekuensi | Tahunan |

**4) INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/ KOTA (INDEKS)**

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator Sasaran Visi (II.J)

**5) RUMAH TANGGA DENGAN AKSES SANITASI AMAN (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) |
| Definisi | Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) |
| Rumus Perhitungan | $PSA = \frac{JRTST + JRTIPLT}{JRTS} x100\%$<br>PSA = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman<br>JRTSPAL = Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T<br>JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)<br>JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya |
| Interpretasi | Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat |

| | |
|---|---|
| Sumber Data | a. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS<br>b. Data Infrastruktur Kementerian PUPR<br>c. Dinas Lingkungan Hidup |
| Frekuensi | Tahunan |

**6) PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI PENGOLAHAN AIR LIMBAH AKSES AMAN (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Pengolahan Air Limbah Akses Aman (%) |
| Definisi | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Pengolahan Air Limbah Akses Aman (%) |
| Rumus Perhitungan | Meningkatnya persentase Masyarakat yang memiliki pengolahan air limbah akses aman di Kota Payakumbuh |
| Interpretasi | $\% = \frac{a}{b}$<br>a : Jumlah rumah tangga yang memiliki pengolahan air limbah akses aman<br>b : Jumlah seluruh rumah di Kota Payakumbuh |
| Sumber Data | Semakin tinggi angka persentase, menunjukkan semakin banyak jumlah rumah tangga yang telah memiliki pengolahan air limbah akses aman |
| Frekuensi | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |

**7) TIMBULAN SAMPAH TEROLAH DI FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH (%)**

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.EE)

**8) PROPORSI RUMAH TANGGA DENGAN LAYANAN PENUH PENGUMPULAN SAMPAH (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%) |
| Definisi | **Pengumpulan Sampah**<br>Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.<br>**Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah** adalah rumah tangga yang :<br>- Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau |

| | |
|---|---|
| | - Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu.<br>**Catatan:**<br>Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota. Penting untuk diketahui **bahwa (a) Sampah terkumpul, dan (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah dua konsep yang berbeda.**<br>Pada (a) Sampah Terkumpul mengacu pada jumlah sampah yang mencapai fasilitas pengelolaan sampah, sementara (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mempertimbangkan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah.<br>Praktik lapangan yang terjadi di beberapa Kabupaten/ Kota, sampah yang terkumpul dibuang ke lingkungan (tidak diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah). Dalam hal ini rumah tangga tersebut memiliki pelayanan pengumpulan sampah, namun sampah terkumpul mencemari lingkungan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan suatu Kabupaten/Kota memiliki nilai yang tinggi dalam "Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah", namun jumlah "sampah terkumpul" dan diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah rendah. |
| Rumus Perhitungan | **Unit Satuan:**<br>Persentase Rumah tangga<br>**Cara Perhitungan :**<br>$$PRTLP = \frac{JRTLA}{JRTS} x100\%$$<br>PRTLA = Proporsi Rumah Tangga dengan **layanan penuh** pengumpulan sampah<br>JRTLA = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah<br>JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya |
| Interpretasi | Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pelayanan rumah tangga untuk pengumpulan sampah |
| Sumber Data | a. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) MKP BPS<br>b. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS |
| Frekuensi | a. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) MKP BPS : 3 tahunan |

| | |
|---|---|
| | b. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS : Tahunan |

**9) INDEKS RISIKO BENCANA – IRBI (INDEKS)**

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.R)

**10) LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Laju Pertumbuhan Penduduk (%) |
| Definisi | Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. |
| Rumus Perhitungan | $$LP = \frac{(P_n - P_{n-1})}{P_n} x100\%$$ Ket : LP =Pertumbuhan penduduk periode n $P_n$ =Penduduk pada periode n $P_{n-1}$ =Penduduk periode sebelumnya |
| Interpretasi | Semakin cepat laju pertumbuhan penduduk mengindikasikan bahwa jumlah populasi suatu wilayah semakin banyak dan laju pertumbuhan penduduk yang lambat menunjukkan jumlah populasi suatu wilayah sedikit |
| Sumber Data | BPS |
| Frekuensi | Tahunan |

**11) RASIO PENDUDUK (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Rasio Penduduk (%) |
| Definisi | Rasio Penduduk dalam hal ini lebih berfokus pada rasio jenis kelamin dimana rasio ini merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan pada suatu wilayah. |
| Rumus Perhitungan | $$RP = \frac{P_L}{P_P} x100$$ Ket : RP =Rasio penduduk (*sex rasio*) $P_L$ =Jumlah penduduk laki-laki $P_P$ =Jumlah penduduk perempuan |
| Interpretasi | Semakin tinggi tingkat rasio mengindikasikan peningkatan/ lebih banyaknya jenis kelamin tertentu dalam rumus diatas adalah perempuan, dan sebaliknya |
| Sumber Data | BPS |
| Frekuensi | Tahunan |

### 12) KEPADATAN PENDUDUK (ORANG/ Km²)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Kepadatan Penduduk (Orang/ Km²) |
| Definisi | Kepadatan Penduduk merupakan jumlah orang yang tinggal per satuan luas pada wilayah suatu daerah. |
| Rumus Perhitungan | $KP = \frac{P}{L}$<br>Ket :<br>KP =Kepadatan penduduk<br>P =Jumlah penduduk<br>L =Luas wilayah |
| Interpretasi | Semakin besar angka kepadatan penduduk maka semakin padat kependudukan di suatu wilayah |
| Sumber Data | BPS |
| Frekuensi | Tahunan |

### 13) JUMLAH PENDUDUK (JIWA)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Jumlah Penduduk (Jiwa) |
| Definisi | Jumlah penduduk adalah banyaknya individu manusia yang menempati suatu wilayah atau negara pada kurun waktu tertentu. |
| Rumus Perhitungan | Perhitungannya melalui sensus penduduk untuk waktu 10 tahun dan Susenas ataupun proyeksi yang dikeluarkan oleh BPS dimana proyeksi menggunakan rumus :<br>$P_n = P_0 (1 + r . n) \Rightarrow$ Rumus Aritmatika<br>$P_n = P_0 (1 + r )^n \Rightarrow$ Rumus Geometrik<br>$P_n = P_0 . e^{r . n} \Rightarrow$ Rumus Eksponensial<br>dimana :<br>$P_n$ = jumlah penduduk setelah n tahun ke depan<br>$P_0$ = jumlah penduduk pada awal tahun<br>r = angka pertumbuhan penduduk<br>n = jangka waktu dalam tahun<br>e = bilangan eksponensial = 2,7182818 |
| Interpretasi | Keakurasian Jumlah penduduk akan membantu dalam memetakan pembangunan pada suatu wilayah |
| Sumber Data | BPS |
| Frekuensi | Tahunan |

## B. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

### 1) PERTUMBUHAN EKONOMI (%)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.D)

### 2) TINGKAT KEMISKINAN (%)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.B)

**3) PDRB Per-kapita ADHB (Rp. Juta)**

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.E)

**4) TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)**

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.C)

**6) RASIO GINI (INDEKS)**

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.G)

**6) INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (INDEKS)**

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.A)

**7) USIA HARAPAN HIDUP – AHH (TAHUN)**

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.H)

**8) INDEKS KELUARGA SEHAT (INDEKS)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Keluarga Sehat (Indeks) |
| Definisi | Alat yang komprehensif untuk menilai kualitas hidup keluarga dengan mengintegrasikan aspek kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang memberikan gambaran holistik mengenai kesejahteraan keluarga |
| Rumus Perhitungan | Jumlah indikator |
| Interpretasi | Hasil perhitungan IKS tersebut, selanjutnya dapat ditentukan kategori kesehatan masing-masing keluarga dengan mengacu pada ketentuan berikut:<br>1) Nilai indeks > 0,800 : keluarga sehat<br>2) Nilai indeks 0,500 – 0,800 : pra-sehat<br>3) Nilai indeks < 0,500 : tidak sehat |
| Sumber Data | Dinas Kesehatan |
| Frekuensi | Tahunan |

**9) PREVALENSI STUNTING (PENDEK DAN SANGAT PENDEK) PADA BALITA (%)**

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.C)

**10) RATA-RATA LAMA SEKOLAH (TAHUN)**

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.J)

**11) HARAPAN LAMA SEKOLAH (TAHUN)**

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.I)

**12) INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT (INDEKS)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks) |
| Definisi | Merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat perkembangan, ketersediaan, pemanfaatan, dan budaya literasi di suatu wilayah atau kelompok masyarakat.<br>IPLM umumnya disusun oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk menilai seberapa baik masyarakat mengakses, memanfaatkan, dan mengembangkan kemampuan literasinya, baik literasi baca-tulis, numerasi, maupun literasi digital. |
| Rumus Perhitungan | Adapun beberapa kaidah utama yang digunakan dalam perhitungan indeks antara lain:<br>1. Indeks terdiri dari 7 (tujuh) unsur pembentuk indeks yang dinamakan unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) yang terdiri dari:<br>UPLM 1 yaitu pemerataan layanan perpustakaan.<br>UPLM 2 yaitu ketercukupan koleksi perpustakaan.<br>UPLM 3 yaitu ketercukupan tenaga perpustakaan.<br>UPLM 4 yaitu tingkat kunjungan masyarakat.<br>UPLM 5 yaitu perpustakaan yang dibina sesuai SNP.<br>UPLM 6 yaitu keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan.<br>UPLM 7 yaitu anggota perpustakaan.<br>2. Aspek Masyarakat (AM) yang digunakan untuk setiap Unsur Pembangun Literasi Masyarakat yaitu:<br>3. AM untuk UPLM 1 adalah jumlah kelembagaan yang ada di masyarakat.<br>4. AM untuk UPLM 2 adalah jumlah populasi penduduk.<br><br>UPLM Kota :<br>$$UPLM_i = \frac{\frac{Kota+Kec+Kel+SDMI+SMPMTs+SMAMA+PT+Khusus}{AM_i}}{k_i}$$<br>IPLM Kota :<br>$$IPLM\ Kota = \frac{\sum_{i=1}^{7}(UPLM)_i}{7} x100$$<br>Dimana :<br>$UPLM_i$ = Unsur Pembangun Literasi Masyarakat<br>$AM_i$ = Aspek Masyarakat Kota sesuai UPLM yang dihitung<br>$k_i$ = Standarisasi sesuai dengan UPLM yang dihitung<br>IPLM Kota = Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota |
| Interpretasi | IPLM biasanya disajikan dalam skala 0 – 100, di mana semakin tinggi nilainya, semakin baik kondisi literasi masyarakat. Interpretasinya umumnya dibagi menjadi kategori berikut (mengacu pada panduan Perpustakaan Nasional RI): |

| | |
|---|---|
| | 0 – 20 (Sangat Rendah) =Akses dan budaya literasi hampir tidak ada, fasilitas minim dan partisipasi rendah<br>21 – 40 (Rendah) =Fasilitas terbatas, partisipasi literasi rendah, budaya membaca belum terbentuk<br>41 – 60 (Sedang) =Ketersediaan sumber literasi mulai memadai, tetapi pemanfaatannya belum optimal<br>61 – 80 (Tinggi) =Akses baik, masyarakat aktif memanfaatkan fasilitas, budaya membaca mulai kuat<br>91–100 (Sangat Tinggi) =Akses merata, pemanfaatan optimal, budaya literasi mengakar di semua lapisan<br>Poin penting interpretasi:<br>1. Nilai tinggi menunjukkan ketersediaan fasilitas, partisipasi, dan kebiasaan literasi masyarakat sudah baik.<br>2. Nilai rendah mengindikasikan perlunya intervensi kebijakan, peningkatan sarana, dan penguatan budaya literasi.<br>3. Perubahan nilai dari tahun ke tahun menjadi indikator keberhasilan atau kegagalan program literasi |
| Sumber Data | - Survei fasilitas perpustakaan (jumlah, luas, koleksi, layanan).<br>- Survei partisipasi masyarakat (kunjungan, keanggotaan, kegiatan literasi).<br>- Observasi kondisi sarana dan prasarana literasi di lapangan.<br>- Wawancara dengan pengelola perpustakaan, komunitas literasi, atau tokoh masyarakat |
| Frekuensi | Tahunan |

**13) CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) |
| Definisi | Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Rasio. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja |
| Rumus Perhitungan | $CJN = \frac{JPK}{P} x100\%$<br>Keterangan:<br>CJN = Cakupan Jamsos Naker<br>JPK = Jumlah peserta BPJS ketenagakerjaan |

| | |
|---|---|
| | P = Jumlah semesta penduduk bekerja<br>Dimana *peserta* merupakan pekerja penerima upah (PPU), jasa konstruksi dan pekerja bukan penerima upah. Sedangkan *semesta penduduk bekerja* merupakan penduduk bekerja yang berusia 15-65 tahun |
| Interpretasi | Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko-risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak |
| Sumber Data | BPJS Ketenagakerjaan dan BPS, Susenas. |
| Frekuensi | Setiap bulan dan survei dua kali setahun, bulan Rasio dan September setiap tahunnya |

**14) INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN (IPK) BERBASIS ABS SBK (INDEKS)**

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.AA)

**15) KARYA BUDAYA YANG DITETAPKAN**

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.BB)

**16) INDEKS PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (INDEKS)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Perlindungan Khusus Anak (Indeks) |
| Definisi | Indeks Perlindungan Khusus Anak merupakan alat untuk mengukur tingkat perlindungan khusus yang diberikan kepada anak-anak dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Perlindungan khusus anak mencakup kebijakan, regulasi, dan praktik yang dirancang untuk melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi, serta untuk mempromosikan hak-hak anak secara luas. Indeks ini memberikan gambaran holistik tentang upaya perlindungan khusus yang dilakukan untuk anak-anak di suatu wilayah, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi keberhasilan atau kekurangan dalam menjaga hak-hak dan kesejahteraan anak. |
| Rumus Perhitungan | Indeks dihitung berdasarkan penilaian terhadap kebijakan perlindungan anak, implementasi regulasi, akses terhadap layanan sosial dan kesehatan anak, penghapusan kekerasan terhadap anak, dan faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap kondisi perlindungan anak.<br>Rumus perhitungan :<br>$$IPKA = \sum_{i=1}^{n} w_i x S_i$$ |

| | |
|---|---|
| | di mana:<br>• *IPKA* adalah indeks perlindungan khusus anak.<br>• *wi* adalah bobot atau weight yang diberikan untuk indikator ke-i.<br>• *Si* adalah skor atau nilai yang dihasilkan dari indikator ke-i setelah normalisasi.<br>Formula ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan karakteristik data yang ada. Bobot dapat diberikan secara subjektif berdasarkan konsultasi dengan para ahli atau berdasarkan analisis statistik yang lebih mendalam. |
| Interpretasi | Indeks Perlindungan Khusus Anak adalah alat pengukuran yang menyediakan gambaran tentang seberapa baik suatu negara atau wilayah melindungi anak-anak dari berbagai risiko dan ancaman terhadap kesejahteraan mereka. Indeks ini mencakup beberapa aspek penting seperti kebijakan perlindungan anak, implementasi regulasi, ketersediaan layanan kesehatan dan sosial, upaya untuk menghapus kekerasan terhadap anak, dan promosi hak-hak anak secara umum.<br>Interpretasi dari indeks ini dapat membantu dalam beberapa cara:<br>a. **Pemantauan Kemajuan**: Menilai apakah upaya untuk meningkatkan perlindungan anak telah berhasil atau tidak dari tahun ke tahun.<br>b. **Perbandingan Antar Negara/Wilayah**: Membandingkan tingkat perlindungan anak antara negara atau wilayah yang berbeda, membantu identifikasi praktik terbaik dan area yang memerlukan perbaikan.<br>c. **Pengidentifikasian Kebutuhan Prioritas**: Menyoroti area di mana perlindungan anak paling rentan atau kebijakan yang perlu diperkuat untuk meningkatkan perlindungan anak.<br>d. **Advokasi dan Kebijakan**: Memberikan dasar data untuk advokasi publik dan pengembangan kebijakan yang berfokus pada perlindungan anak, memastikan hak-hak mereka terpenuhi dengan lebih baik.<br>Indeks ini penting karena anak-anak sering kali menjadi kelompok yang paling rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran, sehingga perlindungan mereka menjadi prioritas penting dalam agenda kesejahteraan dan hak asasi manusia secara global. |
| Sumber Data | Kementerian PP dan PA |
| Frekuensi | Tahunan |

**17) INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA – iBangga (INDEKS)**

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.G)

### 18) INDEKS KETIMPANGAN GENDER – IKG (INDEKS)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.H)

### 19) INDEKS PEMBANGUNAN GENDER – IPG (ANGKA)

| Nama Indikator | Indeks Pembangunan Gender – IPG (ANGKA) |
|---|---|
| Definisi | Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap IPM laki-laki, yang digunakan untuk mengukur kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek dasar pembangunan manusia: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. |
| Rumus Perhitungan | $IPG = (\frac{IPM\ Perempuan}{IPM\ Laki-laki}) \times 100$<br>*Atau Jika menggunakan Skala Desimal*<br>$IPG = \frac{IPM\ Perempuan}{IPM\ Laki-laki}$<br>**Keterangan Rumus:**<br>• **IPM Perempuan**<br>Indeks Pembangunan Manusia untuk penduduk perempuan, dihitung dari:<br>○ **Angka harapan hidup perempuan**<br>○ **Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah perempuan**<br>○ **Pengeluaran riil per kapita perempuan**<br>• **IPM Laki-laki**<br>Sama seperti IPM perempuan, namun untuk penduduk laki-laki. |
| Interpretasi | Semakin mendekati 100 atau 1.000, semakin kecil kesenjangan pembangunan gender |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PPPA |
| Frekuensi | Tahunan |

## C. ASPEK DAYA SAING DAERAH

### 1) ANGKA KETERGANTUNGAN (%)

| Nama Indikator | Angka Ketergantungan (%) |
|---|---|
| Definisi | Angka ketergantungan atau dependency rasio adalah ukuran yang menjelaskan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) untuk memenuhi kebutuhan penduduk non-produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) |
| Rumus Perhitungan | $AK = \frac{(pddblmproduktif + pddtdkproduktif)}{jmlpddusiaproduktif} x100$<br>AK = Angka ketergantungan |

| | |
|---|---|
| Interpretasi | Semakin rendah angka ketergantungan, semakin baik kondisi ekonomi suatu negara karena beban tanggungan penduduk non-produktif lebih rendah |
| Sumber Data | BPS |
| Frekuensi | Tahunan |

**2) KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PDRB (%)**

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja sasaran visi (II.B)

**3) RASIO PDRB PENYEDIAAN AKOMODASI MAKAN DAN MINUM (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum (%) |
| Definisi | Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi:<br>1. Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan,<br>2. Penyediaan Jasa Makan dan Minum. |
| Rumus Perhitungan | $Rasio\ PDB_{AMM} = \frac{\Delta\ AMM}{PDRB} x100\%$<br>Dimana : Rasio $PDB_{AMM}$ merupakan rasio PDRB sektor akomodasi, makan dan minum dan Δ AMM = nilai tambah sektor akomodasi, makan dan minum |
| Interpretasi | Semakin besar nilai PDB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB regional, ceteris paribus. Ke depan, perlu ada pemutakhiran dari aktivitas-aktivitas yang terkait pariwisata. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| Frekuensi | Tahunan |

**4) PROPORSI PDRB EKONOMI KREATIF TERHADAP PDRB EKONOMI KREATIF PROVINSI (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi (%) |
| Definisi | PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada satu daerah. Dengan demikian, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDRB yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang termasuk:<br>a. Fesyen<br>b. Kuliner<br>c. Kriya<br>d. Film, Animasi dan Video |

| | |
|---|---|
| | e. Pengembang Permainan<br>f. Aplikasi<br>g. Musik<br>h. Seni Pertunjukan<br>i. Fotografi<br>j. Desain Komunikasi Visual<br>k. Televisi dan Radio<br>l. Seni Rupa<br>m. Desain Produk<br>n. Periklanan<br>o. Penerbitan<br>p. Arsitektur<br>q. Desain Interior |
| Rumus Perhitungan | $Rasio\ PDB_{EK} = \frac{\sum PDRB\ 17\ Sek\ EK}{PDRB_{Prov}} x100\%$<br>Dimana : Rasio $PDB_{EK}$ merupakan rasio PDRB sektor Ekonomi Kreatif dan ∑PDRB 17 Sek EK merupakan Akumulasi 17 Sub Sektor Ekonomi Kreatif Regional |
| Interpretasi | Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh subsektor ekonomi kreatif, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB Provinsi, *ceteris paribus*. Namun dalam penerjemahannya ke depan, perlu diperhatikan nilai rupiah dari PDRB subsektor ekonomi kreatif untuk menghindari misinterpretasi |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| Frekuensi | Tahunan |

**5) RASIO KEWIRAUSAHAN (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Rasio Kewirausahaan (%) |
| Definisi | Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. |
| Rumus Perhitungan | $RK = \frac{berusaha\ dibantu\ buruh\ tetap\ daerah}{total\ angkatan\ kerja\ daerah} x100\%$<br>Dimana RK = Rasio kewirausahaan |
| Interpretasi | Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha. |

| | |
|---|---|
| Sumber Data | Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Sakernas dilaksanakan dua kali dalam setahun (Februari dan Agustus). Perhitungan untuk indikator merujuk pada Sakernas bulan Agustus. |

### 6) TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) |
| Definisi | **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan** adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. **Angkatan kerja perempuan** adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. **Penduduk usia kerja perempuan** adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas. |
| Rumus Perhitungan | $$TPAK_p = \frac{PAK_p}{P_{(15+p)}} x100\%$$ Ket : $TPAK_p$ =Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%) <br> $PAK_p$ =Jumlah angkatan kerja perempuan (orang) <br> $P_{(15+p)}$ =Jumlah penduduk Perempuan usia 15 tahun ke atas (orang) |
| Interpretasi | TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (*labor supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) |
| Frekuensi | Dua kali per tahun (Februari dan Agustus) |

### 7) INDEKS INOVASI DAERAH (INDEKS)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja sasaran visi (II.G)

### 8) EKSPOR BARANG DAN JASA (% PDRB)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) |
| Definisi | Ekspor didefiniskan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah |

| | |
|---|---|
| | negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun.<br>Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan.<br>Ekspor barang dan jasa (% PDRB) merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Provinsi |
| Rumus Perhitungan | $$\%Ebj = \frac{Ebj}{PDRB\ ADHK} x100\%$$<br>Ket :<br>%Ebj = Persentase Ekport Barang dan Jasa<br>Ebj = Total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Rupiah)<br>PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Rupiah) |
| Interpretasi | Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. PDB adalah ukuran nilai total produksi dalam suatu negara dalam satu periode waktu. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk- produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi.<br>Ketika ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan, maka pendapatan negara juga meningkat karena peningkatan penjualan dan penerimaan deviden. Peningkatan pendapatan ini mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor. Selain itu, ekspor juga meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri untuk dapat bersaing di pasar global |
| Sumber Data | BPS |
| Frekuensi | Tahunan |

**9) INDEKS INFRASTRUKTUR**

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.FF)

**10) PERSENTASE RT YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP HUNIAN LAYAK DAN TERJANGKAU (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase RT yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau (%) |
| Definisi | Untuk menentukan "hunian layak dan terjangkau" menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sebuah rumah tangga harus memenuhi empat kriteria utama: |

| | |
|---|---|
| | *Kecukupan Luas Tempat Tinggal* : Minimal 7,2 meter persegi luas lahan per kapita.<br>*Akses Air Minum Layak* : Memiliki akses ke sumber air minum yang memenuhi standar.<br>*Akses Sanitasi Layak* : Memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang memadai.<br>*Ketahanan Bangunan* : Memiliki atap, dinding, dan lantai yang terbuat dari material yang kokoh dan tahan lama (misalnya, beton, genteng, tembok, keramik, dll.) |
| Rumus Perhitungan | $\%RThunianlayakterjangkau = \frac{jmlRThunianlayakterjangkau}{jmlRT} x100\%$ |
| Interpretasi | Semakin besar angka persentase menunjukkan semakin besar RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau . |
| Sumber Data | BPS |
| Frekuensi | Tahunan |

**11) RASIO PAJAK DAERAH TERHADAP PDRB (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) |
| Definisi | a. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<br>b. PDRB adalah Penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan.<br>c. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah. |
| Rumus Perhitungan | $RPDRB_t = \frac{tax_t}{PDRB_t} x100\%$<br>Keterangan :<br>$RPDRB_t$ = Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) pada tahun t<br>$tax_t$ = Penerimaan Pajak Daerah pada tahun t<br>$PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t |
| Interpretasi | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak |

| | |
|---|---|
| | daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah |
| Sumber Data | BPS, Sistem Informasi Keuangan Daerah |
| Frekuensi | Tahunan Data Triwulanan sesuai dengan rilis PDRB |

**12) TINGKAT INFLASI (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Tingkat Inflasi (%) |
| Definisi | Kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah provinsi tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. |
| Rumus Perhitungan | $$TI = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} x100\%$$ Perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) berdasarkan *the Classification of Individual Consumption by Purpose* (*COICOP*) 2018. Pengukuran IHK dilakukan melalui Surve Biaya Hidup (SBH) oleh BPS di 90 Kabupaten/Kota sampel IHK |
| Interpretasi | Perubahan IHK menggambarkan tingkat kenaikan harga (inflasi) atau tingkat penurunan harga (deflasi) dari barang dan jasa. Setelah diketahui indeks harga konsumen (IHK) di bulan tersebut, inflasi diketahui melalui perhitungan persentase perubahan IHK. Secara umum, persentase perubahan inflasi dibagi menjadi tiga:<br>a. Inflasi m-t-m membandingkan nilai IHK pada bulan amatan dengan bulan sebelumnya (misal bulan amatan adalah bulan Januari maka bulan sebelumnya adalah Desember).<br>b. Inflasi y-t-d membandingkan IHK pada akhir tahun amatan dengan titik tertentu dalam tahun yang telah berjalan.<br>c. Inflasi y-o-y membandingkan nilai IHK pada bulan amatan tertentu dengan IHK pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya (sebagai contoh untuk menghitung inflasi *year-on-year* September 2023 maka IHK September 2023 dibandingkan dengan IHK September 2022). |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik (catatan : Hingga saat ini BPS tidak me-release data inflasi tingkat Provinsi, melainkan inflasi tingkat Kabupaten/ Kota IHK. Sehingga perlu mendorong BPS untuk dapat mempublikasi tingkat inflasi di tingkat Provinsi |
| Frekuensi | Bulanan |

**13) PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (% PDRB)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) |
| Definisi | Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan.<br>Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah.<br>PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB Provinsi |
| Rumus Perhitungan | $$\%PMTB = \frac{PMTB}{PDRB\ ADHK} x100\%$$<br>Ket :<br>%PMTB =Pembentukan PMTB<br>PMTB =Total PMTB berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Rupiah)<br>PDRB ADHK =Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Rupiah) |
| Interpretasi | PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (*financial leasing*), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (*financial leasing*). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Triwulan dan Tahunan |

**14) TOTAL DANA PIHAK KETIGA / PDRB (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%) |
| Definisi | Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPRBPRS) di suatu daerah provinsi. |

| | |
|---|---|
| | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan.<br>Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu provinsi terhadap PDRB provinsi tersebut pada suatu waktu tertentu. |
| Rumus Perhitungan | $$\%DPK = \frac{DPK}{PDRB} x100$$<br>Keterangan :<br>%DPK = Rasio Dana Pihak Ketiga<br>DPK = Total Dana Pihak Ketiga Bank Umum+Total Dana Pihak Ketiga BPRS-BPRS (di suatu Kota)<br>PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (Atas Dasar Harga Berlaku) |
| Interpretasi | Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai Total DPK/PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB (%), menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah. |
| Sumber Data | Total Dana Pihak Ketiga diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedangkan PDRB diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) |
| Frekuensi | Total Dana Pihak Ketiga : Bulanan<br>PDRB : Triwulan |

**15) NILAI TRANSAKSI SAHAM PER KAPITA (Rp)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Nilai Transaksi Saham per Kapita (rupiah) |
| Definisi | Nilai transaksi saham per kapita menunjukkan nilai transaksi saham per kepala atau persatu orang penduduk di suatu wilayah. Nilai transaksi saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham. |
| Rumus Perhitungan | $$ntr = \frac{nts}{12 * populasi}$$<br>Keterangan :<br>ntr = Nilai transaksi saham berupa nilai rata – rata tahunan<br>nts = Nilai transaksi investor saham per provinsi selama setahun<br>populasi= Jumlah penduduk suatu wilayah |
| Interpretasi | Untuk mengukur size dari pasar modal dapat digunakan berbagai pendekatan. Salah satunya dengan mengukur |

| | |
|---|---|
| | tingkat likuiditas pasar melalui pendekatan rata-rata transaksi. Pasar modal yang aktif memberikan sinyal adanya pertumbuhan perekonomian. Sentimen pasar yang baik kemudian akan meningkatkan performa saham, pada akhirnya akan mempengaruhi nilai kapitalisasi pasar secara keseluruhan. |
| Sumber Data | Otoritas Jasa Keuangan |
| Frekuensi | Tahunan |

**16) TOTAL KREDIT/PDRB (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Total Kredit/PDRB (%) |
| Definisi | Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di suatu wilayah.<br>PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/ wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.<br>Total Kredit/ PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu wilayah terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) wilayah tersebut pada suatu waktu tertentu. |
| Rumus Perhitungan | $$rtk = \frac{tk}{PDRB} 100$$<br>Keterangan :<br>rtk = Rasio Total Penyaluran Kredit Bank Umum + Total Penyaluran Kredit BPR-BPRS terhadap PDRB<br>tk = Rasio Total Penyaluran Kredit Bank Umum + Total Penyaluran Kredit BPR-BPRS<br>PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (Atas Dasar Harga Berlaku) |
| Interpretasi | Total Kredit/ PDRB (%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di wilayah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit/ PDRB (%) menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian wilayah tersebut. |
| Sumber Data | Total Kredit diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan dan PDRB diperoleh dari Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Total Kredit : Bulanan |

| | |
|---|---|
| | PDRB : Triwulan |

### 17) RASIO PDRB SEKTOR JASA KEUANGAN (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%) |
| Definisi | Proporsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Jasa Keuangan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor Jasa Keuangan terhadap PDRB. |
| Rumus Perhitungan | $Rasio\ PDRB\ Sektor\ Jasa\ Keuangan = \frac{Nilai\ Tambah\ Jasa\ Keuangan}{Nilai\ PDRB\ Kota\ Payakumbuh} x100$ |
| Interpretasi | Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait jasa keuangan, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB, *ceteris paribus*. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik Daerah |
| Frekuensi | Tahunan |

### 18) RASIO PDRB SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) |
| Definisi | Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pertanian, kehutanan dan perikanan. |
| Rumus Perhitungan | $Rasio\ PDB_{PKP} = \frac{\Delta\ PKP}{PDRB} x100\%$<br>Dimana : Rasio $PDB_{PKP}$ merupakan rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan ΔPKP = nilai tambah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan |
| Interpretasi | Semakin besar nilai PDB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pertanian, kehutanan dan perikanan maka semakin tinggi proporsinya terhadap PDB regional, ceteris paribus. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| Frekuensi | Tahunan |

## D. ASPEK PELAYANAN UMUM

### 1. LAYANAN URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR

### a) URUSAN PENDIDKAN

#### 1) RATA-RATA LAMA SEKOLAH (TAHUN)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.J)

**2) ANGKA PARTISIPASI KASAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – APK PAUD (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini – APK PAUD (%) |
| Definisi | Indikator yang mengukur tingkat partisipasi anak dalam pendidikan anak usia dini (PAUD) tanpa memandang usia mereka |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah Siswa PAUD / Jumlah Penduduk Usia 4-6 Tahun) x 100% |
| Interpretasi | **APK tinggi (mendekati 100%):**<br>Menunjukkan partisipasi yang tinggi dalam pendidikan PAUD, tetapi bisa juga berarti ada banyak anak yang tidak sesuai usia yang masuk PAUD.<br>**APK rendah:**<br>Menunjukkan bahwa masih banyak anak usia PAUD yang belum mendapatkan akses pendidikan di jenjang ini.<br>**Nilai ideal:**<br>Nilai ideal untuk APK PAUD adalah 100%, yang berarti semua anak usia sekolah (3-6 tahun) terdaftar di PAUD |
| Sumber Data | Profil Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |
| Frekuensi | Tahunan |

**3) ANGKA PARTISIPASI KASAR SEKOLAH DASAR DAN SEDERAJAT - APK SD/MI/Paket A (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar dan Sederajat - APK SD/MI/PAKET A (%) |
| Definisi | Mengukur proporsi seluruh siswa yang terdaftar di SD/MI/Paket A, tanpa memandang usia mereka, dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah dasar (umumnya 7-12 tahun) |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah murid SD/MI/Paket A / Jumlah penduduk usia 7-12 tahun) x 100% |
| Interpretasi | **APK = 100%:**<br>Semua penduduk usia 7-12 tahun terdaftar di SD/MI/Paket A. Ini adalah kondisi ideal.<br>**APK > 100%:**<br>Ada siswa yang usianya di luar 7-12 tahun yang juga bersekolah di SD/MI/Paket A. Ini bisa karena berbagai faktor seperti keterlambatan masuk sekolah atau melanjutkan pendidikan setelah putus sekolah.<br>**APK < 100%:**<br>Ada sebagian penduduk usia 7-12 tahun yang belum terdaftar di SD/MI/Paket A. Ini menunjukkan adanya tantangan dalam akses pendidikan.<br>Perlu dicatat bahwa APK adalah indikator kasar dan tidak memberikan informasi mengenai kualitas pendidikan atau alasan ketidakterlibatan siswa. Untuk mendapatkan |

| | |
|---|---|
| | gambaran yang lebih lengkap, perlu juga mempertimbangkan indikator lain. |
| Sumber Data | Profil Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |
| Frekuensi | Tahunan |

**4) ANGKA PARTISIPASI KASAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEDERAJAT - APK SMP/MTs/Paket B (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama dan Sederajat - APK SMP/MTs/PAKET B (%) |
| Definisi | Rasio jumlah siswa, tanpa memandang usia mereka, yang bersekolah di tingkat SMP/MTs/Paket B, dibagi dengan jumlah penduduk usia sekolah pada umumnya untuk tingkat tersebut (biasanya usia 13-15 tahun) |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah siswa pada tingkat SMP/MTs/Paket B) / (Jumlah penduduk usia 13-15 tahun) x 100% |
| Interpretasi | **APK tinggi:** Menunjukkan bahwa banyak anak usia sekolah (13-15 tahun) yang bersekolah di SMP/MTs/Paket B, bahkan mungkin ada siswa yang berusia di luar rentang usia tersebut.<br>**APK rendah:** Menunjukkan bahwa masih banyak anak usia sekolah yang belum atau tidak bersekolah di SMP/MTs/Paket B |
| Sumber Data | Profil Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |
| Frekuensi | Tahunan |

**5) ANGKA PARTISIPASI MURNI SEKOLAH DASAR DAN SEDERAJAT - APM SD/MI/Paket A) (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar dan Sederajat - APK SD/MI/PAKET A (%) |
| Definisi | Mengukur tingkat partisipasi murni, yaitu berapa banyak anak usia sekolah yang benar-benar bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan usianya |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah siswa usia 7-12 tahun di SD/MI/Paket A / Jumlah penduduk usia 7-12 tahun) * 100% |
| Interpretasi | - APM 100% menunjukkan bahwa semua anak usia sekolah telah bersekolah di tingkat dasar pada usia yang seharusnya.<br>- APM di bawah 100% menunjukkan adanya anak usia sekolah yang belum bersekolah, atau bersekolah di luar usia yang seharusnya (misalnya, anak usia SD/MI/Paket A yang masih bersekolah di PAUD, atau anak usia 13 tahun ke atas yang masih bersekolah di SD/MI/Paket A).<br>APM yang rendah dapat menjadi indikasi adanya kendala aksesibilitas atau faktor lain yang menyebabkan anak-anak tidak bersekolah pada usia yang tepat |
| Sumber Data | Profil Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |

| | |
|---|---|
| Frekuensi | Tahunan |

### 6) ANGKA PARTISIPASI MURNI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEDERAJAT - APM SMP/MTs/Paket B (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama dan Sederajat - APK SMP/MTs/PAKET B (%) |
| Definisi | Persentase murid usia 13-15 tahun yang sedang menempuh pendidikan di tingkat SMP/MTs/Paket B (setara SMP) dari total penduduk usia 13-15 tahun |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah siswa SMP/MTs/Paket B usia 13-15 tahun / Jumlah penduduk usia 13-15 tahun) x 100% |
| Interpretasi | ▯ APM membantu pemerintah dan lembaga pendidikan dalam memantau dan mengevaluasi tingkat partisipasi pendidikan di tingkat SMP/MTs.<br>▯ Data APM dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan partisipasi dan merencanakan program pendidikan yang lebih efektif.<br>▯ APM juga dapat digunakan untuk membandingkan tingkat partisipasi pendidikan antar wilayah atau antar kelompok sosial |
| Sumber Data | Profil Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |
| Frekuensi | Tahunan |

### 7) CAKUPAN PENGUATAN IDIOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN (%)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.CC)

### 8) PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN (SD/SMP) YANG TERAKREDITASI A (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Satuan Pendidikan (SD/SMP) yang Terakreditasi (%) |
| Definisi | Ukuran yang menunjukkan proporsi jumlah Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang telah mendapatkan peringkat akreditasi "A" (Unggul/Amat Baik) dibandingkan dengan total keseluruhan jumlah SD/SMP di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Peringkat akreditasi A menandakan bahwa sekolah tersebut telah mencapai standar kualitas yang sangat baik, biasanya dengan rentang nilai yang tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah Satuan Pendidikan SD/SMP Terakreditasi A / Jumlah Total Satuan Pendidikan SD/SMP) x 100% |
| Interpretasi | • **Satuan Pendidikan:**<br>Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang tertentu, baik jalur formal, nonformal, maupun informal. Dalam konteks SD/SMP, |

| | |
|---|---|
| | ini merujuk pada sekolah formal yang melaksanakan pendidikan pada jenjang dasar.<br>• **Terakreditasi A:**<br>Merupakan hasil Penilaian tertinggi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) yang menunjukkan bahwa satuan pendidikan telah mencapai standar kualitas yang sangat baik berdasarkan 8 (delapan) standar Nasional Pendidikan.<br>• **8 Standar Pendidikan:**<br>Kriteria penilaian akreditasi mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pengelolaan, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, serta standar penilaian.<br>Secara sederhana, SD/SMP Terakreditasi A memiliki kualitas yang sangat baik dalam menjalankan proses pendidikan dan telah mencapai standar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah |
| Sumber Data | Badan Akreditasi Sekolah |
| Frekuensi | Tahunan |

**9) PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN YANG MENCAPAI STANDAR KOMPETENSI MINIMUM PADA ASESMEN TINGKAT NASIONAL UNTUK LITERASI (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk: Literasi (%) |
| Definisi | Proporsi dari seluruh satuan pendidikan yang hasil asesmen literasi memenuhi atau melampaui tingkat minimum yang telah ditetapkan |
| Rumus Perhitungan | Nilai AN Literasi dari Rapor Pendidikan |
| Interpretasi | - **Tinggi:**<br>Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar siswa di satuan pendidikan tersebut memiliki kemampuan literasi membaca yang memadai, sesuai dengan standar yang ditetapkan.<br>- **Rendah:**<br>Persentase yang rendah menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang belum mencapai tingkat kemampuan minimum dalam literasi membaca.<br>- **Analisis:**<br>Data persentase ini dapat digunakan untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan literasi membaca di berbagai satuan pendidikan, serta sebagai dasar untuk perbaikan pembelajaran |
| Sumber Data | Rapor Pendidikan (Kemendikbud) |
| Frekuensi | Tahunan |

**10) PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN YANG MENCAPAI STANDAR KOMPETENSI MINIMUM PADA ASESMEN TINGKAT NASIONAL UNTUK: NUMERASI (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk: Numerasi (%) |
| Definisi | Ukuran yang menunjukkan proporsi sekolah-sekolah yang memenuhi kriteria minimum dalam kemampuan numerasi, yang diukur melalui Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) |
| Rumus Perhitungan | Nilai AN Numerasi dari Rapor Pendidikan |
| Interpretasi | - Tinggi (di atas 75%): Sebagian besar satuan pendidikan mencapai SKM, menunjukkan bahwa sebagian besar siswa di sekolah-sekolah tersebut memiliki kemampuan numerasi yang baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Ini adalah hasil yang positif dan menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pendidikan dalam bidang numerasi telah efektif.<br>- Sedang (50% - 75%): Cukup banyak satuan pendidikan yang mencapai SKM, tetapi masih ada sebagian yang belum. Ini menunjukkan bahwa ada variasi dalam pencapaian kompetensi numerasi di berbagai sekolah. Peningkatan perlu dilakukan di sekolah-sekolah yang masih di bawah standar.<br>Rendah (di bawah 50%) : Sebagian besar satuan pendidikan belum mencapai SKM, menandakan bahwa sebagian besar siswa di sekolah-sekolah tersebut belum memiliki kemampuan numerasi yang memadai. Hal ini perlu menjadi perhatian serius dan membutuhkan intervensi yang lebih intensif untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa di sekolah-sekolah tersebut |
| Sumber Data | Rapor Pendidikan (Kemendikbud) |
| Frekuensi | Tahunan |

**11) PROPORSI PENDUDUK BERUSIA 15 TAHUN KE ATAS YANG BERKUALIFIKASI PENDIDIKAN TINGGI (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) |
| Definisi | Proporsi ini merupakan persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan sampai pada pendidikan tinggi. |
| Rumus Perhitungan | $$PT = \frac{P(15+)_{PT}}{P(15+)} x100\%$$<br>Dimana :<br>PT = % Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi<br>$P(15+)_{PT}$ = Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang menyelesaikan pendidikan tinggi |

| | |
|---|---|
| | PT(15+) = Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas |
| Interpretasi | Semakin besar persentasenya menandakan semakin baiknya akses masyarakat suatu wilayah dalam menempuh pendidikan tinggi |
| Sumber Data | BPS |
| Frekuensi | Tahunan |

**b) URUSAN KESEHATAN**

**1) JUMLAH KEMATIAN IBU (JIWA)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Jumlah Kematian Ibu (Jiwa) |
| Definisi | Indikator ini menunjukkan jumlah kematian ibu selama kehamilan, persalinan atau dalam 42 hari setelah melahirkan |
| Rumus Perhitungan | $jki = kki_n$<br>dimana :<br>jki = jumlah kematian ibu (jiwa)<br>$kki_n$ = kasus kematian ibu pada tahun berkenaan |
| Interpretasi | Jumlah kematian ibu menjadi indikator penting menilai kualittas layanan kesehatan ibu di suatu wilayah, yang berarti dengan layanan yang berkualitas kasus kematian ibu dapat ditekan atau tidak ada sama sekali |
| Sumber Data | Dinas Kesehatan |
| Frekuensi | Tahunan |

**2) CAKUPAN PENEMUAN DAN PENGOBATAN KASUS TUBERKULOSIS (TREATMENT COVERAGE) (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage*) (%) |
| Definisi | Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu |
| Rumus Perhitungan | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberculosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu. |
| Interpretasi | Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting :<br>a. **Penemuan Kasus** merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis. |

| | |
|---|---|
| | b. **Pengobatan Kasus** merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis. |
| Sumber Data | Data Program Kementerian |
| Frekuensi | Tahunan |

### 3) ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN TUBERKULOSIS (*TREATMENT SUCCESS RATE*) (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*) (%) |
| Definisi | Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap |
| Rumus Perhitungan | Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibagi dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan. |
| Interpretasi | Ini adalah indikator penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah |
| Sumber Data | Data Program Kementerian Kesehatan |
| Frekuensi | Tahunan |

### 4) CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%) |
| Definisi | Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah. |
| Rumus Perhitungan | Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia dikali 100%.<br>$$Persentase\ cakupan\ kepesertaan\ JKN = \frac{jumlah\ peserta\ JKN}{jumlah\ penduduk\ Indonesia} x100\%$$ |
| Interpretasi | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting:<br>a. **Akses Pelayanan Kesehatan**: Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan.<br>b. **Kesadaran Masyarakat**: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. |

| | |
|---|---|
| | c. **Komitmen Pemerintah Daerah**: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional.<br>d. **Pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC)**: Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan. |
| Sumber Data | BPJS DJSN |
| Frekuensi | Tahunan |

**5) INDEKS KELUARGA SEHAT**

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja daerah (IV.B.8)

**6) PREVALENSI STUNTING BERDASARKAN E-PPGBM (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Prevalensi Stunting berdasarkan E-PPGBM (%) |
| Definisi | Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010.<br>a. Sangat pendek: Z-score < -3,0<br>b. Pendek: Z-score ≥ -3,0 s/d Z-score < -2,0 |
| Rumus Perhitungan | (1) Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).<br>$PAB(5)P_{\text{stuntin}} = \frac{JAB(5)P_{\text{stunting}}}{JAB(5)} \times 100\%_g$<br>*Keterangan* : $PAB(5)P_{\text{stuntin}}$ = *Prevalensi anak balita yang menderita pendek (stunting)*<br>$JAB(5)P_{\text{stuntin}}$ = Jumlah anak balita pendek (stunting) pada waktu tertentu<br>JAB(5) = Jumlah anak balita pada waktu yang sama |
| Interpretasi | Kategori ambang batas status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) dan Tinggi Badan menurut Umur (TB/U):<br>Sangat pendek : <-3 SD<br>Pendek : -3 SD sampai <-2 SD<br>Normal : -2 SD sampai 2 SD<br>Tinggi : >2 SD |

| | |
|---|---|
| Sumber Data | Data E-PPGBM Dinas Kesehatan |
| Frekuensi | Tahunan |

## c) URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

### 1) KAPASITAS AIR BAKU (M3/DETIK)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Kapasitas Air Baku ($m^3$/detik) |
| Definisi | Air baku adalah jenis air yang menjadi sumber pokok untuk diolah menjadi air minum |
| Rumus Perhitungan | $Q = C\ I\ A\ m^3/detik$<br>Keterangan :<br>Q : besarnya kapasitas debit air baku<br>C : koefisien pengaliran<br>I : intensitas hujan mm/hari<br>A : luas DAS $m^2$ |
| Interpretasi | Air baku merupakan tahapan awal dalam siklus penyediaan air bersih kepada masyarakat yang dapat bersumber dari air permukaan maupun air tanah. Kualitas air baku sangat penting karena akan berdampak langsung pada kualitas air minum yang dihasilkan. |
| Sumber Data | Dinas PUPR Kota Payakumbuh |
| Frekuensi | Tahunan |

### 2) PERSENTASE INFRASTRUKTUR DAERAH YANG DIBANGUN SESUAI DENGAN RENCANA TATA RUANG (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Infrastruktur Daerah yang Dibangun sesuai dengan Rencana Tata Ruang (%) |
| Definisi | Mengukur proporsi pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tata ruang |
| Rumus Perhitungan | Perbandingan antara jumlah/ panjang infrastruktur yang telah dibangun kewenangan Dinas PUPR (Jalan, drainase, irigasi, trotoar, SPAM, prasarana sampah dan sanitasi) dibandingkan dengan rencana sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. |
| Interpretasi | Mengindikasikan seberapa baik pembangunan infrastruktur di suatu daerah mengikuti rencana telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) |
| Sumber Data | Dinas PUPR Kota Payakumbuh |
| Frekuensi | Tahunan |

### 3) INDEKS PENGATURAN, PEMBINAAN, PELAKSANAAN TATA RUANG (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Tata Ruang (%) |

| | |
|---|---|
| Definisi | indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penataan ruang |
| Rumus Perhitungan | *20% capaian aspek pengaturan + 15% capaian aspek pembinaan + 25% capaian aspek perencanaan + 20% capaian aspek pemanfaatan + 20% capaian aspek pengendalian.* |
| Interpretasi | Indeks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan tata ruang digunakan untuk membantu pemerintah daerah dalam memantau dan mengevaluasi sejauh mana aturan, bimbingan, dan implementasi tata ruang telah berjalan sesuai rencana dan peraturan yang berlaku. |
| Sumber Data | Dinas PUPR Kota Payakumbuh |
| Frekuensi | Tahunan |

**4) AKSES RUMAH TANGGA TERHADAP SUMBER AIR MINUM JARINGAN PERPIPAAN (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%) |
| Definisi | Jumlah RT yang terlayani jaringan perpipaan dibandingkan dengan jumlah RT kota Payakumbuh secara keseluruhan |
| Rumus Perhitungan | $\frac{Jumlah\ RT\ yang\ terlayani\ jaringan\ aman\ perpipaan}{Jumlah\ RT\ keseluruhan} x100\%$ |
| Interpretasi | Menunjukkan proporsi rumah tangga yang mendapatkan air minum langsung dari sistem jaringan perpipaan, yang disediakan oleh PDAM atau sistem penyediaan air perpipaan lainnya |
| Sumber Data | Dinas PUPR, BPS |
| Frekuensi | Tahunan |

**d) URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN**

**1) PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Rumah Layak Huni (%) |
| Definisi | Terlaksananya peningkatan kualitas RTLH |
| Rumus Perhitungan | Persentase Rumah Layak Huni = Jumlah Rumah Layak Huni dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rumah |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase rumah layak huni semakin kecil masyarakat yang memiliki rumah dengan kualitas rusak sedang dan berat |
| Sumber Data | Pelaksanaan kegiatan |
| Frekuensi | Tahunan |

**2) PERSENTASE RT YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP HUNIAN LAYAK DAN TERJANGKAU (%)**

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja daerah (IV.C.10)

### 3) PERSENTASE PSU PERUMAHAN YANG DIBANGUN PENGEMBANG YANG TELAH DIKELOLA OLEH PEMERINTAH KOTA (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase PSU Perumahan yang Dibangun Pengembang yang telah Dikelola oleh Pemerintah Kota (%) |
| Definisi | Terlaksananya pengelolaan oleh pemerintah daerah terhadap PSU perumahan yang dibangun pengembang baik dalam bentuk serah terima maupun intervensi peningkatan dari PSU perumahan tersebut |
| Rumus Perhitungan | $\% = \frac{a}{b}$<br>a : PSU perumahan yang telah dikelola oleh pemerintah daerah baik yang telah difasilitasi serah terima PSU maupun yang telah dilakukan intervensi peningkatan dan Pembangunan<br>b : Jumlah perumahan yang ada di Kota Payakumbuh |
| Interpretasi | Semakin besar angka persentase menunjukkan semakin besar PSU perumahan yang telah diserahterimakan dan atau yang telah dilakukan intervensi oleh pemerintah daerah. |
| Sumber Data | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| Frekuensi | Tahunan |

## e) URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

### 1) PERSENTASE PENEGAKAN PERDA (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Penegakan Perda (%) |
| Definisi | Persentase jumlah Perda dan Perkada yang telah ditegakkan oleh Satpol PP dibandingkan dengan total jumlah Perda dan Perkada yang menjadi target penegakan pada tahun berjalan |
| Rumus Perhitungan | $\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang Diselesaikan}}{\textit{Jumlah Pelanggaran Pengaduan yang Masuk}} \; x\; 100\%$<br>**Keterangan :**<br>Jumlah pelanggaran pengaduan yang masuk bisa melalui social media, telepon, dan pengaduan langsung. |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan semakin efektif penegakan Perda dan Perkada di daerah tersebut. |
| Sumber Data | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| Frekuensi | Tahunan |

### 2) ANGKA KRIMINALITAS (PER 1000 PENDUDUK) (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Angka Kriminalitas (per 1000 Penduduk) (%) |
| Definisi | Indikator ini mengukur jumlah kejahatan yang dilaporkan dalam suatu wilayah dalam satu tahun, dinyatakan sebagai jumlah kejahatan per 1000 penduduk. Ini |

| | |
|---|---|
| | memberikan gambaran tentang tingkat kejahatan relatif dalam populasi yang diberikan untuk menilai tingkat keamanan daerah. |
| Rumus Perhitungan | $$Angka\ Kriminalitas\ (per\ 1000\ penduduk = \frac{Jumlah\ Kejahatan}{Jumlah\ Penduduk} x100$$ |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka kriminalitas, maka semakin tidak aman suatu daerah. Sebaliknya semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin aman suatu daerah. Tujuannya adalah memantau dan menganalisis tren kriminalitas untuk keperluan kebijakan keamanan dan pencegahan kejahatan. |
| Sumber Data | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| Frekuensi | Tahunan |

**3) PERSENTASE PENURUNAN PELANGGARAN TRANTIBUM (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum (%) |
| Definisi | Mengukur efektivitas kegiatan pengawasan dan penegakan Perda oleh Satpol PP dalam menurunkan jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibandingkan periode sebelumnya. |
| Rumus Perhitungan | $$\frac{\text{Pelanggaran Tahun (n} - 1) - Pelanggaran\ Tahun\ n}{Pelanggaran\ Tahun\ n - 1} x\ 100\%$$ **Keterangan:** • Pelanggaran tahun n-1 merupakan jumlah pelanggaran yang terjadi pada tahun sebelumnya • Pelanggaran tahun n merupakan jumlah pelanggaran yang terjadi pada tahun ini (tahun perhitungan). |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai, semakin efektif pengawasan Perda dan Perkada yang dilakukan di Kota Payakumbuh |
| Sumber Data | Satpol PP dan Damkar |
| Frekuensi | Tahunan |

**4) PESENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Pesentase Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan (%) |
| Definisi | Persentase jumlah gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang berhasil ditangani dan diselesaikan oleh Satpol PP dalam kurun waktu tertentu. |

| | |
|---|---|
| Rumus Perhitungan | $\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang Diselesaikan}}{\textit{Jumlah Pelanggaran Pengaduan yang Masuk}} \; x\; 100\%$<br>**Keterangan :**<br>Jumlah pelanggaran pengaduan yang masuk bisa melalui sosial media, telepon, dan pengaduan langsung. |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase penyelesaian pengaduan, semakin bagus kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| Sumber Data | Laporan Bulanan Bidang Tibum Tranmas dan Bidang Penegakan Peraturan Daerah |
| Frekuensi | Tahunan |

**f) URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**1) PERSENTASE WARGA KOTA PAYAKUMBUH YANG MENERIMA PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Warga Kota Payakumbuh yang Menerima Pelayanan Penanggulangan Bencana (%) |
| Definisi | Persentase warga kota Payakumbuh yang menerima serangkaian pelayanan dan Tindakan untuk **mencegah, mengurangi risiko, merespons, dan memulihkan** kondisi akibat bencana, baik yang bersifat alam, non-alam, maupun sosial yang berhasil ditangani dan diselesaikan oleh BPBD dalam kurun waktu tertentu. |
| Rumus Perhitungan | $\frac{\text{Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana} + \text{Persentase penanganan tanggap bencana darurat} + \text{Persentase Penanganan Pasca Bencana}}{3}$ |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase pelayanan yang diberikan, semakin bagus kinerja Badan Penanggulangan bencana Daerah |
| Sumber Data | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Frekuensi | Tahunan |

**g) URUSAN SOSIAL**

**1) TINGKAT KEMISKINAN (%)**

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.B)

**2) PERSENTASE PPKS YANG TERLAYANI (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase PPKS yang terlayani (%) |
| Definisi | Indikator ini mengukur persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang telah memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar melalui intervensi layanan sosial oleh pemerintah dan/atau lembaga kesejahteraan sosial. |

| | |
|---|---|
| Rumus Perhitungan | $\%PPKSterlayani = \frac{jPPKSterlayani}{JtotPPKS} x100$<br>Keterangan:<br>• %PPKSterlayani = Persentase PPKS terlayani<br>• jPPKSterlayani = Jumlah PPKS terlayani<br>• jtotPPKS = Jumlah seluruh PPKS |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilainya, menunjukkan keberhasilan dalam menjangkau kelompok rentan melalui layanan sosial |
| Sumber Data | Dinas Sosial Kota Payakumbuh |
| Frekuensi | Tahunan |

**3) PERSENTASE PENERIMA MANFAAT YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%) |
| Definisi | Indikator ini mengukur persentase penerima manfaat yang telah terpenuhi kebutuhan dasar yang meliputi makanan, air bersih, sanitasi, perumahan, pendidikan dan layanan kesehatan. |
| Rumus Perhitungan | $\%PMterpenuhi = \frac{jPMterpenuhi}{JtotPM} x100$<br>Keterangan:<br>• %Pmterpenuhi =Persentase Penerima Manfaat terpenuhi kebutuhan dasarnya<br>• jPMterpenuhi =Jumlah Penerima Manfaat terpenuhi kebutuhan dasarnya<br>• jtotPM =Jumlah seluruh Penerima Manfaat |
| Interpretasi | tingkat pencapaian yang tinggi menunjukkan bahwa program tersebut berhasil memberikan manfaat yang signifikan bagi penerimanya |
| Sumber Data | Dinas Sosial Kota Payakumbuh |
| Frekuensi | Tahunan |

## 2. LAYANAN URUSAN WAJIB TERKAIT NON PELAYANAN DASAR

### a) URUSAN KETENAGAKERJAAN

**1) TINGKAT PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (Rp. JUTA/ TENAGA KERJA)**

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja sasaran visi (II.I)

**2) TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) |
| Definisi | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Angkatan kerja adalah penduduk |

| | |
|---|---|
| | usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas |
| Rumus Perhitungan | $TPAK = \frac{PAK}{P} x100\%$<br>dimana :<br>TPAK = Tingkat partisipasi angkatan kerja<br>PAK = Jumlah angkatan kerja<br>P = Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas |
| Interpretasi | TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (labor supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) |
| Frekuensi | Dua kali per tahun (Februari dan Agustus) |

### 3) PROPORSI PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA FORMAL (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) |
| Definisi | Indikator |
| Rumus Perhitungan | $P_f = \frac{jlkf}{tplk} x100$<br>dimana :<br>$P_f$ = Proporsi penciptaan lapangan kerja formal<br>jlkf = Jumlah lapangan kerja formal<br>tplk = Total penciptaan lapangan kerja |
| Interpretasi | Semakin tinggi proporsinya lapangan kerja formal semakin terjaminnya kondisi pekerja di suatu wilayah |
| Sumber Data | BPS |
| Frekuensi | Tahunan |

### 4) TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN (%)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja daerah (III.C.6)

### 5) TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.C)

### 6) PERSENTASE PENYERAPAN TENAGA KERJA (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%) |
| Definisi | Persentase Penyerapan Tenaga Kerja adalah ukuran yang menunjukkan berapa besar bagian dari Angkatan kerja |

| | |
|---|---|
| | yang berhasil mendapatkan pekerjaan dalam suatu wilayah dalam periode tertentu |
| Rumus Perhitungan | $\text{PPTK} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang bekerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} x\ 100\%$ |
| Interpretasi | Persentase penyerapan tenaga kerja menunjukkan jumlah Angkatan kerja yang terserap di lapangan kerja, sisanya menunjukkan jumlah pengangguran |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik (diolah) |
| Frekuensi | Tahunan |

**7) PERSENTASE PEKERJA LULUSAN PENDIDIKAN MENENGAH TINGGI BEKERJA DI BIDANG KEAHLIAN MENENGAH TINGGI (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) |
| Definisi | Persentase Penyerapan Tenaga Kerja adalah ukuran yang menunjukkan berapa besar bagian dari Angkatan kerja yang berhasil mendapatkan pekerjaan dalam suatu wilayah dalam periode tertentuPersentase ini merupakan persentase dari penduduk dengan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja pada bidang keahlian menengah tinggi |
| Rumus Perhitungan | %LMT=LMT PMT $x$ 100%<br>dimana :<br>%LMT = % Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi<br>LMT = Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi<br>PMT = Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi |
| Interpretasi | Semakin besar persentasenya menandakan baiknya kondisi ekonomi pada suatu wilayah dimana telah dapat menampung pekerja sesuai pendidikannya |
| Sumber Data | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh |
| Frekuensi | Tahunan |

**8) CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN/ CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (%)**

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja daerah (IV.B.13)

**9) JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS YANG MENDAPATKAN FASILITASI DARI UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN/ATAU DARI DINAS YANG MENANGANI BIDANG KETENAGAKERJAAN (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/ atau dari Dinas yang Menangani Bidang Ketenagakerjaan (%) |
| Definisi | Keberadaan Angkatan kerja penyandang disabilitas harus mendapat perhatian khusus pemerintah daerah. Keterbatasan yang mereka miliki seharusnya tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.<br>Karena keterbatasannya, Penyandang disabilitas memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja yang lebih rendah dibandingkan non-penyandang disabilitas. Hal ini juga menyebabkan Sebagian besar dari Angkatan kerja penyandang disabilitas ini berada di level 40 % ekonomi terendah.<br>Sesuai dengan undangn – undang dan pelaksanaan Pembangunan ekonomi yang inklusif maka fasilitasi terhadap Angkatan kerja penyandang disabilitas ini menjadi suatu keharusan bagi pemerintah. |
| Rumus Perhitungan | *Jumlah Penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau Dari Dinas yang menangani bidang ketengakerjaan = Jumlah Angkatan kerja penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi ketenagakerjaan dari unit layanan ketenagakerjaan pemerintah daerah* |
| Interpretasi | Semakin tinggi Jumlah Penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau Dari Dinas yang menangani bidang ketengakerjaan, menunjukkan semakin besar perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas tersebut, yang menunjukkan berjalannya inklusifitas Pembangunan (Pembangunan untuk semua) |
| Sumber Data | Dinas yang mengampu urusan ketenagakerjaan |
| Frekuensi | Semesteran, Tahunan |

**10) JUMLAH UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN DI TINGKAT KAB/KOTA (UNIT LAYANAN)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Jumlah unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan di Tingkat Kab/Kota (unit layanan) |
| Definisi | Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang ketenagakerjaan adalah fasilitas layanan yang dirancang untuk membantu penyandang disabilitas mendapatkan hak dan layanan secara inklusif dan adil khususnya terkait ketenagakerjaan. |

| | |
|---|---|
| | ULD Ketenagakerjaan berfungsi sebagai jembatan antara penyandang disabilitas dan dunia kerja untuk menciptakan ketenagakerjaan yang inklusif, adil, dan setara, baik dari sisi pelatihan, penempatan, hingga adaptasi kerja.<br><br>Berdasarkan Permenaker No. 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengembangan ULD Ketenagakerjaan, berikut adalah fungsi-fungsi ULD secara rinci:<br>a. Fasilitasi Akses Kerja untuk Penyandang Disabilitas<br>b. Pemberian Konseling Karir dan Bimbingan<br>c. Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan<br>d. Pemberdayaan dan Penempatan Kerja<br>e. Fasilitasi kepada Pemberi Kerja<br>f. Penyuluhan dan Advokasi<br>g. Koordinasi dan Kemitraan |
| Rumus Perhitungan | *Jumlah unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan di Tingkat Kab/Kota* |
| Interpretasi | Ada tidaknya unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan menunjukkan perhatian dan keseriusan pemerintah dalam pelayanan untuk semua, khususnya penyandang disabilitas. |
| Sumber Data | Dinas yang mengampu urusan ketenagakerjaan |
| Frekuensi | Semesteran, Tahunan |

**b) URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**1) INDEKS KETIMPANGAN GENDER – IKG (INDEKS)**

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.H)

**2) INDEKS PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja daerah (IV.C.16)

**3) INDEKS PERLINDUNGAN ANAK (INDEKS)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Perlindungan Anak (Indeks) |
| Definisi | Angka yang menggambarkan pencapaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak meliputi hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhanalternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus |
| Rumus Perhitungan | $IPA = \sum_{j=1}^{5}(W_j \; x \; Indeks \; K_j)$<br><br>Formula ini digunakan untuk menghitung Indeks Perlindungan Anak (IPA), yaitu indikator komposit yang |

| | |
|---|---|
| | mengukur tingkat perlindungan anak di suatu wilayah (misalnya kota, kabupaten, atau provinsi).<br>Berikut penjelasan setiap komponennya:<br>• IPA = Nilai akhir Indeks Perlindungan Anak.<br>• Σ = Simbol penjumlahan (sigma) yang menunjukkan bahwa perhitungan dilakukan untuk semua komponen.<br>• j = 1 sampai 5 = Menandakan bahwa ada 5 dimensi atau klaster yang dinilai dalam perlindungan anak.<br>• $W_j$ = Bobot untuk dimensi ke-j. Setiap dimensi memiliki bobot yang mencerminkan tingkat kepentingannya.<br>• Indeks Kj = Nilai indeks untuk dimensi ke-j, yang diperoleh dari pengukuran indikator-indikator spesifik di bidang tersebut.<br>Secara sederhana, formula ini menunjukkan bahwa nilai IPA adalah penjumlahan dari hasil perkalian bobot tiap dimensi ($W_j$) dengan skor indeks dimensi tersebut (Indeks $K_j$).<br>Contoh Dimensi Perlindungan Anak ($K_j$):<br>1. Hak Sipil dan Kebebasan Anak<br>2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif<br>3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan<br>4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya<br>5. Perlindungan Khusus |
| Interpretasi | Nilai IPA tinggi, semakin baik upaya pemerintah dalam perlindungan anak |
| Sumber Data | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Frekuensi | Tahunan |

**4) INDEKS PEMBANGUNAN GENDER – IPG (ANGKA)**

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja daerah (IV.B.19)

**5) TINGKAT KATEGORI CAPAIAN ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA – APE (KATEGORI)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Tingkat Kategori Capaian Anugerah Parahita Ekapraya – APE (Kategori) |
| Definisi | **Anugerah Parahita Ekapraya (APE)** adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui **Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)** kepada kementerian/lembaga serta pemerintah daerah yang menunjukkan komitmen dan prestasi dalam penerapan **Pengarusutamaan Gender (PUG)** untuk mewujudkan kesetaraan gender. Ada **empat kategori** capaian dalam APE, yang mencerminkan tingkat kematangan pelaksanaan PUG:<br>• **Pratama** (Pemula)<br>• **Madya** (Pengembang) |

| | |
|---|---|
| | • **Utama** (Peletakan dasar & keberlanjutan)<br>**Mentor** (Pembina/pemimpin) |
| Rumus Perhitungan | Penilaian APE berdasarkan **tujuh komponen/prasyarat utama PUG**, yaitu:<br>1. Komitmen (misalnya peraturan daerah/perbup PUG),<br>2. Kebijakan (RPJMD, Renstra OPD, surat keputusan terkait PUG),<br>3. Kelembagaan (Pokja PUG, analisis teknis, focal point),<br>4. Sumber daya (anggaran, SDM),<br>5. Sistem informasi dan data terpilah gender,<br>6. Alat analisis gender,<br>7. Partisipasi masyarakat<br>Belum dipublikasikan **rumus matematis publik** yang menjelaskan pengolahan atau pemeringkatan. Penilaian dilakukan melalui penginputan di Aplikasi KPPPA, untuk diverifikasi oleh tim independen. |
| Interpretasi | **Skala kategori APE** mencerminkan **tingkat kematangan dan komitmen daerah dalam PUG,** dari tahap pemula hingga mentor/pembina. |
| Sumber Data | Kementerian PPPA |
| Frekuensi | Setiap dua tahun sekali (biennial) |

### 6) TINGKAT KATEGORI CAPAIAN KOTA LAYAK ANAK – KLA (KATEGORI)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Tingkat Kategori Capaian Kota Layak Anak – KLA (Kategori) |
| Definisi | **Kota Layak Anak (KLA)** adalah kabupaten/kota yang menerapkan sistem pembangunan berbasis **hak anak.** Sistem ini mengintegrasikan **komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara menyeluruh dan berkelanjutan** dalam kebijakan, program, dan kegiatan guna menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak di wilayah tersebut |
| Rumus Perhitungan | Penilaian KLA berbasis **skor komposit** yang dihitung dari berbagai indikator kelembagaan dan klaster.<br>Berdasarkan Permen PPPA No. 12 Tahun 2011, indikator KLA terdiri dari:<br>1. **Penguatan Kelembagaan** (3 indikator), misalnya adanya peraturan daerah, gugus tugas, dan data Profil Anak setiap tahun.<br>2. **Lima Klaster Hak Anak** (total 24 indikator), meliputi:<br>o Hak Sipil dan Kebebasan<br>o Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif<br>o Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan<br>o Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya<br>Perlindungan Khusus |
| Interpretasi | Hasil penilaian ini kemudian menghasilkan **peringkat capaian KLA**, biasanya berupa kategori (misalnya Pratama, Madya, Utama, Mentor), meski struktur kategorial ini lebih umum |

| | |
|---|---|
| | ditemukan di APE. **Semakin banyak indikator yang terpenuhi**, semakin tinggi skor dan kategori capaian KLA. |
| Sumber Data | Permen PPPA, laporan pemda, verifikasi tim evaluasi |
| Frekuensi | Tahunan |

### 7) PERSENTASE ARG PADA BELANJA LANGSUNG APBD (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%) |
| Definisi | **Presentasi anggaran yang dialokasikan** untuk kegiatan yang memiliki dampak positif langsung terhadap pemberdayaan perempuan dan pengurangan ketimpangan gender. |
| Rumus Perhitungan | $ARG = (\frac{Anggaran\ Responsif\ Gender}{Total\ Anggaran\ Pemerintah}) \times 100\%$<br><br>**Keterangan Rumus:**<br>• **Anggaran Responsif Gender**<br>Merupakan total anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan yang memiliki tujuan atau hasil yang jelas terkait dengan pemberdayaan perempuan dan pengurangan kesenjangan gender. Ini bisa mencakup:<br>o Program pendidikan untuk perempuan<br>o Layanan kesehatan yang ramah gender<br>o Perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan<br>o Infrastruktur yang mendukung kesetaraan gender<br>o Proyek pengurangan kemiskinan berbasis gender<br>**Total Anggaran Pemerintah**<br>Adalah total anggaran yang disetujui untuk setiap tahun oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang mencakup seluruh sektor tanpa memperhitungkan dimensi gender. |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentasenya, semakin besar komitmen pemerintah terhadap kebijakan responsif gender |
| Sumber Data | Dokumen Anggaran Pemerintah (APBN/APBD), Kementerian Keuangan, Bappenas, Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Tahunan |

### 8) PERSENTASE ANAK KORBAN KEKERASAN YANG DITANGANI INSTANSI TERKAIT KABUPATEN/KOTA (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota (%) |
| Definisi | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/ Kota merupakan persentase anak korban kekerasan (fisik, seksual, psikis) yang memperoleh akses penuh terhadap layanan yang komprehensif dari lembaga pemerintah dan mitra terkait |
| Rumus Perhitungan | $\%anakterlynifas = \frac{janakkrbnterlynifas}{jtotanakkrbn} x100\%$ |

| | |
|---|---|
| | Dimana :<br>%anakterlynifas =Persentase anak korban kekerasan yang dilayani instansi terkait<br>janakkrbnterlynifas =Jumlah anak korban kekerasan yang dilayani instansi terkait<br>jtotanakkrbn =Jumlah anak korban kekerasan |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentasenya, semakin baik ketersediaan layanan bagi anak korban kekerasan |
| Sumber Data | DP3AP2KB |
| Frekuensi | Tahunan |

**c) URUSAN PANGAN**

**1) KETERSEDIAAN PANGAN UTAMA**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Ketersediaan Pangan Utama |
| Definisi | Penyediaan pangan yang di ukur menggunakan salah satu instrumen yangada pada Prognosa Neraca Pangan yaitu pengadaan/ penyediaan pangan (FoodSupply) |
| Rumus Perhitungan | penyediaan pangan (Food Supply)<br>FD = O – (Δ St) + M-X – (F+S+I+W+Rou)<br>dimana :<br>FD : Ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk<br>O : Produksi (input / output)<br>Δ St : Stok akhir - Stok awal<br>M : Impor<br>X : Ekspor<br>F : Pakan<br>S : Bibit<br>I : Industri<br>W : Tercecer<br>Rou : Penggunaan lain |
| Interpretasi | Ketersediaan pangan utama adalah komoditi beras untuk dikonsumsi |
| Sumber Data | Prognosa Neraca Pangan |
| Frekuensi | Bulanan |

**2) PREVALENSI KETIDAKCUKUPAN KONSUMSI PANGAN (PREVALENCE OF UNDERNOURISHMENT)**

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.D)

### 3) SKOR PPH KONSUMSI

| Nama Indikator | Skor PPH Konsumsi |
|---|---|
| Definisi | Nilai kualitas keragaman konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah berdasarkan atas proporsi keseimbangan energi menurut kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. |
| Rumus Perhitungan | Mengelompokkan pangan menjadi 9 kelompok pangan ( Padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/ biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, aneka bumbu dan bahan minuman). 2. Mengkonversi ke dalam bentuk, jenis, dan satuan yang sama. 3. Menghitung kandungan energi setiap komoditas pangan yang dikonsumsi dengan bantuan Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM). Kolom energi dalam DKBM menunjukkan kandungan energi (kkal)per 100 gram bagian yang dapat dimakan. Selanjutnya besaran energi setiap jenis pangan dijumlahkan menurut kelompok pangannya. 4. Menjumlahkan total energi dari masing-masing kelompok pangan sehingga akan diketahui total energi dari seluruh kelompok pangan. 5. Menghitung kontribusi energi dari setiap kelompok pangan terhadap total energi aktual. 6. Menghitung kontribusi energi dari setiap kelompok pangan terhadap Angka kecukupan Energi ideal. 7. Menghitung skor aktual berdasarkan kontribusi aktual dikalikan bobot masing-masing kelompok pangan. 8. Menghitung skor AKE setiap kelompok pangan dengan bobotnya masing-masing. 9. Menghitung shor PPH setiap kelompok pangan. 10. Menghitung Total Skor PPH. |
| Interpretasi | Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan bergizi seimbang konsumsi pangan penduduk. |
| Sumber Data | SUSENAS |
| Frekuensi | Tahunan |

### 4) TINGKAT KEAMANAN PANGAN

| Nama Indikator | Tingkat Keamanan Pangan |
|---|---|
| Definisi | Perbandingan keamanan pangan yang beredar di masyarakat yaitu jumlah sampel bahan pangan aman dikonsumsi hasil pengujian terhadap jumlah total sampel yangdi uji. |
| Rumus Perhitungan | Jml sampel bahan pangan yg aman dikonsumsi apabila dibawah BMR (Batas Minimal Residu) dan tidak tercemar bahan yang dilarang<br>*Jumlah total sampel yang diambil x* 100% |
| Interpretasi | Pangan aman merupakan pangan yang harus layak dikonsumsi yaitu pangan yang tidak busuk, tidak menjijikkan, dan bermutu baik, serta bebas dari tiga |

| | |
|---|---|
| | cemaran yaitu cemaran biologi, kimia dan cemaran fisik. Bahan pangan yang dikategorikan aman apabila ≥80% sample yang diuji aman. |
| Sumber Data | Hasil uji sampel dari Laboratorium |
| Frekuensi | Tahunan |

**5) STABILISASI HARGA BERAS, CABE, DAN BAWANG (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Stabilitas Harga Beras, Cabe dan Bawang (%) |
| Definisi | Coefisien Variasi Harga Bahan Pangan Pokok dan Strategis (CV) adalah indikator yang menggambarkan tingkat disparitas harga bahan<br>pangan pokok dan strategis dipasar dimana Harga beras dinyatakan stabil jika gejolak harga beras di suatu wilayah kurang dari 10% dari kondisi normal, Harga cabe dinyatakan stabil jika gejolak harga cabe di suatu wilayah kurang dari 25% dari kondisi normal, dan Harga bawang dinyatakan stabil jika gejolak harga bawang di suatu wilayah kurang dari 25% dari kondisi normal |
| Rumus Perhitungan | CV = (Standar Deviasi/Rata rata harga tingkat konsumen) x 100% |
| Interpretasi | Koefisien Keragaman adalah simpangan baku dibagi dengan rata–rata. Digunakan untuk menunjukkan fluktuasi harga dalam satu periode. Koefisien keragaman yang semakin besar, maka data stabilitas harga akan semakin fluktuasi. Perhitungan ini sama untuk semua kebutuhan pokok |
| Sumber Data | Survei harga yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan |
| Frekuensi | Bulanan |

**6) INDEK KETAHANAN PANGAN**

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja daerah (IV.A.1)

**d) URUSAN PERTANAHAN**

**1) INDEKS TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (%) |
| Definisi | Ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana administrasi pertanahan berjalan tertib dan teratur sesuai dengan aturan yang berlaku. |
| Rumus Perhitungan | Indeks dengan pembobotan dari : (65% persentase capaian sertifikasi tanah pemkot + 35% capaian pemenuhan kebutuhan pertanahan) x 100. |
| Interpretasi | Indeks ini mencerminkan kualitas dan efektivitas pengelolaan administrasi pertanahan, termasuk pendaftaran tanah, penerbitan sertifikat, dan pelayanan publik di bidang pertanahan. Indeks Tertib Administrasi Pertanahan mencakup aspek tertib hukum, tertib |

| | |
|---|---|
| | administrasi, tertib penggunaan dan tertib pemeliharaan & lingkungan hidup |
| Sumber Data | Dinas PUPR Kota Payakumbuh |
| Frekuensi | Tahunan |

## e) URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

### 1) PERSENTASE TIMBULAN SAMPAH TEROLAH DI FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH (%)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.EE)

### 2) PERSENTASE RTH PUBLIK (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase RTH Publik (% |
| Definisi | Indikator yang mengukur proporsi luas ruang terbuka hijau (seperti taman, hutan kota, kebun, dan area vegetasi lainnya) terhadap total luas area yang tersedia dalam suatu wilayah. |
| Rumus Perhitungan | $$Persentase\ RTH = \left(\frac{Luas\ RTH}{Luas\ Wilayah}\right) \times 100\%$$<br>**Keterangan Rumus:**<br>• **Luas RTH:** Merupakan luas total ruang terbuka hijau yang ada dalam wilayah yang dihitung (biasanya dalam satuan meter persegi atau hektar).<br>• **Luas Wilayah:** Merupakan luas total area atau wilayah yang dihitung (biasanya dalam satuan meter persegi atau hektar).<br>• Hasil dari perhitungan ini kemudian dikalikan dengan 100 untuk menghasilkan persentase. |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase RTH, semakin baik kualitas lingkungan dan ketersediaan ruang untuk aktivitas rekreasi serta fungsi ekologis lainnya. |
| Sumber Data | Dinas Tata Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Lingkungan Hidup |
| Frekuensi | Tahunan |

### 3) INDEKS KUALITAS AIR (INDEKS)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Kualitas Air (Indeks) |
| Definisi | Nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) |
| Rumus Perhitungan | $$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_{2_m} + (C_i/L_{ij})_{2R}}{2}}$$<br>Dimana |

| | |
|---|---|
| | $L_{ij}$ : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j)<br>$C_i$ : Konsentrasi sampel Paramenter kualitas air (i)<br>$IP_j$ : Pencemaran bagi peruntukan (j)<br>$IP_j$ : $(C_i/L_{ij}, C^2/L^2_j, ....)$<br>$(C_i/L_{ij})$Maksimum : Nilai Maksimum dari $C_i/L_{ij}$<br>$(C_i/L_{ij})$Rata-rata : Nilai rata-rata dari $C_{ij}/L_{ij}$ |
| Interpretasi | Kategori Index Lingkungan Hidup yaitu :<br>a. sangat baik 90 ≤ IKLH ≤ 100<br>b. baik 70 ≤ IKLH ≤ 90<br>c. sedang 50 ≤ IKLH ≤ 70<br>d. kurang 25 ≤ IKLH ≤ 50<br>e. sangat kurang 0 ≤ IKLH ≤ 25 |
| Sumber Data | Dinas Lingkungan Hidup |
| Frekuensi | Satu tahun |

**4) INDEKS KUALITAS UDARA (INDEKS)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Kualitas Udara (Indeks) |
| Definisi | Nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) |
| Rumus Perhitungan | $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9}(Ieu - 0,1)\right)$ |
| Interpretasi | Kategori Index Lingkungan Hidup yaitu :<br>a. sangat baik 90 ≤ IKLH ≤ 100<br>b. baik 70 ≤ IKLH ≤ 90<br>c. sedang 50 ≤ IKLH ≤ 70<br>d. kurang 25 ≤ IKLH ≤ 50<br>e. sangat kurang 0 ≤ IKLH ≤ 25 |
| Sumber Data | Dinas Lingkungan Hidup |
| Frekuensi | Satu tahun |

**5) INDEKS KUALITAS LAHAN (INDEKS)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Kualitas Lahan (Indeks) |
| Definisi | Indeks Kualitas Lahan yang selanjutnya disingkat IKL adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas TutupanLahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut |
| Rumus Perhitungan | *IKL = IKTL + Faktor Koreksi Gambut* |
| Interpretasi | Kategori Index Lingkungan Hidup yaitu :<br>a. sangat baik 90 ≤ IKLH ≤ 100<br>b. baik 70 ≤ IKLH ≤ 90 |

| | |
|---|---|
| | c. sedang 50 ≤ IKLH ≤ 70<br>d. kurang 25 ≤ IKLH ≤ 50<br>e. sangat kurang 0 ≤ IKLH ≤ 25 |
| Sumber Data | Dinas Lingkungan Hidup Aplikasi SITALA (sistem Indeks Kualitas Lingkungan Hidup |
| Frekuensi | Tahunan |

**6) PERSENTASE PENGELOLAAN SAMPAH DI WILAYAH KAB/ KOTA (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota (%) |
| Definisi | Presentase jumlah sampah yang terkelola mencakup pengurangan sampah dan penanganan sampah |
| Rumus Perhitungan | Pengelolaan sampah = (jumlah pengurangan sampah + jumlah penanganan sampah) / total timbulan sampah x 100% |
| Interpretasi | Jumlah sampah terkelola: jumlah sampah yang dilakukan pembatasan, penggunaan kembali, pendaur ulangan serta jumlah sampah yang dikumpulkan, diangkut, diolah, dan diproses akhir di TPST/TPA Kabupaten/Kota. |
| Sumber Data | Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) |
| Frekuensi | 2x per tahun |

**f) URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**1) NILAI IKM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (NILAI)**

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.V)

**2) PERSENTASE KEPEMILIKAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk (%) |
| Definisi | Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan adalah Persentase Kepemilikan KIA ditambah Persentase Aktivasi IKD |
| Rumus Perhitungan | $\frac{Persentase\ Kepemilikan\ KIA + Persentase\ aktivasi\ IKD}{2}\ x\ 100\%$ |
| Interpretasi | • Semakin tinggi persentase, semakin baik kinerja administrasi kependudukan dan semakin besar akses masyarakat terhadap layanan dasar.<br>• Angka rendah menunjukkan masih terdapat penduduk yang belum terlayani dalam kepemilikan dokumen kependudukan, sehingga berpotensi mengalami keterbatasan dalam mengakses pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan lainnya). |
| Sumber Data | Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang diterbitkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri |

| | |
|---|---|
| Frekuensi | Tahunan |

### 3) PERSENTASE KEPEMILIKAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (%) |
| Definisi | Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil adalah Persentase kepemilikan Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan, Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan, Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan, Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan |
| Rumus Perhitungan | $\frac{\text{Persentase Akta kematian + Akta Kelahiran + akta perkawinan + } \textit{akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melapor}}{4} \; x\ 100\%$ |
| Interpretasi | • Semakin tinggi persentase, semakin baik pencatatan dan perlindungan hukum terhadap peristiwa penting penduduk.<br>• Persentase rendah menunjukkan masih ada penduduk yang belum tercatat secara hukum, sehingga berpotensi mengalami kesulitan dalam mengakses hak-hak sipil dan layanan publik. |
| Sumber Data | Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang diterbitkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri |
| Frekuensi | Tahunan |

### 4) PERSENTASE PENINGKATAN PENGGUNAAN DATA KEPENDUDUKAN DALAM PELAYANAN PUBLIK (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Peningkatan Penggunaan Data Kependudukan dalam Pelayanan Publik (%) |
| Definisi | Angka yang menunjukan Persentase Peningkatan Penggunaan Data Kependudukan dalam Pelayanan Publik |
| Rumus Perhitungan | $\frac{\textit{Laporan Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Penyajian Database Kependudukan+ Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan +Laporan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan +Laporan Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan}}{4} \; X \; 100$ |
| Interpretasi | • Nilai positif menunjukkan adanya peningkatan jumlah lembaga/instansi yang menggunakan data kependudukan dalam pelayanan publik.<br>• Nilai nol berarti tidak ada peningkatan (stagnan).<br>• Nilai negatif menunjukkan penurunan penggunaan data kependudukan, yang dapat mengindikasikan kurangnya integrasi, kendala teknis, atau kebijakan yang tidak berkelanjutan. |

| | |
|---|---|
| Sumber Data | Laporan Kegiatan |
| Frekuensi | Tahunan |

**g) URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**1) PERSENTASE FASILITASI PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%) |
| Definisi | Indikator yang mengukur sejauh mana pemerintah atau pihak terkait telah memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa, seperti PKK, Karang Taruna, LPM, RT/RW, dan Posyandu. |
| Rumus Perhitungan | $Persentase\ Fasilitasi\ Pemberdayaan\ LKD = \left(\frac{Jumlah\ Kegiatan\ Fasilitasi\ Pemberdayaan\ LKD\ yang\ Dilaksanakan}{Jumlah\ Kegiatan\ yang\ Direncanakan}\right) \times 100\%$<br><br>Keterangan Rumus:<br>- Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan LKD yang Dilaksanakan: Merupakan jumlah aktual kegiatan (seperti pelatihan, pembinaan teknis, bantuan operasional, dsb.) yang ditujukan untuk LKD dan benar-benar terlaksana.<br>- Jumlah Kegiatan yang Direncanakan: Total kegiatan fasilitasi pemberdayaan LKD yang tertuang dalam dokumen perencanaan tahunan atau RKPD/RENJA OPD.<br>- 100%: Untuk menghasilkan nilai dalam bentuk persentase. |
| Interpretasi | Nilai persentase menunjukkan sejauh mana LKD didukung dalam peningkatan kapasitas dan fungsinya. Semakin tinggi, semakin optimal fasilitasi yang diberikan. |
| Sumber Data | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), laporan fasilitasi atau pembinaan LKD |
| Frekuensi | Tahunan |

**h) URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**1) INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA – IBANGGA (INDEKS)**

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.H)

**2) ANGKA KELAHIRAN TOTAL (*TOTAL FERTILITY RATE*/TFR) PER WANITA USIA SUBUR (15-49 TAHUN) (RATA-RATA ANAK PER WANITA)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR) per Wanita Usia Subur (15-49 Tahun) (Rata-Rata Anak per Wanita) |
| Definisi | Indeks Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) adalah perkiraan rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita sepanjang usia reproduksinya (biasanya didefinisikan antara usia 15-49 tahun), dengan asumsi bahwa ia akan mengalami tingkat |

| | |
|---|---|
| | kesuburan spesifik menurut usia (Age-Specific Fertility Rates/ASFR) yang berlaku pada tahun tertentu |
| Rumus Perhitungan | Angka kelahiran total/Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita selama masa usia suburnya (15-49 t<br><br>Metode penghitungan TFR sama dengan metode penghitungan ASFR yaitu menggunakan metode tidak langsung dengan metode anak kandung/own children method (OCM).<br>TFR dihitung dengan menjumlahkan nilai semua ASFR dikalikan 5 dibagi 1.000, yang menggambarkan tingkat kelahiran per wanita usia subur. TFR dinyatakan dengan rata-rata jumlah kelahiran hidup laki-laki dan Wanita pada setiap wanita yang hidup hingga akhir masa reproduksinya, dengan formula sebagai berikut:<br><br>$TFR = \frac{1}{1000} \times [5 \sum_{i=1}^{7} ASFR\ i]$<br><br>dengan: $ASFRi = \frac{Bi}{Pi} \times 100$ : jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur ; : jumlah wanita kelompok umur ; dan : kelompok umur terdiri dari 15-19 tahun, 20-24 tahun, 25-29 tahun, 30-34 tahun, 35-39 tahun, 40-44 tahun, dan 45-49 tahun.ahun) |
| Interpretasi | TFR sekitar 2.1 anak per wanita sering dianggap sebagai tingkat penggantian (replacement level), di mana populasi secara alami akan stabil dalam jangka panjang (dengan asumsi tidak ada migrasi). |
| Sumber Data | Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) |
| Frekuensi | Biasanya dilakukan setiap 5 tahun. |

**3) INDEKS PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN – IPBK (INDEKS)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan – IPBK (Indeks) |
| Definisi | Indeks komposit yang merepresentasikan pembangunan dengan pendekatan kependudukan, terdiri dari lima dimensi utama:<br>• **Partisipasi**<br>• **Keberlanjutan**<br>• **Inklusivitas** atau pemihakan (keseimbangan)<br>• **Holistik integratif** (integrasi)<br>• **Kesetaraan** |
| Rumus Perhitungan | IPBK = (Dimensi Partisipasi + Dimensi Keberlanjutan + Dimensi Pemihakan + Dimensi Integrasi + Dimensi Kesetaraan) / 5 |

| | |
|---|---|
| Interpretasi | Indeks ini diukur pada skala **0–100**, dengan makna positif: semakin tinggi nilai IPBK, semakin baik kondisi pembangunan berwawasan kependudukan di wilayah tersebut |
| Sumber Data | BKKBN |
| Frekuensi | Tahunan |

**4) PROPORSI KEBUTUHAN KB YANG TERPENUHI MENURUT ALAT/CARA KB MODERN (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern (%) |
| Definisi | Persentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, dan saat ini sedang menggunakan kontrasepsi modern. Komponen dalam perhitungan indikator ini adalah prevalensi penggunaan kontrasepsi (suatu cara dan cara modern) dan kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi (unmet need KB) |
| Rumus Perhitungan | Tahap Pertama: Menghitung PUS yang sedang menggunakan kontrasepsi, baik metode kontrasepsi modern maupun tradisional (Prevalensi Kontrasepsi atau CPR).<br>Tahap Kedua: Menghitung PUS yang sedang menggunakan kontrasepsi modern (Prevalensi Kontrasepsi Modern atau mCPR).<br>Tahap Ketiga: Menghitung PUS yang kebutuhan ber-Kbnya tidak terpenuhi (unmet need KB)<br>Tahap Keempat: Berdasarkan tiga tahap di atas, selanjutnya dapat dihitung proporsi kebutuhan KB menurut metode kontrasepsi modern yang terpenuhi dengan formula sebagai berikut:<br>Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat atau cara KB Modern adalah proporsi kebutuhan KB PUS yang telah terpenuhi penggunaan alat/obat kontrasepsi Modern meliputi IUD, Implant, MOW, MOP, Pil, Suntik, Kondom dan MAL. |
| Interpretasi | Semakin tinggi proporsinya (mendekati 100%), artinya semakin baik / semakin banyak perempuan/pasangan yang membutuhkan KB sudah terpenuhi kebutuhannya. Semakin rendah proporsinya, berarti masih banyak orang yang membutuhkan KB tetapi belum terlayani, atau belum menggunakan metode kontrasepsi modern. Kalau proporsinya 85%, itu berarti dari semua perempuan yang ingin mencegah kehamilan, 85% sudah menggunakan KB, dan 15% belum |
| Sumber Data | BKKBN |
| Frekuensi | Tahunan |

### 5) PERSENTASE KEHAMILAN TIDAK DIRENCANAKAN – KTD (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan – KTD (%) |
| Definisi | **Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)** adalah kondisi kehamilan yang terjadi **di luar rencana** atau **tidak diinginkan** oleh perempuan atau pasangan pada saat kehamilan terjadi. KTD dapat meliputi:<br>• **Kehamilan tidak diinginkan (unwanted pregnancy):** kehamilan yang tidak diharapkan sama sekali.<br>• **Kehamilan tidak direncanakan (mistimed pregnancy):** kehamilan yang terjadi lebih cepat atau lebih lambat dari waktu yang diinginkan.<br>Indikator ini mengukur **persentase perempuan usia reproduktif (15–49 tahun)** yang mengalami kehamilan tidak direncanakan dalam periode tertentu, biasanya dalam **12 bulan terakhir.** |
| Rumus Perhitungan | $KTD = \frac{\text{Jumlah perempuan usia } 15-49 \text{ tahun yang mengalami kehamila}}{\text{Jumlah kehamilan yang terjadi pada perempuan usia } 15}$ |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase KTD, semakin menunjukkan **kurangnya efektivitas program keluarga berencana (KB)**, minimnya akses informasi dan kontrasepsi, atau rendahnya kesadaran perencanaan kehamilan. |

| PERSENTASE | INTERPRESTASI |
|---|---|
| < 10% | Sangat rendah – menunjukkan keberhasilan program KB dan edukasi reproduksi. |
| 10–20% | Rendah – masih ada kebutuhan akan layanan KB atau edukasi. |
| 21–40% | Sedang – menunjukkan masalah pada akses, kualitas, atau kesadaran penggunaan kontrasepsi. |
| > 40% | Tinggi – menunjukkan kegagalan sistem pelayanan KB dan rendahnya kesadaran perencanaan kehamilan. |

| | |
|---|---|
| Sumber Data | Tahunan |
| Frekuensi | Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) |

### 6) Angka Kelahiran Rema Umur 15-19 tahun/*Age Spesific Fertility Rate* – ASFR 15-19 (Kelahiran per 1000 WUS 15 – 19 tahun)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Angka Kelahiran Rema Umur 15-19 tahun/ *Age Spesific Fertility Rate* – ASFR 15-19 (Kelahiran per 1000 WUS 15 – 19 tahun) |
| Definisi | Indeks Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR 15-19) adalah jumlah kelahiran hidup per 1.000 wanita berusia 15-19 tahun dalam satu tahun tertentu di suatu wilayah. Indikator ini secara spesifik mengukur tingkat kesuburan pada kelompok usia remaja akhir |
| Rumus Perhitungan | $ASFR_{(15-19)} = \frac{\text{Jumlah Kelahiran Hidup dari Wanita Berusia } 15-19 \text{ Tahun}}{\text{Jumlah Rata} - \text{rata Wanita Berusia } 15-19 \text{ Tahun pada Tahun yang Sama}} \times 1000$<br>Keterangan : |

| | |
|---|---|
| | • ASFR 15-19 memberikan gambaran tentang tingkat kesuburan di kalangan remaja akhir.<br>• Nilai yang tinggi menunjukkan tingginya proporsi remaja yang melahirkan pada usia tersebut |
| Interpretasi | Indikator ini penting untuk memahami tren kesehatan reproduksi remaja, implikasi sosial dan ekonomi, serta kebutuhan akan layanan kesehatan dan pendidikan seksual. |
| Sumber Data | Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) |
| Frekuensi | Setiap 10 tahun |

**7) INDEKS LANSIA BERDAYA (INDEKS)**

| Nama Indikator | Indeks Lansia Berdaya (Indeks) |
|---|---|
| Definisi | Indeks Lansia Berdaya adalah indeks komposit yang menggambarkan tentang lansia yang memenuhi indikator dari dimensi lansia tangguh yaitu dimensi spiritual, dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi sosial kemasyarakatan, dimensi intelektual, dimensi vokasional dan dimensi lingkungan |
| Rumus Perhitungan | Indeks Lansia Berdaya dihitung berdasarkan 7 Dimensi Lansia Tangguh dengan variabel sebagai berikut.<br>- Dimensi Spiritual: Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga (usia 10 tahun ke atas) menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut;<br>- Dimensi Fisik: Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga makan "makanan beragam" (makanan pokok, sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 (dua) kali sehari;<br>- Dimensi Emosional:<br>a. Tanpa tegur sapa (selama 3 hari berturut-turut);<br>b. Pisah ranjang antara suami dan istri (selama 7 hari berturut-turut);<br>c. Pergi dari rumah/minggat (selama 2 hari berturut-turut);<br>d. Kekerasan dalam rumah tangga<br>- Dimensi Sosial Kemasyarakatan: Keluarga yang memiliki lansia dan atau lansia (umur ≥ 60 tahun) ikut kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL);<br>- Dimensi Intelektual: Minimal paling sedikit ada 1 (satu) lansia dengan pendidikan minimal SLTP;<br>- Dimensi Vokasional: Minimal paling sedikit ada 1 (satu) lansia dengan status pekerjaan adalah bekerja;<br>- Dimensi Lingkungan: Selama 6 (enam) bulan terakhir, keluarga ikut serta dalam kegiatan sosial/gotong royong di lingkungan RT.<br>Rumus :<br>$Di$ : dimensi ke- $i$, dan $wi$ : bobot ke- $i$; dimana $i$ = 1,2, ... , 7. Adapun bobot untuk masing-masing dimensi adalah $w1$ |

| | |
|---|---|
| | = 0,1; $w2$ = 0,1; $w3$ = 0,2; $w4$ = 0,1; $w5$ = 0,25; $w6$ = 0,15; dan $w7$ = 0,1.<br>$D1$ : dimensi spiritual (***Sp***), adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia yang setiap anggota keluarga usia 10 tahun ke atas menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut.<br>$D2$ : dimensi intelektual (***In***), adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia dimana terdapat paling sedikit 1 (satu) lansia yang pendidikan terakhir minimal SLTP.<br>$D3$ : dimensi fisik (***Fs***), adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia yang setiap anggota keluarganya makan "makanan beragam" (makanan pokok, sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 (dua) kali sehari.<br>$D4$ : dimensi emosional (***Es***), adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia yang tidak terdapat konflik diantara anggota keluarga (tanpa tegur sapa, pisah ranjang antara suami dan istri, pergi dari rumah/minggat, serta kekerasan dalam rumah tangga).<br>$D5$ : dimensi sosial kemasyarakatan (***SK***), adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia yang memiliki lansia dan atau lansia(, adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia yang memiliki lansia dan atau lansia (umur ≥ 60 tahun) ikut kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL)<br>$D6$ : dimensi vokasional (***PV***), adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia dimana terdapat paling sedikit 1 (satu) lansia yang bekerja.<br>$D7$ : dimensi lingkungan (***Lk***), adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia ikut serta dalam kegiatan sosial/gotong royong di lingkungan RT.<br>Indeks Lansia Tangguh dihitung dengan pendekatan agregat dimensi, dimana setiap dimensi dihitung tingkat pencapaiannya kemudian dilakukan agregat pada seluruh dimensi dan masing-masing dimensi memiliki tingkat kepentingan bobot yang berbeda. Indeks Lansia Tangguh bernilai 0-100, dengan arti semakin tinggi nilainya berarti semakin baik/tangguh lansianya. |
| Interpretasi | Indeks Lansia Berdaya menunjukkan tingkat ketangguhan/ keberdayaan lansia, dimana semakin tinggi angkanya menunjukkan semakin tangguh/ berdaya lansia tersebut.<br>Contoh:<br>Hasil perhitungan Indeks Lansia Tangguh/ Berdaya di Indonesia tahun 2023 adalah sebesar 56,99, artinya sejumlah 56,99% lansia Indonesia tergolong tangguh/ berdaya |
| Sumber Data | BKKBN |
| Frekuensi | Tahunan |

**8) INDEKS PENGASUHAN KELUARGA YANG MEMILIKI REMAJA (INDEKS)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja (Indeks) |
| Definisi | Indeks komposit yang menggambarkan pengasuhan orang tua/keluarga kepada anaknya/anggota keluarga yang berusia remaja |
| Rumus Perhitungan | Indeks pengasuhan remaja dihitung dengan pendekatan agregat indikator, di mana setiap indikator dihitung tingkat pencapaiannya kemudian dilakukan agregat pada seluruh indikator dan masing-masing indikator memiliki tingkat kepentingan bobot yang sama. Indikator ini dinyatakan dalam indeks, dengan formula sebagai berikut:<br>dengan : indikator ke- ; dan : bobot ke- ; di mana . Adapun bobot untuk masing-masing indikator adalah , dengan = banyaknya indikator.<br>V1 : memiliki legalitas diri, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap remaja (10-24 tahun) memiliki akta lahir.<br>V2 : akses terhadap pendidikan, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap remaja (10-18 tahun) tidak ada yang putus sekolah.<br>V3 : terbebas dari pekerjaan, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap remaja (10-14 tahun) tidak/belum bekerja.<br>V4 : memiliki jaminan kesehatan, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap remaja (10-24 tahun) memiliki asuransi kesehatan (pemerintah/swasta).<br>V5: memiliki jaminan masa depan, adalah persentase keluarga punya remaja yang memiliki aset: tabungan (uang kontan/rekening aktif), emas/perhiasan (minimal 10 gram), dan atau hewan ternak yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam 3 (tiga) bulan ke depan.<br>V6 : kecukupan gizi, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap anggota keluarga makan "makanan beragam" (makanan pokok, sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 (dua) kali sehari.<br>V7 : kondisi sehat, adalah persentase keluarga punya remaja di mana tidak ada anggota keluarga yang memiliki penyakit kronis dan atau disabilitas.<br>V8 : akses terhadap sumber informasi, adalah persentase keluarga punya remaja di mana terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota keluarga mengakses informasi dari media online (internet). |
| Interpretasi | Indeks pengasuhan remaja bernilai 0-100, dengan arti semakin tinggi nilainya berarti semakin baik keluarga dalam pengasuhan remajanya.<br>Contoh: |

| | |
|---|---|
| | Hasil perhitungan indeks pengasuhan remaja di Indonesia tahun 2023 adalah sebesar 84,30, artinya tingkat pengasuhan remaja di Indonesia dapat dikatakan baik. |
| Sumber Data | BKKBN |
| Frekuensi | Tahunan |

**9) PERSENTASE KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS MANDIRI (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (%) |
| Definisi | Kampung KB Mandiri adalah satuan wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu di mana terdapat peningkatan indikator Program Bangga Kencana dan keterpaduan dengan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat |
| Rumus Perhitungan | $KKM = \frac{jkelkm}{jkel} x100\%$<br>Ket ;<br>- KKM =Kampung keluarga berkualitas mandiri<br>- jkelkm =Jumlah kelurahan memiliki kampung keluarga berkualitas mandiri<br>- jkel =Jumlah kelurahan seluruhnya |
| Interpretasi | Semakin besar nilainya, maka semakin banyak jumlah Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri di wilayah tersebut |
| Sumber Data | Website Kampung Keluarga Berkualitas |
| Frekuensi | BKKBN |

**i) URUSAN PERHUBUNGAN**

**1) NILAI SURVEY IKM PELAYANAN TRANSPORTASI (ANGKA)**

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.V)

**2) PERSENTASE KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN YANG RAMAH LINGKUNGAN (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan yang Ramah Lingkungan (%) |
| Definisi | Meningkatnya keselamatan, kelancaran, ketertiban dan kenyamanan lalu lintas |
| Rumus Perhitungan | $\frac{Jumlah\ Pemasangan\ perlengkapan\ jalan\ Kabupaten/Kota}{Target\ kebutuhan\ perlengkapan\ jalan\ Kabupaten/Kota} x\ 100\%$ |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentasenya semakin tersedia dengan baik infrastruktur perhubungan |
| Sumber Data | Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh |
| Frekuensi | Tahunan |

## j) URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

### 1) INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK - SPBE (INDEKS)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.S)

### 2) INDEKS MASYARAKAT DIGITAL INDONESIA (INDEKS)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Masyarakat Digital Indonesia (Indeks) |
| Definisi | Indeks Masyarakat Digital Indonesia merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaan |
| Rumus Perhitungan | Indeks bersumber dari Kementerian Komunikasi dan Informatika setiap tahunnya |
| Interpretasi | Pengukuran Indeks Masyarakat Digital digunakan untuk mengukur tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya yang terdiri dari empat pilar penyusunan yaitu infrastruktur dan ekosistem, keterampilan digital, pemberdayaan dan pekerjaan |
| Sumber Data | Kementerian Komunikasi dan Informatika |
| Frekuensi | Tahunan |

### 3) NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (NILAI)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Nilai) |
| Definisi | Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) merupakan ukuran tingkat keterbukaan informasi oleh badan publik di Indonesia, diukur oleh Komisi Informasi Provinsi berdasarkan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. |
| Rumus Perhitungan | Perhitungan nilai keterbukaan informasi publik adalah hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan oleh Komisi Informasi untuk menilai sejauh mana badan publik memenuhi kewajiban menyediakan informasi yang akurat dan dapat diakses masyarakat. Penilaian ini menggunakan metode seperti Self-Assessment Questionnaire (SAQ) dan penilaian kualitas layanan, dengan bobot penilaian yang berubah seiring waktu, untuk mengklasifikasikan badan publik ke dalam kategori Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif, dan Tidak Informatif. |
| Interpretasi | Interpretasi perhitungan nilai keterbukaan informasi publik menunjukkan sejauh mana sebuah badan publik berhasil dalam menyediakan informasi kepada masyarakat, dengan sistem penilaian berdasarkan kategori seperti "Informatif" (nilai 90-100) hingga "Tidak Informatif" (< 39.9), diukur melalui berbagai indikator seperti pengembangan website, pelayanan informasi, dan |

| | |
|---|---|
| | kepatuhan terhadap undang-undang. Skor ini memberikan gambaran objektif tentang akuntabilitas dan transparansi badan publik, yang penting untuk partisipasi masyarakat dan pencegahan korupsi. |
| Sumber Data | Sumber data perhitungan nilai keterbukaan informasi publik berasal dari Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang disusun oleh Komisi Informasi (KI). |
| Frekuensi | Tahunan |

**4) INDEKS PEMERINTAHAN DIGITAL (INDEKS)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Pemerintahan Digital (Indeks) |
| Definisi | Indeks pemerintah digital adalah ukuran kinerja atau kematangan transformasi digital di instansi pemerintah, seperti yang diukur dalam Indeks Pemdi di Indonesia, yang mencakup penilaian terhadap tata kelola, layanan, dan infrastruktur digital untuk mendorong modernisasi dan penciptaan nilai publik melalui pemanfaatan teknologi dan data digital. Indeks ini membantu pemerintah mengevaluasi kesiapan mereka dalam transformasi digital secara menyeluruh dan menjadi dasar untuk menyusun program pengembangan SDM digital dan peningkatan pelayanan publik |
| Rumus Perhitungan | Total skor dari 9 aspek Pemdi berdasarkan evaluasi Kemen PAN RB, dengan bobot nilai masing-masing aspek sebagai berikut :<br>1. Strategi dan Rencana (bobot 5 %)<br>2. Tata Kelola dan Manajemen (bobot 5 %)<br>3. Teknologi Digital (bobot 20 %)<br>4. Audit Teknologi Digital (bobot 6 %)<br>5. Kemananan Siber (bobot 9 %)<br>6. Kapabilitas dan Budaya Digital (bobot 10 %)<br>7. Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi (bobot 10 %)<br>8. Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah (bobot 15 %)<br>9. Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (bobot 20 %) |
| Interpretasi | Indeks ini dirancang untuk mengukur kinerja transformasi digital di instansi pemerintah Indonesia, sesuai dengan arahan RPJMN 2025-2029 dan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Indeks ini berfungsi Memberikan gambaran tentang tingkat kesiapan dan kualitas transformasi digital di instansi pemerintah. Skala indeks yang lebih tinggi menunjukkan kematangan transformasi digital yang lebih baik dalam penggunaan teknologi digital pemerintahan. |
| Sumber Data | Kementerian PANRB berdasarkan hasil evaluasi |
| Frekuensi | Tahunan |

## k) URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

### 1) KONTRIBUSI UMKM TERHADAP PDRB (%)

| Nama Indikator | **Kontribusi UMKM Terhadap PDRB** (%) |
|---|---|
| Definisi | Kontribusi PDRB yang bersumber dari Sub sektor UMKM yang mencerminkan proporsi nilai tambah sub sektor UMKM terhadap PDRB<br>Karena UMKM bukan merupakan sektor langsung yang terdapat dari 17 sektor pembentuk PDRB, maka untuk nilainya diambil dari sektor yang utamanya merupakan usaha mikro, kecil dan menengah yaitu sektor:<br>- Industri pengolahan<br>- Pertanian, kehutanan dan perikanan<br>- Industri pengolahan |
| Rumus Perhitungan | $\text{Kontribusi} = \frac{\text{PDRB}_{UMKM}}{PDRB_{Kota}} x100\%$ |
| Interpretasi | Kontribusi subsektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB Kota, *ceteris paribus* |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Triwulanan, Tahunan |

### 2) PROPORSI JUMLAH UKM NON PERTANIAN (%)

| Nama Indikator | Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian (%) |
|---|---|
| Definisi | Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama. |
| Rumus Perhitungan | $Proporsi\ UKM\ Non\ Pertanian = \frac{Jml\ UKM\ Non\ Tani}{Total\ Jumlah\ Unit\ Usaha} x100\%$ |
| Interpretasi | Usaha kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi UKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. |
| Sumber Data | a. Sensus Ekonomi (10 tahun sekali)<br>b. Data Pendataan Lengkap UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM (masih dalam tahap pengumpulan dan pengembangan)<br>c. Data UMKM yang dikumpulkan oleh daerah |
| Frekuensi | Tahunan |

### 3) Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB (%)

| Nama Indikator | Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB (%) |
|---|---|
| Definisi | Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. |
| Rumus Perhitungan | $RvK = \frac{volume\ usaha\ koperasi\ daerah}{PDRB\ ADHB} x100\%$<br>Dimana RvK = Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB |
| Interpretasi | Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah |
| Sumber Data | a. Volume usaha koperasi daerah: ODS Koperasi.Kementerian Koperasi dan UKM.<br>b. PDRB: PDRB Seri 2010. Badan Pusat Statistik. |
| Frekuensi | Tahunan |

### 4) RASIO KEWIRAUSAHAAN (%)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja daerah (IV.C.5)

## l) URUSAN PENANAMAN MODAL

### 1) NILAI REALISASI INVESTASI (Rp)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.Q)

## m) URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

### 1) JUMLAH ATLET BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL (ORANG)

| Nama Indikator | Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Nasional (Orang) |
|---|---|
| Definisi | Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional merupakan atlet-atlet yang memiliki prestasi pada even-even bidng olahraga berskala nasional pada tahun tersebut |
| Rumus Perhitungan | $Jatletnasional = \sum atlet\ nasional_n$ |
| Interpretasi | Semakin besar jumlah atlet yang berprestasi tingkat nasional menandakan tingginya kualitas SDM pada bidang keolahragaan |

| | |
|---|---|
| Sumber Data | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga |
| Frekuensi | Tahunan |

**2) PERSENTASE ATLET YANG MASUK PELATNAS (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (%) |
| Definisi | Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas adalah indikator yang mengukur proporsi atlet daerah atau nasional yang terpilih dan mengikuti program Pelatihan Nasional (Pelatnas) untuk persiapan mengikuti kejuaraan nasional maupun internasional. Indeks ini mencerminkan kapasitas pembinaan prestasi olahraga di daerah maupun nasional serta efektivitas sistem talent scouting dan pembinaan atlet. |
| Rumus Perhitungan | $Persentase\ Atlet\ Pelatnas = \frac{\text{Jumlah Atlet yang Masuk Pelatnas}}{\text{Total Jumlah Atlet Potensial atau Terdaftar}} \times 100\%$<br>Keterangan :<br>- Jumlah Atlet yang Masuk Pelatnas: Ini adalah angka yang menunjukkan berapa banyak atlet yang terpilih dan mengikuti program Pemusatan Latihan Nasional untuk cabang olahraga tertentu atau untuk persiapan event olahraga tertentu (misalnya, SEA Games, Asian Games, Olimpiade).<br>- Total Jumlah Atlet Potensial atau Terdaftar: Ini adalah angka yang menunjukkan keseluruhan jumlah atlet yang dianggap memiliki potensi untuk masuk Pelatnas atau jumlah total atlet yang terdaftar dalam suatu organisasi atau federasi olahraga pada tingkat tertentu (misalnya, tingkat provinsi atau nasional). Pemilihan basis total atlet ini akan memengaruhi interpretasi persentase.<br>- 100%: Faktor pengali untuk mengubah hasil pembagian menjadi bentuk persentase. |
| Interpretasi | Persentase ini menunjukkan seberapa banyak atlet dari suatu wilayah atau cabang olahraga yang lolos ke jenjang pelatnas. Indikator ini dapat digunakan untuk Mengukur efektivitas pembinaan olahraga prestasi di tingkat daerah.Mengevaluasi distribusi talenta dari daerah ke tingkat nasional. Menyusun strategi peningkatan kualitas pelatih, fasilitas, dan scouting |
| Sumber Data | Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Komite Olimpiade Indonesia (KOI), PB/PP Cabang Olahraga |
| Frekuensi | Tahunan |

## n) URUSAN STATISTIK

### 1) INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK (NILAI)

| Nama Indikator | Indeks Pembangunan Statistik (Nilai) |
|---|---|
| Definisi | **Indeks Pembangunan Statistik (IPS)** adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan pembangunan statistik pada **Unit Pengelola Statistik (UPS)** di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi lainnya. Indeks ini menilai aspek kelembagaan, sumber daya manusia, proses bisnis statistik, serta ketersediaan dan kualitas data statistik yang dikelola oleh UPS. |
| Rumus Perhitungan | $IPS\ UPS = \frac{\sum(Skor\ Komponen \times Bobot\ Komponen)}{\sum Bobot}$<br>Keterangan :<br>**Kelembagaan Statistik (Bobot 25%)**<br>• Ketersediaan Unit Pengelola Data<br>• Penetapan SDM statistik<br>• SOP Pengelolaan Data<br>**Proses Bisnis Statistik (Bobot 25%)**<br>• Perencanaan dan Pengumpulan Data<br>• Pengolahan dan Penyajian<br>Diseminasi dan Pemanfaatan Data |
| Interpretasi | IPS dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan atau gap statistik dalam organisasi. Menyusun roadmap pembangunan statistik sektoral. Meningkatkan koordinasi dan integrasi sistem statistik nasional |
| Sumber Data | Dokumen pembentukan UPS, regulasi internal, SK penunjukan UPS |
| Frekuensi | Tahunan |

## O) URUSAN PERSANDIAN

### 1) Indeks Keamanan Informasi (%)

| Nama Indikator | Indeks Keamanan Informasi (%) |
|---|---|
| Definisi | Indeks keamanan informasi atau Indeks SPBE (Aspek Keamanan) adalah ukuran capaian tingkat kematangan keamanan informasi dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada instansi pemerintah. Indeks ini mencerminkan kemampuan instansi dalam melindungi aset informasi dari ancaman, gangguan, maupun risiko keamanan melalui kebijakan, infrastruktur, prosedur, dan pelaksanaan teknis keamanan siber |
| Rumus Perhitungan | $IKI = \frac{\sum(S_i x B_i)}{\sum B_i}$<br>Keterangan :<br>- IKI =Indeks keamanan informasi |

| | |
|---|---|
| | - $S_i$ =Skor indikator ke-i pada aspek keamanan SPBE (rentang 0–5 atau 0–100, tergantung panduan evaluasi)<br>- $B_i$ =Bobot indikator ke-i (menunjukkan tingkat pentingnya setiap indikator)<br>- $\sum (S_i \times B_i)$ =Jumlah dari semua nilai bobot yang dikalikan dengan skor<br>- $\sum B_i$ =Total bobot seluruh indikator keamanan |
| Interpretasi | Indeks ini sangat penting untuk Menjamin **kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi pemerintah**. Menjadi dasar penguatan infrastruktur siber pemerintah. Mendukung layanan publik digital yang aman dan andal |
| Sumber Data | Dokumen internal instansi (Peraturan, Pedoman, SK Penanggung Jawab, SOP) |
| Frekuensi | Tahunan |

## p) URUSAN KEBUDAYAAN

### 1) KARYA BUDAYA YANG DITETAPKAN (UNIT)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.BB)

### 2) PERSENTASE WARISAN BUDAYA YANG DILESTARIKAN (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (%) |
| Definisi | **Indeks Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan** adalah indikator kuantitatif yang mengukur proporsi elemen warisan budaya (baik benda maupun takbenda) yang telah dilakukan upaya pelestarian terhadap total keseluruhan warisan budaya yang telah teridentifikasi dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu. |
| Rumus Perhitungan | $$Persentase\ Warisan\ Budaya\ yang\ Dilestarikan\ (\%) = \frac{Jumlah\ Warisan\ Budaya\ yang\ Dilestarikan}{Jumlah\ Total\ Warisan\ Budaya\ yang\ Terdaftar} \times 100$$<br>Keterangan :<br>- Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan = Jumlah warisan budaya (baik benda maupun tak benda) yang masih dilestarikan, dijaga, dan dikembangkan melalui kegiatan budaya seperti pelatihan, pameran, festival, atau pengakuan resmi (seperti yang terdaftar sebagai warisan budaya tak benda atau benda oleh pemerintah).<br>- Jumlah Total Warisan Budaya yang Terdaftar = Semua jenis warisan budaya (baik yang dilestarikan maupun yang tidak dilestarikan) yang terdaftar di suatu wilayah berdasarkan data resmi atau hasil inventarisasi warisan budaya.<br>- Hasil dihitung dalam persentase (%), yang menunjukkan seberapa banyak warisan budaya yang terjaga dan dilestarikan dari keseluruhan warisan yang ada. |

| | |
|---|---|
| Interpretasi | Menunjukkan tingkat komitmen dan efektivitas dalam pelestarian budaya. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak elemen budaya yang terjaga keberlanjutannya. |
| Sumber Data | Dinas Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan, Kemendikbudristek, komunitas budaya, registrasi nasional warisan budaya, hasil inventarisasi daerah.masyarakat. |
| Frekuensi | Tahunan (1 kali per tahun), atau per dua tahun jika inventarisasi memerlukan waktu lebih panjang |

**3) PERSENTASE LEMBAGA ADAT YANG AKTIF DALAM MELESTARIKAN NILAI NILAI BUDAYA (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Lembaga Adat yang Aktif dalam Melestarikan Nilai Nilai Budaya (%) |
| Definisi | Jumlah lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai budaya berjumlah 22 lembaga adat dan aktif sebanyak 100% |
| Rumus Perhitungan | $\text{Lembaga adat yang aktif (\%)} = \frac{\text{Jumlah lembaga adat yang aktif}}{\text{Jumlah lembaga adat yang berpartisipasi}} \times 100$ |
| Interpretasi | Menunjukkan tingkat presentasi lembaga adat yang aktif dapat ditafsirkan sebagai bentuk nyata keterlibatan masyarakat dalam melestarikan nilai budaya ditengah arus modernisasi |
| Sumber Data | Dokumentasi kegiatan, Observasi lapangan, Wawancara langsung |
| Frekuensi | Tahunan (1 kali per tahun) |

**4) JUMLAH OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN YANG DILESTARIKAN (UNIT)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan (Unit) |
| Definisi | Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan berjumlah 10 objek |
| Rumus Perhitungan | $\textit{Jumlah objek pemajuan kebudayaan} = \frac{\textit{Jumlah objek kebudayaan keseluruhan}}{\textit{jumlah objek kebudayaan yang dilestarikan}} \times 100\%$ |
| Interpretasi | Menunjukkan jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan dapat ditafsirkan sebagai bentuk nyata dalam melestarikan objek kebudayaan yang ada |
| Sumber Data | Dokumentasi kegiatan, Observasi lapangan, Wawancara langsung |
| Frekuensi | Tahunan |

## q) URUSAN PERPUSTAKAAN

### 1) INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT (INDEKS)

| Nama Indikator | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks) |
|---|---|
| Definisi | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat pembangunan literasi di masyarakat berdasarkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan fasilitas layanan perpustakaan serta aktivitas literasi di suatu daerah.<br>IPLM dikembangkan untuk menilai kemampuan masyarakat dalam mengakses, memahami, dan menggunakan informasi melalui aktivitas membaca, belajar, dan berpartisipasi dalam kegiatan literasi yang difasilitasi oleh perpustakaan dan lembaga sejenis |
| Rumus Perhitungan | $\textbf{IPLM} = \frac{\sum_{i}^{n}=1 (wi \times Ii)}{\sum_{i}^{n} = 1 \ wi}$<br><br>Keterangan :<br>- $I_i$ = Skor indikator ke-i pada dimensi pembangunan literasi masyarakat<br>- $w_i$ = Bobot indikator ke-i<br>- n = Jumlah indikator yang digunakan dalam penghitungan<br>- IPLM= memiliki rentang nilai dari 0 sampai 100, di mana makin tinggi nilai IPLM, makin baik tingkat pembangunan literasi masyarakat di wilayah tersebut. |
| Interpretasi | Semakin tinggi skor IPLM, semakin baik pembangunan dan pencapaian literasi masyarakat di wilayah tersebut |
| Sumber Data | Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi/Kabupaten/Kota, BPS, data survei literasi daerah |
| Frekuensi | Tahunan (1 kali per tahun, disesuaikan dengan pelaporan nasional) |

### 2) RASIO KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN PERKAPITA (RASIO)

| Nama Indikator | Rasio Kunjungan Perpustakaan Perkapita (Rasio) |
|---|---|
| Definisi | Merupakan indikator yang menggambarkan tingkat pemanfaatan layanan perpustakaan oleh masyarakat dengan menghitung perbandingan antara jumlah total kunjungan ke perpustakaan dalam periode tertentu dengan jumlah penduduk di wilayah yang sama. |
| Rumus Perhitungan | $Rasio\ kunjungan\ per\ Kapita = \frac{Jml\ kunjungan\ perpustakaan\ dalam\ 1\ tahun}{Jml\ penduduk}$ |
| Interpretasi | 1. Jumlah kunjungan mencakup semua kunjungan fisik dan/atau kunjungan virtual (jika dihitung dalam indikator) ke perpustakaan umum, sekolah, keliling, atau digital yang berada di wilayah tersebut. |

| | |
|---|---|
| | 2. Jumlah penduduk biasanya menggunakan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk tahun berjalan<br>yang jika dicontohkan nilai rasio 0,4 berarti rata-rata setiap penduduk mengunjungi perpustakaan 0,5 kali per tahun (atau 1 kali untuk setiap orang per tahun) |
| Sumber Data | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| Frekuensi | Tahunan |

**r) URUSAN KEARSIPAN**

**1) INDEKS HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN DI LINGKUP PEMERINTAHAN DAERAH (NILAI)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkup Pemerintahan Daerah (Nilai) |
| Definisi | Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menunjukkan tingkat kepatuhan, kualitas, dan efektivitas pengelolaan arsip di lingkungan pemerintahan daerah (provinsi/kabupaten/kota), berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Nasional (ANRI) atau Lembaga Kearsipan Daerah |
| Rumus Perhitungan | *Indeks = (Skor Total Hasil Pengawasan Kearsipan/Skor Maksimal) × 100*<br>Keterangan :<br>• Skor Total Hasil Pengawasan: Penjumlahan dari seluruh poin nilai yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi terhadap aspek-aspek pengelolaan arsip (seperti: kebijakan kearsipan, SDM, sarana prasarana, pengelolaan arsip aktif-inaktif, pengawasan internal, dll.)<br>• Skor Maksimal: Nilai maksimum yang bisa dicapai (biasanya = 100 poin).<br>• Output: Nilai indeks dalam skala 0–100 |
| Interpretasi | Semakin tinggi skor, menunjukkan tata kelola kearsipan semakin baik dan sesuai standar nasional kearsipan |
| Sumber Data | • Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan oleh ANRI atau LKD<br>• Formulir Penilaian Mandiri Kearsipan (AMANI/IKM)<br>• Berita Acara Hasil Pengawasan Kearsipan<br>• Dokumentasi Audit Arsip Internal<br>• Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) |
| Frekuensi | Tahunan (Biasanya dilakukan dalam siklus audit/pengawasan kearsipan per tahun anggaran) |

**2) PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN SISTEM KEARSIPAN SESUAI STANDAR (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Sistem Kearsipan sesuai Standar (%) |
| Definisi | Persentase perangkat daerah yang menerapkan sistem kearsipan sesuai standar adalah semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan penyelenggara pemerintahan daerah, meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah yang menerapkan sistem arsip sesuai standar kearsipan. Penerapan standar kearsipan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan arsip yang baik, efektif, dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan |
| Rumus Perhitungan | $\%standar = \frac{JPDsistarsipstandar}{JPD} x100$<br>Keterangan :<br>• %standar = Persentase Perangkat Daerah menerapkan sistem kearsipan sesuai standar<br>• JPDsistarsipstandar = Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan sistem kearsipan sesuai standar<br>• JPD = Jumlah Perangkat Daerah |
| Interpretasi | Indikator ini menunjukkan semakin tinggi persentase semakin tinggi norma, aturan, atau persyaratan yang dijadikan sebagai acuan dalam sistem kearsipan, yang biasanya berupa dokumen formal agar ada keseragaman dalam pelaksanaannya. |
| Sumber Data | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| Frekuensi | Tahunan |

**3. LAYANAN URUSAN PILIHAN**

**a) URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**1) JUMLAH TOTAL PRODUKSI PERIKANAN - TANGKAP DAN BUDIDAYA (TON)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Jumlah Total Produksi Perikanan - tangkap dan budidaya (Ton) |
| Definisi | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap adalah total volume hasil tangkapan ikan dan biota air lainnya yang ditangkap oleh nelayan dari perairan laut dan perairan umum daratan (PUD) dalam satu periode waktu tertentu, baik oleh nelayan kecil, nelayan kapal besar, atau unit penangkapan lainnya, yang dinyatakan dalam satuan ton.<br>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya adalah total volume hasil panen komoditas perikanan (seperti ikan, udang, kepiting, rumput laut, kerang, dll.) yang dibudidayakan oleh pembudidaya ikan dalam satu periode tertentu, yang dinyatakan dalam satuan ton (untuk ikan, udang, kepiting) atau ton basah/kering (untuk rumput laut). |
| Rumus Perhitungan | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap<br>= ∑ (Volume Hasil Tangkapan per Jenis Ikan)<br>Keterangan : |

| | |
|---|---|
| | • Volume hasil tangkapan dapat diambil dari data rekapitulasi:<br>➢ Laporan TPI (Tempat Pelelangan Ikan)<br>➢ Pencatatan nelayan per alat tangkap<br>➢ Laporan harian/monitoring petugas pelabuhan perikanan<br>• Biasanya dibagi menurut:<br>➢ Lokasi tangkap (laut/pud)<br>➢ Jenis kapal dan alat tangkap<br>➢ Jenis komoditas (ikan pelagis, demersal, udang, cumi, dll.)<br>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya<br>= ∑ (Volume Panen Komoditas Budidaya per Jenis dan Lokasi)<br><br>Keterangan :<br>• Data produksi dihitung dari laporan hasil panen yang dilaporkan oleh pembudidaya atau kelompok.<br>• Perhitungan dapat dikelompokkan berdasarkan:<br>o Sistem budidaya: air tawar, air payau, laut<br>o Jenis komoditas: ikan nila, lele, patin, udang, bandeng, rumput laut, kerapu, dll.<br>Metode budidaya: kolam tanah, terpal, KJA, tambak, dll.<br>sehingga<br>$Jmltotproduksiperikanan = jmlprodperikanantangkap + jmlprodperikananbudidaya$ |
| Interpretasi | Semakin tinggi produksi perikanan menunjukkan petumbuhan sektor tangkap dan budidaya dan ketahanan pangan daerah meningkat |
| Sumber Data | • Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota<br>• Data Laporan Produksi Pembudidaya Ikan<br>• Sistem Informasi Statistik Perikanan Budidaya (SISDATIK), KKP<br>• BPS – Statistik Perikanan Budidaya<br>Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) dan UPTD Perikanan |
| Frekuensi | Bulanan dan Tahunan (Biasanya dikompilasi secara tahunan dalam laporan kinerja atau publikasi statistik perikanan) |

**b) URUSAN PARIWISATA**

**1) JUMLAH TAMU WISATAWAN MANCANEGARA (RIBU ORANG)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Jumlah Tamu wisatawan mancanegara (ribu orang) |
| Definisi | Jumlah tamu asing (wisatawan) mancanegara yang menginap di daerah tertentu |
| Rumus Perhitungan | *Data Jumlah Tamu* Asing (*Wisatawan*) *Mancanegara di setiap hotel/* penginapan *di daerah tertentu* |

| | |
|---|---|
| Interpretasi | Semakin tinggi jumlah tamu (wisatawan) asing yang menginap di hotel/ penginapan di daerah tertentu, maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata secara nasional |
| Sumber Data | BPS, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga |
| Frekuensi | Tahunan |

**2) JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN NUSANTARA (ORANG)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Orang) |
| Definisi | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara merupakan perhitungan terhadap kunjungan wisatawan domestik pada daerah tertentu |
| Rumus Perhitungan | *Data Jumlah kunjungan wisatawan domestik di daerah tertentu* |
| Interpretasi | Semakin tinggi jumlah kunjungan wisatawan domestik di daerah tertentu, maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata secara nasional |
| Sumber Data | BPS, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga |
| Frekuensi | Tahunan |

**3) Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%) |
| Definisi | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual adalah proporsi pelaku usaha atau individu dalam sektor ekonomi kreatif yang telah memiliki perlindungan hukum melalui pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) seperti hak cipta, merek dagang, desain industri, paten, atau indikasi geografis terhadap total pelaku ekonomi kreatif dalam suatu periode tertentu |
| Rumus Perhitungan | $\%ekrafpunyaKI = \frac{jekrafpunyaKI}{Totekraf} x100$<br>dimana :<br>%ekrafpunyaKI = Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual<br>JekrafpunyaKI = Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual<br>Totekraf = Jumlah semua pelaku ekraf |
| Interpretasi | Nilai tinggi berarti tingkat legalitas dan perlindungan karya ekraf meningkat |
| Sumber Data | Laporan komunitas ekonomi kreatif / UMKM |
| Frekuensi | Tahunan |

**4) PROPORSI PDRB EKONOMI KREATIF TERHADAP PDRB EKONOMI KREATIF PROVINSI (%)**

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja daerah (IV.C.4)

**5) PERSENTASE PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATAWAN (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan (%) |
| Definisi | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan adalah tingkat peningkatan atau penurunan jumlah kunjungan wisatawan (baik wisatawan nusantara maupun mancanegara) ke suatu daerah dari satu periode ke periode berikutnya, yang dinyatakan dalam persentase (%). |
| Rumus Perhitungan | Persentase Pertumbuhan Kunjungan wisatawan (%) = [(Jumlah wisatawan Tahun N – Tahun N-1) / Jumlah wisatawan Tahun N-1] × 100%<br><br>Keterangan :<br>➢ Jumlah Wisatawan Tahun N: Total wisatawan yang berkunjung pada tahun berjalan (misalnya 2024)<br>➢ Jumlah Wisatawan Tahun N-1: Total wisatawan pada tahun sebelumnya (misalnya 2023)<br>➢ Data bisa dihitung untuk:<br>• Total keseluruhan wisatawan<br>• Wisatawan nusantara (domestik)<br>• Wisatawan mancanegara (internasional) |
| Interpretasi | Nilai positif menandakan pertumbuhan, negatif menandakan penurunan |
| Sumber Data | • Dinas Pariwisata Provinsi/Kabupaten/Kota<br>• Badan Pusat Statistik (BPS) – Statistik Pariwisata<br>• Data pintu masuk destinasi (bandara, pelabuhan, terminal, gerbang kawasan wisata)<br>• Laporan pengelola destinasi wisata, hotel, event pariwisata |
| Frekuensi | Tahunan (umumnya digunakan untuk pelaporan indikator pembangunan) |

**6) RASIO PDRB PENYEDIAAN AKOMODASI MAKAN MINUM (%)**

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja daerah (IV.C.3)

**c) URUSAN PERTANIAN**

**1) PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN (ADHB) (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan (ADHB) (%) |
| Definisi | Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan (ADHB) merupakan tingkat pertumbuhan dari sektor pertanian, kehutanan, |

| | |
|---|---|
| | perikanan yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota. |
| Rumus Perhitungan | $pertmbPDRB_{PKP} = \frac{(PDRB_{PKP(n)} - PDRB_{PKP\,(n-1)}}{PDRB_{n-1}} x100$ |
| Interpretasi | Semakin tinggi tingkat pertumbuhan semakin besar kontribusi dan berkembangnya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada suatu daerah |
| Sumber Data | Dinas Pertanian |
| Frekuensi | Tahunan |

**2) PRODUKSI PADI (TON)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Produksi Padi (Ton) |
| Definisi | ukuran jumlah total Gabah Kering Panen (GKP) yang dihasilkan dari kegiatan bercocok tanam padi dalam satu periode waktu dan wilayah tertentu, diukur dalam satuan ton |
| Rumus Perhitungan | Produksi Padi (Ton) = Luas Panen (Ha) x Produktivitas (Ton/Ha) |
| Interpretasi | Angka yang lebih tinggi menunjukkan hasil panen yang lebih baik dan potensi ketersediaan pangan yang lebih besar, sementara angka yang lebih rendah mengindikasikan penurunan produksi |
| Sumber Data | Dinas Pertanian |
| Frekuensi | Tahunan |

**3) POPULASI SAPI (EKOR)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Populasi Sapi (Ekor) |
| Definisi | Jumlah total sapi yang hidup dan dipelihara di suatu wilayah geografis tertentu pada periode waktu tertentu |
| Rumus Perhitungan | Populasi Akhir = Populasi Awal + (Jumlah Kelahiran + Jumlah Pemasukan) – (Jumlah Kematian + Jumlah Pengeluaran)<br>Penjelasan Komponen Rumus<br>• **Populasi Awal (ekor)**: Jumlah total sapi pada awal periode waktu yang dianalisis.<br>• **Jumlah Kelahiran (Bi) (ekor)**: Jumlah anak sapi yang lahir dalam periode tersebut.<br>• **Jumlah Pemasukan (E) (ekor)**: Jumlah sapi yang didatangkan ke wilayah tersebut dari luar.<br>• **Jumlah Kematian (Di) (ekor)**: Jumlah sapi yang mati dalam periode tersebut.<br>• **Jumlah Pengeluaran (G) (ekor)**: Jumlah sapi yang dijual atau dikeluarkan dari wilayah tersebut |

| | |
|---|---|
| Interpretasi | jumlah total sapi yang hidup dan terhitung di suatu wilayah atau waktu tertentu |
| Sumber Data | Dinas Pertanian |
| Frekuensi | Tahunan |

**4) INDEKS PERTANAMAN (INDEKS)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Pertanaman (Indeks) |
| Definisi | Indeks pertanaman adalah ukuran kepadatan tanaman pada suatu lahan pertanian |
| Rumus Perhitungan | Ada 3 Metode Perhitungan diantaranya :<br>1. Metode *sampling* dengan cara :<br>- Menentukan titik *sampling* yang representatif<br>- Mengukur jumlah tanaman pada titik *sampling* tersebut<br>- Menghitung rata-rata jumlah tanaman pada seluruh titik *sampling*<br>2. Metode *Counting Grid*<br>$IP = \left(\frac{jt}{ljaring}\right) x \left(\frac{jjaring}{llp}\right)$<br>dimana<br>IP = Indeks Pertanaman<br>jt = Jumlah tanaman<br>ljaring = Luas jaring-jaring perhitungan<br>jjaring = Jumlah jaring-jaring perhitungan<br>llp = Luas lahan pertanian<br><br>3. Metode Visual dengan cara :<br>- Melakukan pengamatan visual pada seluruh lahan pertanian<br>- Memperkirakan jumlah tanaman yang tumbuh pada seluruh lahan pertanian berdasarkan pengalaman dan pengetahuan petani |
| Interpretasi | Indeks pertanaman memiliki nilai yang bervariasi tergantung pada jenis tanaman, umur tanaman, dan kondisi lahan pertanian. Dengan mengetahui indeks pertanaman, petani dapat menilai keadaan tanaman dan melakukan evalaus terhadap hasil panen yang telah dicapai |
| Sumber Data | Dinas Pertanian |
| Frekuensi | Tahunan |

**5) TINGKAT PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PADA LAPANGAN USAHA SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN (JUTA/ORANG)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (juta rupiah/orang) |

| | |
|---|---|
| Definisi | Produktivitas tenaga kerja adalah kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan |
| Rumus Perhitungan | $PTK = \frac{O_P}{JTkp}$<br>- Dimana : PTK = Produktivitas Tenaga Kerja; $O_p$ = Produk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang dihasilkan; JTkp = Jumlah tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang dibayar |
| Interpretasi | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan digunakan untuk mengukur kemampuan tenaga kerja dalam mengerjakan pekerjaan dalam waktu kerja yang sudah ditentukan dengan metode penghitungan adalah nilai tambah dibagi dengan jumlah tenaga kerja yang dibayar |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik (Survei Tahunan Perusahaan Industri Manufaktur) |
| Frekuensi | Setiap tahun |

**d) URUSAN PERDAGANGAN**

**1) KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PDRB (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%) |
| Definisi | Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB adalah persentase nilai tambah bruto (gross value added) yang dihasilkan oleh sektor perdagangan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada suatu wilayah dalam periode tertentu. Sektor perdagangan meliputi kegiatan perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil dan sepeda motor. |
| Rumus Perhitungan | $Kontribusi\ Sektor\ Perdagangan\ (\%) = (\frac{PDRB\ Sektor\ Perdagangan}{Total\ PDRB}) \times 100$<br>Keterangan :<br>• PDRB Sektor Perdagangan: Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (atau konstan) yang berasal dari sektor perdagangan besar dan eceran.<br>• Total PDRB: Jumlah seluruh nilai tambah bruto dari seluruh sektor ekonomi dalam wilayah tertentu. |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilainya, semakin besar peran sektor perdagangan dalam membentuk PDRB |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik (BPS): Tabel PDRB Menurut Lapangan Usaha |
| Frekuensi | Tahunan |

**2) EKSPOR BARANG DAN JASA (% PDRB)**

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja daerah (IV.C.8)

### 3) PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR PERDAGANGAN (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan (%) |
| Definisi | Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan merupakan tingkat pertumbuhan dari aktivitas pada sektor perdagangan yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota dibandingkan dengan tahun sebelumnya |
| Rumus Perhitungan | $pertmbPDRB_D = \frac{(PDRB_{D(n)} - PDRB_{D\,(n-1)}}{PDRB_{n-1}} x100$ |
| Interpretasi | Semakin tinggi tingkat pertumbuhan semakin besar kontribusi dan berkembangnya sektor perdagangan pada suatu daerah |
| Sumber Data | Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh |
| Frekuensi | Tahunan |

## e) URUSAN PERINDUSTRIAN

### 1) PERSENTASE PENINGKATAN NILAI PRODUKSI (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Peningkatan Nilai Produksi (%) |
| Definisi | Persentase Peningkatan Nilai Produksi digunakan untuk mengukur jumlah peningkatan nilai produksi dibandingkan dengan kondisi di tahun sebelumnya |
| Rumus Perhitungan | $\%pennilprod = \frac{nilprod_n - nilprod_{n-1}}{nilprod_{n-1}} x100\%$<br>dimana<br>%pennilprod = Persentase peningkatan nilai produksi<br>$nilprod_n$ = Nilai produksi tahun berjalan<br>$nilprod_{n-1}$ = Nilai produksi tahun sebelumnya |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase peningkatannya berarti mengindikasikan terjadi peningkatan produktifitas di sektor industri |
| Sumber Data | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| Frekuensi | Tahunan |

### 2) Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator sasaran visi (II.B)

### 3) PROPORSI JUMLAH IKM (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Proporsi Jumlah IKM (%) |
| Definisi | Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama |
| Rumus Perhitungan | $Proporsi\ IKM = \frac{Jml\ Unit\ IKM}{Total\ Jml\ Unit\ Industri}$ |

| | |
|---|---|
| Interpretasi | Industri kecil dan menengah (IKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi<br>IKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. |
| Sumber Data | a. Survei Industri Kecil dan Menengah, Badan Pusat Statistik<br>b. Survei Industri Menengah dan Besar, Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Tahunan |

## 4. FUNGSI PENDUKUNG

### a) KESEKRETARIATAN DAERAH

#### 1) INDEKS PELAYANAN PUBLIK (INDEKS)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator sasaran visi (II.S)

#### 2) INDEKS REFORMASI BIROKRASI (INDEKS)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks) |
| Definisi | Indeks RB adalah gambaran tingkat kemajuan di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah dalam mewujudkan birokrasi yang berkualitas |
| Rumus Perhitungan | a. Terdapat 3 variabel yaitu (i) komponen (ii) sub komponen dan (iii) indikator, dimana komponen dan sub komponen dialokasikan nilai sebagai berikut : |

| NO. | KOMPONEN | BOBOT | SUB KOMPONEN |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengungkit | 60% | |
| | Aspek Pemenuhan | 20% | 1) Manajemen Perubahan (2%)<br>2) Deregulasi Kebijakan (2%)<br>3) Penataan Organisasi (3%)<br>4) Peantaan Tatalaksana (2,5%)<br>5) Penataan Manajemen Sdm (3%)<br>6) Penguatan Akuntabilitas (2,5%)<br>7) Penguatan Pengawasan (2,5%)<br>8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,5%) |
| | Aspek Hasil Antara | 10% | 1) Kualitas Pengelolaan Arsip (1%)<br>2) Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang (1%)<br>3) Kualitas Pengelolaan Keuangan (1%)<br>4) Kualitas Pengelolaan Aset (1%)<br>5) *Merit System* (1%)<br>6) Asn Profesional (1%)<br>7) Kualitas Perencanaan (1%)<br>8) Maturitas Spip (1%)<br>9) Kapabilitas Apip (1%)<br>10) Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan (1%) |
| | Aspek Reform | 30% | 1) Manajemen Perubahan (3%) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 2) Deregulasi Kebijakan (3)<br>3) Penataan Organisasi (4,5%<br>4) Penataan Tatalaksana (3,75%)<br>5) Penataan Manajemen Sdm (4,5%)<br>6) Penguatan Akuntabilitas (3,75%<br>7) Penguatan Pengawasan (3,75%)<br>8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,75%) |
| **2** | Hasil | 40% | |
| | a. Akuntabilias Kinerja Dan Keuangan | 10% | 1) Opini Bpk (3%)<br>2) Nilai Akuntabilitas Kinerja (7) |
| | b. Kualitas Pelayanan Publik | 10% | Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (10%) |
| | c. Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas Kkn | 10% | Indeks Persepsi Anti Korupsi (10%) |
| | d. Kinerja Organisasi | 10% | 1) Capaian Kinerja (5%)<br>2) Kinerja Lainnya (2%)<br>3) Survey Internal Organisasi (3%) |

b. Setiap sub komponen pada komponen pengungkit akan dibagi ke dalam beberapa pernyataan sebagai indikator pemenuhan sub komponen tersebut. Setiap pertanyaan/pernyataan akan dijawab dengan ya/tidak atau a/b/c atau a/b/c/d/e atau numerik. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab ya atau tidak. Jawaban a/b/c/d/e dan a/b/c diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang menggunakan skala ordinal, jawaban numerik diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang dapat dihitung langsung ketercapaiannya.

c. Setiap jawabannya "Ya" akan diberikan nilai 1 sedangkan jawaban "Tidak" maka akan diberikan nilai 0.

d. Dalam memberikan penilaian "ya" atau "tidak" maupun "a/b/c/d/e", asesor harus menggunakan professional judgementnya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap indikator, dan didukung dengan suatu kertas kerja penilaian mandiri.

e. Setiap sub-komponen pada komponen hasil akan dibagi kedalam beberapa pernyataan sebagai indikator pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan/pernyataan akan dijawab dengan angka nominal.

f. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut: (i) Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen, sehingga ditemukan suatu angka tertentu, misal: sub-komponen Pengendalian Gratifikasi mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki

| | |
|---|---|
| | 10 (sepuluh) buah pertanyaan. Dari 10 (sepuluh) pertanyaan tersebut apabila pertanyaan yang dijawab "Ya" ada 3 (tiga) pertanyaan, maka nilai untuk sub-komponen tersebut adalah: (3/10) x 10 = 3; (ii) Untuk indikator yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub indikator, penyimpulan tentang indikator dilakukan melalui nilai rata-rata; (iii) Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan range nilai antara 0 s.d. 100.<br>g. Pertanyaan atau pernyataan dikategorikan ke dalam 2 level, yaitu pertanyaan atau pernyataan level instansi/pusat dan level unit kerja. Pemetaan beberapa pertanyaan atau pernyataan tersebut sebagai berikut : (i) Pertanyaan atau pernyataan yang hanya terdapat pada level instansi/pusat; (ii) Pertanyaan atau pernyataan yang hanya terdapat pada level unit kerja; dan (iii) Pertanyaan atau pernyataan yang hanya terdapat pada level instansi/pusat dan level unit kerja. |
| Interpretasi | Indeks RB berfungsi juga memastikan pemerintahan terbebas atau bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Inilah yang membuat saat sebuah instansi pemerintah memiliki Indeks RB yang tinggi, maka tujuan-tujuan dari Indeks RB yang telah dipaparkan sebelumnya semakin bisa terwujud. |
| Sumber Data | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. |
| Frekuensi | Tahunan |

### 3) INDEKS REFORMASI HUKUM (NILAI)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Reformasi Hukum (Indeks) |
| Definisi | Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. |
| Rumus Perhitungan | Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut:<br>a. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%,<br>b. Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas, dengan bobot 25%, |

| | |
|---|---|
| | c. Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasil reviu, dengan bobot 35%,<br>d. Penataan database PUU, dengan bobot 15%.<br>Dalam hal ini, sumber data yang digunakan oleh IRH adalah data administratif Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah. Kategori penilaian IRH:<br>a. AA >90 – 100 Istimewa<br>b. A >80 – 90 Sangat Baik<br>c. BB >70 – 80 Baik<br>d. B >60 – 70 Cukup Baik<br>e. CC >50 – 60 Cukup<br>f. C >30 – 50 Buruk<br>g. D 0 – 30 Sangat Buruk<br>Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (*self-assesment*) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap self-assesment tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian. |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan |
| Sumber Data | Kementerian Hukum dan HAM |
| Frekuensi | Tahunan |

**4) INDEKS BerAKHLAK (NILAI)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Ber-Akhlak (Nilai) |
| Definisi | Indeks BerAKHLAK adalah alat untuk mengetahui tingkat kesehatan budaya organisasi mengenai implementasi Core Values BerAKHLAK, keselarasan antara nilai pribadi dan organisasi. |
| Rumus Perhitungan | Perhitungan Indeks BerAKHLAK berdasarkan :<br>1. Hasil Survei BerAKHLAK (Bobot 80%)<br>2. Hasil Evaluasi Organisasi (Bobot 20%)*<br>*) Catatan :<br>Perhitungan Indeks BerAKHLAK menggunakan Hasil Evaluasi Organisasi (Bobot 20%) hanya pada tahun 2024, pada tahun sebelumnya hanya berdasarkan hasil Survei BerAKHLAK |
| Interpretasi | Survei Indeks BerAKHLAK dilaksanakan terhadap ASN dengan jumlah responden minimal ditentukan oleh Kementerian PANRB.<br>Kategori Indeks BerAKHLAK yaitu : |

| PREDIKAT | KATEGORI | RANGE INDEKS | DESKRIPSI |
|---|---|---|---|
| A | Sehat | 75%-100% | Nilai Berakhlak Sudah Sangat Erat Menjadi Bagian Dari Perilaku Kerja Sehari-Hari Dan Menjadi Ciri Khas |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Yang Mewakili Individu Di Dalam Organisasi Tersebut |
| | **B** | Cukup Sehat | 50%-74,9% | Pegawai Sudah Mengimplementasikan Nilai-Nilai Berakhlak Dalam Perilaku Kerja Sehari-Hari Dengan Baik |
| | **C** | Tidak Sehat | 25%-49,9% | Pegawai Memiliki Tingkat Implementasi Nilai Berakhlak Yang Rendah Ke Dalam Perilaku Kerja Sehari-Hari |
| | **D** | Sangat Tidak Sehat | 0%-24,9% | Pegawai Memiliki Tingkat Implementasi Nilai Berakhlak Yang Sangat Rendah Ke Dalam Perilaku Kerja Sehari-Hari |
| Sumber Data | Kementerian PAN DAN RB | | | |
| Frekuensi | Tahunan | | | |

### 5) INDEKS AKSES KEUANGAN DAERAH (IKAD)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) |
| Definisi | Indeks yang menggambarkan kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten/Kota, yang dihitung dari data *supply* dan *demand*. Indeks terdiri dari 14 indikator yang terbagi dalam 3 dimensi yaitu Penggunaan, Ketersediaan dan Kedalaman. Nilai indeks berkisar antara 0-10 |
| Rumus Perhitungan | $IKAD_m = \left(\sum_{i=1}^{14} a_i Z_{im}\right) x10$<br>Dimana $a_i$ merupakan bobot dari masing-masing indikator yang telah disesuaikan menjadi skala |
| Interpretasi | Menggambarkan tingkat akses keuangan di kabupaten dan kota, dimana semakin tinggi nilai indeks menggambarkan tingkat akses keuangan yang semakin baik. Nilai indeks juga menunjukkan adanya tantangan dalam inklusi keuangan, seperti keterbatasan infrastruktur keuangan, rendahnya literasi keuangan, kepemilikan produk/layanan keuangan yang belum terjangkau, atau kedalaman/kualitas penggunaan produk/layanan keuangan |
| Sumber Data | Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) |
| Frekuensi | Tahunan |

### 6) INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) |
| Definisi | Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah terutama terhadap dampak atau hasil bagi pembangunan yang strategis dengan mengedepankan prinsip berbasis bukti (*evidence-based)* |

| | |
|---|---|
| Rumus Perhitungan | Perhitungan Indeks Kualitas Kebijakan berdasarkan pembobotan Instrumen IKK yang terdiri dari :<br>**1. Profil (Bobot 10%) :**<br>Pelibatan pejabat fungsional Analis Kebijakan dalam pengukuran kualitas kebijakan.<br>**2. Perencanaan Kebijakan (Bobot 20%) :**<br>1) penyusunan kebijakan yang didasarkan pada data dan informasi yang valid;<br>2) keterlibatan pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan; dan<br>3) pelaksanaan analisis dampak sebelum kebijakan diimplementasikan<br>**3. Implementasi Kebijakan (Bobot 25%) :**<br>1) kejelasan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan;<br>2) efektifitas pelaksanaan kebijakan di lapangan; dan<br>3) adanya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan.<br>**4. Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan (Bobot 30%) :**<br>1) adanya evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan;<br>adanya dampak yang terukur bagi masyarakat; dan<br>2) adanya keselarasan kebijakan dengan kebijakan lain yang relevan.<br>**5. Transparansi dan Partisipasi Publik (Bobot 15%) :**<br>1) tersedianya akses informasi kebijakan bagi publik; dan<br>2) adanya mekanisme bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau mengajukan keberatan. |
| Interpretasi | Pengukuran kualitas kebijakan dilakukan setiap tahun dengan objek kebijakan yaitu kebijakan pembangunan strategis dari Instansi Pemerintah untuk pembangunan berkelanjutan yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan mendukung pertumbuhan perekonomian;<br>Kebijakan pembangunan strategis dimaksud harus memenuhi kriteria :<br>a. mengatur kepentingan dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas dan<br>b. telah ditetapkan dan diimplementasikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum tahun pengukuran.<br><br>Pengukuran IKK dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :<br>1. Registrasi melalui Sistem Informasi Pengukuran Kualitas Kebijakan<br>2. Pengukuran mandiri (*self asessment)*<br>3. Verifikasi hasil pengukuran mandiri<br>4. Penyampaian umpan balik (*feedback)* |

| | |
|---|---|
| | 5. Perbaikan pengukuran berdasarkan umpan balik (*feedback*)<br>6. Pembahasan hasil pengukuran<br>7. Penetapan hasil pengukuran kualitas kebijakan Instansi Pemerintah<br>Kualifikasi nilai kualitas kebijakan dalam Indeks Kuatiras Kebijakan yaitu :<br><br>**NILAI** / **KUALIFIKASI**<br>91,00 - 100 / Unggul<br>80,00 – 90,99 / Sangat Baik<br>65,00 – 79,99 / Baik<br>50,00 – 64,99 / Cukup<br>< 50,00 / Kurang |
| Sumber Data | LAN RI |
| Frekuensi | Tahunan |

**7) INDEKS ZAKAT NASIONAL (INDEKS)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Zakat Nasional (Indeks) |
| Definisi | Indeks yang menggambarkan kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten/Kota, yang dihitung dari data *supply* dan *demand*. Indeks terdiri dari 14 indikator yang terbagi dalam 3 dimensi yaitu Penggunaan, Ketersediaan dan Kedalaman. Nilai indeks berkisar antara 0-10 |
| Rumus Perhitungan | $IKAD_m = \left(\sum_{i=1}^{14} a_i Z_{im}\right) x10$<br>Dimana $a_i$ merupakan bobot dari masing-masing indikator yang telah disesuaikan menjadi skala |
| Interpretasi | Menggambarkan tingkat akses keuangan di kabupaten dan kota, dimana semakin tinggi nilai indeks menggambarkan tingkat akses keuangan yang semakin baik. Nilai indeks juga menunjukkan adanya tantangan dalam inklusi keuangan, seperti keterbatasan infrastruktur keuangan, rendahnya literasi keuangan, kepemilikan produk/layanan keuangan yang belum terjangkau, atau kedalaman/kualitas penggunaan produk/layanan keuangan |
| Sumber Data | Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) |
| Frekuensi | Tahunan |

**8) NILAI EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (NILAI)**

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator sasaran visi (II.F)

**9) NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (NILAI)**

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.V)

**10) NILAI EVALUASI AKIP (NILAI)**

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.W)

**11) PERSENTASE KERJASAMA WAJIB YANG DILAKSANAKAN (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan (%) |
| Definisi | Persentase dari total kerja sama wajib antara pemerintah daerah (kabupaten/kota) dengan pemerintah provinsi atau nasional atau dengan kabupaten/kota lainnya yang telah dilaksanakan atau dipenuhi dalam suatu periode waktu tertentu. Kerja sama wajib biasanya merujuk pada peraturan atau keputusan yang mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan tindakan atau menyediakan sumber daya tertentu sebagai bagian dari kesepakatan atau perjanjian dengan pihak lainnya, seperti pemerintah provinsi atau nasional. |
| Rumus Perhitungan | $\%\ Kerjasama\ Wajib\ yang\ Dilaksanakan = \frac{Jumlah\ Kerjasama\ Wajib\ yang\ telah\ Dilaksanakan\ atau\ Dipenuhi}{Total\ Kerjasama\ Wajib\ yang\ Diharuskan\ atau\ Diperintahkan} x100$ |
| Interpretasi | Indikator ini mengukur sejauh mana pemerintah daerah (kabupaten/kota) telah memenuhi kewajiban atau kesepakatan yang diatur dalam peraturan atau keputusan untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah provinsi atau nasional atau kabupaten/kota lain. Kerja sama ini dapat berupa pengalokasian sumber daya, pelaksanaan program atau proyek bersama, atau kewajiban lainnya yang telah ditetapkan dalam perjanjian atau aturan hukum.<br>Dalam konteks ini, persentase kerja sama wajib yang dilaksanakan menggambarkan efektivitas pemerintah daerah dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Semakin tinggi persentase ini, semakin baik pula implementasi kerja sama wajib yang dilakukan oleh pemerintah daerah.<br>Indikator ini penting untuk mengukur ketaatan dan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi komitmen serta menjaga konsistensi dalam pelaksanaan kerja sama dengan tingkat yang telah ditetapkan dalam regulasi atau perjanjian yang berlaku. Evaluasi terhadap indikator ini dapat memberikan gambaran tentang efisiensi administrasi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. |
| Sumber Data | Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah |
| Frekuensi | Tahunan |

## 12) INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA (INDEKS)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Indeks) |
| Definisi | Indikator ini atau juga dikenal dengan Tingkat Kematangan UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) adalah ukuran capaian tingkat pengembangan kelembagaan UKPBJ di suatu daerah berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), mencakup aspek kelembagaan, SDM, proses bisnis, sistem informasi, dan peran strategis UKPBJ. |
| Rumus Perhitungan | $Tingkat\ Kematangan\ UKPBJ\ (\%) = (\frac{Nilai\ Skor\ Kematangan\ Saat\ Ini}{Nilai\ Skor\ Maksimum}) \times 100$<br><br>Keterangan :<br>• **Nilai Skor Kematangan Saat Ini**: Total nilai penilaian dari LKPP berdasarkan indikator penilaian (biasanya menggunakan kuesioner atau instrumen penilaian mandiri/evaluasi eksternal).<br>• **Nilai Skor Maksimum**: Nilai maksimal yang dapat dicapai sesuai indikator LKPP (biasanya 100 poin atau sesuai bobot terkini). |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilainya, semakin matang dan strategis peran UKPBJ dalam mendukung belanja daerah |
| Sumber Data | Laporan Evaluasi Kematangan UKPBJ oleh LKPP |
| Frekuensi | Tahunan (sesuai jadwal evaluasi LKPP) |

## 13) INDEKS KEMATANGAN ORGANISASI (INDEKS)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Kematangan Organisasi (Indeks) |
| Definisi | Indeks Kematangan Organisasi (IKO) adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan suatu organisasi pemerintah dalam hal penerapan sistem, tata kelola, proses, sumber daya manusia, budaya kerja, serta kemampuan beradaptasi dan berinovasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. |
| Rumus Perhitungan | $Indeks\ Kematangan\ Organisasi\ (IKO) = \frac{\sum(Nilai\ Aspek \times Bobot)}{Total\ Bobot}$ |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai, semakin matang dan efektif organisasi menjalankan fungsinya |
| Sumber Data | Laporan Evaluasi Kelembagaan |
| Frekuensi | Tahunan |

## 14) ROA BUMD (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | *Return on Asset (*ROA) BUMD (%) |
| Definisi | *Return On Asset* (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. *Return On Asset* (ROA) dihitung dengan |

| | |
|---|---|
| | membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan. |
| Rumus Perhitungan | $ROA = \frac{laba\ bersih}{total\ aset} x100\%$ |
| Interpretasi | *Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan. |
| Sumber Data | LKPD, BPS, Laporan keuangan BUMD. (*) *menyesuaikan ketersediaan data di daerah dan akan dikonfirmasi lebih lanjut" |
| Frekuensi | Tahunan |

**b) KESEKRETARIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**1) NILAI IKM DPRD (NILAI)**

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.V)

**2) PERSENTASE RANPERDA YANG DITETAPKAN (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Ranperda yang Ditetapkan (%) |
| Definisi | Mengukur tingkat capaian penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam satu periode tertentu (biasanya satu tahun), dibandingkan jumlah Ranperda yang telah direncanakan atau diajukan. |
| Rumus Perhitungan | $\%Ranperda\ yang\ ditetapkan = \frac{Jumlah\ Ranperda\ yang\ ditetapkan\ menjadi\ Perda}{Jumlah\ Ranperda\ yang\ direncanakan/diusulkan} x100\%$<br><br>Nilai 100% berarti semua Ranperda yang direncanakan berhasil ditetapkan menjadi Perda<br>Nilai dibawah 100% menunjukkan ada Ranperda yang belum selesai proses pembahasannya atau tidak dilanjutkan. |
| Interpretasi | - Semakin tinggi persentase (mendekati atau sama dengan 100%), semakin baik kinerja DPRD dan Pemerintah daerah dalam menuntaskan pembahasan Ranperda sesuai jadwal dan prioritas yang telah ditetapkan dalam Propemperda<br>- Persentase rendah menunjukkan bahwa terdapat hambatan atau keterlambatan dalam proses |

| | |
|---|---|
| | pembahasan, seperti perbendaan pandangan, perubahan prioritas atau kendala teknis/administratif. |
| Sumber Data | Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD |
| Frekuensi | Tahunan |

## 5. FUNGSI PENUNJANG

### a) PERENCANAAN

#### 1) INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (ANGKA)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Angka) |
| Definisi | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah adalah ukuran komposit yang menggambarkan kualitas dan konsistensi proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, keterpaduan, partisipatif, serta ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. |
| Rumus Perhitungan | $$Indeks\ Perencanaan\ Pembangunan\ Daerah = \frac{\sum_i^n = 1\ (Skor i \times Boboti)}{\sum_i^n = 1\ Boboti}$$<br>Keterangan :<br>• Skor i = Nilai dari setiap aspek penilaian (0–100)<br>• Bobot i = Bobot pentingnya aspek tersebut terhadap kualitas perencanaan<br>• Aspek penilaian meliputi, misalnya:<br>➢ Kelengkapan dokumen<br>➢ Konsistensi antar dokumen (RPJMD–RKPD–Renja)<br>➢ Keterpaduan dengan prioritas nasional<br>➢ Tingkat partisipasi masyarakat<br>➢ Penggunaan sistem informasi (SIPD)<br>➢ Ketepatan waktu penyusunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilainya, semakin baik kualitas tata kelola perencanaan (Perumusan saat ini menggunakan metode perumusan baru) |
| Sumber Data | Bappeda (dokumen RPJMD, RKPD, Renja, Renstra) |
| Frekuensi | Tahunan |

#### 2) NILAI EVALUASI AKIP KOMPONEN PERENCANAAN KINERJA (NILAI)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Nilai Evaluasi AKIP Komponen Perencanaan Kinerja (Nilai) |
| Definisi | Nilai evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) komponen perencanaan kinerja merupakan ukuran sejauh mana perencanaan kinerja instansi pemerintah telah memenuhi standar yang ditetapkan. Evaluasi ini menilai kualitas dan keselarasan perencanaan kinerja, termasuk perencanaan strategis, rencana kinerja tahunan, dan rencana aksi, dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. |

| | |
|---|---|
| Rumus Perhitungan | Nilai evaluasi AKIP komponen Perencanaan Kinerja pada dasarnya tidak memiliki rumus tunggal yang baku. Penilaian AKIP, termasuk komponen Perencanaan Kinerja, dilakukan dengan menggunakan pendekatan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Penilaian berfokus pada pemenuhan kriteria dan bobot yang ditentukan untuk setiap aspek perencanaan kinerja |
| Interpretasi | Interpretasi nilai evaluasi AKIP komponen Perencanaan Kinerja merujuk pada penilaian atas kualitas dan efektivitas perencanaan kinerja yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah dalam konteks AKIP. Penilaian ini mencakup berbagai aspek seperti keselarasan perencanaan, keterukuran target, dan kelengkapan dokumen perencanaan |
| Sumber Data | Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra), Dokumen Perjanjian Kinerja, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Rencana Aksi, Laporan Kinerja, Hasil Evaluasi AKIP sebelumnya, Laporan Kinerja Instansi, Dokumen pendukung lainnya |
| Frekuensi | Tahunan |

**b) KEUANGAN**

**1) IPKD (SKOR)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | IPKD (Skor) |
| Definisi | Melihat nilai dari kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah |
| Rumus Perhitungan | 1. Bobot Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran = 15<br>2. Bobot Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD = 20<br>3. Bobot Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah = 15<br>4. Bobot Dimensi Penyerapan Anggaran = 20<br>5. Bobot Dimensi Kondisi Keuangan Daerah = 15<br>6. Bobot Dimensi Opini BPK atas LKPD = 15 |
| Interpretasi | Merupakan jumlah bobot dari keenam komponen kinerja atau kriteria dimaksud |
| Sumber Data | BKD/SK Mendagri Hasil Pengukuran IPKD |
| Frekuensi | Tahunan |

**2) OPINI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DARI BPK (OPINI)**

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.X)

### 3) PERSENTASE BELANJA PEGAWAI TERHADAP BELANJA DAERAH DILUAR TUNJANGAN GURU YANG DIALOKASIKAN MELALUI TKD (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Belanja Pegawai terhadap Belanja Daerah diluar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (%) |
| Definisi | Indikator ini merupakan indikator untuk mengukur rasio belanja pegawai di luar guru |
| Rumus Perhitungan | $\%blnjpgwiexguru = \frac{jumlah\ belanja\ pegawai\ di\ luar\ guru}{jumlah\ APBD} x100\%$ |
| Interpretasi | 1. Pembilang<br>Jumlah belanja pegawai diluar guru adalah jumlah realisasi seluruh komponen belanja pegawai antara lain gaji, tunjangan yang melekat pada gaji dan tunjangan kinerja, tidak termasuk belanja pegawai guru<br>2. Penyebut<br>Jumlah APBD adalah jumlah realisasi seluruh belanja daerah |
| Sumber Data | Sistem Informasi Pemerintah Daerah/LRA/BKD |
| Frekuensi | Tahunan |

### 4) PERSENTASE PENURUNAN SILPA (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase penurunan SILPA (%) |
| Definisi | Persentase Penurunan Silpa merupakan suatu indikator untuk mengukur Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya |
| Rumus Perhitungan | $\%penurunansilpa = \frac{nilai\ realisasi\ SILPA}{tot\ belanja\ anggaran\ tahun\ sebelumnya} x100\%$ |
| Interpretasi | 1. Pembilang<br>Nilai realisasi SILPA (sisa lebih perhitungan anggaran) dalam APBD pada tahun pelaporan<br>2. Penyebut<br>Total belanja anggaran dalam APBD yang ditetapkan pada tahun sebelumnya (APBD sebelum perubahan/murni) |
| Sumber Data | Sistem Informasi Pemerintah Daerah/LRA/BKD |
| Frekuensi | Tahunan |

### 5) PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN TEPAT WAKTU (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu (%) |
| Definisi | Persentase laporan keuangan tepat waktu merupakan indikator untuk melihat perkembangan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah dan kualitas dari tahun sebelumnya |
| Rumus Perhitungan | $\%lapkeuontime = \frac{tglpenyampaian\ yang\ ditentukan}{tgl\ penyampaian\ yang\ dilaksanakan} x100\%$ |
| Interpretasi | 1. Pembilang |

| | |
|---|---|
| | Tanggal penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK RI Perwakilan Sumbar pada tahun berjalan yang telah ditentukan (pada akhir maret setiap tahunnya)<br>2. Penyebut<br>Tanggal penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK RI Perwakilan Sumbar pada tahun berjalan yang dilaksanakan oleh BKD dan Pemerintah Kota Payakumbuh ke Kantor BPK RI |
| Sumber Data | BPK RI/Dokumentasi/Surat Penyampaian oleh BKD |
| Frekuensi | Tahunan |

**6) PERSENTASE PENAMBAHAN NILAI ASET TETAP (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%) |
| Definisi | Persentase penambahan nilai aset tetap merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur rasio nilai aset tetap |
| Rumus Perhitungan | $\%tmbhnilasetttp = \frac{total\ aset\ tetap_n}{total\ aset\ tetap_{n-1}} x100\%$ |
| Interpretasi | 1. Pembilang<br>Dokumen daftar aset tetap atau hasil inventarisasi aset tahunan atau nilai aset tetap yang tercantum dalam laporan anggaran yang merupakan laporan tahun berjalan<br>2. Penyebut<br>Dokumen daftar aset tetap atau hasil inventarisasi aset tahunan atau nilai aset tetap yang tercantum dalam laporan keuangan yang merupakan laporan tahun n-1 atau tahun sebelumnya |
| Sumber Data | BKD/Neraca |
| Frekuensi | Tahunan |

**7) PERSENTASE PENERIMAAN PAD TERHADAP TOTAL PENERIMAAN PENDAPATAN (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Penerimaan PAD terhadap Total Penerimaan Pendapatan (%) |
| Definisi | Indikator ini merupakan indikator untuk mengukur *Tax Rasio* atau Kemampuan Daerah dalam mengumpulkan Pajak dari Potensi Pajak Daerah |
| Rumus Perhitungan | $\%taxrasio = \frac{jml\ PAD}{jml\ pendapatan\ pada\ APBD} x100\%$ |
| Interpretasi | 1. Pembilang<br>Jumlah realisasi seluruh pendapatan asli daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah |

| | |
|---|---|
| | 2. Penyebut<br>Jumlah realisasi seluruh pendapatan daerah yang meliputi PAD, pendapatan transfer, dan lain lain pendapatan daerah yang sah |
| Sumber Data | Sistem Informasi Pemerintah Daerah/LRA/BKD |
| Frekuensi | Tahunan |

**8) PERSENTASE PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN BERBASIS DIGITAL (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (%) |
| Definisi | Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital merupakan indikator untuk melihat kemampuan Pemerintah Daerah dalam menerapkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah yang berbasis digital |
| Rumus Perhitungan | $\%SIK = \frac{jml\ sapras\ digitalisasi\ yang\ dibutuhkan}{jml\ sapras\ digitalisasi\ yang\ tersedia} x100\%$ |
| Interpretasi | 1. Pembilang<br>Jumlah sarana prasarana dimaksud adalah jumlah sarana prasarana baik perangkat lunak maupun perangkat keras yang dibutuhkan yang terdapat pada laporan RKBMD dan RKBMD Perubahan serta Laporan Data Base Pajak dan Retribusi Daerah<br>2. Penyebut<br>Jumlah sarana prasarana dimaksud adalah jumlah sarana prasarana baik perangkat lunak maupun perangkat keras yang tersedia yang terdapat pada laporan RKBMD dan RKBMD Perubahan serta Laporan Data Base Pajak dan Retribusi Daerah |
| Sumber Data | BKD |
| Frekuensi | Tahunan |

**c) KEPEGAWAIAN**

**1) INDEKS IMPLEMENTASI NSPK MANAJEMEN ASN (INDEKS)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN (Indeks) |
| Definisi | Ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian implementasi NSPK Manajemen ASN dan merupakan salah satu metode pengawasan dan pengendalian implementasi NSPK Manajemen ASN di Instansi Pemerintah. |
| Rumus Perhitungan | Formulasi penghitungan Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN berdasarkan rumus pengolahan hasil yang terdapat pada sistem aplikasi indeks. Implementasi NSPK Manajemen ASN yang di kembangkan oleh BKN sebagai berikut : |

| | |
|---|---|
| | a. Nilai Indeks dengan jumlah antara 85,01 sampai dengan 100,00 diberi kategori A dengan Predikat Unggul;<br>b. Nilai Indeks dengan jumlah antara 70,01 sampai dengan 85,00 diberi kategori B dengan Predikat Baik;<br>c. Nilai Indeks dengan jumlah antara 55,01 sampai dengan 70,00 diberi kategori C dengan Predikat Cukup;<br>d. Nilai Indeks dengan jumlah antara 40,01 sampai dengan 55,00 diberi kategori D dengan Predikat Kurang; dan<br>e. Nilai Indeks dengan jumlah antara 25,00 sampai dengan 40,00 diberi kategori E dengan Predikat Buruk. |
| Interpretasi | Semakin tinggi Nilai Indeks NSPK Instansi Pemerintah, semakin tinggi kualitas manajemen ASN |
| Sumber Data | Badan Kepegawaian Negara (BKN) |
| Frekuensi | Tahunan |

**2) Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Profesionalitas ASN (Indeks) |
| Definisi | Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan |
| Rumus Perhitungan | Jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator.<br>$IP = \sum_{i=1}^{4} IP_i$<br>$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$<br>$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$<br>$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$<br>$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$<br>$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$<br>Keterangan:<br>IP = Indeks Profesionalisme<br>$IP_i$ = Indeks Profesionalisme Ke-i<br>$IP_1$ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi<br>$IP_2$ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi<br>$IP_3$ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja<br>$IP_4$ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin<br>$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi Ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j<br>$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi Ke-K * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-K<br>$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi Ke-1 * Rating Jawaban indikator Kualifikasi Ke-1<br>$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi Ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi Ke-m |

| | |
|---|---|
| | Kategori Penilaian :<br>a. Sangat Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 91–100;<br>b. Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 81–90;<br>c. Sedang yang memiliki rentang nilai antara 71–80;<br>d. Rendah yang memiliki rentang nilai antara 61–70; dan<br>e. Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai 60 kebawah. |
| Interpretasi | Semakin tinggi indeks Profesionalitas ASN, maka semakin profesional ASN. |
| Sumber Data | Badan Kepegawaian Negara (BKN) |
| Frekuensi | Tahunan |

**d) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

**1) INDEKS PROFESIONALITAS ASN DIMENSI KOMPETENSI (INDEKS)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi (Indeks) |
| Definisi | Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kompetensi pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh ASN dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan |
| Rumus Perhitungan | Jumlah hasil perkalian dari bobot indikator kompetensi dikalikan nilai jawaban indikator kompetensi.<br>Kriteria penilaian dimensi kompetensi :<br>1. Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran.<br>2. Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas :<br>a. Diklat Kepemimpinan;<br>b. Diklat Fungsional;<br>c. Diklat Teknis; dan<br>d. Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya. |
| Interpretasi | Semakin tinggi Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi, semakin kompeten ASN dalam menjalankan tugas jabatan. |
| Sumber Data | Badan Kepegawaian Negara (BKN) |
| Frekuensi | Tahunan |

**e) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

**1) INDEKS INOVASI DAERAH (NILAI)**

Metadata dapat dilihat pada indikator kinerja sasaran visi (II.G)

### 2) PERSENTASE KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI (INDEKS)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Kebijakan Berbasis Bukti (Indeks) |
| Definisi | Persentase Kebijakan Berbasis Bukti adalah proporsi dokumen kebijakan (peraturan, program, atau kegiatan) yang disusun berdasarkan hasil kajian, data, analisis, atau riset yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, terhadap total jumlah kebijakan yang disusun dalam satu periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase. |
| Rumus Perhitungan | $\%kebijakabasebukti = \frac{jkebijkanberbasisbukti}{tkebijakan} x100$<br>Keterangan :<br>- Jumlah Kebijakan Berbasis Bukti: Dokumen kebijakan (misalnya: RPJMD, RKPD, Renja, Perkada, Perda, Program, atau kegiatan) yang dilengkapi dengan justifikasi berbasis data, kajian akademik, riset, statistik, survei, atau analisis kebijakan.<br>- Total Jumlah Kebijakan: Keseluruhan dokumen kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah pada periode tertentu (misalnya dalam satu tahun anggaran). |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin kuatnya penerapan prinsip evidence-based policy |
| Sumber Data | Bappeda (Dokumen RPJMD, RKPD, Renstra, Renja) |
| Frekuensi | Tahunan |

## 6. PENGAWASAN

### a) INSPEKTORAT

### 1) PERSENTASE PEMENUHAN INDIKATOR MSCP (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Pemenuhan Indikator MSCP (%) |
| Definisi | Persentase pemenuhan indikator MSCP merupakan indikator yang memperlihatkan pemenuhan dari komitmen dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan yang mencakup delapan area intervensi utama. |
| Rumus Perhitungan | Indikator MSCP yang dipenuhi dibagi Total Indikator MSCP dikali 100% |
| Interpretasi | Semakin tinggi pemenuhan dari indikator MSCP maka akan semakin baik tata kelola pemerintahan |
| Sumber Data | Komisi Pemberantasan Korupsi |
| Frekuensi | Tahunan |

### 2) KAPABILITAS APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH – APIP (LEVEL)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah – APIP (Level) |

| | |
|---|---|
| Definisi | Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah merupakan suatu penilaian terhadap tingkat kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif |
| Rumus Perhitungan | Bobot Komponen, Matriks Elemen, dan Topik Penilaian Kapabilitas APIP  |
| Interpretasi | Level Kapabilitas APIP<br>- *Initial* (Level 1) ⇒ Organisasi APIP telah terbentuk dan memiliki mandat pengawasan<br>- *Structured* (Level 2) ⇒ APIP melaksanakan mandat pengawasan dengan dukungan kualifikasi dan kompetensi SDM yang memadai<br>- *Delivered* (Level 3) ⇒ APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (assurance dan consulting) sesuai dengan standar dan praktik profesional. Dalam kondisi ini, hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola bagi organisasi K/L/D<br>- *Institutionalized* (Level 4) ⇒ APIP secara berkelanjutan telah menjadi mitra strategis bagi organisasi K/L/D hasil pengawasan APIP terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC) telah menunjukkan adanya evaluasi perbaikan kualitas pengawasan secara terus-menerus untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi K/L/D<br>- *Optimized* (Level 5) ⇒ APIP telah mampu memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan organisasi K/L/D dalam bentuk pencapaian efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan |
| Sumber Data | Badan Pegawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) |
| Frekuensi | Tahunan dengan Penilaian Mandiri pada Triwulan I dan Triwulan II dan Penetapan Level bulan Juli – Agustus Tahun Berjalan |

### 3) SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS - SPI KPK (NILAI)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Survei Penilaian Integritas - SPI KPK (Nilai) |
| Definisi | Survei Penilaian Integritas merupakan suatu alat mengukur tingkat integritas serta potensi risiko korupsi di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah |
| Rumus Perhitungan | Survei dilakukan KPK melalui link https://spi.kpk.go.id/ yang meliputi responden internal, responden eksternal, dan responden ahli . Kemudian dari hasil survei tersebut diperoleh hasil penilaian |
| Interpretasi | Kategori Indeks Integritas :<br>- 00.00 – 72.99 ⇒ Rentan<br>- 73.00 – 77.99 ⇒ Waspada<br>- 78.00 – 100.00 ⇒ Terjaga |
| Sumber Data | Komisi Pemberantasan Korupsi |
| Frekuensi | Tahunan |

## 7. KEWILAYAHAN

## a) KECAMATAN

### 1) PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN (LPM, PKK, RT/RW) YANG AKTIF (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang Aktif (%) |
| Definisi | Indikator ini digunakan untuk mengukur keaktifan dari lembaga kemasyarakatan yang ada, tercatat dan tumbuh di masyarakat sebagai salah satu wadah pemberdayaan masyarakat |
| Rumus Perhitungan | $\%\text{lembagakemasyaktif} = \frac{lembagakemasyaktif}{totallembagakemasy} x100\%$ |
| Interpretasi | Lembaga kemasyarakatan merupakan salah satu wadah pemberdayaan masyarakat, dengan semakin tingginya persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif, mengindikasikan semakin berfungsinya kelembagaan pemberdayaan di masyarakat |
| Sumber Data | Masing-masing kecamatan |
| Frekuensi | Tahunan |

### 2) PERSENTASE PENGADUAN PELAYANAN MASYARAKAT YANG DITINDAKLANJUTI (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Pengaduan Pelayanan Masyarakat yang ditindaklanjuti (%) |
| Definisi | Indikator ini digunakan untuk mengetahui respon/ tanggapan dari instansi terkait pengaduan pelayanan masyarakat yang diterima |

| | |
|---|---|
| Rumus Perhitungan | $\%\text{responaduan} = \frac{responaduan}{aduan} x100\%$ |
| Interpretasi | Pengaduan pelayanan masyarakat merupakan keluhan yang dirasakan masyarakat, dan semakin tinggi persentasenya yang berarti adanya penanganan yang cepat dan responsif terhadap aduan pelayanan masyarakat yang diterima |
| Sumber Data | Masing-masing Kecamatan |
| Frekuensi | Tahunan |

## 8. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

### 1) PERSENTASE PARTAI POLITIK DAN ORGANISASI MASYARAKAT YANG AKTIF (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Partai Politik dan Organisasi Masyarakat yang Aktif (%) |
| Definisi | Ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi jumlah partai politik dan organisasi masyarakat yang masih aktif melaksanakan kegiatan sesuai AD/ART, memiliki kepengurusan aktif, serta memenuhi kewajiban administratif (seperti pelaporan tahunan), terhadap total jumlah partai politik dan organisasi masyarakat yang terdaftar di suatu wilayah |
| Rumus Perhitungan | $\frac{Jumlah\ parpol\ dan\ ormas\ yang\ aktif}{Jumlah\ parpol\ dan\ ormas\ yang\ terdaftar}\ x\ 100\%$<br><br>Keterangan :<br>1. Parpol dan Ormas Aktif adalah organisasi yang:<br>a. Memiliki kepengurusan yang masih berjalan<br>b. Melaporkan kegiatan minimal 1×/tahun<br>c. Tidak dinyatakan tidak aktif/dibekukan<br>2. Total Parpol dan Ormas Terdaftar adalah seluruh parpol dan ormas yang masih terdata secara administratif di wilayah tersebut (baik aktif maupun tidak aktif).<br>3. Hasil dalam bentuk persentase (%) |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin tinggi partisipasi aktif partai politik dan ormas dalam kehidupan berdemokrasi |
| Sumber Data | • Database Parpol dan Ormas dari Kantor Kesbangpol<br>• Laporan Tahunan Parpol dan Ormas<br>• Hasil Monitoring & Evaluasi Kesbangpol<br>• Dokumentasi Kegiatan Parpol dan Ormas (laporan kegiatan, undangan, berita acara, dll.) |
| Frekuensi | Tahunan (Biasanya dilakukan di akhir tahun oleh Kantor Kesbangpol) |

**2) PERSENTASE PENANGANAN KONFLIK SOSIAL YG TERJADI DI TENGAH MASYARAKAT (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Penanganan Konflik Sosial Yang Terjadi di Tengah Masyarakat (%) |
| Definisi | Ukuran yang menggambarkan proporsi jumlah kasus konflik sosial yang berhasil diselesaikan secara damai dan tuntas oleh pemerintah daerah (melalui mediasi, fasilitasi, atau penyelesaian hukum), dibandingkan dengan jumlah total konflik sosial yang terjadi dalam satu periode tertentu di wilayah tersebut |
| Rumus Perhitungan | $\frac{Jumlah\ Konflik\ Sosial\ yang\ Diselesaikan}{Jumlah\ Konflik\ Sosial\ yang\ Terjadi}\ x\ 100\%$<br>Keterangan :<br>• Konflik Sosial yang Diselesaikan: Konflik yang telah melalui proses penyelesaian formal (mediasi, fasilitasi, penyelesaian hukum) dan berakhir damai atau tidak berlanjut.<br>• Total Konflik Sosial yang Terjadi: Seluruh konflik sosial yang terdeteksi, dilaporkan, dan tercatat secara resmi pada periode tersebut.<br>• Hasil Akhir: Dalam bentuk persentase |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka, semakin efektif upaya deteksi dan resolusi konflik oleh pemerintah |
| Sumber Data | • Laporan Tim Penanganan Konflik Sosial (PKS) Kota Payakumbuh<br>• • Laporan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) |
| Frekuensi | Tahunan (Biasanya dilaporkan dalam laporan akhir tahun seksi Hubungan Antar Lembaga) |

**3) INDEKS HARMONI INDONESIA – IHaI (INDEKS)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Harmoni Indonesia – Ihal (Indeks) |
| Definisi | Sebuah sistem pengukuran yang dirancang untuk menentukan tingkat harmoni dan kerukunan dalam masyarakat Indonesia khususnya pada tingkat kabupaten/kota, mencakup berbagai aspek yaitu ekonomi, sosial, budaya dan keberagaman |
| Rumus Perhitungan | Penghitungan IHaI dilakukan melalui Survei Online dengan target responden 1250. Hasil survei diolah berdasarkan Pendekatan Wellbeing Methodology (WM), yaitu: 1). Aspek harmoni Ekonomi; 2). Aspek Harmoni Sosial; 3) Harmoni Budaya; 4) Harmoni Keberagamaan. IHaI kemudian diuraikan menjadi 8 variabel, yaitu :<br>1) Variabel X1: Ketahanan Pangan dan Ekonomi Berkelanjutan, bobot 15%<br>2) Variabel X2: Peningkatan Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan, Bobot 15% |

| | |
|---|---|
| | 3) Variabel X3: Penguatan Kehidupan Sosial yang Harmonis, 11,5%<br>4) Variabel X4: Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Komunitas Marginal, 11,5%<br>5) Variabel X5: Pelestarian dan Penguatan Nilai Budaya Lokal, 11%<br>6) Variabel X6: Penguatan Akulturasi dan Keberagaman Budaya,11%<br>7) Variabel X7: Moderasi Beragama dan Toleransi Antarumat Beragama, 12,5%<br>8) Variabel X8: Penguatan Nilai-Nilai Keberagamaan dalam Kehidupan Sehari-Hari, 12,5% |
| Interpretasi | Basis Skala 9<br>> 7 = Sangat bagus<br>6,5-7 = Bagus<br>5,5-6,5 = moderat<br>< 5,5 = Kurang baik |
| Sumber Data | Survei Indeks Harmoni Indonesia (IHal) oleh Kementrian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum |
| Frekuensi | Tahunan (Biasanya dilakukan di awal tahun oleh Kementrian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum) |

# V. METADATA INDIKATOR KINERJA KUNCI

## A. LAYANAN URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR

### 1. PENDIDIKAN

#### a) TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 5-6 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PAUD (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%) |
| Definisi | Persentase anak usia 5-6 tahun yang mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dibandingkan dengan total jumlah anak usia 5-6 tahun |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sedang atau telah belajar di PAUD / Jumlah seluruh anak usia 5-6 tahun) x 100% |
| Interpretasi | - **Tingkat partisipasi tinggi:**<br>Jika tingkat partisipasi tinggi, ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak-anak usia 5-6 tahun di suatu wilayah mendapatkan pendidikan PAUD. Hal ini positif karena pendidikan PAUD dapat memberikan dasar yang kuat untuk perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak.<br>- **Tingkat partisipasi rendah:** |

| | |
|---|---|
| | Jika tingkat partisipasi rendah, ini mengindikasikan bahwa masih banyak anak usia 5-6 tahun yang belum mendapatkan akses atau belum memanfaatkan layanan PAUD. Hal ini perlu menjadi perhatian karena dapat menghambat potensi perkembangan anak.<br>- **Perbandingan antar wilayah:**<br>Tingkat partisipasi juga dapat dibandingkan antar wilayah untuk melihat kesenjangan dalam akses pendidikan PAUD. Misalnya, perbandingan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.<br>- **Faktor-faktor yang mempengaruhi:**<br>Tingkat partisipasi PAUD dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti:<br>• **Ketersediaan PAUD:** Jumlah dan lokasi PAUD yang tersedia di suatu wilayah.<br>• **Biaya:** Biaya pendidikan PAUD dan kemampuan ekonomi keluarga.<br>• **Kesadaran orang tua:** Pemahaman orang tua tentang pentingnya pendidikan PAUD.<br>**Kualitas PAUD:** Fasilitas, tenaga pendidik, dan kurikulum PAUD |
| Sumber Data | Profil Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |
| Frekuensi | Tahunan |

**2) TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 7-12 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN DASAR (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (%) |
| Definisi | Proporsi anak-anak usia tersebut yang sedang atau telah menyelesaikan pendidikan dasar (sekolah dasar) |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sedang atau telah menyelesaikan pendidikan dasar / Jumlah seluruh anak usia 7-12 tahun) * 100% |
| Interpretasi | - **Tingkat Partisipasi Kasar:**<br>Menunjukkan persentase total anak usia 7-12 tahun yang terdaftar di sekolah dasar, tanpa memandang apakah mereka sudah menyelesaikan jenjang tersebut atau belum.<br>- **Tingkat Partisipasi Murni:**<br>Menunjukkan persentase anak usia 7-12 tahun yang telah menyelesaikan pendidikan dasar.<br>- **Tingkat Partisipasi Berkelanjutan:**<br>Menunjukkan persentase anak usia 7-12 tahun yang masih bersekolah di sekolah dasar dan terus melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.<br>- **Perbandingan:**<br>Data ini juga dapat dibandingkan antar wilayah (misalnya, antar kabupaten/kota, antar provinsi) atau |

| | |
|---|---|
| | antar kelompok demografis (misalnya, laki-laki vs perempuan, kelompok pendapatan berbeda) untuk mengidentifikasi kesenjangan dan ketidaksetaraan dalam akses pendidikan dasar.<br>Data ini, yang tersedia dalam format terbuka, dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti:<br>- **Evaluasi Program:**<br>Untuk melihat efektivitas program-program pendidikan dasar yang ada dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.<br>- **Perencanaan:**<br>Untuk membantu pemerintah dan lembaga pendidikan dalam merencanakan kebijakan dan alokasi sumber daya yang lebih baik untuk pendidikan dasar.<br>- **Monitoring:**<br>Untuk melacak kemajuan dalam mencapai target universalisasi pendidikan dasar dan mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin muncul. |
| Sumber Data | Profil Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |
| Frekuensi | Tahunan |

### 3) TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 13-15 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama (%) |
| Definisi | Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13- 15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Pertama |
| Rumus Perhitungan | Persentase dari populasi usia 13-15 tahun yang saat ini terdaftar dan sedang mengikuti pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat |
| Interpretasi | (Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sedang atau telah menyelesaikan pendidikan menengah pertama / Jumlah total penduduk usia 13-15 tahun) x 100% |
| Sumber Data | - **Tingkat Partisipasi Tinggi:**<br>Jika tingkat partisipasi mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia 13-15 tahun di wilayah tersebut mendapatkan akses dan mengikuti pendidikan di SMP. Ini adalah indikator positif dari kualitas pendidikan dan upaya pemerintah dalam memastikan pendidikan dasar terpenuhi.<br>- **Tingkat Partisipasi Rendah:**<br>Jika tingkat partisipasi rendah, ini bisa menjadi tanda adanya masalah dalam akses pendidikan, seperti faktor ekonomi, sosial, atau geografis yang menghalangi anak-anak untuk bersekolah. Perlu ada upaya lebih lanjut untuk mengatasi hambatan ini dan memastikan semua anak usia SMP mendapatkan haknya untuk belajar.<br><br>Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi: |

| | |
|---|---|
| | - **Ketersediaan Sekolah:**<br>Jumlah dan lokasi sekolah SMP yang memadai di suatu wilayah sangat berpengaruh.<br>- **Biaya Pendidikan:**<br>Biaya pendidikan, termasuk biaya pendaftaran, seragam, buku, dan lain-lain, bisa menjadi penghalang bagi keluarga yang kurang mampu.<br>- **Faktor Sosial dan Budaya:**<br>Norma sosial dan budaya tertentu dalam masyarakat bisa mempengaruhi pandangan orang tua terhadap pentingnya pendidikan bagi anak perempuan atau anak-anak dari keluarga kurang mampu.<br>- **Kualitas Pendidikan:**<br>Jika kualitas pendidikan di SMP tidak memadai, orang tua mungkin enggan mengirimkan anaknya ke sana.<br>- **Kondisi Geografis:**<br>Jarak tempuh ke sekolah, terutama di daerah terpencil, bisa menjadi masalah.<br>- **Faktor Ekonomi:**<br>Kemiskinan dan kurangnya mata pencaharian bisa mendorong anak-anak untuk bekerja daripada bersekolah. |
| Frekuensi | Tahunan |

**4) TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 7-18 TAHUN YANG BELUM MENYELESAIKAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN KESETARAAN (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (%) |
| Definisi | Persentase anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, namun mengikuti pendidikan kesetaraan (non formal), dibandingkan dengan total jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah |
| Rumus Perhitungan | *(Jumlah anak usia 7-18 tahun yang mengikuti pendidikan kesetaraan / Jumlah total anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah) x 100%* |
| Interpretasi | - **Tingkat Partisipasi:**<br>Angka ini menunjukkan seberapa banyak anak dan remaja yang putus sekolah dasar dan menengah berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak anak putus sekolah yang terjangkau oleh program pendidikan kesetaraan yang dirancang untuk memberikan pendidikan setara dengan pendidikan formal<br>- **Kelompok Usia 7-18 Tahun:** |

| | |
|---|---|
| | Fokus pada kelompok usia ini karena merupakan usia wajib belajar pendidikan dasar dan menengah di banyak negara.<br>- **Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah:**<br>Menunjukkan bahwa target partisipasi adalah anak-anak dan remaja yang belum memiliki ijazah pendidikan dasar atau menengah. **Pendidikan Kesetaraan:**<br>- **Proporsi:**<br>Angka persentase ini adalah proporsi dari total anak putus sekolah yang mengikuti program kesetaraan, bukan angka absolut. Ini penting untuk membandingkan tingkat partisipasi di berbagai wilayah atau kelompok |
| Sumber Data | Profil Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |
| Frekuensi | Tahunan |

## 2. KESEHATAN

### a) RASIO DAYA TAMPUNG RUMAH SAKIT RUJUKAN (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan (%) |
| Definisi | Mengukur rasio daya tampung rumah sakit rujukan di Kabupaten/Kota |
| Rumus Perhitungan | Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan dibagi Jumlah penduduk di Kab/Kota |
| Interpretasi | Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan Alat kesehatan sesuai standar |
| Sumber Data | Dinkes |
| Frekuensi | Tahunan |

### b) PERSENTASE RS RUJUKAN TINGKAT KAB/KOTA YANG TERAKREDITASI (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase RS Rujukan Tingkat Kab/Kota yang Terakreditasi (%) |
| Definisi | Mengukur tingkat rumah sakit rujukan di Kabupaten/Kota yang telah memiliki akreditasi |
| Rumus Perhitungan | Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi dibagi Jumlah RS di Kab/Kota dikali 100% |
| Interpretasi | Pengakuan terhadap mutu pelayanan RS setelah dilakukan penilaian bahwa RS telah memenuhi standar akreditasi minimal madya |
| Sumber Data | Dinkes |
| Frekuensi | Tahunan |

**c) PERSENTASE IBU HAMIL MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) |
| Definisi | Mengukur tingkat ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar |
| Rumus Perhitungan | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi Jumlah ibu hamil di kab/kota dikali 100% |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentasenya semakin membaik layanan kesehatannya |
| Sumber Data | Dinkes |
| Frekuensi | Tahunan |

**d) PERSENTASE IBU BERSALIN MENDAPATKAN PELAYANAN PERSALINAN (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan (%) |
| Definisi | Mengukur tingkat ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar |
| Rumus Perhitungan | Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi Jumlah ibu bersalin di kab/kota dikali 100% |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentasenya semakin membaik layanan kesehatannya |
| Sumber Data | Dinkes |
| Frekuensi | Tahunan |

**e) PERSENTASE BAYI BARU LAHIR MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) |
| Definisi | Mengukur persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir |
| Rumus Perhitungan | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah bayi baru lahir di kab/kota dikali 100% |
| Interpretasi | Semakin tinggi semakin bagus pelayanan |
| Sumber Data | Dinkes |
| Frekuensi | Tahunan |

**f) CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA SESUAI STANDAR (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar (%) |
| Definisi | Mengukur persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita |
| Rumus Perhitungan | Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah balita di kab/kota dikali 100% |
| Interpretasi | Semakin tinggi semakin bagus pelayanan |
| Sumber Data | Dinkes |
| Frekuensi | Tahunan |

**g) PERSENTASE ANAK USIA PENDIDIKAN DASAR YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%) |
| Definisi | Mengukur persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar |
| Rumus Perhitungan | Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi umlah anak usia pendidikan dasar di kab/kota dikali 100% |
| Interpretasi | Mendapatkan skrining kesehatan dan tindak lanjut skrining kesehatan |
| Sumber Data | Dinkes |
| Frekuensi | Tahunan |

**h) PERSENTASE ORANG USIA 15-59 TAHUN MENDAPATKAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar (%) |
| Definisi | Mengukur persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar |
| Rumus Perhitungan | Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota dikali 100% |
| Interpretasi | Skrining kesehatan dan perilaku beresiko |
| Sumber Data | Dinkes |
| Frekuensi | Tahunan |

**i) PERSENTASE WARGA NEGARA USIA 60 TAHUN KE ATAS MENDAPATKAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar (%) |
| Definisi | Mengukur persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar |

| | |
|---|---|
| Rumus Perhitungan | Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kab/kota dikali 100% |
| Interpretasi | Skrining kesehatan dan Tingkat kemandirian usia lanjut serta perilaku beresiko |
| Sumber Data | Dinkes |
| Frekuensi | Tahunan |

**j) PERSENTASE PENDERITA HIPERTENSI YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar (%) |
| Definisi | Mengukur persentase penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar |
| Rumus Perhitungan | Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah penderita hipertensi di kab/kota dikali 100% |
| Interpretasi | Pengukuran TD, edukasi perubahan gaya hidup dan kepatuhan minum obat |
| Sumber Data | Dinkes |
| Frekuensi | Tahunan |

**k) PERSENTASE PENDERITA DM YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar (%) |
| Definisi | Mengukur persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar |
| Rumus Perhitungan | Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah penderita DM di kab/kota dikali 100% |
| Interpretasi | Pengukuran gula darah, edukasi dan terapi farmakologi |
| Sumber Data | Dinkes |
| Frekuensi | Tahunan |

**l) PERSENTASE ODGJ BERAT YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA SESUAI STANDAR (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar (%) |
| Definisi | Mengukur persentase penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar |

| | |
|---|---|
| Rumus Perhitungan | Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah penderita ODGJ di kab/kota dikali 100% |
| Interpretasi | Pemeriksaan kesehatan jiwa dan edukasi kepatuhan minum obat |
| Sumber Data | Dinkes |
| Frekuensi | Tahunan |

**m) PERSENTASE ORANG TERDUGA TBC MENDAPATKAN PELAYANAN TBC SESUAI STANDAR (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC sesuai Standar (%) |
| Definisi | Mengukur persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar |
| Rumus Perhitungan | Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah penderita TBC di kab/kota dikali 100% |
| Interpretasi | Orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun |
| Sumber Data | Dinkes |
| Frekuensi | Tahunan |

**n) PERSENTASE ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI HIV MENDAPATKAN PELAYANAN DETEKSI DINI HIV SESUAI STANDAR (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar |
| Definisi | Mengukur persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV (pelayanan kesehatan HIV) sesuai standar |
| Rumus Perhitungan | Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kab/kota dikali 100% |
| Interpretasi | Skrining dengan Tes Cepat HIV orang pada kelompok beresiko (ibu hamil, pasien TBC, pasien infeksi menular seksual, penjaja seks, lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki, transgender/waria, pengguna napza suntik dan warga binaan pemasyarakatan) |
| Sumber Data | Dinkes |
| Frekuensi | Tahunan |

## 3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

### 1) RASIO LUAS DAERAH IRIGASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA YANG DILAYANI OLEH JARINGAN IRIGASI (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi (%) |
| Definisi | Mengukur rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi |
| Rumus Perhitungan | $\frac{\text{Luas irigasi kewenangan kab./kotayang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun existing}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan kewenangan kab./kota}} x100\%$ |
| Interpretasi | Kemampuan dari jaringan irigasi yang tersedia untuk melayani kebutuhan irigasi di wilayah kewenangan kabupaten/kota |
| Sumber Data | Dinas PUPR |
| Frekuensi | Tahunan |

### 2) PERSENTASE JUMLAH RUMAH TANGGA YANG MENDAPATKAN AKSES TERHADAP AIR MINUM MELALUI SPAM JARINGAN PERPIPAAN DAN BUKAN JARINGAN PERPIPAAN TERLINDUNGI TERHADAP RUMAH TANGGA DI SELURUH KABUPATEN/KOTA (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten/Kota (%) |
| Definisi | Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota |
| Rumus Perhitungan | $\frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota bersangkutan}} x100\%$ |
| Interpretasi | cakupan layanan air minum yang aman dan layak di suatu wilayah |
| Sumber Data | Dinas PUPR |
| Frekuensi | Tahunan |

### 3) PERSENTASE JUMLAH RUMAH TANGGA MEMPEROLEH LAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Jumlah Rumah Tangga Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik (%) |
| Definisi | Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik |

| | |
|---|---|
| Rumus Perhitungan | $\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten/Kota}} x100\%$ |
| Interpretasi | menggambarkan tingkat akses rumah tangga terhadap sistem pengelolaan air limbah yang aman dan terlayani secara teknis |
| Sumber Data | Dinas PUPR |
| Frekuensi | Tahunan |

**4) RASIO KEPATUHAN IMB KAB/KOTA (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota (%) |
| Definisi | Mengukur rasio kepatuhan IMB Kab/Kota |
| Rumus Perhitungan | $\frac{\text{Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku}} x100\%$ |
| Interpretasi | mengukur seberapa banyak bangunan di suatu wilayah kabupaten/kota yang telah dibangun dengan izin resmi |
| Sumber Data | Dinas PUPR |
| Frekuensi | Tahunan |

**5) RASIO TENAGA OPERATOR/TEKNISI/ANALISIS YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi (%) |
| Defenisi | Jumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat dibandingkan dengan jumlah total tenaga kerja konstruksi di Kota Payakumbuh |
| Rumus Perhitungan | $\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat}}{\text{Jumlah total tenaga kerja konstruksi di Kota Payakumbuh}} x100\%$ |
| Interpretasi | Perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh instansi resmi dengan total jumlah tenaga kerja di bidang tersebut. |
| Sumber Data | Dinas PUPR |
| Frekuensi | Tahunan |

**6) RASIO PROYEK YANG MENJADI KEWENANGAN PENGAWASANNYA TANPA KECELAKAAN KONSTRUKSI (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasan Tanpa Kecelakaan Konstruksi (%) |
| Defenisi | Jumlah proyek yang di awasi tanpa kecelakaan kerja dibandingkan dengan jumlah seluruh proyek yang di awasi di kota Payakumbuh |

| | |
|---|---|
| Rumus Perhitungan | $\frac{Jumlah\ proyek\ yang\ di\ awasi\ tanpa\ kecelakaan\ kerja}{Jumlah\ seluruh\ proyek\ yang\ di\ awasi} x100\%$ |
| Interpretasi | Menunjukkan persentase proyek konstruksi yang berada di bawah kewenangan pengawasan Dinas PUPR, yang berjalan tanpa mengalami kecelakaan konstruksi selama periode tertentu |
| Sumber Data | Dinas PUPR |
| Frekuensi | Tahunan |

## 4. URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

### a) PERSENTASE KAWASAN PEMUKIMAN KUMUH DIBAWAH 10 HA DI KAB/ KOTA YANG DITANGANI (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Kawasan Pemukiman Kumuh Dibawah 10 Ha DI Kab/ Kota yang Ditangani |
| Defenisi | Luasan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di kab/kota yang ditangani setiap tahunnya dibandingnkan dengan luas kawasan permukiman kumuh yang ada dan ditetapkan |
| Rumus Perhitungan | $\% = \frac{a}{b} \times 100\%$<br>a : Luas kawasan permukiman kumuh yang dilakukan intervensi peningkatan/ditangani<br>b : Luas Kawasan permukiman kumuh yang ada dan ditetapkan |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka persentase menunjukan penanganan/intervensi terhadap kawasan permukiman kumuh semakin besar sehingga luasan kawasan permukiman kumuh yang ada semakin berkurang. |
| Sumber Data | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| Frekuensi | Tahunan |

### b) BERKURANGNYA JUMLAH UNIT RTLH - RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni (%) |
| Defenisi | Kondisi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah rumah kabupaten/kota |
| Rumus Perhitungan | $\% = \frac{a}{b} \times 100\%$<br>a : Kondisi jumlah RTLH tahun n<br>b : Jumlah rumah kabupaten/kota |
| Interpretasi | Semakin kecil angka persentase, menunjukkan penanganan terhadap RTLH baik itu peningkatan kualitas maupun pembangunan baru semakin baik, dengan artian jumlah RTLH semakin berkurang. |

| | |
|---|---|
| Sumber Data | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| Frekuensi | Tahunan |

**c) JUMLAH PERUMAHAN YANG SUDAH DILENGKAPI PSU - PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Jumlah Perumahan yang sudah Dilengkapi PSU - Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (%) |
| Defenisi | Jumlah rumah pada perumahan yang telah dilakukan serah terima PSU kepada pemerintah daerah dibandingkan dengan jumlah rumah pada perumahan yang ada. |
| Rumus Perhitungan | $\% = \frac{a}{b}$ x 100%<br>a : Jumlah rumah pada perumahan yang telah serah terima PSU.<br>b : Jumlah rumah pada seluruh perumahan yang ada |
| Interpretasi | Semakin besar persentase, menunjukkan jumlah rumah yang telah dilengkapi PSU dan kesinambungan pengelolaan PSU semakin besar. |
| Sumber Data | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| Frekuensi | Tahunan |

## 5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

**a) PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan (%) |
| Defenisi | Persentase jumlah gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang berhasil ditangani dan diselesaikan oleh Satpol PP dalam kurun waktu tertentu. |
| Rumus Perhitungan | $\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang Diselesaikan}}{\textit{Jumlah Pelanggaran Pengaduan yang Masuk}}\ x\ 100\%$<br>Keterangan :<br>Jumlah pelanggaran pengaduan yang masuk bisa melalui sosial media, telepon, dan pengaduan langsung. |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase penyelesaian pengaduan, semakin bagus kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| Sumber Data | Laporan Bulanan Bidang Tibum Tranmas dan Bidang Penegakan Peraturan Daerah |
| Frekuensi | Tahunan |

**b) PERSENTASE PERDA DAN PERKADA YANG DITEGAKKAN (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan (%) |
| Defenisi | Persentase jumlah Perda dan Perkada yang telah ditegakkan oleh Satpol PP dibandingkan dengan total jumlah Perda dan Perkada yang menjadi target penegakan pada tahun berjalan. |
| Rumus Perhitungan | $\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang Diselesaikan}}{\textit{Jumlah Pelanggaran Pengaduan yang Masuk}} \; x\; 100\%$<br>**Keterangan :**<br>Jumlah pelanggaran pengaduan yang masuk bisa melalui social media, telepon, dan pengaduan langsung. |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan semakin efektif penegakan Perda dan Perkada di daerah tersebut. |
| Sumber Data | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| Frekuensi | Tahunan |

**c) JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana (%) |
| Defenisi | Jumlah warga negara yang memperoleh Pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana secara terperinci berbasis Kajian Risiko Bencana dan layanan kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana terkait informasi mengenai potensi, ancaman, atau kejadian bencana di suatu wilayah |
| Rumus Perhitungan | $\frac{\textit{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana}}{\textit{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan}} \; x\; 100\%$ |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan semakin baik pelayanan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diberikan oleh BPBD menyangkut informasi rawan bencana |
| Sumber Data | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Frekuensi | Tahunan |

**d) JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (%) |
| Defenisi | Jumlah warga negara yang memperoleh serangkaian layanan atau dukungan yang disediakan oleh BPBD, lembaga kemanusiaan, maupun masyarakat untuk membantu mengurangi risiko bencana dan meningkatkan |

| | |
|---|---|
| | kesiapan masyarakat dalam menghadapinya dan upaya yang dilakukan untuk **meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana**, agar dapat merespons dengan cepat dan tepat saat bencana terjadi. |
| Rumus Perhitungan | $\frac{\textit{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\textit{Jumlah warga negara yang berada dikawasan rawan bencana}} \times 100\%$ |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan semakin baik pelayanan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diberikan oleh BPBD menyangkut pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana |
| Sumber Data | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Frekuensi | Tahunan |

**e) JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (%) |
| Defenisi | Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan tanggap darurat dalam penanggulangan bencana. Layanan ini bertujuan untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi cedera, dan memindahkan korban dari daerah bahaya ke tempat yang aman dengan cepat dan terkoordinasi |
| Rumus Perhitungan | $\frac{\textit{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban bencana}}{\textit{Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana}}$ |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan semakin baik pelayanan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diberikan oleh BPBD menyangkut penyelamatan dan evakuasi korban bencana |
| Sumber Data | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Frekuensi | Tahunan |

**f) PERSENTASE PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%) |
| Defenisi | Rasio antara jumlah kejadian kebakaran yang disertai dengan layanan penyelamatan dan evakuasi korban terhadap total kejadian kebakaran dalam periode tertentu, yang menggambarkan efektivitas pelayanan penyelamatan oleh petugas. |
| Rumus Perhitungan | $\frac{\textit{Jumlah Kejadian Kebakaran dengan Evakuasi dan Penyelamatan Korban}}{\textit{Jumlah Total Kejadian Kebakaran}} \times 100\%$ |

| | |
|---|---|
| | Keterangan:<br>• Jumlah evakuasi korban kebakaran termasuk dengan kejadian yang ditangani oleh relawan pemadam kebakaran yang telah dibentuk oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentasenya, semakin baik kualitas dan responsivitas layanan penyelamatan korban dalam kejadian kebakaran. |
| Sumber Data | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| Frekuensi | Tahunan |

**g) WAKTU TANGGAP (*RESPONSE TIME*) PANANGANAN KEBAKARAN (MENIT)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Waktu Tanggap (*Response Time*) Penanganan Kebakaran (Menit) |
| DefInisi | Waktu yang dibutuhkan sejak laporan kejadian kebakaran diterima hingga unit pemadam pertama tiba di lokasi kejadian. |
| Rumus Perhitungan | $\frac{Jumlah\ Keseluruhan\ Waktu\ Response\ Time}{Jumlah\ Keseluruhan\ Kejadian}$<br>Keterangan:<br>• Waktu Response Time merupakan waktu kedatangan di lokasi dikurangi waktu laporan diterima. |
| Interpretasi | Semakin cepat waktu tanggap (semakin kecil nilai menit), semakin baik respons dan kesiapsiagaan pelayanan penanganan kebakaran. |
| Sumber Data | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| Frekuensi | Tahunan |

## 6. URUSAN SOSIAL

**a) PERSENTASE PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN GELANDANGAN PENGEMIS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI LUAR PANTI (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (%) |
| DefInisi | mengukur sejauh mana pelayanan sosial dasar berhasil memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) bagi kelompok rentan tersebut di luar lembaga panti |
| Rumus Perhitungan | $\frac{Jumlah\ penyandang\ disabilitas\ terlantar, anak\ terlantar, lanjut\ usia\ terlantar\ dan\ gelandangan, pengemis\ yang\ terpenuhi\ kebutuhan\ gelandangan\ pengemis\ yang\ terpenuhi\ kebutuhan\ dasarnya\ di\ luar\ panti}{Total\ Populasi\ sasaran} \times 100\%$ |

| | |
|---|---|
| Interpretasi | menunjukkan tingkat keberhasilan dalam menyediakan layanan dasar bagi kelompok rentan ini di luar lembaga (non-institusional) |
| Sumber Data | Dinas Sosial |
| Frekuensi | Tahunan |

**b) PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA KABUPATEN / KOTA (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten / Kota (%) |
| Deflnisi | untuk menilai efektivitas respons bencana dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat |
| Rumus Perhitungan | $\frac{Jumlah\ Korban\ bencana\ yang\ terpenuhi\ kebutuhan\ dasarnya}{Jumlah\ total\ korban\ bencana\ pada\ tahun\ N} \times 100\%$ |
| Interpretasi | untuk menilai efektivitas respons bencana dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat |
| Sumber Data | Dinas Sosial |
| Frekuensi | Tahunan |

## B. LAYANAN URUSAN WAJIB TERKAIT NON PELAYANAN DASAR

### 1. URUSAN KETENAGAKERJAAN

**a) PERSENTASE KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN YANG MENGACU KE RENCANA TENAGA KERJA (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja (%) |
| Deflnisi | Rasio antara jumlah kegiatan ketenagakerjaan yang direalisasikan dan mengacu pada Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD), terhadap total kegiatan yang direncanakan dalam RTKD |
| Rumus Perhitungan | $\frac{Kegiatan\ yang\ dilaksanakan\ mengacu\ RTKD}{Kegiatan\ yang\ ada\ di\ RTKD}\ x\ 100\%$ |
| Interpretasi | Rasio antara jumlah kegiatan ketenagakerjaan yang direalisasikan dan mengacu pada Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD), terhadap total kegiatan yang direncanakan dalam RTKD |
| Sumber Data | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| Frekuensi | Tahunan |

**b) PERSENTASE TENAGA KERJA BERSETIFIKAT KOMPETENSI (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%) |
| DefInisi | Sertifikat kompetensi menunjukkan pengakuan terhadap kemampuan kerja seseorang sesuai dengan standar kompetensi kerja tertentu yang dibutuhkan di dunia kerja |
| Rumus Perhitungan | $\frac{Tenaga\ kerja\ yang\ bersertifikat}{Jumlah\ tenaga\ kerja\ yang\ bekerja}\ x\ 100\%$ |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka ini, mencerminkan kualitas dan daya saing tenaga kerja yang lebih baik dan siap bersaing di pasar kerja |
| Sumber Data | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| Frekuensi | Tahunan |

**c) TINGKAT PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (RP. JUTA/ TENAGA KERJA)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp Juta/Tenaga Kerja) |
| DefInisi | Produktivitas tenaga kerja adalah kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi |
| Rumus Perhitungan | $PTK = \frac{PDRB}{JTkB}$<br><br>Dimana :<br>PTK = Produktivitas Tenaga Kerja<br>PDRB = PDRB ADHB tahun n<br>JTkB = Jumlah Penduduk Bekerja tahun n |
| Interpretasi | Tingkat produktivitas tenaga kerja digunakan untuk mengukur kemampuan tenaga kerja dalam mengerjakan pekerjaannya dalam waktu kerja yang sudah ditentukan dengan metode penghitungan adalah nilai tambah dibagi dengan jumlah tenaga kerja yang dibayar |
| Sumber Data | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| Frekuensi | Tahunan |

**d) PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK (PP/PKB, LKS BIPARTIT, STRUKTUR SKALA UPAH DAN TERDAFTAR PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN) (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) |
| DefInisi | Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja layak adalah yang memiliki sekurangnya salah satu dari: Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan |

| | |
|---|---|
| | Perusahaan (PP), LKS Bipartit aktif, Struktur dan Skala Upah, dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan |
| Rumus Perhitungan | $\frac{jumlah\ perusahaan\ yang\ layak}{Jumlah\ Perusahaan}\ x\ 100\%$ |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka ini, semakin menunjukkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perlindungan tenaga kerja |
| Sumber Data | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| Frekuensi | Tahunan |

**e) PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN (DALAM DAN LUAR NEGERI) MELALUI MEKANISME LAYANAN ANTAR KERJA DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota |
| Deflnisi | Persentase tenaga kerja yang berhasil ditempatkan pada lapangan kerja oleh instansi pemerintah, lembaga pelatihan kerja, atau lembaga penempatan tenaga kerja (publik maupun swasta), dibandingkan dengan total pencari kerja yang terdaftar |
| Rumus Perhitungan | $\frac{Jumlah\ tenaga\ kerja\ yang\ ditempatkan}{Jumlah\ pencari\ kerja}\ x\ 100$ |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentasenya, semakin efektif sistem penempatan kerja domestik |
| Sumber Data | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| Frekuensi | Tahunan |

## 2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**a) PERSENTASE ARG PADA BELANJA LANGSUNG APBD (%)**

Metadata dilihat pada metadata indikator kinerja daerah (IV.D.2.b.7)

**b) PERSENTASE ANAK KORBAN KEKERASAN YANG DITANGANI INSTANSI TERKAIT KABUPATEN/KOTA (%)**

Metadata dilihat pada metadata indikator kinerja daerah (IV.D.2.b.8)

**c) RASIO KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN, TERMASUK TPPO (PER 100.000 PENDUDUK PEREMPUAN)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan) |
| Deflnisi | Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO merupakan perbandingan jumlah kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah perempuan yang ada pada suatu wilayah yang menunjukkan kerentanan perempuan terhadap kekerasan dan perdagangan orang |

| | |
|---|---|
| Rumus Perhitungan | $rasiokptppo = \frac{jkptppo}{jpp} x100.000$<br>Dimana :<br>rasiokptppo = Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)<br>jkptppo = Jumlah kekerasan terhadap perempuan<br>jpp = Populasi penduduk perempuan |
| Interpretasi | Semakin kecil atau semakin mendekati 0 rasionya maka menandakan wilayah tersebut aman dan nyaman bagi perempuan |
| Sumber Data | DP3AP2KB |
| Frekuensi | Tahunan |

## 3. URUSAN PANGAN

### a) PERSENTASE CADANGAN PANGAN (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Cadangan Pangan (%) |
| Definisi | Persentase cadangan pangan adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Kota |
| Rumus Perhitungan | $\%CP = \frac{jcp}{jtcp} x100\%$<br>Dimana :<br>%CP = Persentase Cadangan Pangan<br>jcp = Jumlah Cadangan Pangan yang dimiliki Pemerintah Kota<br>jtcp = Jumlah Target Cadangan Pangan Pemerintah Kota yang ditetapkan |
| Interpretasi | Cadangan pangan yang dimaksud disini adalah cadangan ketersediaan beras pemerintah, sehingga setiap tahunnya persentasenya disesuaikan dengan target cadangan pangan |
| Sumber Data | Dinas Ketahanan Pangan |
| Frekuensi | Tahunan |

## 4. URUSAN PERTANAHAN

### a) PERSENTASE PEMANFAATAN TANAH YANG SESUAI DENGAN PERUNTUKKAN TANAHNYA DI ATAS IZIN LOKASI DIBANDINGKAN DENGAN LUAS IZIN LOKASI YANG DITERBITKAN (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan |
| Deflnisi | Mengukur Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan |

| | |
|---|---|
| Rumus Perhitungan | $\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)}}{\text{seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatann Pemanfaatan Ruang (KKPR)}} x100\%$ |
| Interpretasi | Menilai efektivitas dan ketaatan dalam pemanfaatan lahan, yaitu seberapa besar tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan rencana peruntukkannya |
| Sumber Data | Dinas PUPR |
| Frekuensi | Tahunan |

**b) PERSENTASE PENETAPAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (%) |
| DefInisi | Jumlah tanah yang ditetapkan untuk pembangunan fasilitas umum dibandingkan dengan jumlah tanah yang digunakan untuk pembangunan fasilitas umum |
| Rumus Perhitungan | $\frac{\text{Jumlah tanah yang ditetapkan untuk pembanguna fasilitas umum}}{\text{Jumlah tanah yang digunakan untuk pembanguna fasilitas umum}} x\ 100\%$ |
| Interpretasi | Mengukur seberapa besar luas tanah yang telah resmi ditetapkan atau dialokasikan untuk pembangunan fasilitas umum (seperti jalan, taman, sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur public lainnya) dari total kebutuhan atau rencana yang telah ditetapkan.<br>Penetapan ini penting untuk memastikan tersedianya ruang yang cukup dan legal untuk fasilitas yang melayani masyarakat |
| Sumber Data | Dinas PUPR |
| Frekuensi | Tahunan |

**c) TERSEDIANYA LOKASI PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Tersedianya Lokasi Pembangunan dalam Rangka Penanaman Modal (%) |
| DefInisi | Mengukur persentase lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal |
| Rumus Perhitungan | $\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukan diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang}}{\text{Luas tanah diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan}} x100\%$ |
| Interpretasi | Menilai kesiapan suatu daerah (kabupaten/kota) dalam menyediakan lahan atau kawasan yang telah ditetapkan, direncanakan, dan siap digunakan untuk kegiatan investasi atau penanaman modal |
| Sumber Data | Dinas PUPR, DPMPTSP |

| | |
|---|---|
| Frekuensi | Tahunan |

**d) PENANGANAN SENGKETA TANAH GARAPAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIASI (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi (%) |
| Deflnisi | Mengukur persentase ketersediaan tanah untuk masyarakat |
| Rumus Perhitungan | $\frac{Jumlah\ sengketa\ tanah\ garapan \text{ yang ditangani}}{Jumlah\ pengaduan\ sengketa\ tanah\ Garapan} x100\%$ |
| Interpretasi | upaya penyelesaian konflik atau sengketa tanah garapan (tanah yang dikuasai dan/atau digarap oleh pihak tertentu) yang diselesaikan melalui proses mediasi |
| Sumber Data | Dinas PUPR, BPN, Bagian Hukum |
| Frekuensi | Tahunan |

## 5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

**1) INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (KLH) KABUPATEN/KOTA (NILAI)**

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator Sasaran Visi (II.J)

**2) TERLAKSANANYA PENGELOLAAN SAMPAH DI WILAYAH KAB/KOTA (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota (%) |
| Deflnisi | Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah |
| Rumus Perhitungan | $\frac{Total\ Volume\ Sampah\ yang\ dapat\ ditangani}{Total\ Volume\ Sampah\ Kota\ Payakumbuh}$ x 100% |
| Interpretasi | Semakin tinggi % Indeks kinerja pengelolaan sampah maka semakin bagus kinerja pengelolaan sampah |
| Sumber Data | Dinas Lingkungan Hidup |
| Frekuensi | Tahunan |

**3) KETAATAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN, IZIN PPLH DAN PUU LH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota |
| Deflnisi | Kepatuhan Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan dalam melaksanakan kewajiban terhadap Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan perundang-undangan |

| | |
|---|---|
| Rumus Perhitungan | $\frac{\text{Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan,dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota}}{\text{Usaha dan atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan}} \times 100\%$ |
| Interpretasi | Jika Tingkat Ketaatan melebihi target yang dipersyaratkan, berarti Kepatuhan usaha/kegiatan terhadap PPLH sudah baik |
| Sumber Data | Hasil Pelaksanaan Pengawasan terhadap Usaha/Kegiatan yang memiliki Persetujuan Lingkungan |
| Frekuensi | Tahunan |

## 6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

### 1) PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Perekaman KTP Elektronik (%) |
| Deflnisi | Angka yang menunjukan persentase Perekaman KTP Elektronik |
| Rumus Perhitungan | $= \frac{\text{Jumlah Penduduk Berumur 17 Tahun ke atas yang Memiliki KTP}}{\text{Jumlah Penduduk 17 Tahun ke atas}} \times 100\%$ |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka persentasenya, semakin banyak penduduk yang sudah memiliki KTP elektronik yang valid, sehingga menunjukkan keberhasilan program dan tingkat kepemilikan identitas resmi penduduk, yang pada gilirannya mendukung akurasi data kependudukan untuk pembangunan dan layanan publik. |
| Sumber Data | Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang diterbitkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri |
| Frekuensi | Tahunan |

### 2) PERSENTASE ANAK USIA 0 – 17 TAHUN KURANG 1 (SATU) HARI YANG MEMILIKI KIA (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA |
| Deflnisi | Angka yang menunjukan persentase Kepemilikan Kartu identitas Anak |
| Rumus Perhitungan | $= \frac{\text{Jumlah Anak Usia } 0-17 \text{ Tahun kurang 1 (satu)hari yang sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah Anak Usia } 0-17 \text{ Tahun}} \times 100\%$ |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentasenya, semakin baik cakupan kepemilikan KIA di kalangan anak-anak, yang menunjukkan keberhasilan program pencatatan identitas anak |
| Sumber Data | Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang diterbitkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri |
| Frekuensi | Tahunan |

### 3) KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Kepemilikan Akta kelahiran (%) |
| Deflnisi | Angka yang menunjukan persentase Kepemilikan Akta Kelahiran |
| Rumus Perhitungan | $= \frac{Jumlah\ Anak\ Usia\ 0-18\ Tahun\ yang\ sudah\ Memiliki\ Akta\ Kelahiran}{Jumlah\ Anak\ Usia\ 0-18\ Tahun} \times 100\%$ |
| Interpretasi | • Nilai indikator yang tinggi (mendekati 100%) menunjukkan semakin baiknya kesadaran masyarakat dan akses terhadap layanan administrasi kependudukan.<br>• Nilai yang rendah menandakan masih adanya hambatan, baik dari sisi layanan pemerintah (akses, ketersediaan sarana prasarana, kecepatan pelayanan) maupun dari sisi masyarakat (kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan mengurus dokumen).<br>Peningkatan indikator ini berhubungan langsung dengan pemenuhan hak dasar anak serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada aspek identitas hukum dan inklusivitas layanan publik. |
| Sumber Data | Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang diterbitkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri |
| Frekuensi | Tahunan |

### 4) JUMLAH OPD YANG TELAH MEMANFAATKAN DATA KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA SAMA (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama (%) |
| Deflnisi | Angka yang menunjukan persentase Jumlah OPD yang Memanfaatkan Data Kependudukan |
| Rumus Perhitungan | $= \frac{Jumlah\ Perangkat\ Daerah\ Kabupaten\ Kota\ yang\ telah\ Memanfaatkan\ data\ Kepependudukan\ berdasarkan\ Perjanjian\ Kerjasama}{Jumlah\ Perangkat\ Daerah} \times 100\%$ |
| Interpretasi | • Nilai indikator yang tinggi menunjukkan semakin banyak OPD yang mengintegrasikan data kependudukan ke dalam sistem perencanaan, pelayanan, maupun pengambilan keputusan. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas tata kelola data, sinkronisasi antar-OPD, serta pemanfaatan data yang lebih akurat, mutakhir, dan terpadu.<br>• Nilai yang rendah dapat mengindikasikan bahwa pemanfaatan data kependudukan belum optimal, masih terbatasnya koordinasi antar-OPD, atau adanya kendala teknis maupun regulasi dalam proses pemanfaatan data.<br>Peningkatan jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan PKS juga mencerminkan kemajuan dalam penerapan Satu Data Indonesia, penguatan e-government, serta upaya peningkatan pelayanan publik berbasis data yang valid. |

| | |
|---|---|
| Sumber Data | Jumlah Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Data Kependudukan |
| Frekuensi | Tahunan |

## 7. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

### a) TFR (ANGKA KELAHIRAN TORTAL) (%)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja daerah (IV.D.2.h.2)

### b) PERSENTASE PEMAKAIAN KONTRASEPSI MODERN (MODERN CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE/mCPR) (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Angka Pravelansi Kontrasepsi Modern / *Modern Contraceptive – mCPR* (%) |
| Deflnisi | Angka Pravelansi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) adalah persentase wanita usia reproduksi (biasanya 15-49 tahun) yang saat ini menggunakan metode kontrasepsi modern dari total wanita usia reproduksi (termasuk yang pasangannya menggunakan metode kontrasepsi modern). |
| Rumus Perhitungan | $mCPR = frac\{\text{Jumlah Wanita Usia Reproduksi (15 – 49 Tahun) yang Saat Ini Menggunakan Metode Kontrasepsi M – 49 Tahun)}\} \times 100$<br>Keterangan:<br>Persentase wanita usia reproduksi (15-49 tahun) yang saat ini menggunakan metode kontrasepsi modern. Ini juga mencakup wanita yang pasangannya menggunakan metode kontrasepsi modern (misalnya vasektomi). |
| Interpretasi | mCPR menunjukkan proporsi wanita usia reproduksi yang menggunakan metode kontrasepsi yang efektif. Peningkatan mCPR sering dikaitkan dengan penurunan angka kelahiran dan peningkatan kesehatan ibu dan anak. mCPR merupakan indikator penting dalam pemantauan dan evaluasi program Keluarga Berencana (KB). |
| Sumber Data | Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) |
| Frekuensi | Dilakukan dua kali setahun (semesteran) atau tahunan dengan cakupan yang lebih detail pada tahun-tahun tertentu. |

### c) PERSENTASE KEBUTUHAN BER-KB YANG TIDAK TERPENUHI - UNMETNEED (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | **Persentase Kebutuhan Ber-KB ang tidak Terpenuhi *(Unmet Need)*** |
| Deflnisi | Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need for Family Planning) adalah proporsi wanita usia reproduksi (15-49 tahun) yang: |

| | |
|---|---|
| | 1. Ingin menunda kehamilan berikutnya atau tidak ingin memiliki anak sama sekali (mengindikasikan kebutuhan untuk ber-KB), tetapi<br>2. Tidak menggunakan metode kontrasepsi apapun. |
| Rumus Perhitungan | \text{Unmet Need (\%)}<br>=<br>\frac{\text{Jumlah Wanita Usia Subur dengan Unmet Need}}{\text{Jumlah To<br>× 100\%<br>Keterangan :<br>Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need for Family Planning)<br>Definisi: Proporsi wanita usia reproduksi (15-49 tahun) yang ingin menunda kehamilan atau tidak ingin memiliki anak lagi, tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi. |
| Interpretasi | Unmet Need merupakan indikator penting untuk mengidentifikasi kelompok wanita yang rentan terhadap kehamilan yang tidak diinginkan. Nilai Unmet Need yang tinggi menunjukkan adanya kesenjangan antara keinginan wanita untuk mengatur kesuburan dan akses atau penggunaan layanan KB. Penurunan Unmet Need merupakan salah satu tujuan utama program Keluarga Berencana. |
| Sumber Data | Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) |
| Frekuensi | Biasanya dilakukan setiap 5 tahun. |

## 8. URUSAN PERHUBUNGAN

### a) RASIO KONEKTIVITAS KABUPATEN/KOTA (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota (%) |
| Deflnisi | Persentase kabupaten/kota yang telah terhubung oleh layanan transportasi publik yang nyaman, aman, dan terjangkau, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara. Indikator ini mencerminkan pemerataan akses transportasi antar wilayah sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur nasional. |
| Rumus Perhitungan | Rasio konektvitas Kota Payakumbuh = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) |
| Interpretasi | ➢ 100% berarti seluruh kabupaten/kota telah memiliki akses ke sistem transportasi publik yang layak.<br>➢ Semakin tinggi nilainya, semakin merata akses transportasi yang mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang/jasa.<br>Nilai rendah menunjukkan adanya kesenjangan wilayah dalam hal aksesibilitas transportasi, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah. |
| Sumber Data | 1. Dinas Perhubungan<br>2. Data survei lalu lintas |

| | |
|---|---|
| Frekuensi | Tahunan |

**b) KINERJA LALU LINTAS KABUPATEN/ KOTA (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota (%) |
| Deflnisi | Persentase tingkat kinerja sistem lalu lintas di wilayah kabupaten/kota yang mencerminkan keselamatan, kelancaran, ketertiban, dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Indikator ini menunjukkan efektivitas manajemen transportasi dan infrastruktur dalam mendukung mobilitas yang aman dan tertib. |
| Rumus Perhitungan | V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota |
| Interpretasi | ➢ > 85%: Sangat baik – lalu lintas aman, lancar, tertib dan nyaman<br>➢ 70–85%: Cukup baik – ada beberapa masalah minor yang masih bisa ditangani<br>➢ < 70%: Perlu perhatian – masalah signifikan dalam kelancaran dan keselamatan<br>< 50%: Buruk – perlu intervensi kebijakan dan infrastruktur secara serius |
| Sumber Data | 1. Dinas Perhubungan<br>2. Data survei Lalu lintas |
| Frekuensi | Tahunan |

## 9. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**a) PERSENTASE PERANGKAT DAERAH (PD) YANG TERHUBUNG DENGAN AKSES INTERNET YANG DISEDIAKAN OLEH DINAS KOMINFO (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Deflnisi | Ukuran pencapaian tingkat konektivitas perangkat daerah terhadap infrastruktur internet yang dibangun dan dikelola oleh Dinas Kominfo. Ini menunjukkan seberapa efektif dinas kominfo dalam menyediakan dan mendistribusikan layanan internet ke instansi-instansi pemerintah daerahnya. |
| Rumus Perhitungan | $\%PDkonekinternetkominfo = \frac{jmlPDinteretkominfo}{jmlPD} x100\%$ |
| Interpretasi | Tinggi : Persentase yang tinggi (mendekati 100%) berarti mayoritas atau semua perangkat daerah sudah terhubung internet dari dinas kominfo, menunjukkan efektivitas program dan penyediaan infrastruktur.<br>**Rendah:** Persentase yang rendah mengindikasikan masih ada banyak perangkat daerah yang belum terhubung, |

| | |
|---|---|
| | sehingga perlu peningkatan dalam strategi, anggaran, atau infrastruktur oleh dinas kominfo |
| Sumber Data | Diskominfo |
| Frekuensi | Tahunan |

**b) PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi (%) |
| Definisi | Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi adalah ukuran jumlah atau proporsi layanan publik yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat melalui platform digital dan terhubung satu sama lain, yang juga mencakup kegiatan, perangkat daerah, dan pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah yang memanfaatkan domain instansi sesuai peraturan |
| Rumus Perhitungan | $\frac{\textit{Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\textit{Jumlah layanan publik}} \times 100\%$ |
| Interpretasi | Angka yang menunjukkan jumlah layanan yang telah digital dan terintegrasi dibandingkan dengan total jumlah layanan publik yang seharusnya tersedia. Angka yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kemajuan yang lebih baik dalam transformasi digital pelayanan publik |
| Sumber Data | Diskominfo |
| Frekuensi | Tahunan |

**c) PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENJADI SASARAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK, MENGETAHUI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%) |
| Definisi | Ukuran persentase masyarakat di suatu wilayah kabupaten/kota yang berhasil dijangkau oleh informasi mengenai kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah, serta memiliki kesadaran dan pemahaman terhadap informasi tersebut. |
| Rumus Perhitungan | $\frac{\textit{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah Daerah lainnya}}{\textit{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$ |
| Interpretasi | Ukuran seberapa efektif pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan program unggulan mereka kepada publik, dengan angka yang lebih tinggi menunjukkan masyarakat lebih banyak |

| | |
|---|---|
| | yang terjangkau dan memahami program prioritas pemerintah daerah |
| Sumber Data | Sumber data persentase masyarakat yang mengetahui kebijakan pemerintah daerah adalah portal data Open Data pemerintah daerah di situs web pemerintah kota setempat, serta melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. |
| Frekuensi | Tahunan |

## 10. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

### a) MENINGKATNYA KOPERASI YANG BERKUALITAS (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%) |
| Definisi | Indikator yang digunakan untuk meengukur peningkatan koperasi yang berkualitas |
| Rumus Perhitungan | $\textbf{Meningkatnya Koperasi yang berkualitas} = \frac{\textit{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset}}{\textit{jumlah seluruh koperasi}} * 100\%$ |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase koperasi yang berkualitas menandakan semakin akuntabel dan handalnya koperasi yang ada pada suatu wilayah |
| Sumber Data | Dinas Koperasi dan UKM |
| Frekuensi | Tahunan |

### b) MENINGKATNYA USAHA MIKRO YANG MENJADI WIRAUSAHA (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha (%) |
| Definisi | Indikator yang digunakan untuk mengukur persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha |
| Rumus Perhitungan | $\textbf{Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha} = \frac{\textit{jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah usaha mikro keseluruhan}} * 100\%$ |
| Interpretasi | Semakin tingginya persentase pada indikator semakin meningkat kewirausahaan pengusaha di Payakumbuh |
| Sumber Data | Dinas Koperasi dan UKM |
| Frekuensi | Tahunan |

## 11. URUSAN PENANAMAN MODAL

### a) PERSENTASE PENINGKATAN INVESTASI DI KABUPATEN/KOTA (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota (%) |
| Definisi | Persentase Peningkatan Investasi adalah ukuran yang menggambarkan tingkat pertumbuhan atau kenaikan nilai investasi yang terealisasi dalam suatu wilayah (misalnya, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional) selama periode waktu tertentu (dibandingkan dengan periode waktu sebelumnya). Investasi yang dimaksud dapat mencakup berbagai jenis, seperti Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), baik dalam bentuk modal tetap bruto (pembangunan fisik) maupun investasi finansial. Indeks ini mencerminkan daya tarik investasi suatu wilayah dan pertumbuhan aktivitas ekonomi. |
| Rumus Perhitungan | $Persentase\ Peningkatan\ Inventasi = \frac{(Nilai\ Investasi\ Akhir - Nilai\ Inventasi\ Awal)}{Nilai\ Inventasi\ Awal} \times 100\%$<br><br>Keterangan :<br>1. Nilai Investasi Akhir: Ini adalah nilai investasi pada periode waktu setelah terjadi peningkatan.<br>2. Nilai Investasi Awal: Ini adalah nilai investasi pada periode waktu sebelumnya atau nilai investasi mula-mula.<br>3. (Nilai Investasi Akhir−Nilai Investasi Awal): Selisih ini menunjukkan besarnya peningkatan nilai investasi.<br>4. Nilai Investasi Awal(Nilai Investasi Akhir−Nilai Investasi Awal):<br>Hasil pembagian ini memberikan rasio peningkatan investasi terhadap nilai investasi awal.<br>5. 100%: Faktor pengali untuk mengubah rasio menjadi bentuk persentase. |
| Interpretasi | Nilai indeks positif menunjukkan peningkatan nilai investasi. Semakin tinggi nilai positif, semakin besar tingkat peningkatannya. Nilai indeks negatif menunjukkan penurunan nilai investasi. Nilai indeks nol menunjukkan tidak ada perubahan. |
| Sumber Data | DPMPTSP |
| Frekuensi | Tahunan |

## 12. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

### a) TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (%) |
| Deflnisi | Indikator ini dapat diartikan sebagai suatu jumlah pemuda usia 16-30 tahun yang menjadi anggota aktif organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang |

| | |
|---|---|
| | didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila |
| Rumus Perhitungan | $tk\ partisipasi\ pemuda\ ormas\ dan\ muda = \frac{jml\ pemuda\ aktif\ ormas\ dan\ muda(16-30\ th)}{jumlah\ pemuda\ (16-30\ th)} x100\%$ |
| Interpretasi | Indikator ini merupakan indikator yang dinotasikan dengan persentase yang melihat perbandingan pemuda aktif organisasi di suatu daerah dengan jumlah keseluruhan pemuda di daerah tersebut. Jika adanya peningkatan persentase dari indikator ini berarti semakin tingginya peran serta aktif pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan |
| Sumber Data | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| Frekuensi | Tahunan |

**b) PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA (MENDALI)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Peningkatan Prestasi Olahraga (Mendali) |
| DefInisi | Peningkatan prestasi olahraga dapat diartikan sebagai segala bentuk pencapaian atau hasil yang diperoleh oleh seseorang atau tim dalam bidang olahraga. Dalam hal ini pengukuran peningkatan prestasi olahraga didasarkan pada perolehan mendali bidang olahraga pada even nasional dan internasional |
| Rumus Perhitungan | *jumlah perolehan mendali pada even olahraga nasional maupun internasional* |
| Interpretasi | Peningkatan prestasi olahraga dilihat dari semakin bertambahnya jumlah mendali yang diperoleh pada setiap even baik nasional maupun internasional yang menggambarkan adanya peningkatan kualitas SDM bidang olahraga |
| Sumber Data | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| Frekuensi | Tahunan |

**c) TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM KEGIATAN EKONOMI MANDIRI (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (%) |
| DefInisi | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri merupakan ukuran yang digunakan untuk melihat dan mengetahui partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri atau berwirausaha |
| Rumus Perhitungan | $tk\ partisipasi\ pemuda\ ekonomi\ mandiri = \frac{jml\ pemuda\ berwirausaha\ (16-30\ th)}{jumlah\ pemuda\ (16-30\ th)} x100\%$ |

| | |
|---|---|
| Interpretasi | Pengukuran pemuda yang berwirausaha ini dibuktikan dengan terdaftarnya pada usahanya di pemerintah daerah ataupun lembaga perizinan usaha yang dibuktikan dengan dokumen pendukung |
| Sumber Data | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| Frekuensi | Tahunan |

## 13. URUSAN STATISTIK

### a) PERSENTASE OPD YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah (%) |
| Deflnisi | Persentase ini menunjukkan seberapa besar tingkat pemanfaatan **data statistik** (data valid, terukur, dan sesuai kaidah BPS/instansi terkait) oleh OPD dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (misalnya: **Renstra, Renja, RKPD, RPJMD**).<br>Semakin tinggi persentase, semakin **evidence-based** atau berbasis data rencana pembangunan yang disusun. |
| Rumus Perhitungan | $\% = \frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik}}{jumlah\ OPD} x100\%$<br><br>Contoh:<br>Jika dari 40 OPD, ada 30 OPD yang menyusun program berbasis data statistik:<br>30/40 × 100 % = 75 % |
| Interpretasi | • **0 – 25% (Rendah):** Sebagian besar OPD belum menggunakan data statistik, perencanaan masih berbasis asumsi/kebijakan subjektif.<br>• **26 – 50% (Sedang):** Ada upaya pemanfaatan data, tapi belum konsisten dan belum menyeluruh.<br>• **51 – 75% (Baik):** Mayoritas OPD sudah berbasis data, perencanaan lebih terukur.<br>• **76 – 100% (Sangat Baik):** Hampir semua OPD menjadikan data statistik sebagai dasar utama, sejalan dengan prinsip **perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based planning).** |
| Sumber Data | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) |
| Frekuensi | Tahunan |

### b) PERSENTASE OPD YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MELAKUKAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah (%) |
| DefInisi | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah adalah proporsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dalam proses evaluasi pelaksanaan pembangunan (misalnya evaluasi program, kegiatan, dan capaian kinerja) menggunakan data statistik yang sahih, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar analisis dan penilaian. |
| Rumus Perhitungan | $\% = \frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam evaluasi pembangunan}}{total\ OPD} x100\%$<br><br>Contoh:<br>Jika dari 40 OPD, ada 30 OPD melakukan evaluasi menggunakan data statistik : 30/40 × 100 % = 75 % |
| Interpretasi | Nilai tinggi menunjukkan evaluasi pembangunan daerah sudah berbasis data yang valid, objektif, dan akuntabel; nilai rendah menunjukkan evaluasi masih lemah dan berpotensi tidak akurat. |
| Sumber Data | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) |
| Frekuensi | Tahunan |

## 14. URUSAN PERSANDIAN

### a) TINGKAT KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (%) |
| DefInisi | Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah mengacu pada sejauh mana pemerintah daerah mampu melindungi informasi yang mereka kelola dari berbagai ancaman dan risiko. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kebijakan dan prosedur keamanan hingga infrastruktur teknologi dan kesadaran pengguna. |
| Rumus Perhitungan | Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah dapat diukur menggunakan berbagai indikator, seperti:<br>Indeks KAMI (Keamanan Informasi): Digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi.<br>Evaluasi Pengamanan Informasi (Evalpaminfo): Digunakan untuk menilai efektivitas penerapan pengamanan informasi.<br>Cyber Security Maturity (CSM): Digunakan untuk mengukur tingkat kematangan keamanan siber. |
| Interpretasi | Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah mengacu pada sejauh mana suatu daerah telah menerapkan langkah-langkah untuk melindungi informasi |

| | |
|---|---|
| | yang mereka miliki dari berbagai ancaman. Ini mencakup aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Penilaian kesiapan ini biasanya menggunakan berbagai metode dan alat ukur, termasuk Indeks KAMI, untuk mengevaluasi penerapan kontrol keamanan dan kematangan penerapan pengamanan |
| Sumber Data | Dinas Kominfo / Unit Keamanan Informasi / Laporan BSSN |
| Frekuensi | Tahunan |

## 15. URUSAN KEBUDAYAAN

### 1) TERLESTARIKAN CAGAR BUDAYA (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Terlestarikan Cagar Budaya (%) |
| DefInisi | Terlestarikan cagar budaya merupakan pelestarian kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara |
| Rumus Perhitungan | $Terlestarikancagarbudaya = \frac{jcagarbudayadilestarikan}{jcagarbudayaditetapkan} x100\%$ |
| Interpretasi | Semakin tinggi pelestarian cagar budaya semakin pedulinya pemahaman dan pengembangan budaya di suatu daerah |
| Sumber Data | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| Frekuensi | Tahunan |

## 16. URUSAN PERPUSTAKAAN

### a) NILAI TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA MASYARAKAT (NILAI)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai) |
| Definisi | Ukuran Yang Menunjukkan Seberapa Besar Minat Dan Kebiasaan Masyarakat Dalam Memperoleh Pengetahuan Dan Informasi Melalui Berbagai Media, Termasuk Membaca Buku, Mengakses Internet, Dan Lain-Lain. |
| Rumus Perhitungan | Rumus Perhitungan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (Tgm) Adalah: Tgm = (0.3 * Fm + 0.3 * Dm + 0.3 * Jb) + (0.05 * Fai + 0.05 * Dai).<br><br>Rumus Ini Mengukur Tingkat Kegemaran Membaca Berdasarkan Frekuensi Membaca (Fm), Durasi Membaca (Dm), Jumlah Bahan Bacaan (Jb), Frekuensi Akses Internet (Fai), Dan Durasi Akses Internet (Dai). |

<table>
<tr><td></td><td> 

Pelaksanaan pengukuran tingkat kegemaran membaca melalui kuisioner yang responden sudah di tentukan jumlah nya oleh Perpustakaan Nasional RI.</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Merupakan proses memahami arti dari skor atau nilai TKM yang diperoleh dari hasil pengukuran, sehingga dapat digunakan untuk menilai kondisi literasi membaca masyarakat dan menentukan langkah perbaikan.
<table>
<tr><th>NILAI</th><th>KATEGORI</th><th>MAKNA/INTERPRETASI</th></tr>
<tr><td>0 – 20</td><td>Sangat Rendah</td><td>Hampir Tidak Ada Kebiasaan Membaca, Minat Rendah.</td></tr>
<tr><td>21 – 40</td><td>Rendah</td><td>Minat Membaca Ada, Tapi Frekuensi Dan Durasi Rendah.</td></tr>
<tr><td>41 – 60</td><td>Sedang</td><td>Kebiasaan Membaca Mulai Terbentuk, Namun Belum Konsisten.</td></tr>
<tr><td>61 – 80</td><td>Tinggi</td><td>Kebiasaan Membaca Baik Dan Rutin.</td></tr>
<tr><td>81 – 100</td><td>Sangat Tinggi</td><td>Membaca Menjadi Bagian Dari Budaya Dan Gaya Hidup.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Laporan Survey TGM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
</table>

**b) INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT (NILAI)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks) |
| Definisi | Merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat perkembangan, ketersediaan, pemanfaatan, dan budaya literasi di suatu wilayah atau kelompok masyarakat.<br>IPLM umumnya disusun oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk menilai seberapa baik masyarakat mengakses, memanfaatkan, dan mengembangkan kemampuan literasinya—baik literasi baca-tulis, numerasi, maupun literasi digital. |

| | |
|---|---|
| Rumus Perhitungan | Adapun beberapa kaidah utama yang digunakan dalam perhitungan indeks antara lain:<br>1. Indeks terdiri dari 7 (tujuh) unsur pembentuk indeks yang dinamakan unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) yang terdiri dari:<br>2. UPLM 1 yaitu pemerataan layanan perpustakaan.<br>3. UPLM 2 yaitu ketercukupan koleksi perpustakaan.<br>4. UPLM 3 yaitu ketercukupan tenaga perpustakaan.<br>5. UPLM 4 yaitu tingkat kunjungan masyarakat.<br>6. UPLM 5 yaitu perpustakaan yang dibina sesuai SNP.<br>7. UPLM 6 yaitu keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan.<br>8. UPLM 7 yaitu anggota perpustakaan.<br>9. Aspek Masyarakat (AM) yang digunakan untuk setiap Unsur Pembangun Literasi Masyarakat yaitu:<br>10. AM untuk UPLM 1 adalah jumlah kelembagaan yang ada di masyarakat.<br>11. AM untuk UPLM 2 adalah jumlah populasi penduduk.<br><br>**a. UPLM Kabupaten/Kota:**<br><br>$UPLM_i = \frac{\left(Kabkota + Kec + \frac{Desa}{Kel} + \frac{SD}{MI} + \frac{SMP}{MTS} + \frac{SMA}{MA} + Perguruan\ Tinggi + Khusus\right)}{K_i}$<br>Keterangan:<br>$UPLM_i$ : Unsur Pembangun Literasi Masyarakat<br>$AM_i$ : Aspek Masyarakat Kab/Kota sesuai dengan UPLM yang dihitung<br>$K_i$ : Standarisasi sesuai dengan UPLM yang dihitung<br><br>**b. IPLM Kabupaten/Kota:**<br><br>$IPLM\frac{Kab}{Kota} = \frac{\sum_{i=1}^{7}(UPLM)_i}{7} \times 100$<br><br>Keterangan:<br>IPLM Kab/Kota : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten/Kota<br>UPLMI : Unsur Pembangun Literasi Masyarakat |
| Interpretasi | IPLM biasanya disajikan dalam **skala 0 – 100**, di mana semakin tinggi nilainya, semakin baik kondisi literasi masyarakat. |

<table>
<tr><td></td><td>Interpretasinya umumnya dibagi menjadi kategori berikut (mengacu pada panduan Perpustakaan Nasional RI):
<table>
<tr><th>NILAI</th><th>KATEGORI</th><th>MAKNA/INTERPRETASI</th></tr>
<tr><td>0 – 20</td><td>Sangat Rendah</td><td>Akses Dan Budaya Literasi Hampir Tidak Ada; Fasilitas Minim Dan Partisipasi Rendah.</td></tr>
<tr><td>21 – 40</td><td>Rendah</td><td>Fasilitas Terbatas, Partisipasi Literasi Rendah, Budaya Membaca Belum Terbentuk.</td></tr>
<tr><td>41 – 60</td><td>Sedang</td><td>Ketersediaan Sumber Literasi Mulai Memadai, Tetapi Pemanfaatannya Belum Optimal.</td></tr>
<tr><td>61 – 80</td><td>Tinggi</td><td>Akses Baik, Masyarakat Aktif Memanfaatkan Fasilitas, Budaya Membaca Mulai Kuat.</td></tr>
<tr><td>81 – 100</td><td>Sangat Tinggi</td><td>Akses Merata, Pemanfaatan Optimal, Budaya Literasi Mengakar Di Semua Lapisan.</td></tr>
</table>
Poin penting interpretasi:<br>1. Nilai tinggi menunjukkan ketersediaan fasilitas, partisipasi, dan kebiasaan literasi masyarakat sudah baik.<br>2. Nilai rendah mengindikasikan perlunya intervensi kebijakan, peningkatan sarana, dan penguatan budaya literasi.<br>3. Perubahan nilai dari tahun ke tahun menjadi indikator keberhasilan atau kegagalan program literasi.</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>• Survei fasilitas perpustakaan (jumlah, luas, koleksi, layanan).<br>• Survei partisipasi masyarakat (kunjungan, keanggotaan, kegiatan literasi).<br>• Observasi kondisi sarana dan prasarana literasi di lapangan.<br>• Wawancara dengan pengelola perpustakaan, komunitas literasi, atau tokoh masyarakat.</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
</table>

## 17. URUSAN KEARSIPAN

### a) TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN AKUNTABILITAS KINERJA, ALAT BUKTI YANG SAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN NASIONAL (PASAL 40 DAN PASAL 59 UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN) (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban nasional diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (%) |
| Definisi | Mengukur pada kemudahan akses dan ketersediaan arsip (rekaman kegiatan atau informasi) untuk digunakan sesuai kebutuhan, baik oleh pencipta arsip maupun pihak lain yang berhak. Ketersediaan ini mencakup akses fisik, akses informasi, dan akses terhadap isi arsip. |

| | |
|---|---|
| Rumus Perhitungan | T= (a+i+s+j)/4<br><br>T = Tingkat Ketersediaan arsip<br>a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan<br>i = Persentase arsip in aktif yang telah dibuatkan<br>s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan<br>j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan |
| Interpretasi | Semakin Tingkat ketersediaan arsip maka semakin baik daftar arsip aktif, arsip in aktif, arsip statis dan jumlah arsip yang dimasukkan ke dalam daftar arsip. |
| Sumber Data | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| Frekuensi | Tahunan |

**b) TINGKAT KEBERADAAN DAN KEUTUHAN ARSIP SEBAGAI BAHAN PERTANGGUNGJAWABAN SETIAP ASPEK KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA UNTUK KEPENTINGAN NEGARA, PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (%) |
| Definisi | Untuk mengukur tingkat arsip yang tersedia . seberapa mudah arsip dapat diakses dan ditemukan kembali ketika dibutuhkan |
| Rumus Perhitungan | T = (m+b+g+a+c+i)/6<br><br>T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip<br>m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan<br>b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan<br>g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan<br>a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi<br>c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian<br>i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin |
| Interpretasi | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip mengacu pada ketersediaan dan kelengkapan arsip sebagai bukti dan bahan pertanggungjawaban dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat. Ini mencakup seberapa baik arsip-arsip tersebut ada (keberadaan) dan seberapa lengkap serta utuh arsip tersebut (keutuhan). |
| Sumber Data | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| Frekuensi | Tahunan |

## C. LAYANAN URUSAN PILIHAN

### 1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

#### a) JUMLAH TOTAL PRODUKSI PERIKANAN (TANGKAP DAN BUDIDAYA) DARI SELURUH KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI (TON)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari Seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi (Ton) |
| Definisi | ukuran kumulatif dari total seluruh hasil perikanan (baik yang ditangkap langsung dari alam maupun yang dibudidayakan) yang diperoleh dari semua kabupaten/kota yang berada dalam satu wilayah provinsi, yang dinyatakan dalam satuan ton |
| Rumus Perhitungan | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari Seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi |
| Interpretasi | seberapa banyak total ikan yang berhasil ditangkap dari alam dan dibudidayakan oleh seluruh wilayah kabupaten/kota |
| Sumber Data | Dinas Pertanian |
| Frekuensi | Tahunan |

### 2. URUSAN PARIWISATA

#### a) PERSENTASE PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATAWAN (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan (%) |
| Definisi | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan adalah tingkat peningkatan atau penurunan jumlah kunjungan wisatawan (baik wisatawan nusantara maupun mancanegara) ke suatu daerah dari satu periode ke periode berikutnya, yang dinyatakan dalam persentase (%). |
| Rumus Perhitungan | Persentase Pertumbuhan Kunjungan wisatawan (%)<br>[(Jumlah Wisatawan Tahun N – Tahun N-1) / Jumlah Wisatawan Tahun N-1] × 100%<br><br>Keterangan :<br>➢ Jumlah Wisatawan Tahun N: Total wisatawan yang berkunjung pada tahun berjalan (misalnya 2025)<br>➢ Jumlah Wisatawan Tahun N-1: Total wisatawan pada tahun sebelumnya (misalnya 2024)<br>➢ Data bisa dihitung untuk:<br>• Total keseluruhan wisatawan<br>• Wisatawan nusantara (domestik)<br>• Wisatawan mancanegara (internasional) |
| Interpretasi | Nilai positif menandakan pertumbuhan, negatif menandakan penurunan |
| Sumber Data | Laporan pengelola wisata, hotel, event pariwisata |
| Frekuensi | Tahunan (umumnya digunakan untuk pelaporan indikator pembangunan) |

**b) PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA PER KEBANGSAAN (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan (%) |
| Definisi | Ukuran yang digunakan untuk menghitung perubahan jumlah kunjungan wisatawan asing ke suatu destinasi wisata berdasarkan kebangsaan. |
| Rumus Perhitungan | $$\%growthwisman = \frac{(jwisman_n - jwisman_{n-1})}{jwisman_{n-1}} x100\%$$<br>dimana :<br>➢ $jwisman_n$ : Total wisatawan yang berkunjung pada tahun berjalan (misalnya 2025)<br>➢ $jwisman_{n-1}$ : Total wisatawan pada tahun sebelumnya (misalnya 2024)<br>➢ Data bisa dihitung untuk:<br>• Total keseluruhan wisatawan<br>• Wisatawan nusantara (domestik)<br>• Wisatawan mancanegara (internasional)<br>➢ 100%: faktor pengali untuk mengubah hasil pembagian menjadi bentuk persentase. |
| Interpretasi | Dengan semakin besarnya persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan dapat dilihat negara mana yang lebih tertarik berkunjung ke Payakumbuh dan sekitarnya. |
| Sumber Data | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| Frekuensi | Tahunan (umumnya digunakan untuk pelaporan indikator pembangunan) |

**c) PERSENTASE PENINGKATAN PERJALANAN WISATAWAN NUSANTARA YANG DATANG KE KABUPATEN / KOTA (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten / Kota |
| Definisi | Ukuran yang digunakan untuk menghitung perubahan jumlah kunjungan wisatawan domestik (dari dalam negeri) ke suatu kabupaten atau kota tertentu dalam periode waktu tertentu. |
| Rumus Perhitungan | $$\%growthdomestik = \frac{(jdomestik_n - jdomestik_{n-1})}{jdomestik_{n-1}} x100\%$$<br>dimana<br>➢ $jdomestik_n$ : Total wisatawan yang berkunjung pada tahun berjalan (misalnya 2025)<br>➢ $jdomestik_{n-1}$ : Total wisatawan pada tahun sebelumnya (misalnya 2024)<br>➢ Data bisa dihitung untuk: |

| | |
|---|---|
| | • Total keseluruhan wisatawan<br>• Wisatawan nusantara (domestik)<br>• Wisatawan mancanegara (internasional)<br>➢ 100% : faktor pengali untuk mengubah hasil pembagian menjadi bentuk persentase. |
| Interpretasi | Dengan meningkatnya persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang memperlihatkan bahwa wisatawan nusantara masih memiliki minat yang tinggi untuk mengunjungi pariwisata di kabupaten/kota. |
| Sumber Data | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| Frekuensi | Tahunan (umumnya digunakan untuk pelaporan indikator pembangunan) |

**d) TINGKAT HUNIAN AKOMODASI (%)**

| Nama Indikator | Tingkat Hunian Akomodasi (%) |
|---|---|
| Definisi | Ukuran yang digunakan untuk menghitung persentase jumlah kamar hotel atau akomodasi lain yang dihuni oleh tamu dibandingkan dengan total jumlah kamar yang tersedia. |
| Rumus Perhitungan | $$tkhunianakomodasi = \frac{jkmrterjual}{jkmrtersedia} x100\%$$<br>dimana :<br>• jkmrterjual : Total kamar yang terisi disebuah hunian (hotel/homestay)<br>jkmrtersedia : Total kamar yang ada pada sebuah hotel/homestay<br>• 100% : faktor pengali untuk mengubah hasil pembagian menjadi bentuk persentase. |
| Interpretasi | Dengan meningkatnya persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang memperlihatkan bahwa wisatawan nusantara masih memiliki minat yang tinggi untuk mengunjungi pariwisata di kabupaten/kota. |
| Sumber Data | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| Frekuensi | Tahunan |

**e) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)**

| Nama Indikator | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD |
|---|---|
| Definisi | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD merupakan besaran porsi dari sektor pariwisata terhadap penambahan pendapatan asli daerah |
| Rumus Perhitungan | $$kontribusipariwisata = \frac{pendapatan\ pariwisata}{PAD} x100\%$$ |

| | |
|---|---|
| Interpretasi | Dengan meningkatnya kontribusi sektor pariwisata akan meningkatkan pendapatan daerah, mengembangkan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. |
| Sumber Data | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, BPS |
| Frekuensi | Tahunan |

## 3. URUSAN PERTANIAN

### a) PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN (PRODUKTIVITAS PADI) (TON/ HA)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun (Produktivitas padi) (Ton/ Ha) |
| Definisi | Ukuran jumlah ton padi yang dihasilkan dari setiap hektar lahan dalam satu tahun, yang menunjukkan efisiensi penggunaan lahan dalam pertanian. |
| Rumus Perhitungan | $produktivitas = \frac{produksi}{luas\ lahan}$ |
| Interpretasi | Tingkat efisiensi serta hasil yang dicapai petani atau suatu wilayah dalam menghasilkan padi, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan produktivitas yang lebih baik. |
| Sumber Data | Dinas Pertanian |
| Frekuensi | Tahunan |

### b) PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN DAN JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%) |
| Definisi | mengukur seberapa besar penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular yang terjadi dalam suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang menunjukkan efektivitas upaya pencegahan dan pengendalian penyakit pada hewan |
| Rumus Perhitungan | Jumlah Kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah<br>Jumlah Kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – Jumlah Kejadian/Kasus<br>Penyakit Hewan menular Tahun sebelumnya (t-1)<br>---------- × 100%<br>Jumlah Kejadian/Kasus Penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) |
| Interpretasi | persentase yang menunjukkan penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular. |
| Sumber Data | Dinas Pertanian |
| Frekuensi | Tahunan |

## 4. URUSAN PERDAGANGAN

### a) PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN (IUPP/SIUP PUSAT PERBELANJAAN DAN IUTM/IUTS/SIUP TOKO SWALAYAN) (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai dengan Ketentuan Iupp/Siup Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan |
| Definisi | Mengukur persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) |
| Rumus Perhitungan | $\frac{Jumlah\ pelaku\ usaha\ yang\ telah\ memiliki\ izin\ sesuai\ ketentuan}{Jumlah\ pelaku\ usaha\ diwilayah\ kab/kota} \times 100\%$ |
| Interpretasi | Keseluruhan jumlah pelaku usaha yang sudah memiliki izin IUPP/SIUP/NIB Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP/NIB Toko Swalayan) yang masih berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.<br>Keseluruhan jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten/Kota.<br>Semakin tinggi persentasenya semakin baik ketaattan pelaku usaha dalam pengurusan izin sesuai ketentuan yang berlaku |
| Sumber Data | Dinas Koperasi dan UKM (Perdagangan) |
| Frekuensi | Tahunan |

### b) PERSENTASE KINERJA REALISASI PUPUK (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Kinerja Realisasi Pupuk (%) |
| Definisi | Mengukur persentase kinerja realisasi pupuk |
| Rumus Perhitungan | $\frac{Realisasi}{RDKK} \times 100\%$ |
| Interpretasi | Keseluruhan jumlah pupuk bersubsidi yang disalurkan kepada kelompok tani/ perorangan petani.<br>Rencana kebutuhan bersubsidi untuk satu tahun yang disusun<br>berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian yang ditetapkan secara manual dan atau melalui sistem elektronik.<br>Semakin tinggi nilainya, menunjukkan lancr dan terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi |
| Sumber Data | Dinas Koperasi dan UKM (Perdagangan) |
| Frekuensi | Tahunan |

**c) PERSENTASE ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN ERLENGKAPANNYA (UTTP) BERTANDA TERA SAH YANG BERLAKU (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku (%) |
| Definisi | Mengukur persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku |
| Rumus Perhitungan | $\frac{Jumlah\ UTTP\ bertanda\ tera\ yang\ berlaku\ pada\ tahun\ berjalan}{Jumlah\ potensi\ UTTP\ yang\ wajib\ sitera\ dan\ ditera\ ulang\ di\ wilayah\ Kabupaten/Kota} x\ 100\%$ |
| Interpretasi | Keseluruhan jumlah alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang sudah ditandai dengan tanda tera sah atau tanda tera yang berlaku yang dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.<br>Keseluruhan jumlah alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota.<br>Semakin tinggi nilainya, menunjukkan tingginya pelaku usaha yang tertib niaga |
| Sumber Data | Dinas Koperasi dan UKM (Perdagangan) |
| Frekuensi | Tahunan |

## 5. URUSAN PERINDUSTRIAN

**a) PERTAMBAHAN JUMLAH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN/ KOTA (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota (%) |
| Definisi | Mengukur tingkat pertambahan IKM di Kabupaten/Kota |
| Rumus Perhitungan | $\frac{Jumlah\ IKM\ Th.N - Jumlah\ IKM\ Th.N-1}{Jumlah\ IKM\ Th.N-1} x\ 100\%$ |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase pertambahan jumlah IKM memberikan dukungan positif terhadap pembangunan Industri |
| Sumber Data | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| Frekuensi | Tahunan |

**b) PERSENTASE PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI TERMASUK TURUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN INDUSTRI DALAM RIPIN YANG DITETAPKAN DALAM RPIK (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIK (%) |
| Definisi | Mengukur persentase pencapaian sasaran pembangunan |

| | |
|---|---|
| | industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK |
| Rumus Perhitungan | *Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing – masing bobot indicator adalah (100/N)%.*<br>*Untuk masing – masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)%*<br>*Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut* |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase pencapaian menunjukkan Pembangunan Industri berjalan dengan baik |
| Sumber Data | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| Frekuensi | Tahunan |

**c) PERSENTASE JUMLAH HASIL PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DENGAN JUMLAH IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH YANG DIKELUARKAN OLEH INSTANSI TERKAIT (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait (%) |
| Definisi | Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan IUI Kecil dan Menengah dengan jumlah IUI Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait |
| Rumus Perhitungan | $\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang dipantau atau diawasi}}{\text{jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$ |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentasenya, maka mengindikasikan bahwa aktivitas usaha industri semakin terkendali |
| Sumber Data | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| Frekuensi | Tahunan |

**d) PERSENTASE JUMLAH HASIL PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DENGAN JUMLAH IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI) KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH YANG DIKELUARKAN OLEH INSTANSI TERKAIT (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait (%) |
| Definisi | Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan IPUI Kecil dan Menengah dengan jumlah IPUI Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait |

| | |
|---|---|
| Rumus Perhitungan | $\frac{Jumlah\ realisasi\ izin\ yang\ diterbitkan}{Jumlah\ permohonan\ atau\ pengajuan\ izin\ yang\ masuk} x\ 100\%$ |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentasenya, maka mengindikasikan bahwa aktivitas usaha industri semakin terkendali dan pembangunan industri terus berkembang |
| Sumber Data | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| Frekuensi | Tahunan |

**e) PERSENTASE JUMLAH HASIL PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DENGAN JUMLAH IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) YANG LOKASINYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota |
| Definisi | Seluruh jumlah izin penambahan luas lahan kawasan industri dari luas lahan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan, kawasan industri, informasi ketersediaan lahan, kepatuhan terhadap standar kawasan industri dan<br>penyampaian data kawasan industri dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi dan/atau kunjungan lapangan |
| Rumus Perhitungan | $\frac{Jumlah\ izin\ yang\ dipantau\ dan\ dianalisis\ dalam\ laporan\ hasil\ pemantauan}{Jumlah\ izin\ yang\ dikeluarkan} x\ 100\%$ |
| Interpretasi | Semakin tinggi menunjukan semakin patuhnya pelaku industri di lapangan |
| Sumber Data | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| Frekuensi | Tahunan |

**f) TERSEDIANYA INFORMASI INDUSTRI SECARA LENGKAP DAN TERKINI (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Tersedianya Informasi Industri Secara lengkap Dan Terkini (%) |
| Definisi | Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap, Akurat, dan Terkini adalah kondisi di mana data dan informasi terkait sektor industri yang tersedia mencakup semua elemen penting (lengkap), sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (akurat), dan diperbarui secara berkala (terkini) |
| Rumus Perhitungan | $\frac{Nilai\ lengkap + Nilai\ Akurat + Nilai\ terkini}{3}$ |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilainya, semakin berkualitas informasi industri yang dapat diakses dan digunakan |

| | |
|---|---|
| Sumber Data | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| Frekuensi | Tahunan |

## D. FUNGSI PENDUKUNG

## 1. KESEKRETARIATAN DAERAH

### a) INDEK KUALITAS KEBIJAKAN (INDEKS)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Kualitas Kebijakan (Indeks) |
| Definisi | Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah terutama terhadap dampak atau hasil bagi pembangunan yang strategis dengan mengedepankan prinsip berbasis bukti (*evidence-based)* |
| Rumus Perhitungan | Perhitungan Indeks Kualitas Kebijakan berdasarkan pembobotan Instrumen IKK yang terdiri dari :<br>**6. Profil (Bobot 10%) :**<br>Pelibatan pejabat fungsional Analis Kebijakan dalam pengukuran kualitas kebijakan.<br>**7. Perencanaan Kebijakan (Bobot 20%) :**<br>4) penyusunan kebijakan yang didasarkan pada data dan informasi yang valid;<br>5) keterlibatan pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan; dan<br>6) pelaksanaan analisis dampak sebelum kebijakan diimplementasikan<br>**8. Implementasi Kebijakan (Bobot 25%) :**<br>4) kejelasan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan;<br>5) efektifitas pelaksanaan kebijakan di lapangan; dan<br>6) adanya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan.<br>**9. Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan (Bobot 30%) :**<br>3) adanya evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan;<br>adanya dampak yang terukur bagi masyarakat; dan<br>4) adanya keselarasan kebijakan dengan kebijakan lain yang relevan.<br>**10. Transparansi dan Partisipasi Publik (Bobot 15%) :**<br>3) tersedianya akses informasi kebijakan bagi publik; dan<br>adanya mekanisme bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau mengajukan keberatan. |
| Interpretasi | Pengukuran kualitas kebijakan dilakukan setiap tahun dengan objek kebijakan yaitu kebijakan pembangunan strategis dari Instansi Pemerintah untuk pembangunan berkelanjutan yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan mendukung pertumbuhan perekonomian; |

<table>
<tr><td></td><td>Kebijakan pembangunan strategis dimaksud harus memenuhi kriteria :<br>c. mengatur kepentingan dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas dan<br>d. telah ditetapkan dan diimplementasikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum tahun pengukuran.<br><br>Pengukuran IKK dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :<br>8. Registrasi melalui Sistem Informasi Pengukuran Kualitas Kebijakan<br>9. Pengukuran mandiri (self asessment)<br>10. Verifikasi hasil pengukuran mandiri<br>11. Penyampaian umpan balik (feedback)<br>12. Perbaikan pengukuran berdasarkan umpan balik (feedback)<br>13. Pembahasan hasil pengukuran<br>14. Penetapan hasil pengukuran kualitas kebijakan Instansi Pemerintah<br>Kualifikasi nilai kualitas kebijakan dalam Indeks Kuatiras Kebijakan yaitu :<br><br>
<table>
<tr><th>NILAI</th><th>KUALIFIKASI</th></tr>
<tr><td>91,00 – 100</td><td>UNGGUL</td></tr>
<tr><td>80,00 – 90,99</td><td>SANGAT BAIK</td></tr>
<tr><td>65,00 – 79,99</td><td>BAIK</td></tr>
<tr><td>50,00 – 64,99</td><td>CUKUP</td></tr>
<tr><td>< 50,00</td><td>KURANG</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>LAN RI</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
</table>

**b) INDEK PELAYANAN PUBLIK (INDEKS)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Pelayanan Publik (Indeks) |
| Definisi | Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.<br>Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks. |
| Rumus Perhitungan | Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, |

| | |
|---|---|
| | menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik.<br>a. Menentukan nilai untuk setiap indikator<br>$Nilai\ per\ indikator = \left(\frac{nilai\ F01 + nilai\ F02 + nilai\ F03}{3}\right) x\ bobot\ per\ indikator$<br>b. Menentukan nilai setiap aspek<br>$Nilai\ per\ aspek : \sum nilai\ per\ indikator$<br>c. Menentukan Indeks<br>$Nilai\ indeks : \sum (nilai\ aspek_n\ x\ bobot_n)$ |
| Interpretasi | Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.<br>Prinsip-prinsip tersebut adalah:<br>a. Keadilan (Fairness);<br>a. Partisipasi (Participation);<br>b. Akuntabilitas (Accountability);<br>c. Transparansi (transparency);<br>d. Berdayaguna (useful);<br>e. Aksesibilitas (accessibility)<br>Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan).<br>Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi: |

| RANGE NILAI | KATEGORI | MAKNA |
|---|---|---|
| **0 – 1,00** | F | GAGAL |
| **1,01 – 1,50** | E | SANGAT BURUK |
| **1,51 – 2,00** | D | BURUK |
| **2,01 – 2,50** | C- | CUKUP(DENGAN CATATAN) |
| **2,51 – 3,00** | C | CUKUP |
| **3,01 – 3,50** | B- | BAIK (DENGAN CATATAN) |
| **3,51 – 4,00** | B | BAIK |
| **4,01 – 4,50** | A- | SANGAT BAIK |
| **4,51 – 5,00** | A | PELAYANAN PRIMA |

| | |
|---|---|
| Sumber Data | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. |
| Frekuensi | Tahunan |

**c) PERSENTASE JUMLAH PENGADAAN YANG DILAKUKAN SECARA KOMPETITIF (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan secara Kompetitif (%) |
| Definisi | Mengukur tingkat pelaksanaan pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif |
| Rumus Perhitungan | $\frac{Jumlah\ Pengadaan\ yang\ dilakukan\ dengan\ metode\ kompetitif}{Jumlah\ seluruh\ pengadaan} \times 100\%$ |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase pengadaan yang dilaksanakan dengan metode kompetitif, maka semakin baik kinerja Instansi Pemerintah dalam pemanfaatan dan ketaatan terhadap peraturan terkait proses pengadaan barang dan jasa |
| Sumber Data | Sekretariat Daerah |
| Frekuensi | Tahunan |

**d) RASIO NILAI BELANJA YANG DILAKUKAN MELALUI PENGADAAN (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan melalui Pengadaan (%) |
| Definisi | Mengukur tingkat pelaksanaan pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif |
| Rumus Perhitungan | $\frac{Jumlah\ nilai\ belanja\ operasi\ dan\ modal\ yang\ melalui\ pengadaan}{Total\ belanja\ operasi\ dan\ modal} \times 100\%$ |
| Interpretasi | Rasio ini memberikan gambaran tentang bagaimana anggaran dialokasikan dan digunakan untuk mencapai tujuan pengadaan |
| Sumber Data | Sekretariat Daerah |
| Frekuensi | Tahunan |

**e) PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI PADA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah (%) |
| Definisi | Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah |

| | |
|---|---|
| Rumus Perhitungan | $\frac{\text{Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n)} - \text{Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha kecil dan Koperasi Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)}}$ |
| Interpretasi | Dengan adanya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah akan berpengaruh terhadap hal-hal sebagai berikut:<br>1. Dorongan pertumbuhan ekonomi<br>2. Pemberdayaan UKKM<br>3. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia<br>4. Peningkatan kualitas dan daya saing<br>5. Peranan LKPP dalam mendukung percepatan penggunaan PDN dalam e-Katalog, dan penyempurnaan peraturan |
| Sumber Data | Sekretariat Daerah |
| Frekuensi | Tahunan |

## E. FUNGSI PENUNJANG

### 1. KEUANGAN

#### a) RASIO BELANJA PEGAWAI DI LUAR GURU DAN TENAGA KESEHATAN (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan (%) |
| Definisi | Mengukur Rasio Belanja Pegawai Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan |
| Rumus Perhitungan | $\frac{\text{Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\ \%$ |
| Interpretasi | 1. Pembilang<br>Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan adalah jumlah realisasi seluruh komponen belanja pegawai antara lain gaji, tunjangan yang melekat pada gaji dan tunjangan kinerja, tidak termasuk belanja pegawai guru dan tenaga kesehatan<br>2. Penyebut<br>Jumlah APBD adalah jumlah realisasi seluruh belanja daerah |
| Sumber Data | Sistem Informasi Pemerintah Daerah/LRA/BKD |
| Frekuensi | Tahunan |

#### b) RASIO PAD (TERHADAP PAD NON MIGAS) (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Rasio PAD (Terhadap PAD Non Migas/%) |
| Definisi | Mengukur Tax Ratio atau Kemampuan Daerah dalam mengumpulkan pajak dari potensi pajak daerah |

| | |
|---|---|
| Rumus Perhitungan | $\frac{Jumlah\ PAD}{Jumlah\ pendapatan\ pada\ APBD}\ x\ 100\%$ |
| Interpretasi | 1. Pembilang<br>Jumlah realisasi seluruh pendapatan asli daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah<br>2. Penyebut<br>Jumlah realisasi seluruh pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain lain pendapatan daerah yang sah |
| Sumber Data | Sistem Informasi Pemerintah Daerah/LRA/BKD |
| Frekuensi | Tahunan |

**c) RASIO BELANJA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (DIKURANGI *TRANSFER EXPENDITURES*) (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi *transfer expenditure*) (%) |
| Definisi | Mengukur efisiensi belanja langsung diluar transfer expenditure atau rasio belanja langsung dalam APBD diluar transfer expenditures |
| Rumus Perhitungan | $\frac{jumlah\ belanja\ urusan\ pemerintahan - transfer\ expenditures}{Jumlah\ belanja\ APBD}\ x\ 100\%$ |
| Interpretasi | 1. Pembilang<br>Jumlah belanja urusan pemerintahan dikurangi transfer expenditures adalah jumlah belanja urusan pemerintahan yang meliputi seluruh belanja daerah diluar belanja modal dikurangi transfer expenditures yang meliputi hibah, bantuan sosial, subsidi, pembayaran bunga, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Atau bisa juga penjumlahan dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa<br>2. Penyebut<br>Jumlah belanja APBD adalah jumlah realisasi seluruh belanja daerah |
| Sumber Data | Sistem Informasi Pemerintah Daerah/LRA/BKD |
| Frekuensi | Tahunan |

**d) DEVIASI REALISASI BELANJA TERHADAP BELANJA TOTAL DALAM APBD (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD (%) |
| Definisi | Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal |
| Rumus Perhitungan | $\frac{nilai\ absolut\ dari\ total\ belanja\ dalam\ realisasi}{Total\ belanja\ APBD}\ x\ 100\%$ |

| | |
|---|---|
| Interpretasi | 1. Pembilang<br>Nilai realisasi belanja daerah dalam APBD tahun pelaporan yang merupakan semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Nilai absolut dimaksud adalah tidak ada angka yang bernilai minus<br>2. Penyebut<br>Total anggaran belanja APBD tahun pelaporan sebelum perubahan |
| Sumber Data | Sistem Informasi Pemerintah Daerah/LRA/BKD |
| Frekuensi | Tahunan |

**e) MANAJEMEN ASET (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Manajemen Aset (%) |
| Definisi | Melihat Manajemen aset seluruh perangkat daerah yang ada |
| Rumus Perhitungan | 1. Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak)<br>2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak)<br>3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tida<br>4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan angg (Ya/Tidak) |
| Interpretasi | Manajemen aset adalah menjawab pertanyaan pada rumus diatas dengan format Ya/Tidak. Apabila seluruh terjawab ya, Pemerintah Daerah mencapai realisasi 100 persen |
| Sumber Data | Sistem Informasi Pemerintah Daerah/LRA/BKD |
| Frekuensi | Tahunan |

**f) RASIO ANGGARAN SISA TERHADAP TOTAL BELANJA DALAM APBD TAHUN SEBELUMNYA (%)**

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya (%) |
| Definisi | Melihat rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya |
| Rumus Perhitungan | $\frac{Nilai\ Realisasi\ SILPA}{Total\ belanja\ anggaran\ tahun\ sebelumnya}\ x\ 100\%$ |
| Interpretasi | 1. Pembilang<br>Nilai realisasi SILPA (sisa lebih perhitungan anggaran) dalam APBD pada tahun pelaporan<br>2. Penyebut<br>Total belanja anggaran dalam APBD yang ditetapkan pada tahun sebelumnya (APBD sebelum perubahan/murni) |

| | |
|---|---|
| Sumber Data | Sistem Informasi Pemerintah Daerah/LRA/BKD |
| Frekuensi | Tahunan |

## 2. KEPEGAWAIAN

### a) RASIO PEGAWAI PENDIDIKAN TINGGI DAN MENENGAH/DASARL (PNS TIDAK TERMASUK GURU DAN TENAGA KESEHATAN) (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) |
| Definisi | Mengukur rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) |
| Rumus Perhitungan | $\frac{Jumlah\ pegawai\ menurut\ Pendidikan\ PT\ ke\ atas}{Seluruh\ jumlah\ pegawai} \times 100\%$ |
| Interpretasi | Melihat perbandingan tingkat pendidikan ASN diluar guru dan tenaga kesehatan |
| Sumber Data | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Payakumbuh |
| Frekuensi | Tahunan |

### b) RASIO PEGAWAI FUNGSIONAL (PNS TIDAK TERMASUK GURU DAN TENAGA KESEHATAN) (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Rasio pegawai Fungsional (%) (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) |
| Definisi | Mengukur rasio pegawai fungsional ASN di luar guru dan tenaga kesehatan |
| Rumus Perhitungan | $\frac{Jumlah\ pegawai\ PNS\ fungsional\ (diluar\ guru\ dan\ tenaga\ kesehatan)}{Jumlah\ pegawai\ pemerintah\ (ASN\ tidak\ termasuk\ guru\ dan\ tenaga\ kesehatan)} \times 100\%$ |
| Interpretasi | Melihat perbandingan jumlah pegawai fungsional ASN diluar guru dan tenaga kesehatan |
| Sumber Data | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Payakumbuh |
| Frekuensi | Tahunan |

### c) RASIO JABATAN FUNGSIONAL BERSERTIFIKAT KOMPETENSI (PNS TIDAK TERMASUK GURU DAN TENAGA KESEHATAN) (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (pnsTidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) (%) |
| Definisi | Mengukur rasio pegawai fungsional bersertifikat kompetensi, diluar tenaga guru dan kesehatan |
| Rumus Perhitungan | $\frac{Jumlah\ pegawai\ fungsional\ yang\ memiliki\ sertifikat\ kompetensi}{Seluruh\ jumlah\ pegawai\ fungsional\ (ASN\ tidak\ termasuk\ guru\ dan\ tenaga\ kesehatan)} \times 100\%$ |
| Interpretasi | |

| | |
|---|---|
| Sumber Data | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Payakumbuh |
| Frekuensi | Tahunan |

## 3. INSPEKTORAT

### 1) LEVEL KAPABILITAS APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) (LEVEL)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) (Level) |
| Definisi | Suatu sistem penilaian yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mengukur dan meningkatkan kualitas serta efektivitas kinerja pengawasan internalnya |
| Rumus Perhitungan | Tingkat kualitas APIP (belum dinilai ())/level 1/level 2/level 3) berdasarkan laporan hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP |
| Interpretasi | Semakin tinggi tingkatnya, semakin baik kemampuan APIP dalam menjalankan fungsi pengawasan, mencakup aspek kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM |
| Sumber Data | BPKP |
| Frekuensi | Tahunan |

### 2) MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTRN PEMERINTAH (APIP) (INDEKS)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Maruritas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP) (Indeks) |
| Definisi | tingkat kematangan dan kesempurnaan penyelenggaraan SPIP di suatu instansi pemerintah, yang dinilai menggunakan kerangka enam tingkatan (Level 0-5) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) |
| Rumus Perhitungan | Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/Level 1/Level 2/level 3 berdasarkan laporan hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP |
| Interpretasi | Semakin tinggi tingkatnya, semakin baik kemampuan pengendalian internnya untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk efektivitas dan efisiensi, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan pada peraturan |
| Sumber Data | BPKP |
| Frekuensi | Tahunan |

# LAMPIRAN 2
# MANAJEMEN RISIKO
# PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

# 1. MANAJEMEN RISIKO TUJUAN DAN SASARAN MISI 1

**Tabel L2.1** Penetapan Konteks Risiko Strategis Misi 1 Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

| PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS | | | |
|---|---|---|---|
| **MISI 1** MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS | | | |
| Nama Pemda | : | Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat | |
| Periode yang dinilai | : | Tahun 2025 - 2029 | |
| Visi | : | Payakumbuh Maju Bermartabat Melalui Pemberdayaan, Pengembangan Kualitas Pendidikan, Dan Sentra Umkm Yang Kompetitif | |
| Tujuan Strategis RPJMD | : | Terwujudnya SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing | |
| Indikator Kinerja Tujuan RPJMD | : | Indeks Pembangunan Manusia | |
| Sasaran Strategis RPJMD | : | 1.1.1 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat |
| | | 1.1.2 | Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan |
| | | 1.1.3 | Menurunkan Tingkat Kemiskinan |
| | | 1.1.4 | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| Indikator Kinerja Sasaran RPJMD | : | 1.1.1.a | Usia Harapan Hidup (tahun) |
| | | 1.1.1.b | Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%) |
| | | 1.1.1.c | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) |
| | | 1.1.2.a | Harapan Lama Sekolah (tahun) |
| | | 1.1.3.a | Tingkat Kemiskinan |
| | | 1.1.4.a | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) |
| | | 1.1.4.b | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) |
| Urusan Pemerintah Daerah | : | 1. Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar: Kesehatan<br>2. Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar: Pendidikan<br>3. Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar: Sosial<br>4. Urusan Pemerintah Wajib Non-Pelayanan Dasar: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |

| PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS | | |
|---|---|---|
| | | 5. Urusan Pemerintah Wajib Non-Pelayanan Dasar: Pangan<br>6. Urusan Pemerintah Wajib Non-Pelayanan Dasar: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Program Pembangunan | : | 1.1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat<br>1.2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan<br>1.3 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman<br>1.4 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan<br>2.1 Program Pengelolaan Pendidikan<br>2.2 Program Pengembangan Kurikulum<br>2.3 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan<br>3.1 Program Pemberdayaan Sosial<br>3.2 Program Rehabilitasi Sosial<br>3.3 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial<br>3.4 Program Penanganan Bencana<br>3.5 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan<br>4.1 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan<br>4.2 Program Perlindungan Perempuan<br>4.3 Program Peningkatan Kualitas Keluarga<br>4.4 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak<br>4.5 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)<br>4.6 Program Perlindungan Khusus Anak<br>5.1 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan<br>5.2 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat<br>5.3 Program Penanganan Kerawanan Pangan<br>5.4 Program Pengawasan Keamanan Pangan<br>6.1 Program Penataan Desa<br>6.2 Program Kerja Sama Desa<br>6.3 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat |
| Perangkat Daerah Terkait | : | 1. Dinas Kesehatan<br>2. Dinas Pendidikan |

| PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS | | |
|---|---|---|
| | | 3. Dinas Sosial<br>4. Dinas Ketahanan Pangan<br>5. Sekretariat Daerah<br>6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

**Tabel L2.2** Identifikasi Risiko Strategis Misi 1 Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U/C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| **Tujuan 1.1** Terwujudnya SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing | Indeks Pembangunan Manusia | | | | | | | | |
| **Sasaran 1.1.1** Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Usia Harapan Hidup (tahun) | Menurunnya derajat kesehatan masyarakat Kota Payakumbuh | RPP: 1.1.1.1 | Kepala Daerah | Kurangnya tenaga medis | Internal | C | Pelayanan kesehatan tidak optimal | PD, Masyarakat |
| | | | | | Aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan masih rendah | Internal | C | Tingginya angka kematian | Masyarakat |
| | | | | | Pemyuluhan dan pelayanan kepada masyarakat belum optimal | Internal | C | Meningkatnya penyebaran penyakit pada masyarakat | PD, Masyarakat |
| | | | | | Masih rendah kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat | Eksternal | C | Tingginya jumlah masyarakat yang sakit | Masyarakat |
| | Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat | Menurunnya Kualitas Sumber daya Manusia | RPP: 1.1.1.2 | Kepala Daerah | Sanitasi dan Air Bersih yang tidak layak | Internal | C | Lingkungan yang tidak higienis meningkatkan risiko infeksi yang menghambat penyerapan nutrisi. | Masyarakat |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/UC | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | Pendek) pada Balita (%) | | | | Perencanaan Keluarga yang tidak tepat | Eksternal | C | Kehamilan terlalu muda atau terlalu dekat antar anak, ditambah banyak anak dalam satu keluarga membuat perhatian dan asupan nutrisi terbagi. | Masyarakat |
| | | | | | Faktor Gizi dan kesehatan Ibu dan Anak yang buruk | Eksternal | C | Gizi buruk pada ibu hamil | PD, Masyarakat |
| | | | | | | | | Pemberian ASI dan MP-ASI yang tidak optimal | PD, Masyarakat |
| | | | | | | | | Pola makan anak yang buruk | PD, Masyarakat |
| | | | | | | | | Pendidikan dan Pengetahuan ibu yang rendah tentang gizi seimbang, ASI ekslusif dan sanitasi | PD, Masyarakat |
| | | | | | Faktor ekonomi dan kemiskinan | Eksternal | UC | Penghasilan rendah berkorelasi langsung dengan kerentanan stunting, sehingga Keluarga tidak mampu membeli makanan bergizi atau mengakses layanan kesehatan. | Masyarakat |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/UC | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | Masalah Tata Kelola dan Program Pemerintah | Internal | C | Kurangnya data yang akurat untuk pemantauan dan evaluasi, sehingga Program intervensi gizi tidak menjangkau daerah terpencil atau miskin atau tidak tepat | PD |
| | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) | Penduduk tidak memperoleh cukup pangan secara kuantitatif | RPP: 1.1.1.3 | Kepala Daerah | Menurunnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Internal | C | Peningkatan Risiko Stunting dan Wasting | Masyarakat |
| | | | | | Produktivitas Ekonomi Menurun | Eksternal | UC | Menurunkan daya saing daerah dalam sektor industri, pertanian, maupun jasa. | Kota Payakumbuh |
| | | | | | Kurangnya Edukasi Gizi dan Pola Konsumsi Tidak Sehat | Internal | C | Konsumsi pangan tak seimbang, Masyarakat tidak tahu pentingnya asupan kalori yang memadai yang Mengandalkan makanan murah tapi rendah nilai gizi | PD, Masyarakat |
| | | | | | Distribusi pangan yang tidak efisien | Internal | C | Daerah tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan dari produksi lokal | Kota Payakumbuh |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/UC | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | | | | Ketergantungan pada pasokan luar daerah atau impor membuat pasokan tidak stabil | Masyarakat |
| | | | | | | | | Sistem distribusi yang tidak efisien | PD, Masyarakat |
| | | | | | Kemiskinan dan Daya Beli Rendah | Eksternal | UC | Memburuknya ketimpangan sosial dapat memicu konflik horizontal, kejahatan, dan instabilitas sosial. | Masyarakat |
| **Sasaran 1.1.2** Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan | Harapan Lama Sekolah (tahun) | Rendahnya akses atau mutu pendidikan | RPP: 1.1.2.1 | Kepala Daerah | Kemiskinan dan Ketidakmampuan Ekonomi Keluarga | Internal | UC | Banyak anak terpaksa berhenti sekolah lebih awal untuk membantu orang tua bekerja | Masyarakat |
| | | | | | Akses terhadap Sekolah yang Terbatas | Internal | C | Kurangnya fasilitas pendidikan menyebabkan banyak anak hanya menyelesaikan pendidikan dasar | PD |
| | | | | | Kualitas Pendidikan yang Rendah | Internal | C | Guru kurang berkualitas atau jumlahnya tidak memadai | PD |
| | | | | | | | | Fasilitas sekolah rusak, tidak lengkap, atau tidak nyaman | PD |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/UC | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | | | | Proses belajar mengajar tidak menarik atau tidak relevan, sehingga anak kehilangan motivasi untuk melanjutkan sekolah | PD |
| | | | | | Budaya dan Nilai Sosial yang Tidak Mendukung Pendidikan | Internal | UC | Kurangnya Kesadaran Orang Tua terhadap Pentingnya Pendidikan | Masyarakat |
| | | | | | | | | Pernikahan dini dan tekanan sosial membuat anak-anak keluar dari sekolah lebih fokus pada kebutuhan jangka pendek seperti membantu ekonomi keluarga | Masyarakat |
| **Sasaran 1.1.3** Menurunkan Tingkat Kemiskinan | Tingkat Kemiskinan | Tidak tercapainya tujuan Pembangunan men-sejahterakan masyarakat | RPP: 1.1.3.1 | Kepala Daerah | Minimnya kesempatan, dan Ketimpangan akses | Internal | C | Keterbatasan Lapangan Kerja yang Layak | PD |
| | | | | | | | | Tingkat Pendidikan Rendah | Masyarakat |
| | | | | | | | | Pengelolaan Sumber Daya yang Tidak Adil | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Minimnya Akses terhadap Modal dan Kredit | Kota Payakumbuh |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/UC | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | Rendahnya kualitas layanan dasar | Internal | C | Akses terhadap Layanan Dasar yang Buruk | PD |
| | | | | | lemahnya pemberdayaan masyarakat | Internal | C | Kurangnya Peran Pemerintah Daerah yang Efektif | PD |
| **Sasaran 1.1.4** Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak | 1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)<br>2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Terbatasnya partisipasi, kemandirian, kapasitas, dan daya kontrol masyarakat terhadap proses pembangunan | RPP: 1.1.4.1 | Kepala Daerah | Kurangnya Akses terhadap Informasi dan Teknologi | Internal | C | masyarakat tidak tahu bagaimana cara menyampaikan aspirasi atau melakukan pengawasan | Masyarakat |
| | | | | | | | | Minimnya akses terhadap: Informasi kebijakan publik, Teknologi komunikasi (internet, media sosial), dan Data pembangunan | Masyarakat |
| | | | | | Tingkat Pendidikan dan Literasi Masyarakat yang Rendah | Internal | C | Ketergantungan pada bantuan pemerintah atau pihak luar mengurangi motivasi untuk berinisiatif dan mandiri | Masyarakat |
| | | | | | | | | Ketika masyarakat hidup dalam kemiskinan, fokus utama mereka adalah | Masyarakat |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/UC | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | | | | bertahan hidup, bukan berpartisipasi | |
| | | | | | Belum optimalnya pola pemerintah yang transparan dan responsif | Internal | C | Musyawarah pembangunan hanya formalitas, tidak benar-benar melibatkan warga | PD |
| | | | | | | | | Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan sangat terbatas | Masyarakat |
| | | | | | | | | Minimnya Pelatihan dan Fasilitasi Pemberdayaan | PD |
| | | | | | Institusi masyarakat yang belum kuat dan responsif | Eksternal | C | tidak ada saluran kolektif yang kuat untuk menyuarakan kepentingan masyarakat | Masyarakat |
| | | | | | | | | Lemahnya atau tidak aktifnya Lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan Karang Taruna, PKK, dan kelompok komunitas lokal lainnya | Masyarakat |
| | | Perempuan dan laki-laki tidak memiliki | RPP: 1.1.5.1 | Kepala Daerah | Budaya patriarki | Eksternal | UC | Budaya Patriarkal yang Mengakar, yang menempatkan laki-laki | Kota Payakumbuh |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | kesempatan yang setara dalam pembangunan yang dapat menghambat langsung terhadap pembangunan masyarakat. | | | | | | lebih tinggi daripada perempuan dan dibatasi ruang geraknya | |
| | | | | | | | | Kebijakan Publik yang Tidak Sensitif Gender | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Kurangnya Data dan Monitoring Gender | PD |
| | | | | | Rendahnya pendidikan dan ekonomi perempuan | Eksternal | C | Rendahnya Akses Perempuan terhadap Pendidikan | PD |
| | | | | | | | | Keterbatasan Perempuan dalam Dunia Kerja | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Minimnya Representasi Perempuan dalam Politik dan Kepemimpinan | Kota Payakumbuh |
| | | | | | Minimnya perlindungan hukum dan kesehatan | Internal | C | Kurangnya Perlindungan terhadap Kekerasan Berbasis Gender | PD |
| | | | | | | | | Tingginya Angka Pernikahan Anak dan Kehamilan Remaja | PD |

**Tabel L2.3** Analisis Risiko Strategis pada Tujuan 1 Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

| | | |
|---|---|---|
| Nama Pemda | : | Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat |
| Tahun Penilaian | : | Tahun 2025 - 2029 |
| Tujuan Strategis RPJMD | : | Terwujudnya SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing |

| NO. | RISIKO TERIDENTIFIKASI | KODE RISIKO | ANALISIS RISIKO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SKALA DAMPAK | SKALA KEMUNGKINAN | SKALA RISIKO |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(4)x(5) |
| 1. | Menurunnya derajat kesehatan masyarakat Kota Payakumbuh | RPP: 1.1.1.1 | 5 | 4 | 20 |
| 2. | Menurunnya Kualitas Sumber daya Manusia | RPP: 1.1.1.2 | 5 | 5 | 25 |
| 3. | Penduduk tidak memperoleh cukup pangan secara kuantitatif | RPP: 1.1.1.3 | 4 | 2 | 8 |
| 4. | Rendahnya akses atau mutu pendidikan | RPP: 1.1.2.1 | 5 | 3 | 15 |
| 5. | Tidak tercapainya tujuan Pembangunan mensejahterakan masyarakat | RPP: 1.1.3.1 | 4 | 4 | 16 |
| 6. | Terbatasnya partisipasi, kemandirian, kapasitas, dan daya kontrol masyarakat terhadap proses pembangunan | RPP: 1.1.4.1 | 4 | 2 | 8 |
| 7. | Perempuan dan laki-laki tidak memiliki kesempatan yang setara dalam pembangunan yang dapat menghambat langsung terhadap pembangunan masyarakat. | RPP: 1.1.5.1 | 3 | 3 | 9 |

**Tabel L2.4** Matriks Hasil Analisis Risiko pada Tujuan 1 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

| MATRIKS ANALISIS RISIKO | | | DAMPAK/KONSEKUENSI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TIDAK SIGNIFIKAN | KECIL | SEDANG | BESAR | SIGNIFIKAN |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO | HAMPIR PASTI | 5 | | | | | RPP: 1.1.1.2 |
| | KEMUNGKINAN BESAR | 4 | | | | RPP: 1.1.3.1 | RPP: 1.1.1.1 |
| | MUNGKIN | 3 | | | RPP: 1.1.5.1 | | RPP: 1.1.2.1 |
| | KEMUNGKINAN KECIL | 2 | | | | RPP: 1.1.1.3<br>RPP: 1.1.4.1 | |
| | SANGAT JARANG | 1 | | | | | |
| KETERANGAN | | | SANGAT RENDAH | RENDAH | SEDANG/ MEDIUM | TINGGI | SANGAT TINGGI |

**Tabel L2.5** Daftar Risiko Prioritas pada Tujuan 1 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

| | | |
|---|---|---|
| Nama Pemda | : | Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat |
| Tahun Penilaian | : | Tahun 2025 - 2029 |

| NO. | RISIKO PRIORITAS | KODE RISIKO | SKALA RISIKO | PEMILIK RESIKO | PENYEBAB | DAMPAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Menurunnya Kualitas Sumber daya Manusia | RPP: 1.1.1.2 | 25 | Kepala Daerah | 1. Sanitasi dan Air Bersih yang tidak layak<br>2. Perencanaan Keluarga yang tidak tepat<br>3. Faktor Gizi dan kesehatan Ibu dan Anak yang buruk<br>4. Faktor ekonomi dan kemiskinan<br>5. Masalah Tata Kelola dan Program Pemerintah | 1. Lingkungan yang tidak higienis meningkatkan risiko infeksi yang menghambat penyerapan nutrisi.<br>2. Kehamilan terlalu muda atau terlalu dekat antar anak, ditambah banyak anak dalam satu keluarga membuat perhatian dan asupan nutrisi terbagi.<br>3. Gizi buruk pada ibu hamil<br>4. Pemberian ASI dan MP-ASI yang tidak optimal<br>5. Pola makan anak yang buruk<br>6. Pendidikan dan Pengetahuan ibu yang rendah tentang gizi seimbang, ASI ekslusif dan sanitasi<br>7. Penghasilan rendah berkorelasi langsung dengan kerentanan stunting, sehingga Keluarga tidak mampu membeli makanan bergizi atau mengakses layanan kesehatan.<br>8. Kurangnya data yang akurat untuk pemantauan dan evaluasi, sehingga Program intervensi gizi tidak menjangkau daerah terpencil atau miskin atau tidak tepat |
| 2. | Menurunnya derajat kesehatan masyarakat Kota Payakumbuh | RPP: 1.1.1.1 | 20 | Kepala Daerah | 1. Kurangnya tenaga medis<br>2. Aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan masih rendah<br>3. Pemyuluhan dan pelayanan kepada masyarakat belum optimal<br>4. Masih rendah kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat | 1. Pelayanan kesehatan tidak optimal<br>2. Tingginya angka kematian<br>3. Meningkatnya penyebaran penyakit pada masyarakat<br>4. Tingginya jumlah masyarakat yang sakit |

| NO. | RISIKO PRIORITAS | KODE RISIKO | SKALA RISIKO | PEMILIK RESIKO | PENYEBAB | DAMPAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Tidak tercapainya tujuan Pembangunan men-sejahterakan masyarakat | RPP: 1.1.3.1 | 16 | Kepala Daerah | 1. Minimnya kesempatan, dan Ketimpangan akses<br>2. Rendahnya kualitas layanan dasar<br>3. lemahnya pemberdayaan masyarakat | 1. Keterbatasan Lapangan Kerja yang Layak<br>2. Tingkat Pendidikan Rendah<br>3. Pengelolaan Sumber Daya yang Tidak Adil<br>4. Minimnya Akses terhadap Modal dan Kredit<br>5. Akses terhadap Layanan Dasar yang Buruk<br>6. Kurangnya Peran Pemerintah Daerah yang Efektif |
| 4. | Rendahnya akses atau mutu pendidikan | RPP: 1.1.2.1 | 15 | Kepala Daerah | 1. Kemiskinan dan Ketidakmampuan Ekonomi Keluarga<br>2. Akses terhadap Sekolah yang Terbatas<br>3. Kualitas Pendidikan yang Rendah<br>4. Budaya dan Nilai Sosial yang Tidak Mendukung Pendidikan | 1. Banyak anak terpaksa berhenti sekolah lebih awal untuk membantu orang tua bekerja<br>2. Kurangnya fasilitas pendidikan menyebabkan banyak anak hanya menyelesaikan pendidikan dasar<br>3. Guru kurang berkualitas atau jumlahnya tidak memadai<br>4. Fasilitas sekolah rusak, tidak lengkap, atau tidak nyaman<br>5. Proses belajar mengajar tidak menarik atau tidak relevan, sehingga anak kehilangan motivasi untuk melanjutkan sekolah<br>6. Kurangnya Kesadaran Orang Tua terhadap Pentingnya Pendidikan<br>7. Pernikahan dini dan tekanan sosial membuat anak-anak keluar dari sekolah lebih fokus pada kebutuhan jangka pendek seperti membantu ekonomi keluarga |

**Tabel L2.6** Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang ada dan masih Dibutuhkan pada Tujuan 1 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

| | | |
|---|---|---|
| Nama Pemda | : | Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat |
| Tahun Penilaian | : | Tahun 2025 - 2029 |

| NO. | RISIKO PRIORITAS | KODE RISIKO | URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA | CELAH PENGENDALIAN | RENCANA TINDAK PENGENDALIAN | PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB | TARGET WAKTU PENYELESAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Menurunnya Kualitas Sumber daya Manusia | RPP: 1.1.1.2 | 1. Pemberian Bantuan Tangki Septik Individu Berstandar Teknis Untuk Rumah Tangga MBR | Pelaksanaan bantuan kurang optimal | Peningkatan Kapasitas dan Integritas Pelaksana | Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | 2025-2027 |
| | | | 1. Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Stunting dan Beresiko Stunting yang belum Terlayani Air Minum Layak | Data yang tersedia belum akurat dan belum termutakhirkan | Pembentukan tim Kerja yang terstruktur | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2025-2029 |
| | | | 1. Memberikan Bantuan Pangan Kepada Keluarga Miskin Melalui Dana Insentif Fiskal<br>2. Edukasi Konsumsi Pangan Lokal, Bantuan Bahan dan Benih Tanaman<br>3. Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal dan Bantuan Alat Pengolahan Pangan Lokal<br>4. Melaksanakan Kegiatan Gelar Pangan Lokal Untuk Anak Sekolah | Pemberian Bantuan tidak tepat sasaran | Proses Verifikasi dan Validasi data dilakukan secara rutin dan berkala | Sekretaris Daerah | 2025-2026 |
| | | | 1. Pelatihan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Untuk Memenuhi Kebutuhan Gizi Keluarga Beresiko Stunting<br>2. Lomba Pangan Lokal Berbahan Ubi Dan Jagung | - | - | - | - |

| NO. | RISIKO PRIORITAS | KODE RISIKO | URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA | CELAH PENGENDALIAN | RENCANA TINDAK PENGENDALIAN | PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB | TARGET WAKTU PENYELESAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3. Melaksanakan Lomba Ketua Kelompok Dasa Wisma Berprestasi Tingkat Kota Payakumbuh | | | | |
| | | | 1. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PAUD)<br>2. Diklat Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Untuk Guru PAUD Kota Payakumbuh | Penganggaran berdasarkan Dana BOP masing-masing sekolah | Dilakukan Kombinasi Kebijakan antara MBG dan PMTAS | Sekretaris Daerah | 2025-2029 |
| | | | 1. Pemantauan Pertumbuhan dan Deteksi Penyimpangan Pertumbuhan Balita<br>2. Pembentukan Pos Gizi<br>3. Memberikan Edukasi Tentang Tentang Pola Asuh Di 171 Posyandu<br>4. Sosialisasi Pemanfaatan Buku KIA Bayi Kecil Bagi Tenaga Puskesmas Dengan Kategori BB Bayi Kurang Dari 2500 Rg, Panjang Bayi Kurang Dari 48 Cm, Masa Kehamilan Kurang Dari 37 Minggu<br>5. Melakukan Penerapan Integrasi Layanan Primer Di Posyandu<br>6. Sosialiasi Pelaksanaan Posyandu ILP Di Setiap Kecamatan<br>7. Sosialisasi Posyandu Dengan Konsep 6 SPM | Kurangnya koordinasi di wilayah kerja | 1. Penyusunan SOP pada setiap tahapan Pelaksanaan Program kerja<br>2. Evaluasi kinerja Pembina wilayah dilaksanakan secara rutin dan berkala. | Kepala Dinas Kesehatan | 2025-2026 |

| NO. | RISIKO PRIORITAS | KODE RISIKO | URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA | CELAH PENGENDALIAN | RENCANA TINDAK PENGENDALIAN | PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB | TARGET WAKTU PENYELESAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1. Memberikan Bantuan Bahan Makanan Bagi Keluarga Beresiko Stunting<br>2. Pemberian Bantuan Bapak Asuh Anak Stunting<br>3. Pendampingan Terhadap Keluarga Sasaran Melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK) Dari Data Elsimil Dan Disandingkan Dengan Data Rekap Manual<br>4. Pelaksanaan Kegiatan Lokakarya Mini Lapangan , Dengan Sasaran Mengawal Dan Mengevaluasi Pelaksanaan Pendampingan Keluarga Oleh TPK di 5 Kecamatan | Pelaksanaan program kerja kurang optimal | 1. Pemanfaatan segala jenis media promosi dan sosialisasi program kerja<br>2. Pembuatan SK Wali Kota untuk Bapak Asuh Anak Stunting | Sekretaris Daerah | 2025-2026 |
| | | | 1. Pemberian Bantuan Sarana Dan Prasarana Budi Daya Ikan dalam Ember untuk Keluarga Stunting<br>2. Sosialisasi Budi Daya Ikan dalam Ember Bagi Penerima Bantuan Budikdamber Untuk KK Stunting Di Tujuh Kelurahan<br>3. Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan | SDM pengelola kurang terampil | Melaksanakan Pelatihan dan Sosialisasi Budi Daya Ikan dalam Ember | Kepala Dinas Pertanian | 2025-2027 |
| | | | 1. Memberikan Edukasi Kepada Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) | Pemberian Bantuan tidak tepat sasaran | Penetapan dan Pemutakhiran SK Penerima Manfaat | Kepala Daerah | 2025-2026 |

| NO. | RISIKO PRIORITAS | KODE RISIKO | URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA | CELAH PENGENDALIAN | RENCANA TINDAK PENGENDALIAN | PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB | TARGET WAKTU PENYELESAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2. Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Beresiko Stunting<br>3. Pemberian Bantuan Sosial Bagi PUS (Penerima PKH)<br>4. Pemberian Bantuan Sosial Pengembangan Ekonomi Bagi Keluarga Miskin<br>5. Pengusulan Keluarga Stunting Dan Keluarga Beresiko Stunting Sebagai Penerima Manfaat Yang Belum Terdata Pada DTKS | | | | |
| 2. | Menurunnya derajat kesehatan masyarakat Kota Payakumbuh | RPP: 1.1.1.1 | 1. Transformasi Layanan Primer Dengan Melakukan Persiapan Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer Di Seluruh Puskesmas.<br>2. Tranformasi Layanan Rujukan dengan Penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS)<br>3. Pelaksanaan Intervensi Serentak Penanganan Stunting<br>4. Meningkatkan Pencapaian Kepesertaan JKN Dalam Rangka Mempertahankan Universal Helath Coverage (UHC)<br>5. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Pokjanal Posyandu Melalui Pelatihan | Pengelolaan kesehatan masyarakat belum optimal | 1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan<br>2. Peningkatan Status RSUD dari Tipe C ke Tipe B | Kepala Daerah | 2025-2028 |

| NO. | RISIKO PRIORITAS | KODE RISIKO | URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA | CELAH PENGENDALIAN | RENCANA TINDAK PENGENDALIAN | PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB | TARGET WAKTU PENYELESAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Integrasi Layana Primer Di Posyandu Bagi Tenaga Kesehatan.<br>6. Mengawal Pelaksanaan Gerakan PHBS (Pola Hidup Bersih Dan Sehat) Baik Di Sekolah-Sekolah Dan Rumah Tangga.<br>7. Melaksanakan Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Melalui Aktifitas Fisik, Budaya Makan Buah dan Sayur, Tidak Merokok,<br>8. Melaksanakan Pemeriksaan Rutin Kesehatan, dan Menjaga Kebersihan Lingkungan.<br>9. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Rujukan<br>10. Melaksanakan Tes Kebugaran dan Screening Penyakit tidak Menular Bagi ASN<br>11. Pemenuhan Kebutuhan Obat dan Sediaan Farmasi Bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | |
| | | | 1. Sosialisasi Dan Simulasi Mitigasi Bencana<br>2. Penanganan Bencana Banjir | Rendahnya kesadaran masyarakat | Penyusunan Perwako Penanggulangan bencana | Sekretaris Daerah | 2025-2026 |

| NO. | RISIKO PRIORITAS | KODE RISIKO | URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA | CELAH PENGENDALIAN | RENCANA TINDAK PENGENDALIAN | PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB | TARGET WAKTU PENYELESAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3. Siaga Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan<br>4. Aksi Pengelolaan Risiko Bencana Berupa Penebangan Pohon Yang Sudah Tua Dan Lapuk | terhadap Bencana | | | |
| 3. | Tidak tercapainya tujuan Pembangunan mensejahterakan masyarakat | RPP: 1.1.3.1 | 1. Telah Tersedianya SK Kepala DPMPTSP No. 540-14/KEP/DPMPTSP/2022 Tentang Standar Pelayaan Publik Dan SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada DPMPTSP Kota Payakumbuh<br>2. Telah Tersedianya SK Kepala DPMPTSP No. 540-14/KEP/DPMPTSP/2022 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan Secara OSS (Online Single Submissions) Dan Non-OSS Pada DPMPTSP Kota Payakumbuh<br>3. Telah Tersedianya SK Kepala Disdukcapil Kota Payakumbuh No: 400.12.4.2/037/DKPS/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh No 477/16/SK- | Pelaksanaan layanan masih manual dan semi digital | Penyusunan Perwako tentang Transisi Transformasi SPBE menuju Pemdi | Sekretaris Daerah | 2025-2026 |

| NO. | RISIKO PRIORITAS | KODE RISIKO | URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA | CELAH PENGENDALIAN | RENCANA TINDAK PENGENDALIAN | PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB | TARGET WAKTU PENYELESAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DKPS/2022 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh<br>4. Telah Tersedianya SK Kepala Dinas Sosial No. 460/17.1/DINSOS/PYK-2023 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Jenis Pelayanan Dinas Sosial Kota Payakumbuh<br>5. Telah Tersedianya SK Direktur RSUD Adnaan WD Payakumbuh No. 189/464/SK/RSUD/2022 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Rumah Sakit RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh<br>6. Telah Tersedianya Sesuai Keputusan Kepala Puskesmas Masing-Masing<br>7. Digitalisasi Layanan Di MPP<br>8. Digitalisasi Layanan Kesehatan, dengan Aplikasi Silakeh Smart Dan Sipaduko<br>9. Digitalisasi Layanan Data Kependudukan (SIAK Terpusat, Lawan Pandemik)<br>10. Melaksanakan Sosialisasi Terhadap Standar Pelayanan Dan Meningkatkan Penanganan Pengelolaan | | | | |

| NO. | RISIKO PRIORITAS | KODE RISIKO | URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA | CELAH PENGENDALIAN | RENCANA TINDAK PENGENDALIAN | PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB | TARGET WAKTU PENYELESAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengaduan Masyarakat Melalui SP4N Lapor! dan Kanal Digital Lainnya<br>11. Melakukan Sosialisasi Terkait Pelayanan (Via TV, Radio, Sosial Media Dsb) | | | | |
| | | | 1. Meningkatkan Pendidikan Dan Pelatihan Angkatan Kerja : Melaksanakan Pelatihan Bengkel, Melakukan Pelatihan Kerajinan Tangan Untuk KK Miskin, Melakukan Pelatihan Keterampilan Teknis Olahan Makanan Untuk KK Miskin, Melakukan Pelatihan Keterampilan Teknis Pertanian Untuk KK Miskin, Diklat Pembuatan Hiasan Busana Dengan Alat Jahit Tangan, Pelatihan Menjahit Bad Cover, Pelatihan Barbershop, Pelatihan Rajut Dan Pelatihan Diversifikasi Produk Sulam/Bordir<br>2. Fasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif Sektor Fashion Pada Event Skala Nasional<br>3. Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri | Jenis Pelatihan belum sesuai Kebutuhan dan tuntutan Kekinian | Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Angkatan Kerja | Kepala Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian | 2025-2029 |
| 4. | Rendahnya akses atau mutu pendidikan | RPP: 1.1.2.1 | 1. Penyerahan Beasiswa Kepada Siswa SD,SMP Dan Kesetaraan | Kurang tergalinya potensi Pendidikan di | Menetapkan Branding Kota Payakumbuh sebagai Kota | Kepala Daerah | 2025-2026 |

| NO. | RISIKO PRIORITAS | KODE RISIKO | URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA | CELAH PENGENDALIAN | RENCANA TINDAK PENGENDALIAN | PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB | TARGET WAKTU PENYELESAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2. Pameran Digital Peserta Didik SD Dan SMP (Panen Kaya Siswa 1.022 Peserta Program Coding)<br>3. Pelaksanaan Asesment Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Jenjang SD, SMP Dan Kesetaraan<br>4. Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Jenjang PAUD, SD Dan SMP<br>5. Lokakarya Pendampingan Penguatan Komunitas Belajar<br>6. Pengukuhan Guru Penggerak | Kota Payakumbuh | Tujuan Pendidikan | | |

**Tabel L2.7** Rencana Pengkomunikasian atas Kegiatan Pengendalian Prioritas yang Dibangun pada Tujuan 1 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

| | | |
|---|---|---|
| Nama Pemda | : | Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat |
| Tahun Penilaian | : | Tahun 2025 - 2029 |

| NO. | KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN | MEDIA/ BENTUK SARANA PENGKOMUNIKASIAN | PENYEDIA INFORMASI | PENERIMA INFORMASI | RENCANA WAKTU PELAKSANAAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peningkatan Kapasitas dan Integritas Pelaksana | Surat Permintaan/ Nota Dinas Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa | Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | BKPSDM | Triwulan I – Tahun 2026 | |
| 2. | Pembentukan tim Kerja Stunting yang terstruktur | Pembentukan Surat Keputusan (SK) Sekretaris Daerah tentang Tim Kerja Pendataan oleh | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait | Triwulan I – Tahun 2026 | Pemutakhiran dilanjutkan sampai 2029 |
| 3. | Proses Verifikasi dan Validasi data dilakukan secara rutin dan berkala | Pembentukan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Payakumbuh tentang Tim Kerja Lintas Sektoral Verifikasi dan Validasi Data | Sekretaris Daerah | Kepala Dinas Sosial | Triwulan I – Tahun 2026 | |
| 4. | Dilakukan Kombinasi Kebijakan antara MBG dan PMTAS | Rapat Koordinasi | Sekretaris Daerah | Kepala Dinas Pendidikan | Triwulan I – Tahun 2026 | Pemutakhiran dilanjutkan sampai 2029 |
| 5. | Penyusunan SOP pada setiap tahapan Pelaksanaan Program kerja Stunting | Dokumen SOP | Kepala Dinas Kesehatan | Staf Dinas Kesehatan terkait | Triwulan I – Tahun 2026 | |
| 6. | Evaluasi kinerja Pembina wilayah dilaksanakan secara rutin dan berkala. | Rapat Koordinasi | Kepala Dinas Kesehatan | Staf Dinas Kesehatan terkait | Triwulan I – IV Tahun 2026 | Pemutakhiran dilanjutkan sampai 2029 |

| NO. | KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN | MEDIA/ BENTUK SARANA PENGKOMUNIKASIAN | PENYEDIA INFORMASI | PENERIMA INFORMASI | RENCANA WAKTU PELAKSANAAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Pemanfaatan segala jenis media promosi dan sosialisasi program kerja Stunting | Infografis / Poster | Sekretaris Daerah | Kepala Dinas Kesehatan | Triwulan I – Tahun 2026 | |
| 8. | Pembuatan SK Kepala Dinas P3AP2KB untuk Bapak Asuh Anak Stunting | Pembentukan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas P3AP2KB untuk Bapak Asuh Anak Stunting | Kepala Dinas P3AP2KB | Staf Dinas P3AP2KB terkait | Triwulan I – Tahun 2026 | Pemutakhiran dilanjutkan sampai 2029 |
| 9. | Melaksanakan Pelatihan dan Sosialisasi Budi Daya Ikan dalam Ember | Surat Pelatihan Budi Daya Ikan dalam Ember | Kepala Dinas Pertanian | Staf Dinas Pertanian terkait | Triwulan I – Tahun 2026 | Pemutakhiran dilanjutkan sampai 2027 |
| 10. | Penetapan dan Pemutakhiran SK Penerima Manfaat | Pembentukan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Payakumbuh tentang Penerima Manfaat | Kepala Daerah | Kepala Dinas Sosial | Triwulan I – Tahun 2026 | Pemutakhiran dilanjutkan sampai 2029 |
| 11. | Meningkatkan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan | Dokumen Kajian | Kepala Dinas Kesehatan | Kepala RSUD | Triwulan I – Tahun 2026 | Pemutakhiran dilanjutkan sampai 2028 |
| 12. | Peningkatan Status RSUD dari Tipe C ke Tipe B | Dokumen Kajian | Kepala Daerah | Kepala Dinas Kesehatan | Triwulan I – Tahun 2026 | Pemutakhiran dilanjutkan sampai 2028 |
| 13. | Penyusunan Perwako tentang Transisi Transformasi SPBE menuju Pemdi | Peraturan Walikota tentang Transisi Transformasi SPBE menuju Pemdi | Sekretaris Daerah | Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi | Triwulan I – Tahun 2026 | |
| 14. | Menetapkan Branding Kota Payakumbuh sebagai Kota Tujuan Pendidikan | Dokumen Kajian | Kepala Daerah | Kepala Bappeda Kepala Dinas Pendidikan | Triwulan I – Tahun 2026 | |

**Tabel L2.8** Rencana Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Prioritas yang Dibangun pada Tujuan 1 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

| | | |
|---|---|---|
| Nama Pemda | : | Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat |
| Tahun Penilaian | : | Tahun 2025 - 2029 |

| NO. | KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN | BENTUK/ METODE PEMANTAUAN YANG DIPERLUKAN | PENANGGUNG JAWAB PEMANTAUAN | RENCANA WAKTU PEMANTAUAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peningkatan Kapasitas dan Integritas Pelaksana | Risk Control Self-Assessment (RCSA) | Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Triwulan II – Tahun 2026 | Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan |
| 2. | Pembentukan tim Kerja Stunting yang terstruktur | Risk Control Self-Assessment (RCSA) | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Triwulan II – Tahun 2026 | Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan |
| 3. | Proses Verifikasi dan Validasi data dilakukan secara rutin dan berkala | Risk Control Self-Assessment (RCSA) | Sekretaris Daerah | Triwulan II – Tahun 2026 | Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan |
| 4. | Dilakukan Kombinasi Kebijakan antara MBG dan PMTAS | Evaluasi Berkala | Sekretaris Daerah | Triwulan II – Tahun 2026 | Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan |
| 5. | Penyusunan SOP pada setiap tahapan Pelaksanaan Program kerja Stunting | Evaluasi Berkala | Kepala Dinas Kesehatan | Triwulan II – Tahun 2026 | Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan |
| 6. | Evaluasi kinerja Pembina wilayah dilaksanakan secara rutin dan berkala. | Evaluasi Berkala | Kepala Dinas Kesehatan | Triwulan II – IV Tahun 2026 | Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan |
| 7. | Pemanfaatan segala jenis media promosi dan sosialisasi program kerja Stunting | Risk Control Self-Assessment (RCSA) | Sekretaris Daerah | Triwulan II – Tahun 2026 | Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan |
| 8. | Pembuatan SK Kepala Dinas P3AP2KB untuk Bapak Asuh Anak Stunting | Risk Control Self-Assessment (RCSA) | Kepala Dinas P3AP2KB | Triwulan II – Tahun 2026 | Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan |
| 9. | Melaksanakan Pelatihan dan Sosialisasi Budi Daya Ikan dalam Ember | Risk Control Self-Assessment (RCSA) | Kepala Dinas Pertanian | Triwulan II – Tahun 2026 | Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan |
| 10. | Penetapan dan Pemutakhiran SK Penerima Manfaat | Risk Control Self-Assessment (RCSA) | Sekretaris Daerah | Triwulan II – Tahun 2026 | Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan |
| 11. | Meningkatkan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan | Evaluasi Berkala | Kepala Dinas Kesehatan | Triwulan II – Tahun 2026 | Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan |

| NO. | KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN | BENTUK/ METODE PEMANTAUAN YANG DIPERLUKAN | PENANGGUNG JAWAB PEMANTAUAN | RENCANA WAKTU PEMANTAUAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Peningkatan Status RSUD dari Tipe C ke Tipe B | Evaluasi Berkala | Sekretaris Daerah | Triwulan II – Tahun 2026 | Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan |
| 13. | Penyusunan Perwako tentang Transisi Transformasi SPBE menuju Pemdi | Risk Control Self-Assessment (RCSA) | Sekretaris Daerah | Triwulan II – Tahun 2026 | Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan |
| 14. | Menetapkan Branding Kota Payakumbuh sebagai Kota Tujuan Pendidikan | Evaluasi Berkala | Sekretaris Daerah | Triwulan II – Tahun 2026 | Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan |

## 2. MANAJEMEN RISIKO TUJUAN DAN SASARAN MISI 2

**Tabel L2.9** Penetapan Konteks Risiko Strategis Misi 2 Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

| PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS | | | |
|---|---|---|---|
| **MISI 2** MEWUJUDKAN IKLIM EKONOMI YANG KOMPETITIF | | | |
| Nama Pemda | : | Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat | |
| Periode yang dinilai | : | Tahun 2025 - 2029 | |
| Visi | : | Payakumbuh Maju Bermartabat Melalui Pemberdayaan, Pengembangan Kualitas Pendidikan, Dan Sentra Umkm Yang Kompetitif | |
| Tujuan Strategis RPJMD | : | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas | |
| Indikator Kinerja Tujuan RPJMD | : | 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi<br>2. Indek Daya Saing Daerah (IDSD)<br>3. Proporsi kontribusi PDRB Kota Payakumbuh<br>4. PDRB Per-kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp Juta) | |
| Sasaran Strategis RPJMD | : | 2.1.1 | Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat |
| | | 2.1.2 | Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal |
| | | 2.1.3 | Meningkatnya Iklim Investasi Daerah |
| Indikator Kinerja Sasaran RPJMD | : | 2.1.1.a | Tingkat Pengangguran Terbuka |
| | | 2.1.1.b | Indeks Gini |
| | | 2.1.2.a | Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%) |
| | | 2.1.3.a | Nilai Realisasi Investasi (Rp) |
| Urusan Pemerintah Daerah | : | 1. Urusan Pemerintah Wajib Non-Pelayanan Dasar: Tenaga Kerja<br>2. Urusan Pemerintah Wajib Non-Pelayanan Dasar: Pangan<br>3. Urusan Pemerintah Wajib Non-Pelayanan Dasar: Koperasi dan UKM<br>4. Urusan Pemerintah Wajib Non-Pelayanan Dasar: Penanaman Modal<br>5. Urusan Pemerintah Pilihan: Kelautan dan Perikanan<br>6. Urusan Pemerintah Pilihan: Pariwisata<br>7. Urusan Pemerintah Pilihan: Pertanian<br>8. Urusan Pemerintah Pilihan: Perdagangan | |

| | | |
|---|---|---|
| | | 9. Urusan Pemerintah Pilihan: Perindustrian<br>10. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan: Keuangan |
| Program Pembangunan | : | 1.1 Program Perencanaan Tenaga Kerja<br>1.2 Program Pelatihan Keja Dan Produktivitas Tenaga Kerja<br>1.3 Program Penempatan Tenaga Kerja<br>1.4 Program Hubungan Industrial<br>2.1 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan<br>2.2 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat<br>2.3 Program Penanganan Kerawanan Pangan<br>2.4 Program Pengawasan Keamanan Pangan<br>3.1 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam<br>3.2 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi<br>3.3 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi<br>3.4 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian<br>3.5 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi<br>3.6 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)<br>3.7 Program Pengembangan UMKM<br>4.1 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal<br>4.2 Program Promosi Penanaman Modal<br>4.3 Program Pelayanan Penanaman Modal<br>4.4 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal<br>4.5 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal<br>5.1 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya<br>5.2 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan<br>6.1 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata<br>6.2 Program Pemasaran Pariwisata<br>6.3 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual<br>6.4 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif<br>7.1 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian<br>7.2 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian<br>7.3 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner<br>7.4 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian<br>7.5 Program Perizinan Usaha Pertanian<br>7.6 Program Penyuluhan Pertanian |

| PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS | | |
|---|---|---|
| | | 8.1 Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan<br>8.2 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan<br>8.3 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting<br>8.4 Program Pengembangan Ekspor<br>8.5 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen<br>8.6 Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri<br>9.1 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri<br>9.2 Program Pengendalian Izin Usaha Industri<br>9.3 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional<br>10.1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah<br>10.2 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah<br>10.3 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| Perangkat Daerah Terkait | : | 1. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian<br>2. Dinas Ketahanan Pangan<br>3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah<br>4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu<br>5. Dinas Pertanian<br>6. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga<br>7. Badan Keuangan Daerah |

**Tabel L2.10** Identifikasi Risiko Strategis Misi 2 Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/UC | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| **Tujuan 2.1** Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas | 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi<br>2. Indek Daya Saing Daerah (IDSD)<br>3. Proporsi kontribusi PDRB Kota Payakumbuh | | | | | | | | |
| **Sasaran 2.1.1** Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat | 1. PDRB Per-kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp Juta)<br>2. Tingkat Penganggu ran Terbuka<br>3. Indeks Gini | Terjadinya ketimpangan kesejahteraan ekonomi masyarakat | RPP: 2.1.1.1 | Kepala Daerah | Ketergantungan pada Sektor Ekonomi Tertentu | Internal | UC | Suatu wilayah terlalu bergantung pada satu sektor | Kota Payakumbuh |
| | | | | | Kurangnya Inovasi dan Daya Saing | Internal | C | Ekonomi yang tidak bertransformasi (dari primer ke sekunder/tersier) cenderung stagnan karena tidak bisa mengikuti dinamika global. | Kota Payakumbuh |
| | | | | | Infrastruktur yang Buruk | Internal | C | Wilayah yang terisolasi sulit berkembang karena akses ke pasar, | Kota Payakumbuh |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | | | | bahan baku, dan tenaga kerja terbatas | |
| | | | | | | | | Biaya logistik tinggi, investor bisa menghambat aktivitas ekonomi dan enggan masuk, produktivitas rendah | Kota Payakumbuh |
| | | | | | Kualitas SDM yang Rendah | Internal | C | Sektor formal sulit berkembang, dominasi sektor informal | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | produktivitas rendah dan sulit bersaing | Kota Payakumbuh |
| | | | | | Kebijakan Pemerintah yang Tidak Efektif | Internal | C | Pertumbuhan kota yang tidak direncanakan menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan lapangan kerja | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Regulasi yang rumit, birokrasi lamban, dan korupsi dapat menghambat investasi dan pertumbuhan | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Pengangguran meningkat | Masyarakat |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/UC | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | | | | konsumsi tidak seimbang dengan produksi | Kota Payakumbuh |
| | | | | | Minimnya Investasi | Eksternal | C | Kurangnya proyek baru, lapangan kerja terbatas | Masyarakat |
| | | | | | | | | Rendahnya kepercayaan investor terhadap keamanan, stabilitas politik, atau prospek ekonomi daerah | Kota Payakumbuh |
| | | | | | Krisis Eksternal | Eksternal | UC | Faktor global seperti krisis ekonomi dunia, pandemi, atau perang dapat berdampak langsung pada ekonomi lokal | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Permintaan ekspor turun, harga komoditas anjlok | Kota Payakumbuh |
| **Sasaran 2.1.2** Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal | Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%) | Potensi Daerah Tidak Termanfaatkan Secara Optimal, dan kemandirian | RPP: 2.1.2.1 | Kepala Daerah | Kurangnya data dan pemetaan potensi daerah | Internal | C | Pertumbuhan ekonomi daerah lambat, karena Pemerintah daerah tidak memiliki data akurat tentang potensi alam, budaya, atau ekonomi lokal | PD |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | daerah gagal terbangun | | | | | | Krisis identitas daerah, Ketiadaan produk unggulan atau ciri khas menyebabkan daerah tidak dikenal dan tidak kompetitif | Kota Payakumbuh |
| | | | | | Sumber daya manusia (SDM) yang terbatas | Internal | C | Lapangan kerja terbatas | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | SDA dikelola investor besar, masyarakat lokal tidak terlibat | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Masyarakat hanya jadi objek pembangunan, bukan subjek yang berperan aktif. | Kota Payakumbuh |
| | | | | | Infrastruktur tidak memadai | Internal | C | Daerah yang gagal mandiri tertinggal dari daerah lain yang sukses mengelola potensi. | Kota Payakumbuh |
| | | | | | Minimnya inovasi dan teknologi | Internal | C | Potensi alam atau budaya tidak dikembangkan secara modern atau kreatif. | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Potensi lokal diambil alih pihak luar (eksternal) | Kota Payakumbuh |
| | | | | | Investasi terbatas | Internal | C | Komoditas lokal tidak bernilai tambah | PD |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | Keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Internal | C | Daerah tidak bisa menghasilkan pendapatan cukup dari potensi ekonominya sendiri | PD |
| | | | | | Kebijakan tidak berpihak pada potensi lokal | Internal | C | Pembangunan tidak berkelanjutan, Program-program hanya sesaat, tidak berdampak jangka panjang | Masyarakat |
| | | | | | | | | Pembangunan lebih berorientasi pada program pusat daripada menggali potensi daerah | Kota Payakumbuh |
| **Sasaran 2.1.3** Meningkatnya Iklim Investasi Daerah | Nilai Realisasi Investasi (Rp) | Pertumbuhan ekonomi daerah cenderung stagnan atau terjadi penurunan | RPP: 2.1.3.1 | Kepala Daerah | Iklim Usaha Tidak Kondusif | Internal | C | Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rendah | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Karena anggaran terbatas, pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi memburuk | Masyarakat |
| | | | | | | | | Kurangnya sektor produktif menyebabkan minimnya lapangan kerja formal | Kota Payakumbuh |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | | | | Ekonomi tidak berkembang, masyarakat tetap bergantung pada sektor informal atau bantuan pemerintah | Kota Payakumbuh |
| | | | | | Kurangnya Kepastian Hukum | Internal | C | prosedur yang tidak efisien membuat investor enggan masuk | Sektor Swasta |
| | | | | | Kualitas Infrastruktur Rendah | Internal | C | Jalan, listrik, air, pelabuhan, dan jaringan internet yang buruk menghambat kegiatan bisnis. | |
| | | | | | Promosi Daerah yang Lemah | Internal | C | Potensi dan keunggulan daerah tidak diketahui publik atau investor luar | |

**Tabel L2.11** Analisis Risiko Strategis Tujuan 2 Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

| | | |
|---|---|---|
| Nama Pemda | : | Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat |
| Tahun Penilaian | : | Tahun 2025 - 2029 |
| Tujuan Strategis RPJMD | : | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas |

| NO. | RISIKO TERIDENTIFIKASI | KODE RISIKO | ANALISIS RISIKO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SKALA DAMPAK | SKALA KEMUNGKINAN | SKALA RISIKO |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(4)x(5) |
| 1. | Terjadinya ketimpangan kesejahteraan ekonomi masyarakat | RPP: 2.1.1.1 | 4 | 4 | 20 |
| 2. | Potensi Daerah Tidak Termanfaatkan Secara Optimal, dan kemandirian daerah gagal terbangun | RPP: 2.1.2.1 | 5 | 5 | 25 |
| 3. | Pertumbuhan ekonomi daerah cenderung stagnan atau terjadi penurunan | RPP: 2.1.3.1 | 4 | 4 | 16 |

**Tabel L2.12** Matriks Hasil Analisis Risiko pada Tujuan 2 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

| MATRIKS ANALISIS RISIKO | | | DAMPAK/KONSEKUENSI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TIDAK SIGNIFIKAN | KECIL | SEDANG | BESAR | SIGNIFIKAN |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO | HAMPIR PASTI | 5 | | | | | RPP: 2.1.2.1 |
| | KEMUNGKINAN BESAR | 4 | | | | RPP: 2.1.1.1<br>RPP: 2.1.2.1 | |
| | MUNGKIN | 3 | | | | | |
| | KEMUNGKINAN KECIL | 2 | | | | | |
| | SANGAT JARANG | 1 | | | | | |
| KETERANGAN | | | SANGAT RENDAH | RENDAH | SEDANG/ MEDIUM | TINGGI | SANGAT TINGGI |

**Tabel L2.13** Daftar Risiko Prioritas pada Tujuan 2 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

| | | |
|---|---|---|
| Nama Pemda | : | Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat |
| Tahun Penilaian | : | Tahun 2025 - 2029 |

| NO. | RISIKO PRIORITAS | KODE RISIKO | SKALA RISIKO | PEMILIK RESIKO | PENYEBAB | DAMPAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Potensi Daerah Tidak Termanfaatkan Secara Optimal, dan kemandirian daerah gagal terbangun | RPP: 2.1.2.1 | 25 | Kepala Daerah | 1. Kurangnya data dan pemetaan potensi daerah<br>2. Sumber daya manusia (SDM) yang terbatas<br>3. Infrastruktur tidak memadai<br>4. Minimnya inovasi dan teknologi<br>5. Investasi terbatas<br>6. Keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD)<br>7. Kebijakan tidak berpihak pada potensi lokal | 1. Pertumbuhan ekonomi daerah lambat, karena Pemerintah daerah tidak memiliki data akurat tentang potensi alam, budaya, atau ekonomi lokal<br>2. Krisis identitas daerah, Ketiadaan produk unggulan atau ciri khas menyebabkan daerah tidak dikenal dan tidak kompetitif<br>3. Lapangan kerja terbatas<br>4. SDA dikelola investor besar, masyarakat lokal tidak terlibat<br>5. Masyarakat hanya jadi objek pembangunan, bukan subjek yang berperan aktif.<br>6. Daerah yang gagal mandiri tertinggal dari daerah lain yang sukses mengelola potensi.<br>7. Potensi alam atau budaya tidak dikembangkan secara modern atau kreatif.<br>8. Potensi lokal diambil alih pihak luar (eksternal)<br>9. Komoditas lokal tidak bernilai tambah<br>10. Daerah tidak bisa menghasilkan pendapatan cukup dari potensi ekonominya sendiri<br>11. Pembangunan tidak berkelanjutan, Program-program hanya sesaat, tidak berdampak jangka panjang<br>12. Pembangunan lebih berorientasi pada program pusat daripada menggali potensi daerah |
| 2. | Terjadinya ketimpangan kesejahteraan ekonomi masyarakat | RPP: 2.1.1.1 | 16 | Kepala Daerah | 1. Ketergantungan pada Sektor Ekonomi Tertentu<br>2. Kurangnya Inovasi dan Daya Saing<br>3. Infrastruktur yang Buruk | 1. Suatu wilayah terlalu bergantung pada satu sektor<br>2. Ekonomi yang tidak bertransformasi (dari primer ke sekunder/tersier) cenderung stagnan karena tidak bisa mengikuti dinamika global.<br>3. Wilayah yang terisolasi sulit berkembang karena akses ke pasar, bahan baku, dan tenaga kerja terbatas |

| NO. | RISIKO PRIORITAS | KODE RISIKO | SKALA RISIKO | PEMILIK RESIKO | PENYEBAB | DAMPAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 4. Kualitas SDM yang Rendah<br>5. Kebijakan Pemerintah yang Tidak Efektif<br>6. Minimnya Investasi<br>7. Krisis Eksternal | 4. Biaya logistik tinggi, investor bisa menghambat aktivitas ekonomi dan enggan masuk, produktivitas rendah<br>5. Sektor formal sulit berkembang, dominasi sektor informal<br>6. produktivitas rendah dan sulit bersaing<br>7. Pertumbuhan kota yang tidak direncanakan menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan lapangan kerja<br>8. Regulasi yang rumit, birokrasi lamban, dan korupsi dapat menghambat investasi dan pertumbuhan<br>9. Pengangguran meningkat<br>10. konsumsi tidak seimbang dengan produksi<br>11. Kurangnya proyek baru, lapangan kerja terbatas<br>12. Rendahnya kepercayaan investor terhadap keamanan, stabilitas politik, atau prospek ekonomi daerah<br>13. Faktor global seperti krisis ekonomi dunia, pandemi, atau perang dapat berdampak langsung pada ekonomi lokal<br>14. Permintaan ekspor turun, harga komoditas anjlok |
| 3. | Pertumbuhan ekonomi daerah cenderung stagnan atau terjadi penurunan | RPP: 2.1.3.1 | 16 | Kepala Daerah | 1. Iklim Usaha Tidak Kondusif<br>2. Kurangnya Kepastian Hukum<br>3. Kualitas Infrastruktur Rendah<br>4. Promosi Daerah yang Lemah | 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rendah<br>2. Karena anggaran terbatas, pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi memburuk<br>3. Kurangnya sektor produktif menyebabkan minimnya lapangan kerja formal<br>4. Ekonomi tidak berkembang, masyarakat tetap bergantung pada sektor informal atau bantuan pemerintah<br>5. prosedur yang tidak efisien membuat investor enggan masuk<br>6. Jalan, listrik, air, pelabuhan, dan jaringan internet yang buruk menghambat kegiatan bisnis.<br>7. Potensi dan keunggulan daerah tidak diketahui publik atau investor luar |

**Tabel L2.14** Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang ada dan masih Dibutuhkan pada Tujuan 2 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

| | | |
|---|---|---|
| Nama Pemda | : | Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat |
| Tahun Penilaian | : | Tahun 2025 - 2029 |

| NO. | RISIKO PRIORITAS | KODE RISIKO | URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA | CELAH PENGENDALIAN | RENCANA TINDAK PENGENDALIAN | PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB | TARGET WAKTU PENYELESAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Potensi Daerah Tidak Termanfaatkan Secara Optimal, dan kemandirian daerah gagal terbangun | RPP: 2.1.2.1 | 1. Melakukan Pengawasan/ Monitoring Stok Dan HET Pupuk Bersubsidi | Penyaluran/ Distribusi Pupuk tidak Tepat Sasaran | 1. Peningkatan Pengawasan<br>2. Penyusunan SOP pada setiap tahapan Pelaksanaan Program kerja | Kepala Daerah | 2025-2029 |
| | | | 1. Pemberian Bantuan Alsintan<br>2. Gerakan Percepatan Tanam Dan Tanam Serentak Padi<br>3. Pelaksanaan Sekolah Lapangan Komoditas Jagung, Tiram, Padi Dan Bawang Merah | Konflik dalam Pengadaan dan Pendistribusian | Penyusunan SOP pada setiap tahapan Pelaksanaan Program kerja, dari Pengadaan sampai dengan Pendistribusian | Kepala Dinas Pertanian | 2025-2026 |
| | | | 1. Pemberian Bantuan Sedian Tambahan Cabe dan Padi<br>2. Bantuan Bibit Cabe, Bamer, Pupuk, Polybag Serta Pelatihan Peningkatan Ketahanan Pangan | - | - | - | - |
| 2. | Terjadinya ketimpangan kesejahteraan ekonomi masyarakat | RPP: 2.1.1.1 | 1. Penyaluran Bantuan Permakanan Tahap III Bantuan Permakanan Diberikan Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta | Pemberian Bantuan tidak tepat sasaran | Proses Verifikasi dan Validasi data dilakukan secara rutin dan berkala | Sekretaris Daerah | 2025-2026 |

| NO. | RISIKO PRIORITAS | KODE RISIKO | URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA | CELAH PENGENDALIAN | RENCANA TINDAK PENGENDALIAN | PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB | TARGET WAKTU PENYELESAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Payakumbuh<br>2. Penyaluran Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas<br>3. Menyalurkan Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana, Seperti Bencana Angin Putting Beliung, Banjir Dan Bencana Kebakaran<br>4. Kegiatan Penyuluhan Sosial Keliling Bagi Warga Kota Payakumbuh<br>5. Memberikan Bantuan Pangan Kepada Keluarga Miskin Melalui Dana Insentif Fiskal<br>6. Penyaluran Bantuan Pangan Dari Bapanas Tahap III | | | | |
| | | | 1. Meningkatkan Pendidikan Dan Pelatihan Angkatan Kerja : Melaksanakan Pelatihan Bengkel, Melakukan Pelatihan Kerajinan Tangan Untuk KK Miskin, Melakukan Pelatihan Keterampilan Teknis Olahan Makanan Untuk KK Miskin, Melakukan Pelatihan Keterampilan Teknis Pertanian Untuk KK Miskin, Diklat Pembuatan Hiasan Busana Dengan Alat Jahit Tangan, Pelatihan Menjahit Bad Cover, Pelatihan Barbershop, Pelatihan Rajut Dan Pelatihan | Jenis Pelatihan belum sesuai Kebutuhan dan tuntutan Kekinian | Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Angkatan Kerja | Kepala Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian | 2025-2029 |

| NO. | RISIKO PRIORITAS | KODE RISIKO | URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA | CELAH PENGENDALIAN | RENCANA TINDAK PENGENDALIAN | PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB | TARGET WAKTU PENYELESAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diversifikasi Produk Sulam/Bordir<br>2. Fasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif Sektor Fashion Pada Event Skala Nasional<br>3. Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri | | | | |
| 3. | Pertumbuhan ekonomi daerah cenderung stagnan atau terjadi penurunan | RPP: 2.1.3.1 | 1. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan KKPR Berbasis Online (E-KKPR) Dalam Rangka 4 5 Aplikasi Sitarang Pemberian Kemudahan Pelayanan Non Berusaha<br>2. RDTR Dijadikan Dasar Penerbitan KKPR (RDTR Terintegrasi OSS RBA) | - | - | - | - |
| | | | 1. Perda Tentang Penanaman Modal Tahun 2024<br>2. Perwako Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan | Pelaksanaan program kerja kurang optimal (Nilai Investasi tidak meningkat) | Penyusunan Perwako tentang Belum ada insentif dan disinsentif bagi investor | Kepala Daerah | 2025-2026 |
| | | | 1. Melakukan Pemantauan Pasokan Dan Stok Pangan Strategis Dan Informasi Harga Terupdate | Pelaksanaan program kerja kurang optimal | Pemanfaatan media publik untuk publikasi harga pangan | Kepala Dinas Ketahanan Pangan | 2025-2026 |
| | | | 1. Mengawasi Distribusi Barang Kebutuhan Pokok Ditingkat Distributor | Pelaksanaan distribusi dan monitoring kurang optimal | Meningkatkan Pengawasan harga | Kepala Dinas Koperasi, UKM | 2025-2029 |

| NO. | RISIKO PRIORITAS | KODE RISIKO | URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA | CELAH PENGENDALIAN | RENCANA TINDAK PENGENDALIAN | PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB | TARGET WAKTU PENYELESAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2. Monitoring Harian Terhadap Harga Bahan Pokok (Bapok) Di Pusat Pasar Tradisional Payakumbuh<br>3. Pasar Murah | | | | |

**Tabel L2.15** Rencana Pengkomunikasian atas Kegiatan Pengendalian Prioritas yang Dibangun pada Tujuan 2 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

| | | |
|---|---|---|
| Nama Pemda | : | Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat |
| Tahun Penilaian | : | Tahun 2025 - 2029 |

| NO. | KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN | MEDIA/ BENTUK SARANA PENGKOMUNIKASIAN | PENYEDIA INFORMASI | PENERIMA INFORMASI | RENCANA WAKTU PELAKSANAAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peningkatan Pengawasan | Laporan Pengawasan | Kepala Daerah | Kepala Dinas Pertanian | Triwulan I – Tahun 2026 | Pemutakhiran dilanjutkan sampai 2029 |
| 2. | Penyusunan SOP pada setiap tahapan Pelaksanaan Program kerja | Dokumen SOP | Kepala Dinas Pertanian | Staf Dinas Pertanian terkait | Triwulan I – Tahun 2026 | Pemutakhiran dilanjutkan sampai 2029 |
| 3. | Penyusunan SOP pada setiap tahapan Pelaksanaan Program kerja, dari Pengadaan sampai dengan Pendistribusian | Dokumen SOP | Kepala Dinas Pertanian | Staf Dinas Pertanian terkait | Triwulan I – Tahun 2026 | |
| 4. | Proses Verifikasi dan Validasi data dilakukan secara rutin dan berkala | Pembentukan Surat Keputusan (SK) Sekretaris Daerah tentang Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Payakumbuh | Sekretaris Daerah | Kepala Dinas Sosial | Triwulan I – Tahun 2026 | Pemutakhiran dilanjutkan sampai 2029 |
| 5. | Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Angkatan Kerja | Surat Usulan Pelatihan | Kepala Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian | Staf Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian terkait | Triwulan I – Tahun 2026 | |
| 6. | Penyusunan Perwako tentang Belum ada insentif dan disinsentif bagi investor | Peraturan Walikota tentang insentif dan | Kepala Daerah | Sekretaris Daerah | Triwulan I – Tahun 2026 | Pemutakhiran dilanjutkan sampai 2029 |

| NO. | KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN | MEDIA/ BENTUK SARANA PENGKOMUNIKASIAN | PENYEDIA INFORMASI | PENERIMA INFORMASI | RENCANA WAKTU PELAKSANAAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | disinsentif bagi investor | | | | |
| 7. | Pemanfaatan media publik untuk publikasi harga pangan | Infografis/ Poster | Kepala Dinas Ketahanan Pangan | Staf Dinas Ketahanan Pangan terkait | Triwulan I – Tahun 2026 | |
| 8. | Meningkatkan Pengawasan harga | Laporan Pengawasan | Kepala Dinas Koperasi, UKM | Staf Kepala Dinas Koperasi, UKM terkait | Triwulan I – Tahun 2026 | Pemutakhiran dilanjutkan sampai 2029 |

**Tabel L2.16** Rencana Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Prioritas yang Dibangun pada Tujuan 2 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

| | | |
|---|---|---|
| Nama Pemda | : | Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat |
| Tahun Penilaian | : | Tahun 2025 - 2029 |

| NO. | KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN | BENTUK/ METODE PEMANTAUAN YANG DIPERLUKAN | PENANGGUNG JAWAB PEMANTAUAN | RENCANA WAKTU PEMANTAUAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peningkatan Pengawasan | Risk Control Self-Assessment (RCSA) | Sekretaris Daerah | Triwulan II – Tahun 2026 | Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan |
| 2. | Penyusunan SOP pada setiap tahapan Pelaksanaan Program kerja | Risk Control Self-Assessment (RCSA) | Kepala Dinas Pertanian | Triwulan II – Tahun 2026 | Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan |
| 3. | Penyusunan SOP pada setiap tahapan Pelaksanaan Program kerja, dari Pengadaan sampai dengan Pendistribusian | Risk Control Self-Assessment (RCSA) | Kepala Dinas Pertanian | Triwulan II – Tahun 2026 | Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan |
| 4. | Proses Verifikasi dan Validasi data dilakukan secara rutin dan berkala | Evaluasi Berkala | Sekretaris Daerah | Triwulan II – Tahun 2026 | Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan |
| 5. | Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Angkatan Kerja | Evaluasi Berkala | Kepala Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian | Triwulan II – Tahun 2026 | Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan |
| 6. | Penyusunan Perwako tentang Belum ada insentif dan disinsentif bagi investor | Evaluasi Berkala | Sekretaris Daerah | Triwulan II – IV Tahun 2026 | Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan |
| 7. | Pemanfaatan media publik untuk publikasi harga pangan | Risk Control Self-Assessment (RCSA) | Kepala Dinas Ketahanan Pangan | Triwulan II – Tahun 2026 | Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan |
| 8. | Meningkatkan Pengawasan harga | Risk Control Self-Assessment (RCSA) | Kepala Dinas Koperasi, UKM | Triwulan II – Tahun 2026 | Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan |

## 3. MANAJEMEN RISIKO TUJUAN DAN SASARAN MISI 3

**Tabel L2.17** Penetapan Konteks Risiko Strategis Misi 3 Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

| PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS | | | |
|---|---|---|---|
| **MISI 3** MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN KONDUSIF | | | |
| Nama Pemda | : | Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat | |
| Periode yang dinilai | : | Tahun 2025 - 2029 | |
| Visi | : | Payakumbuh Maju Bermartabat Melalui Pemberdayaan, Pengembangan Kualitas Pendidikan, Dan Sentra Umkm Yang Kompetitif | |
| Tujuan Strategis RPJMD | : | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | |
| Indikator Kinerja Tujuan RPJMD | : | 1. Indeks Reformasi Birokrasi (RB)<br>2. Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK | |
| Sasaran Strategis RPJMD | : | 3.1.1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik |
| | | 3.1.2 | Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel |
| | | 3.1.3 | Meningkatnya Pendapatan Daerah |
| | | 3.1.4 | Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat |
| Indikator Kinerja Sasaran RPJMD | : | 3.1.1.a | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE/ Pemdi) |
| | | 3.1.1.b | Indeks Pelayanan Publik |
| | | 3.1.1.c | Indeks Kepuasan Masyarakat |
| | | 3.1.2.a | Nilai Evaluasi AKIP |
| | | 3.1.2.b | Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) |
| | | 3.1.2.c | Indeks Pengelolaan Aset Daerah |
| | | 3.1.3.a | Rasio PAD terhadap APBD |
| | | 3.1.4.a | Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum |
| Urusan Pemerintah Daerah | : | 1. Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar: Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat<br>2. Urusan Pemerintah Wajib Non-Pelayanan Dasar: Pertanahan | |

| PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS | | |
|---|---|---|
| | | 3. Urusan Pemerintah Wajib Non-Pelayanan Dasar: Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil<br>4. Urusan Pemerintah Wajib Non-Pelayanan Dasar: Penanaman Modal<br>5. Urusan Pemerintah Wajib Non-Pelayanan Dasar: Komunikasi dan Informatika<br>6. Urusan Pemerintah Wajib Non-Pelayanan Dasar: Statistik<br>7. Urusan Pemerintah Wajib Non-Pelayanan Dasar: Persandian<br>8. Urusan Pemerintah Wajib Non-Pelayanan Dasar: Kearsipan<br>9. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan: Sekretariat Daerah<br>10. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan: Sekretariat DPRD<br>11. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan: Perencanaan<br>12. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan: Keuangan<br>13. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan: Kepegawaian<br>14. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan: Pendidikan dan Pelatihan<br>15. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan: Penelitian dan Pengembangan<br>16. Unsur Pengawas: Inspektorat<br>17. Unsur Kewilayahan: Kec. Payakumbuh Barat<br>18. Unsur Kewilayahan: Kec. Payakumbuh Timur<br>19. Unsur Kewilayahan: Kec. Payakumbuh Utara<br>20. Unsur Kewilayahan: Kec. Payakumbuh Selatan<br>21. Unsur Kewilayahan: Kec. Lamposi Tigo Nagori<br>22. Unsur Pemerintahan Umum: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Program Pembangunan | : | 1.1 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan<br>1.2 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik<br>1.3 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan<br>1.4 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya<br>1.5 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial<br>2.1 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan<br>2.2 Program Penetapan Tanah Ulayat<br>2.3 Program Penatagunaan Tanah<br>3.1 Program Pendaftaran Penduduk<br>3.2 Program Pencatatan Sipil<br>3.3 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan<br>3.4 Program Pengelolaan Profil Kependudukan |

| | | |
|---|---|---|
| | | 4.1 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal |
| | | 4.2 Program Promosi Penanaman Modal |
| | | 4.3 Program Pelayanan Penanaman Modal |
| | | 4.4 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal |
| | | 4.5 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal |
| | | 5.1 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik |
| | | 5.2 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika |
| | | 6.1 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral |
| | | 7.1 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi |
| | | 8.1 Program Pengelolaan Arsip |
| | | 8.2 Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip |
| | | 8.3 Program Perizinan Penggunaan Arsip |
| | | 9.1 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat |
| | | 9.2 Program Perekonomian Dan Pembangunan |
| | | 10.1 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD |
| | | 11.1 Program Perencanaan. Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
| | | 11.2 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | 12.1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | 12.2 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| | | 12.3 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| | | 13.1 Program Kepegawaian Daerah |
| | | 14.1 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | 15.1 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| | | 15.2 Program Riset Dan Inovasi Daaerah |
| | | 16.1 Program Penyelenggaraan Pengawasan |
| | | 16.2 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi |
| | | 17.1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kec. Payakumbuh Barat |
| | | 17.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kec. Payakumbuh Barat |
| | | 17.3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kec. Payakumbuh Barat |
| | | 17.4 Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Kec. Payakumbuh Barat |
| | | 18.1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kec. Payakumbuh Timur |
| | | 18.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kec. Payakumbuh Timur |
| | | 18.3 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kec. Payakumbuh Timur |
| | | 18.4 Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Kec. Payakumbuh Timur |

| | | |
|---|---|---|
| | | 19.1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kec. Payakumbuh Utara<br>19.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kec. Payakumbuh Utara<br>19.3 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kec. Payakumbuh Utara<br>19.4 Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Kec. Payakumbuh Utara<br>20.1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kec. Payakumbuh Selatan<br>20.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kec. Payakumbuh Selatan<br>20.3 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kec. Payakumbuh Selatan<br>20.4 Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Kec. Payakumbuh Selatan<br>21.1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kec. Lamposi Tigo Nagori<br>21.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kec. Lamposi Tigo Nagori<br>21.3 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kec. Lamposi Tigo Nagori<br>21.4 Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Kec. Lamposi Tigo Nagori<br>22.1 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan<br>22.2 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik<br>22.3 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan<br>22.4 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya<br>22.5 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial |
| Perangkat Daerah Terkait | : | 1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran<br>2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang<br>3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil<br>4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>5. Dinas Komunikasi dan Informatika<br>6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan<br>7. Sekretariat Daerah<br>8. Sekretariat DPRD<br>9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah<br>10. Badan Keuangan Daerah<br>11. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia<br>12. Inspektorat<br>13. Kecamatan Payakumbuh Barat<br>14. Kecamatan Payakumbuh Timur<br>15. Kecamatan Payakumbuh Utara |

| PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS | | |
|---|---|---|
| | | 16. Kecamatan Payakumbuh Selatan<br>17. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori<br>18. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |

**Tabel L2.18** Identifikasi Risiko Strategis Misi 3 Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U/C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| **Tujuan 3.1** Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | 1. Indeks Reformasi Birokrasi (RB)<br>2. Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK | | | | | | | | |
| **Sasaran 3.1.1** Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | 1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE/ Pemdi)<br>2. Indeks Pelayanan Publik<br>3. Indeks Kepuasan Masyarakat | Tidak terlayaninya publik dengan optimal | RPP: 3.1.1.1 | Kepala Daerah | Kualitas SDM Aparatur yang Rendah | Internal | C | Pelayanan Publik Buruk dan Tidak Profesional | Masyarakat |
| | | | | | | | | Lemahnya Inovasi dan Adaptasi Teknologi | PD |
| | | | | | | | | Rendahnya Akuntabilitas dan Transparansi | PD |
| | | | | | | | | Kurangnya Kepuasan dan Kepercayaan Publik | PD |
| | | | | | Sistem Birokrasi yang Rumit dan Lambat | Internal | C | Terhambatnya Akses terhadap Hak Dasar Warga Negara, Seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, bantuan sosial, dan layanan perizinan | Masyarakat |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | Kurangnya Sarana dan Prasarana Layanan | Internal | C | Pelayanan Publik Tidak Efisien | Masyarakat |
| | | | | | | | | Turunnya Kualitas Pelayanan | Masyarakat |
| | | | | | | | | Tingginya Ketidakpuasan Masyarakat | Masyarakat |
| | | | | | | | | Menurunnya Citra dan Kepercayaan terhadap Pemerintah | PD |
| | | | | | Minimnya Penggunaan Teknologi Informasi | Internal | C | Terhambatnya Transformasi Digital dan Inovasi Pelayanan | Masyarakat |
| | | | | | | | | Warga harus menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya ekstra hanya untuk mendapatkan layanan dasar. | Masyarakat |
| | | | | | Tidak Adanya Standar Pelayanan yang Jelas | Internal | C | Pelayanan Tidak Konsisten | Masyarakat |
| | | | | | | | | Rendahnya Akuntabilitas dan Transparansi | PD |
| | | | | | | | | Pelayanan Publik Tidak Profesional | Masyarakat |
| | | | | | | | | Masyarakat Tidak Tahu Hak dan Prosedur | Masyarakat |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | | | | Sulit Melakukan Pengawasan dan Evaluasi | PD |
| | | | | | | | | Tingginya Ketidakpuasan dan Keluhan Publik | Masyarakat |
| | | | | | Pengawasan dan Evaluasi yang Lemah | Internal | C | Kinerja Aparatur Tidak Terkontrol | PD |
| | | | | | | | | Rendahnya Akuntabilitas Publik | PD |
| | | | | | | | | Pelayanan Publik Tidak Berkualitas dan Tidak Merata | Masyarakat |
| | | | | | | | | Meningkatnya Praktik Korupsi, Pungli, dan Penyalahgunaan Wewenang | Masyarakat |
| | | | | | | | | Program dan Kegiatan Pemerintah Tidak Efektif, dan Keputusan dan Kebijakan Tidak Tepat Sasaran | Masyarakat |
| | | | | | | | | Tertutupnya Ruang Perbaikan dan Inovasi | PD |
| | | | | | Adanya penyimpangan menyebabkan proses layanan | Internal | C | Meningkatnya Ketidakpuasan dan Ketidakpercayaan terhadap Pemerintah | PD |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | menjadi diskriminatif dan tidak adil | | | Terciptanya Ketidaksetaraan Akses Pelayanan | Masyarakat |
| | | | | | | | | Menurunnya Partisipasi Masyarakat | PD |
| | | | | | | | | Melemahnya Rule of Law (Kepatuhan terhadap Hukum) | PD |
| | | | | | | | | Hambatan bagi Pembangunan Inklusif dan Berkeadilan | Masyarakat |
| **Sasaran 3.1.2** Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel | 1. Nilai Evaluasi AKIP<br>2. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)<br>3. Indeks Pengelolaan Aset Daerah | Rendahnya nilai evaluasi AKIP | RPP: 3.1.2.1 | Kepala Daerah | Perencanaan Kinerja yang Lemah | Internal | C | Program/Kegiatan Tidak Tepat Sasaran | PD |
| | | | | | | | | Kinerja Instansi Tidak Terukur | PD |
| | | | | | | | | Inefisiensi Penggunaan Anggaran | PD |
| | | | | | | | | Rendahnya Nilai Akuntabilitas Kinerja | PD |
| | | | | | | | | Tidak Tercapainya Sasaran Pembangunan | PD |
| | | | | | | | | Lemahnya Koordinasi Antarpihak | PD |
| | | | | | | | | Turunnya Kepercayaan Publik | PD |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | | | | Keterlambatan Pengambilan Keputusan | PD |
| | | | | | Ketidak-sinambungan Antara Perencanaan dan Penganggaran | Internal | C | Program/Kegiatan Tidak Sesuai Prioritas Pembangunan | PD |
| | | | | | | | | Pemborosan dan Inefisiensi Anggaran | PD |
| | | | | | | | | Target Kinerja Tidak Tercapai | PD |
| | | | | | | | | Rendahnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah | PD |
| | | | | | | | | Tumpang Tindih atau Kekosongan Kegiatan | PD |
| | | | | | | | | Terhambatnya Pembangunan Daerah | PD |
| | | | | | | | | Kinerja OPD Sulit Dievaluasi | PD |
| | | | | | | | | Turunnya Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah | PD |
| | | | | | Pelaporan Kinerja Tidak Akurat dan Lengkap | Internal | C | Evaluasi Kinerja Tidak Objektif | PD |
| | | | | | | | | Kesalahan dalam Pengambilan Keputusan | PD |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | | | | Rendahnya Nilai Akuntabilitas Kinerja | PD |
| | | | | | | | | Gagalnya Perbaikan Layanan Publik | PD |
| | | | | | | | | Tingginya Risiko Temuan Audit (BPK/Inspektorat) | PD |
| | | | | | | | | Menurunnya Kepercayaan Masyarakat | PD |
| | | | | | | | | Rendahnya Integritas dan Profesionalisme Aparatur | PD |
| | | | | | | | | Penggunaan Anggaran Tidak Efektif | PD |
| | | | | | Monitoring dan Evaluasi Internal Tidak Berjalan Efektif | Internal | C | Kinerja Program Tidak Diketahui Secara Nyata | PD |
| | | | | | | | | Kesalahan Berulang Tidak Terkoreksi | PD |
| | | | | | | | | Anggaran Digunakan Tidak Efisien | PD |
| | | | | | | | | Rendahnya Akuntabilitas Instansi | PD |
| | | | | | | | | Tidak Ada Data Pendukung untuk Perbaikan atau Inovasi | PD |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | | | | Kesulitan Menentukan Prioritas Program Selanjutnya | PD |
| | | | | | | | | Tidak Terdeteksinya Penyimpangan dan Pelanggaran | PD |
| | | | | | | | | Menurunnya Kepercayaan dari Pimpinan, Stakeholder, dan Publik | PD |
| | | | | | Rendahnya Kapasitas SDM dalam Penyusunan LAKIP | Internal | C | Laporan Tidak Sesuai Standar Penilaian | PD |
| | | | | | | | | Indikator Kinerja Tidak Relevan atau Tidak Terukur | PD |
| | | | | | | | | Kesalahan Analisis Data Kinerja | PD |
| | | | | | | | | Tidak Tercapainya Tujuan Akuntabilitas Publik | PD |
| | | | | | | | | Turunnya Nilai Akuntabilitas Instansi (SAKIP) | PD |
| | | | | | | | | Perencanaan Tahun Berikutnya Tidak Berkualitas | PD |
| | | | | | | | | Lemahnya Evaluasi Internal dan | PD |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | | | | Pengambilan Keputusan | |
| | | | | | | | | Kegiatan Pelatihan/Peningkatan Kapasitas Tidak Dilakukan | PD |
| | | | | | Minimnya Komitmen Pimpinan Instansi | Internal | C | Arah Kebijakan Tidak Jelas dan Tidak Fokus | PD |
| | | | | | | | | Rendahnya Budaya Kinerja di Lingkungan Instansi | PD |
| | | | | | | | | Pelaksanaan SAKIP dan LAKIP Sekadar Formalitas | PD |
| | | | | | | | | Tidak Ada Dorongan untuk Perbaikan dan Inovasi | PD |
| | | | | | | | | Program Strategis Tidak Terimplementasi Secara Optimal | PD |
| | | | | | | | | Koordinasi Antarunit Lemah | PD |
| | | | | | | | | Menurunnya Citra dan Kredibilitas Instansi | PD |
| | | | | | | | | Rendahnya Nilai Evaluasi Instansi | PD |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | Kurangnya Inovasi dan Penggunaan Sistem Informasi Kinerja | Internal | C | Kinerja Tidak Terdokumentasi Secara Baik | PD |
| | | | | | | | | Sulit Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Secara Real-Time | PD |
| | | | | | | | | Pengambilan Keputusan Tidak Berbasis Data | PD |
| | | | | | | | | Lemahnya Akuntabilitas dan Transparansi | PD |
| | | | | | | | | Rendahnya Efisiensi dan Produktivitas Aparatur | PD |
| | | | | | | | | Minimnya Inovasi Pelayanan Publik | PD |
| | | | | | | | | Potensi Manipulasi atau Ketidaksesuaian Data | PD |
| | | | | | | | | Tidak Terdeteksinya Permasalahan Sejak Dini | PD |
| | | | | | Kinerja Program Tidak Berdampak Nyata bagi Masyarakat | Internal | C | Pemborosan Anggaran | PD |
| | | | | | | | | Ketidakpuasan dan Kekecewaan Masyarakat | PD |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U/C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | | | | Menurunnya Kepercayaan Terhadap Pemerintah | PD |
| | | | | | | | | Tujuan Pembangunan Daerah Tidak Tercapai | PD |
| | | | | | | | | Nilai Evaluasi Kinerja Rendah | PD |
| | | | | | | | | Tidak Ada Keberlanjutan Program | PD |
| | | | | | | | | Kesulitan dalam Mengukur Keberhasilan | PD |
| | | | | | | | | Potensi Konflik Sosial | PD |
| **Sasaran 3.1.3** Meningkatnya Pendapatan Daerah | Rasio PAD terhadap APBD | Pendapatan Daerah tidak berpengaruh signifikan pada ekonomi daerah | RPP: 3.1.3.1 | Kepala Daerah | Pendapatan tidak dikelola secara efektif | Internal | C | Tidak Terjadinya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat | PD |
| | | | | | | | | Pemborosan dan Ketidakefisienan Anggaran | PD |
| | | | | | | | | Pembangunan Tidak Merata | PD |
| | | | | | | | | Rendahnya Daya Saing Daerah | PD |
| | | | | | | | | Rendahnya Nilai Evaluasi Kinerja Keuangan dan Pembangunan | PD |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | | | | Menurunnya Kepercayaan Publik | PD |
| | | | | | | | | Terhambatnya Pertumbuhan Ekonomi Lokal | PD |
| | | | | | | | | Risiko Korupsi dan Penyalahgunaan Anggaran | PD |
| | | | | | Pendapatan Daerah Tidak diinvestasikan atau dibelanjakan pada sektor produktif | Internal | C | Pertumbuhan Ekonomi Daerah Lambat | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Kesempatan Kerja Tidak Tumbuh | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Kemandirian Ekonomi Daerah Tidak Terbangun | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Tidak Terjadi Multiplikasi Ekonomi (Multiplayer Effect) | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulit Meningkat | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Terhambatnya Inovasi dan Modernisasi Ekonomi Lokal | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Tingginya Ketimpangan Sosial-Ekonomi | Kota Payakumbuh |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | | | | Dana Daerah Tidak Memberikan Manfaat Jangka Panjang | Kota Payakumbuh |
| | | | | | Tidak mendukung penciptaan lapangan kerja dan daya beli masyarakat | Internal | C | Tingginya Angka Pengangguran dan Setengah Pengangguran | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Kemiskinan Tetap Tinggi atau Meningkat | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Lesunya Ekonomi Lokal | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Ketimpangan Sosial-Ekonomi Meningkat | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Tingginya Ketergantungan pada Bantuan Sosial | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Risiko Sosial dan Politik | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Bonus Demografi Menjadi Beban Demografi | Kota Payakumbuh |
| **Sasaran 3.1.4** Terciptanya ketentraman | Persentase Penurunan | Meningkatnya pelanggaran Trantibum | RPP: 3.1.4.1 | Kepala Daerah | Lemahnya Penegakan Peraturan Daerah | Internal | C | Meningkatnya Pelanggaran Ketertiban Umum (Trantibum) | Masyarakat |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U/C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| dan ketertiban masyarakat | Pelanggaran Trantibum | | | | | | | Menurunnya Wibawa Pemerintah Daerah | PD |
| | | | | | | | | Ketidakpastian Hukum dan Ketidakadilan | Masyarakat |
| | | | | | | | | Kegagalan Mencapai Tujuan Pembangunan Daerah | PD |
| | | | | | | | | Turunnya Kepatuhan dan Disiplin Sosial | PD |
| | | | | | | | | Kerugian Keuangan Daerah | PD |
| | | | | | | | | Tingginya Konflik Sosial dan Gesekan Antarwarga | PD |
| | | | | | | | | Terganggunya Tata Ruang dan Lingkungan | PD |
| | | | | | Kurangnya Edukasi dan Sosialisasi Hukum kepada Masyarakat | Internal | C | Tingginya Tingkat Pelanggaran karena Ketidaktahuan | PD |
| | | | | | | | | Minimnya Kesadaran Hukum di Tingkat Akar Rumput | PD |
| | | | | | | | | Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Aturan | PD |
| | | | | | | | | Stigma atau Salah Persepsi terhadap | PD |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | | | | Aparat Penegak Hukum | |
| | | | | | | | | Tidak Efektifnya Implementasi Perda dan Kebijakan Publik | PD |
| | | | | | | | | Tertutupnya Akses Hukum bagi Kelompok Rentan | PD |
| | | | | | | | | Meningkatnya Potensi Konflik Sosial | PD |
| | | | | | | | | Terhambatnya Program Pembangunan Berbasis Aturan | PD |
| | | | | | Tingginya Kepadatan Penduduk dan Urbanisasi | Internal | C | Kemacetan dan Kepadatan Lalu Lintas | PD |
| | | | | | | | | Meningkatnya Permukiman Kumuh | PD |
| | | | | | | | | Tingginya Tekanan terhadap Layanan Publik | PD |
| | | | | | | | | Peningkatan Pengangguran dan Persaingan Kerja | PD |
| | | | | | | | | Tingginya Biaya Hidup dan Ketimpangan Sosial | PD |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/UC | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | | | | Meningkatnya Kriminalitas dan Konflik Sosial | PD |
| | | | | | | | | Menurunnya Kualitas Lingkungan | PD |
| | | | | | | | | Terjadinya Ketegangan Antarwilayah dan Antarwarga | PD |
| | | | | | | | | Beban Fiskal Daerah Meningkat | PD |
| | | | | | Ketimpangan Sosial dan Ekonomi | Internal | UC | Meningkatnya Kemiskinan Struktural | PD |
| | | | | | | | | Tingginya Potensi Konflik Sosial | PD |
| | | | | | | | | Menurunnya Kohesi Sosial dan Solidaritas | PD |
| | | | | | | | | Rendahnya Mobilitas Sosial | PD |
| | | | | | | | | Terganggunya Stabilitas Politik dan Pemerintahan | PD |
| | | | | | | | | Kinerja Ekonomi Daerah atau Negara Tidak Optimal | PD |
| | | | | | | | | Munculnya Permukiman Kumuh dan Urban Sprawl | PD |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | | | | Tingginya Angka Kriminalitas | PD |
| | | | | | | | | Ketergantungan terhadap Bantuan Sosial | PD |
| | | | | | Koordinasi Lintas Sektor Lemah | Internal | C | Program dan Kegiatan Tidak Sinkron | PD |
| | | | | | | | | Inefisiensi Penggunaan Anggaran | PD |
| | | | | | | | | Kinerja Pembangunan Tidak Optimal | PD |
| | | | | | | | | Pelayanan Publik Menjadi Lambat dan Tumpang Tindih | PD |
| | | | | | | | | Minimnya Akuntabilitas | PD |
| | | | | | | | | Data dan Informasi Tidak Terpadu | PD |
| | | | | | | | | Menghambat Respons Cepat terhadap Krisis | PD |
| | | | | | | | | Menyulitkan Monitoring dan Evaluasi Program | PD |
| | | | | | | | | Meningkatkan Biaya Koordinasi Sosial dan Politik | PD |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/UC | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | Kurangnya Jumlah dan Kapasitas Aparat Trantib | Internal | C | Peningkatan Pelanggaran Ketertiban Umum | PD |
| | | | | | | | | Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Tidak Efektif | PD |
| | | | | | | | | Turunnya Wibawa Pemerintah Daerah | PD |
| | | | | | | | | Meningkatnya Konflik Sosial saat Penertiban | PD |
| | | | | | | | | Ketimpangan Penanganan antara Wilayah | PD |
| | | | | | | | | Terhambatnya Respons terhadap Aduan Masyarakat | PD |
| | | | | | | | | Tidak Maksimalnya Pelaksanaan Tugas Preventif dan Edukatif | PD |
| | | | | | | | | Lemahnya Dokumentasi, Pelaporan, dan Evaluasi Penindakan | PD |
| | | | | | | | | Beban Kerja Aparat Melebihi Kapasitas | PD |
| | | | | | Perubahan Nilai Sosial dan Gaya Hidup | Eksternal | UC | Menurunnya Kepedulian Sosial dan Solidaritas Komunitas | Kota Payakumbuh |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | | | | Meningkatnya Konsumerisme dan Gaya Hidup Hedonis | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Tergerusnya Nilai Budaya dan Kearifan Lokal | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Meningkatnya Tindakan Pelanggaran Norma Sosial | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Terjadinya Konflik Antar Generasi | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Tumbuhnya Gaya Hidup Instan dan Kurang Produktif | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Melemahnya Ketahanan Sosial Masyarakat | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Tingkat Ketertiban dan Keamanan Menurun | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Meningkatnya Kesenjangan Sosial | Kota Payakumbuh |
| | | | | | Lingkungan Fisik yang Tidak Tertata | Internal | C | Meningkatnya Risiko Bencana | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Kemacetan dan Kesemrawutan Lalu Lintas | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Pertumbuhan Permukiman Kumuh | Kota Payakumbuh |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/UC | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | | | | Menurunnya Kualitas Hidup Masyarakat | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Peningkatan Kriminalitas dan Ketidakamanan | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Penurunan Nilai Ekonomi dan Investasi | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Kerusakan Ekologis dan Lingkungan Hidup | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Tingginya Beban Biaya Pemeliharaan | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Konflik Tata Guna Lahan | Kota Payakumbuh |

**Tabel L2.19** Analisis Risiko Strategis Tujuan 3 Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

| | | |
|---|---|---|
| Nama Pemda | : | Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat |
| Tahun Penilaian | : | Tahun 2025 - 2029 |
| Tujuan Strategis RPJMD | : | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel |

| NO. | RISIKO TERIDENTIFIKASI | KODE RISIKO | ANALISIS RISIKO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SKALA DAMPAK | SKALA KEMUNGKINAN | SKALA RISIKO |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(4)x(5) |
| 1. | Tidak terlayaninya publik dengan optimal | RPP: 3.1.1.1 | 5 | 2 | 10 |
| 2. | Rendahnya nilai evaluasi AKIP | RPP: 3.1.2.1 | 4 | 3 | 12 |
| 3. | Pendapatan Daerah tidak berpengaruh signifikan pada ekonomi daerah | RPP: 3.1.3.1 | 5 | 5 | 25 |
| 4. | Meningkatnya pelanggaran Trantibum | RPP: 3.1.4.1 | 5 | 5 | 25 |

**Tabel L2.20** Matriks Hasil Analisis Risiko Tujuan 3 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

| MATRIKS ANALISIS RISIKO | | | DAMPAK/KONSEKUENSI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TIDAK SIGNIFIKAN | KECIL | SEDANG | BESAR | SIGNIFIKAN |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO | HAMPIR PASTI | 5 | | | | | RPP: 3.1.3.1<br>RPP: 3.1.4.1 |
| | KEMUNGKINAN BESAR | 4 | | | | | |
| | MUNGKIN | 3 | | | | RPP: 3.1.2.1 | |
| | KEMUNGKINAN KECIL | 2 | | | | | RPP: 3.1.1.1 |
| | SANGAT JARANG | 1 | | | | | |
| KETERANGAN | | | SANGAT RENDAH | RENDAH | SEDANG/ MEDIUM | TINGGI | SANGAT TINGGI |

**Tabel L2.21** Daftar Risiko Prioritas Tujuan 3 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

| | | |
|---|---|---|
| Nama Pemda | : | Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat |
| Tahun Penilaian | : | Tahun 2025 - 2029 |

| NO. | RISIKO PRIORITAS | KODE RISIKO | SKALA RISIKO | PEMILIK RESIKO | PENYEBAB | DAMPAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pendapatan Daerah tidak berpengaruh signifikan pada ekonomi daerah | RPP: 3.1.3.1 | 25 | Kepala Daerah | 1. Pendapatan tidak dikelola secara efektif<br>2. Pendapatan Daerah Tidak diinvestasikan atau dibelanjakan pada sektor produktif<br>3. Tidak mendukung penciptaan lapangan kerja dan daya beli masyarakat | 1. Tidak Terjadinya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat<br>2. Pemborosan dan Ketidakefisienan Anggaran<br>3. Pembangunan Tidak Merata<br>4. Rendahnya Daya Saing Daerah<br>5. Rendahnya Nilai Evaluasi Kinerja Keuangan dan Pembangunan<br>6. Menurunnya Kepercayaan Publik<br>7. Terhambatnya Pertumbuhan Ekonomi Lokal<br>8. Risiko Korupsi dan Penyalahgunaan Anggaran<br>9. Pertumbuhan Ekonomi Daerah Lambat<br>10. Kesempatan Kerja Tidak Tumbuh<br>11. Kemandirian Ekonomi Daerah Tidak Terbangun<br>12. Tidak Terjadi Multiplikasi Ekonomi (Multiplayer Effect)<br>13. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulit Meningkat<br>14. Terhambatnya Inovasi dan Modernisasi Ekonomi Lokal<br>15. Tingginya Ketimpangan Sosial-Ekonomi<br>16. Dana Daerah Tidak Memberikan Manfaat Jangka Panjang<br>17. Tingginya Angka Pengangguran dan Setengah Pengangguran<br>18. Kemiskinan Tetap Tinggi atau Meningkat<br>19. Lesunya Ekonomi Lokal<br>20. Ketimpangan Sosial-Ekonomi Meningkat<br>21. Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD)<br>22. Tingginya Ketergantungan pada Bantuan Sosial<br>23. Risiko Sosial dan Politik<br>24. Bonus Demografi Menjadi Beban Demografi |
| 2. | Meningkatnya pelanggaran Trantibum | RPP: 3.1.4.1 | 25 | Kepala Daerah | 1. Lemahnya Penegakan Peraturan Daerah | 1. Meningkatnya Pelanggaran Ketertiban Umum (Trantibum)<br>2. Menurunnya Wibawa Pemerintah Daerah<br>3. Ketidakpastian Hukum dan Ketidakadilan<br>4. Kegagalan Mencapai Tujuan Pembangunan Daerah |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2. Kurangnya Edukasi dan Sosialisasi Hukum kepada Masyarakat<br>3. Tingginya Kepadatan Penduduk dan Urbanisasi<br>4. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi<br>5. Koordinasi Lintas Sektor Lemah<br>6. Kurangnya Jumlah dan Kapasitas Aparat Trantib<br>7. Perubahan Nilai Sosial dan Gaya Hidup<br>8. Lingkungan Fisik yang Tidak Tertata | 5. Turunnya Kepatuhan dan Disiplin Sosial<br>6. Kerugian Keuangan Daerah<br>7. Tingginya Konflik Sosial dan Gesekan Antarwarga<br>8. Terganggunya Tata Ruang dan Lingkungan<br>9. Tingginya Tingkat Pelanggaran karena Ketidaktahuan<br>10. Minimnya Kesadaran Hukum di Tingkat Akar Rumput<br>11. Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Aturan<br>12. Stigma atau Salah Persepsi terhadap Aparat Penegak Hukum<br>13. Tidak Efektifnya Implementasi Perda dan Kebijakan Publik<br>14. Tertutupnya Akses Hukum bagi Kelompok Rentan<br>15. Meningkatnya Potensi Konflik Sosial<br>16. Terhambatnya Program Pembangunan Berbasis Aturan<br>17. Kemacetan dan Kepadatan Lalu Lintas<br>18. Meningkatnya Permukiman Kumuh<br>19. Tingginya Tekanan terhadap Layanan Publik<br>20. Peningkatan Pengangguran dan Persaingan Kerja<br>21. Tingginya Biaya Hidup dan Ketimpangan Sosial<br>22. Meningkatnya Kriminalitas dan Konflik Sosial<br>23. Menurunnya Kualitas Lingkungan<br>24. Terjadinya Ketegangan Antarwilayah dan Antarwarga<br>25. Beban Fiskal Daerah Meningkat<br>26. Meningkatnya Kemiskinan Struktural<br>27. Tingginya Potensi Konflik Sosial<br>28. Menurunnya Kohesi Sosial dan Solidaritas<br>29. Rendahnya Mobilitas Sosial<br>30. Terganggunya Stabilitas Politik dan Pemerintahan<br>31. Kinerja Ekonomi Daerah atau Negara Tidak Optimal<br>32. Munculnya Permukiman Kumuh dan Urban Sprawl<br>33. Tingginya Angka Kriminalitas<br>34. Ketergantungan terhadap Bantuan Sosial<br>35. Program dan Kegiatan Tidak Sinkron<br>36. Inefisiensi Penggunaan Anggaran<br>37. Kinerja Pembangunan Tidak Optimal<br>38. Pelayanan Publik Menjadi Lambat dan Tumpang Tindih<br>39. Minimnya Akuntabilitas |

| NO. | RISIKO PRIORITAS | KODE RISIKO | SKALA RISIKO | PEMILIK RESIKO | PENYEBAB | DAMPAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 40. Data dan Informasi Tidak Terpadu<br>41. Menghambat Respons Cepat terhadap Krisis<br>42. Menyulitkan Monitoring dan Evaluasi Program<br>43. Meningkatkan Biaya Koordinasi Sosial dan Politik<br>44. Peningkatan Pelanggaran Ketertiban Umum<br>45. Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Tidak Efektif<br>46. Turunnya Wibawa Pemerintah Daerah<br>47. Meningkatnya Konflik Sosial saat Penertiban<br>48. Ketimpangan Penanganan antara Wilayah<br>49. Terhambatnya Respons terhadap Aduan Masyarakat<br>50. Tidak Maksimalnya Pelaksanaan Tugas Preventif dan Edukatif<br>51. Lemahnya Dokumentasi, Pelaporan, dan Evaluasi Penindakan<br>52. Beban Kerja Aparat Melebihi Kapasitas<br>53. Menurunnya Kepedulian Sosial dan Solidaritas Komunitas<br>54. Meningkatnya Konsumerisme dan Gaya Hidup Hedonis<br>55. Tergerusnya Nilai Budaya dan Kearifan Lokal<br>56. Meningkatnya Tindakan Pelanggaran Norma Sosial<br>57. Terjadinya Konflik Antar Generasi<br>58. Tumbuhnya Gaya Hidup Instan dan Kurang Produktif<br>59. Melemahnya Ketahanan Sosial Masyarakat<br>60. Tingkat Ketertiban dan Keamanan Menurun<br>61. Meningkatnya Kesenjangan Sosial<br>62. Meningkatnya Risiko Bencana<br>63. Kemacetan dan Kesemrawutan Lalu Lintas<br>64. Pertumbuhan Permukiman Kumuh<br>65. Menurunnya Kualitas Hidup Masyarakat<br>66. Peningkatan Kriminalitas dan Ketidakamanan<br>67. Penurunan Nilai Ekonomi dan Investasi<br>68. Kerusakan Ekologis dan Lingkungan Hidup<br>69. Tingginya Beban Biaya Pemeliharaan<br>70. Konflik Tata Guna Lahan |

**Tabel L2.22** Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang ada dan masih Dibutuhkan Tujuan 3 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

| | | |
|---|---|---|
| Nama Pemda | : | Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat |
| Tahun Penilaian | : | Tahun 2025 - 2029 |

| NO. | RISIKO PRIORITAS | KODE RISIKO | URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA | CELAH PENGENDALIAN | RENCANA TINDAK PENGENDALIAN | PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB | TARGET WAKTU PENYELESAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pendapatan Daerah tidak berpengaruh signifikan pada ekonomi daerah | RPP: 3.1.3.1 | 1. Pemanfaatan Teknologi Informasi: Perluasan Kanal Pembayaran Qris Dinamis, Penggunaan Aplikasi E-Sptpd Untuk Pelaporan & Pembayaran Pajak Daerah, Dan Pemberitahuan Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Daerah Melalui Aplikasi Sms Blast<br>2. Perluasan Kanal Pembayaran Retribusi<br>3. Penguatan Kapabilitas dan Kompetensi ASN<br>4. Penghapusan Denda Administrasi Pembayaran PBB-P2<br>5. Peningkatan kerjasama dengan mitra kerja: Kerjasama Dengan Dirjen Pajak dan DJPK, Kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional, dan Kerjasama antara Badan Keuangan Daerah dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu<br>6. Intensifikasi pajak daerah: penagihan pajak daerah dan | Tidak optimal pendataan dan pemungutan WPWR daerah | Pemutakhiran data WPWR | Kepala Daerah | 2025-2027 |

| NO. | RISIKO PRIORITAS | KODE RISIKO | URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA | CELAH PENGENDALIAN | RENCANA TINDAK PENGENDALIAN | PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB | TARGET WAKTU PENYELESAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | pengawasan pajak daerah melalui KSWP<br>7. Ektensifikasi pajak daerah: pendataan dan pendaftaran OP baru, penyesuaian tarif pajak barang jas tertentu (PBJT) dan sosialisasi peraturan daerah terkait PDRD | | | | |
| 2. | Meningkatnya pelanggaran Trantibum | RPP: 3.1.4.1 | 1. Penertiban PKL<br>2. Menindaklanjuti Laporan Masyarakat Adanya Tindak Asusila, Anak Punk Yang Meresahkan Dan Mengganggu Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, Adanya Orang Terlantar, Ada ODGJ Yang Meresahkan Dan Mengganggu Trantibum Dan Adanya Pengemis Di Bawah Umur<br>3. Penertiban Baliho Yang Memakai Fasilitas Umum Dan Melanggar Perda No. 01 Tahun 2022 Tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum<br>4. Patroli Cipta Kondisi Antisipasi Pelanggaran Perda 01 Tahun 2022 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum<br>5. Pelaksanaan Pemadam Kebakaran<br>6. Bersama TNI, Polri, PolPP dan Dinas PUPR Melaksanakan | Penyelesaian pelanggaran Trantibum tidak tuntas | Penyusunan SOP pada setiap tahapan Pelaksanaan | Sekretaris Daerah | 2025-2029 |

| NO. | RISIKO PRIORITAS | KODE RISIKO | URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA | CELAH PENGENDALIAN | RENCANA TINDAK PENGENDALIAN | PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB | TARGET WAKTU PENYELESAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyegelan Bangunan yang tidak Memiliki Izin<br>7. Penertiban Baliho Iklan Rokok Di Kota Payakumbuh yang Melanggar Perda | | | | |

**Tabel L2.23** Rencana Pengkomunikasian atas Kegiatan Pengendalian Prioritas yang Dibangun pada Tujuan 3 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

| | | |
|---|---|---|
| Nama Pemda | : | Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat |
| Tahun Penilaian | : | Tahun 2025 - 2029 |

| NO. | KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN | MEDIA/ BENTUK SARANA PENGKOMUNIKASIAN | PENYEDIA INFORMASI | PENERIMA INFORMASI | RENCANA WAKTU PELAKSANAAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pemutakhiran data WPWR | Surat Keputusan (SK) tentang Wajib Pajak Wajib Retribusi | Kepala Daerah | Kepala Badan Keuangan Daerah | Triwulan I – Tahun 2026 | Pemutakhiran dilanjutkan sampai 2029 |
| 2. | Penyusunan SOP pada setiap tahapan Pelaksanaan Pemungutan | Dokumen SOP | Sekretaris Daerah | Kepala SatpolPP dan Pemadam Kebakaran | Triwulan I – Tahun 2026 | |

**Tabel L2.24** Rencana Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Prioritas yang Dibangun pada Tujuan 3 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

| | | |
|---|---|---|
| Nama Pemda | : | Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat |
| Tahun Penilaian | : | Tahun 2025 - 2029 |

| NO. | KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN | BENTUK/ METODE PEMANTAUAN YANG DIPERLUKAN | PENANGGUNG JAWAB PEMANTAUAN | RENCANA WAKTU PEMANTAUAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pemutakhiran data WPWR | Risk Control Self-Assessment (RCSA) | Kepala Daerah | Triwulan II – Tahun 2026 | Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan |
| 2. | Penyusunan SOP pada setiap tahapan Pelaksanaan Pemungutan | Risk Control Self-Assessment (RCSA) | Sekretaris Daerah | Triwulan II – Tahun 2026 | Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan |

## 4. MANAJEMEN RISIKO TUJUAN DAN SASARAN MISI 4

**Tabel L2.25** Penetapan Konteks Risiko Strategis Misi 4 Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

| PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS | | |
|---|---|---|
| **MISI 4** MEWUJUDKAN NUANSA IMANI MELALUI PENDEKATAN BUDAYA DAN ADAT | | |
| Nama Pemda | : | Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat |
| Periode yang dinilai | : | Tahun 2025 - 2029 |
| Visi | : | Payakumbuh Maju Bermartabat Melalui Pemberdayaan, Pengembangan Kualitas Pendidikan, Dan Sentra Umkm Yang Kompetitif |
| Tujuan Strategis RPJMD | : | Terwujudnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK |
| Indikator Kinerja Tujuan RPJMD | : | IPK berbasis ABS SBK |
| Sasaran Strategis RPJMD | : | Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat |
| Indikator Kinerja Sasaran RPJMD | : | 1. Karya Budaya yang Ditetapkan<br>2. Persentase Satuan Pendidikan yang Menerapkan Pendidikan Karakter |
| Urusan Pemerintah Daerah | : | 1. Urusan Pemerintah Wajib Non-Pelayanan Dasar: Kebudayaan<br>2. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan: Sekretariat Daerah |
| Program Pembangunan | : | 1.1 Program Pengembangan Kebudayaan<br>1.2 Program Pengembangan Kesenian Tradisional<br>1.3 Program Pembinaan Sejarah<br>1.4 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya<br>1.5 Program Pengelolaan Permuseuman<br>2.1 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat<br>2.2 Program Perekonomian Dan Pembangunan |
| Perangkat Daerah Terkait | : | 1. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga<br>2. Sekretariat Daerah |

**Tabel L2.26** Identifikasi Risiko Strategis Misi 4 Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/UC | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| **Tujuan 4.1** Terwujudnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK | IPK berbasis ABS SBK | | | | | | | | |
| **Sasaran 4.1.1** Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat | Karya Budaya yang Ditetapkan | Tidak diterapkannya nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat secara optimal | RPP: 4.1.1.1 | Kepala Daerah | Pengaruh Globalisasi dan Modernisasi | Eksternal | UC | Perubahan Nilai dan Gaya Hidup | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Tergerusnya Identitas Budaya Lokal | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Meningkatnya Kesenjangan Sosial dan Ekonomi | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Ketergantungan terhadap Produk dan Teknologi Asing | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Perubahan Pola Pikir Generasi Muda | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Peningkatan Akses Informasi dan Pendidikan | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Perubahan Struktur Ekonomi Lokal | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Disrupsi Dunia Kerja | Kota Payakumbuh |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | | | | Kehidupan Sosial yang Lebih Individual | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Pemudaran Kearifan Lokal dalam Pengambilan Keputusan | Kota Payakumbuh |
| | | | | | Kurangnya Pendidikan Karakter Sejak Dini | Internal | C | Rendahnya Moral dan Etika di Kalangan Anak dan Remaja | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Menurunnya Disiplin dan Tanggung Jawab | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Meningkatnya Perilaku Menyimpang | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Kurangnya Kepedulian Sosial dan Empati | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Menurunnya Semangat Kebangsaan dan Nasionalisme | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Ketidakmampuan Menghadapi Tantangan dan Tekanan Hidup | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Rendahnya Integritas dan Kepemimpinan di Masa Depan | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Pendidikan Formal Tidak Berdampak Komprehensif | Kota Payakumbuh |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | | | | Lingkungan Sosial Sekolah dan Masyarakat Menjadi Tidak Sehat | Kota Payakumbuh |
| | | | | | Minimnya Peran Keluarga dan Tokoh Masyarakat | Eksternal | C | Pendidikan Moral Anak Menjadi Lemah | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Meningkatnya Perilaku Menyimpang di Kalangan Remaja | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Menurunnya Kontrol Sosial dalam Komunitas | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Rendahnya Kepedulian terhadap Lingkungan Sosial | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Hilangnya Warisan Nilai Budaya Lokal | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Lemahnya Ketahanan Keluarga | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Turunnya Keteladanan Sosial | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Konflik Sosial Semakin Sulit Diredam | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | Internal | C | Kebijakan Tidak Relevan dengan | Kota Payakumbuh |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | Lemahnya Integrasi Nilai dalam Kebijakan Publik | | | Kondisi Sosial Budaya Masyarakat | |
| | | | | | | | | Turunnya Legitimasi dan Kepercayaan terhadap Pemerintah | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Peningkatan Ketimpangan Sosial | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Pudarnya Nilai Etika dalam Pelayanan Publik | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Munculnya Konflik Sosial dan Penolakan Kebijakan | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Kebijakan Menjadi Kaku dan Kurang Humanis | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Peluang Korupsi dan Penyimpangan Meningkat | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Kegagalan Pembangunan Karakter Bangsa | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Terjadinya Fragmentasi Sosial | Kota Payakumbuh |
| | | | | | Keterbatasan Ruang Ekspresi Budaya Lokal | Eksternal | C | Keterbatasan Ruang Ekspresi Budaya Lokal | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Punahnya Tradisi dan Warisan Budaya | Kota Payakumbuh |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/UC | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | | | | Menurunnya Rasa Bangga terhadap Budaya Sendiri | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Terhambatnya Potensi Ekonomi Kreatif Daerah | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Kesempatan Anak Muda Berkarya secara Lokal Menyempit | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Kesenjangan Budaya antara Kota dan Desa | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Tergerusnya Modal Sosial dan Nilai Kolektif | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Menurunnya Inovasi Budaya Lokal | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Penguasaan Budaya Lokal oleh Pihak Eksternal | Kota Payakumbuh |
| | | | | | Rendahnya Kesadaran Kolektif | Eksternal | UC | Kurangnya Kepedulian terhadap Masalah Bersama | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Gotong Royong dan Partisipasi Sosial Menurun | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Mudah Terjadi Konflik Sosial | Kota Payakumbuh |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | | | | Lemahnya Dukungan terhadap Program Pemerintah | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Pembangunan Daerah Tidak Berkelanjutan | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Rendahnya Resiliensi Komunitas terhadap Krisis | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Kesulitan Membangun Nilai Karakter Bangsa | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Lingkungan Sosial Menjadi Cuek dan Renggang | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Tingkat Pelanggaran Hukum dan Norma Sosial Meningkat | Kota Payakumbuh |
| | | | | | Kurangnya Keteladanan dari Pemimpin dan Aparatur | Internal | C | Menurunnya Kepercayaan Publik | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Terbentuknya Budaya Negatif di Lingkungan Kerja dan Masyarakat | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Rendahnya Disiplin dan Moral Aparatur | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Erosi Nilai-Nilai Etika dalam Pelayanan Publik | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Pendidikan Karakter Gagal Terbentuk | Kota Payakumbuh |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | | | | Terhambatnya Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan Bersih | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Masyarakat Kehilangan Panutan | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Meningkatnya Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Kualitas Kepemimpinan Regeneratif Menurun | Kota Payakumbuh |
| | | | | | Minimnya Kolaborasi Lintas Lembaga | Eksternal | C | Program dan Kebijakan Menjadi Terfragmentasi | PD |
| | | | | | | | | Pencapaian Tujuan Pembangunan Tidak Maksimal | PD |
| | | | | | | | | Inefisiensi Anggaran dan Sumber Daya | PD |
| | | | | | | | | Data dan Informasi Tidak Terintegrasi | PD |
| | | | | | | | | Lambatnya Respon terhadap Isu atau Krisis | PD |
| | | | | | | | | Turunnya Inovasi dan Solusi Kreatif | PD |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | | | | Pelayanan Publik Menjadi Tidak Terpadu | PD |
| | | | | | | | | Gagalnya Implementasi Kebijakan Berskala Luas | PD |
| | | | | | | | | Lemahnya Dukungan Sosial dan Politik terhadap Program | PD |
| | | | | | Lingkungan Sosial yang Tidak Mendukung | Eksternal | C | Terhambatnya Perkembangan Karakter Anak dan Remaja | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Rendahnya Motivasi Belajar dan Berkarya | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Meningkatnya Perilaku Menyimpang dan Kriminalitas | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Sulitnya Mewujudkan Ketertiban dan Keamanan Sosial | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Minimnya Dukungan terhadap Pelaksanaan Program Pembangunan | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Menurunnya Solidaritas dan Rasa Kebersamaan | Kota Payakumbuh |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | | | | Tingginya Stres Sosial dan Kesehatan Mental yang Terganggu | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Kualitas Hidup Masyarakat Menurun | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Tertutupnya Ruang untuk Partisipasi dan Aspirasi Publik | Kota Payakumbuh |

**Tabel L2.27** Analisis Risiko Strategis Tujuan 4 Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

| | | |
|---|---|---|
| Nama Pemda | : | Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat |
| Tahun Penilaian | : | Tahun 2025 - 2029 |
| Tujuan Strategis RPJMD | : | Terwujudnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK |

| NO. | RISIKO TERIDENTIFIKASI | KODE RISIKO | ANALISIS RISIKO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SKALA DAMPAK | SKALA KEMUNGKINAN | SKALA RISIKO |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(4)x(5) |
| 1. | Tidak diterapkannya nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat secara optimal | RPP: 4.1.1.1 | 5 | 5 | 25 |

**Tabel L2.28** Matriks Hasil Analisis Risiko Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

| MATRIKS ANALISIS RISIKO | | | DAMPAK/KONSEKUENSI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TIDAK SIGNIFIKAN | KECIL | SEDANG | BESAR | SIGNIFIKAN |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO | HAMPIR PASTI | 5 | | | | | RPP: 4.1.1.1 |
| | KEMUNGKINAN BESAR | 4 | | | | | |
| | MUNGKIN | 3 | | | | | |
| | KEMUNGKINAN KECIL | 2 | | | | | |
| | SANGAT JARANG | 1 | | | | | |
| KETERANGAN | | | SANGAT RENDAH | RENDAH | SEDANG/ MEDIUM | TINGGI | SANGAT TINGGI |

**Tabel L2.29** Daftar Risiko Prioritas Tujuan 4 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

| | | |
|---|---|---|
| Nama Pemda | : | Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat |
| Tahun Penilaian | : | Tahun 2025 - 2029 |

| NO. | RISIKO PRIORITAS | KODE RISIKO | SKALA RISIKO | PEMILIK RESIKO | PENYEBAB | DAMPAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tidak diterapkannya nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat secara optimal | RPP: 4.1.1.1 | 25 | Kepala Daerah | 1. Pengaruh Globalisasi dan Modernisasi<br>2. Kurangnya Pendidikan Karakter Sejak Dini<br>3. Minimnya Peran Keluarga dan Tokoh Masyarakat<br>4. Lemahnya Integrasi Nilai dalam Kebijakan Publik<br>5. Keterbatasan Ruang Ekspresi Budaya Lokal<br>6. Rendahnya Kesadaran Kolektif<br>7. Kurangnya Keteladanan dari Pemimpin dan Aparatur<br>8. Minimnya Kolaborasi Lintas Lembaga<br>9. Lingkungan Sosial yang Tidak Mendukung | 1. Perubahan Nilai dan Gaya Hidup<br>2. Tergerusnya Identitas Budaya Lokal<br>3. Meningkatnya Kesenjangan Sosial dan Ekonomi<br>4. Ketergantungan terhadap Produk dan Teknologi Asing<br>5. Perubahan Pola Pikir Generasi Muda<br>6. Peningkatan Akses Informasi dan Pendidikan<br>7. Perubahan Struktur Ekonomi Lokal<br>8. Disrupsi Dunia Kerja<br>9. Kehidupan Sosial yang Lebih Individual<br>10. Pemudaran Kearifan Lokal dalam Pengambilan Keputusan<br>11. Rendahnya Moral dan Etika di Kalangan Anak dan Remaja<br>12. Menurunnya Disiplin dan Tanggung Jawab<br>13. Meningkatnya Perilaku Menyimpang<br>14. Kurangnya Kepedulian Sosial dan Empati<br>15. Menurunnya Semangat Kebangsaan dan Nasionalisme<br>16. Ketidakmampuan Menghadapi Tantangan dan Tekanan Hidup<br>17. Rendahnya Integritas dan Kepemimpinan di Masa Depan<br>18. Pendidikan Formal Tidak Berdampak Komprehensif<br>19. Lingkungan Sosial Sekolah dan Masyarakat Menjadi Tidak Sehat<br>20. Pendidikan Moral Anak Menjadi Lemah<br>21. Meningkatnya Perilaku Menyimpang di Kalangan Remaja<br>22. Menurunnya Kontrol Sosial dalam Komunitas<br>23. Rendahnya Kepedulian terhadap Lingkungan Sosial<br>24. Hilangnya Warisan Nilai Budaya Lokal<br>25. Lemahnya Ketahanan Keluarga<br>26. Turunnya Keteladanan Sosial |

| NO. | RISIKO PRIORITAS | KODE RISIKO | SKALA RISIKO | PEMILIK RESIKO | PENYEBAB | DAMPAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 27. Konflik Sosial Semakin Sulit Diredam<br>28. Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan<br>29. Kebijakan Tidak Relevan dengan Kondisi Sosial Budaya Masyarakat<br>30. Turunnya Legitimasi dan Kepercayaan terhadap Pemerintah<br>31. Peningkatan Ketimpangan Sosial<br>32. Pudarnya Nilai Etika dalam Pelayanan Publik<br>33. Munculnya Konflik Sosial dan Penolakan Kebijakan<br>34. Kebijakan Menjadi Kaku dan Kurang Humanis<br>35. Peluang Korupsi dan Penyimpangan Meningkat<br>36. Kegagalan Pembangunan Karakter Bangsa<br>37. Terjadinya Fragmentasi Sosial<br>38. Keterbatasan Ruang Ekspresi Budaya Lokal<br>39. Punahnya Tradisi dan Warisan Budaya<br>40. Menurunnya Rasa Bangga terhadap Budaya Sendiri<br>41. Terhambatnya Potensi Ekonomi Kreatif Daerah<br>42. Kesempatan Anak Muda Berkarya secara Lokal Menyempit<br>43. Kesenjangan Budaya antara Kota dan Desa<br>44. Tergerusnya Modal Sosial dan Nilai Kolektif<br>45. Menurunnya Inovasi Budaya Lokal<br>46. Penguasaan Budaya Lokal oleh Pihak Eksternal<br>47. Kurangnya Kepedulian terhadap Masalah Bersama<br>48. Gotong Royong dan Partisipasi Sosial Menurun<br>49. Mudah Terjadi Konflik Sosial<br>50. Lemahnya Dukungan terhadap Program Pemerintah<br>51. Pembangunan Daerah Tidak Berkelanjutan<br>52. Rendahnya Resiliensi Komunitas terhadap Krisis<br>53. Kesulitan Membangun Nilai Karakter Bangsa<br>54. Lingkungan Sosial Menjadi Cuek dan Renggang<br>55. Tingkat Pelanggaran Hukum dan Norma Sosial Meningkat<br>56. Menurunnya Kepercayaan Publik |

| NO. | RISIKO PRIORITAS | KODE RISIKO | SKALA RISIKO | PEMILIK RESIKO | PENYEBAB | DAMPAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 57. Terbentuknya Budaya Negatif di Lingkungan Kerja dan Masyarakat<br>58. Rendahnya Disiplin dan Moral Aparatur<br>59. Erosi Nilai-Nilai Etika dalam Pelayanan Publik<br>60. Pendidikan Karakter Gagal Terbentuk<br>61. Terhambatnya Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan Bersih<br>62. Masyarakat Kehilangan Panutan<br>63. Meningkatnya Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum<br>64. Kualitas Kepemimpinan Regeneratif Menurun<br>65. Program dan Kebijakan Menjadi Terfragmentasi<br>66. Pencapaian Tujuan Pembangunan Tidak Maksimal<br>67. Inefisiensi Anggaran dan Sumber Daya<br>68. Data dan Informasi Tidak Terintegrasi<br>69. Lambatnya Respon terhadap Isu atau Krisis<br>70. Turunnya Inovasi dan Solusi Kreatif<br>71. Pelayanan Publik Menjadi Tidak Terpadu<br>72. Gagalnya Implementasi Kebijakan Berskala Luas<br>73. Lemahnya Dukungan Sosial dan Politik terhadap Program<br>74. Terhambatnya Perkembangan Karakter Anak dan Remaja<br>75. Rendahnya Motivasi Belajar dan Berkarya<br>76. Meningkatnya Perilaku Menyimpang dan Kriminalitas<br>77. Sulitnya Mewujudkan Ketertiban dan Keamanan Sosial<br>78. Minimnya Dukungan terhadap Pelaksanaan Program Pembangunan<br>79. Menurunnya Solidaritas dan Rasa Kebersamaan<br>80. Tingginya Stres Sosial dan Kesehatan Mental yang Terganggu<br>81. Kualitas Hidup Masyarakat Menurun<br>82. Tertutupnya Ruang untuk Partisipasi dan Aspirasi Publik |

**Tabel L2.30** Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang ada dan masih Dibutuhkan Tujuan 4 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

| | | |
|---|---|---|
| Nama Pemda | : | Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat |
| Tahun Penilaian | : | Tahun 2025 - 2029 |

| NO. | RISIKO PRIORITAS | KODE RISIKO | URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA | CELAH PENGENDALIAN | RENCANA TINDAK PENGENDALIAN | PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB | TARGET WAKTU PENYELESAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tidak diterapkannya nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat secara optimal | RPP: 4.1.1.1 | 1. Adanya Perwako Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal<br>2. Pencanangan Pembiasaan Sehari Berbudaya Minang Kabau Di Sekolah<br>3. Bimtek Pendidikan Inklusi Bagi Guru SD dan SMP | Pelaksanaan belum optimal | Penyusunan Perwako Rencana Aksi Daerah | Sekretaris Daerah | 2025-2026 |

**Tabel L2.31** Rencana Pengkomunikasian atas Kegiatan Pengendalian Prioritas yang Dibangun pada Tujuan 4 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

| | | |
|---|---|---|
| Nama Pemda | : | Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat |
| Tahun Penilaian | : | Tahun 2025 - 2029 |

| NO. | KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN | MEDIA/ BENTUK SARANA PENGKOMUNIKASIAN | PENYEDIA INFORMASI | PENERIMA INFORMASI | RENCANA WAKTU PELAKSANAAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Penyusunan Perwako Rencana Aksi Daerah Integrasi nilai-nilai agama dan budaya | Dokumen Kajian | Sekretaris Daerah | Kepala Dinas Pendidikan | Triwulan I – Tahun 2026 | |

**Tabel L2.32** Rencana Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Prioritas yang Dibangun pada Tujuan 4 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

| | | |
|---|---|---|
| Nama Pemda | : | Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat |
| Tahun Penilaian | : | Tahun 2025 - 2029 |

| NO. | KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN | BENTUK/ METODE PEMANTAUAN YANG DIPERLUKAN | PENANGGUNG JAWAB PEMANTAUAN | RENCANA WAKTU PEMANTAUAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Penyusunan Perwako Rencana Aksi Daerah Integrasi nilai-nilai agama dan budaya | Risk Control Self-Assessment (RCSA) | Sekretaris Daerah | Triwulan II – Tahun 2026 | Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan |

## 5. MANAJEMEN RISIKO TUJUAN DAN SASARAN MISI 5

**Tabel L2.33** Penetapan Konteks Risiko Strategis Misi 5 Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

| PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS | | | |
|---|---|---|---|
| **MISI 5** MEWUJUDKAN SARANA PERKOTAAN YANG HUMANIS RAMAH LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN | | | |
| Nama Pemda | : | Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat | |
| Periode yang dinilai | : | Tahun 2025 - 2029 | |
| Visi | : | Payakumbuh Maju Bermartabat Melalui Pemberdayaan, Pengembangan Kualitas Pendidikan, Dan Sentra Umkm Yang Kompetitif | |
| Tujuan Strategis RPJMD | : | Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan | |
| Indikator Kinerja Tujuan RPJMD | : | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | |
| Sasaran Strategis RPJMD | : | 5.1.1 | Meningkatnya Resiliensi Bencana dan kualitas lingkungan hidup |
| | | 5.1.2 | Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas |
| Indikator Kinerja Sasaran RPJMD | : | 5.1.1.a | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) |
| | | 5.1.2.a | Indeks Infrastruktur |
| Urusan Pemerintah Daerah | : | 1. Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang<br>2. Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar: Perumahan dan Pemukiman<br>3. Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar: Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat<br>4. Urusan Pemerintah Wajib Non-Pelayanan Dasar: Lingkungan Hidup<br>5. Urusan Pemerintah Wajib Non-Pelayanan Dasar: Perhubungan | |
| Program Pembangunan | : | 1.1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)<br>1.2 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum<br>1.3 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional<br>1.4 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah<br>1.5 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase<br>1.6 Program Penataan Bangunan Gedung<br>1.7 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya<br>1.8 Program Penyelenggaraan Jalan | |

| | | |
|---|---|---|
| | | 1.9 Program Pengembangan Jasa Konstruksi<br>1.10 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang<br>2.1 Program Pengembangan Perumahan<br>2.2 Program Kawasan Permukiman<br>2.3 Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh<br>2.4 Program Peningatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)<br>2.5 Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman<br>3.1 Program Penanggulangan Bencana<br>4.1 Program Perencanaan Lingkungan Hidup<br>4.2 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup<br>4.3 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)<br>4.4 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)<br>4.5 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)<br>4.6 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat<br>4.7 Program Penghargaan Lingkungan Hudup Untuk Masyarakat<br>4.8 Program Pengelolaan Persampahan<br>5.1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) |
| Perangkat Daerah Terkait | : | 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang<br>2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman<br>3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah<br>4. Dinas Lingkungan Hidup<br>5. Dinas Perhubungan |

**Tabel L2.34** Identifikasi Risiko Strategis Misi 5 Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U/C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| **Tujuan 5.1** Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | | | | | | | | |
| **Sasaran 5.1.1** Meningkatnya Resiliensi Bencana dan kualitas lingkungan hidup | Indeks Risiko Bencana (IRBI)<br>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup<br>Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) | Menurunnya Resiliensi Bencana dan Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup | RPP: 5.1.1.1 | Kepala Daerah | Alih Fungsi Lahan yang Tidak Terkendali | Internal | C | Meningkatkan Risiko Banjir dan Longsor | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Memperluas Dampak Kekeringan dan Krisis Air | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Meningkatkan Paparan Risiko Bencana di Wilayah Terbangun | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Degradasi Ekosistem dan Kehilangan Keanekaragaman Hayati | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Penurunan Kualitas Udara dan Suhu Mikroklimat Meningkat | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Pencemaran Air dan Tanah | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Berubahnya Fungsi Lahan secara Irreversibel | Kota Payakumbuh |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | | | | Berkurangnya Ruang untuk Pengelolaan Sampah | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Penumpukan Sampah di Wilayah Perkotaan | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Pencemaran dari Sampah yang Tidak Terkelola | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Meningkatkan Risiko Kesehatan Masyarakat | Kota Payakumbuh |
| | | | | | Minimnya Edukasi dan Kesadaran Lingkungan | Internal | C | Kerusakan Lingkungan Semakin Parah | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Meningkatnya Risiko Bencana Alam | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Ancaman terhadap Kesehatan Masyarakat | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Menurunnya Kualitas Hidup di Perkotaan dan Pedesaan | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Gagalnya Program Pelestarian Lingkungan | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Generasi Muda Tidak Peduli terhadap Lingkungan | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Pembangunan Berkelanjutan Terhambat | Kota Payakumbuh |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | | | | Kontribusi terhadap Perubahan Iklim | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Terbentuknya Kawasan Kumuh dan Tidak Tertata | Kota Payakumbuh |
| | | | | | Pola Pembangunan yang Tidak Berwawasan Lingkungan | Internal | C | Meningkatnya Risiko dan Frekuensi Bencana Alam | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Berkurangnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Hilangnya Keanekaragaman Hayati | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Kualitas Hidup dan Kesehatan Masyarakat Menurun | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Kontribusi terhadap Perubahan Iklim | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Terbentuknya Kawasan Permukiman Kumuh dan Tidak Layak Huni | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Masalah Persampahan dan Limbah Meningkat | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Biaya Pemulihan dan Rehabilitasi Lingkungan Tinggi | Kota Payakumbuh |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | | | | Ketimpangan Sosial dan Konflik Agraria | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Gagalnya Pembangunan Berkelanjutan | Kota Payakumbuh |
| | | | | | Kurangnya Investasi dalam Sistem Mitigasi Bencana | Internal | C | Meningkatnya Jumlah Korban Jiwa dan Kerugian Harta | Masyarakat |
| | | | | | | | | Kerusakan Infrastruktur Publik dan Aset Ekonomi | Masyarakat |
| | | | | | | | | Keterlambatan dan Ketidaksiapan dalam Tanggap Darurat | Masyarakat |
| | | | | | | | | Biaya Penanganan Pascabencana Lebih Besar | Masyarakat |
| | | | | | | | | Rendahnya Kapasitas dan Kesiapsiagaan Masyarakat | Masyarakat |
| | | | | | | | | Pembangunan Tidak Berkelanjutan | Masyarakat |
| | | | | | | | | Iklim Investasi Daerah Melemah | Masyarakat |
| | | | | | | | | Turunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah | Masyarakat |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | | | | Kelompok Rentan Terdampak Lebih Parah | Masyarakat |
| | | | | | | | | Ketahanan Wilayah terhadap Perubahan Iklim Melemah | Masyarakat |
| | | | | | Perubahan Iklim Global | Eksternal | UC | Peningkatan Suhu Bumi (Pemanasan Global) | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Meningkatnya Frekuensi dan Intensitas Bencana Alam | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Penurunan Produktivitas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Krisis Air Bersih | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Meningkatnya Risiko Kesehatan Masyarakat | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Hilangnya Keanekaragaman Hayati | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Migrasi dan Konflik Sosial | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Kerugian Ekonomi yang Signifikan | Kota Payakumbuh |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | | | | Peningkatan Beban Pemerintah dan Penurunan Ketahanan Daerah | Kota Payakumbuh |
| | | | | | Lemahnya Penegakan Hukum Lingkungan | Internal | C | Kerusakan Lingkungan Semakin Meluas | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Peningkatan Pencemaran | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Meningkatnya Risiko Bencana Lingkungan | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Kesenjangan Sosial dan Ketidakadilan Lingkungan | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Merusak Iklim Investasi Berkelanjutan | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Aparat dan Pemerintah | PD |
| | | | | | | | | Hilangnya Keanekaragaman Hayati | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Gagalnya Target-target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) | PD |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | | | | Terjadinya Siklus Kerusakan dan Impunitas | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Melemahkan Efektivitas Kebijakan dan Program Lingkungan | Kota Payakumbuh |
| | | | | | Kurangnya Kolaborasi Antar-Lembaga | Eksternal | C | Koordinasi tanggap darurat lambat dan tidak terorganisir | PD |
| | | | | | | | | Data dan informasi risiko bencana tidak terintegrasi | PD |
| | | | | | | | | Simulasi dan edukasi kebencanaan tidak merata | PD |
| | | | | | | | | Simulasi dan edukasi kebencanaan tidak merata | PD |
| | | | | | | | | Penegakan hukum lingkungan lemah | PD |
| | | | | | | | | Pengawasan kawasan lindung atau rawan bencana ekologis tidak berjalan efektif | PD |
| | | | | | | | | Sistem pengelolaan sampah tidak terpadu dari hulu ke hilir | PD |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | | | | Infrastruktur pengolahan sampah mandek | PD |
| | | | | | | | | Partisipasi masyarakat rendah | PD |
| | | | | | Keterbatasan Anggaran dan Kapasitas Daerah | Internal | C | Tidak tersedianya sistem peringatan dini (early warning system) | PD |
| | | | | | | | | Kurangnya infrastruktur mitigasi bencana | PD |
| | | | | | | | | Minimnya edukasi dan simulasi kebencanaan | PD |
| | | | | | | | | Respon darurat yang lambat dan tidak terkoordinasi | PD |
| | | | | | | | | Gagalnya program konservasi dan rehabilitasi lingkungan | PD |
| | | | | | | | | Tidak efektifnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan | PD |
| | | | | | | | | Tidak optimalnya integrasi isu lingkungan dalam perencanaan pembangunan | PD |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U/C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | | | | Minim inovasi dan teknologi hijau | PD |
| | | | | | | | | Terbatasnya armada dan fasilitas pengangkut sampah | PD |
| | | | | | | | | TPA penuh dan tidak memenuhi standar sanitasi | PD |
| | | | | | | | | Tidak tersedianya program pengelolaan sampah terpadu (reduce, reuse, recycle) | PD |
| | | | | | | | | Rendahnya edukasi dan partisipasi masyarakat | PD |
| **Sasaran 5.1.2** Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur | Pembangunan infrastruktur yang tidak merata, tidak efektif dan tidak memenuhi standar | RPP: 5.1.2.1 | Kepala Daerah | Perencanaan yang Lemah dan Tidak Berbasis Data | Internal | C | Pembangunan Tidak Tepat Sasaran | PD |
| | | | | | | | | Rendahnya Efektivitas dan Efisiensi Anggaran | PD |
| | | | | | | | | Program Mudah Gagal atau Mangkrak | PD |
| | | | | | | | | Tidak Tercapainya Target Kinerja Daerah (Renstra/RPJMD) | PD |
| | | | | | | | | Gagal Mengantisipasi Risiko Bencana dan Lingkungan | PD |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | | | | Timbulnya Ketimpangan Antarwilayah | PD |
| | | | | | | | | Rendahnya Kepuasan dan Kepercayaan Masyarakat | PD |
| | | | | | | | | Program Sulit Diintegrasikan Antar-Sektor | PD |
| | | | | | | | | Infrastruktur Cepat Rusak dan Tidak Tahan Lama | PD |
| | | | | | | | | Tidak Berkelanjutan dan Tidak Ramah Lingkungan | PD |
| | | | | | Ketimpangan Alokasi Anggaran | Internal | C | Pembangunan Tidak Merata antar Wilayah | PD |
| | | | | | | | | Ketimpangan Sosial dan Ekonomi Semakin Melebar | PD |
| | | | | | | | | Infrastruktur Dasar Tidak Tersedia atau Tidak Layak | PD |
| | | | | | | | | Layanan Publik Berkualitas Rendah | PD |
| | | | | | | | | Menurunnya Kinerja Daerah Tertentu | PD |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | | | | Meningkatnya Potensi Konflik Sosial | PD |
| | | | | | | | | Isu Lingkungan dan Bencana Diabaikan | PD |
| | | | | | | | | Minimnya Program Pemberdayaan Masyarakat | PD |
| | | | | | | | | Program Pusat Tidak Relevan di Daerah | PD |
| | | | | | | | | Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah | PD |
| | | | | | Rendahnya Kapasitas SDM Teknis dan Perencana Daerah | Internal | C | Perencanaan Pembangunan Tidak Akurat dan Tidak Berbasis Data | PD |
| | | | | | | | | Infrastruktur Dibangun Tanpa Standar Teknis yang Memadai | PD |
| | | | | | | | | Rendahnya Efisiensi dan Efektivitas Anggaran | PD |
| | | | | | | | | Sering Terjadi Keterlambatan atau Kegagalan Proyek | PD |
| | | | | | | | | Gagal Menyusun Dokumen Perencanaan | PD |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | | | | Berkualitas (RKPD, Renstra, RPJMD) | |
| | | | | | | | | Minimnya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi | PD |
| | | | | | | | | Lemahnya Monitoring dan Evaluasi Program | PD |
| | | | | | | | | Tidak Mampu Menyusun Proposal Pendanaan Eksternal (DAK, Hibah, CSR) | PD |
| | | | | | | | | Meningkatnya Ketergantungan kepada Konsultan Eksternal | PD |
| | | | | | | | | Koordinasi Antar-Instansi Lemah | PD |
| | | | | | Minimnya Pengawasan dan Evaluasi Proyek | Internal | C | Kualitas Proyek Rendah dan Tidak Sesuai Spesifikasi | PD |
| | | | | | | | | Proyek Sering Terlambat atau Tidak Selesai Tepat Waktu | PD |
| | | | | | | | | Potensi Pemborosan dan Penyimpangan Anggaran Tinggi | PD |
| | | | | | | | | Gagal Mencapai Tujuan dan Manfaat Proyek | PD |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | | | | Tingginya Risiko Penyimpangan dan Korupsi | PD |
| | | | | | | | | Tidak Ada Perbaikan Berkelanjutan (Continuous Improvement) | PD |
| | | | | | | | | Rendahnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah | PD |
| | | | | | | | | Inefisiensi Anggaran | PD |
| | | | | | | | | Tidak Terjaminnya Keamanan dan Keselamatan Publik | PD |
| | | | | | | | | Tumpang Tindih Program dan Duplikasi Proyek | PD |
| | | | | | | | | Tidak Tersedianya Data dan Bukti untuk Pengambilan Keputusan | PD |
| | | | | | Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) | Eksternal | C | Infrastruktur Dibangun Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Penunjukan Kontraktor karena Nepotisme, Bukan Kompetensi | Kota Payakumbuh |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | | | | Pembangunan Tidak Merata karena Motif Politik dan Koneksi | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Proyek Mangkrak karena Dana Bocor di Tengah Jalan | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Tidak Ada Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Prioritas Pembangunan Ditentukan oleh Kepentingan Pribadi/Politik | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Menurunnya Efisiensi dan Daya Guna Infrastruktur | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Tidak Ada Pemeliharaan Berkelanjutan | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Citra Pemerintah Daerah Tercoreng | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Target Pembangunan Nasional dan Daerah Tidak Tercapai | Kota Payakumbuh |
| | | | | | Kurangnya Partisipasi | Eksternal | C | Infrastruktur Tidak Sesuai Kebutuhan Nyata | Kota Payakumbuh |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/UC | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | Masyarakat dan Stakeholder | | | Rendahnya Kualitas dan Keberlanjutan Proyek | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Ketimpangan dan Ketidakadilan Pembangunan Antarwilayah | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Minimnya Rasa Kepemilikan (Sense of Belonging) | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Tingginya Potensi Penolakan Proyek | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Tidak Adanya Masukan untuk Perbaikan atau Inovasi | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Pemerintah Daerah Kehilangan Legitimasi | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Lemahnya Kolaborasi dan Dukungan Antar-Pihak | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Evaluasi dan Pengawasan Kurang Akurat | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Infrastruktur Tidak Memenuhi Standar Sosial dan Budaya Lokal | Kota Payakumbuh |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/UC | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | Ketergantungan Tinggi pada Pemerintah Pusat | Internal | UC | Pembangunan Tidak Merata antar Daerah | Masyarakat |
| | | | | | | | | Terhambatnya Inisiatif dan Inovasi Daerah | Masyarakat |
| | | | | | | | | Tidak Sesuainya Proyek dengan Kebutuhan Lokal | Masyarakat |
| | | | | | | | | Rendahnya Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Daerah | Masyarakat |
| | | | | | | | | Lemahnya Kapasitas dan Kemandirian Pemerintah Daerah | Masyarakat |
| | | | | | | | | Proses Perencanaan Terpusat dan Kurang Partisipatif | Masyarakat |
| | | | | | | | | Lambatnya Respons terhadap Kebutuhan Mendesak | Masyarakat |
| | | | | | | | | Banyak Proyek Infrastruktur Tidak Terpelihara | Masyarakat |
| | | | | | | | | Evaluasi dan Pengawasan Terbagi, Kurang Efektif | Masyarakat |
| | | | | | | | | Melemahkan Semangat Otonomi Daerah | Masyarakat |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | Tidak Tersedianya Standar Pelayanan Infrastruktur yang Jelas | Internal | C | Kualitas Infrastruktur Tidak Konsisten | Masyarakat |
| | | | | | | | | Tidak Efektif dalam Menjawab Kebutuhan Masyarakat | Masyarakat |
| | | | | | | | | Inefisiensi Penggunaan Anggaran | Masyarakat |
| | | | | | | | | Ketimpangan Pelayanan Antarwilayah | Masyarakat |
| | | | | | | | | Banyak Infrastruktur Cepat Rusak dan Tidak Tahan Lama | Masyarakat |
| | | | | | | | | Sulitnya Pengawasan dan Evaluasi | Masyarakat |
| | | | | | | | | Rendahnya Akuntabilitas Pelaksana Proyek | Masyarakat |
| | | | | | | | | Masyarakat Bingung dan Tidak Dapat Mengontrol | Masyarakat |
| | | | | | | | | Pembangunan Infrastruktur Bersifat Asal Jadi | Masyarakat |
| | | | | | | | | Sulitnya Replikasi dan Perbaikan | Masyarakat |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | Pola Pembangunan yang Tidak Berkelanjutan | Internal | C | Infrastruktur Cepat Rusak dan Tidak Tahan Lama | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Efektivitas Penggunaan Anggaran Rendah | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Ketimpangan Pembangunan antar Wilayah | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Infrastruktur Tidak Sesuai Kebutuhan Masa Depan | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Merusak Lingkungan dan Ekosistem | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Proyek Gagal atau Tidak Digunakan Masyarakat | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Tidak Adanya Standarisasi dan Perencanaan Jangka Panjang | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Menambah Risiko Bencana dan Kerentanan Sosial | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Tinggi | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Gagal Mendukung Pencapaian Tujuan | Kota Payakumbuh |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | | | | Pembangunan Jangka Panjang | |
| | | | | | Konflik Kepentingan dan Politik Anggaran | Eksternal | UC | Pembangunan Tidak Berdasarkan Kebutuhan Nyata | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Pemborosan dan Duplikasi Proyek | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Kualitas Infrastruktur Rendah | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Proses Penganggaran Lambat dan Tidak Fokus | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Infrastruktur Mangkrak atau Tidak Tuntas | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Fragmentasi Program dan Lemahnya Integrasi Pembangunan | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Sulit Dievaluasi Secara Objektif | Kota Payakumbuh |
| | | | | | | | | Meningkatkan Risiko KKN | Kota Payakumbuh |

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | RISIKO | | | SEBAB | | C/U C | DAMPAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | KODE RISIKO | PEMILIK | URAIAN | SUMBER | | URAIAN | PIHAK TERKENA |
| | | | | | | | | Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah | Kota Payakumbuh |

**Tabel L2.35** Analisis Risiko Strategis Tujuan 5 Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

| | | |
|---|---|---|
| Nama Pemda | : | Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat |
| Tahun Penilaian | : | Tahun 2025 - 2029 |
| Tujuan Strategis RPJMD | : | Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan |

| NO. | RISIKO TERIDENTIFIKASI | KODE RISIKO | ANALISIS RISIKO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SKALA DAMPAK | SKALA KEMUNGKINAN | SKALA RISIKO |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(4)x(5) |
| 1. | Menurunnya Resiliensi Bencana dan Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup | RPP: 5.1.1.1 | 5 | 4 | 20 |
| 2 | Pembangunan infrastruktur yang tidak merata, tidak efektif dan tidak memenuhi standar | RPP: 5.1.2.1 | 5 | 4 | 20 |

**Tabel L2.36** Matriks Hasil Analisis Risiko Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

| MATRIKS ANALISIS RISIKO | | | DAMPAK/KONSEKUENSI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TIDAK SIGNIFIKAN | KECIL | SEDANG | BESAR | SIGNIFIKAN |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO | HAMPIR PASTI | 5 | | | | | |
| | KEMUNGKINAN BESAR | 4 | | | | | RPP: 5.1.1.1<br>RPP: 5.1.2.1 |
| | MUNGKIN | 3 | | | | | |
| | KEMUNGKINAN KECIL | 2 | | | | | |
| | SANGAT JARANG | 1 | | | | | |
| KETERANGAN | | | SANGAT RENDAH | RENDAH | SEDANG/ MEDIUM | TINGGI | SANGAT TINGGI |

**Tabel L2.37** Daftar Risiko Prioritas Tujuan 5 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

| | | |
|---|---|---|
| Nama Pemda | : | Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat |
| Tahun Penilaian | : | Tahun 2025 - 2029 |

| NO. | RISIKO PRIORITAS | KODE RISIKO | SKALA RISIKO | PEMILIK RESIKO | PENYEBAB | DAMPAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Menurunnya Resiliensi Bencana dan Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup | RPP: 5.1.1.1 | 20 | Kepala Daerah | 1. Alih Fungsi Lahan yang Tidak Terkendali<br>2. Minimnya Edukasi dan Kesadaran Lingkungan<br>3. Pola Pembangunan yang Tidak Berwawasan Lingkungan<br>4. Kurangnya Investasi dalam Sistem Mitigasi Bencana<br>5. Perubahan Iklim Global<br>6. Lemahnya Penegakan Hukum Lingkungan<br>7. Kurangnya Kolaborasi Antar-Lembaga<br>8. Keterbatasan Anggaran dan Kapasitas Daerah | 1. Meningkatkan Risiko Banjir dan Longsor<br>2. Memperluas Dampak Kekeringan dan Krisis Air<br>3. Meningkatkan Paparan Risiko Bencana di Wilayah Terbangun<br>4. Degradasi Ekosistem dan Kehilangan Keanekaragaman Hayati<br>5. Penurunan Kualitas Udara dan Suhu Mikroklimat Meningkat<br>6. Pencemaran Air dan Tanah<br>7. Berubahnya Fungsi Lahan secara Irreversibel<br>8. Berkurangnya Ruang untuk Pengelolaan Sampah<br>9. Penumpukan Sampah di Wilayah Perkotaan<br>10. Pencemaran dari Sampah yang Tidak Terkelola<br>11. Meningkatkan Risiko Kesehatan Masyarakat<br>12. Kerusakan Lingkungan Semakin Parah<br>13. Meningkatnya Risiko Bencana Alam<br>14. Ancaman terhadap Kesehatan Masyarakat<br>15. Menurunnya Kualitas Hidup di Perkotaan dan Pedesaan<br>16. Gagalnya Program Pelestarian Lingkungan<br>17. Generasi Muda Tidak Peduli terhadap Lingkungan<br>18. Pembangunan Berkelanjutan Terhambat<br>19. Kontribusi terhadap Perubahan Iklim<br>20. Terbentuknya Kawasan Kumuh dan Tidak Tertata<br>21. Meningkatnya Risiko dan Frekuensi Bencana Alam<br>22. Berkurangnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan<br>23. Hilangnya Keanekaragaman Hayati |

| NO. | RISIKO PRIORITAS | KODE RISIKO | SKALA RISIKO | PEMILIK RESIKO | PENYEBAB | DAMPAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 24. Kualitas Hidup dan Kesehatan Masyarakat Menurun<br>25. Kontribusi terhadap Perubahan Iklim<br>26. Terbentuknya Kawasan Permukiman Kumuh dan Tidak Layak Huni<br>27. Masalah Persampahan dan Limbah Meningkat<br>28. Biaya Pemulihan dan Rehabilitasi Lingkungan Tinggi<br>29. Ketimpangan Sosial dan Konflik Agraria<br>30. Gagalnya Pembangunan Berkelanjutan<br>31. Meningkatnya Jumlah Korban Jiwa dan Kerugian Harta<br>32. Kerusakan Infrastruktur Publik dan Aset Ekonomi<br>33. Keterlambatan dan Ketidaksiapan dalam Tanggap Darurat<br>34. Biaya Penanganan Pascabencana Lebih Besar<br>35. Rendahnya Kapasitas dan Kesiapsiagaan Masyarakat<br>36. Pembangunan Tidak Berkelanjutan<br>37. Iklim Investasi Daerah Melemah<br>38. Turunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah<br>39. Kelompok Rentan Terdampak Lebih Parah<br>40. Ketahanan Wilayah terhadap Perubahan Iklim Melemah<br>41. Peningkatan Suhu Bumi (Pemanasan Global)<br>42. Meningkatnya Frekuensi dan Intensitas Bencana Alam<br>43. Penurunan Produktivitas Pertanian dan Ketahanan Pangan<br>44. Krisis Air Bersih<br>45. Meningkatnya Risiko Kesehatan Masyarakat<br>46. Hilangnya Keanekaragaman Hayati<br>47. Migrasi dan Konflik Sosial<br>48. Kerugian Ekonomi yang Signifikan<br>49. Peningkatan Beban Pemerintah dan Penurunan Ketahanan Daerah<br>50. Kerusakan Lingkungan Semakin Meluas<br>51. Peningkatan Pencemaran |

| NO. | RISIKO PRIORITAS | KODE RISIKO | SKALA RISIKO | PEMILIK RESIKO | PENYEBAB | DAMPAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 52. Meningkatnya Risiko Bencana Lingkungan<br>53. Kesenjangan Sosial dan Ketidakadilan Lingkungan<br>54. Merusak Iklim Investasi Berkelanjutan<br>55. Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Aparat dan Pemerintah<br>56. Hilangnya Keanekaragaman Hayati<br>57. Gagalnya Target-target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)<br>58. Terjadinya Siklus Kerusakan dan Impunitas<br>59. Melemahkan Efektivitas Kebijakan dan Program Lingkungan<br>60. Koordinasi tanggap darurat lambat dan tidak terorganisir<br>61. Data dan informasi risiko bencana tidak terintegrasi<br>62. Simulasi dan edukasi kebencanaan tidak merata<br>63. Simulasi dan edukasi kebencanaan tidak merata<br>64. Penegakan hukum lingkungan lemah<br>65. Pengawasan kawasan lindung atau rawan bencana ekologis tidak berjalan efektif<br>66. Sistem pengelolaan sampah tidak terpadu dari hulu ke hilir<br>67. Infrastruktur pengolahan sampah mandek<br>68. Partisipasi masyarakat rendah<br>69. Tidak tersedianya sistem peringatan dini (early warning system)<br>70. Kurangnya infrastruktur mitigasi bencana<br>71. Minimnya edukasi dan simulasi kebencanaan<br>72. Respon darurat yang lambat dan tidak terkoordinasi<br>73. Gagalnya program konservasi dan rehabilitasi lingkungan<br>74. Tidak efektifnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan<br>75. Tidak optimalnya integrasi isu lingkungan dalam perencanaan pembangunan<br>76. Minim inovasi dan teknologi hijau |

| NO. | RISIKO PRIORITAS | KODE RISIKO | SKALA RISIKO | PEMILIK RESIKO | PENYEBAB | DAMPAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 77. Terbatasnya armada dan fasilitas pengangkut sampah<br>78. TPA penuh dan tidak memenuhi standar sanitasi<br>79. Tidak tersedianya program pengelolaan sampah terpadu (reduce, reuse, recycle)<br>80. Rendahnya edukasi dan partisipasi masyarakat |
| 2. | Pembangunan infrastruktur yang tidak merata, tidak efektif dan tidak memenuhi standar | RPP: 5.1.2.1 | 20 | Kepala Daerah | 1. Perencanaan yang Lemah dan Tidak Berbasis Data<br>2. Ketimpangan Alokasi Anggaran<br>3. Rendahnya Kapasitas SDM Teknis dan Perencana Daerah<br>4. Minimnya Pengawasan dan Evaluasi Proyek<br>5. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)<br>6. Kurangnya Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder<br>7. Ketergantungan Tinggi pada Pemerintah Pusat<br>8. Tidak Tersedianya Standar Pelayanan Infrastruktur yang Jelas<br>9. Pola Pembangunan yang Tidak Berkelanjutan<br>10. Konflik Kepentingan dan Politik Anggaran | 1. Pembangunan Tidak Tepat Sasaran<br>2. Rendahnya Efektivitas dan Efisiensi Anggaran<br>3. Program Mudah Gagal atau Mangkrak<br>4. Tidak Tercapainya Target Kinerja Daerah (Renstra/RPJMD)<br>5. Gagal Mengantisipasi Risiko Bencana dan Lingkungan<br>6. Timbulnya Ketimpangan Antarwilayah<br>7. Rendahnya Kepuasan dan Kepercayaan Masyarakat<br>8. Program Sulit Diintegrasikan Antar-Sektor<br>9. Infrastruktur Cepat Rusak dan Tidak Tahan Lama<br>10. Tidak Berkelanjutan dan Tidak Ramah Lingkungan<br>11. Pembangunan Tidak Merata antar Wilayah<br>12. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi Semakin Melebar<br>13. Infrastruktur Dasar Tidak Tersedia atau Tidak Layak<br>14. Layanan Publik Berkualitas Rendah<br>15. Menurunnya Kinerja Daerah Tertentu<br>16. Meningkatnya Potensi Konflik Sosial<br>17. Isu Lingkungan dan Bencana Diabaikan<br>18. Minimnya Program Pemberdayaan Masyarakat<br>19. Program Pusat Tidak Relevan di Daerah<br>20. Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah<br>21. Perencanaan Pembangunan Tidak Akurat dan Tidak Berbasis Data<br>22. Infrastruktur Dibangun Tanpa Standar Teknis yang Memadai<br>23. Rendahnya Efisiensi dan Efektivitas Anggaran<br>24. Sering Terjadi Keterlambatan atau Kegagalan Proyek |

| NO. | RISIKO PRIORITAS | KODE RISIKO | SKALA RISIKO | PEMILIK RESIKO | PENYEBAB | DAMPAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 25. Gagal Menyusun Dokumen Perencanaan Berkualitas (RKPD, Renstra, RPJMD)<br>26. Minimnya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi<br>27. Lemahnya Monitoring dan Evaluasi Program<br>28. Tidak Mampu Menyusun Proposal Pendanaan Eksternal (DAK, Hibah, CSR)<br>29. Meningkatnya Ketergantungan kepada Konsultan Eksternal<br>30. Koordinasi Antar-Instansi Lemah<br>31. Kualitas Proyek Rendah dan Tidak Sesuai Spesifikasi<br>32. Proyek Sering Terlambat atau Tidak Selesai Tepat Waktu<br>33. Potensi Pemborosan dan Penyimpangan Anggaran Tinggi<br>34. Gagal Mencapai Tujuan dan Manfaat Proyek<br>35. Tingginya Risiko Penyimpangan dan Korupsi<br>36. Tidak Ada Perbaikan Berkelanjutan (Continuous Improvement)<br>37. Rendahnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah<br>38. Inefisiensi Anggaran<br>39. Tidak Terjaminnya Keamanan dan Keselamatan Publik<br>40. Tumpang Tindih Program dan Duplikasi Proyek<br>41. Tidak Tersedianya Data dan Bukti untuk Pengambilan Keputusan<br>42. Infrastruktur Dibangun Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis<br>43. Penunjukan Kontraktor karena Nepotisme, Bukan Kompetensi<br>44. Pembangunan Tidak Merata karena Motif Politik dan Koneksi<br>45. Proyek Mangkrak karena Dana Bocor di Tengah Jalan<br>46. Tidak Ada Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan<br>47. Prioritas Pembangunan Ditentukan oleh Kepentingan Pribadi/Politik<br>48. Menurunnya Efisiensi dan Daya Guna Infrastruktur<br>49. Tidak Ada Pemeliharaan Berkelanjutan |

| NO. | RISIKO PRIORITAS | KODE RISIKO | SKALA RISIKO | PEMILIK RESIKO | PENYEBAB | DAMPAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 50. Citra Pemerintah Daerah Tercoreng<br>51. Target Pembangunan Nasional dan Daerah Tidak Tercapai<br>52. Infrastruktur Tidak Sesuai Kebutuhan Nyata<br>53. Rendahnya Kualitas dan Keberlanjutan Proyek<br>54. Ketimpangan dan Ketidakadilan Pembangunan Antarwilayah<br>55. Minimnya Rasa Kepemilikan (Sense of Belonging)<br>56. Tingginya Potensi Penolakan Proyek<br>57. Tidak Adanya Masukan untuk Perbaikan atau Inovasi<br>58. Pemerintah Daerah Kehilangan Legitimasi<br>59. Lemahnya Kolaborasi dan Dukungan Antar-Pihak<br>60. Evaluasi dan Pengawasan Kurang Akurat<br>61. Infrastruktur Tidak Memenuhi Standar Sosial dan Budaya Lokal<br>62. Pembangunan Tidak Merata antar Daerah<br>63. Terhambatnya Inisiatif dan Inovasi Daerah<br>64. Tidak Sesuainya Proyek dengan Kebutuhan Lokal<br>65. Rendahnya Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Daerah<br>66. Lemahnya Kapasitas dan Kemandirian Pemerintah Daerah<br>67. Proses Perencanaan Terpusat dan Kurang Partisipatif<br>68. Lambatnya Respons terhadap Kebutuhan Mendesak<br>69. Banyak Proyek Infrastruktur Tidak Terpelihara<br>70. Evaluasi dan Pengawasan Terbagi, Kurang Efektif<br>71. Melemahkan Semangat Otonomi Daerah<br>72. Kualitas Infrastruktur Tidak Konsisten<br>73. Tidak Efektif dalam Menjawab Kebutuhan Masyarakat<br>74. Inefisiensi Penggunaan Anggaran<br>75. Ketimpangan Pelayanan Antarwilayah<br>76. Banyak Infrastruktur Cepat Rusak dan Tidak Tahan Lama |

| NO. | RISIKO PRIORITAS | KODE RISIKO | SKALA RISIKO | PEMILIK RESIKO | PENYEBAB | DAMPAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 77. Sulitnya Pengawasan dan Evaluasi<br>78. Rendahnya Akuntabilitas Pelaksana Proyek<br>79. Masyarakat Bingung dan Tidak Dapat Mengontrol<br>80. Pembangunan Infrastruktur Bersifat Asal Jadi<br>81. Sulitnya Replikasi dan Perbaikan<br>82. Infrastruktur Cepat Rusak dan Tidak Tahan Lama<br>83. Efektivitas Penggunaan Anggaran Rendah<br>84. Ketimpangan Pembangunan antar Wilayah<br>85. Infrastruktur Tidak Sesuai Kebutuhan Masa Depan<br>86. Merusak Lingkungan dan Ekosistem<br>87. Proyek Gagal atau Tidak Digunakan Masyarakat<br>88. Tidak Adanya Standarisasi dan Perencanaan Jangka Panjang<br>89. Menambah Risiko Bencana dan Kerentanan Sosial<br>90. Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Tinggi<br>91. Gagal Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Jangka Panjang<br>92. Pembangunan Tidak Berdasarkan Kebutuhan Nyata<br>93. Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah<br>94. Pemborosan dan Duplikasi Proyek<br>95. Kualitas Infrastruktur Rendah<br>96. Proses Penganggaran Lambat dan Tidak Fokus<br>97. Infrastruktur Mangkrak atau Tidak Tuntas<br>98. Fragmentasi Program dan Lemahnya Integrasi Pembangunan<br>99. Sulit Dievaluasi Secara Objektif<br>100. Meningkatkan Risiko KKN<br>101. Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah |

**Tabel L2.38** Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang ada dan masih Dibutuhkan Tujuan 5 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

| | | |
|---|---|---|
| Nama Pemda | : | Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat |
| Tahun Penilaian | : | Tahun 2025 - 2029 |

| NO. | RISIKO PRIORITAS | KODE RISIKO | URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA | CELAH PENGENDALIAN | RENCANA TINDAK PENGENDALIAN | PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB | TARGET WAKTU PENYELESAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Menurunnya Resiliensi Bencana dan Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup | RPP: 5.1.1.1 | 1. Pembinaan Ke Sekolah Dalam Pengelolaan Sampah<br>2. Peningkatan Kapasitas Pengolahan Sampah Di TPS3R Koto Tangah Dan Mancang Labu<br>3. Peningkatan Kapasitas Rumah Magot | Belum Optimalnya pengelolaan Sampah | Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah secara komperhensif | Kepala Daerah | 2025-2026 |

| NO. | RISIKO PRIORITAS | KODE RISIKO | URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA | CELAH PENGENDALIAN | RENCANA TINDAK PENGENDALIAN | PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB | TARGET WAKTU PENYELESAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4. Proses Renovasi Bangunan Untuk Hangar TPST Dan Pengadaan Peralatan, Serta Penataan Kawasan TPST<br>5. Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Di TPS3R Koto Tangah<br>6. Kerjasama Dengan PT. Semen Padang Melalui Program Nabuang Sarok | | | | |
| | | | 5. Sosialisasi Dan Simulasi Mitigasi Bencana<br>6. Penanganan Bencana Banjir<br>7. Siaga Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan<br>8. Aksi Pengelolaan Risiko Bencana Berupa Penebangan Pohon Yang Sudah Tua Dan Lapuk | Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Bencana | Penyusunan Perwako Penanggulangan bencana | Sekretaris Daerah | 2025-2026 |
| 2. | Pembangunan infrastruktur yang tidak merata, tidak efektif dan tidak memenuhi standar | RPP: 5.1.2.1 | 1. Kebijakan pengelolaan jalan: Ruas Jalan Dapat Dilewati Sepanjang Tahun, Dan Zero Pothole (Jalan Bebas Lubang).<br>2. Kebijakan pengembangan jalan: Sudah Terhubung Semua Pusat-Pusat Kegiatan Dan Pemenuhan Jalan Kota Yang Sesuai Standar Konstruksi.<br>3. Pelaksanaan Rekonstruksi Jalan Dan Peningkatan | Keterbatasan anggaran untuk infrastruktur | Meningkatan koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur dengan pusat, dan provinsi | Kepala Daerah | 2025-2029 |

| NO. | RISIKO PRIORITAS | KODE RISIKO | URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA | CELAH PENGENDALIAN | RENCANA TINDAK PENGENDALIAN | PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB | TARGET WAKTU PENYELESAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kapasitas Jalan Dilakukan Dengan Sumber Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit<br>4. Penataan Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional Dan Kawasan Strategis Lainnya<br>5. Peningkatan Kontinuitas Pelayanan Infrastruktur 24 Jam Per-Hari<br>6. Optimalisasi Sumber Air Baku | | | | |

**Tabel L2.39** Rencana Pengkomunikasian atas Kegiatan Pengendalian Prioritas yang Dibangun pada Tujuan 5 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

| | | |
|---|---|---|
| Nama Pemda | : | Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat |
| Tahun Penilaian | : | Tahun 2025 - 2029 |

| NO. | KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN | MEDIA/ BENTUK SARANA PENGKOMUNIKASIAN | PENYEDIA INFORMASI | PENERIMA INFORMASI | RENCANA WAKTU PELAKSANAAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah secara komperhensif | Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah secara Komprehensif | Kepala Daerah | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | Triwulan I – Tahun 2026 | |
| 2. | Penyusunan Perwako Penanggulangan bencana | Pembentuk Surat Keputusan (SK) Wali Kota Payakumbuh tentang Sosialisasi Penanggulangan Bencana | Sekretaris Daerah | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Triwulan I – Tahun 2026 | |
| 3. | Meningkatan koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur dengan pusat, dan provinsi | Proposal dan Kerja Sama Daerah | Kepala Daerah | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Triwulan I – Tahun 2026 | Pemutakhiran dilanjutkan sampai 2029 |

**Tabel L2.40** Rencana Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Prioritas yang Dibangun pada Tujuan 5 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

| | | |
|---|---|---|
| Nama Pemda | : | Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat |
| Tahun Penilaian | : | Tahun 2025 - 2029 |

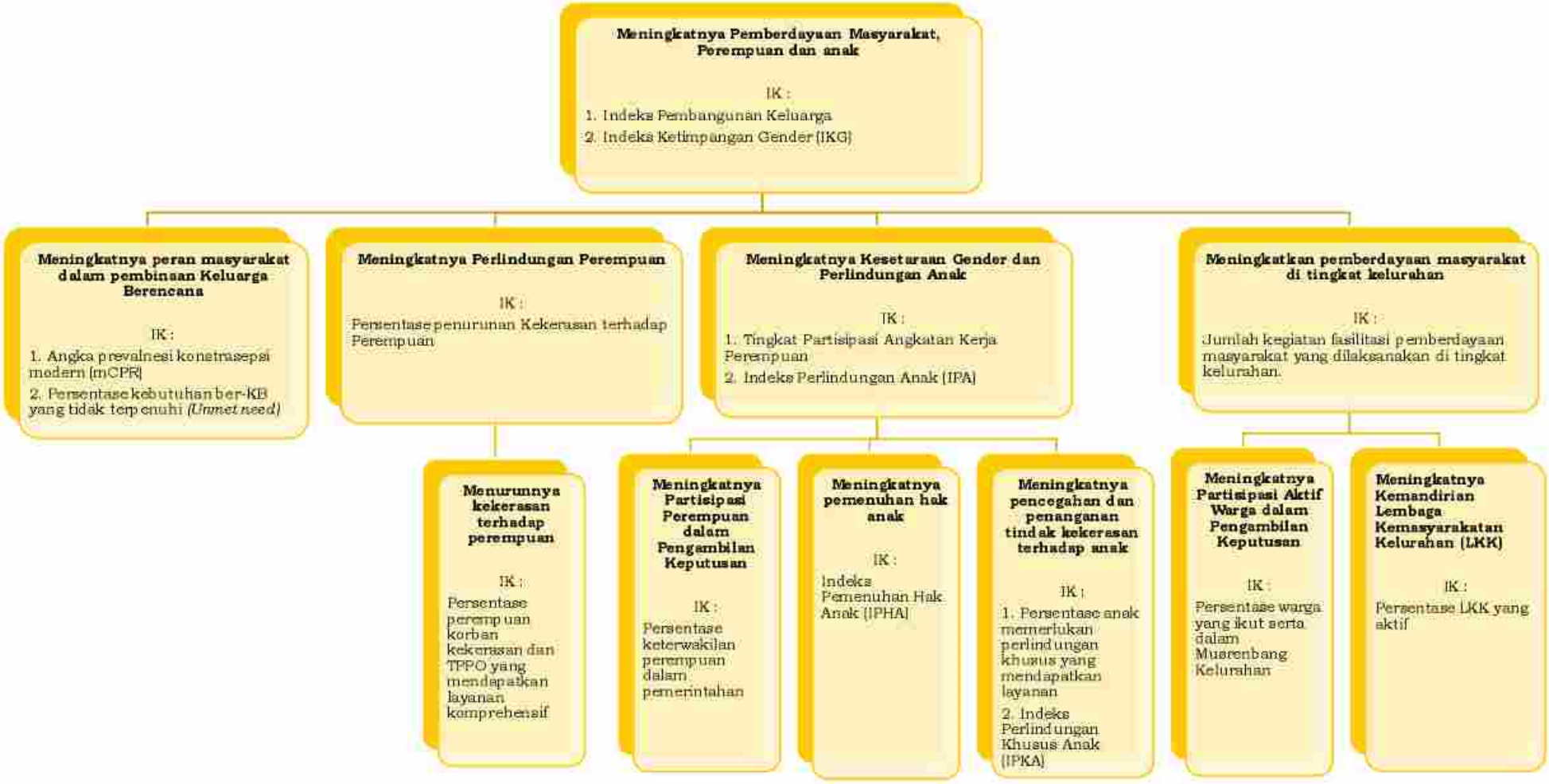
| NO. | KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN | BENTUK/ METODE PEMANTAUAN YANG DIPERLUKAN | PENANGGUNG JAWAB PEMANTAUAN | RENCANA WAKTU PEMANTAUAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah secara komperhensif | Risk Control Self-Assessment (RCSA) | Kepala Daerah | Triwulan II – Tahun 2026 | Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan |
| 2. | Penyusunan Perwako Penanggulangan bencana | Risk Control Self-Assessment (RCSA) | Sekretaris Daerah | Triwulan II – Tahun 2026 | Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan |
| 3. | Meningkatan koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur dengan pusat, dan provinsi | Risk Control Self-Assessment (RCSA) | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Triwulan II – Tahun 2026 | Pemantauan dilakukan Berkala Tahunan |

# LAMPIRAN 3
# POHON KINERJA
# PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

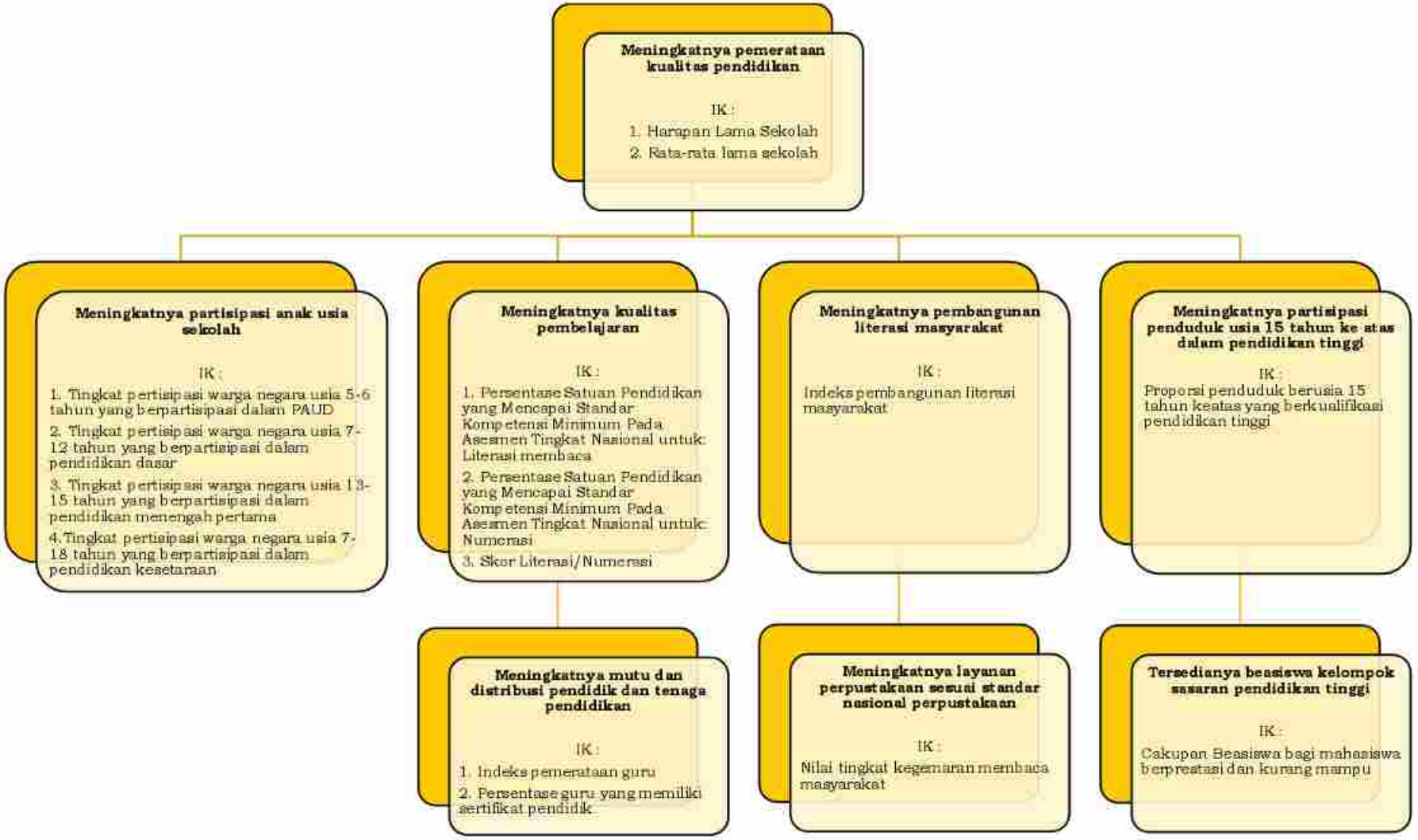
**Bagan L3.1** Pohon Kinerja 1 **Menurunkan Tingkat Kemiskinan**



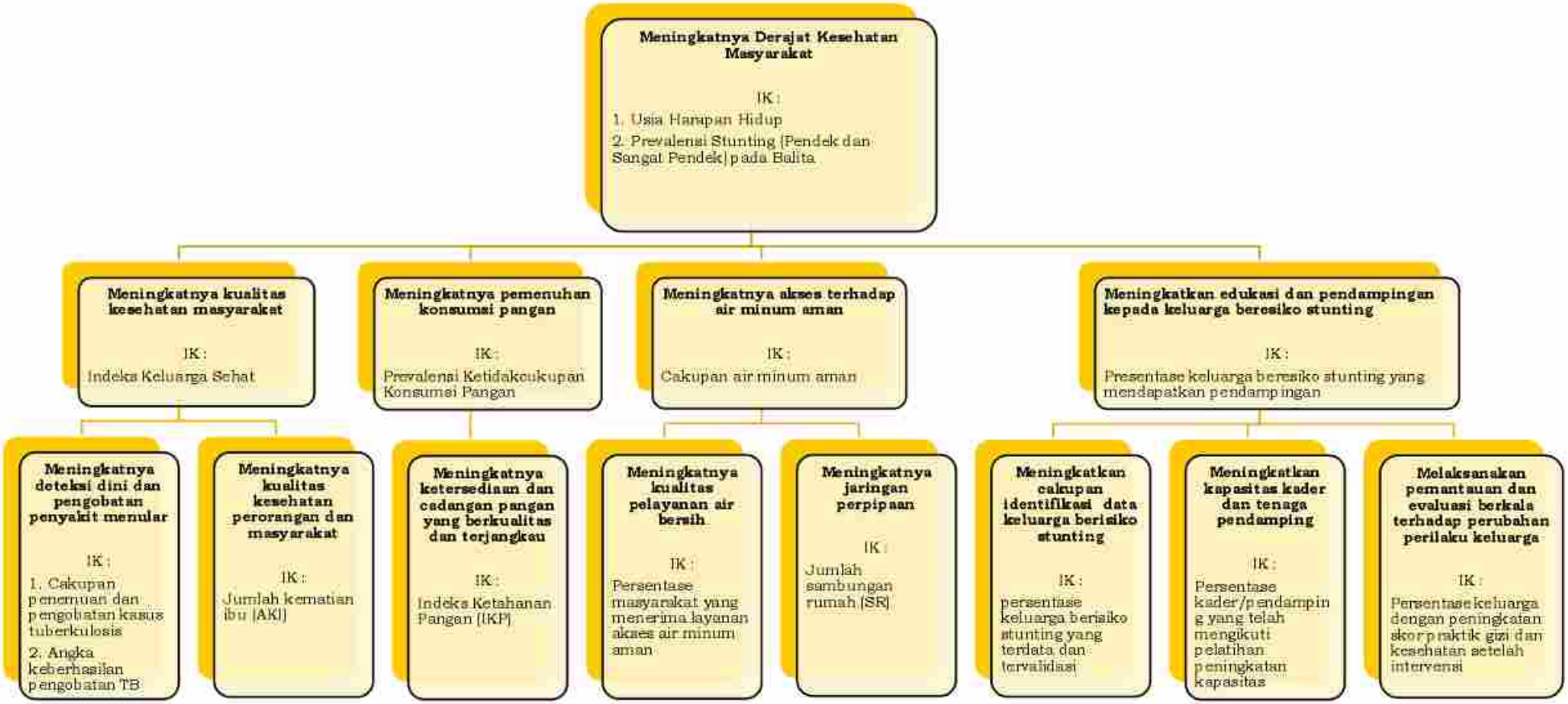
**Bagan L3.2** Pohon Kinerja 1.1 **Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan anak**



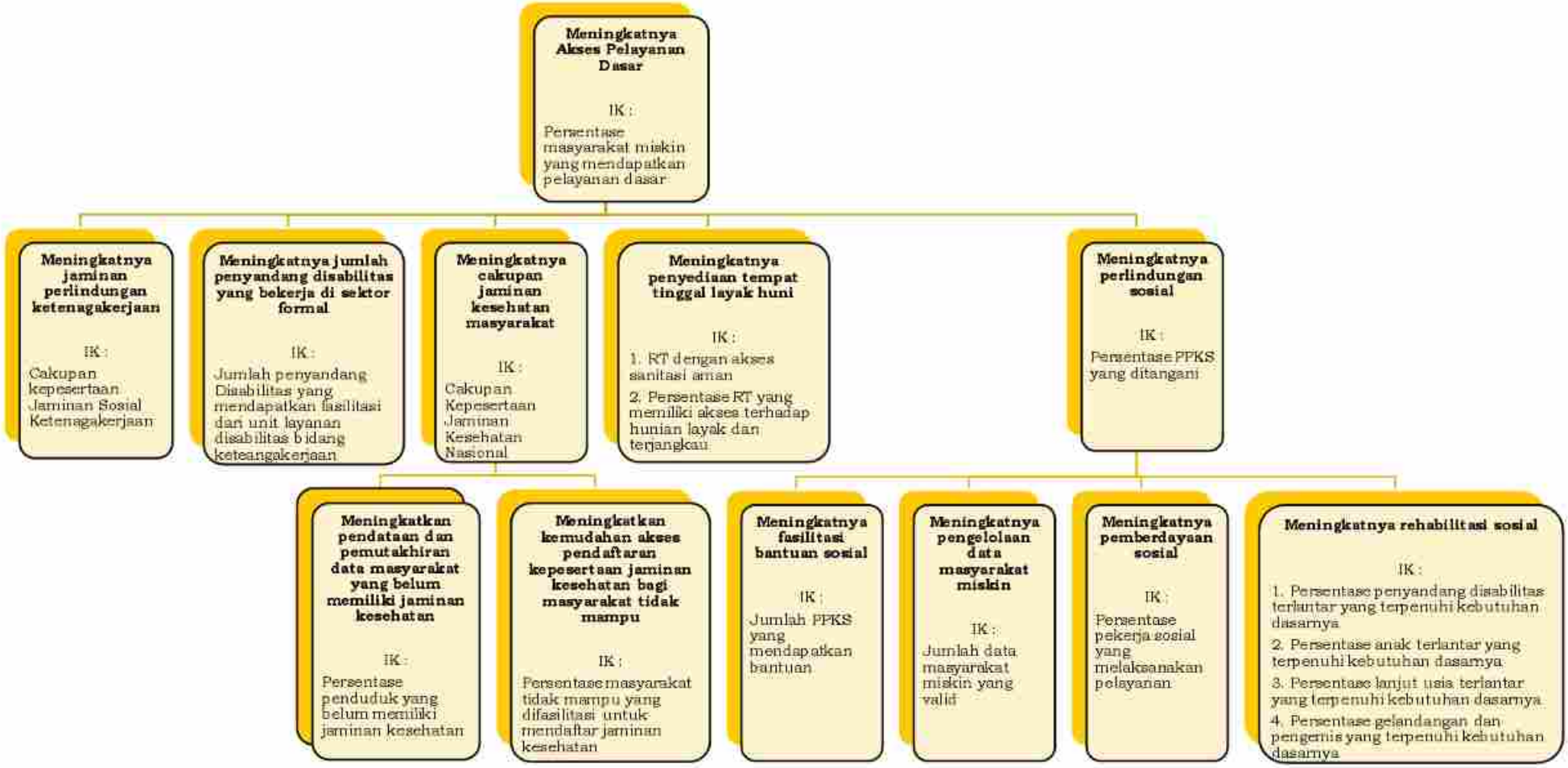
**Bagan L3.3** Pohon Kinerja 1.2 **Meningkatnya Pemerataan Kualitas Pendidikan**



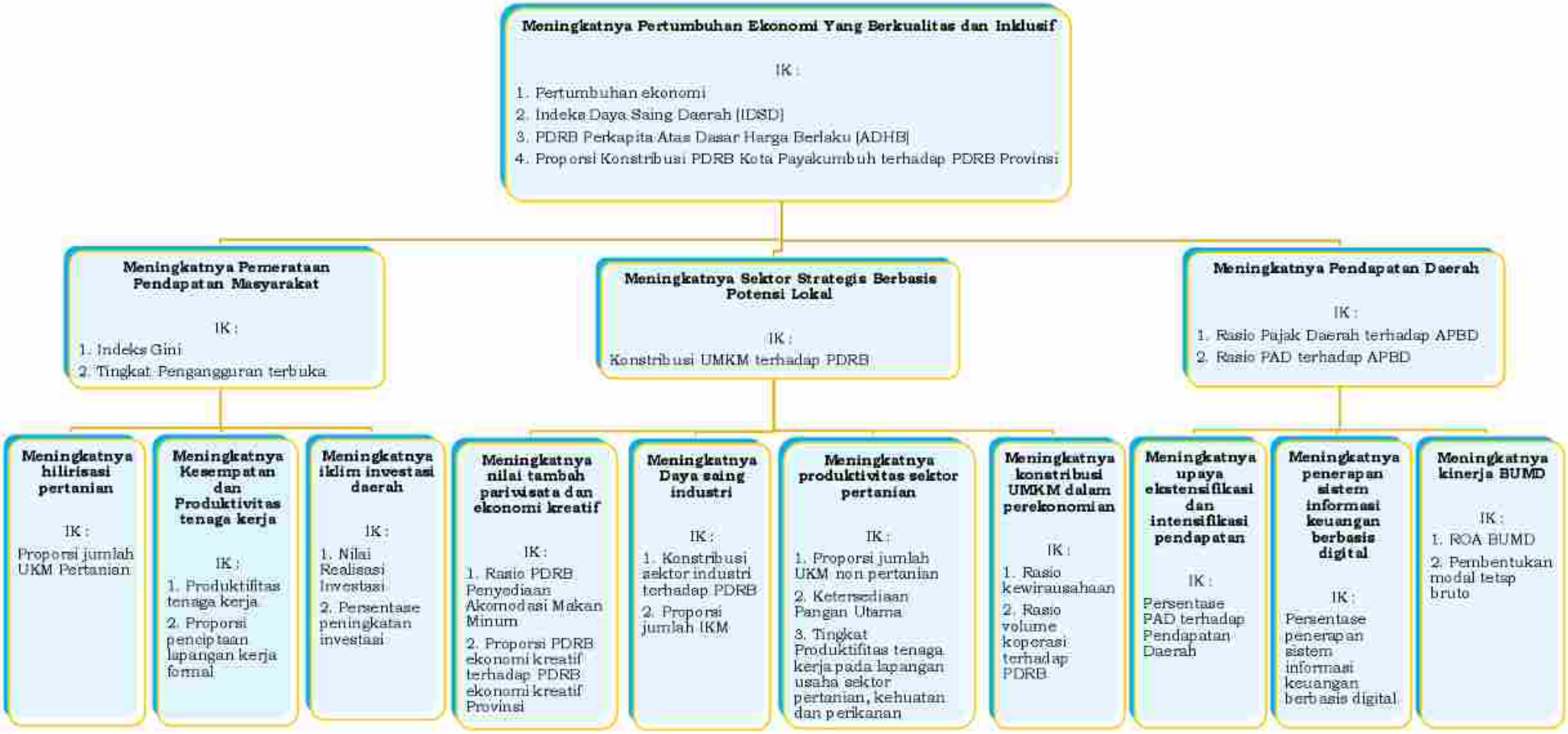
**Bagan L3.4** Pohon Kinerja 1.3 **Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**



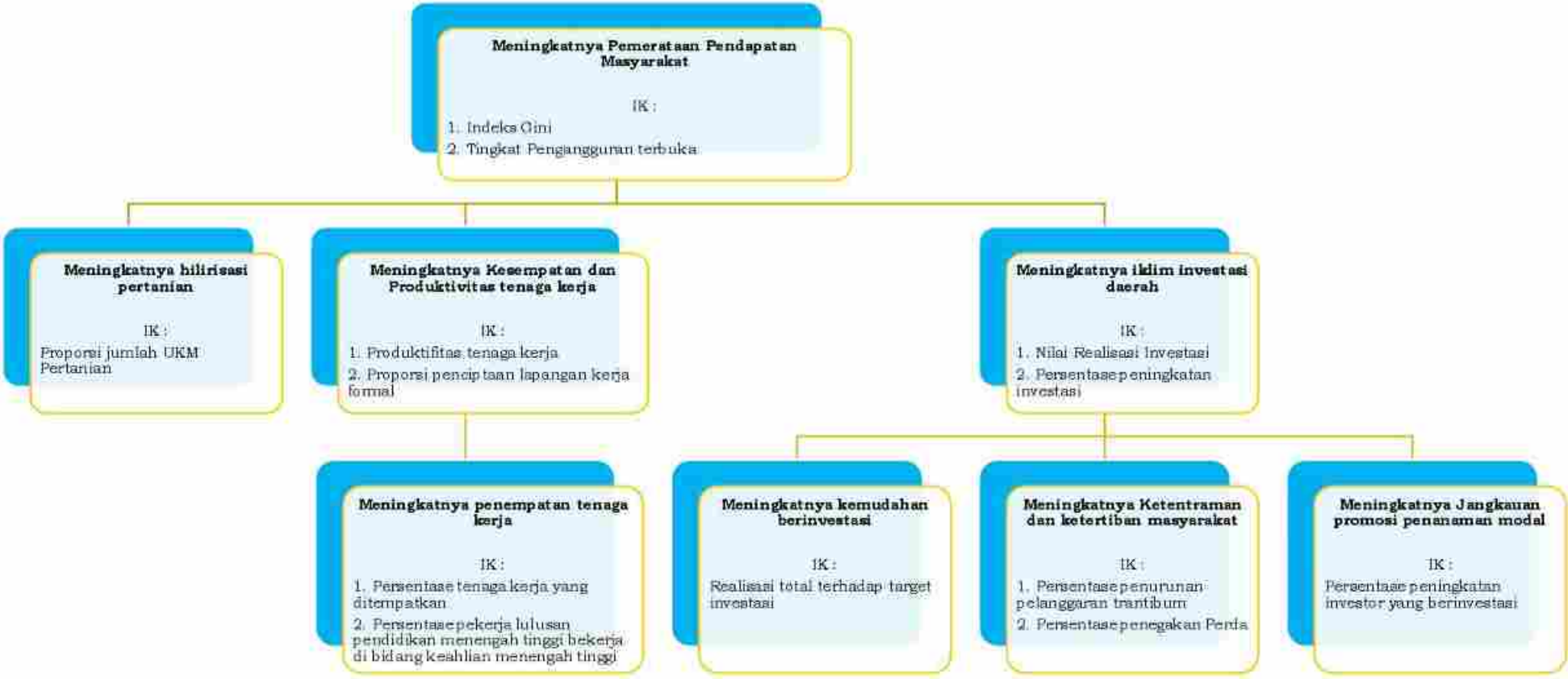
**Bagan L3.5** Pohon Kinerja 1.4 **Meningkatnya Akses Pelayanan Dasar**



**Bagan L3.6** Pohon Kinerja 2 **Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif**



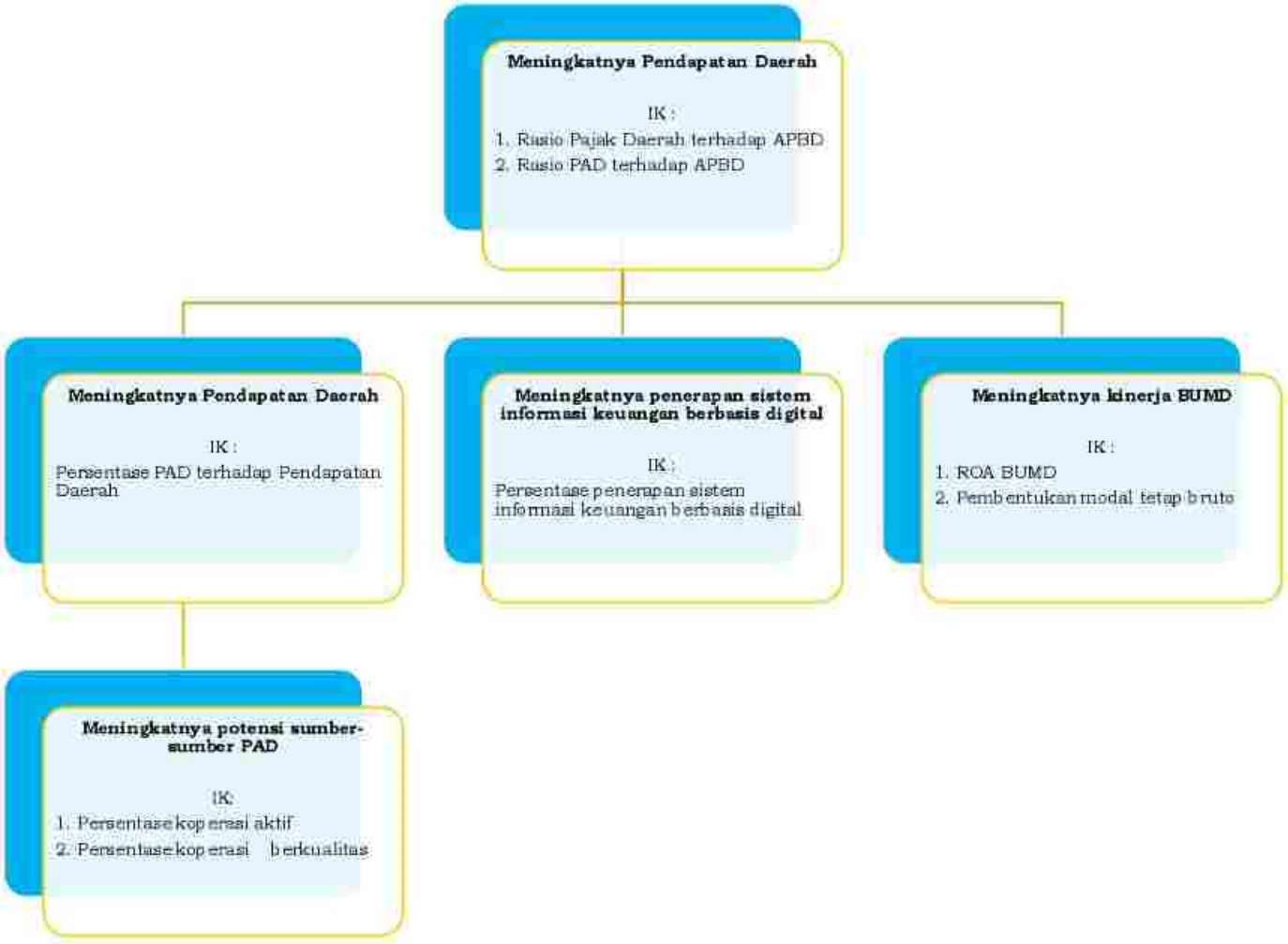
**Bagan L3.7** Pohon Kinerja 2.1 **Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat**



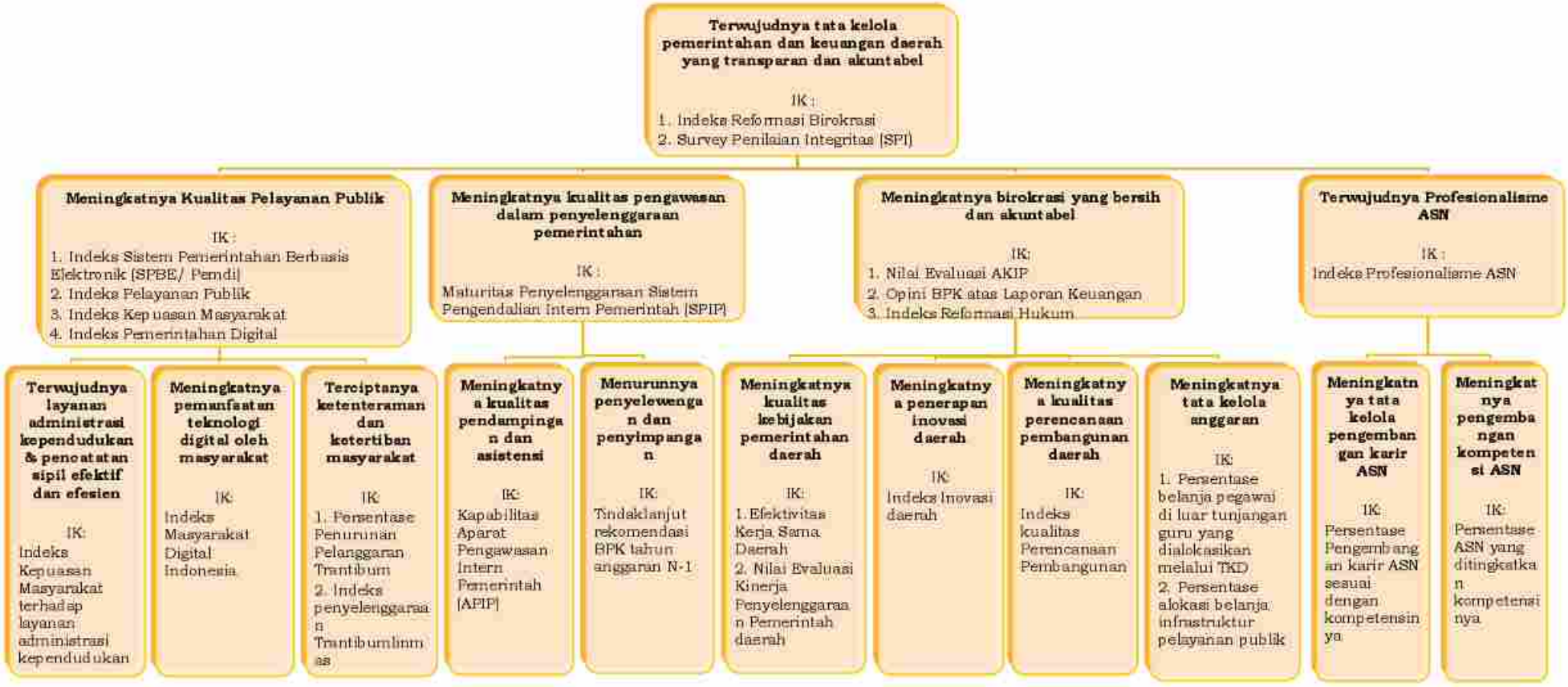
**Bagan L3.8** Pohon Kinerja 2.2 **Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat Meningkatnya Sektor Strategis Berbasis Potensi Lokal**



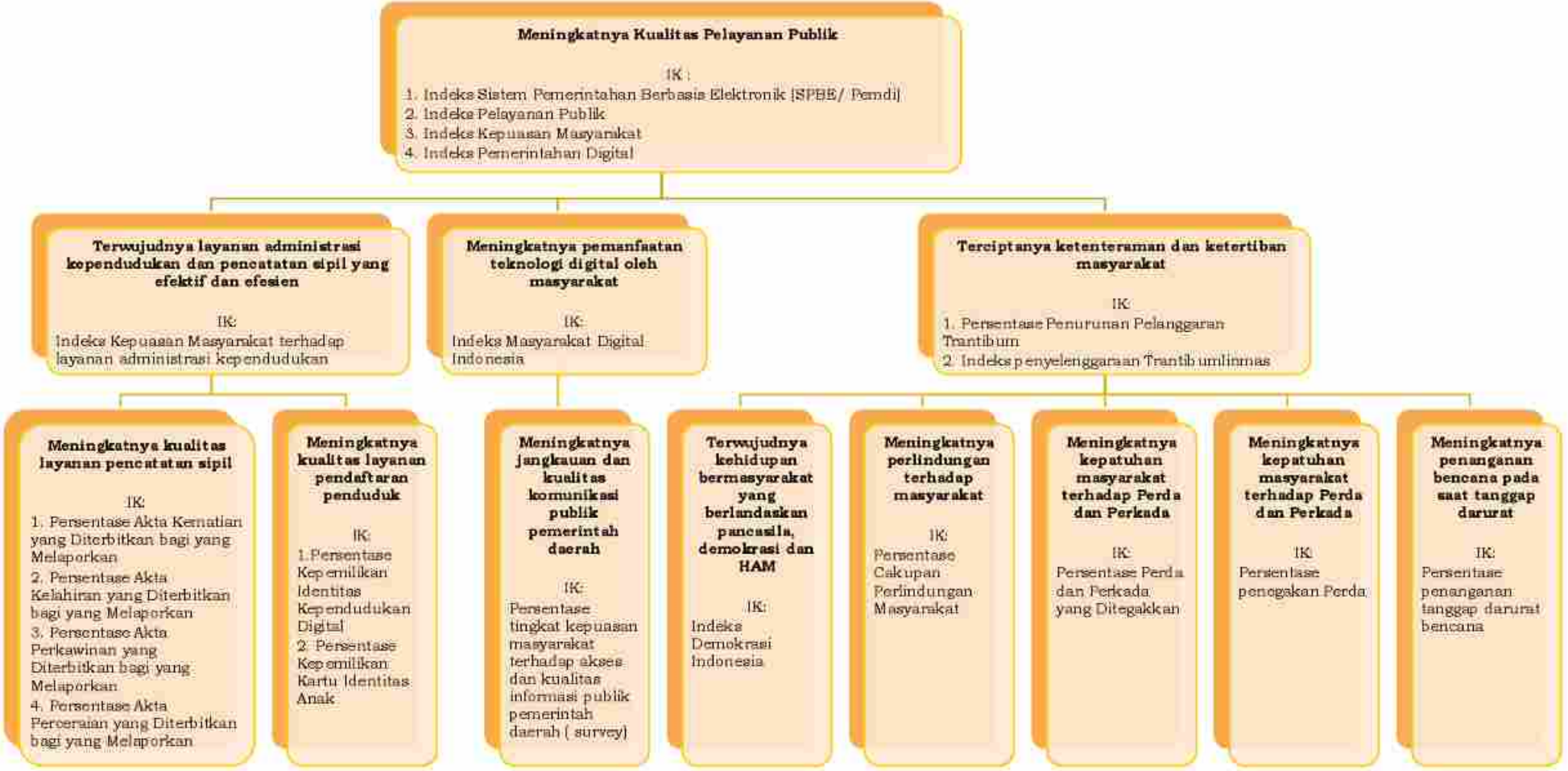
**Bagan L3.9** Pohon Kinerja 2.3 **Meningkatnya Pendapatan Daerah**



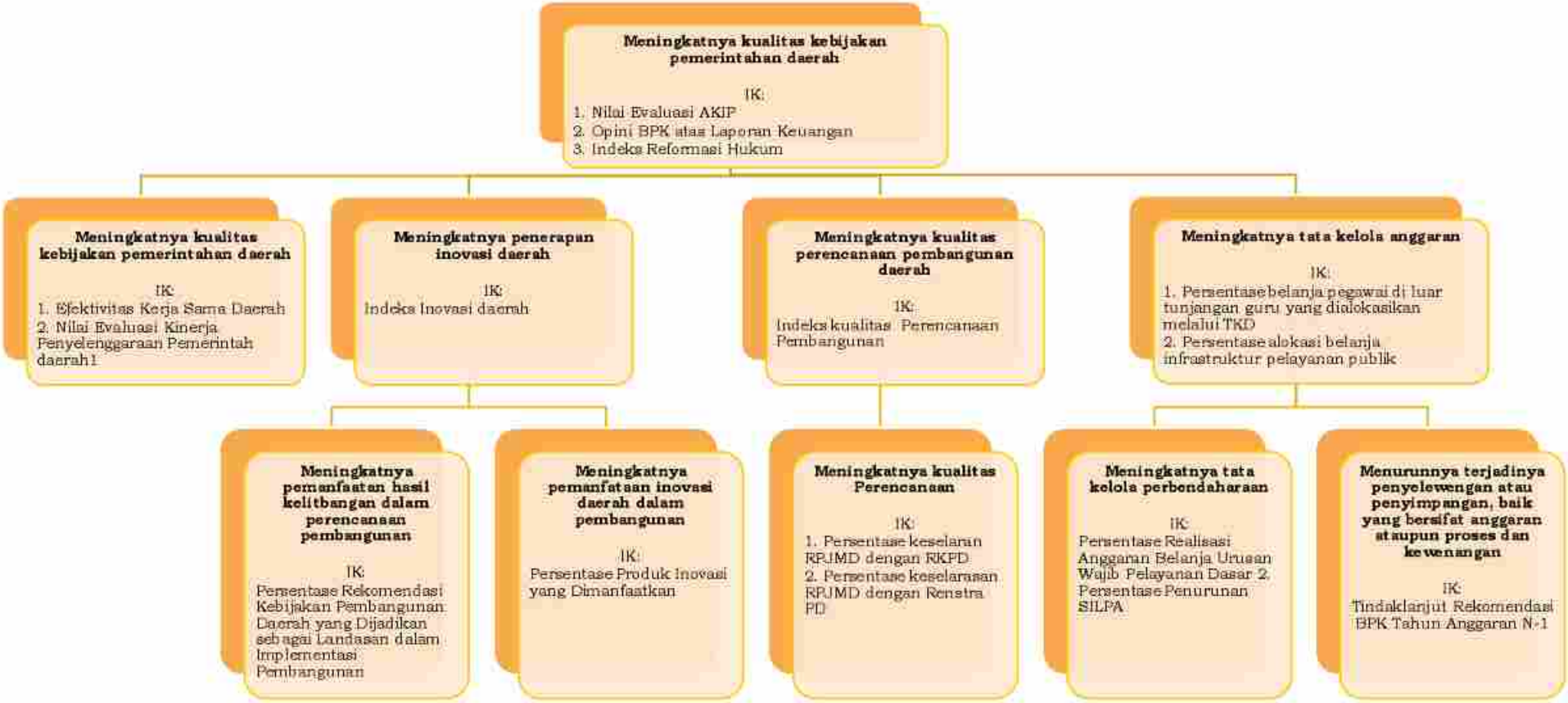
**Bagan L3.10** Pohon Kinerja 3 **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel**



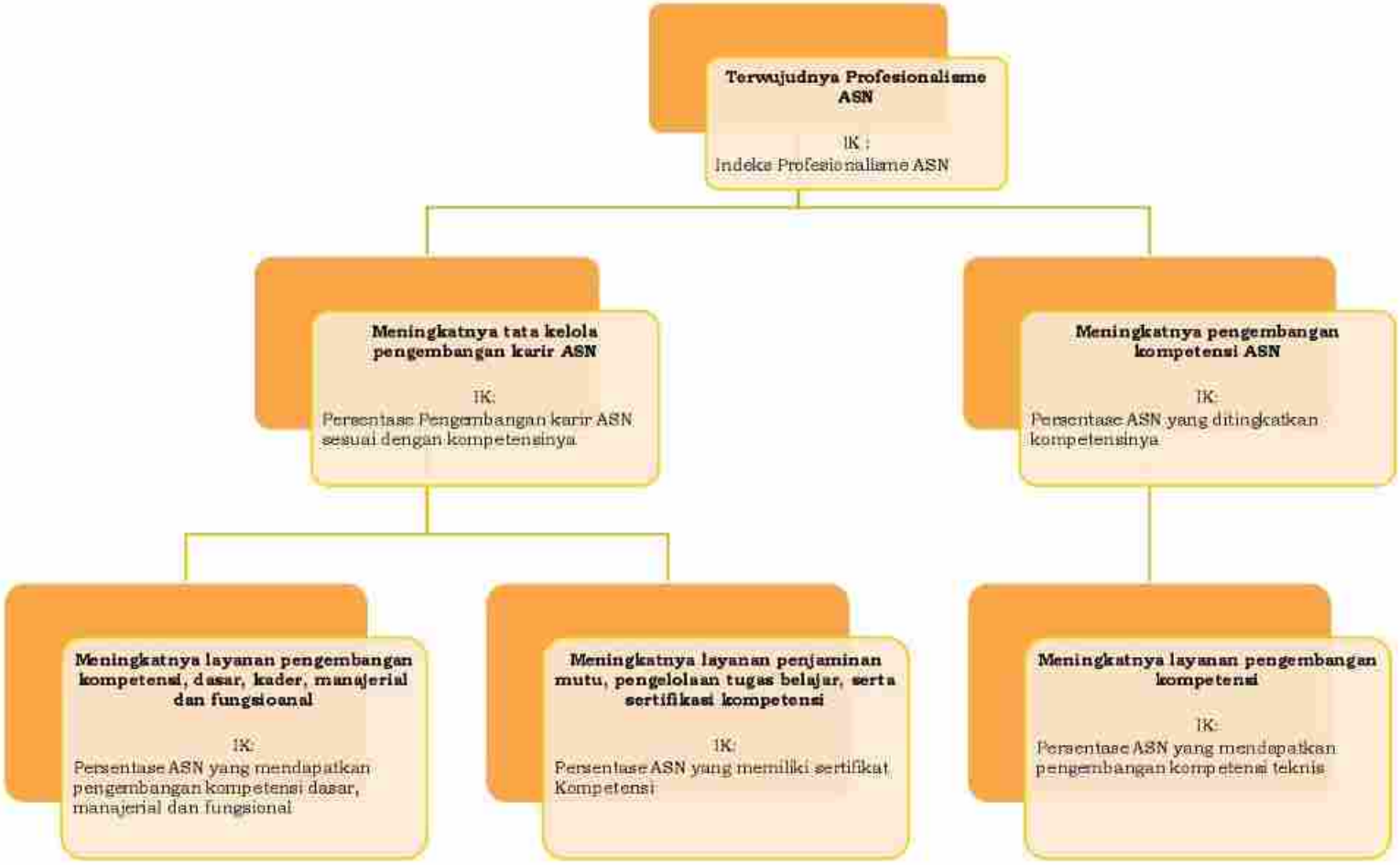
**Bagan L3.11** Pohon Kinerja 3.1 **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**



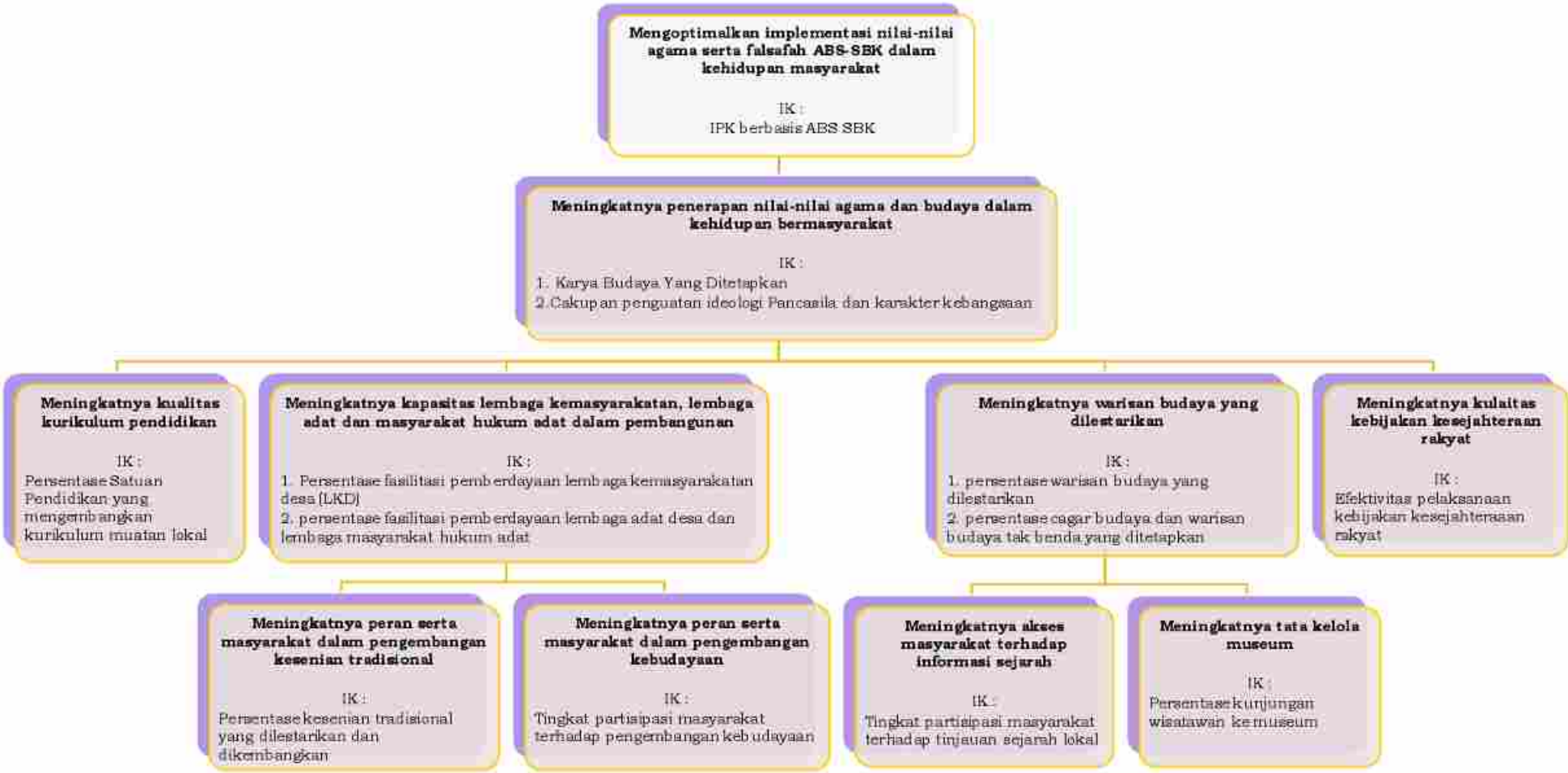
**Bagan L3.12** Pohon Kinerja 3.3 **Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel**



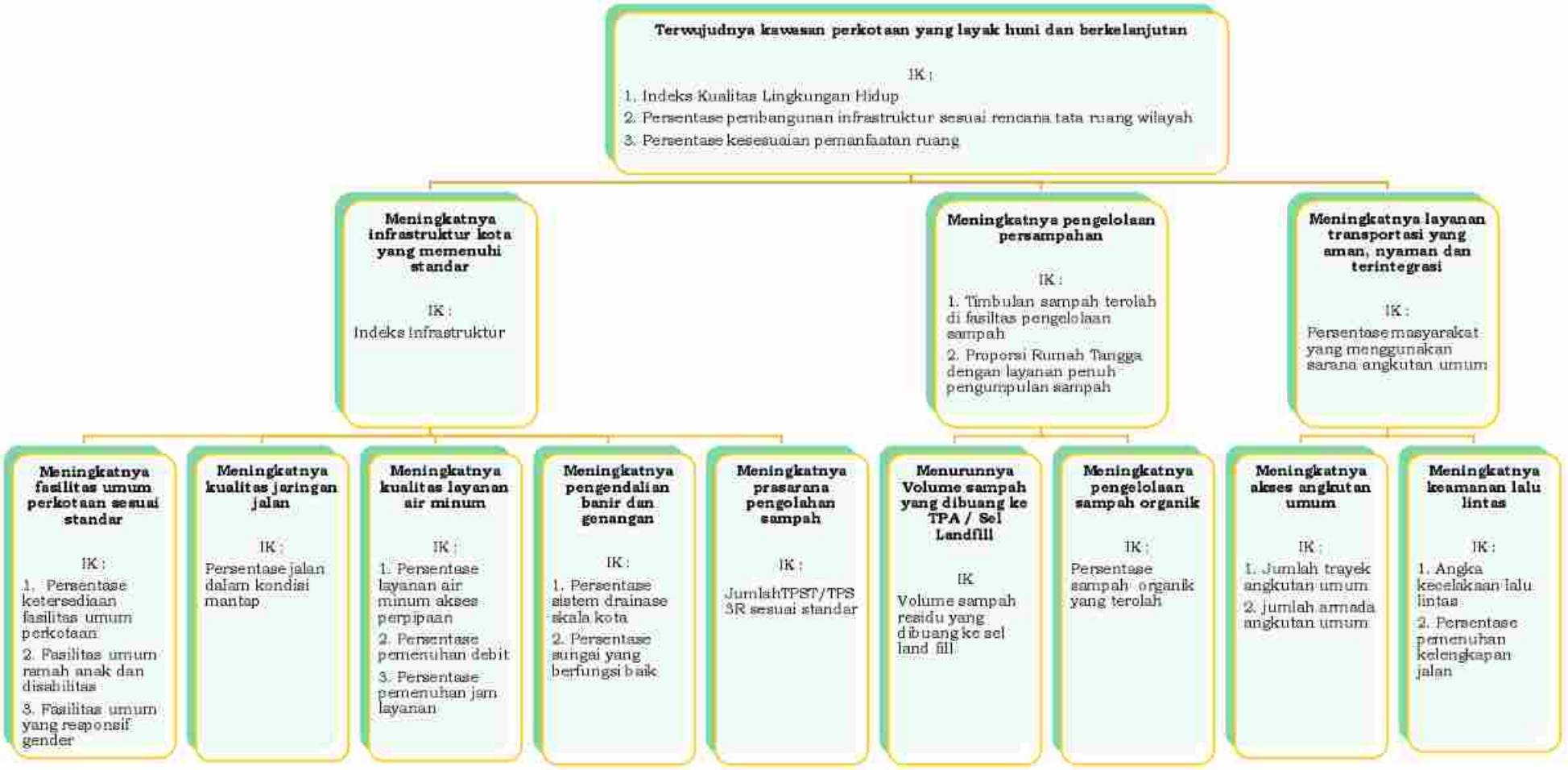
**Bagan L3.13** Pohon Kinerja 3.4 **Terwujudnya Profesionalisme ASN**

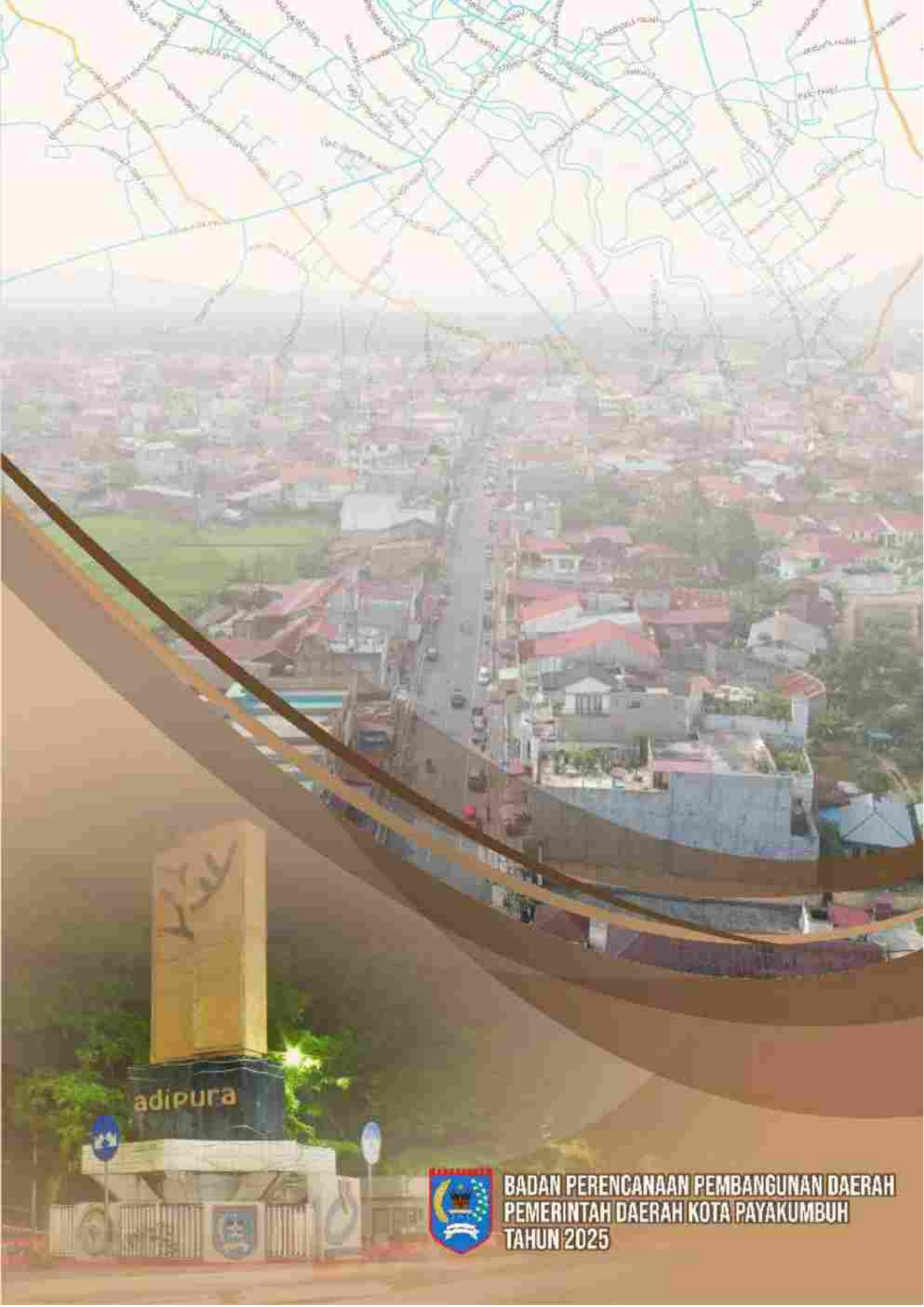


**Bagan L3.14** Pohon Kinerja 4 **Mengoptimalkan Implementasi Nilai-Nilai Agama serta Falsafah ABS-SBK dalam Kehidupan Masyarakat**



**Bagan L3.15** Pohon Kinerja 5 **Terwujudnya Kawasan Perkotaan yang Layak Huni dan Berkelanjutan**






BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2025